



PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 Kabupaten Bandung

BANDUNG
BEDAS!

BANGKIT
EDUKATIF
DINAMIS
AGAMIS
SEJAHTERA





BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih masa bakti 2021-2026, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (6-67/2019);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kabupaten Bandung yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan periode RPJMD Kabupaten Bandung yang masih

- berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa periode RPJMD Kabupaten Bandung;
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Berisi Visi, Misi serta perubahan tujuan dan sasaran;
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Berisi perubahan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bandung;
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Berisi perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang di rumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta perubahan indikator kinerja;
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan perubahan indikator kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- BAB IX : PENUTUP
Memuat kesimpulan;
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

DARCA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT (9/225/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 sesuai periode.

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 67



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbilalamin,

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izin-Nya, pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung melalui Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Bandung.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, penyusunan Buku RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 berjalan dengan baik. Penyusunan RPJMD ini telah melibatkan berbagai pihak dari Perangkat Daerah, masyarakat dan akademisi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih baik.

Soreang, November 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	1-9
1.4.1 Maksud.....	1-9
1.4.2 Tujuan	1-9
1.5 Sistematika Penulisan.....	1-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	2-1
2.1.2 Kondisi Topografi.....	2-2
2.1.3 Kondisi Geologi.....	2-3
2.1.4 Kondisi Hidrologi.....	2-4
2.1.5 Kondisi Klimatologi	2-5
2.1.6 Penggunaan Lahan	2-5
2.1.7 Layanan Kinerja Jasa Ekosistem.....	2-6
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah.....	2-15
2.1.9 Wilayah Rawan Bencana	2-21
2.1.10 Demografi Penduduk.....	2-23
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-31
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-31



2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	2-46
2.3	Aspek Pelayanan Umum	2-51
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	2-51
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.....	2-108
2.3.3	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2-114
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	2-117
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	2-118
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	2-119
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	2-121
2.4.6	Fokus Sumber Daya Manusia.....	2-123
2.5	Kondisi COVID-19 di Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-136
2.5.1	Kondisi Kesehatan.....	2-136
2.5.2	Kondisi Sektor Terdampak Lainnya.....	2-140
2.6	Evaluasi RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021.....	2-145
2.7	Evaluasi Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)...	2-165
2.7.1	Kerangka Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung.....	2-166
2.7.2	Hasil Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung	2-168
2.7.3	Tantangan Pelaksanaan SDGs Kabupaten Bandung	2-170
2.8	Evaluasi Penerapan SPM di Kabupaten Bandung	2-171
BAB 3	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2021).....	3-1
3.1.1	Kinerja pelaksanaan APBD.....	3-1
3.1.2	Neraca Pembiayaan.....	3-9
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020).....	3-13
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	3-18
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah.....	3-20
3.3	Kerangka Pendanaan	3-24
3.3.1	Perhitungan Kerangka Pendanaan	3-30



BAB 4	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	4-1
4.1.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.....	4-3
4.1.2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	4-10
4.1.3	Urusan Pilihan.....	4-26
4.2	Isu Strategis.....	4-31
4.2.1	Telaah Isu Strategis Internasional.....	4-32
4.2.2	Telaah Isu Strategis RPJMN Nasional Tahun 2020-2024.....	4-33
4.2.3	Telaah Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	4-35
4.2.4	Telaah Isu Strategis RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.....	4-37
4.2.5	Telaah Isu Strategis dan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2025.....	4-38
4.2.6	Telaah RPJMD Daerah Sekitar Yang Berbatasan.....	4-48
4.2.8	Telaah Pencapaian Sustainable Development Goals 2021-2026.....	4-52
4.2.9	Telaah Standar Pelayanan Minimal 2021-2026.....	4-54
4.2.10	Telaah Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode Tahun 2021-2026.....	4-57
4.2.11	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	4-60
BAB 5	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1	Visi dan Misi.....	5-1
5.2	Tujuan dan Sasaran.....	5-13
5.3	Prioritas Pembangunan.....	5-25
BAB 6	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	6-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif.....	6-1
6.2	Tema Pembangunan.....	6-13
6.1.1	Konsep Pembangunan Tematik.....	6-29
6.3	Arah Kebijakan Spasial Kabupaten Bandung.....	6-36
6.4	Program Pembangunan Daerah.....	6-45
6.5	Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Berbasis Tematik (Bandung Bedas Manunggal).....	6-101
6.6	Penguatan Sistem Inovasi Daerah.....	6-134



BAB 7	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	7-1
7.1	Skema Pendanaan Alternatif.....	7-1
7.2	Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah.....	7-5
BAB 8	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	8-1
BAB 9	PENUTUP	9-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan	2-2
Tabel 2-2	Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2011.....	2-6
Tabel 2-3	Proyeksi Kebutuhan Air dan Tingkat Ketersediaan Air	2-10
Tabel 2-4	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	2-10
Tabel 2-5	Luas Panen Padi dan Produksi Gabah (Kg).....	2-11
Tabel 2-6	Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1)	2-14
Tabel 2-7	Lahan Sawah Kabupaten Bandung	2-16
Tabel 2-8	Lahan Kering Pertanian Kabupaten Bandung	2-16
Tabel 2-9	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	2-30
Tabel 2-10	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-31
Tabel 2-11	Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020	2-31
Tabel 2-12	Nilai Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020	2-35
Tabel 2-13	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku	2-36
Tabel 2-14	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-37
Tabel 2-15	Rata-Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-39
Tabel 2-16	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-40
Tabel 2-17	Indikator Kemiskinan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020	2-41
Tabel 2-18	Gini Ratio Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-45
Tabel 2-19	IPM Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020	2-47
Tabel 2-20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-53
Tabel 2-21	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-57
Tabel 2-22	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-58
Tabel 2-23	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-58
Tabel 2-24	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-59



Tabel 2-25	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Dinas Kesehatan & Puskesmas Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	2-60
Tabel 2-26	Persentase Balita Gizi Baik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-60
Tabel 2-27	Situasi di Lokus Prioritas Berdasarkan Indikator Dalam Intervensi Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	2-61
Tabel 2-28	Identifikasi Kendala Penanganan Stunting Di Kabupaten Bandung	2-62
Tabel 2-29	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020	2-63
Tabel 2-30	Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020.....	2-64
Tabel 2-31	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-65
Tabel 2-32	Luas Areal Irigasi Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-65
Tabel 2-33	Kondisi DAS Citarum	2-66
Tabel 2-34	Kondisi Sub Das Citarum di Kabupaten Bandung.....	2-66
Tabel 2-35	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-67
Tabel 2-36	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung.....	2-68
Tabel 2-37	Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-68
Tabel 2-38	Persentase Permukiman Layak Huni dan Jumlah RT Yang Menempati Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-69
Tabel 2-39	Cakupan Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Sumber Pembangunannya di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2020.....	2-70
Tabel 2-40	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-70
Tabel 2-41	Kemajuan Cakupan Layanan Sanitasi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-71
Tabel 2-42	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-71
Tabel 2-43	Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-72
Tabel 2-44	Jenis Objek yang Terbakar.....	2-72
Tabel 2-45	Rekapitulasi Penyebab Kebakaran	2-72
Tabel 2-46	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-73
Tabel 2-47	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-73
Tabel 2-48	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-73
Tabel 2-49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-74
Tabel 2-50	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 ..	2-75



Tabel 2-51	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-76
Tabel 2-52	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020	2-76
Tabel 2-53	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020	2-78
Tabel 2-54	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020	2-78
Tabel 2-55	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Berdasarkan Kelompok Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2-56	Angka Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2-57	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2-58	Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2020	2-82
Tabel 2-59	Kategori Penilaian IKLH	2-83
Tabel 2-60	Peringkat PROPER Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-84
Tabel 2-61	Peringkat PROPERDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-84
Tabel 2-62	Peringkat PROPERKAB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-84
Tabel 2-63	Rekapitulasi Jumlah Sekolah Adiwiyata, Desa/Kelurahan Kampung Bedas, dan Lokasi Proklamasi	2-89
Tabel 2-64	Jumlah Kumulatif Per Tahun Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	2-91
Tabel 2-65	Persentase Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-92
Tabel 2-66	Persentase Volume Sampah yang berkurang di Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020	2-94
Tabel 2-67	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-95
Tabel 2-68	Rasio Tempat Pengelolaan Sampah 3R Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-95
Tabel 2-69	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-96
Tabel 2-70	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-97
Tabel 2-71	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-97
Tabel 2-72	Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-97
Tabel 2-73	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-98
Tabel 2-74	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-98
Tabel 2-75	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-99
Tabel 2-76	Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-99



Tabel 2-77	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-100
Tabel 2-78	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-101
Tabel 2-79	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-101
Tabel 2-80	Jumlah Pelaku UKM di Kabupaten Bandung Tahun per Jenis Usaha Tahun 2020	2-102
Tabel 2-81	Jumlah Volume Koperasi dan Omzet Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020	2-103
Tabel 2-82	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2016-2020	2-103
Tabel 2-83	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-104
Tabel 2-84	Ketersediaan Dokumen Statistik Tahun 2016-2020.....	2-104
Tabel 2-85	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-105
Tabel 2-86	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-106
Tabel 2-87	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-107
Tabel 2-88	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-107
Tabel 2-89	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2016-2020	2-108
Tabel 2-90	Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-108
Tabel 2-91	Indikator Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-108
Tabel 2-92	Indikator Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-109
Tabel 2-93	Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-110
Tabel 2-94	Indikator Peternakan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-111
Tabel 2-95	Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-112
Tabel 2-96	Indikator Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-113
Tabel 2-97	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-114
Tabel 2-98	Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-114
Tabel 2-99	Capaian Opini BPK Untuk Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-117
Tabel 2-100	Gambaran Kinerja Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung	2-118
Tabel 2-101	Level of Service (LOS) Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-119
Tabel 2-102	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-121
Tabel 2-103	Data Perkembangan Jenis Izin dan Jumlah Izin yang Terbit Tahun 2016-2020.....	2-121
Tabel 2-104	Jumlah dan Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	2-122



Tabel 2-105	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-123
Tabel 2-106	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 ...	2-124
Tabel 2-107	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-124
Tabel 2-108	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-125
Tabel 2-109	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-126
Tabel 2-110	Rekapitulasi Kasus COVID-19 Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat Dan Kabupaten Bandung	2-136
Tabel 2-111	Progres Vaksinasi COVID-19 Nasional, Provinsi Jawa Barat, Dan Kabupaten Bandung	2-137
Tabel 2-112	Data Perusahaan yang Terkena Dampak Covid-19	2-144
Tabel 2-113	Capaian Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.....	2-146
Tabel 2-114	Capaian Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021	2-146
Tabel 2-115	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021	2-148
Tabel 2-116	Gap Capaian Pembangunan Terhadap Arah Kebijakan Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025	2-154
Tabel 2-117	Permasalahan dan Rekomendasi Tiap Urusan RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016-2021	2-160
Tabel 2-118	Indikator Prioritas dalam Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung.....	2-167
Tabel 2-119	Rekapitulasi Capaian SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	2-172
Tabel 2-120	Predikat Capaian SPM Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis Urusan Tahun 2020 dengan Predikat Rendah dan Sangat Rendah.....	2-177
Tabel 3-1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	3-3
Tabel 3-2	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	3-6
Tabel 3-3	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.....	3-8
Tabel 3-4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung	3-10
Tabel 3-5	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bandung 2016-2019.....	3-19
Tabel 3-6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bandung	3-20
Tabel 3-7	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	3-21
Tabel 3-8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	3-22
Tabel 3-9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2019.....	3-23
Tabel 3-10	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	3-25
Tabel 3-11	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat.....	3-28
Tabel 3-12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	3-29



Tabel 4-1	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pendidikan.....	4-3
Tabel 4-2	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kesehatan	4-4
Tabel 4-3	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4-6
Tabel 4-4	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4-7
Tabel 4-5	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.....	4-8
Tabel 4-6	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Sosial.....	4-9
Tabel 4-7	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja.....	4-10
Tabel 4-8	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ..	4-10
Tabel 4-9	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pangan	4-11
Tabel 4-10	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pertanahan.....	4-13
Tabel 4-11	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup	4-14
Tabel 4-12	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	4-15
Tabel 4-13	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4-17
Tabel 4-14	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	4-18
Tabel 4-15	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perhubungan.....	4-18
Tabel 4-16	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Komunikasi Dan Informatika	4-19
Tabel 4-17	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4-20
Tabel 4-18	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Penanaman Modal.....	4-22
Tabel 4-19	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.....	4-22
Tabel 4-20	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Statistik	4-24
Tabel 4-21	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Persandian	4-25
Tabel 4-22	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kebudayaan	4-25
Tabel 4-23	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perpustakaan	4-26
Tabel 4-24	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kearsipan	4-26
Tabel 4-25	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kelautan Dan Perikanan.....	4-26
Tabel 4-26	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pariwisata	4-27
Tabel 4-27	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pertanian	4-27
Tabel 4-28	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	4-29
Tabel 4-29	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perdagangan.....	4-29
Tabel 4-30	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perindustrian	4-30



Tabel 4-31	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Transmigrasi	4-31
Tabel 4-32	Isu Strategis Nasional RPJMN Tahun 2020-2024.....	4-33
Tabel 4-33	Rekomendasi terhadap TPB 3. Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	4-39
Tabel 4-34	Rekomendasi terhadap TPB 2 Menghilangkan Kelaparan	4-40
Tabel 4-35	Rekomendasi terhadap TPB 6. Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan	4-42
Tabel 4-36	Rekomendasi terhadap TPB 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan	4-43
Tabel 4-37	Rekomendasi terhadap TPB 15. Melindungi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan.....	4-44
Tabel 4-38	Rekomendasi terhadap TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4-45
Tabel 4-39	Rekomendasi terhadap TPB 4. Menjamin Kehidupan Pendidikan yang Inklusif dan Merata.....	4-46
Tabel 4-40	Rekomendasi terhadap TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.	4-47
Tabel 4-41	Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Berbatasan	4-48
Tabel 4-42	Kata Kunci Indikator untuk Setiap Pilar SDGs Prioritas Kabupaten Bandung.....	4-53
Tabel 4-43	Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	4-69
Tabel 4-44	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	4-69
Tabel 4-45	Keterkaitan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	4-70
Tabel 4-46	Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	4-71
Tabel 5-1	Visi RPJPD, RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat	5-1
Tabel 5-2	Arahan Kebijakan RPJPD, RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.....	5-2
Tabel 5-3	Visi, Misi RPJP Kabupaten Bandung, RPJM Provinsi dan RPJMN	5-11
Tabel 5-4	Integrasi Misi RPJMD, Misi RPJM Provinsi Jawa Barat dan Agenda Pembangunan RPJMN	5-11
Tabel 5-5	Keterkaitan antara Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Isu Strategis RPJMD	5-12
Tabel 5-6	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	5-15
Tabel 5-7	Perbandingan Indikator Makro Kabupaten Bandung Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	5-16



Tabel 5-8	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung	5-22
Tabel 5-9	Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung.....	5-29
Tabel 5-10	Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	5-29
Tabel 5-11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikatornya	5-31
Tabel 6-1	Visi, Misi, Sasaran, Strategi,dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	6-4
Tabel 6-2	Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	6-10
Tabel 6-3	Arahan Kebijakan dalam Rentang Tahun Perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026.....	6-16
Tabel 6-4	Arahan Kebijakan Pada Setiap Tahun Perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026.....	6-19
Tabel 6-5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1	6-23
Tabel 6-6	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2.....	6-25
Tabel 6-7	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3.....	6-26
Tabel 6-8	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4.....	6-27
Tabel 6-9	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5.....	6-28
Tabel 6-10	Alokasi Luas Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten.....	6-40
Tabel 6-11	Alokasi Luas Kawasan Budidaya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung	6-40
Tabel 6-12	Rencana Pola Ruang Kawasan KSTB.....	6-43
Tabel 6-13	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	6-47
Tabel 6-14	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026....	6-54
Tabel 6-15	Pemetaan Konsep Pembangunan Tematik Bandung Bedas Manunggal.....	6-105
Tabel 6-16	Ringkasan Tolak Ukur Keberhasilan Konsep Pembangunan Tematik Bandung Bedas Manunggal	6-123
Tabel 7-1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema KPBU.....	7-3
Tabel 7-2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Bandung	7-6
Tabel 7 3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	7-7
Tabel 8-1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026.....	8-2
Tabel 8-2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	8-4
Tabel 8-3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.....	8-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1-3
Gambar 1-2	Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1-8
Gambar 2-1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung	2-3
Gambar 2-2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung	2-4
Gambar 2-3	Peta Topografi Kabupaten Bandung.....	2-5
Gambar 2-4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung.....	2-8
Gambar 2-5	Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung	2-8
Gambar 2-6	Klasifikasi Jasa Ekosistem (%) di Kabupaten Bandung	2-12
Gambar 2-7	Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bandung.....	2-13
Gambar 2-8	Peta Daya Dukung Pangan Berdasarkan Status Daya Dukung Kecamatan di Kabupaten Bandung....	2-14
Gambar 2-9	Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	2-14
Gambar 2-10	Grafik Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	2-15
Gambar 2-11	Peta Jasa Penyedia Pangan (P1).....	2-16
Gambar 2-12	Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2019	2-20
Gambar 2-13	Kerangka Pemikiran Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	2-21
Gambar 2-14	Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Bandung	2-22
Gambar 2-15	Peta Kawasan Risiko Gunung Berapi di Kabupaten Bandung	2-23
Gambar 2-16	Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung.....	2-24
Gambar 2-17	Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Bandung.....	2-25
Gambar 2-18	Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-25
Gambar 2-19	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020	2-26
Gambar 2-20	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-27
Gambar 2-21	Komposisi Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2020 Hasil Survei Penduduk 2020	2-28
Gambar 2-22	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-29
Gambar 2-23	Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung	2-29
Gambar 2-24	Grafik Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020	2-33
Gambar 2-25	Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	2-33



Gambar 2-26 Analisis Quadran Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dengan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	2-34
Gambar 2-27 Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-38
Gambar 2-28 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	2-40
Gambar 2-29 Grafik Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-41
Gambar 2-30 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-42
Gambar 2-31 Analisis Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	2-43
Gambar 2-32 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	2-43
Gambar 2-33 Grafik Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	2-43
Gambar 2-34 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-44
Gambar 2-35 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2-44
Gambar 2-36 Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-45
Gambar 2-37 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	2-46
Gambar 2-38 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2-47
Gambar 2-39 Analisis Kuadran Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 dan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020.....	2-48
Gambar 2-40 Grafik Capaian Komponen IPM Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-48
Gambar 2-41 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-49
Gambar 2-42 Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	2-50
Gambar 2-43 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-50
Gambar 2-44 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	2-51
Gambar 2-45 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-52
Gambar 2-46 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	2-52
Gambar 2-47 Grafik Perkembangan Purchasing Power Parity Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-54
Gambar 2-48 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Jenjang SD/Sederajat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-54



Gambar 2-49	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-54
Gambar 2-50	Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SD/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-55
Gambar 2-51	Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SMP/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-56
Gambar 2-52	Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SD/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-56
Gambar 2-53	Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SMP/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-56
Gambar 2-54	Grafik Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-58
Gambar 2-55	Grafik Perkembangan Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020.....	2-63
Gambar 2-56	Grafik Perkembangan Jumlah Jembatan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-64
Gambar 2-57	Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-75
Gambar 2-58	Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-76
Gambar 2-59	Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020	2-77
Gambar 2-60	Grafik Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2020 ..	2-78
Gambar 2-61	Grafik Jumlah Kumulatif Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah/Tahun pada Tahun 2016-2020	2-91
Gambar 2-62	Grafik Jumlah Pelaku UKM di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020	2-102
Gambar 2-63	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-115
Gambar 2-64	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....	2-116
Gambar 2-65	Capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-116
Gambar 2-66	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-116
Gambar 2-67	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-171
Gambar 2-68	Grafik Perkembangan Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-120
Gambar 2-69	Grafik Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020....	2-120
Gambar 2-70	Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Per Kecamatan	2-138
Gambar 2-71	Tingkat Kematian COVID-19 Per Kecamatan	2-139



Gambar 2-72	Peta Zona Risiko COVID-19 Per Desa Di Kabupaten Bandung	2-140
Gambar 2-73	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	2-141
Gambar 2-74	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Per Triwulan Di Tahun 2020	2-141
Gambar 2-75	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah).....	2-141
Gambar 2-76	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020	2-142
Gambar 2-77	Perkembangan Jumlah Wisatawan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 (Jiwa).....	2-143
Gambar 2-78	Data UMKM Terdampak COVID-19 Berdasarkan Bidang Usaha	2-144
Gambar 2-79	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	2-166
Gambar 2-80	Tinjauan Umum Hasil Capaian SDGs Kabupaten Bandung	2-168
Gambar 2-81	Predikat Capaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-176
Gambar 2-82	Predikat Capaian SPM Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis Urusan Tahun 2020	2-177
Gambar 3-1	Rata-rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020.....	3-5
Gambar 3-2	Kerangka Analisis Proyeksi Keuangan Daerah Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.	3-24
Gambar 4-1	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.....	4-2
Gambar 4-2	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan Masalahan Utama ...	4-2
Gambar 4-3	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.....	4-35
Gambar 4-4	Diagram Alir dalam Proses Perumusan Isu Startegis.....	4-60
Gambar 4-5	Kerangka Isu Strategis 1	4-62
Gambar 4-6	Kerangka Isu Strategis 2	4-63
Gambar 4-7	Kerangka Isu Strategis 3	4-64
Gambar 4-8	Kerangka Isu Strategis 4	4-66
Gambar 4-9	Kerangka Isu Strategis 5	4-67
Gambar 4-10	Kerangka Isu Strategis 6	4-68
Gambar 4-11	Hasil Pembobotan Isu Stragis Kabupaten Bandung.....	4-72
Gambar 5-1	Integrasi Perencanaan Misi 1.....	5-6
Gambar 5-2	Integrasi Perencanaan Misi 2	5-6
Gambar 5-3	Integrasi Perencanaan Misi 3	5-7
Gambar 5-4	Klasifikasi Pangauban	5-7
Gambar 5-5	Lemah Mala	5-8
Gambar 5-6	Aspek Arsitektur Wastu Citra	5-8



Gambar 5-7 Konsep Pariwisata Berbasis Lingkungan	5-9
Gambar 5-8 Integrasi Perencanaan Misi 4	5-10
Gambar 5-9 Integrasi Perencanaan Misi 5	5-10
Gambar 5-10 Keterkaitan Prioritas dalam Pencapaian Visi	5-13
Gambar 5-11 Kerangka Berpikir Logis Misi 1	5-17
Gambar 5-12 Kerangka Berpikir Logis Misi 2	5-18
Gambar 5-13 Kerangka Berpikir Logis Misi 3	5-19
Gambar 5-14 Kerangka Berpikir Logis Misi 4	5-20
Gambar 5-15 Kerangka Berpikir Logis Misi 5	5-21
Gambar 5-16 Diagram Alir dalam Proses Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah	5-25
Gambar 5-17 Grafik Hasil Kuesioner terhadap Tingkat Urgensi Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2026 Menurut Persepsi Stakeholder.....	5-26
Gambar 6-1 Posisi RPJMD Tahun 2021-2026 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD	6-2
Gambar 6-2 Pemetaan SWOT Analysis Kabupaten Bandung.....	6-3
Gambar 6-3 Tema Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Bandung	6-13
Gambar 6-4 Rincian Alternatif Mekanisme Penyaluran APBD Kabupaten Bandung.....	6-36
Gambar 6-5 Ilustrasi Rencana Pengembangan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB)	6-44
Gambar 6-6 Ilustrasi Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar (KTPT)	6-45
Gambar 6-7 Konsep Kebijakan Bandung Bedas Manunggal.....	6-104
Gambar 6-8 Tolak Ukur Keberhasilan Fokus Semangat Pembangunan BEDAS	6-119
Gambar 6-9 Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Berdaya	6-120
Gambar 6-10 Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Rancage	6-120
Gambar 6-11 Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Net 4.0	6-121
Gambar 6-12 Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Lestari	6-122
Gambar 7-1 Diagram Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Pendanaan Alternatif	7-2



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah dibagi ke dalam tiga *time frame* perencanaan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 (lima) tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Bandung melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode 2021-2026 dan berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 18/Pl.02.7-Kpt/3204/Kab/lii/2021 tanggal 20 Maret 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pasangan H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si. dan H. Sahrul Gunawan, SE. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si. dan H. Sahrul Gunawan, SE. sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 26 April 2021 oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ridwan Kamil, ST., M.U.D.

Berdasarkan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Selain itu RPJMD sebagai pedoman bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yaitu suatu dokumen Perencanaan yang



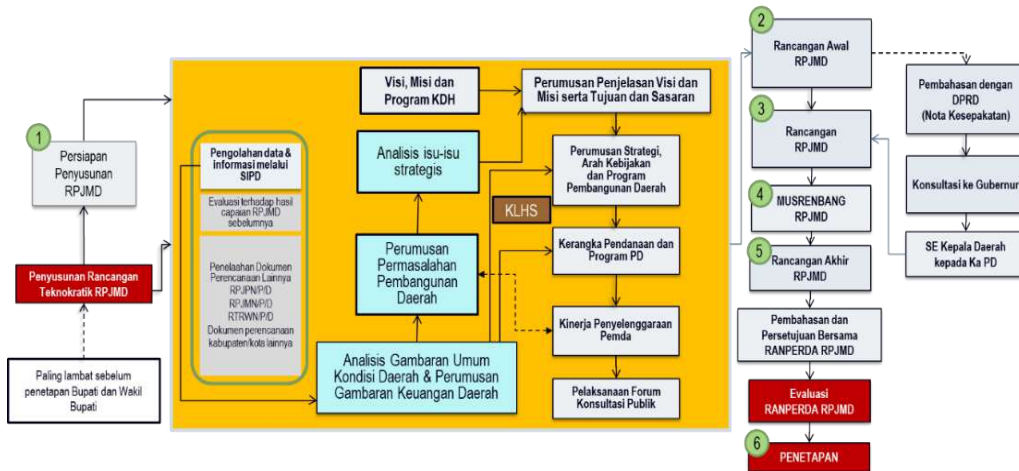
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai lanjutan dari rencana pembangunan sebelumnya yaitu RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 ini akan berisikan visi, misi, dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka menyinergikan rencana jangka menengah dengan rencana pembangunan jangka panjang serta mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung khususnya setelah pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berkonsep *good governance* dan *dynamic government*. Adapun RPJMD ini juga berupaya mengakselerasi pengarusutamaan konsepsi *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat kabupaten selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Nasional.

RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan Rancangan Awal, pembahasan dan penyepakatan bersama dengan DPRD Tentang Rancangan Awal, Konsultasi ke Gubernur Tentang Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir, pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda RPJMD, evaluasi Ranperda RPJMD dan penetapan. Alur tahapan pelaksanaan penyusunan RPJMD digambarkan pada **Gambar 1-1**.



Gambar 1-1
Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026, beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- i. Landasan Idiil Pancasila
- ii. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6
- iii. Landasan Operasional, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 - i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- w. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- x. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- y. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- z. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
- aa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- jj. Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- kk. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 604/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- ll. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor. 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
- nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
- uu. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan



Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (2/1/2020))

- vv. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 67);
- ww. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 28);
- xx. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 30);
- yy. Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pengajaran Pendidikan Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 78).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Bandung.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap Keempat dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 melalui penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

D. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselenggarakan dengan program pembangunan daerah



yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPd.

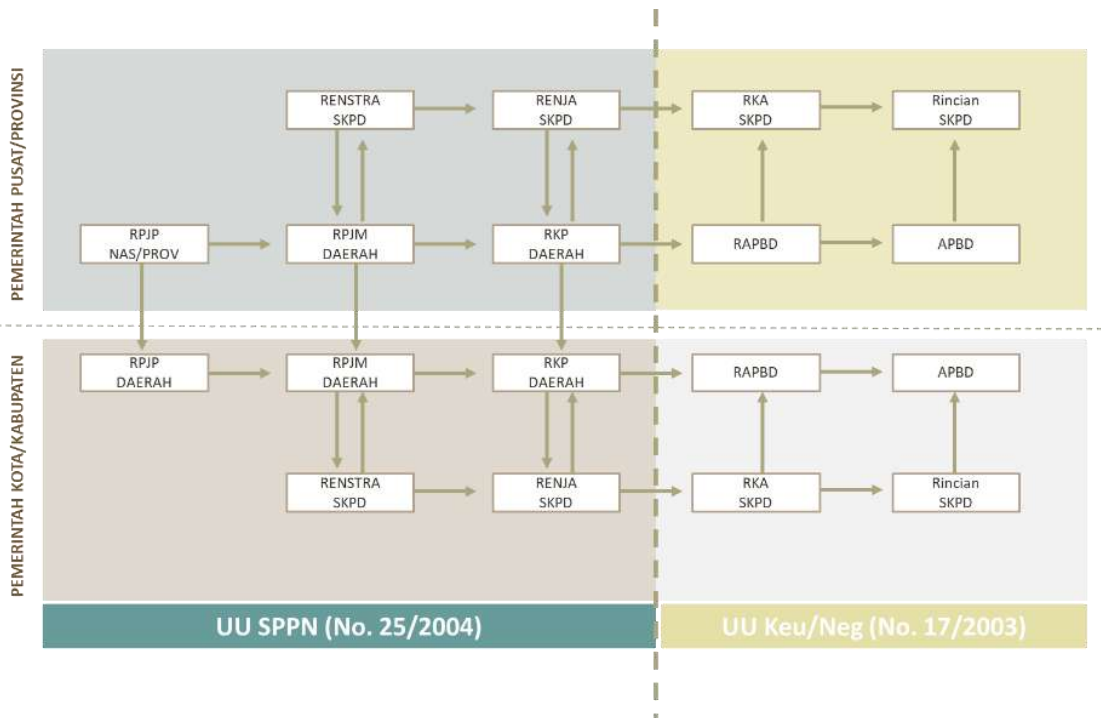
E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

F. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD pelaksana pembangunan.

Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Rencana Pembangunan Nasional diilustrasikan oleh **Gambar 1-2** berikut.



Gambar 1-2
Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD ini yaitu:

1. Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, di antaranya:

1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan kajian lingkungan hidup serta hasil evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Bandung yang lalu, evaluasi pelaksanaan TPB, dan evaluasi penerapan SPM di Kabupaten Bandung.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dijelaskan berdasarkan tiap bidang pembangunan daerah, baik dari segi internal maupun eksternal.

Analisis profil daerah diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini



dengan pencapaian yang diharapkan setiap bidang pembangunan daerah sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan bidang pembangunan daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai kejelasan arah, fokus, dan perspektif visi dan misi pembangunan daerah dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah. Pada bagian ini dilakukan analisis sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan sasaran yang akan dituju.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, juga penurunannya ke dalam level outcome (prioritas pembangunan daerah).

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB IX PENUTUP

Pada bab terakhir dijelaskan mengenai pedoman transisi meliputi pedoman transisi untuk mengisi kekosongan akibat pengaruh perubahan arahan kebijakan dan transisi pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD serta kaidah pelaksanaan dalam implementasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.



Contents

BAB 1	PENDAHULUAN	1-1
1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	1-7
1.4	Maksud dan Tujuan	1-9
1.4.1	Maksud	1-9
1.4.2	Tujuan	1-9
1.5	Sistematika Penulisan	1-9
Gambar 1-1	Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1-3
Gambar 1-2	Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1-8



BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Bandung, hasil evaluasi pembangunan di tahun 2020, evaluasi pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta evaluasi penerapan SPM di Kabupaten Bandung. Gambaran umum daerah akan menjadi dasar bagi pemetaan potensi daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Sedangkan hasil evaluasi pembangunan tahun lalu akan dijadikan referensi kinerja pembangunan daerah dan akan menjadi basis bagi pemetaan tantangan pembangunan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan teridentifikasinya tantangan pembangunan ini, harapannya Pemerintah Daerah dapat menyusun strategi antisipasi dalam membangun rencana pembangunan tahun 2021-2026 yang lebih terarah.

Secara garis besar, penjelasan mengenai gambaran umum kondisi daerah akan meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Ditinjau dari segi geografis, kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terbagi atas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi penduduk. Kabupaten Bandung yang berada pada jalur strategis pergerakan di Jawa Barat memberikan keunggulan absolut bagi Kabupaten Bandung. Di samping itu, posisi geografi Kabupaten Bandung yang dikelilingi deretan gunung api menjadikan kondisi lahan Kabupaten Bandung relatif subur dan ditunjang oleh ketersediaan sumber daya air sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah yang akan dibahas pada bagian ini mencakup luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, serta beberapa kondisi fisik wilayah lainnya.

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bandung meliputi 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan cakupan area seluas 176.238,67 ha, atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 3.709.528,44 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bandung berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Rincian luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bandung dijelaskan dalam **Tabel 2-1**.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Dari segi administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada 107° 14' – 108° 56' Bujur Timur dan 6° 49' – 7° 18' Lintang Selatan. Peta orientasi wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2-1** dan **Gambar 2-2**.



Tabel 2-1
Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
				Ha	%	
1.	WP Soreang - Kutawaringin - Katapang	1.	Soreang	2.550,68	1,45	10
		2.	Kutawaringin	4.730,26	2,68	11
		3.	Katapang	1.572,46	0,89	7
		4.	Rancabali	14.837,00	8,42	5
		5.	Pasirjambu	23.957,64	13,59	10
		6.	Ciwidey	4.846,92	2,75	7
2.	WP Baleendah	1.	Baleendah	4.155,54	2,36	8
		2.	Dayeuhkolot	1.102,91	0,63	6
		3.	Bojongsoang	2.781,22	1,58	6
3.	WP Banjaran	1.	Banjaran	4.291,79	2,44	11
		2.	Pangalengan	19.540,93	11,09	13
		3.	Cangkuang	2.461,06	1,40	7
		4.	Cimaung	5.500,02	3,12	10
		5.	Arjasari	6.497,79	3,69	11
		6.	Pameungpeuk	1.462,32	0,83	6
4.	WP Majalaya	1.	Majalaya	2.536,46	1,44	11
		2.	Ciparay	4.617,57	2,62	14
		3.	Pacet	9.193,96	5,22	13
		4.	Kertasari	15.207,36	8,63	8
		5.	Paseh	5.102,90	2,90	12
		6.	Ibun	5.456,51	3,10	12
		7.	Solokanjeruk	2.400,66	1,36	7
5.	WP Cicalengka	1.	Cicalengka	3.599,23	2,04	12
		2.	Nagreg	4.930,29	2,80	8
		3.	Cikancung	4.013,63	2,28	9
6.	WP Cileunyi - Rancaekek	1.	Cileunyi	3.157,51	1,79	6
		2.	Rancaekek	4.524,83	2,57	14
7.	WP Cilengkrang - Cimencyan	1.	Cimencyan	5.308,33	3,01	9
		2.	Cilengkrang	3.011,94	1,71	6
8.	WP Margahayu - Margaasih	1.	Margaasih	1.834,49	1,04	6
		2.	Margahayu	1.054,33	0,60	5
Kabupaten Bandung				176.238,67	100,00	280

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Topografi wilayah merupakan pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan, dan ketinggian secara umum pada satuan morfologi.

Sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%). Sebagian besar kawasan perkotaan seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang terletak di topografi ini. Kawasan dengan topografi <700 mdpl ini berpotensi mengalami banjir yang dilanda pada setiap musim hujan dikarenakan aliran sungai yang ada di seluruh Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta dangkalnya sungai.



Adapun Kecamatan yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan serta Cimencyan dan Cilengkrang di bagian wilayah Kabupaten Bandung bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha

(2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang.

Informasi detail mengenai topografi Kabupaten Bandung disajikan dalam Peta Topografi pada **Gambar 2-3**.



Gambar 2-1
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2.1.3 Kondisi Geologi

Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung yang dikelilingi deretan pegunungan, antara lain meliputi:

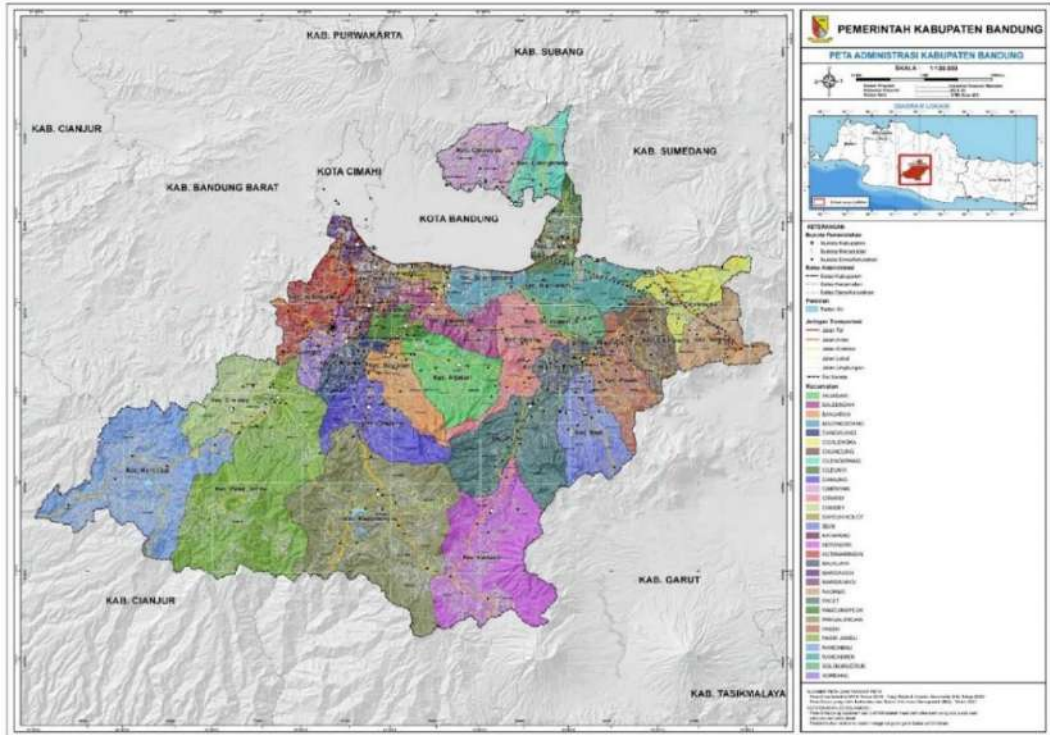
- Di bagian utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan

Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta;

- Di bagian selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut;



- Di bagian barat terdapat deretan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung- punggung tidak teratur; dan
- Di bagian timur terdapat Gunung Kreceng dan Gunung Mandalawangi.



Gambar 2-2

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung , 2021

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi yang cukup melimpah, baik itu sumber daya air yang berupa air bawah tanah maupun air permukaan. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan perikanan. Adapun pemanfaatan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Khusus air tanah permukaan, beberapa sumber air permukaan yang berada dalam cakupan wilayah kabupaten Bandung yaitu meliputi 4 danau alam, 3

danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sedangkan untuk air tanah, sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada beberapa wilayah perkotaan, pasokan air penduduk ditopang melalui fasilitas PDAM.

Secara tidak langsung, kondisi hidrologi Kabupaten Bandung ini turut dipengaruhi oleh kondisi curah hujan. Kabupaten Bandung rata-rata memiliki curah hujan dengan kisaran antara 3 hingga 6 mm per tahun. Potensi limpasan air hujan yang besar ini memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur drainase guna menghindari timbulnya persoalan banjir.



2.1.5 Kondisi Klimatologi

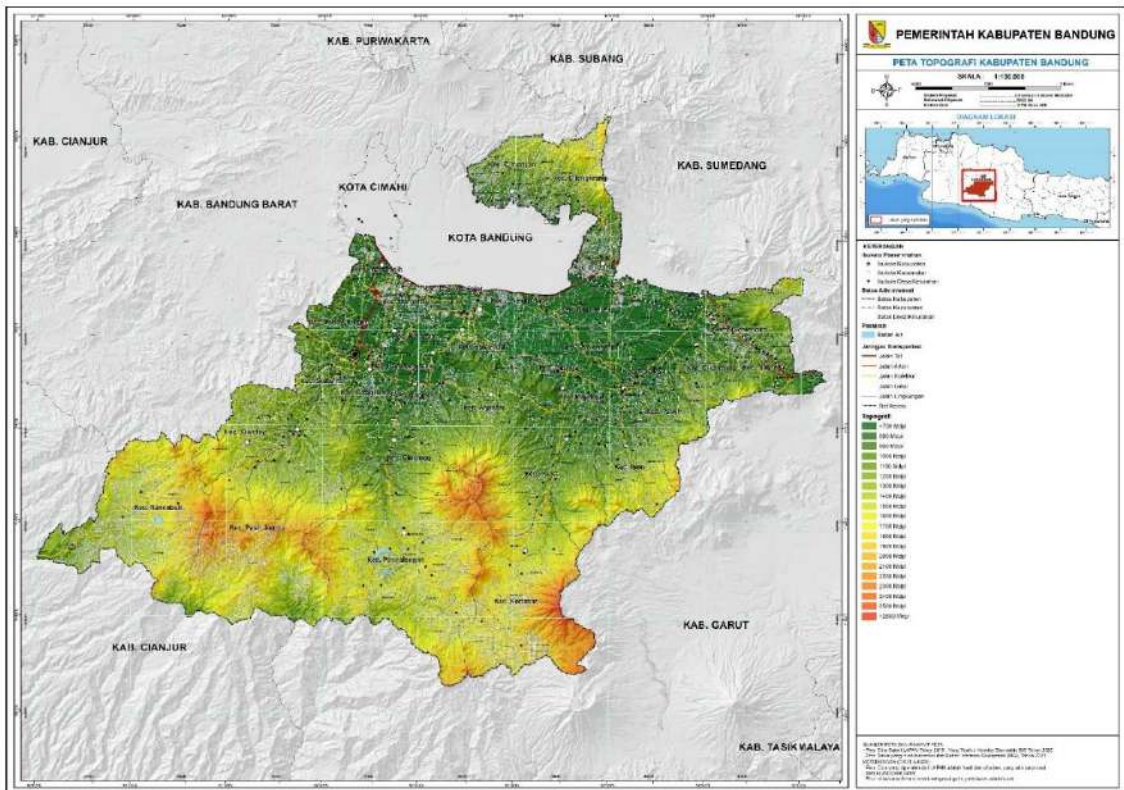
Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Kondisi iklim ini berpengaruh terhadap suhu Kabupaten Bandung, sehingga berada dalam kisaran antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 75% pada musim hujan dan 87% pada musim kemarau.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung disajikan dalam informasi tutupan lahan yang dihasilkan dari RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036. Tutupan lahan mengalami perubahan sebagian besar menjadi wilayah terbangun. Perubahan tutupan lahan

sangat dipengaruhi dari aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Pertambahan kebutuhan ruang untuk permukiman dan kebutuhan ruang untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan perubahan tutupan lahan tidak dapat dihindari.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, penggunaan lahan di Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan ke dalam guna lahan lindung dan guna lahan budidaya. Guna lahan lindung antara lain meliputi guna lahan hutan, sungai, danau/waduk, rawa, dan taman. Adapun guna lahan budidaya di antaranya meliputi guna lahan sawah, perkebunan, industri, tambang, permukiman, institusi, dan pasar. Selengkapnya, penggunaan lahan disajikan pada **Tabel 2-2**.



Gambar 2-3
Peta Topografi Kabupaten Bandung
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021



Sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh lahan budidaya dengan cakupan seluas 138.116,90 ha atau sebesar 78,37% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Adapun sisanya, yaitu sebesar 21,63% merupakan kawasan lindung. Pada komponen lahan budidaya, penggunaan lahan budidaya terbesar yaitu lahan sawah, dengan persentase cakupan sebesar 23,25% dan kemudian diikuti oleh lahan perkebunan dengan persentase sebesar 12,81%. Meninjau persentase luas penggunaan lahan ini tampak bahwa ketersediaan lahan budidaya di Kabupaten Bandung potensial dalam mendukung fungsi pertanian. Selain dari pada itu, ketersediaan kawasan lindung dan ruang terbuka, penggunaan lahan ini berpotensi sebagai kawasan resapan air.

Potensi kawasan resapan air ini jika dikelola dengan baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir pada saat puncak musim hujan tiba. Kawasan resapan air di Kabupaten Bandung

dibagi menjadi Imbuhan Bandung Soreang, Imbuhan Banjarsari, Imbuhan Batujajar, Imbuhan Ciater, Imbuhan Cibuni, Imbuhan Garut, Imbuhan Malangbong, Imbuhan Sumedang, dan Imbuhan Limuang. Peta kawasan resapan air di Kabupaten Bandung secara lebih rinci dapat dilihat pada **Gambar 2-5**.

2.1.7 Layanan Kinerja Jasa Ekosistem

Layanan Kinerja Jasa Ekosistem disusun berdasarkan Peta Digital Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (sumber: Dinas LH Provinsi Jawa Barat).

Selanjutnya metode yang dilakukan adalah pengolahan data digital skala Provinsi Jawa Barat yang diolah dengan cara melakukan *cropping* menjadi lingkup Kabupaten Bandung, dan dianalisis melalui sistem *database software* Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga dapat menghasilkan nilai kinerja layanan jasa ekosistem.

Tabel 2-2
Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2011

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase(%)
I	LINDUNG	38.121,77	21,63
1	Hutan	37.290,79	21,16
2	Sungai	441,60	0,25
3	Danau/Waduk	357,40	0,20
4	Rawa	12,72	0,01
5	Taman	19,26	0,01
II	BUDIDAYA	138.116,90	78,37
1	Sawah	40.983,84	23,25
2	Sawah Tadah Hujan	10,97	0,01
3	Perkebunan/Kebun	22.577,66	12,81
4	Kebun Campur	8.171,12	4,64
5	Industri	1.408,90	0,80
6	Tambang	37,44	0,02
7	Perumahan /Komplek Permukiman	16.306,68	9,25
8	Institusi	339,70	0,19
9	Pasar/Pertokoan	3,94	0,002
10	Lapangan Golf	122,03	0,07
11	Stadion/Lapangan	26,21	0,01
12	Bandara	67,80	0,04



No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase(%)
13	Jalan	3.567,59	2,02
14	Jalan KA	26,77	0,02
15	Stasiun/Terminal	2,44	0,001
16	Belukar	17.696,59	10,04
17	Rumput	52,81	0,03
18	Semak	3.821,50	2,17
19	Tanah Kosong	839,14	0,48
20	Tegal/Ladang	22.053,77	12,51
	Jumlah (Ha)	176.238,67	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2031

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dapat direpresentasikan oleh jasa ekosistem, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Semakin baik atau tinggi DDDTLH suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan jasa ekosistemnya (Riqqi, dkk., 2018). Jasa ekosistem terbagi menjadi empat klasifikasi dengan rincian yaitu:

1. Layanan Penyedia (*Provisioning Services*), yaitu jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti sumber daya genetika, makanan, air, dll.
2. Layanan Pengaturan (*Regulating Services*), yaitu manfaat yang didapat dari pengaturan ekosistem, seperti aturan pengendalian banjir, erosi, dampak perubahan iklim, dll.
3. Layanan Kultural (*Cultural Services*), yaitu manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti kekayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, serta nilai-nilai estetika dan pengetahuan
4. Layanan Pendukung (*Supporting Services*), yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, oksigen, nutrisi, air, dll.

1) Jasa Penyedia (P)

Jasa Penyedia. Jasa Penyedia Bahan Pangan (P1) di Kabupaten Bandung sebagian besar kategori sangat

rendah seluas 59,209.85 Ha atau 33.50 % dan sangat rendah sebanyak 47,366.52 Ha atau 26,80, selanjutnya kategori sedang 45,989.75 Ha atau 26 %.

Jasa Penyedia Air Bersih (P2) sebagian besar merupakan kategori tinggi seluas 106,922.39 Ha atau 60 %. Jasa penyedia serat fiber (P3) di Kabupaten Bandung sebagian besar kategori sangat tinggi seluas 79.972,58 Ha atau 40.14%. Jasa Penyedia Bahan Bakar (P4) sebagian besar pada kategori sangat tinggi seluas 98.156,02 Ha atau 55,53%, Jasa penyedia sumber daya genetik (P5) sebagian besar merupakan kategori tinggi dengan luas 46.654,52 Ha atau 26,39% dan kategori sangat tinggi dengan luas 40,752 Ha atau 23,05 %.

2) Jasa Pengatur (R)

Jasa Pengatur Iklim (R1) sebagian besar di Kabupaten Bandung pada sebagian besar kategori tinggi 79,737.50 Ha atau 45,108 %. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (R2) sebagian besar pada kategori tinggi seluas 56,536.73 Ha atau 31.98%. Jasa Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (R3) sebagian besar sangat tinggi seluas 54,239.30 Ha atau 30.68%. Jasa Pengaturan Permurnian Air (R4) sebagian besar pada kategori sangat tinggi 64314.78 Ha atau 36.68 %. Kinerja jasa Pengolahan dan Pemurnian limbah (R5) sebagian besar merupakan kategori tinggi 65,461.42 Ha atau 37.03 %. Kinerja Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara (R6) sebagian besar kategori tinggi 63,495.27 Ha atau



35,92 %. Kinerja Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (R7) sebagian besar kategori tinggi seluas 51,859.56 Ha atau 29.33% dan kategori sangat tinggi seluas 50,071.60 Ha atau 28.33 %. Kinerja Jasa pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit (R8) sebagian besar pada kategori sedang seluas 68,619.22 Ha atau 38.82 % dan kategori tinggi seluas 56,022.76 Ha atau 31.39%.

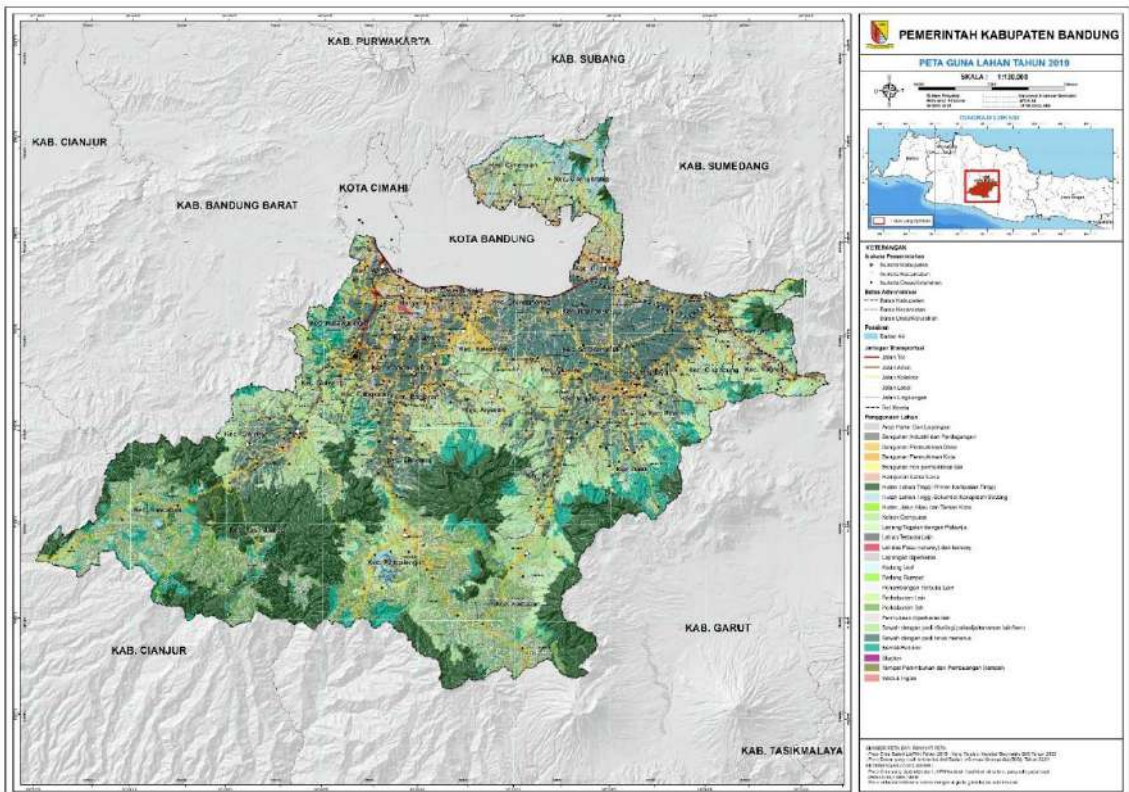
3) Jasa Pendukung (D)

Kinerja Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan (D1) sebagian besar kategori sedang 57,724.03 Ha atau 32.65% dan sangat tinggi seluas 50,298.59 Ha atau 28.45%. Kinerja Jasa Pendukung Siklus Hara (D2) sebagian besar pada kategori tinggi seluas 101,375.17 atau

57.34%. Kinerja Jasa Pendukung Produksi Primer (D3) sebagian besar pada kategori sedang seluas 88,953 Ha atau 50.32%. Kinerja Jasa Biodiversitas (D4) sebagian besar pada kategori tinggi dengan luas 67377.33 Ha atau 38.116 %.

4) Fungsi Budaya (Cultural)

Kinerja Jasa Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1) sebagian besar pada kategori sedang 87,644.13 Ha atau 49.58 %. Kinerja Jasa Rekreasi dan Ekowisata (C2) sebagian besar pada kategori tinggi seluas 113,180.89 Ha atau 64.03%. Kinerja Jasa Fungsi Estetika (C3) sebagian besar pada kategori tinggi dengan luas 92.446.79 Ha atau 52.29 %



Gambar 2-4
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021



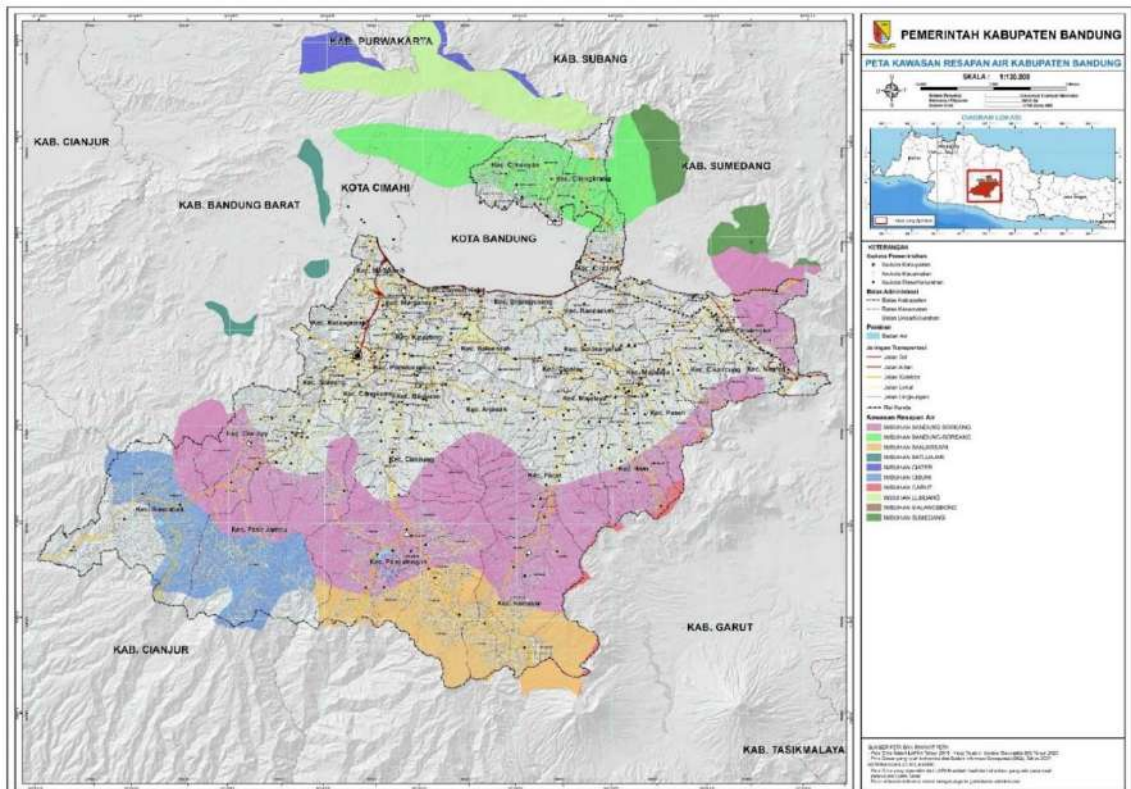
2.1.7.1 Daya Dukung Sumber Daya Air

Daya dukung sumber daya air (DDL-SDA) adalah rasio ketersediaan air dibagi jumlah kebutuhan air, yang dihitung berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi atau proyeksi yang akan datang.

Apabila nilai rasio 1,0 maka DDL-SDA baik untuk memenuhi kebutuhan air. Ketersediaan air dihitung berdasarkan kondisi besar debit *baseflow* atau Q80%.

Apabila semua potensi air di musim hujan dan musim kemarau dihitung dan sepanjang waktu tersebut air ditampung dengan bendungan atau waduk maka menggunakan debit air rata-rata atau Q50%. Hasil perhitungan daya dukung sumber daya air tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **DDL-SDA pada Q80%** pada tahun 2019 adalah 0,79 dan proyeksi pada tahun 2030 adalah 0,77. Nilai tersebut $<1,0$ yang menunjukkan sumber daya air permukaan di Kabupaten Bandung di musim kemarau saat ini kritis **tidak mampu memenuhi kebutuhan** semua penduduk di Kabupaten Bandung.
- b) **DDL-SDA pada Q50%** pada tahun 2019 adalah 1,20 dan proyeksi pada tahun 2030 adalah 1,24. Nilai tersebut $>1,0$ yang menunjukkan apabila semua air sungai disimpan dalam waduk maka kebutuhan air terjamin bahkan **masih terdapat kelebihan air**



Gambar 2-5
Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



Tabel 2-3
Proyeksi Kebutuhan Air dan Tingkat Ketersediaan Air

Kebutuhan Air dan Daya Dukung SDA	2019	2030
	m ³ /detik	m ³ /detik
Air bersih	5,24	6,14
Air irigasi	40,717	40,717
Jumlah	45,96	46,86
Ketersediaan air Q 50 %	58,03	58,03
Ketersediaan air Q 80 %	36,11	36,11
Indeks Daya Dukung SDA Q50%	1,26	1,24
Indeks Daya Dukung SDA Q80%	0,79	0,77

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka 2019, KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

Tabel 2-4
Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

No	Nama	Luas (Ha)	%
1	Sangat Rendah	6367,02	3,60
2	Rendah	15041,17	8,51
3	Sedang	6510,86	3,68
4	Tinggi	106922,39	60,48
5	Sangat Tinggi	41928,91	23,72
	Jumlah	176,770	100

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK, KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

A. Daya Dukung Air berdasarkan Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

Sebagian besar kondisi jasa ekosistem penyedia air bersih adalah kategori tinggi mencapai 60%, selanjutnya sangat tinggi mencapai 23,72% ini menunjukkan bahwa potensi vegetasi yang berfungsi sebagai infiltrasi air hujan cukup baik, dan memberikan kontribusi sumber daya air bersih bagi Kabupaten Bandung. Namun saat ini distribusi air bersih di beberapa tempat tidaklah merata dan beberapa kecamatan yang memiliki penyediaan air sangat rendah dan rendah sebesar 13,01% yang menyebar pada beberapa kecamatan yang sebagian besar berada di Kecamatan Cimemyan

2.1.7.2 Daya Dukung Pangan

Daya Dukung pangan adalah kemampuan lahan dalam produksi beras dibagi konsumsi beras penduduk Kabupaten Bandung. Asumsi tingkat kebutuhan pangan yang paling pokok adalah beras.

Daya dukung pangan di Kabupaten Bandung ialah tingkat produksi beras dibagi kebutuhan Konsumsi beras penduduk, menghasilkan indeks daya dukung pangan.

Daya Dukung Pangan Tinggi = $DD \text{ Pangan} \geq 1$

Daya Dukung Pangan Rendah = $DD \text{ Pangan} \leq 1$

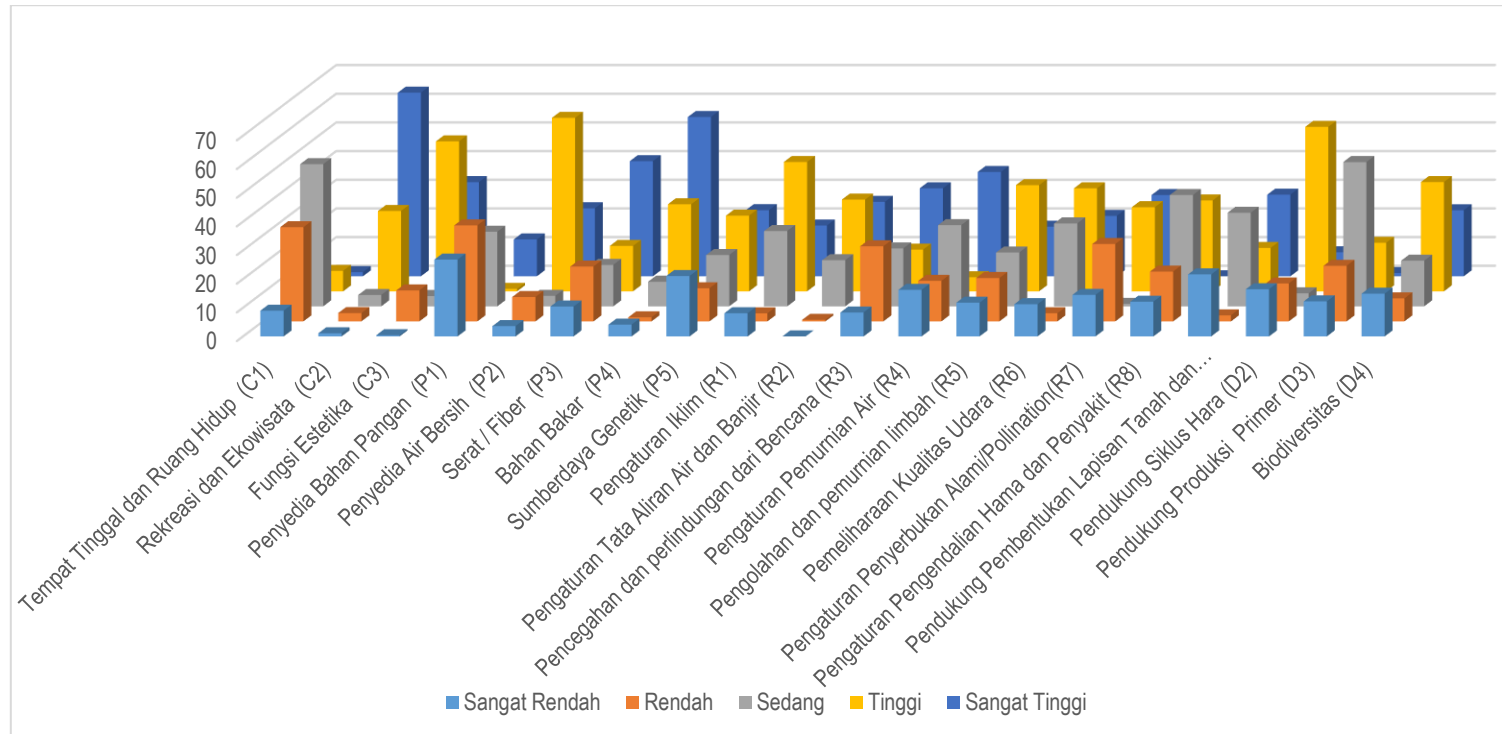


Tabel 2-5

Luas Panen Padi dan Produksi Gabah (Kg)

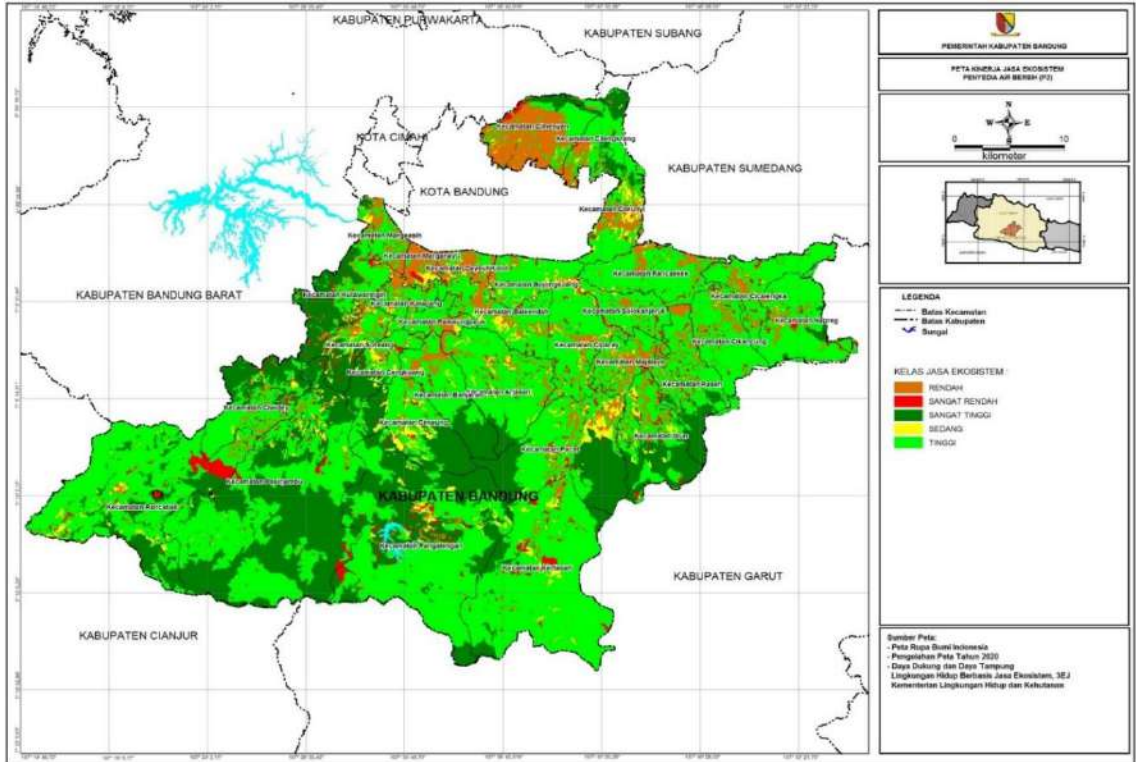
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Produksi Padi (Ton/tahun)	Produksi Beras (Kg/tahun)	Perkapita kg/Th	Konsumsi (Kg/Tahun)	Ratio	Keterangan
1	Ciwidey	81.277	18.650	11.940.044	92,9	7.550.633	1,58	Memenuhi DD
2	Rancabali	52.921	8.645	5.534.689	92,9	4.916.361	1,13	Memenuhi DD
3	Pasirjambu	89.364	23.625	15.124.930	92,9	8.301.916	1,82	Memenuhi DD
4	Cimaung	82.505	39.013	24.976.046	92,9	7.664.715	3,26	Memenuhi DD
5	Pangalengan	155.224	7.517	4.812.185	92,9	14.420.310	0,33	Tidak memenuhi DD
6	Kertasari	72.924	3.874	2.480.020	92,9	6.774.640	0,37	Tidak memenuhi DD
7	Pacet	114.024	50.390	32.259.902	92,9	10.592.830	3,05	Memenuhi DD
8	Ibun	85.704	19.281	12.343.703	92,9	7.961.902	1,55	Memenuhi DD
9	Paseh	136.187	40.063	25.648.089	92,9	12.651.772	2,03	Memenuhi DD
10	Cikancung	95.410	17.562	11.243.237	92,9	8.863.589	1,27	Memenuhi DD
11	Cicalengka	124.369	19.885	12.730.179	92,9	11.553.880	1,10	Memenuhi DD
12	Nagreg	54.916	8.464	5.418.602	92,9	5.101.696	1,06	Memenuhi DD
13	Rancaekek	190.965	43.405	27.787.919	92,9	17.740.649	1,57	memenuhi DD
14	Majalaya	171.445	32.882	21.051.287	92,9	15.927.241	1,32	memenuhi DD
15	Solokan Jeruk	87.670	30.135	19.292.337	92,9	8.144.543	2,37	Memenuhi DD
16	Ciparay	171.698	46.776	29.945.707	92,9	15.950.744	1,88	Memenuhi DD
17	Baleendah	270.528	28.768	18.417.101	92,9	25.132.051	0,73	Tidak Memenuhi DD
18	Arjasari	103.408	29.028	18.583.751	92,9	9.606.603	1,93	Memenuhi DD
19	Banjaran	130.788	35.589	22.784.167	92,9	12.150.205	1,88	Memenuhi DD
20	Cangkuang	78.011	26.690	17.087.079	92,9	7.247.222	2,36	Memenuhi DD
21	Pameungpeuk	80.067	15.161	9.705.906	92,9	7.438.224	1,30	memenuhi DD
22	Katapang	132.130	17.606	11.271.195	92,9	12.274.877	0,92	Tidak memenuhi DD
23	Soreang	121.050	19.905	12.743.264	92,9	11.245.545	1,13	Memenuhi DD
24	Kutawaringin	103.688	39.654	25.386.510	92,9	9.632.615	2,64	Memenuhi DD
25	Margaasih	159.221	12.695	8.127.384	92,9	14.791.631	0,55	Tidak Memenuhi DD
26	Margahayu	135.341	1.153	738.426	92,9	12.573.179	0,06	Tidak Memenuhi DD
27	Dayeuhkolot	125.820	2.649	1.695.947	92,9	11.688.678	0,15	Tidak Memenuhi DD
28	Bojongsoang	128.098	35.349	22.630.366	92,9	11.900.304	1,90	Memenuhi DD
29	Cileunyi	206.277	27.095	17.345.957	92,9	19.163.133	0,91	Tidak memenuhi DD
30	Cilengkrang	54.957	6.563	4.201.345	92,9	5.105.505	0,82	Tidak memenuhi DD
31	Cimencyan	121.304	7.212	4.617.148	92,9	11.269.142	0,41	Tidak Memenuhi DD
	Jumlah	3.717.291	715.283	457.924.420		345.336.334	1,40	

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2019 dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

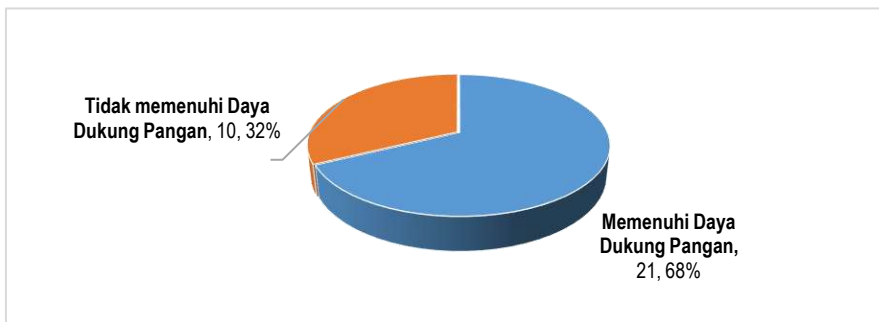


Gambar 2-6
Klasifikasi Jasa Ekosistem (%) di Kabupaten Bandung

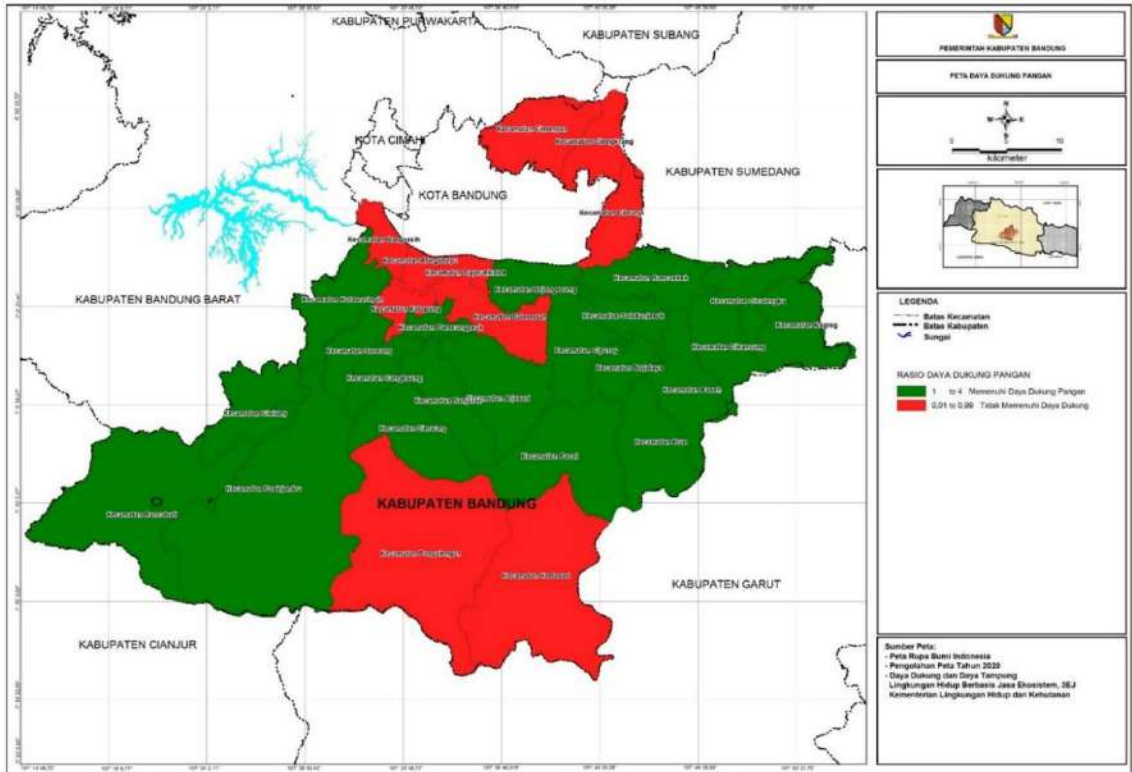
Sumber: KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025



Gambar 2-7
Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bandung
Sumber: D3TLH Provinsi Jawa Barat, KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025



Gambar 2-8
Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2020
Sumber: KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025



Gambar 2-9
Peta Daya Dukung Pangan Berdasarkan Status Daya Dukung Kecamatan di Kabupaten Bandung
Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2019

A. Daya Dukung Pangan Berdasarkan Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

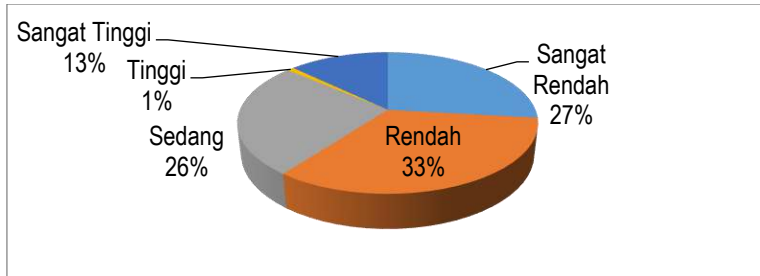
Daya dukung pangan berdasarkan layanan jasa ekosistem pangan sebagian besar adalah kategori rendah mencapai 33 %, selanjutnya sangat rendah

mencapai 27%, dan sedang hanya menyediakan 26%. Penyedia pangan sangat tinggi sebesar 13 % dan sebagian kecil klas tinggi hanya 1 %. Dengan demikian setidaknya 60% lahan Kabupaten tidak memenuhi daya dukung Pangan. Sedangkan hanya 40% memenuhi daya dukung pangan.

Tabel 2-6
Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1)

No	Nama	Luas (Ha)	%
1	Sangat Rendah	47,367	27
2	Rendah	59,210	33
3	Sedang	45,990	26
4	Tinggi	1,485	1
5	Sangat Tinggi	22,719	13
	Jumlah	176,770	100

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-202



Gambar 2-10

Grafik Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level internal Kabupaten Bandung, tetapi juga dianggap strategis oleh pemerintah nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam level nasional, Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenal lagi Kawasan Strategis Propinsi, Kawasan Strategis Kabupaten. Hanya ada Kawasan Strategis Nasional.

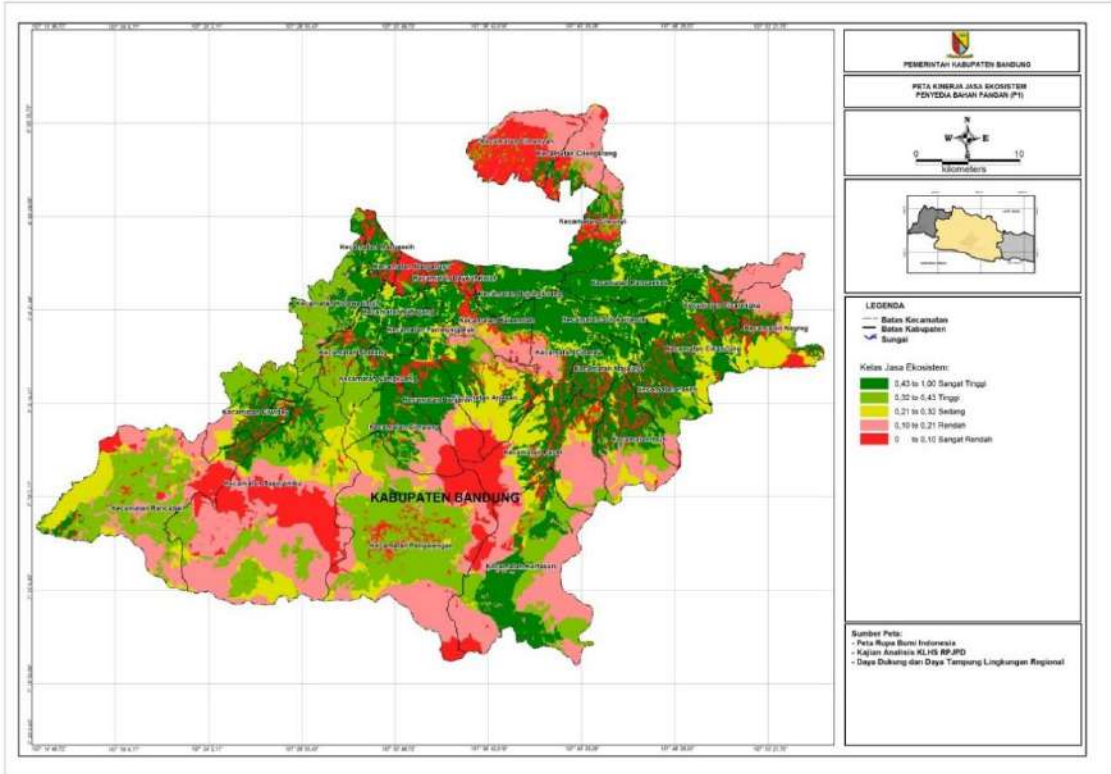
Lokasi KSN yang berlokasi di Kabupaten Bandung adalah KSN Cekungan Bandung. Penetapan KSN didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028. KSN Cekungan Bandung dipandang penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari KSN cekungan Bandung, pengembangan Kabupaten Bandung dilakukan searah dengan arahan nasional untuk pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan.

2.1.8.1 Potensi Pertanian

Potensi unggulan Kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah Kabupaten Bandung, seperti: sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, potensi kawasan, potensi panas bumi dan sebagainya. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 berdasarkan dokumen KBDA jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang berumur lebih dari 15 tahun bekerja di sektor pertanian sebanyak 24,60%. Lahan merupakan sumber daya alam yang paling penting dalam usaha budidaya pertanian. Potensi lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari Lahan Sawah seluas 36.212 hektar atau 20,55% dari luas wilayah kabupaten dan Lahan Kering seluas 140.027 hektar (79,45%) terdiri dari Lahan Kering Pertanian seluas 74.778 Ha (42,43%) dan Lahan kering bukan pertanian seluas 65.249 Ha (37,02%)

Dengan luas lahan kering pertanian kecamatan secara berurutan (2010) adalah Kecamatan Pasir Jambu, Pangalengan, Rancabali, Kertasari dan Pacet serta lima besar terluas lahan sawah adalah Kecamatan Rancaekek, Ciparay, Pacet, Solokan Jeruk dan Cimaung dan jika digabungkan antara lahan kering pertanian dan lahan sawah maka kecamatan yang terluas lahan pertaniannya adalah Kecamatan Pasirjambu, Pangalengan, Rancabali, Kertasari dan Pacet.



Gambar 2-11
Peta Jasa Penyedia Pangan (P1)

(Sumber: D3TLH Provinsi Jawa Barat, dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025)

Tabel 2-7
Lahan Sawah Kabupaten Bandung

No	Kondisi Lahan Sawah	Luas (hektar)
1	Irigasi Teknis	8.730
2	Irigasi Setengah	6.949
3	Irigasi Sederhana	6.571
4	Irigasi Non-PU	7.063
5	Tadah Hujan	6.899
#	Total	36.212

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-8
Lahan Kering Pertanian Kabupaten Bandung

No	Kondisi Lahan Kering	Luas(hektar)
1	Tegal/Kebun	20.901
2	Ladang/Huma	12.650
3	Perkebunan (PBS/PTP)	27.305
4	Hutan Rakyat	6.132
5	Kolam Empang	980
6	Pengembalaan/Padang Rumput	376
7	Pekarangan yang ditanami	6.381



No	Kondisi Lahan Kering	Luas(hektar)
8	Sementara tidak diusahakan	8
	Total	74.778

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, sumber daya petani yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sektor pertanian yang tangguh. Upaya peningkatan kualitas sumber daya petani di Kabupaten Bandung selama ini ditempuh melalui pendekatan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berjumlah 214 Gapoktan.

Saat ini di Kabupaten Bandung terdapat 1.192 Kelompok Tani, yang terdiri dari:;

- Kelompok Tani Pemula : 130 Kel.
- Kelompok Tani Lanjut : 742 Kel.
- Kelompok Tani Madya : 312 Kel.
- Kelompok Tani Utama : 8 Kel
- Kelompok Wanita Tani : 65 Kel.

Adapun Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung mencapai 7.7 % pada tahun 2020. Pada tahun 2020, produksi tanaman sayuran di Kabupaten Bandung sebanyak 7.042 ribu kuintal dengan tomat menjadi komoditas dengan produksi terbesar yang menapai 1.092 ribu kuintal. Sementara lima komoditas utama lainnya adalah petersili dengan produksi 877 ribu kuintal, kubis sebesar 824 ribu kuintal, kentang 652 ribu kuintal, labu 613ribu kuintal, dan bawang merah 609 ribu kuintal Sementara produksi sayuran buah semusim sebanyak 8.950 ribu kuintal, dan produksi tanaman biofarmaka sebanyak 1.546 ribu kg, sedangkan produksi tanaman hias cukup bervariasi menurut jenisnya. Adapun komoditas unggulan kabupaten Bandung adalah bunga krisan dan anggrek. Produk pertanian unggulan Kabupaten Bandung lainnya adalah sektor perkebunan, terutama komoditi teh dan kopi. Dua komoditi ini merupakan salah satu produk ekspor unggulan, baik ekspor antar wilayah maupun ekspor ke luar negeri. Komoditi teh diproduksi oleh perkebunan rakyat, swasta dan negara. Pada tahun 2020, produksi teh di Kabupaten Bandung

mencapai 12 ribu ton lebih. Komoditi unggulan kedua dari perkebunan adalah kopi dengan tingkat produksi 21,53 ribu ton. Penghasil kopi terbesar adalah Kecamatan Pangalengan, yang berupa kopi olahan (sumber KBDA 2020).

Khusus untuk komoditas kentang, Kabupaten Bandung merupakan penghasil produksi tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 70% dan sisanya sebesar 30% untuk tingkat Nasional. Produksi lainnya yaitu komoditas perkebunan (teh, kopi, cengkeh) dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik yang berasal dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar di ekspor.

Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain : sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Dari komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar baik level Jawa Barat maupun Nasional. Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Untuk memenuhi kebutuhan susu secara nasional, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor yang mencapai 70 % (mayoritas dalam bentuk olahan) dan sisanya (30 %) dari produksi dalam negeri, sehingga peluang pengembangan ternak sapi perah masih cukup tinggi. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Selain sapi potong, domba merupakan jenis ternak



yang potensial dikembangkan. Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih sulit didapat.

Berdasarkan dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia di atas, potensi pengembangan wilayah yang dikembangkan saat ini antara lain:

1. Kawasan Agropolitan Ciwidey

Kawasan Agropolitan Ciwidey meliputi 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali yang biasa disebut "Kawasan Pacira". Secara umum kawasan Pacira memiliki banyak potensi pertanian dan peternakan. Untuk potensi pertanian terdapat tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan potensi peternakan terdapat sapi perah. Selain itu, produk olah pertanian seperti kalua jeruk, manisan strawberry dan produk lainnya.

Jenis komoditi unggulan yang paling banyak di wilayah Pacira untuk tingkat desa yaitu sapi perah, padi sawah tersebar di 18 desa, buncis, tomat dan cabe tersebar di 11 desa, alpukat dan pisang tersebar di 11 desa, teh rakyat tersebar di 9 desa, dan kopi tersebar di 7 desa.

2. Kawasan Agropolitan Pangalengan

Agropolitan Kecamatan Pangalengan menjadi wilayah untuk tiga komoditas unggulan untuk sektor pertanian, antara lain Kopi, jagung, kentang dan kubis. Selain itu peternakan sapi perah dan olahannya menjadi komoditas utama juga yang dikembangkan di Pangalengan.

Selain produk sayuran, Pangalengan memiliki beberapa potensi di sektor perkebunan dan peternakan, yang meliputi:

- Perkebunan teh, baik milik swasta, negara, maupun perkebunan rakyat.
- Perkebunan kopi (sebagian besar milik masyarakat), dan
- Peternakan, dengan adanya industri makanan olahan seperti industri pembuatan Via, dodol, karamel, kerupuk susu, dan sebagainya

2.1.8.2 Potensi Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut.

- Kawasan Pariwisata Alam, meliputi Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang);
- Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet),



- Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi);
- Kawasan Pariwisata Agro, meliputi: ✓ Agrowisata Strawberry: Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh; ✓ Agrowisata Teh: Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu); ✓ Agrowisata Sayuran: Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan; ✓ Agrowisata Herbal: Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey;
 - Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pengalengan).

Kondisi sumber daya alam seperti terurai di atas mendukung terutama di wilayah Bandung Selatan sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi daerah kunjungan wisata. Selama tahun 2019 tercatat 862.789 wisatawan domestik dan 4.588 wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan wisata ke Kabupaten Bandung. Objek wisata alam masih menjadi primadona wisata Kabupaten Bandung. Sebagian besar lokasi wisata alam terdapat di wilayah selatan Kabupaten Bandung yaitu di kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu dan Kertasari. Namun

potensi wisata alam masih bisa dikembangkan di wilayah utara yaitu di kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang. Dalam industri pariwisata salah satu komponen utama aktivitas pariwisata adalah akses dan akomodasi. Akses masuk ke Kabupaten Bandung semakin mudah dengan telah beroperasinya tol Soreang-Pasirkoja sejak 3 tahun lalu. Adapun hotel atau penginapan sebagai sarana akomodasi utama pariwisata telah banyak didirikan di Kabupaten Bandung. Terdapat banyak hotel dengan berbagai kelas dari hotel bintang lima hingga hotel melati atau penginapan jenis lainnya seperti *guest house* atau *home stay*. Fasilitas penunjang pariwisata lainnya seperti tempat makan atau restoran telah banyak beroperasi di Kabupaten Bandung. Setidaknya terdapat 40 restoran, 48 kafetaria/kafe dan beberapa tempat makan lainnya seperti kedai makan, warung dan *coffee shop*. (sumber KBDA 2021).

2.1.8.3 Potensi Panas Bumi

Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.711 megawatt (mW). Dari jumlah tersebut, yang sudah dimanfaatkan (ter-install) mencapai ± 697 mW masing-masing di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Area Cibuni.

Energi yang berasal dari Kabupaten Bandung sudah mampu menyuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali dan ini akan terus berkembang dengan adanya perluasan di area Kamojang, Wayang Windu, dan Patuha dengan total rencana perluasan mencapai sekitar 360 MW.

Menurut BPS dalam dokumen KBDA tahun 2021 Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah produksi listrik di Jawa Barat. Terdapat delapan titik lokasi pembangkit listrik di Kabupaten Bandung dengan PLTP Wayang Windu 1 dan 2 yang berlokasi di kecamatan Pangalengan sebagai produsen listrik terbesar yang mampu menghasilkan listrik 1,9 juta kWh selama tahun 2020 atau 48 persen dari total produksi listrik Kabupaten Bandung. Berkaitan dengan

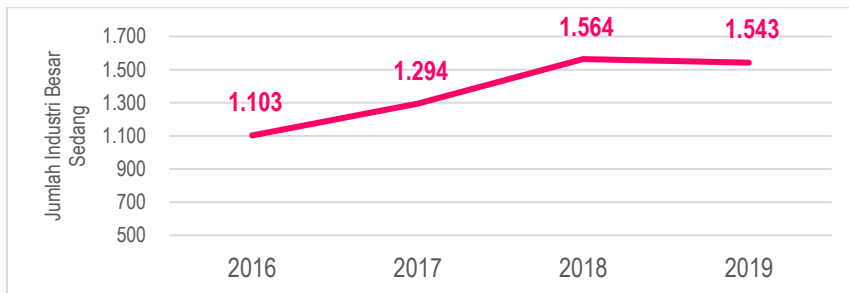


pelayanan distribusi listrik di Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh PLN di dua area pelayanan di Kabupaten Bandung mencapai 4,9 juta Kwh di tahun 2020. Area Majalaya mendistribusikan listrik sebanyak 2,55 juta Kwh sementara area Bandung telah mendistribusikan listrik sebanyak 2,32 Kwh di tahun 2020 (sumber KBDA 2021).

2.1.8.4 Potensi Industri

Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri, yang terdiri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Menurut BPS Kabupaten Bandung dalam KBDA 2020 perusahaan industri besar dan sedang yang tercatat dan dalam kondisi aktif pada tahun pada tahun 2019 sebanyak 1.564 perusahaan yang terdiri dari perusahaan besar dan sedang. Jumlah ini belum termasuk industri dengan skala kecil atau industri rumah tangga. Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya mengalami peningkatan, penambahan ini bisa dari industri yang baru berdiri maupun dari baru masuk daftar. Kontribusi kategori Industri selama tujuh tahun terakhir mengalami peningkatan dari 50,94 persen di tahun 2010 menjadi 52,07 persen di tahun 2019. Laju pertumbuhan kategori Industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Industri di Kabupaten Bandung tahun 2018 mencapai 6,97 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,75 persen. Kategori industri Kabupaten Bandung mempunyai peran yang sangat besar tidak hanya di Kabupaten Bandung namun juga di Provinsi Jawa Barat.

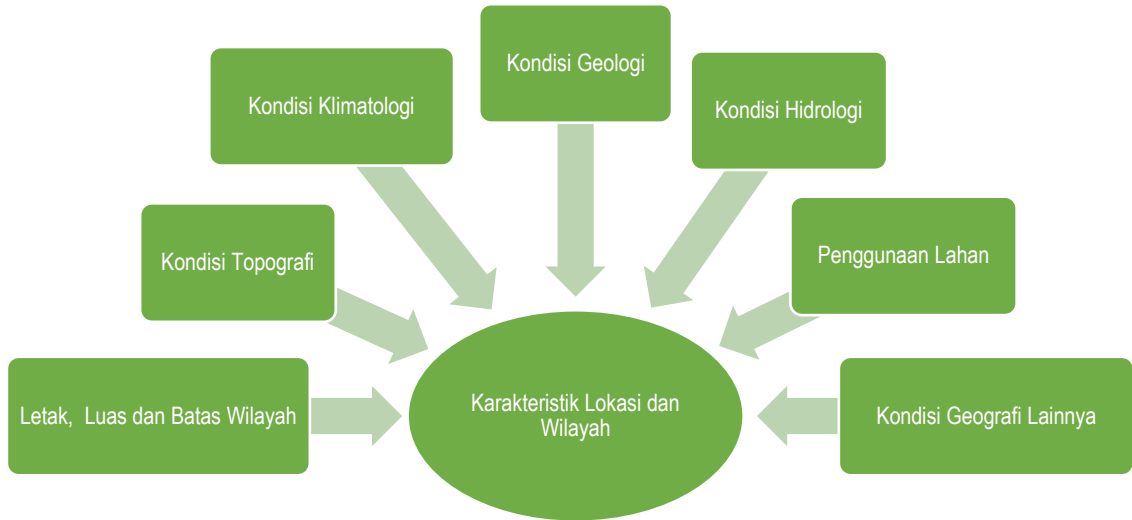


Gambar 2-12
Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi bahwa berdasarkan lokasi geografi dan potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Bandung potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Keterkaitan antara kondisi geografi daerah

dengan potensi pengembangan wilayah tersebut sejalan mengikuti arahan kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.



Gambar 2-13
Kerangka Pemikiran Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi morfologi Kabupaten Bandung yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh deretan pegunungan mengakibatkan tingginya kerentanan bencana alam baik bencana letusan gunung api, tanah longsor, banjir maupun kekeringan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bandung menduduki peringkat tingkat rawan bencana kategori Tinggi, yakni dengan skor 174.00 atau urutan 96 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung menempati *ranking* ketujuh dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, setelah Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Tingginya tingkat kerentanan bencana ini diukur dari berbagai faktor, di antaranya jumlah kasus yang terjadi hingga potensi wilayahnya.

Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Selain diakibatkan oleh morfologi wilayah yang berupa cekungan, juga turut

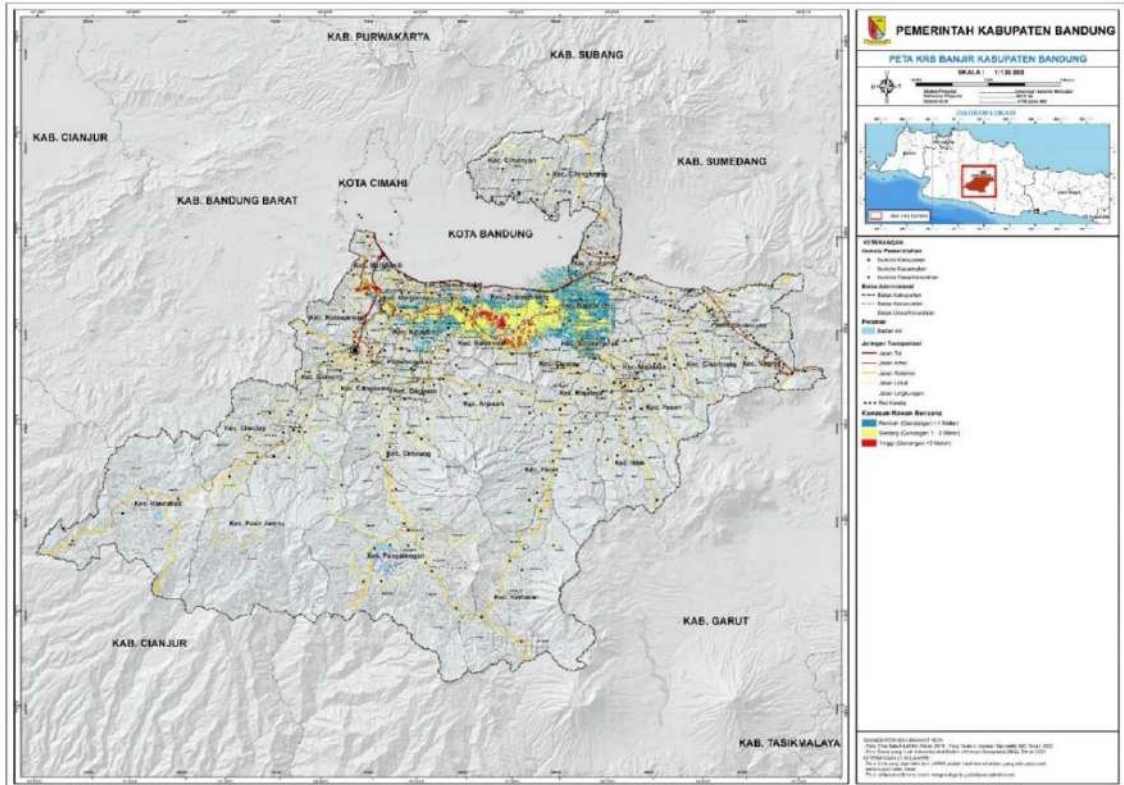
dipicu oleh adanya alih fungsi lahan di kawasan hulu Sungai Citarum. Selain itu, terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase juga turut memicu terjadinya banjir, terutama di beberapa titik lokasi seperti di Margaasih, Margahayu, Dayeuh Kolot, Katapang, Bojongsoang, Baleendah, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Cileunyi. Disisi lain, kawasan ini merupakan kawasan pelepasan air tanah yang memiliki daya serap air yang rendah. Pada kondisi eksisting, tingkat banjir dengan status tinggi (genangan > 3 m) terdapat di Margaasih, Margahayu, Bojongsoang, dan Baleendah dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan di wilayah perbatasan. Sedangkan titik lokasi rawan banjir lainnya berada pada status sedang (genangan 1-3 m) dan rendah (genangan < 1 m). Peta kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada **Gambar 2-14**.

Selain bencana banjir, Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana letusan gunung berapi, terutama wilayah yang berada di bagian selatan dan timur Kabupaten Bandung. Namun, zona bahaya gunung berapi ini masih berada pada KRB I dan KRB II, yakni berpotensi terlanda aliran lahar hujan dan



aliran awan panas, lava, dan lahar hujan di mana bukan merupakan zona dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Kecamatan yang berada di KRB I bahaya gunung berapi adalah Kecamatan Rancabali, Ciwidey, dan Pasirjambu serta Pangalengan. Sementara

kecamatan yang berada di KRB II adalah Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan serta Kertasari. Lokasi persebaran kawasan risiko gunung berapi dapat dilihat secara rinci pada **Gambar 2-15**.



Gambar 2-14
Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

Selain risiko bencana banjir dan gunung berapi, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tingkat risiko bencana ini cukup tinggi karena pada sebagian besar luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan gempa yang tinggi dan sebagian lainnya memiliki tingkat kerentanan menengah. Tingkat kerentanan gempa dengan status tinggi berada di Kecamatan Cimenyan, Cilengrang, Cileunyi, Margaasih, Kutawaringin, Dayeuhkolot, Katapang, Bojongsoang, Baleendah,

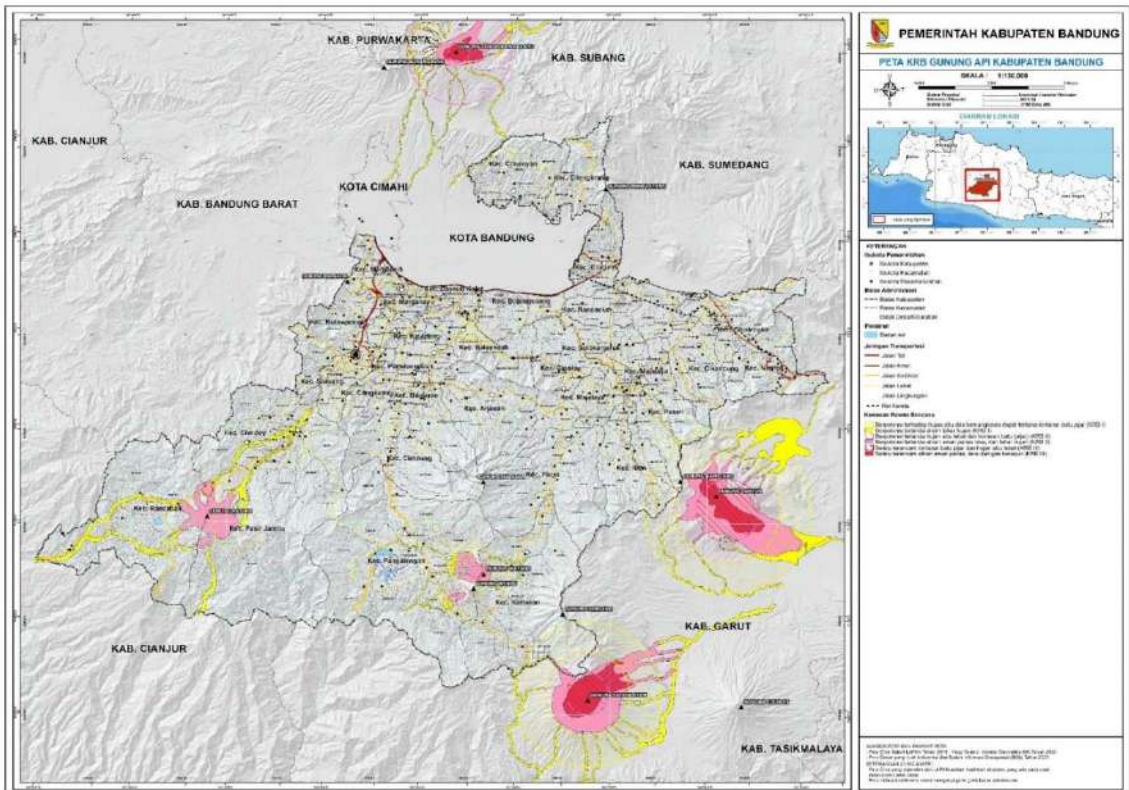
Rancaek, Solokanjeruk, Ciparay, Majalaya, Cikancung, Cicalengka, dan sebagian Kecamatan Nagreg serta Pamengpeuk. Sementara kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2-16**.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung adalah risiko gerakan tanah mengingat



topografi dan kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dimulai dari bagian utara dengan tingkat kerentanan gerakan tanah sangat rendah, menuju bagian tengah dan selatan Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerentanan rendah dan menengah, serta beberapa kawasan di bagian selatan dan timur yang memiliki tingkat

kerentanan gerakan tanah tinggi. Daerah dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi hanya terdapat di sebagian kecil daerah di Kecamatan Nagreg dan Cicalengka. Sementara sebagian besar daerah lainnya memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah menengah hingga sangat rendah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2-17**.



Gambar 2-15
Peta Kawasan Risiko Gunung Berapi di Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021

2.1.10 Demografi Penduduk

Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.775.279 jiwa dengan angka kepadatan penduduk sekitar 2.135 jiwa/km². Angka tersebut

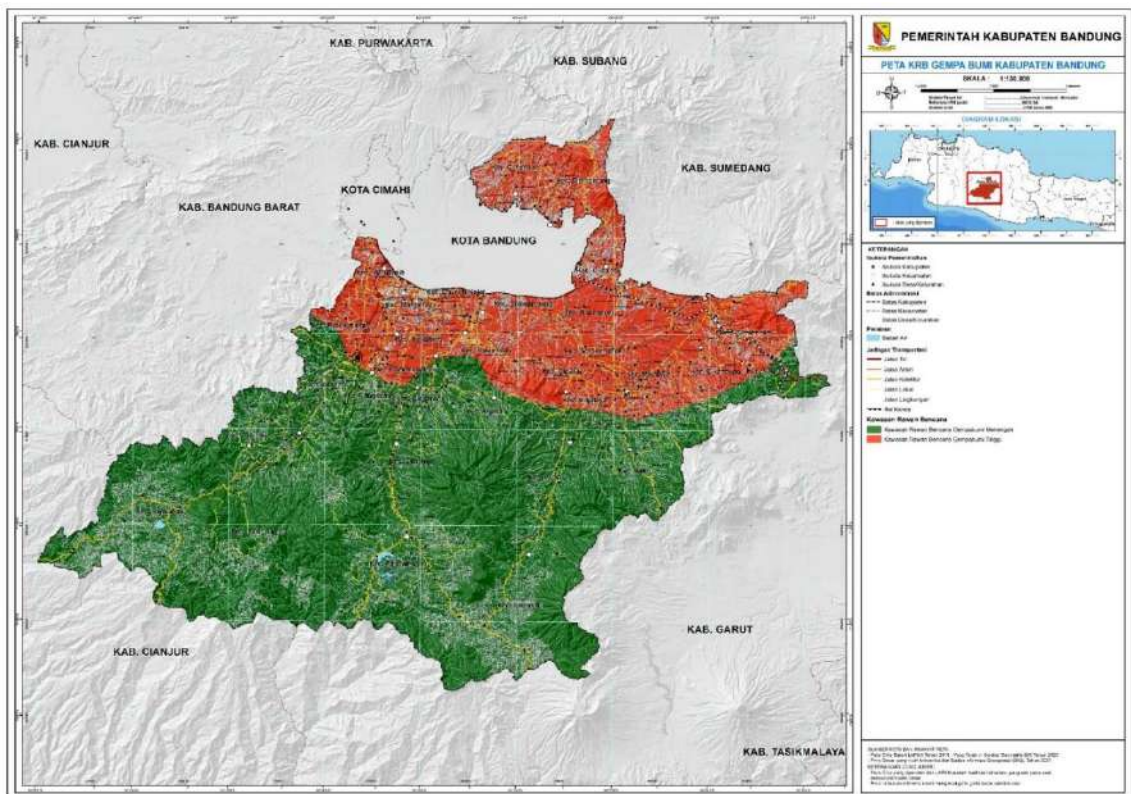
diperoleh berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Pada tahun 2020, BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung



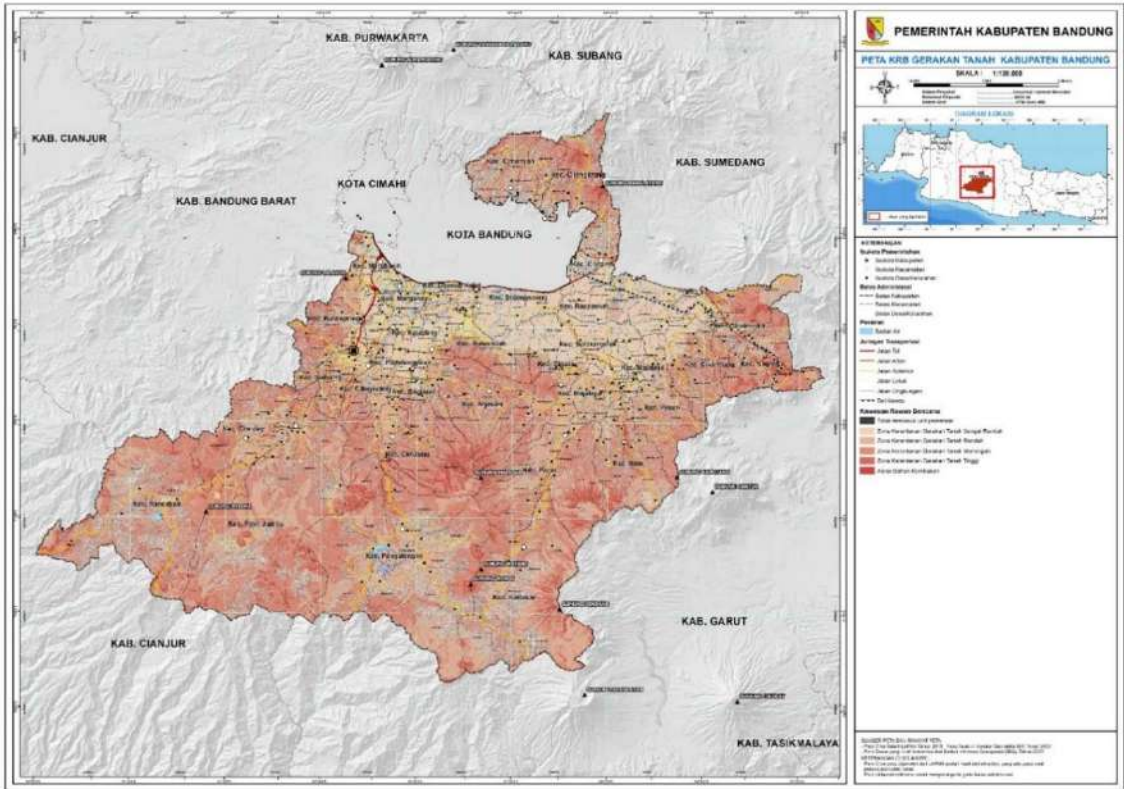
adalah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.056 jiwa/km². Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010, juga dapat mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan korban jiwa dan bermigrasinya masyarakat Kabupaten Bandung ke luar kota akibat melemahnya aktivitas perekonomian di daerah. Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk

Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Gambar 2-18**.

Jika ditinjau dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2020 termasuk ke dalam 3 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Selengkapnya jumlah penduduk untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat di **Gambar 2-19**

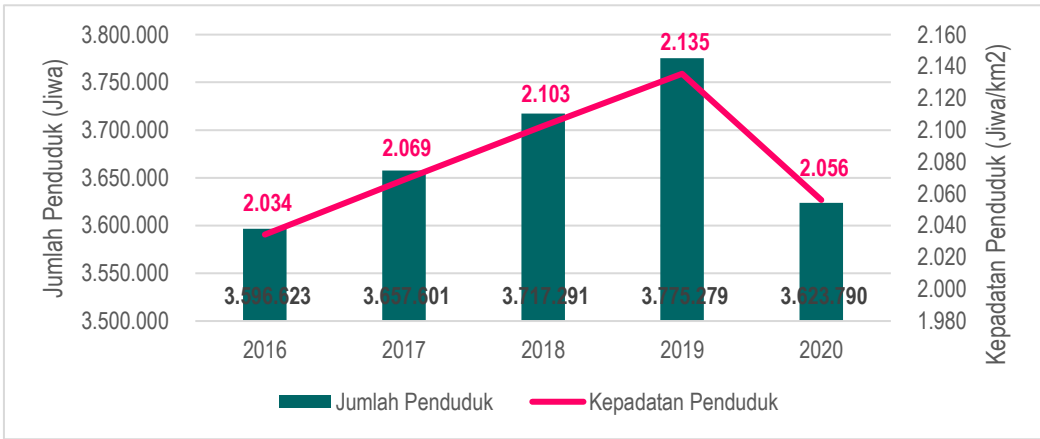


Gambar 2-16
Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021



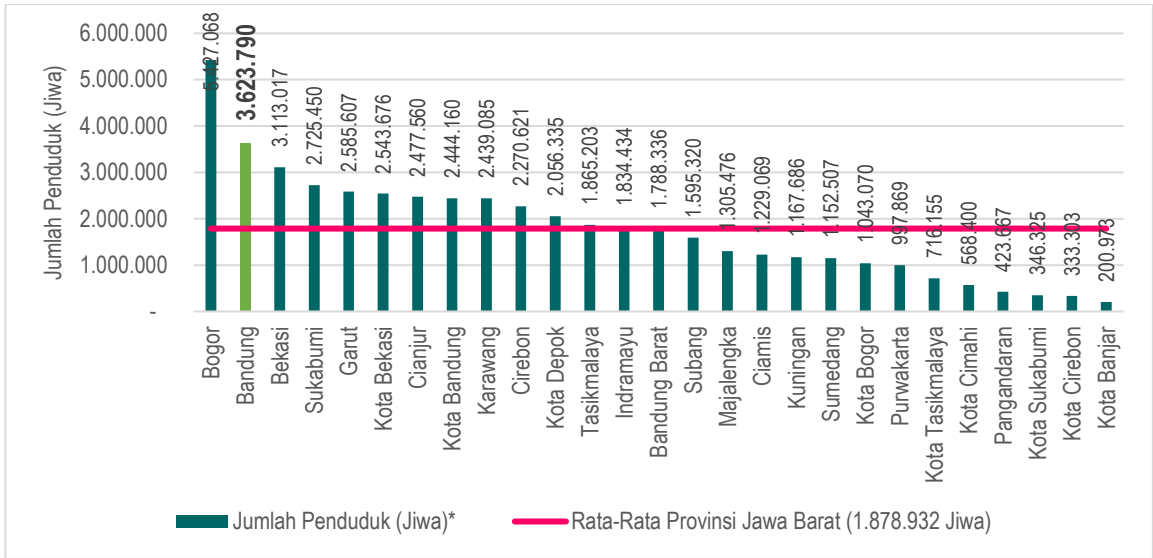
Gambar 2-17
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-18
Grifik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-19
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2020, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 51% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.848.018 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.775.772 jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dengan *dependency ratio* sebesar 46% pada tahun 2020. Dengan demikian, setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bandung menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2020 digambarkan dalam piramida penduduk di **Gambar 2-20**.

Berdasarkan piramida penduduk di **Gambar 2-20**, tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung memiliki bentuk *expansive*, yang ditandai dengan besarnya penduduk dalam kelompok umur

muda terutama penduduk 0-19 tahun, serta sedikitnya jumlah penduduk dalam kelompok usia tua. Bentuk ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Adapun fenomena ini tercerminkan dalam hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS per September 2020. Walau ada perbedaan total jumlah penduduk antara hasil survei dengan Ditjen Dukcapil, secara umum komposisi penduduk Kabupaten Bandung tergolong ke kategori Gen Z, yakni penduduk usia 8-23 tahun, disusul oleh kategori Milenial, yakni penduduk usia 24-39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan.

Bentuk kependudukan yang *expansive* ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi diikuti dengan jumlah kematian yang juga tinggi. Bentuk piramida penduduk seperti ini memberikan informasi bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan.

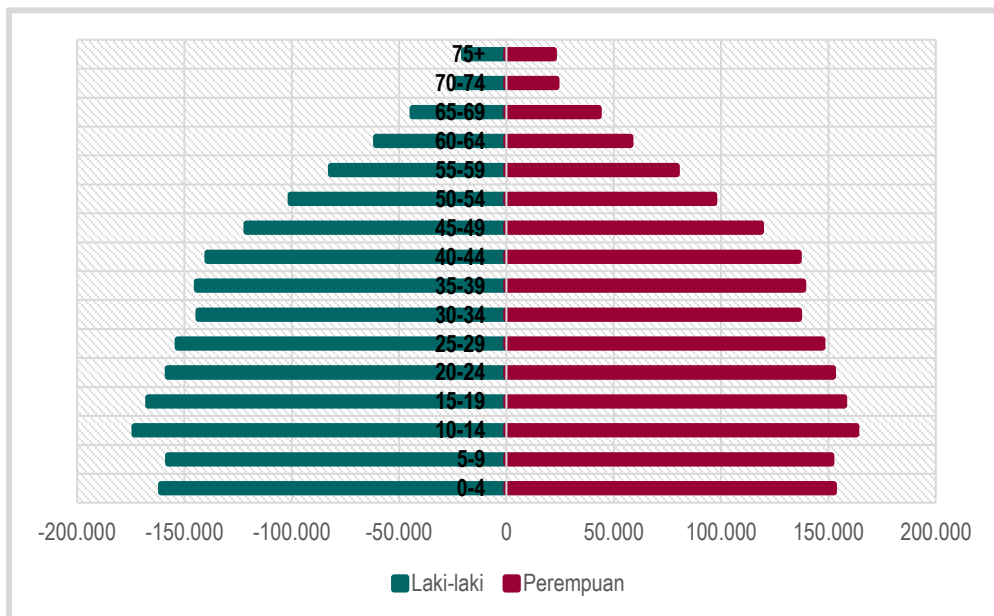


Di tahun 2020, tercatat angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung sebesar 1,49%. Jika ditinjau pertahun, kecenderungan jumlah penduduk Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan positif dengan persentase yang menurun selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Bandung, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung cenderung terkonsentrasi di bagian utara, seperti Kecamatan Baleendah, Rancaekek, Ciparay, dan Cileunyi. Adapun wilayah-wilayah yang berlokasi cenderung jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Cilengkrang,

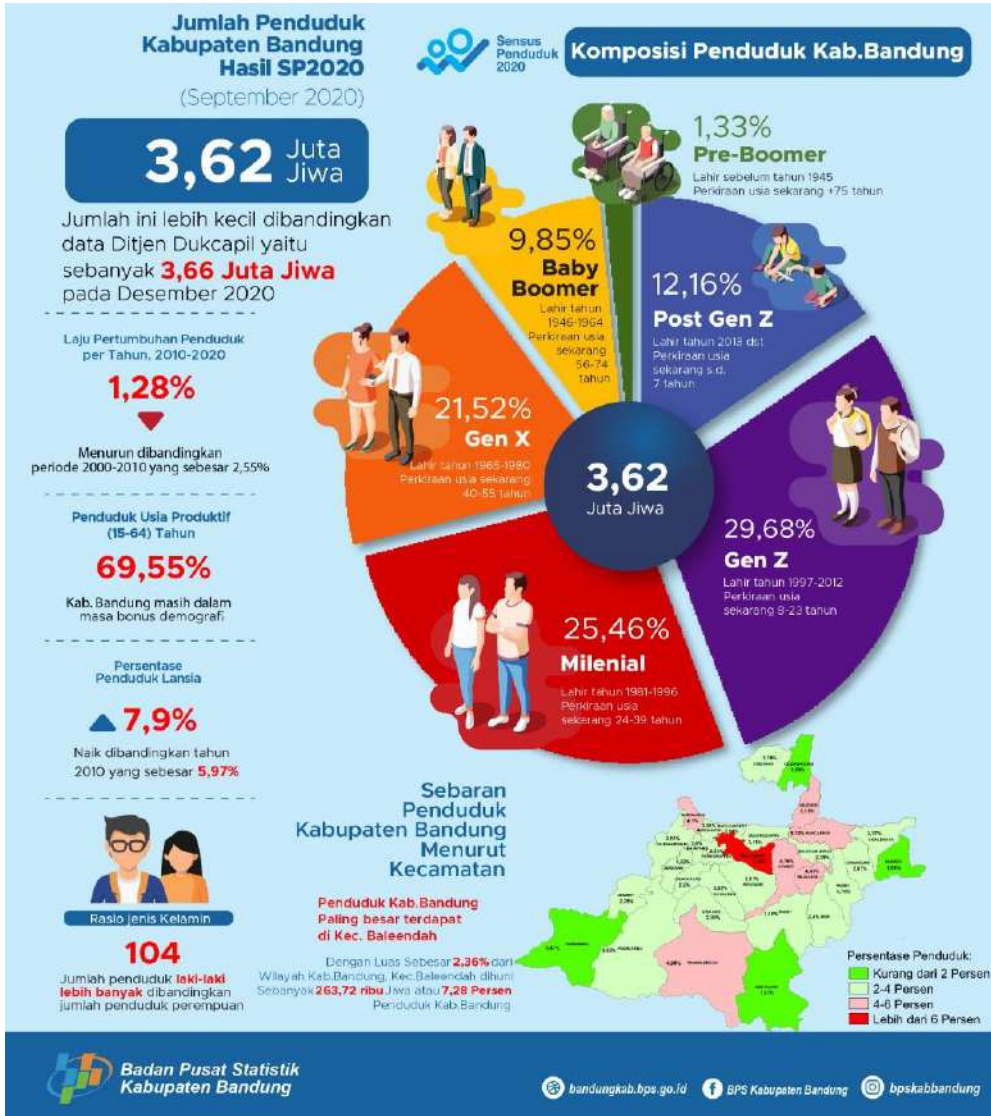
Rancabali, Nagreg, dan Kertasari cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah.

Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu kategori kepadatan penduduk 0-2.500 jiwa/km², 2.500-5.000 jiwa/km², 5.000-7.500 jiwa/km², 7.500-10.000 jiwa/km², dan >10.000 jiwa/km². Distribusi penduduk di Kabupaten Bandung ditampilkan dalam peta berikut. Adapun informasi lengkap mengenai demografi Kabupaten Bandung dijabarkan pada **Tabel 2-9**.

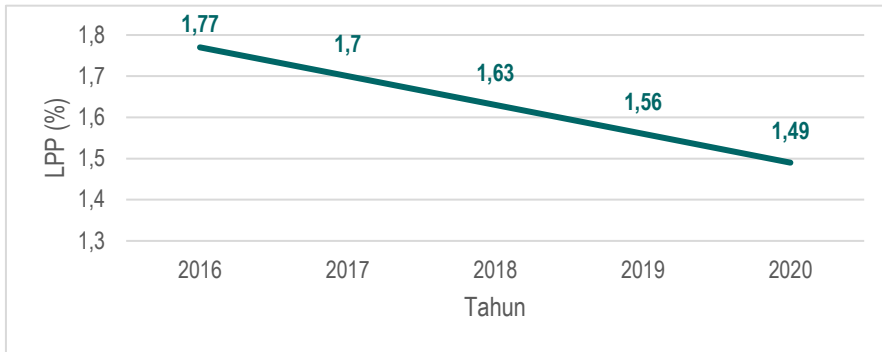


Gambar 2-20
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2020

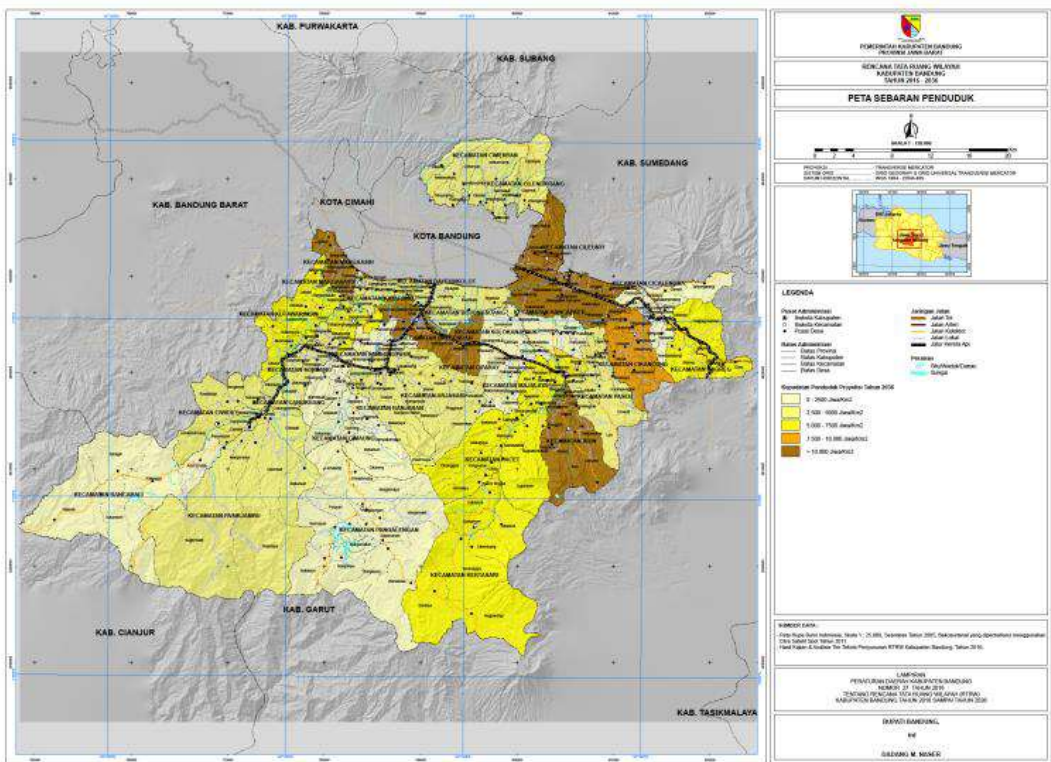
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-21
Komposisi Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2020 Hasil Survei Penduduk 2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-22
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-23
Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



Tabel 2-9
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
2016	Laki- Laki	539.932	1.206.507	77.269	1.823.708	50,71	1,77	51,16	2.041
	Perempuan	524.894	1.172.904	75.117	1.772.915	49,29			
	Jumlah	1.064.823	2.379.411	152.386	3.596.623	100			
	%	29,60	66,16	4,24					
2017	Laki- Laki	532.173	1.239.883	81.744	1.853.615	50,68	1,70	49,86	2.075
	Perempuan	511.069	1.201.094	92.003	1.803.986	49,32			
	Jumlah	1.043.148	2.440.717	173.736	3.657.601	100			
	%	28,52	66,73	4,75					
2018	Laki- Laki	560.770	1.248.682	73.465	1.882.917	50,65	1,63	51,21	2.110
	Perempuan	539.659	1.209.745	84.970	1.834.347	49,35			
	Jumlah	1.100.429	2.458.427	158.435	3.717.291	100			
	%	29,60	66,13	4,26					
2019	Laki- Laki	495.795	1.221.733	99.879	1.911.189	50,62	1,56	47,94	2.143
	Perempuan	465.241	1.185.747	93.284	1.864.090	49,38			
	Jumlah	961.036	2.407.480	193.163	3.775.279	100			
	%	26,98	67,59	5,42					
2020	Laki- Laki	491.899	1.268.998	87.121	1.848.018	51,00	1,49	46,00	2.056
	Perempuan	467.055	1.220.133	88.584	1.775.772	49,00			
	Jumlah	958.954	2.489.131	175.705	3.623.790	100			
	%	26,46	68,69	4,85					

Sumber: BPS Kabupaten Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2021



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penjelasan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum, yang dibagi secara spesifik ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan basis data utama untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah. Dengan menggunakan

komponen PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bandung, baik PDRB ADHB maupun ADHK, cenderung menunjukkan trend pertumbuhan positif namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 7,61% dan 4,60% per tahun. Informasi mendetail mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-10
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PDRB ADHB	PDRB ADHK
2016	Rp94.334,76	Rp68.804,85	10,18	6,34
2017	Rp102.865,60	Rp73.039,45	9,04	6,15
2018	Rp113.185,39	Rp77.603,12	10,03	6,25
2019	Rp124.001,19	Rp82.336,63	9,56	6,10
2020	Rp123.049,25	Rp80.829,31	-0,77	-1,87
RATA-RATA			7,61	4,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

Secara lebih rinci, PDRB di tahun 2020, struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung didominasi oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 52,4%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,83%, dan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,7%. Meski demikian, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di

Kabupaten Bandung pada tahun juga mengalami penurunan sebesar -1,87% atau senilai Rp -1.543,87 M. Hal ini mengindikasikan bahwa volume produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan.

Secara lebih detail, PDRB ADHB tahun 2020 di Kabupaten Bandung berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-11
Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

Lapangan Usaha		PDRB ADHB Tahun 2020	
		PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	9.470,24	7,70
B	Pertambangan dan penggalian	2.165,06	1,76
C	Industri pengolahan	64.476,54	52,40
D	Pengadaan listrik dan gas	125,70	0,10



Lapangan Usaha		PDRB ADHB Tahun 2020	
		PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	%
E	Pengadaan air; Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	47,37	0,04
F	Konstruksi	7.933,86	6,45
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	15.788,43	12,83
H	Transportasi dan pergudangan	4.468,21	3,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.016,97	2,45
J	Informasi dan komunikasi	2.336,67	1,90
K	Jasa keuangan dan asuransi	861,33	0,70
L	Real estat	1.470,25	1,19
M,N	Jasa perusahaan	490,01	0,40
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2.478,30	2,01
P	Jasa pendidikan	4.239,07	3,45
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	1.044,90	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.636,33	2,14
TOTAL		123.049,25	100,00

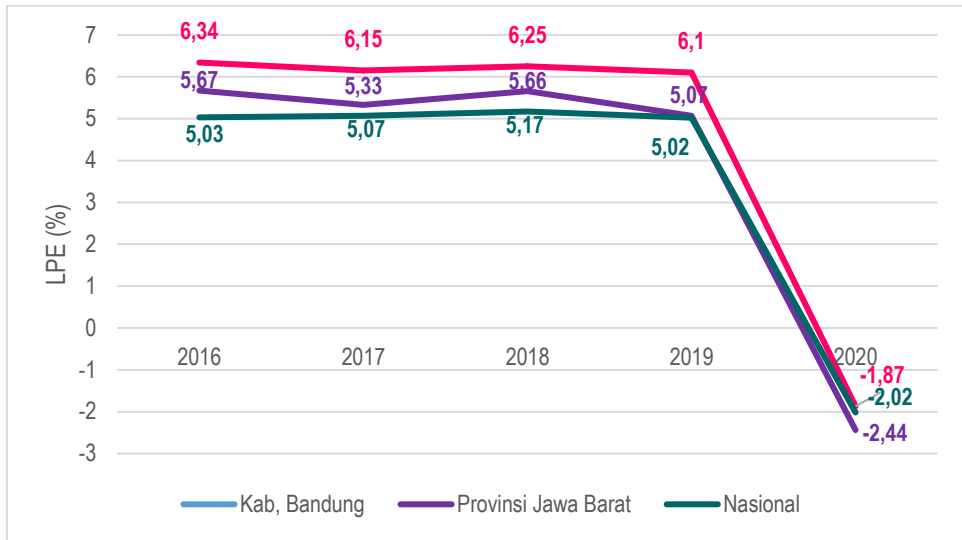
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. LPE Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat disrupsi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Selengkapnya pertumbuhan LPE Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2-24**.

Adapun secara regional, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2020. Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 6,1% di tahun 2019 dan menjadi -1,87% di tahun 2020. Di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, LPE Kabupaten Bandung termasuk kabupaten/kota dengan LPE kisaran menengah. Dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat, yakni bernilai -2,44%, LPE Kabupaten Bandung masih lebih tinggi. Secara lebih rinci, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 2-25**.

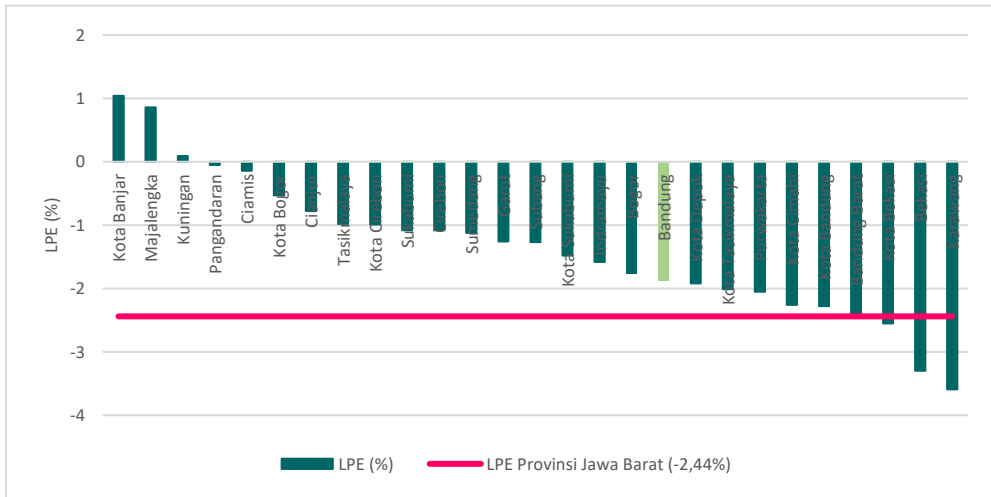
Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2-26**, LPE Kabupaten Bandung termasuk ke kuadran II. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata LPE Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 tinggi namun

pada tahun 2020 mengalami LPE yang negatif. Fenomena tersebut terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, dan juga Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdampak disrupsi pandemi COVID-19, perekonomian Kabupaten Bandung masih mampu tumbuh pada kisaran menengah dalam konteks Provinsi Jawa Barat.



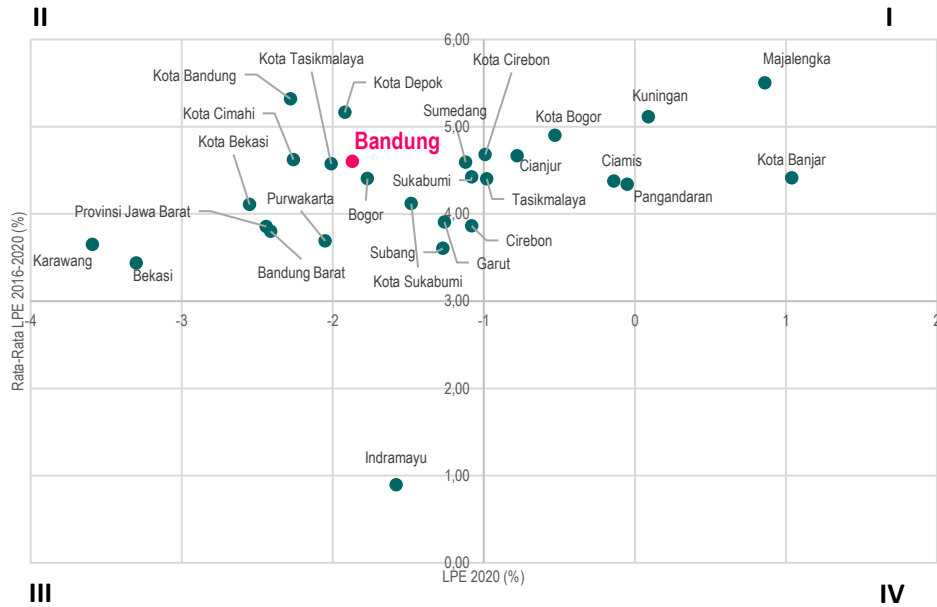
Gambar 2-24
Grafik Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-25
Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021



Gambar 2-26

Analisis Quadran Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dengan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Tabel 2-12

Nilai Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020

No.	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.071.860,87	7,37	5.356.849,97	7,33	5.431.870,55	7,00	5.485.594,10	6,66	5.515.490,00	6,82
B	Pertambangan dan Penggalian	1.649.759,73	2,40	1.638.146,71	2,24	1.730.320,62	2,23	1.667.545,77	2,03	1.709.490,00	2,11
C	Industri Pengolahan	34.952.831,77	50,80	36.963.264,57	50,61	39.538.734,83	50,95	42.613.968,44	51,76	41.305.860,00	51,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93.493,38	0,14	95.645,04	0,13	94.024,00	0,12	94.879,15	0,12	90.000,00	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.461,10	0,03	24.946,20	0,03	26.607,60	0,03	27.687,87	0,03	30.520,00	0,04
F	Konstruksi	4.439.967,50	6,45	4.912.750,33	6,73	5.344.089,80	6,89	5.697.335,40	6,92	5.717.310,00	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.676.959,23	14,06	10.222.299,05	14,00	10.744.786,35	13,85	11.123.995,43	13,51	10.590.270,00	13,10
H	Transportasi dan Pergudangan	2.567.209,96	3,73	2.705.210,54	3,70	2.820.290,09	3,63	2.889.939,77	3,51	2.798.740,00	3,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.660.985,60	2,41	1.767.695,93	2,42	1.894.005,25	2,44	2.029.304,16	2,46	1.965.590,00	2,43
J	Informasi dan Komunikasi	1.455.410,18	2,12	1.644.417,31	2,25	1.802.980,28	2,32	1.994.217,92	2,42	2.464.990,00	3,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	510.853,57	0,74	530.816,89	0,73	557.470,40	0,72	573.700,73	0,70	606.530,00	0,75
L	Real Estate	833.582,01	1,21	918.273,94	1,26	1.014.600,90	1,31	1.113.273,70	1,35	1.109.150,00	1,37
M,N	Jasa Perusahaan	317.112,90	0,46	343.401,56	0,47	372.635,00	0,48	405.352,35	0,49	347.520,00	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.501.702,57	2,18	1.515.994,71	2,08	1.544.143,66	1,99	1.593.401,84	1,94	1.491.420,00	1,85
P	Jasa Pendidikan	2.121.550,61	3,08	2.289.577,42	3,13	2.432.676,00	3,13	2.587.150,93	3,14	2.697.740,00	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	537.487,72	0,78	599.943,79	0,82	648.824,81	0,84	708.386,93	0,86	684.260,00	0,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.390.622,14	2,02	1.510.219,82	2,07	1.605.061,60	2,07	1.730.898,43	2,10	1.704.420,00	2,11
	Total PDRB	68.804.850,82	100	73.039.453,78	100	77.603.121,75	100	82.336.632,90	100	80.829.310,00	100

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 2-13
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.552.775,31	8,01	8.180.369,34	7,95	8.872.311,16	7,84	9.333.834,61	7,53	9.470.240,00	7,70
B	Pertambangan dan Penggalan	2.064.735,96	2,19	2.190.035,00	2,13	2.432.718,14	2,15	2.397.476,75	1,93	2.165.060,00	1,76
C	Industri Pengolahan	49.472.413,43	52,44	53.410.543,63	51,92	58.933.668,75	52,07	65.729.950,47	53,01	64.476.540,00	52,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	112.330,48	0,12	132.910,83	0,13	131.934,40	0,12	136.390,21	0,11	125.700,00	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.822,58	0,03	34.433,56	0,03	39.623,58	0,04	42.749,65	0,03	47.370,00	0,04
F	Konstruksi	5.442.231,75	5,77	6.289.850,67	6,11	7.175.985,00	6,34	7.908.626,05	6,38	7.933.860,00	6,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.805.362,54	13,57	13.878.206,26	13,49	15.038.235,98	13,29	16.046.953,26	12,94	15.788.430,00	12,83
H	Transportasi dan Pergudangan	3.670.966,64	3,89	3.997.832,13	3,89	4.236.273,41	3,74	4.425.459,67	3,57	4.468.210,00	3,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.263.914,96	2,40	2.504.799,56	2,44	2.766.077,68	2,44	3.034.620,33	2,45	3.016.970,00	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	1.383.095,03	1,47	1.579.867,97	1,54	1.723.220,46	1,52	1.907.713,58	1,54	2.336.670,00	1,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	649.279,15	0,69	706.113,74	0,69	777.628,75	0,69	816.705,02	0,66	861.330,00	0,70
L	Real Estate	1.013.291,49	1,07	1.135.597,98	1,10	1.273.919,50	1,13	1.461.971,32	1,18	1.470.250,00	1,19
M,N	Jasa Perusahaan	401.389,56	0,43	442.542,06	0,43	498.895,60	0,44	559.739,37	0,45	490.010,00	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.126.428,65	2,25	2.272.245,76	2,21	2.439.240,20	2,16	2.639.099,44	2,13	2.478.300,00	2,01
P	Jasa	2.741.260,19	2,91	3.125.707,02	3,04	3.561.840,80	3,15	3.877.793,71	3,13	4.239.070,00	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	726.419,28	0,77	837.260,66	0,81	926.484,37	0,82	1.059.887,04	0,85	1.044.900,00	0,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.880.047,18	1,99	2.147.281,29	2,09	2.357.330,48	2,08	2.622.222,76	2,11	2.636.330,00	2,14
	Total PDRB	94.334.764,17	100	102.865.597,44	100	113.185.388,25	100	124.001.193,24	100	123.049.250,00	100

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 2-14
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

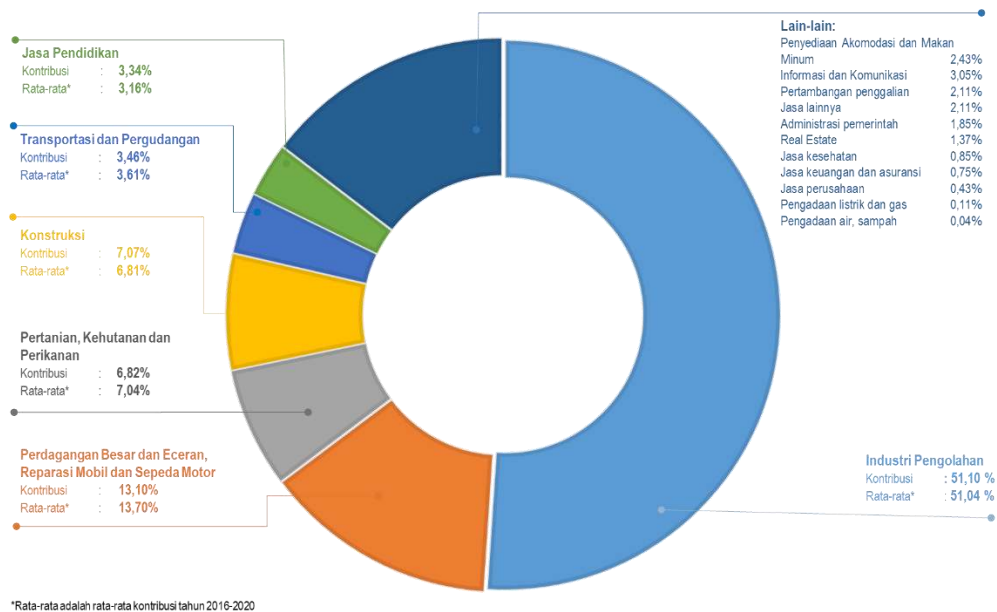
No.	Sektor	Tahun								Rata-rata Pertumbuhan	
		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020			
		HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,93%	0,67%	-0,50%	-0,67%	-4,59%	-1,43%	-4,79%	-3,97%	2,42%	2,25%
B	Pertambangan dan Pengecilan	2,53%	0,32%	-6,46%	-2,73%	-0,59%	0,95%	-9,16%	-10,04%	4,43%	-9,00%
C	Industri Pengolahan	-0,38%	0,54%	-0,38%	-0,99%	0,82%	0,28%	1,44%	1,80%	-1,26%	-1,15%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,55%	6,91%	-3,63%	8,51%	-7,48%	-9,79%	-4,89%	-5,64%	-3,38%	-7,12%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,68%	5,18%	0,17%	9,56%	0,38%	4,58%	-1,92%	-1,52%	12,30%	11,67%
F	Konstruksi	1,12%	-0,47%	4,23%	5,99%	2,38%	3,69%	0,49%	0,60%	2,22%	1,10%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,42%	-2,05%	-0,49%	-0,61%	-1,54%	-1,52%	-1,95%	-2,60%	-3,02%	-0,85%
H	Transportasi dan Pergudangan	0,37%	-1,06%	-0,73%	-0,13%	-1,88%	-3,70%	-3,41%	-4,65%	-1,35%	1,75%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15%	-1,40%	0,25%	1,46%	0,84%	0,36%	0,99%	0,14%	-1,33%	0,19%
J	Informasi dan Komunikasi	7,50%	3,90%	6,44%	4,75%	3,19%	-0,87%	4,26%	1,05%	25,91%	23,43%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25%	3,66%	-2,12%	-0,27%	-1,16%	0,09%	-3,00%	-4,14%	7,69%	6,28%
L	Real Estate	2,18%	-0,07%	3,77%	2,78%	3,99%	1,95%	3,42%	4,75%	1,49%	1,34%
M,N	Jasa Perusahaan	2,28%	0,90%	2,01%	1,11%	2,12%	2,46%	2,53%	2,41%	-12,67%	-11,78%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,22%	-2,89%	-4,90%	-2,00%	-4,14%	-2,44%	-2,74%	-1,24%	-4,65%	-5,37%
P	Jasa Pendidikan	0,71%	-1,80%	1,66%	4,57%	-0,01%	3,56%	0,24%	-0,63%	6,22%	10,16%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,57%	1,24%	5,15%	5,70%	1,78%	0,57%	2,91%	4,42%	-1,60%	-0,65%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,37%	3,36%	2,30%	4,74%	0,02%	-0,23%	1,65%	1,53%	0,31%	1,32%

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Ditinjau dari nilai rata-rata kontribusi sektor dan PDRB Kabupaten Bandung, sebagaimana diresume pada **Tabel 2-10**, rata-rata kontribusi sektor PDRB paling besar dari tahun 2016-2020 ialah sektor industri pengolahan (51,11%); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,65%); serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (7,04%). Kondisi tersebut juga tercermin PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sektor ekonomi dengan kontribusi paling besar, dengan angka di atas rata-rata kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung (5,88%), ialah sektor industri pengolahan yang mencapai 51,1%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,1%; sektor konstruksi sebesar 7%; serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,82%.

Berdasarkan **Tabel 2-14**, tampak bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan kontribusi paling tinggi untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Adapun untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan kontribusi tertinggi adalah Sektor Informasi dan Komunikasi. Selain itu, sektor terendah untuk PDRB ADHB adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan untuk PDRB ADHK, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki nilai rata-rata persentase pertumbuhan paling rendah. Hal ini terjadi karena pada rentang tahun 2016-2020 sektor ini terus mengalami penurunan sehingga berdampak pada rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan.



Gambar 2-27
Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung Tahun 2020

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-15
Rata-Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hk (%)	Hb (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,88%	-0,63%
B	Pertambangan dan Penggalan	-1,85%	-4,10%
C	Industri Pengolahan	0,05%	0,10%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,18%	-1,43%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85%	5,89%
F	Konstruksi	2,09%	2,18%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,49%	-1,53%
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,40%	-1,56%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,18%	0,15%
J	Informasi dan Komunikasi	9,46%	6,45%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,13%	1,12%
L	Real Estate	2,97%	2,15%
M,N	Jasa Perusahaan	-0,74%	-0,98%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,93%	-2,79%
P	Jasa Pendidikan	1,77%	3,17%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,76%	2,25%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,33%	2,14%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Indikator PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per penduduk suatu daerah. Berdasarkan **Tabel 2-15**, dapat diketahui bahwa nilai PDRB per kapita di Kabupaten Bandung mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB per kapita tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2020, yakni -2,22% untuk PDRB per kapita ADHB dan -3,27% untuk PDRB per kapita ADHK.

Pada konteks yang lebih luas, dapat dilihat dari tabel yang sama bahwa PDRB per kapita Kabupaten Bandung masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yang masing-masing mencapai Rp 14.639.157,88, Rp 25.310.591,99, dan Rp 39.556.580,00. Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat bahwa secara umum

banyak kabupaten yang memiliki PDRB per kapita ADHK yang di bawah provinsi, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi dan termasuk Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi seiring pula dengan jumlah penduduk kabupaten yang semakin tinggi. Secara lebih rinci, pemaparan PDRB per kapita pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat di **Gambar 2-28**.

Meskipun gambaran ekonomi agregat Kabupaten Bandung dapat dikatakan cukup baik, relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan kondisi pandemi COVID-19, angka PDRB ADHK per kapita Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah 21,09 juta rupiah. Angka ini berada pada peringkat ke-25 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Angka tersebut juga berada di bawah nilai rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Artinya, kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung per kapita secara keseluruhan masih relatif rendah.

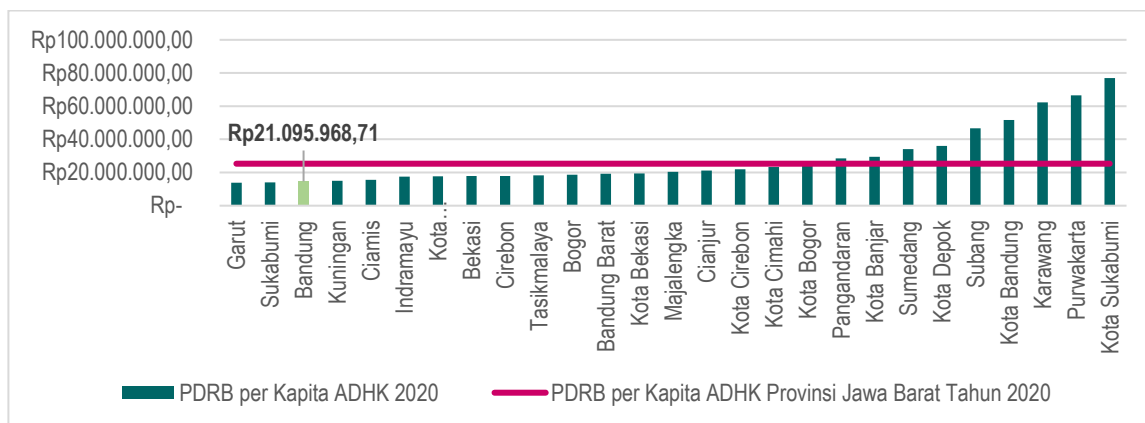
Tabel 2-16

PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB ADHB Per Kapita	PDRB ADHK Per Kapita	Laju Pertumbuhan (%)	
				PDRB ADHB Per Kapita	PDRB ADHK Per Kapita
2016	3.596.623	Rp26.228.705,14	Rp19.130.403,94	8,26%	4,49%
2017	3.657.601	Rp28.123.788,64	Rp19.969.224,03	7,23%	4,38%
2018	3.717.291	Rp30.474.122,31	Rp20.877.714,63	8,36%	4,55%
2019	3.775.279	Rp32.845.570,68	Rp21.809.416,71	7,78%	4,46%
2020	3.623.790	Rp32.115.121,45	Rp21.095.968,71	-2,22%	-3,27%

Tahun	PDRB ADHB Per Kapita		PDRB ADHK Per Kapita	
	Provinsi Jawa Barat	Nasional	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	Rp34.893.620,56	Rp47.937.722,50	Rp26.923.505,52	Rp36.468.616,38
2017	Rp37.223.110,89	Rp51.891.171,86	Rp27.970.918,46	Rp37.851.365,21
2018	Rp40.305.586,71	Rp55.990.395,65	Rp29.161.391,20	Rp39.338.850,62
2019	Rp43.092.045,33	Rp59.065.437,01	Rp30.247.470,83	Rp40.844.017,67
2020	Rp42.493.747,25	Rp56.938.720,00	Rp25.310.591,99	Rp39.556.580,00

Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-28

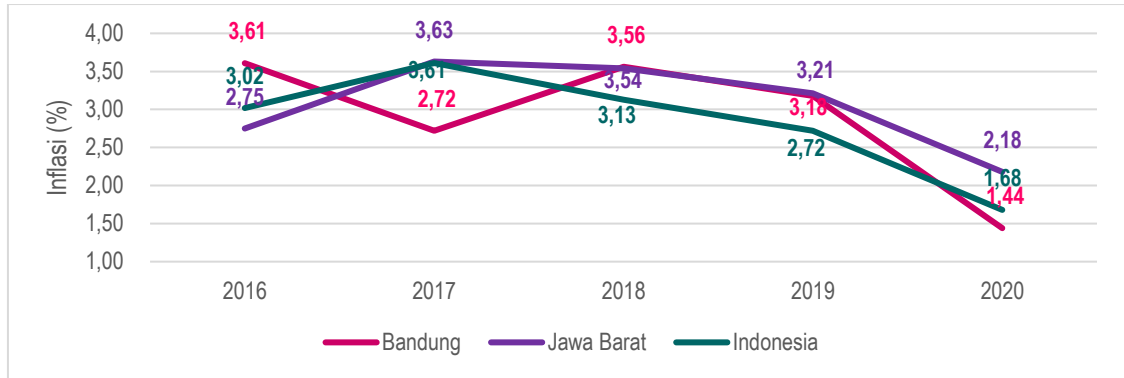
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

2.2.1.2 Laju Inflasi

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir inflasi di Kabupaten Bandung cenderung menurun dengan rata-rata nilai inflasi mencapai 2,9%. Hal ini dapat berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menjaga harga komoditas sehingga terjangkau maupun bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama pada saat pandemi COVID-19

sehingga perputaran uang di Kabupaten Bandung turut menurun. Dapat dilihat di **Gambar 2-28** bahwa pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Bandung tercatat sebesar 1,44% sehingga termasuk ke dalam klasifikasi inflasi ringan. Adapun tingkat inflasi di Kabupaten Bandung cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



Gambar 2-29
Grafik Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2021

2.2.1.3 Kemiskinan

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks

kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 adalah sebanyak 263.600 jiwa, hal ini menunjukkan angka yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 223.210 jiwa di tahun 2019.

Tabel 2-17
Indikator Kemiskinan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Lingkup Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Kab. Bandung	272,65	268,02	246,13	223,21	263,60
	Prov. Jabar	4.224,30	4.168,40	3.615,80	3.399,20	3.920,23
	Nasional	28.005,39	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02
Persentase Penduduk Miskin (%)	Kab. Bandung	7,61	7,36	6,65	5,94	6,91
	Prov. Jabar	8,95	8,71	7,45	6,91	7,88
	Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Kab. Bandung	1	1,12	0,87	1,04	0,92
	Prov. Jabar	1,17	1,2	1,13	1,03	1,13
	Nasional	1,19	1,24	1,17	1,05	1,61
Indeks Keparahannya Kemiskinan	Kab. Bandung	0,18	0,26	0,20	0,28	0,17
	Prov. Jabar	0,37	0,37	0,34	0,24	0,23
	Nasional	0,44	0,46	0,41	0,36	0,47
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Kab. Bandung	297.483	310.569	334.929	345.177	367.403
	Prov. Jabar	324.992	344.427	367.755	386.198	410.988
	Nasional	260.469	274.544	294.806	313.232	335.793

Sumber: BPS, 2021

Sebagaimana disajikan pada **Tabel 2-17**, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai 17,93%. Peningkatan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk

miskin juga terjadi di level Provinsi maupun Nasional, yakni sebesar 15,33% dan 5,09%. Meski demikian, terdapat penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bandung, yakni mencapai 0,92 poin atau

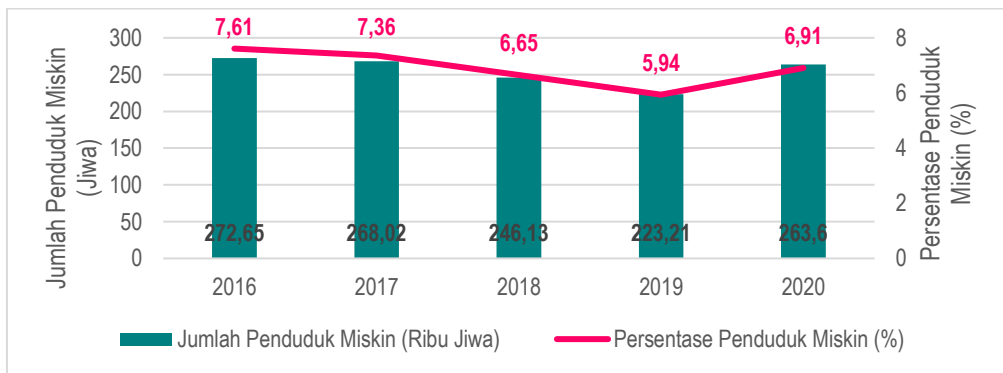
terjadi penurunan sebesar 11,54%. Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang justru mengalami peningkatan, yakni masing-masing mencapai 1,13 poin dan 1,61 poin.

Jika dilihat dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, terdapat pola perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang serupa yang terjadi di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yakni bahwa pada tahun 2016-2019 jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin cenderung menurun namun kembali meningkat di tahun 2020. Hal ini dapat diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Meski demikian, nilai absolut Kabupaten Bandung untuk kelima indikator kemiskinan tersebut mayoritas berada di bawah nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan dalam **Gambar 2-31**.

Selain melihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, kemiskinan di Kabupaten Bandung dapat dicermati melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan

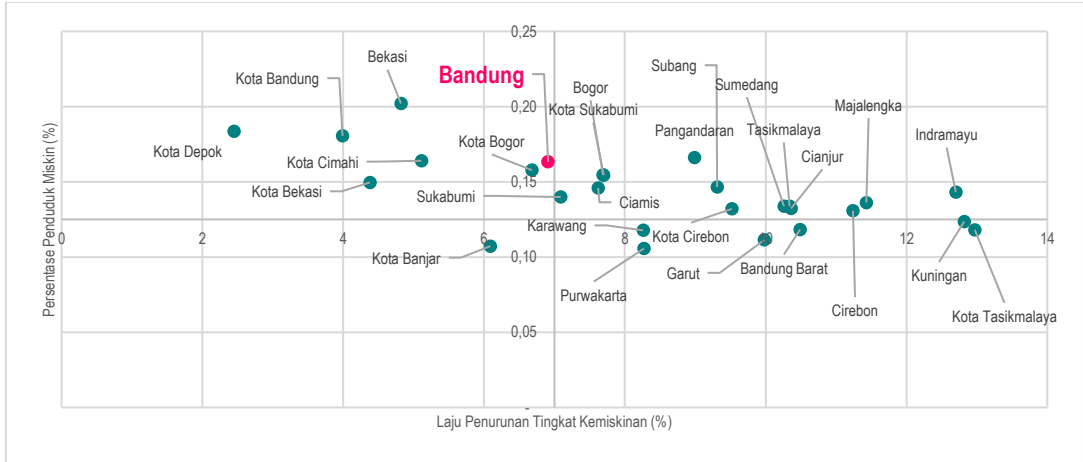
Kemiskinan. Mengutip dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Secara lebih detail, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bandung sebesar adalah 0,92 di tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, Kabupaten Bandung memiliki nilai indeks yang paling rendah dan nasional tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk Kabupaten Bandung terhadap garis kemiskinannya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



Gambar 2-30
Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

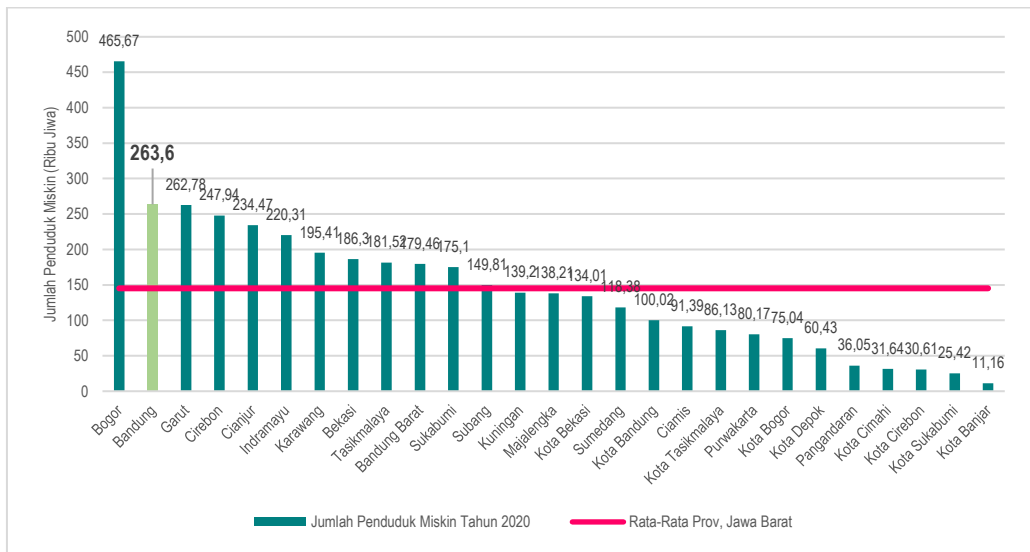
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-31

Analisis Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

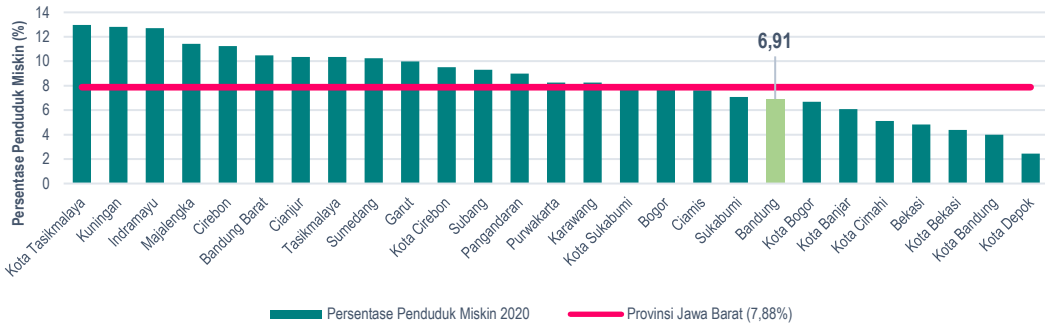
Sumber: BPS, 2021



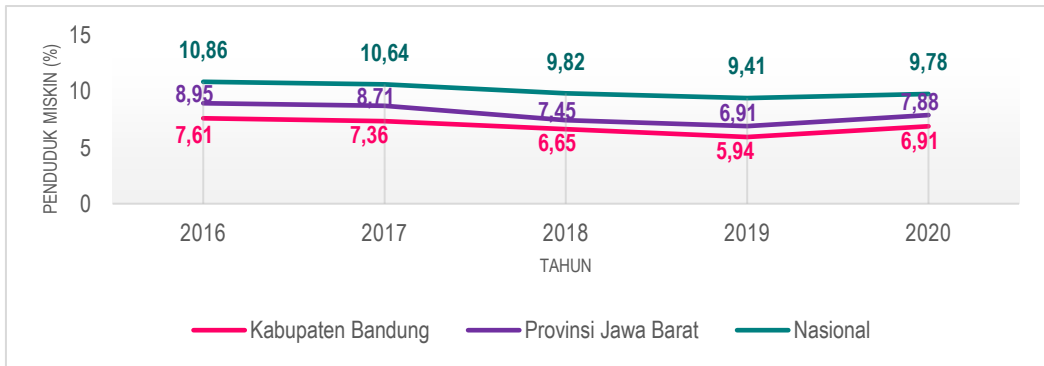
Gambar 2-32

Grafik Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

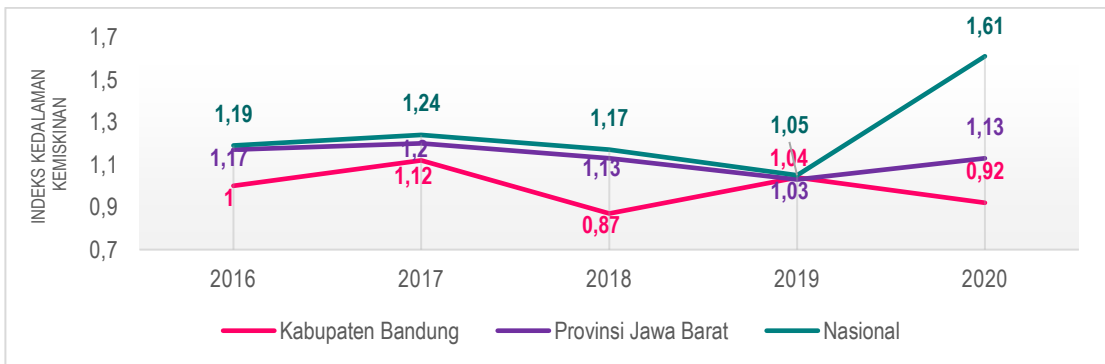
Sumber: BPS, 2021



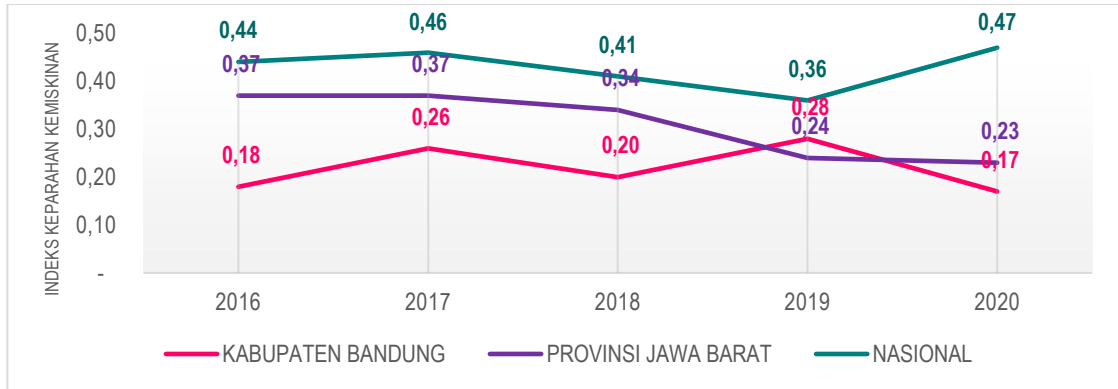
Gambar 2-33
Grafik Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-34
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-35
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-36

Grafik Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2021

Selain itu, Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Bandung cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2020, nilai Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,17 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara penduduk miskin semakin rendah. Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh disrupsi pandemi COVID-19 yang berdampak secara merata di kalangan penduduk miskin. Pada konteks yang lebih luas, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung cenderung berada di bawah nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2-35**.

2.2.1.4 Ketimpangan Penduduk

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah belum bisa menjadi acuan untuk meninjau pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Dibutuhkan pengukuran lain yang dapat menunjukkan kesejahteraan ekonomi yang merata seperti gini ratio. Gini ratio adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan suatu daerah.

Nilai gini ratio di Kabupaten Bandung menunjukkan fluktuasi pada tahun 2016-2020. Apabila dilihat dari perbandingan perubahan gini ratio dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, gini ratio di Kabupaten Bandung memiliki pola perubahan yang hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016 tingkat perubahan gini ratio di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat sama-sama menurun kemudian meningkat pada tahun selanjutnya, sedangkan secara nasional gini rasio cenderung menurun. Gambaran terkait perbandingan perubahan gini ratio antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2-18**

Pada konteks regional, gini ratio Kabupaten Bandung menempati peringkat 3 tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, yakni senilai 0,414, setelah Kabupaten Purwakarta dan Kota Cirebon. Selengkapnya, dapat dilihat di **Gambar 2-37**.

Tabel 2-18

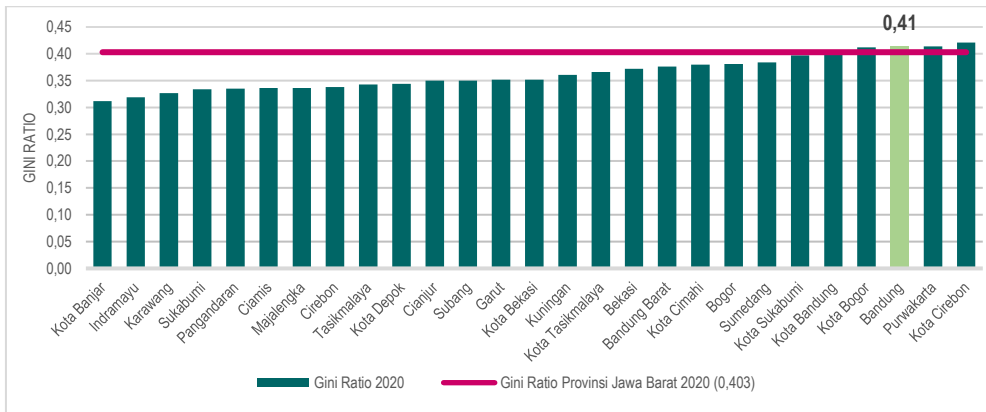
Gini Ratio Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Gini Ratio		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	0,399	0,402	0,394



Tahun	Gini Ratio		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2017	0,390	0,393	0,391
2018	0,420	0,405	0,384
2019	0,355	0,402	0,382
2020	0,414	0,403	0,381

Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-37
Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: BPS, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator umum yang dapat mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, meliputi pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Sebagai akumulasi yang mewakili ketiga aspek ini, IPM dengan metode perhitungan baru diukur sebagai komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59% per tahun. Tahun 2016-2017, IPM Kabupaten Bandung meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 0,466% dari semula 70,69 di tahun 2016 menjadi 71,02 di tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, IPM Kabupaten Bandung berada pada kisaran 71,75, tumbuh 1,03%

dari angka tahun sebelumnya. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Bandung tercatat sebesar 72,41, sedangkan pada tahun 2020 nilai IPM yang tercapai adalah sebesar 72,39. Adanya tren yang cenderung meningkat untuk IPM Kabupaten Bandung di lima tahun terakhir, meski menurun di tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan sosial penduduk.

Perbandingan antara IPM di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM di Kabupaten Bandung sudah baik dikarenakan angka IPM Kabupaten Bandung selalu berada di posisi atas dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat dan IPM Nasional. Pada tahun 2020, Kabupaten Bandung berada pada angka IPM sebesar 72,39. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,09 dan juga lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94. Meski demikian, terdapat penurunan IPM Kabupaten Bandung sebesar 0,02. Rincian IPM



Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut (**Tabel 2-19**).

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung termasuk di antara kabupaten/kota yang memiliki IPM yang tinggi. Adapun di tahun 2020, meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Bandung melebihi IPM Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, jika ditinjau dari segi laju pertumbuhan IPM, Kabupaten Bandung cenderung berada di posisi bawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Fenomena tersebut pun dialami oleh sebagian besar kota di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kota Depok, sebagaimana dapat dilihat di kuadran IV pada **Gambar 2-39**.

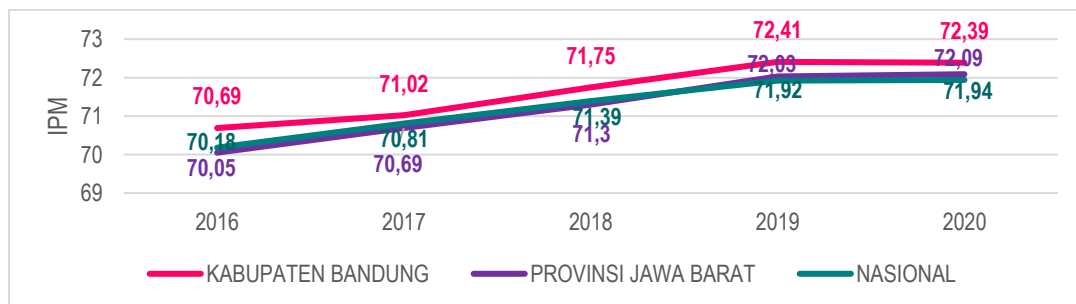
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam mendukung pertumbuhan IPM Kabupaten

Bandung, diperlukan pemahaman mengenai komponen-komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran. Ditinjau per komponen penyusunnya, kenaikan nilai IPM Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir terutama didukung oleh kenaikan nilai Indeks Pengeluaran dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,34% per tahun. Adapun untuk komponen Indeks Pendidikan, pertumbuhan dalam lima tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89% per tahun. Sedangkan untuk Indeks Kesehatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cenderung rendah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19% per tahun. Terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam meningkatkan nilai IPM Kabupaten Bandung berasal dari sektor pendidikan. Perkembangan komponen IPM Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Gambar 2-40**.

Tabel 2-19
IPM Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020

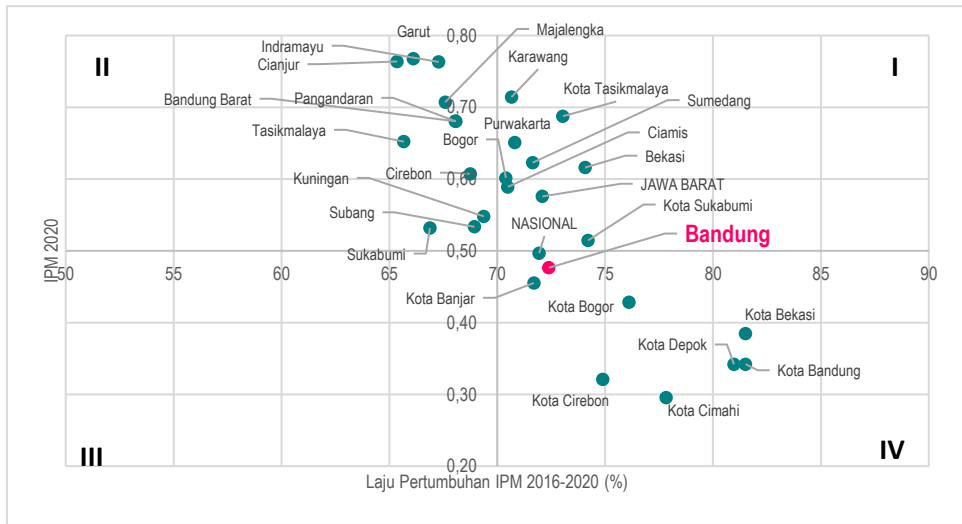
Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	70,69	70,05	70,18
2017	71,02	70,69	70,81
2018	71,75	71,30	71,39
2019	72,41	72,03	71,92
2020	72,39	72,09	71,94

Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-38
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

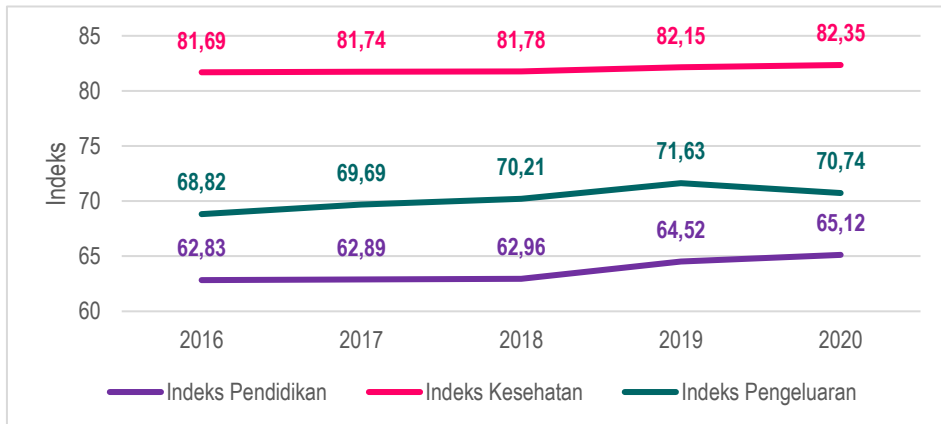
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-39

Analisis Kuadran Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 dan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021



Gambar 2-40

Grafik Capaian Komponen IPM Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

2.2.2.1 Indeks Pendidikan

Dalam pengukuran indeks pendidikan, pertumbuhan nilai indeks ditentukan oleh beberapa variabel. Pada perhitungan metode baru, terjadi perubahan pada

beberapa variabel seperti perubahan indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Har

apan Lama Sekolah (HLS), sehingga komponen indikator untuk menentukan indeks pendidikan menjadi HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penggunaan kedua indikator ini mampu menunjukkan gambaran yang lebih relevan dalam aspek pendidikan dan perubahan yang terjadi.

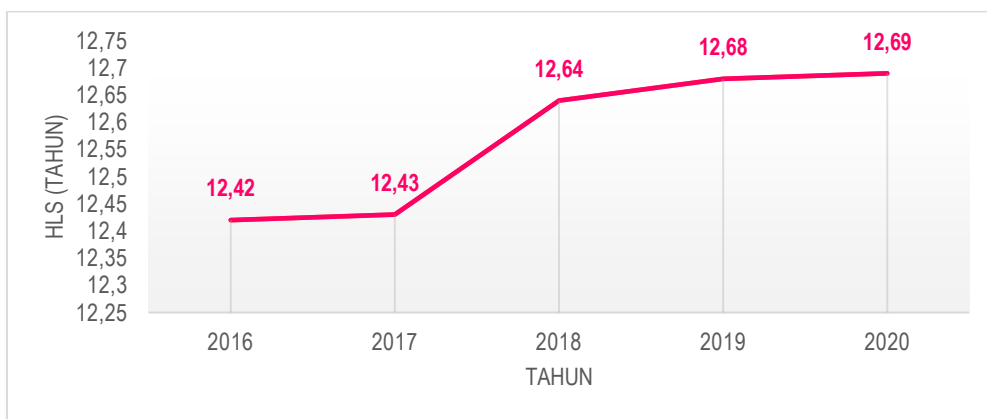
2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama sekolah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 yakni sebesar 12,69 tahun. Harapan lama sekolah merupakan suatu indikator yang menunjukkan lamanya sekolah dalam satuan tahun yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada usia tertentu di suatu daerah pada masa yang akan datang. Hasil perhitungan ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di suatu daerah. **Gambar 2-41** menunjukkan gambaran

peningkatan pencapaian harapan lama sekolah Kabupaten Bandung dari tahun 2016 hingga 2020.

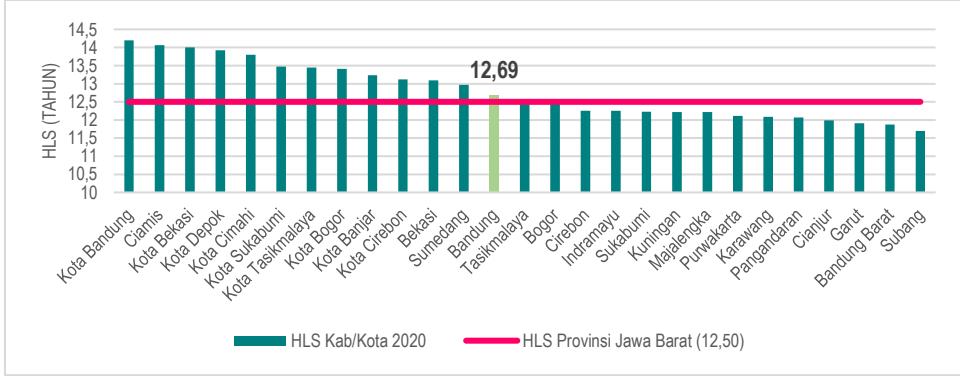
2.2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui jumlah tahun rata-rata yang digunakan oleh penduduk di suatu daerah dalam menjalani pendidikan formal. Nilai rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat. Di Kabupaten Bandung, pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8,96. Meskipun sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi angka ini masih berada di bawah ketentuan wajar 12 tahun. Dengan demikian, realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung sudah tercapai namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai ketentuan wajar 12 tahun

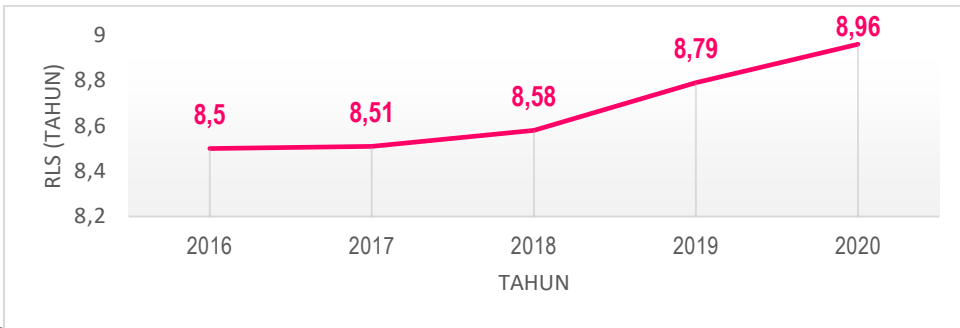


Gambar 2-41
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

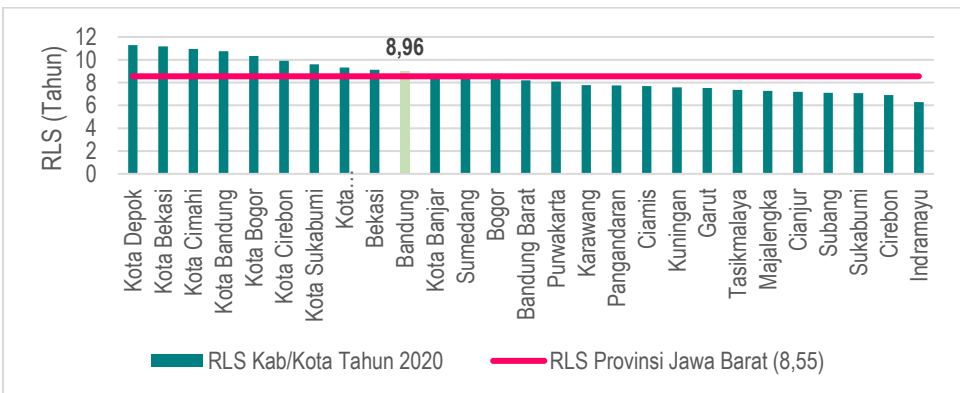
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-42
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021



Gambar 2-43
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-44
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
Sumber: BPS, 2021

2.2.2.4 Indeks Kesehatan

Kesejahteraan sosial penduduk salah satunya tercermin dari nilai indeks kesehatan. Variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan hasil evaluasi, selama kurun waktu tahun 2016-2020, nilai indeks kesehatan Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Demikian pula halnya dengan capaian angka harapan hidup yang terus mengalami peningkatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir semakin membaik.

2.2.2.5 Indeks Pengeluaran

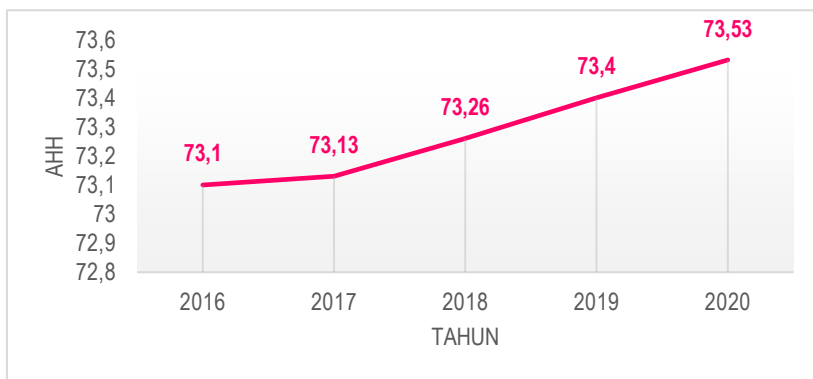
Tinggi rendahnya daya beli penduduk menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, daya beli penduduk Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan, namun menurun di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesejahteraan sosial penduduk yang semakin membaik namun daya beli masyarakat menurun pada saat pandemi COVID-19. Perkembangan daya beli penduduk Kabupaten Bandung disajikan dalam **Gambar 2-47**

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari dua fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan pemerintah wajib dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

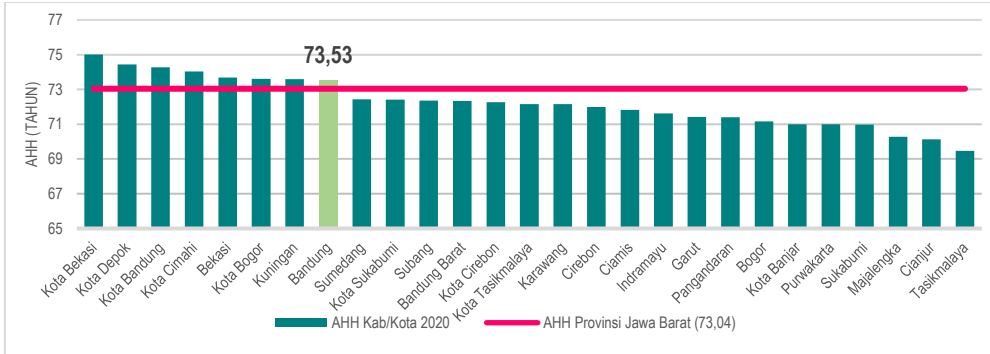
Layanan urusan wajib terbagi menjadi dua, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non dasar).



Gambar 2-45

Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

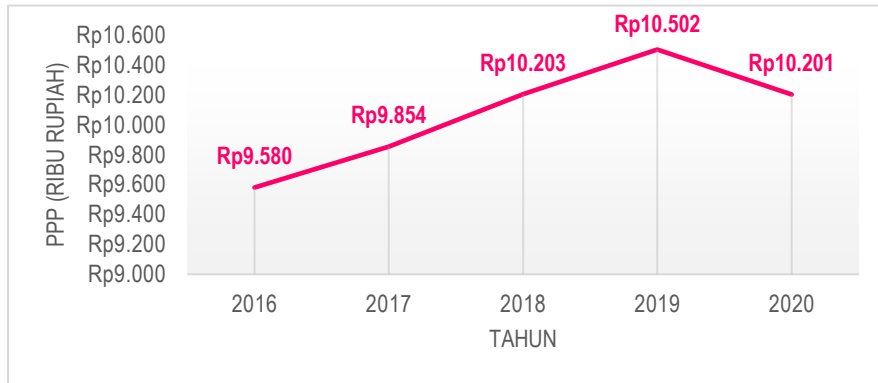
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-46

Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021



Gambar 2-47

Grafik Perkembangan *Purchasing Power Parity* Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2021

2.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar meliputi: 1) urusan pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) sosial. Urusan-urusan ini merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan untuk penduduk.

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pemenuhan layanan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan tercermin

salah satunya dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah menunjukkan seberapa besar anak di usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada level SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat digunakan rentang usia 7-12 tahun, sementara untuk



tingkat pendidikan SMP/ sederajat digunakan rentang usia 13-15 tahun.

Secara garis besar, APS dikelompokkan ke dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan rasio antara jumlah siswa dalam rentang usia pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia tersebut. Sedangkan APK menunjukkan rasio antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan tertentu. Sehingga berbeda dengan APM, dalam perhitungan APK jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang usia, sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100%.

Naik turunnya nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah

yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

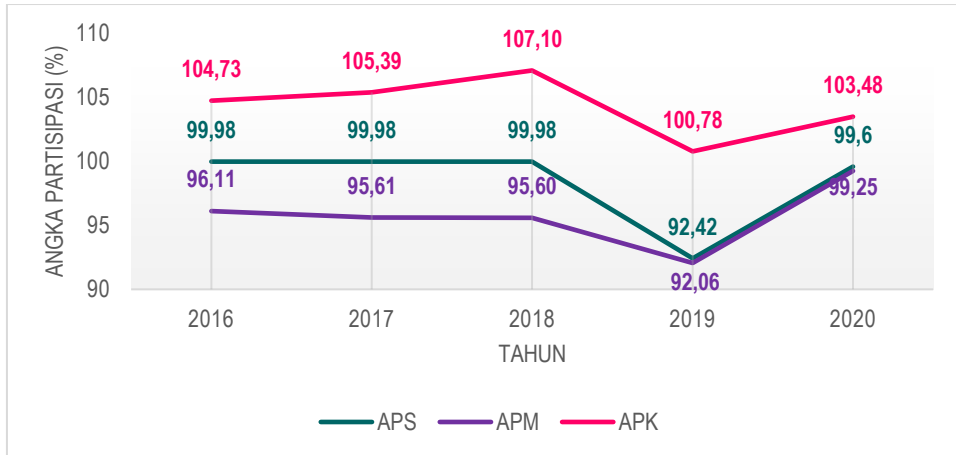
Secara garis besar, APS tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di Kabupaten Bandung sudah tergolong baik dengan nilai APS keduanya berada di atas angka 90%. Namun sayangnya angka tersebut belum diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Gambaran lengkap mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016-2020 ditampilkan dalam **Tabel 2-20**.

Ditinjau berdasarkan perkembangannya, APS, APM dan APK SD/ sederajat di Kabupaten Bandung cenderung menurun pada tahun 2018-2019 namun kembali meningkat pada tahun 2020. Informasi lengkap mengenai data APK dan APM SD/ sederajat Kabupaten Bandung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tertera pada **Gambar 2-48**.

Tabel 2-20
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/ sederajat						
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	Orang	374.313	373.977	367.805	335.959	338.064
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	387.951	391.130	384.694	617.193	413.652
1.3	APS SD/MI	Indeks	99,98	99,98	99,98	92,42	99,60
2	SMP/ sederajat						
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Orang	168.070	166.130	165.166	107.257	147.622
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	192.883	195.722	194.576	207.586	209.235
2.3	APS SMP/MTs	Indeks	97,17	97,18	98,22	77,55	91,37

Sumber: BPS Kabupaten Bandung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



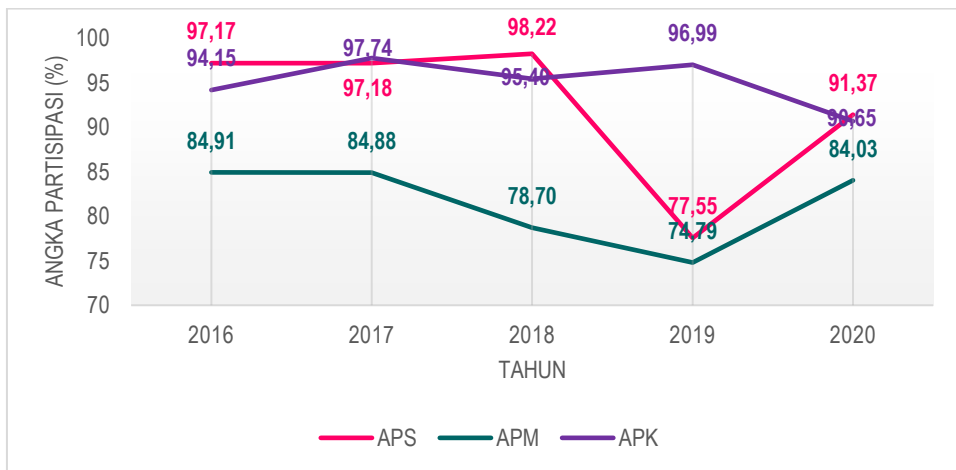
Gambar 2-48

Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Jenjang SD/Sederajat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat, jika ditinjau dalam selang tahun 2016-2020 grafik perkembangan angka partisipasi jenjang SMP/ sederajat menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun kembali

meningkat pada tahun 2020 untuk indikator APS, APM maupun APK. Perkembangan angka partisipasi Kabupaten Bandung untuk jenjang SMP/ sederajat ditampilkan dalam **Gambar 2-49**.



Gambar 2-49

Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Jenjang SMP/ Sederajat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan

sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah untuk sarana SD/ sederajat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 angka rasio sebesar 242 sekolah per 10.000 penduduk dan



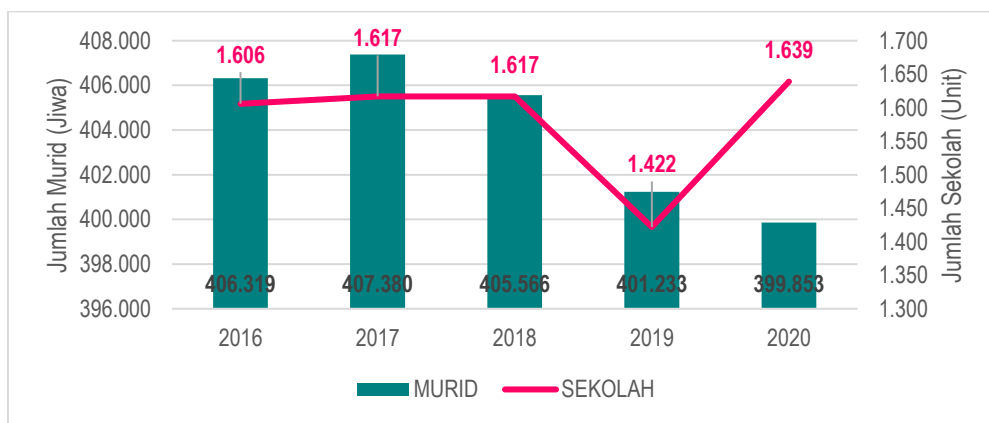
meningkat di tahun-tahun berikutnya yang diakibatkan oleh adanya peningkatan jumlah sekolah seiring dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Pada akhir tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun tercatat sebesar 1:243. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah sekolah untuk penduduk usia 7-12 tahun dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebanyak 1 (satu) sekolah per 10.000 penduduk.

Untuk sarana SMP/ sederajat, selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 angka rasio ketersediaan sekolah cenderung mengalami fluktuasi, meningkat di tahun 2016, dan kembali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana sekolah SMP/ sederajat belum seimbang dengan pertumbuhan penduduk usia 13-15 tahun. Tahun 2020, angka rasio ini tercatat sebesar 320 untuk 10.000 penduduk

3. Rasio Guru dan Murid

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pada tahun 2020 ketersediaan guru SD/ sederajat di Kabupaten Bandung yaitu berkisar 1 guru untuk 25 siswa. Rasio ini meningkat dari tahun 2016, yakni semula 1 guru untuk 24 siswa, namun lebih rendah dari tahun 2017 dengan rasio 1 guru untuk 26 siswa. Hal ini dikarenakan terjadinya fluktuasi jumlah guru yang cenderung menurun dan berkurangnya jumlah murid SD.

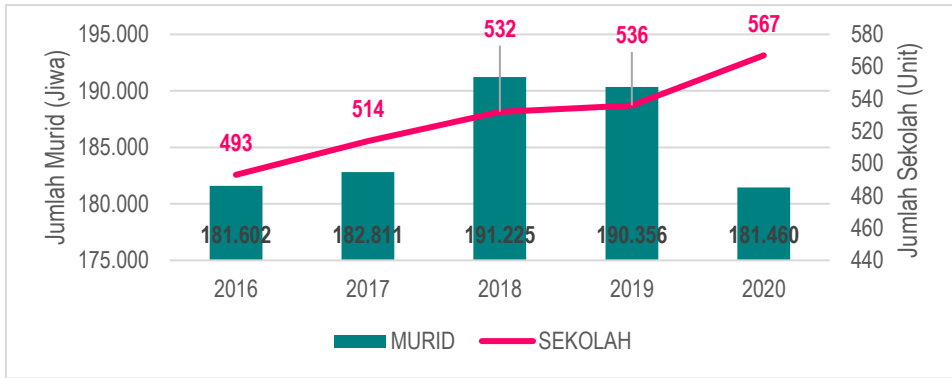
Hal serupa dapat dilihat pada jenjang SMP. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan guru terhadap murid tingkat SMP adalah 1 guru untuk 17 murid. Cenderung menurunnya jumlah guru SMP dan fluktuasi jumlah murid SMP mengakibatkan rasio tersebut naik menjadi 1 guru untuk 23 siswa pada tahun 2020



Gambar 2-50

Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SD/ Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

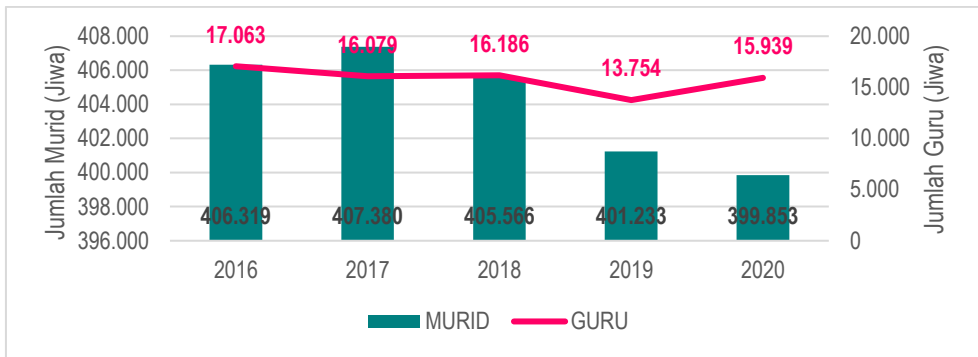
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-51

Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SMP/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

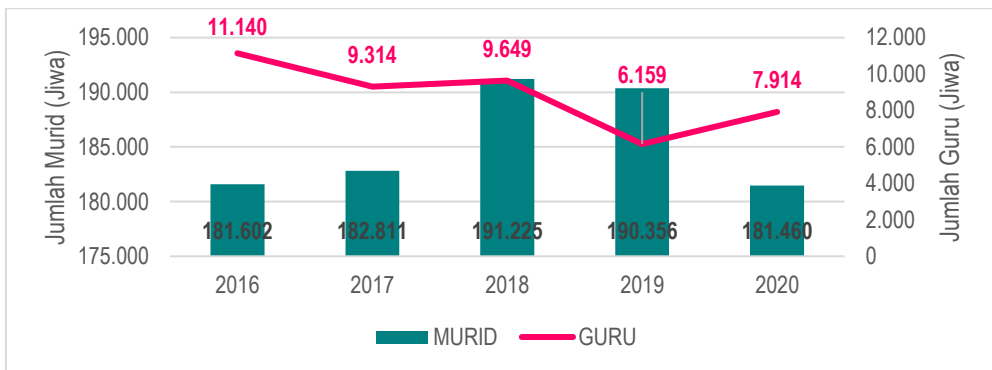
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-52

Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SD/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-53

Grafik Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid SMP/Sederajat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-21
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/ sederajat					
1.1	Jumlah Guru	17.063	16.079	16.186	13.754	15.939
1.2	Jumlah Murid	406.319	407.380	405.566	401.233	399.853
1.3	Rasio Guru/Murid	1 : 24	1 : 26	1 : 25	1 : 26	1 : 25
2	SMP/ sederajat					
2.1	Jumlah Guru	11.140	9.314	9.649	6.159	7.914
2.2	Jumlah Murid	181.602	182.811	191.225	190.356	181.460
2.3	Rasio Guru/Murid	1 : 17	1 : 20	1 : 20	1 : 23	1 : 23

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

B. Urusan Kesehatan

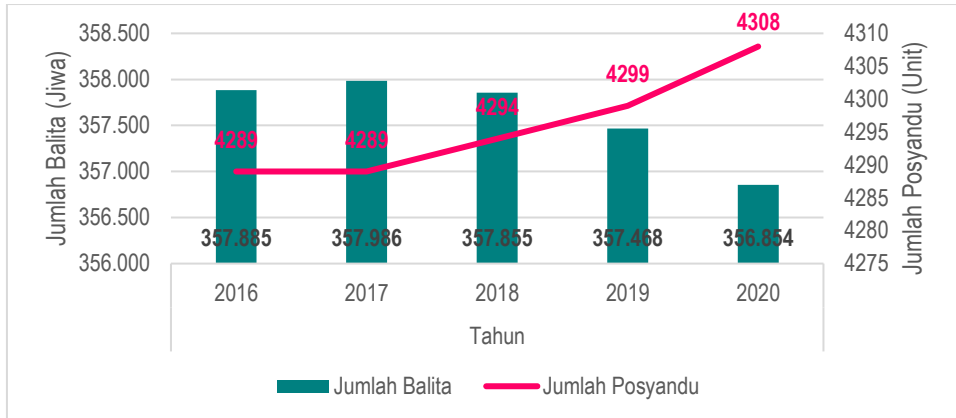
Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan urusan kesehatan, salah satunya tergambar dari capaian indikator kinerja bidang kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di tahun 2020, selain menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat seperti stunting dan kematian ibu dan bayi, Pemerintah Kabupaten Bandung juga berupaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai realisasi indikator kinerja di bidang kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung.

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu terdaftar di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebanyak 4.308 unit dan melayani jumlah balita sebanyak 356.854 jiwa. Dengan demikian, rasio Posyandu terhadap balita 1: 82. Hal ini berarti bahwa satu unit Posyandu di Kabupaten Bandung melayani sekitar 82 balita usia 0-3 tahun. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.



Gambar 2-54
Grafik Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-22
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	4.289	4.289	4.294	4.299	4.308
2	Jumlah balita	357.885	357.986	357.855	357.468	356.854
3	Rasio	1:83	1:83	1:83	1:83	1:82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini di mana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per penduduk tahun 2020 sebesar 1: 12.988. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung dari rasio semula 1: 12.378 pada tahun 2019. Semakin besarnya beban cakupan pelayanan pada fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor. Pada satu sisi jumlah penduduk yang harus dilayani mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan di sisi lain jumlah sarana kesehatan cenderung tetap/tidak mengalami peningkatan.

Tabel 2-23
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	62	62	50	62	62
2	Jumlah Poliklinik	40	40	40	40	171
3	Jumlah Pustu	78	78	78	78	62



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah 1, 2, dan 3		180	180	168	180	295
4	Jumlah Penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 13.079	1 : 13.017	1 : 13.640	1 : 12.378	1 : 12.988
5	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan

penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan rumah sakit adalah 1 : 382.150 yang menunjukkan bahwa 1 rumah sakit untuk 382.150 jiwa.

Tabel 2-24
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3	3
2	Jumlah Rumah Sakit Provinsi	1	1	1	1	2
3	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	3	3	4
4	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	7	8	8	10
6	Jumlah Penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
7	Rasio	1 : 513.804	1 : 522.515	1 : 464.661	1 : 471.910	1 : 383.150

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

4. Jumlah Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan

dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bandung, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan terlebih di saat pandemi COVID-19 saat ini ketersediaan tenaga kesehatan menjadi penting untuk diperhatikan. Data perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung terdapat pada **Tabel 2-25** berikut.



Tabel 2-25

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Dinas Kesehatan & Puskesmas Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Ketersediaan					Target Kebutuhan Nakes 2025	Gap Kebutuhan Nakes Hingga 2025
		2016**	2017**	2018**	2019*	2020*	2025	
1	Dokter Spesialis	153	189	189	189	238	469	231
2	Dokter Umum	225	246	246	279	363	1.955	1.592
3	Dokter Gigi	83	101	101	110	114	547	433
4	Perawat	315	357	357	1663	1893	7.818	5.925
5	Bidan	565	535	535	2028	2007	5.082	3.075
6	Perawat Gigi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	821	N/A
7	Apoteker	N/A	N/A	N/A	138	129	586	457
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	67	67	67	309	201	1.173	972
9	SKM (Tenaga Kes Masyarakat)	N/A	N/A	N/A	120	120	704	584
10	Sanitarian (Tenaga Kes Lingk)	N/A	N/A	N/A	85	90	782	692
11	Gizi	N/A	N/A	N/A	120	124	704	580
12	Keterampilan Fisik	N/A	N/A	N/A	30	33	235	202
13	Keterampilan Medis	N/A	N/A	N/A	276	348	704	356
14	Ahli Laboratorium Medik	N/A	N/A	N/A	146	188	N/A	N/A
15	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	N/A	N/A	N/A	31	90	N/A	N/A
16	Tenaga Medis	197	212	212	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Tenaga Kesehatan lainnya	151	258	258	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah	1756	1965	1965	5524	5938	N/A	N/A

*sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bandung

**sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

5. Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik merupakan aset

dan investasi bangsa untuk masa yang akan datang. Selama tahun 2016-2020, Kabupaten Bandung telah banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi ini. Meski demikian, terdapat penurunan jumlah balita gizi baik dan penurunan persentase jumlah balita gizi baik dikarenakan meningkatnya jumlah balita keseluruhan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk sebesar 0,04%.

Tabel 2-26

Persentase Balita Gizi Baik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Baik	272,319	265,805	251,216	246,426	159,151
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	86	112	160	147	1030
3	Jumlah Balita Seluruhnya (Usia 0-3 tahun)	357,885	357,986	357,855	357,468	356,854
4	Persentase :					
	Gizi Baik	95,21	94,59	94,29	94,26	83,61



No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Gizi Buruk	0,030	0,04	0,06	0,05	0,541

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

6. Prevalensi Stunting

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung (2020), rata-rata prevalensi stunting dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebesar 17 persen. Apabila dilihat dari grafik yang telah disajikan, terdapat beberapa kecamatan yang prevalensi stuntingnya melebihi rata-rata. Kecamatan dengan jumlah prevalensi stunting tertinggi ada di Kecamatan Paseh, Ciparay, Cimaung, Banjaran, dan Rancabali. Kecamatan inilah yang harus mendapat prioritas dalam penanganan stunting di Kabupaten

Bandung, karena menggambarkan balita stunting paling tinggi se-Kabupaten Bandung. Adapun program/kegiatan yang harus dilakukan tidak hanya perbaikan gizi pada remaja, ibu hamil/menyusui dan anak-anak balita, namun juga harus disertai langkah-langkah penanganan terhadap perbaikan lingkungan, seperti perbaikan sanitasi, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan penanganan sampah. Setelah menghitung prevalensi stunting per kecamatan, dilakukan pula analisis melalui data cakupan stunting di Kabupaten Bandung yang dapat dilihat pada **Tabel 2-27**.

Tabel 2-27
Situasi di Lokus Prioritas Berdasarkan Indikator Dalam Intervensi Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2020

No.	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat ini di Desa Fokus	Target Nasional
1	Cakupan bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan	83,8	95
2	Cakupan ibu hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	93,2	98
3	Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT	96,5	90
4	Cakupan kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	78,2	80
5	Cakupan ibu hamil K-4	91,5	100
6	Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vitamin A	100	90
7	Cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	84,8	100
8	Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc	62,2	NA
9	Cakupan remaja putri mendapatkan TTD	100	30
10	Cakupan layanan ibu nifas	91,4	100
11	Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	100	NA
12	Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	14,2	NA
13	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak	63,7	85
14	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	60,5	80
15	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting	198,2	NA
16	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD	198,2	100



No.	Intervensi	Rata-rata Cakupan Intervensi Saat ini di Desa Fokus	Target Nasional
17	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	195	100
18	Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan	474,2	NA
19	Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT	17038	NA
20	Cakupan desa menerapkan KRPL	20,9	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan dan cakupan layanan program prioritas penurunan stunting

maka dapat diidentifikasi beberapa kendala sebagai berikut.

Tabel 2-28
Identifikasi Kendala Penanganan Stunting Di Kabupaten Bandung

No.	Aspek Analisis Manajemen Layanan	Kendala yang Diidentifikasi
1	Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	Isu stunting belum menjadi prioritas utama PD dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tertuang dalam RKA dan DPA masing-masing PD
2	Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program	Belum tersedianya basis data terkait stunting yang sampai ke tingkat desa di setiap PD
3	Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana	Belum optimalnya jumlah dan kapasitas SDM pengukur status gizi balita
		Belum optimalnya jumlah tenaga kesehatan pengelola gizi di lokus intervensi stunting
4	Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	Belum meratanya pemahaman masyarakat di Kabupaten Bandung terkait stunting

Sumber: Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Pemaparan di atas menunjukkan masih pentingnya upaya penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Adapun yang perlu diperhatikan juga adalah untuk mendukung target penanganan stunting untuk Kabupaten Bandung, yakni target Nasional sebesar 14% dan Provinsi sebesar 19%.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bandung berlangsung dengan perkembangan yang signifikan di hampir setiap indikator kinerja. Hal ini dibuktikan di antaranya dengan semakin baiknya kondisi jalan, jembatan, jangkauan irigasi dan drainase, dan jumlah rumah yang ber-IMB. Kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dapat dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik

(buatan) akan menyebabkan sulitnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yang sering dialami adalah banjir yang disebabkan oleh tidak seimbang volume air dengan kapasitas dan fungsi sungai serta drainase. Hal ini juga terjadi pada kondisi jaringan transportasi di mana kapasitasnya tidak lagi mampu menampung pergerakan barang dan manusia secara ideal.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan ke dalam kategori jalan kondisi baik,

sedang, rusak, dan rusak berat. Selama kurun waktu tahun 2016-2017 telah terjadi penurunan kualitas jalan kabupaten. Namun di tahun 2018 proporsi jalan kondisi baik mengalami peningkatan dan terus meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 659,485 km kondisi jalan baik dengan proporsi sebesar 56,84% dari keseluruhan panjang jalan kabupaten. Berikut adalah gambaran secara mendetail mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisinya selama kurun waktu tahun 2016-2020.

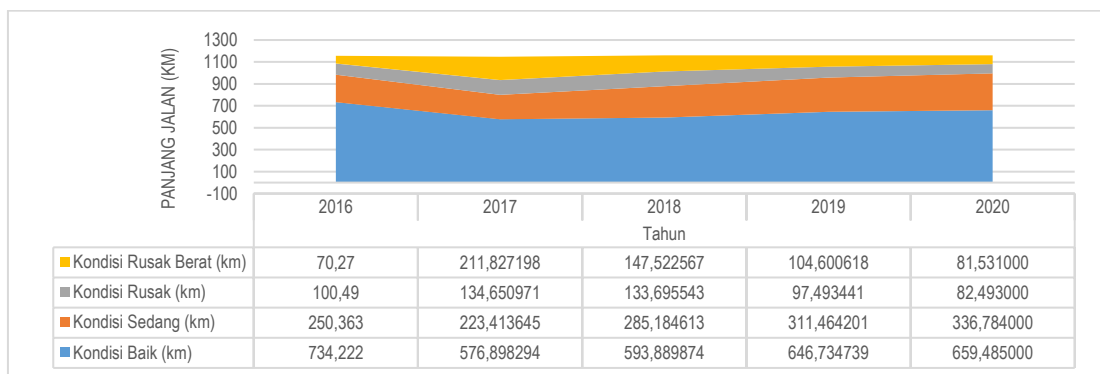
Tabel 2-29
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik (km)	734,222	576,898	593,890	646,735	659,485
2	Kondisi Sedang (km)	250,363	223,414	285,185	311,464	336,784
3	Kondisi Rusak (km)	100,49	134,651	133,696	97,493	82,493
4	Kondisi Rusak Berat (km)	70,27	211,827	147,523	104,601	81,531
	Jalan secara keseluruhan (km)	1.155,35	1.146,79	1.160,29	1.160,29	1.160,29
5	Proporsi Kondisi Baik (%)	63,55	50,31	51,18	55,74	56,84
6	Proporsi Kondisi Sedang (%)	21,67	19,48	24,58	26,84	29,03
7	Proporsi Kondisi Rusak (%)	8,7	11,74	11,52	8,40	7,11
8	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	6,02	18,47	12,71	9,02	7,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Apabila disandingkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat peningkatan yang cukup signifikan untuk

proporsi panjang jalan dalam kondisi baik selama selang waktu 2016-2020.



Gambar 2-55

Grafik Perkembangan Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Proporsi Jumlah Jembatan

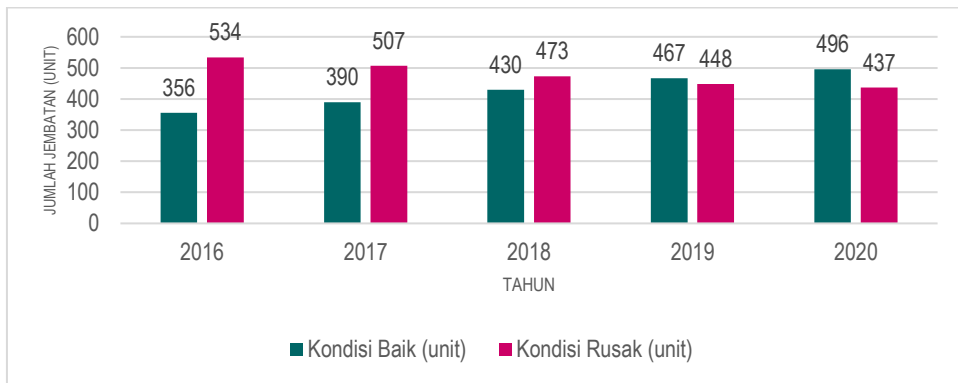
Jembatan berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah yang aksesnya terpisah oleh morfologi wilayah baik lembah maupun sungai, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah yang dapat memperlancar dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, keberadaan jembatan sekaligus akan mendukung perekonomian wilayah.

Berdasarkan hasil evaluasi, selama selang tahun 2016-2020, proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020, proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung adalah sebesar 53,16%. Perkembangan proporsi jembatan berdasarkan kondisinya disajikan dalam **Tabel 2-28** dan **Gambar 2-55**.

Tabel 2-30
Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik (unit)	356	390	430	467	496
2	Kondisi Rusak (unit)	534	507	473	448	437
	Jumlah Keseluruhan** (unit)	890	897	903	915	933
3	Proporsi Kondisi Baik (%)	40,00	43,48	47,62	51,04	53,16
4	Proporsi Kondisi Rusak (%)	60,00	56,52	52,38	48,96	46,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-56

Grafik Perkembangan Jumlah Jembatan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

3. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Bandung sebagian besar berfungsi untuk mendukung sektor pertanian, khususnya pertanian lahan basah. Jaringan ini meliputi baik jaringan irigasi teknis maupun jaringan irigasi non teknis. Ditinjau berdasarkan persentasenya, jaringan irigasi di Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh

jaringan irigasi non teknis, dengan rata-rata persentase dalam lima tahun terakhir sebesar 97,76%. Adapun untuk jaringan irigasi teknis, persentasenya hanya mencakup 2,24%.

Dari segi panjang jaringan irigasi, dalam kurun waktu tahun 2016-2020, terjadi fluktuasi panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bandung, baik untuk irigasi teknis maupun irigasi non teknis. Informasi



menyeluruh mengenai kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-31**.

Tabel 2-31
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Jenis Irigasi	Kondisi	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Teknis	Baik (km)	16,93	18,08	18,63	18,63	19,64
		Rusak Ringan (km)	7,03	6,33	5,58	5,58	6,84
		Rusak Berat (km)	4,43	3,99	3,92	3,92	1,92
		Total (km)	28,39	28,39	28,4	28,40	28,40
2	Non Teknis	Baik (km)	610,13	673,02	700,89	700,89	740,20
		Rusak Ringan (km)	358,77	322,89	319,39	319,39	318,82
		Rusak Berat (km)	270,12	243,11	218,74	218,74	180,00
		Total (km)	1.239,02	1.239,02	1.239,02	1239,02	1239,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Ditinjau berdasarkan luas areal irigasi, khusus irigasi non teknis, irigasi dengan luas areal 0-25 ha pengelolannya menjadi kewenangan pemerintah desa, sedangkan untuk irigasi dengan luas area >25 ha pengelolannya menjadi kewenangan kabupaten. Dari total luas irigasi non teknis seluas 19.819,27 ha di tahun 2020, 18,77% di antaranya atau sebesar 3.720,01 ha merupakan areal irigasi non-teknis kewenangan desa. Adapun sisanya yaitu sebanyak 81,23% atau sebesar 16.099,26 ha merupakan areal irigasi non-teknis kewenangan kabupaten.

Adapun untuk irigasi teknis di Kabupaten Bandung dikelompokkan berdasarkan luas dan kewenangannya menjadi irigasi teknis kewenangan kabupaten dengan luas areal <1.000 ha, irigasi teknis kewenangan provinsi dengan luas areal 1.000-3.000 ha, serta irigasi

teknis kewenangan provinsi yang berupa irigasi lintas. Pada tahun 2020, dari total areal irigasi teknis seluas 14.559,05 ha, hanya 18,25% atau sekitar 2.657,05 ha yang merupakan irigasi kewenangan kabupaten. Adapun untuk irigasi non teknis kewenangan provinsi, areal irigasi dengan luasan 1.000-3.000 ha mencakup sekitar 61,54% atau sekitar 8.959,00 ha yang tersebar di beberapa daerah irigasi, di antaranya DI Leuwikuya, DI Cisarea, DI Wangisagara, DI Wanir, dan DI Cisayana. Sedangkan untuk irigasi yang bersifat lintas irigasi, memiliki cakupan areal dengan persentase 20,21% dari total luasan irigasi non teknis atau sekitar 2.943 ha yang tersebar di beberapa daerah irigasi, antara lain DI Leuwikuya, DI Malang, DI Lagadar, DI Sudiplak, DI Mengger, DI Depok, DI Ciranjeng, DI Ciaro, DI Buang Batu, dan DI Ciateul.

Tabel 2-32
Luas Areal Irigasi Kabupaten Bandung Tahun 2020

No.	Areal Irigasi	Luas Area (ha)	Persentase (%)
A	Irigasi Non Teknis		
1	Kewenangan Desa dengan areal 0-25 ha	3.720,01	18,77
2	Kewenangan Kabupaten dengan Areal >25 ha	16.099,26	81,23
	TOTAL	19.819,27	100
B	Irigasi Teknis		
1	Kewenangan Kabupaten dengan Areal <1.000 ha	2.657,05	18,25
2	Kewenangan Provinsi dengan Areal 1.000-3.000 ha	8.959,00	61,54
3	Kewenangan Provinsi (Irigasi Lintas)	2.943,00	20,21
	TOTAL	14.559,05	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

4. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Kabupaten Bandung dapat di kelompokkan ke dalam drainase primer, sekunder dan tersier. Jaringan drainase primer terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai lintas wilayah administratif, yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara ke Laut Jawa. Dalam sektor drainase, Kabupaten Bandung memiliki peran strategis, Sungai Citarum merupakan muara bagi anak-anak sungai yang ada di Cekungan Bandung.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat meluapnya Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005, 2010, dan 2014.

Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum. Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Canguang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cileunyi. Informasi detail mengenai kondisi Sub DAS Citarum ditampilkan pada **Tabel 2-33**. Dalam lingkup Kabupaten Bandung, Aliran Sungai Citarum menjadi muara bagi empat Sub DAS, antara lain sub DAS Citarik, Sub DAD Cirasea, Sub DAS Ciwidey dan Sub DAS Cisangkuy. Kendati demikian, drainase Kabupaten Bandung pada dasarnya turut pula dipengaruhi oleh drainase Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yaitu dari aliran Sub DAS Cikapundung dan Ciminyak. Secara detail kondisi Sub DAS Citarum di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-34**.

Tabel 2-33
Kondisi DAS Citarum

DAS/ SUB DAS	Panjang (km)	Daerah Tangkapan (ha)	Debit Rata-rata	Debit (m ³ / detik)
Citarum	269	268.130	14 milyar/m ³ /tahun	a. Debit air Citarum di Majalaya: (i) Q50 = 3,505 m ³ /detik (ii) Q80=0,764 m ³ /detik (iii) Q90 = 0,69 m ³ /detik b. Debit air Citarum di Dayeuhkolot: (i) Q50 = 5,105 m ³ /detik (ii) Q80 = 1,24 m ³ /detik (iii) Q90 = 0,60 m ³ /detik c. Debit air Citarum di Nanjung: (i) Q50=33,975m ³ /detik (ii) Q80 = 10,32 m ³ /detik (iii) Q90 = 8,77 m ³ /detik

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial dan Ekonomi Untuk RTRW Kab. Bandung

Tabel 2-34
Kondisi Sub Das Citarum di Kabupaten Bandung

SUB DAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m ³ /detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
Citarik	22.952	17.295	5.657	10,90	Kecamatan Cikancung Kecamatan Cileunyi Kecamatan Cilengkrang



SUB DAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m ³ /detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
					Kecamatan Bojongsoang Kecamatan Cicalengka Kecamatan Nagrek Kecamatan Rancaekek Kecamatan Cimenyan
Cirasea	38.110	37.219	891	22,1	Kecamatan Kertasari Kecamatan Pacet Kecamatan Ibun Kecamatan Majalaya Kecamatan Paseh Kecamatan Solokanjeruk Kecamatan Ciparay Kecamatan Baleendah
Ciwidey	22.169	-	-	12,3	Kecamatan Rancabali Kecamatan Ciwidey Kecamatan Pasirjambu Kecamatan Soreang Kecamatan Katapang Kecamatan Canguang Kecamatan Kutawaringin
Cisangkuy	34.159	-	-	17,7	Kecamatan Pangalengan Kecamatan Cimaung Kecamatan Arjasari Kecamatan Pamengpeuk Kecamatan Banjaran Kecamatan Canguang Kecamatan Baleendah

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial dan Ekonomi Untuk RTRW

Di samping drainase primer, kondisi drainase Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh drainase sekunder dan drainase tersier berupa drainase permukiman. Belum terintegrasinya serta belum optimalnya kualitas saluran drainase permukiman menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir tahunan di Kabupaten Bandung. Sepanjang 1.053,37 km

drainase yang ada di Kabupaten Bandung masih berada pada kondisi yang belum optimal yang menjadi salah satu penyebab kejadian banjir, sementara persentase drainase dalam kondisi baik baru mencapai 2,08%. Secara umum kondisi drainase di Kabupaten Bandung ditampilkan pada **Tabel 2-35**.

Tabel 2-35
Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	521,6	782,4	521,6	520	467,00
2	Panjang Drainase yang dipakai bangunan liar (km)	391,2	586,73	391,2	300	300
	Panjang Total Drainase (km)	924,28	1.386,42	1.441,77	1.615,87	1.623,37
3	Persentase Drainase Primer dalam Kondisi Baik (%)	1,24	1,47	2,88	1,75	2,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



5. Persentase Bangunan Ber-IMB Per Seluruh Bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang

berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung. Dari tahun ke tahun persentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Bandung cenderung meningkat, di mana pada tahun 2020 terjadi peningkatan dengan rasio bangunan ber-IMB naik 0,04% dari 7,47% di tahun 2019 menjadi 7,51% di tahun 2020.

Tabel 2-36
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bangunan ber-IMB (unit)	75.428	75.524	75.557	75.932	76.285
2	Jumlah Bangunan (unit)	1.015.517	1.015.517	1.015.828	1.015.915	1.016.278
3	Rasio bangunan ber-IMB (%)	7,43%	7,44%	7,44%	7,47%	7,51%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Rencana Kawasan Terbangun)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung. Ketersediaan RTH dalam kota berdampak pada kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 30%, di mana 10% di antaranya adalah RTH privat (RTH yang berada di lahan milik pribadi) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH Publik di Kabupaten Bandung tahun 2020 mencapai 4,8217 ha atau 0,011 % dari rencana luas wilayah kawasan terbangun RTRW seluas 42.265,73 ha. Capaian ini masih jauh dari standar kebutuhan RTH yang seharusnya sebesar 8.453,146 ha. Adapun rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dari tahun 2016 hingga 2020 ditampilkan pada **Tabel 2-37**.

Tabel 2-37
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	38.283	46.54	48.39	50.9	51.29



No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Luas Rencana Kawasan Terbangun (Ha)	42.265,73	42.265,73	42.265,73	42.265,73	42.265,73
	Persentase RTH Publik per satuan luas rencana kawasan terbangun	0,010%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja seperti luas dan jumlah rumah tangga di permukiman layak huni, cakupan pelayanan air bersih dan rumah tangga bersanitasi. Secara umum, terdapat peningkatan pada kinerja sebagian besar indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Selengkapnya kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

1. Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap manusia. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Luas wilayah permukiman layak huni di Kabupaten Bandung dalam rentang tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020, mencapai 14.107,92 ha atau sebesar 98,67% dari luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung.

Tabel 2-38
Persentase Permukiman Layak Huni dan Jumlah RT Yang Menempati Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni (ha)	13.408,50	13.534,10	13.811,90	14.093,36	14.107,92
2	Persentase permukiman layak huni (%)	93,78	94,66	96,60	98,13	98,67
3	Jumlah RT yang menempati rumah layak huni	933.911	1.149.320	1.023.120	1.173.880	1.176.487

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan); dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Disperkimtan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air

baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan



selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau KPPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dispersasi belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya diharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kurun tahun 2016-2020, cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan. Jumlah cakupan ini pada tahun 2020 adalah 81,45% penduduk Kabupaten Bandung dengan didominasi akses air bersih yang dibangun masyarakat.

Tabel 2-39

Cakupan Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Sumber Pembangunannya di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penduduk yang sudah mendapatkan akses air bersih (%)	76,04	77,12	78,49	80,52	81,45
1	Persentase Akses air bersih yang dibangun masyarakat (%)	50,28	49,83	49,65	47,23	46,24
2	Persentase Akses air bersih yang dibangun Disperkimtan (%)	12,44	14,52	15,97	17,92	18,93
3	Persentase akses air bersih yang dibangun PDAM (%)	12,32	12,77	12,87	15,35	18,48

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-40

Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perdesaan (jiwa)	483.386	531.084	584.135	676.529	669.650
2	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perkotaan (jiwa)	443.104	467.076	470.746	579.504	589.206
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.271	3.623.790
4	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perkotaan (%)	12,32	12,77	12,87	15,35	18,48
5	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan (%)	62,72	64,35	65,62	65,15	65,17

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih; 2) Pembuangan air besar/tinja; 3) Pembuangan air limbah (air bekas); dan 4) Pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal

berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan akses aman terhadap sanitasi dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman sebanyak 86,11% dari total jumlah penduduk. Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses terhadap sarana



sanitasi bersuspek aman diduga karena belum terintegrasinya sarana sanitasi penduduk dengan saluran pembuang akhir yang terstandar, baik itu

berupa *septic tank* individual dan IPLT bagi pengolahan limbah sistem *on-site* maupun IPAL bagi pengolahan limbah sistem *off-site*.

Tabel 2-41
Kemajuan Cakupan Layanan Sanitasi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Akses aman terhadap sanitasi (%)	70,04	70,19	75,54	82,4	85,35

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2021 yang dikelola dalam SIPD

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelayanan urusan wajib dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Selama kurun lima tahun terakhir, rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan secara signifikan. Informasi detail disajikan pada **Tabel 2-42**.

Tabel 2-42
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah polisi pamong praja	365	417	393	457	457
2	Jumlah penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,01	1,14	1,06	1,21	1,26

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam

ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang



dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2-43
Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas	5.600	5.775	5.775	5775	5.755
2	Jumlah penduduk	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	15,84	15,79	18,21	15,30	15,88

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

3. Jenis & Objek yang Terbakar

Banyaknya kejadian kebakaran yang cenderung meningkat dengan kompleksitas yang semakin sulit di Kabupaten Bandung yang realitasnya tidak diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan sarana

pemadaman kebakaran. Jumlah Penanggulangan Kejadian Kebakaran Selama Tahun 2020 adalah 282 Kali Kebakaran dan jumlah korban sebanyak 129 jiwa. Berikut adalah jenis objek yang terbakar dan penyebab kebakaran yang terjadi tahun 2020.

Tabel 2-44
Jenis Objek yang Terbakar

Jenis Objek Terbakar	Jumlah
Rumah Tinggal	132
Gudang	19
Pabrik	17
Lainnya	114
Jumlah Kejadian	282

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-45
Rekapitulasi Penyebab Kebakaran

	Jumlah
Korsleting Listrik	140
Gas Bocor	12
Kompor	7
Pembakar Liar	1
Puntung rokok	9
Lainnya	113

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

F. Urusan Sosial

Dalam memberikan pelayanan wajib urusan sosial, Pemerintah Kabupaten Bandung mengevaluasi kinerja melalui indikator-indikator terkait permasalahan sosial

masyarakat seperti penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang akan dibahas di bawah ini.



1. Penanganan PPKS Fakir Miskin

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah PPKS Fakir

Miskin yang juga mengalami fluktuasi pada periode yang sama. Secara lebih detail pada tahun 2020 terjadi penurunan penanganan PPKS Fakir Miskin dari tahun sebelumnya yakni menjadi 15,98% dari 17,54%.

Tabel 2-46

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PPKS FM yang Tertangani (jiwa)	Jumlah PPKS FM yang Ada (jiwa)	Penanganan PPKS FM (%)
2016	13.689	13.164	10,4
2017	128.862	281.452	45,1
2018	7.462	281.452	2,7
2019	9.603	54.750	17,54
2020	8.748	54.750	15,98

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Penanganan PPKS Anak Terlantar

Pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak terlantar di

Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PPKS anak terlantar yang ditangani terhadap total PPKS anak terlantar yang ada, yaitu sebesar 25,77 % di tahun 2020.

Tabel 2-47

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PPKS Anak Terlantar Tertangani (jiwa)	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Ada (jiwa)	Penanganan PPKS Anak Terlantar (%)
2016	2.872	18.528	15,5
2017	3.133	18.528	16,90
2018	3.937	18.528	21,25
2019	4.561	18.528	24,62
2020	4.775	18.528	25,77

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

3. Jumlah Sarana Sosial

Meninjau tren ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bandung tampak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah unit sarana sosial. Untuk unit panti asuhan pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 43

unit, jumlahnya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara panti jompo jumlahnya 2 unit dan stagnan dari tahun lalu. Untuk sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA terjadi peningkatan sarana dari tahun ke tahun hingga di tahun 2020 total jumlah panti rehabilitasi sebanyak 4 unit.

Tabel 2-48

Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2016	51	1	3
2017	43	1	3



Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2018	41	1	6
2019	37	2	2
2020	43	2	4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan pemerintahan wajib non dasar terdiri atas: 1) urusan tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olahraga; 14) statistik; 15) persandian; 16) kebudayaan; 17) perpustakaan; dan 18) kearsipan.

A. Urusan Tenaga Kerja

Evaluasi terhadap urusan wajib non dasar terkait tenaga kerja mencakup beberapa indikator penting, antara lain:

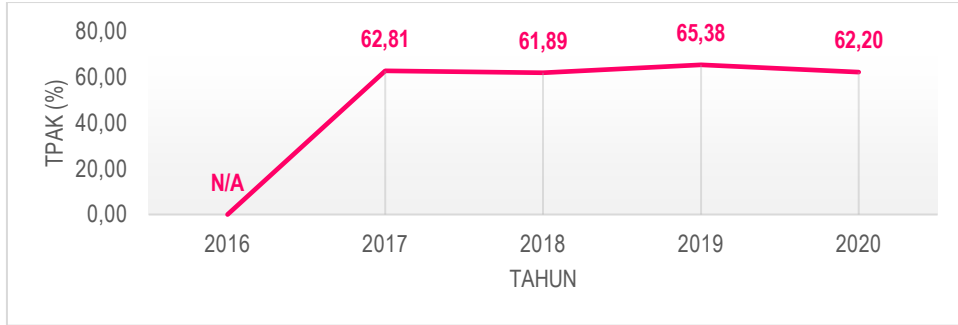
1. Angkatan Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja oleh pemerintah Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Evaluasi terhadap urusan wajib non dasar terkait tenaga kerja mencakup beberapa indikator penting, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini termasuk salah satu urusan yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 dan menurunnya perekonomian daerah maupun nasional. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa kinerja urusan tenaga kerja ini menurun. Selengkapnya uraian setiap indikator kinerja urusan tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2-49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2016	N/A	N/A	N/A
2017	2.625.509	1.649.064	62,81
2018	2.679.763	1.658.601	61,89
2019	2.731.785	1.786.162	65,38
2020	2.761.249	1.717.376	62,20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-57

Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Terdapat berbagai jenis lapangan usaha yang menjadi mata pencaharian bagi penduduk Kabupaten Bandung. Lapangan usaha “Perdagangan besar eceran, rumah makan, dan hotel” menjadi lapangan

usaha dengan jumlah pekerja tertinggi yaitu 470.717 orang, disusul sektor perdagangan besar eceran, rumah makan, dan hotel. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-50

Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	N/A	221.661	187.430	147.181	205.749
2	Pertambangan dan penggalian	N/A	4.997	1.600	5.437	2.013
3	Industri pengolahan	N/A	440.692	480.052	580.007	464.339
4	Listrik, gas, dan air	N/A	9.035	15.750	20.045	22.155
5	Bangunan	N/A	111.502	122.107	119.004	96.432
6	Perdagangan besar eceran, rumah makan, dan hotel	N/A	425.215	409.559	467.502	470.717
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	N/A	89.154	89.281	94.864	91.214
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	N/A	49.148	51.773	50.339	42.777
9	Jasa kemasyarakatan	N/A	232.987	218.109	203.827	174.578
	JUMLAH	N/A	1.584.391	1.575.661	1.688.206	1.569.974

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Pengangguran

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan

jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Sakernas, dalam lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 8,58% di tahun 2020.



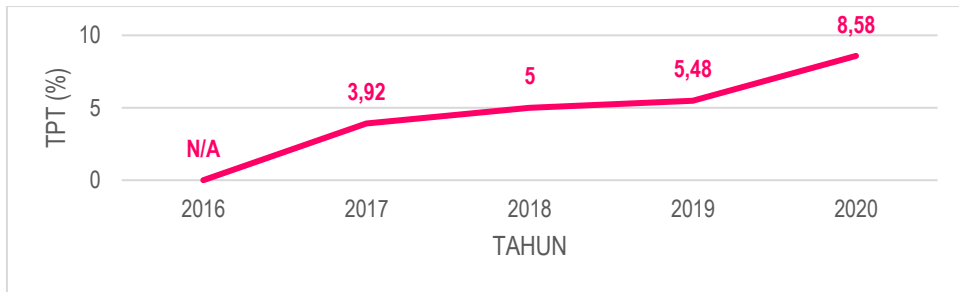
Tabel 2-51
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2016	N/A	N/A	N/A
2017	64.673	1.649.064	3,92
2018	82.940	1.658.601	5
2019	97.956	1.786.162	5,48
2020	147.402	1.717.376	8,58

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Dalam kurun waktu 2016-2020, tingkat perubahan TPT mengalami peningkatan. Grafik yang ditampilkan tidak menunjukkan data pada tahun 2016 karena estimasi

yang dikeluarkan BPS pada tahun 2016 tidak sampai nilai kabupaten/kota. Grafik perkembangan TPT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2-58
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Sepanjang tahun 2016-2019 perbandingan perubahan TPT antara Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional lebih di dominasi nilai tingkat perubahan TPT Provinsi Jawa Barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat perubahan TPT di Kabupaten Bandung dan Nasional. Meski demikian, pada tahun 2020 terdapat peningkatan TPT di setiap tingkat pemerintahan dan kini TPT Kabupaten Bandung mencapai 8,58% yakni lebih tinggi dari TPT

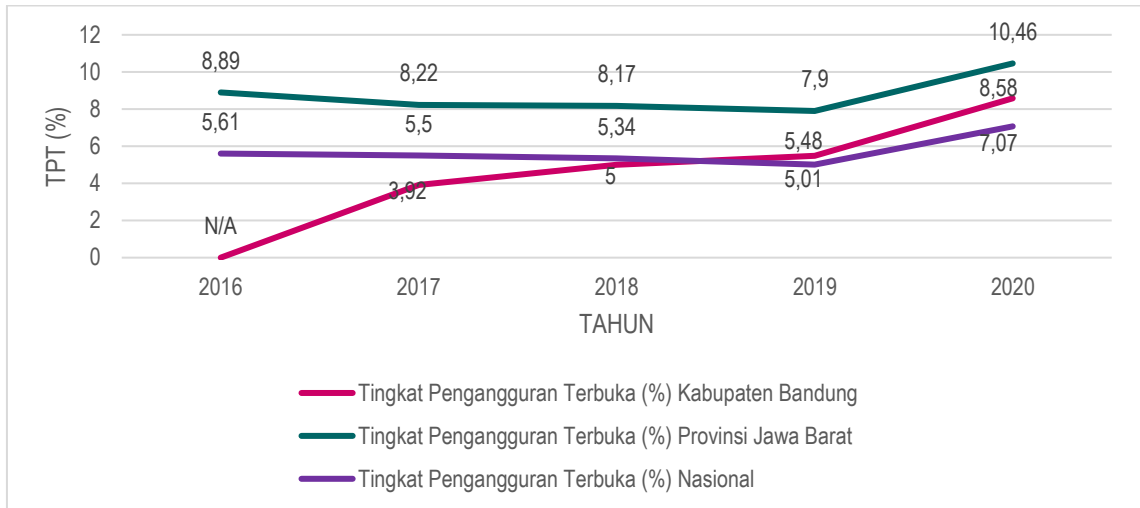
Nasional yang sebesar 7,07% namun masih lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat yang sebesar 10,46%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Bandung cenderung lebih kuat dibandingkan perekonomian di tingkat provinsi dan nasional serta bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Bandung memiliki lebih banyak kesempatan pekerjaan, terutama di kala pandemi.

Tabel 2-52
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2016	N/A	8,89	5,61
2017	3,92	8,22	5,5
2018	5	8,17	5,34

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional
2019	5,48	7,9	5,01
2020	8,58	10,46	7,07

Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-59

Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Urusan pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah partisipasi perempuan dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi perempuan dapat dilihat dari jumlah pekerja perempuan yang terdapat di Kabupaten Bandung, yakni sebanyak 3.903 orang atau berkisar 47,63% dari total keseluruhan populasi yang bekerja di Kabupaten Bandung.

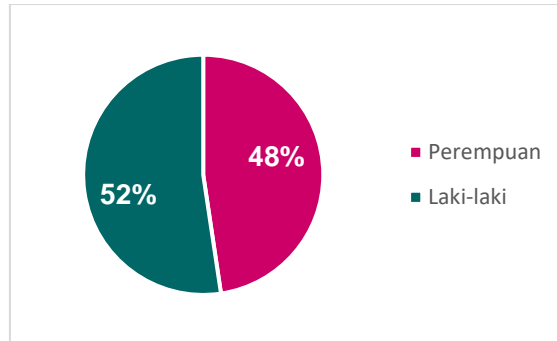
Selain itu, terdapat juga indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan

Gender, dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak. Rincian indikator tersebut di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 2-51** dan **Tabel 2-52**. Berdasarkan **Tabel 2-51**, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung cenderung meningkat perlahan namun turun pada tahun 2019-2020. Meski demikian, perkembangan nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung selama 2016-2020 masih lebih tinggi dibandingkan nilai Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Sedangkan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2-51** nilai Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung selama tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung menurun. Adapun nilai ini juga masih lebih rendah daripada Indeks Pemberdayaan Gender pada tingkat Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan IPM



Kabupaten Bandung cenderung merata selama tahun 2016-2020, akan tetapi belum tentu meningkatkan keberdayaan masyarakat, terutama tingkat keberdayaan perempuan, bahkan ada kecenderungan memiliki tingkat perkembangan yang lebih rendah dibanding tingkat Provinsi dan Nasional. Berdasarkan **Tabel 2-53** menunjukkan bahwa Indeks Komposit

Kesejahteraan Anak di Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan dan memiliki perkembangan nilai lebih tinggi dibandingkan tingkat Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesejahteraan anak secara perlahan cenderung meningkat di Kabupaten Bandung.



Gambar 2-60

Grafik Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Tabel 2-53

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bandung	N/a	93,43	93,59	93,96	93,95	N/a	76,50	72,40	65,86	67,07
Provinsi Jawa Barat	89,56	89,18	89,19	89,26	89,20	71,15	70,04	70,20	69,48	70,24
Indonesia	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber: Kementerian PPPA, 2021

Tabel 2-54

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bandung	65,20	67,60	67,60	70,98	N/a
Provinsi Jawa Barat	62,90	66,20	68,70	70,10	N/a
Indonesia	64,00	65,80	67,90	N/a	N/a

Sumber: Kementerian PPPA, 2021

B. Urusan Pangan

Secara umum, penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi Skor PPH dan keanekaragaman

dan konsumsi pangan di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020. Perwujudan ketahanan pangan dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut.

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan kemampuan wilayah untuk menyediakan pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, melalui produksi wilayah sendiri maupun pengadaan dari luar wilayahnya. Ketersediaan merupakan ukuran untuk penyediaan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein penduduk dalam jenis pangan yang beragam. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk baik jumlah dan mutunya di wilayah yaitu

berdasarkan jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per-orang per hari. Berdasarkan SPM Ketahanan Pangan, kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.200 kkal, kebutuhan protein sebesar 57 gram, dengan jumlah Skor (PPH) sebesar 100. Skor PPH di Kabupaten Bandung terus mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun 2020 dengan Skor PPH sebesar 88,6 Realisasi dan target capaian skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 2-55
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Berdasarkan Kelompok Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	0,6	1,5	1,1	1,1
3	Pangan hewani	14,08	24	23,8	23,1	22,9
4	Minyak dan lemak	5,0	5	5,0	5	5
5	Buah/Biji berminyak	0,1	0,43	0,0	0	0
6	Kacang-kacangan	10	8,5	9,3	8,5	8,7
7	Gula	1,7	1,7	2,1	1,1	1,1
8	Sayur dan buah	20,9	30	21,9	26,6	30
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0	0
Total PPH		79,27	78,9	78,9	94,9	88,6

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM), pada tahun 2016 jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung sudah mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini ditandai dengan Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan Angka Ketersediaan Protein (AKP) yang melebihi angka kecukupan gizi ketersediaan

pangan (ketersediaan energi sebesar 104,01 AKE dan ketersediaan protein 109,6 AKP), walaupun keberagamannya masih belum ideal ditandai dengan skor PPH tahun 2020 sebesar 83,6. Dari data tersebut, rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengonsumsi bahan makanan energi yang sesuai standar kecukupan gizi, namun konsumsi terhadap bahan makanan yang berprotein masih kurang.

Tabel 2-56
Angka Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Energi (%AKE)	104,1	116,0	117,3	109,7	110,0
2	Konsumsi Protein (%AKP)	109,6	119,4	125,4	210,8	119,4
Total PPH		77,3	79,2	84,6	88,6	83,6

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

C. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan diindikasikan dengan persentase luas lahan bersertifikat. Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan

bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bandung cenderung membaik sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase luas lahan bersertifikat adalah 12,07% atau 20.916,49 ha.

Tabel 2-57
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (ha)	Luas Wilayah Kabupaten Bandung (ha)	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
2016	15.025,01	174.304,12	8,62
2017	15.077,30	174.304,12	8,65
2018	15.635,07	174.304,12	8,97
2019	18.301,93	174.304,12	10,15
2020	20.916,49	174.304,12	12,07

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

D. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kabupaten Bandung yang pesat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di pihak lain, menimbulkan dampak negatif berupa tekanan terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi ketika upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) tidak dilakukan secara optimal.

Hal tersebut memerlukan berbagai strategi yang harus direspons secara memadai oleh seluruh elemen secara *pentahelix*, meliputi pemerintah, akademisi, swasta, media, dan masyarakat. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Sementara itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat beberapa pasal yang pada intinya mengamanatkan hak dan kewajiban setiap orang dalam melakukan PPLH, termasuk pengelolaan sampah.

Berbagai upaya PPLH yang telah dilakukan cenderung meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bandung pada 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari Capaian IKLH berturut-turut pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 sebesar 46,9, 50,08, 51,69, dan 53,57. Peningkatan tersebut ditunjang dengan meningkatnya penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dan masifnya kegiatan konservasi berbasis masyarakat.

IKLH digunakan sebagai kontrol terhadap kualitas lingkungan, yang terdiri dari agregat Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH secara prinsip mewakili isu coklat (*brown issues*) dan isu hijau (*green issues*). Isu coklat merupakan isu terkait pencemaran lingkungan, yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan, yang dijabarkan dengan indikator kualitas air dan udara serta memiliki bobot yang sama untuk setiap indikator. Sementara, isu hijau merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek konservasi dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, tetapi karena hanya diwakili oleh indikator tutupan lahan, maka proporsinya lebih besar



dibandingkan dengan indikator coklat. Formula perhitungan IKLH adalah: 30% IKA + 30% IKU + 40%IKTL. Namun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 138/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, formula IKLH diubah menjadi: 0,376 IKA + 0,405 IKU + 0,219 IKTL yang akan diterapkan pada perhitungan IKLH mulai tahun 2021. Gambaran umum kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari uraian berikut.

1. Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara

Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kualitas air sungai dan kualitas udara ambien yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Evaluasi terhadap hasil pemantauan ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pemantauan kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pemantauan kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet dan metode indeks pencemaran untuk menentukan status mutunya seperti dalam **Tabel 2-58**.

Pada lokasi-lokasi yang berstatus cemar berat, beberapa parameter utama kualitas air yang menyebabkan nilai status mutu cemar atau cenderung melebihi baku mutu air adalah parameter total coli, fecal coliform, Timbal (Pb), Seng (Zn), Fenol, Total P, BOD, dan COD. Beberapa parameter memiliki nilai melebihi BM dikarenakan secara umum kondisi kualitas airnya memang buruk, namun untuk beberapa parameter seperti Timbal (Pb) dan Fenol nilai pengujian di atas baku mutu dikarenakan nilai limit of quantitation (LoQ) metode pengujian laboratorium di atas nilai baku mutu. Untuk anak-anak sungai yang berada di Hulu, umumnya status mutu anak-anak sungai tersebut masih tercemar. "Cemar berat" pada anak-anak Sungai Citarum di bagian hulu umumnya disebabkan oleh tingginya parameter total coli dan atau fecal coliform. Hal ini menunjukkan bahwa air

limbah domestik dan peternakan merupakan sumber pencemar utama dan harus dilakukan intervensi terhadap pembangunan IPAL domestik atau IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) serta pengolahan air limbah peternakan.

Pada tahun 2020, DLH Kabupaten Bandung melaksanakan pemantauan kualitas air yang mewakili kawasan hulu maupun hilir yaitu sebanyak 20 (dua puluh) lokasi pada 2 Sub DAS yang secara keseluruhan berada di wilayah Kabupaten Bandung yaitu Hulu sungai Citarum (Situ Cisanti) 1 titik, Sub DAS Cisangkuy sebanyak 12 titik, dan Sub DAS Ciwidey sebanyak 7 titik. Sejak tahun 2008–2019 jumlah lokasi pemantauan kualitas air yang diuji sebanyak 75 lokasi dengan periode pemantauan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun pada 5 sub DAS yaitu sub DAS Ciwidey, sub DAS Cisangkuy, sub DAS Cirasea, sub DAS Cikapundung, dan sub DAS Citarik. Namun, mengingat lokasi pada 3 sub DAS khususnya sub DAS Cirasea, sub DAS Cikapundung, dan sub DAS Citarik merupakan sungai-sungai perlintasan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan sub DAS yang secara keseluruhan berada di dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah sub DAS dan aliran anak sungainya yang harus dipantau termasuk juga banyaknya pemangku kepentingan/stakeholder seperti stakeholder pusat (KLHK, BBWS Citarum, Perum Jasa Tirta 2) dan stakeholder daerah (DLH Provinsi Jawa Barat, Dinas PSDA Provinsi, PDAM Tirtaraharja) yang berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sungai Citarum, secara bertahap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung telah melakukan sinergitas terpadu diantara para pihak dimaksud sehingga khususnya untuk kegiatan pemantauan kualitas air dapat diperoleh hasil yang lebih mampu mewakili gambaran kualitas air di seluruh anak-anak sungai Citarum baik yang secara keseluruhan berada di wilayah Kabupaten Bandung maupun yang merupakan sungai-sungai perlintasan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi.



Pengujian kualitas udara ambien dengan metode Passive Sampler dilaksanakan sejak tahun 2016 sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan KLHK, pada tahun-tahun sebelumnya pengujian kualitas udara ambien dilaksanakan dengan metode manual aktif. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) berada pada rentang nilai 72-88. Hal ini bahwa kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Bandung dapat dikatakan masih relatif baik, sesuai dengan rentang kategori IKLH sebagai berikut.

Tabel 2-58
Kategori Penilaian IKLH

IKLH	
Sangat Baik	$X > 90$
Baik	$70 < X \leq 90$
Cukup	$50 \leq X \leq 70$
Kurang	$30 \leq X \leq 50$
Sangat Kurang	$X < 30$

Namun demikian, meski nilai IKU Kabupaten Bandung masih dalam rentang kondisi baik, langkah pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan mengingat dalam tahun-tahun mendatang akan terjadi berbagai peningkatan jumlah/tingkat kepadatan penduduk, serta peningkatan aktivitas seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung

Strategi pengendalian pencemaran udara terutama perlu diprioritaskan terhadap wilayah dengan nilai konsentrasi SO₂ dan NO₂ yang tinggi. Nilai IKU di wilayah permukiman perlu mendapat perhatian, karena wilayah ini merupakan tempat di mana populasi manusia terkonsentrasi. Pada umumnya nilai IKU di wilayah permukiman masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah dengan aktivitas komersial, dan industri. Rentang nilai IKU di wilayah permukiman berada pada rentang 85 - 90 (Baik). Dan dari ketiga sektor aktivitas perkotaan yaitu komersial, industri dan transportasi, aktivitas transportasi dan industri memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas udara yang paling besar.

Strategi pengendalian pencemaran udara dalam hal ini melibatkan berbagai pihak di antaranya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal

pengendalian pencemaran udara dalam sektor transportasi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya PPU oleh Dinas Perhubungan di antaranya mengontrol emisi udara dari kendaraan bermotor melalui pengujian emisi kendaraan serta mengurangi tingkat kemacetan dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Sedangkan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara dalam sektor industri yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung salah satunya dilakukan dengan mendorong upaya penaatan usaha/kegiatan terhadap ketentuan pengendalian pencemaran udara khususnya dari emisi sumber tidak bergerak seperti cerobong, dan genset.

Dalam upaya peningkatan nilai IKA dan IKU yang merupakan komponen dalam IKLH, DLH Kabupaten Bandung melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan di antaranya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan dengan prioritas industri manufaktur (tekstil, kimia tekstil, makanan dan minuman, farmasi, elektroplating, kertas, dan lain-lain), fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik), hotel dan rumah makan, pengelola limbah B3, SPBU, dan lain-lain. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penaatan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan yang terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam aspek pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.



Tabel 2-59
Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pemantauan Kualitas Air							
1	Lokasi Pemantauan Kualitas Air	68 lokasi (3x pengujian) 7 lokasi, (12x pengujian)	68 lokasi (3x pengujian) 7 lokasi, (12x pengujian)	70 lokasi (3x pengujian) 7 lokasi, (12x pengujian)	70 lokasi (3x pengujian) 7 lokasi, (12x pengujian)	75 lokasi 3x pengujian	20 lokasi 3x pengujian
2	Status Mutu Air	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 53% Cemar Berat	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 53% Cemar Berat	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 55% Cemar Berat	- Storet 100% Cemar Berat - IP = 36% Cemar Berat	- Storet 99% Cemar Berat; 1% Cemar Sedang - IP = 55% Cemar Berat; 39% Cemar Sedang; 5% Cemar Ringan	- Storet 99% Cemar Berat; 1% Cemar Sedang - IP = 20% Cemar Berat; 62% Cemar Sedang; 18% Cemar Ringan
3	Skor Storet Terburuk	-286	-137	-152	-147	-132	-115
	BOD tertinggi (mg/L)	642	1.021	653	271	516	82
	COD tertinggi (mg/L)	1.280	9.880	1.420	400	1.065	233
Pemantauan Kualitas Udara							
4	Lokasi Pemantauan Kualitas Udara (Metode Passive Sampler)	-	10 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi
5	Indeks Kualitas Udara	-	88	72	75,19	76,4	78,1
6	SO ₂ tertinggi (µg/m ³)	-	10,66	44	24,75	33,3	53,0
	NO ₂ tertinggi (µg/m ³)	-	24,54	35	10,25	31	20,1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 2021 yang dikelola dalam SIPD



Salah satu instrumen yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bandung dalam pembinaan terhadap usaha/kegiatan adalah melalui penerapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang merupakan program untuk mengevaluasi ketaatan dan kinerja penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. PROPER mendorong para pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. PROPER yang awalnya alat pengawasan, telah berkembang menjadi kerangka kerja kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha

untuk mengatasi persoalan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan tidak meninggalkan esensi utama ketaatan terhadap peraturan (KLHK, 2018). Program serupa yang diselenggarakan di tingkat Provinsi adalah PROPERDA, selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyelenggarakan program serupa yang bernama Properkab. Berikut adalah peringkat perusahaan yang mengikuti PROPER, PROPERDA, dan PROPERKAB dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2-60
Peringkat PROPER Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Peringkat	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Emas	2	7%	2	6%	2	7%	3	12%	3	11%
Hijau	1	3%	1	3%	1	4%	0	0%	0	0%
Biru	23	77%	24	77%	19	70%	22	85%	16	57%
Merah	4	13%	4	13%	5	19%	1	4%	9	32%
Hitam	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	30	100%	31	100%	27	100%	26	100%	28	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-61
Peringkat PROPERDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Peringkat	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Biru	32	54%	33	67%	25	74%	15	88%	5	50%
Merah	27	46%	16	33%	9	26%	2	12%	5	50%
Hitam	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	59	100%	49	100%	34	100%	17	100%	10	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-62
Peringkat PROPERKAB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Peringkat	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Biru	0	0%	3	18%	8	35%	9	36%	0	0%
Merah	0	0%	14	82%	15	65%	16	64%	0	0%
Hitam	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	0	0%	17	100%	23	100%	25	100%	0	0%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Berdasarkan data di atas, secara umum Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan dari peringkat PROPER tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 96% taat. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terdapat penambahan kriteria penilaian yang belum dapat dipenuhi oleh peserta PROPER sehingga perlu adanya penguatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan yang berperingkat biru, hijau dan emas memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi untuk perusahaan yang berperingkat merah dan hitam masih belum konsisten dalam melaksanakan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Instrumen lain yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bandung adalah melalui penegakan hukum lingkungan berupa penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sejak tahun 2016 hingga 2020 telah diberikan sanksi administrasi berturut-turut sebanyak 13, 38, 44, 35, dan 27. Berdasarkan jumlah sanksi yang diberikan, menunjukkan bahwa pelaku usaha kurang konsisten dalam melaksanakan seluruh kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itulah pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk menjahejaterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

Banyaknya kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi termasuk di Kabupaten Bandung, membuktikan bahwa perlu adanya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk peran serta dapat berupa: pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau; penyampaian informasi dan/atau laporan. Sejak tahun 2018, DLH Kabupaten Bandung telah melakukan pemantauan permasalahan/isu lingkungan di bidang lingkungan

hidup (Badega Lingkungan) untuk memperkuat ruang partisipasi dan peran aktif dalam pengawasan sosial sehingga menjadi bagian dari penanggulangan permasalahan lingkungan. Adapun sasaran kegiatan ini adalah tumbuhnya kepedulian dan rasa memiliki yang diwujudkan dalam bentuk tumbuhnya spirit dan nilai-nilai “Jaga Kampung Jaga Lembur” pada komponen masyarakat di wilayah segmentasi (5 segmen).

2. Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan

Upaya konservasi dan pengendalian kerusakan lahan merupakan isu hijau yang secara signifikan menjadi unsur penting dalam perhitungan IKLH yang disimbolisasikan dengan IKTL. Walaupun berdasarkan formula hanya unsur “luas lahan non hutan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung, tetapi upaya yang dilakukan terdiri dari berbagai aspek yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, seperti: upaya peningkatan tutupan lahan melalui Rehabilitasi/Penanaman, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembangunan Taman Kehati dan Tahura, Pelaksanaan Program Unggulan Strategis Kampung Bedas, serta program dan kegiatan inovatif dan kolaboratif lainnya.

(i) Peningkatan Luas Tutupan Lahan

Tutupan lahan suatu wilayah merupakan nilai perbandingan antara luas hutan dan non hutan di wilayah tersebut dengan luas total wilayah. Yang dimaksud dengan lahan non hutan yang dapat diperhitungkan dalam IKTL adalah: semak belukar, Ruang Terbuka Hijau (bandara, permukiman, pemakaman, taman, sempadan jalan, sempadan sungai), kebun raya, dan Taman Keanekaragaman Hayati.

Untuk meningkatkan nilai IKTL, khususnya unsur tutupan lahan non hutan, sejak tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup menggagas berbagai kegiatan konservasi berbasis kesejahteraan, antara lain dengan skema bahwa kegiatan penanaman harus dijamin keberlanjutan pemeliharannya, kewajiban penanaman “1 orang 2 pohon” untuk warga Kabupaten



Bandung, fasilitasi penanaman di lokasi lahan kritis di Kabupaten Bandung untuk warga Kabupaten Bandung maupun luar Kabupaten Bandung, pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati, penanaman dengan pola sabuk gunung pada lahan dengan kemiringan 300, pembangunan pembibitan berbasis masyarakat, pengembangan Kampung Konservasi Tematik, pembangunan Hutan Tematik, dan rencana rintisan pembangunan Tahura Gunung Wayang.

Program dan kegiatan tersebut didukung dengan berbagai norma dan regulasi, antara lain:

- a. Instruksi Bupati Bandung No. 2 Tahun 2018 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sampah Organik melalui Pembuatan Lubang Resapan Biopori/Lubang Cerdas Organik,
- b. Instruksi Bupati Bandung No. 3 Tahun 2018 tentang Konservasi Berbasis Ibadah dan Kesejahteraan melalui Gerakan Tanam Pohon Kesayangan,
- c. Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2020 tentang Pola Tanam Perlindungan dan Konservasi Lahan, Hutan, serta Daerah Resapan Air di Wilayah Kabupaten Bandung,

Serta beberapa kegiatan kemitraan dan kolaboratif yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama, yaitu:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) tanggal 15 Agustus 2017 tentang Kerjasama Sinergitas Pengelolaan Hutan.
- b. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT Perkebunan Nusantara VIII tanggal 28 Maret 2019 tentang Sinergitas Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kritis pada PTPN VIII di Kabupaten Bandung.
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Kamojang tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Keanekaragaman Hayati di Kampung Ciseupang Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Kegiatan-kegiatan tersebut, bersama-sama dengan upaya mandiri masyarakat yang tercatat,

meningkatkan luas tutupan lahan berturut-turut tahun 2018, 2019, dan 2020 seluas 48,63 ha, 407,0 ha, dan 84,28 ha. Dari pengolahan data terhadap luas lahan non hutan tersebut, dihasilkan nilai IKTL berturut-turut 49,07, 49,21, dan 49,24 atau meningkat sebesar 0,06-028%.

(ii) Pengendalian Perubahan Iklim

Untuk merespons isu lingkungan hidup global yang juga dipandang strategis secara nasional, dilakukan pula upaya pengendalian perubahan iklim. Upaya pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan masyarakat di tingkat tapak.

Secara global pengendalian perubahan iklim dikaitkan dengan pembangunan rendah karbon yang harus menjadi arus utama dalam prinsip pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung. Kegiatan ini diimplementasikan antara lain melalui peningkatan upaya mitigasi melalui penurunan emisi GRK pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik; dan upaya adaptasi melalui peningkatan adaptasi masyarakat yang antara lain dilakukan dengan Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim dan pembangunan prototype unit adaptasi perubahan iklim (Sumur Resapan, Instalasi Pemanenan Air Hujan, dan pembuatan Lubang Resapan Biopori/Lubang Cerdas Organik); serta gabungan upaya adaptasi dan mitigasi melalui beberapa program berbasis masyarakat yang sinergi dengan perangkat daerah terkait, seperti Proklim, Kampung Bedas, dan Sekolah Adiwiyata.

(iii) Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati dan Taman Hutan Raya

Konservasi yang dilaksanakan sesuai kaidah secara umum dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Kajian Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung Tahun 2014 menampilkan informasi bahwa terdapat kekayaan sumber daya hayati di Kabupaten Bandung yang memadai. Namun demikian, kegiatan pembangunan dan kegiatan antropogenik lainnya telah menyebabkan terjadinya "peralihan fungsi" pada 9% komunitas, "aman dari perubahan fungsi" pada 7% komunitas, dan "rawan



dari perubahan fungsi” pada 84% komunitas. Sementara itu dari aspek keutuhan komunitas, 4 komunitas vegetasi hutan primer “terjamin keutuhannya”; 12 komunitas hutan dan 8 komunitas vegetasi rawa 8 “perlu diperiksa keutuhannya”; dan 15 komunitas vegetasi ladang/tegalan, 2 komunitas vegetasi lahan terbuka, 15 komunitas vegetasi permukiman, 16 komunitas vegetasi perkebunan, 12 komunitas vegetasi sawah, 12 komunitas vegetasi sawah tadah hujan, dan 14 komunitas vegetasi semak belukar dinyatakan “terancam keutuhannya”, sehingga salah satu rekomendasi adalah dibangunnya Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati). Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi insitu dan/atau eksitu, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemacaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya. Manfaat Taman Kehati adalah koleksi tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit, sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal; sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata; sumber bibit dan benih, RTH, dan penambahan tutupan vegetasi.

Setelah melalui survei pada 16 calon lokasi yang dilakukan pada tahun 2015-2016, ditetapkan lahan seluas 10,8 ha milik Pemerintah Kabupaten Bandung di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka sebagai Taman Kehati Kabupaten Bandung. Saat ini pembangunan Taman Kehati yang dilakukan sejak tahun 2018 sudah mencapai 30% pembangunan infrastruktur dan 20% penanaman vegetasi berdasarkan DED yang disusun pada tahun 2017. Pengamatan terhadap Taman Kehati pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Ahli Keanekaragaman Hayati menunjukkan bahwa dari citra satelit nampak adanya pengayaan koleksi; sementara berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Power Kamojang POMU dan Universitas Padjadjaran telah tampak hadirnya satwa endemik Elang Jawa, Kucing Hutan, dan beberapa jenis avifauna, seperti: Sikep, Madu Asia, Cekakak Jawa, Julang Mas, Wergan Jawa, Takur Tohtor, dan Celepek Reban.

Sementara itu, dalam rangka memastikan peran Pemerintah Kabupaten Bandung konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan di hulu Sungai Citarum atau di Kawasan Gunung Wayang, digagas rencana rintisan Pembangunan Tahura Gunung Wayang yang dapat diharmonisasi dengan gagasan lain, seperti pengembangan Destinasi 3 Danau (Cisanti, Cileunca, dan Patengan) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (Pangalengan-Kertasari) dengan basis konservasi dan pertanian. Sebagai langkah awal, pada tahun 2019 telah dilakukan FGD Rencana Pembangunan Tahura Gunung Wayang dan penyusunan Pra-Studi Kelayakan Tahura Gunung Wayang. Hasil Pra-Studi Kelayakan antara lain menyatakan bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Kawasan Hutan Gunung Wayang saat ini telah mengalami perubahan yang sangat besar, yang diindikasikan dengan hilangnya keutuhan struktur vegetasi hutan hujan pegunungan walaupun beberapa jenis tumbuhan asli yang menjadi bagian dari komposisi hutan hujan pegunungan masih dapat dijumpai. Dinamika kondisi keanekaragaman hayati dan perkembangan vegetasi melalui proses suksesi sekunder merupakan modal dasar penting bagi pembangunan Tahura Gunung Wayang.

Kabupaten Bandung memiliki lanskap pegunungan yang membentang melingkar dari ujung bagian utara, barat, timur, tenggara, hingga wilayah selatan. Dari data yang dipublikasikan Gunung Institute sekurang-kurangnya terdapat 280 gunung yang berada di dalam administrasi Kabupaten Bandung (Pepep DW, 2018). Namun demikian dari jumlah tersebut, hanya 10% atau sekitar 28 gunung saja yang status dan fungsi formalnya masuk pada kategori kawasan konservasi, khususnya Cagar Alam dan Taman Buru. Artinya 252 gunung lainnya yang berada di luar kawasan konservasi, secara formal rentan terhadap intervensi, pemanfaatan langsung, yang dapat mengubah keutuhan kawasan, atau kerusakan.

Di saat yang bersamaan, perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat memiliki konsekuensi terhadap peningkatan intervensi terhadap kelestarian alam, khususnya hutan dan gunung-gunung di Kabupaten Bandung. Untuk itu diperlukanantisipasi sejak dini guna menghadapi



tangan tersebut ke depan. Salah satu upaya formal dalam upaya pelestarian alam di Kabupaten Bandung adalah dengan usulan penetapan status dan fungsi kawasan dari non-konservasi menjadi kawasan konservasi.

Dari beberapa hasil diskusi grup terfokus, terdapat beberapa poin yang menjadi hasil rekomendasi, di antaranya:

- 1) urgensi usulan penetapan kawasan konservasi sejalan dengan semangat inisiasi penetapan Kawasan Bandung Selatan yang di dalamnya memuat lanskap pegunungan Malabar
- 2) Taman Nasional merupakan kawasan konservasi yang dirasa relevan dengan keadaan eksisting, luasan (-/+ 14.500 Ha), keanekaragaman-hayati, sosial budaya, termasuk sejarah, dan potensi jasa lingkungan. Untuk itu maka diperlukan segera dilakukan proses usulan penetapan pegunungan Malabar untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status Kawasan Pelestarian Alam, dan fungsi Taman Nasional sebagaimana UU 5 1990, UU 41 1999.
- 3) Diperlukan tim kolaboratif yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, penggiat lingkungan, dan stakeholder dalam upaya akselerasi sehingga usulan penetapan TN di Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

(iv) Program Unggulan Strategis Kampung Bedas serta Program Berbasis Masyarakat dan Kolaboratif Lainnya

Untuk meningkatkan optimalisasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), khususnya konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat, antara lain melalui Program Unggulan Strategis Kampung Bedas (Bersih dan Sehat). Tujuan Kampung Bedas adalah menciptakan desa/kelurahan yang secara mandiri dapat memahami, menangani, dan mengelola permasalahan serta potensi lingkungan

hidup di wilayahnya dan memiliki kemampuan melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan unggulan tematik kewilayahan. Sampai saat ini jumlah Kampung Bedas 95 desa pada 27 kecamatan.

Program Kampung Bedas di Kabupaten Bandung dimulai sejak tahun 2017 dan sampai saat ini telah terwujud 95 (35% dari jumlah desa/kelurahan) Kampung Bedas yang tersebar pada 27 kecamatan. Capaian kinerja Kampung Bedas ditentukan melalui 10 indikator, yaitu: (a) terbitnya regulasi di tingkat desa/kelurahan tentang PPLH, (b) tersusunnya Rencana Aksi dalam upaya PPLH; (c) terwujudnya lokasi kampung percontohan; (d) terbentuknya kader lingkungan yang menjadi pelopor dan edukator; (e) terciptanya basis unggulan tematik kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan potensi; (f) tumbuhnya kegiatan swadaya dan gotong royong dalam kegiatan PPLH; (g) terbangunnya budaya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dan sirkular ekonomi; (h) terbangunnya sarana dan prasarana penunjang upaya PPLH; (i) terlaksananya kegiatan konservasi; dan (j) terbangunnya kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak.

Selain Program Kampung Bedas, juga dilaksanakan program PPLH lainnya yang berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait, seperti Sekolah Adiwiyata yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Sampai saat ini telah terwujud sebanyak 343 Sekolah Adiwiyata yang tersebar pada 31 kecamatan serta dari tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bandung. Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki sarana prasarana penunjang pengelolaan lingkungan yang memadai, serta melakukan kemitraan terkait pengelolaan lingkungan dengan berbagai pihak.

Berikut ditampilkan Rekapitulasi Jumlah Sekolah Adiwiyata, Desa/Kelurahan Kampung Bedas, dan Lokasi Proklamasi (Program Kampung Iklim).



Tabel 2-63

Rekapitulasi Jumlah Sekolah Adiwiyata, Desa/Kelurahan Kampung Bedas, dan Lokasi Proklim

Tahun	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Jumlah Kampung Bedas	Jumlah Lokasi Proklim
2010-2016	69	N/A	6
2017	44	10	N/A
2018	67	25	2
2019	76	40	7
2020	*	*	11
2021	74	20	N/A
Jumlah	343	95	26

Keterangan: *kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan pandemi Covid-19

3. Persentase Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah. Volume sampah yang tertangani di Kabupaten Bandung menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada selang waktu tahun 2016 – 2020. Pada awal tahun 2016 persentase volume sampah yang tertangani hanya sebesar 320 ton per hari atau sebanyak 24% total volume sampah yang dihasilkan. Persentase ini terus meningkat hingga tahun 2020 dengan persentase volume sampah yang tertangani sebesar 43,435 atau sebanyak 510,24 ton/hari dari jumlah timbulan sampah sebanyak 1.321 ton/hari.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah baik pendekatan kebijakan maupun pendekatan teknis. Pendekatan kebijakan dimaksud yaitu telah diterbitkannya beberapa peraturan di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Bupati Bandung 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020;
8. Instruksi Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sinergi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bandung Tahun 2018;
9. Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi SDA dan Pengelolaan Sampah melalui Pembuatan LCO/LRB;
10. Instruksi Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Gerakan Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bandung;
11. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2037.

Sedangkan pendekatan teknis dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung telah



melakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui:

1) Penambahan Armada

Penambahan armada truk pengangkut sampah sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 sebanyak 20 Unit terdiri dari 14 Unit arm roll, 3 Unit Dump Truk dan 3 Unit Tronton. Total jumlah armada hingga tahun 2020 adalah sebanyak 110 dengan rincian Tronton sebanyak 6 unit, Arm roll 37 unit dan Dump Truk 67 unit. Namun 1 unit tronton sudah dalam keadaan rusak berat sehingga jumlah kendaraan pengangkut efektif sebanyak 109 unit.

2) Fasilitas Pengolahan Sampah

- Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah pada tahun 2017 di Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah dengan kapasitas 10 ton per hari.
- Pembangunan Pusat Edukasi dan Pengelolaan Sampah (PUSPA) pada tahun 2019 di Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah dengan kapasitas 6 ton per hari.
- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) pada tahun 2019 di Desa Bojong Kecamatan Majalaya dengan kapasitas 30 – 50 ton per hari.
- Pembangunan TPS3R Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 sudah terbangun sebanyak 33 unit yang tersebar di wilayah kabupaten Bandung dengan kapasitas masing-masing 1 – 2 ton per hari. Sehingga total TPS3R terbentuk sampai dengan tahun 2020 sebanyak 135 unit.

3) Inovasi Program

- Program Raksa Desa melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran

2020 telah mendorong terbentuknya Bank Sampah Tematik di 270 desa pada tahun 2020.

- Dalam rangka penguatan kampanye bank sampah telah dilakukan registrasi terhadap bank sampah unit sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 sebanyak 318 unit.
- Telah dilakukan kampanye secara masif sejak tahun 2017 mengenai penggunaan tumbler, penggunaan wadah ramah lingkungan sebagai pengganti wadah qurban pada kawasan permukiman dan pembatasan timbulan di kawasan perkantoran.

Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam **Tabel 2-64**.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan dalam pengelolaan sampah masih terkendala dengan:

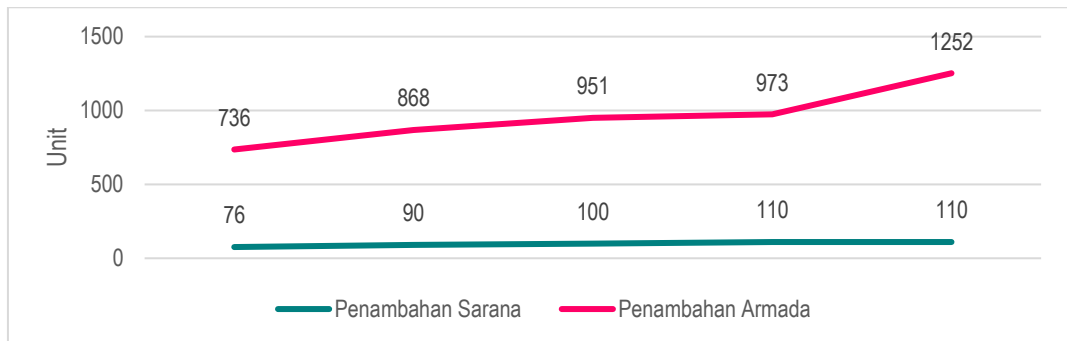
- 1) Perlu ditingkatkannya partisipasi dan peran serta masyarakat melalui Bimtek dan Sosialisasi;
- 2) Belum memadainya rasio jumlah sarana pengelolaan sampah dengan jumlah timbulan sampah baik yang berupa infrastruktur sarana dan prasarana sebagai fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah, bank sampah tematik dan TPS3R;
- 3) Belum memadainya ketersediaan sarana prasarana untuk pengangkutan sampah meliputi armada pengangkutan, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai dengan dokumen rencana induk pengelolaan sampah tahun 2016 – 2037;
- 4) Belum tersedia tempat pemrosesan akhir sampah (TPPAS) lokal Kabupaten Bandung yang memenuhi standar teknis maupun non teknis sangat diperlukan sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 9.

Tabel 2-64

Jumlah Kumulatif Per Tahun Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

Jumlah Kumulatif Per Tahun Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah					
Nama Infrastruktur	2016	2017	Jakstrada		
			2018	2019	2020
Sarana Penanganan					
Tronton	3	3	3	6	6
Amrol Truk	16	23	31	37	37
Dump Truk	61	64	66	67	67
Alat Berat Buldozer	1	1	1	1	1
Alat Berat Wheel Loader	1	1	1	1	1
Motor Roda 3 Sampah	11	11	18	18	18
Kompektor Truk	2	2	2	2	2
Pick Up	6	6	6	7	7
Alat Berat Excavator	2	2	2	2	2
TPS 3R	102	117	118	127	135
Bank Sampah	137	244	317	318	318
TPST	0	1	1	1	1
Bank Sampah Tematik	0	0	0	0	270
TPA Babakan	1	0	0	0	0
TPSS	700	721	1.312	1.932	2.068

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



Gambar 2-61

Grafik Jumlah Kumulatif Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah/Tahun pada Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Progres persentase sampah tertangani di Kabupaten Bandung dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Volume sampah tertangani menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2020 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pada tahun 2016 volume sampah terkelola sebesar 320 ton per hari atau sebanyak 24,00 % dari total timbulan sampah sebesar 1.333 ton per hari
2. Pada tahun 2017 volume sampah terkelola sebesar 384 ton per hari atau sebanyak 30,25 % dari total timbulan sampah sebesar 1.280 ton per hari
3. Pada tahun 2018 volume sampah tertangani sebesar 481 ton per hari atau sebanyak 32,19 % dari total timbulan sampah sebesar 1.301 ton per hari
4. Pada tahun 2019 volume sampah tertangani sebesar 452 ton per hari atau sebanyak



- 34,82 % dari total timbulan sampah sebesar 1.321 ton per hari
5. Pada tahun 2020 volume sampah tertangani sebesar 543 ton per hari atau sebanyak 41,12 % dari total timbulan sampah sebesar 1.321 ton per hari

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal Penanganan Sampah adalah sebagai berikut.

Tabel 2-65
Persentase Volume Sampah yang tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Target Jakstrada	Realisasi	Target Jakstrada	Realisasi	Target Jakstrada	Realisasi	Target Jakstrada	Realisasi
1	Jumlah Volume Sampah yang tertangani	921 ton/hari	384 ton/hari	949 ton/hari	481 ton/hari	1.056 ton/hari	459 ton/hari	990 ton/hari	510,24 ton/hari
2	Jumlah Volume Sampah yang dihasilkan	1.280 ton/hari		1.301 ton/hari		1.321 ton/hari		1.321 ton/hari	
3	Persentase (%)	72	30,25	73	32,19	80	34,82	75	41,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

4. Persentase Pengurangan Sampah

Adapun upaya lain dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah di sumber sampah yaitu melalui kegiatan sebagai berikut.

(i) Pembatasan Timbulan

Pembatasan timbulan sampah dilakukan sebelum sampah terjadi timbulan sampah. Pembatasan timbulan dilakukan pada kawasan permukiman maupun perkantoran. Pembatasan dilakukan dengan menggunakan kampanye penggunaan tumbler dan penggunaan wadah ramah lingkungan di kawasan perkantoran. Selain itu kampanye penggunaan wadah ramah lingkungan dilakukan pada saat qurban selama 4 tahun terakhir. Melalui Instruksi Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Gerakan

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung telah menghimbau retail untuk melakukan timbulan pembatasan plastik.

(ii) Penanganan Sampah Berbasis Rumah Tangga

Pengolahan dengan 3R di Kabupaten Bandung dilakukan dalam tahapan dari sumber hingga ke fasilitas pengelolaan 3R seperti Bank Sampah Tematik, TPST/PDU, dan TPS 3R. Walaupun kegiatan memang lebih berat di fasilitas 3R namun Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berusaha menyadarkan dan megedukasi masyarakat bahwa pengelolaan dengan 3R dapat memberikan daya guna bagi sampah. Pengurangan timbulan dilakukan dengan menggunakan proses composting melalui Lubang Cerdas Organik (LCO), dengan BSF



(Magot) dan dengan composting biasa seperti bata terawang/kompos timbun. Melalui LCO warga Kabupaten Bandung telah melakukan konservasi sumber daya air dan pengelolaan sampah dengan pembuatan LCO sebanyak 2 lubang di setiap rumah. Sehingga pada setiap rumah organik dapat habis di sumber melalui LCO sedangkan untuk anorganik dapat ditabung ke bank sampah terdekat.

(iii) Bank Sampah/Bank Sampah Tematik

Bank sampah merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan pemecuan bagi kelompok-kelompok pengelola sampah dan masyarakat pada umumnya. Bank sampah memiliki fungsi ekonomi karena bank sampah lebih banyak memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomi tinggi (*high value*). Jumlah bank sampah di Kabupaten Bandung hingga tahun 2021 sebanyak 318. Di Kabupaten Bandung untuk mendukung program ini dilakukan inovasi dengan menambah tematik yaitu meningkatkan nilai tambah dari penanganan dan pemanfaatan bank sampah melalui magot, hidroponik dan terintegrasi dengan budidaya ternak seperti lele atau ayam.

Rintisan Pengembangan Bank Sampah Tematik adalah Program edukasi pengelolaan sampah berbasis rumah tangga/ masyarakat dalam skala kawasan tertentu/ komunal untuk mendorong penguatan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan memperkuat keberadaan serta fungsi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS/TPS3R), sehingga secara optimal mampu mendukung pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau paling tidak secara bertahap mampu mengurangi potensi timbulan sampah yang dibuang ke TPS sekaligus ditujukan untuk mengubah "mindset" bahwa sampah bukan sumber masalah melainkan sumber daya lingkungan serta mengubah cara pandang tentang tanggung jawab sebagai sumber sampah sekaligus sumber solusi dalam pengelolaan

sampah. Penguatan tematik antara lain meliputi:

- Pengolahan dan pemanfaatan sampah organik melalui gerakan LCO, komposter dan atau melalui biokonversi maggot yang terintegrasi dengan budidaya ikan dan ternak (ayam /bebek/kalkun) serta budidaya tanaman hidroponik / budidaya tanaman hias serta pengembangan pembibitan/persemaian.
- Pemanfaatan sampah anorganik melalui Bank Sampah dan Teknologi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat / peyeumisasi) menjadi briket sampah.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung telah mendorong terbentuknya sebanyak 270 Unit Bank Sampah Tematik yang tersebar di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Bandung dimana 270 unit didukung melalui Program Raksa Desa. Rintisan pengembangan bank sampah tematik kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 dengan bantuan anggaran sebesar Rp. 33.000.000 per lokasi.

(iv) Biodigester

Pengurangan sampah menggunakan biodigester lebih di titik beratkan pada lokasi-lokasi yang terdapat timbulan sampah organik basah (organik lunak) seperti pasar atau pusat makanan (foodcourt). Di Kabupaten Bandung biodigester skala besar terdapat di pasar Margahayu sedangkan biodigester skala rumah tangga terdapat di taman edukasi Dinas Lingkungan Hidup atau di TPS3R Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan biodigester skala besar yang berada di Stasiun peralihan Antara (SPA) Bojong-Majalaya dengan kapasitas 2 ton/har

i.

Tabel 2-66
Persentase Volume Sampah yang terkurangi di Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Target Jakstrada	Realisasi	Target Jakstrada	Realisasi	Target Jakstrada	Realisasi	Target Jakstrada	Realisasi
1	Jumlah Volume Sampah yang terkurangi	192 ton/hari	205,7 ton/hari	195 ton/hari	220,4 ton/hari	264 ton/hari	282,1 ton/hari	290 ton/hari	280,7 ton/hari
2	Jumlah Volume Sampah yang dihasilkan	1.280 ton/hari		1.301 ton/hari		1.321 ton/hari		1.321 ton/hari	
3	Persentase (%)	15	16,07	18	16,94	20	21,35	22	21,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Strategi pemerintah daerah dalam proses pemindahan dan atau pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Akhir dilaksanakan melalui strategi penyiapan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Tempat pembuangan sampah sementara terdiri dari beberapa pola dan mekanisme, antara lain:

1. Tempat penampungan berupa bank sampah
2. Tempat penampungan berupa TPS3R
3. Tempat penampungan berupa TPST
4. Tempat penampungan berupa pepadatan dalam bentuk kontainer atau dump truk yang dilakukan secara *door to door* baik dalam mekanisme pembuangan setiap hari, 3 kali seminggu dan 1 kali seminggu.

Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 adalah sebanyak 721 unit berlokasi di pasar, perumahan, permukiman dan kawasan perusahaan. Daya tampung TPSS tersebut sebesar 4.272 meter kubik. Rasio daya tampung TPSS ideal yaitu 1:3.002 hal tersebut menunjukkan bahwa 1 TPSS dalam kondisi ideal harus menampung 3.002 jiwa. Jika dilihat

pada perbandingan rasio TPSS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 yaitu 1:5.137, maka pada tahun 2017 daya tampung TPSS dapat menampung 5.137 jiwa, hal tersebut belum dalam kondisi ideal maka diperlukan penambahan TPSS di tahun berikutnya. Namun pada tahun 2020 jumlah TPSS di Kabupaten Bandung sudah mencapai sebanyak 2.068 unit dengan daya tampung 12.408 meter kubik, rasio daya tampung terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 1:1.752 atau 164% dari kebutuhan. Sehingga kebutuhan TPSS pada tahun 2020 telah terpenuhi. Rasio perbandingan terdapat pada **Tabel 2-67**

6. Rasio Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R

Pengumpulan di TPS / TPS3R dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan kesanggupan dari setiap pengelola. Dalam praktiknya rata-rata setiap minggu dilaksanakan 2-3 kali/minggu. Proses ini sama dengan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mobil truk yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya operasional dan mengedukasi masyarakat agar mengelola dan memilah dari sumber.



Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R) untuk yang proses pemilahan dan pengolahan untuk sampah organik melalui *composting* dengan metode *open windrow* atau bata terawang dan metode biokonversi maggot dengan menerapkan prinsip *circular economy* selain itu dilakukan pengelolaan sampah anorganik. Jumlah TPS3R di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 adalah sebanyak 117 unit. Daya tampung TPS3R tersebut sebesar 702 meter kubik. Rasio daya tampung TPS3R ideal yaitu 1:3.002 hal tersebut menunjukkan bahwa 1 TPS3R dalam kondisi ideal harus menampung 3.002 jiwa atau 600 KK. Jika dilihat

pada perbandingan rasio TPS3R terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 yaitu 1:31.262, maka pada tahun 2017 daya tampung TPS3R dapat menampung 31.262 Jiwa, hal tersebut belum dalam kondisi ideal maka diperlukan penambahan TPS3R di tahun berikutnya. Namun pada tahun 2020 jumlah TPS3R di Kabupaten Bandung baru mencapai sebanyak 135 unit dengan daya tampung 810 meter kubik, rasio daya tampung terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 1:26.843 atau 10,7% dari kebutuhan. Sehingga kebutuhan TPS3R pada tahun 2020 masih memenuhi standar kebutuhan yaitu sebanyak 1.258 unit maka diperlukan penambahan TPS3R. Rasio perbandingan terdapat pada **Tabel 2-68**

Tabel 2-67

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPSS (unit)*	700	721	1.312	1.932	2.068
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m3)	4.200	4.272	7.872	11.952	12.408
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
4	Rasio Daya Tampung TPSS Ideal	1:3002	1:3002	1:3002	1:3002	1:3002
5	Rasio Daya Tampung TPSS terhadap jumlah penduduk	1:5.138	1:5.137	1:2.833	1:1.954	1:1.752
6	Kebutuhan TPSS terhadap jumlah penduduk	1269	1219	1238	1258	1258
7	Persentase Daya Jumlah TPSS terhadap jumlah penduduk	55,2%	58,4%	106%	153,6%	164,4%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-68

Rasio Tempat Pengelolaan Sampah 3R Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TP3R (unit)*	102	117	118	127	135
2	Jumlah Daya Tampung TPS3R (m3)	702	702	708	762	810
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
4	Rasio Daya Tampung TPS3R	1:3002	1:3002	1:3002	1:3002	1:3002
5	Rasio Daya Tampung TPS3R terhadap jumlah penduduk	1:35.261	1:31.262	1:31.502	1:29.727	1:26.843



No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Kebutuhan TPS3R terhadap jumlah penduduk	1.268	1.218	1.238	1.258	1.258
7	Persentase Daya Jumlah TPS3R terhadap jumlah penduduk	8,0%	9,6%	9,5%	10,1%	10,7%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang mencerminkan Kabupaten Bandung dari segi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase penduduk yang memiliki administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dilakukan perhitungan berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Nikah. Saat ini, KTP yang dimiliki oleh penduduk

Kabupaten Bandung sudah merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP atau KTP-el).

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung cenderung meningkat. Didukung oleh berbagai inovasi dalam pelayanan kependudukan yang berbasis digital, kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung pada urusan ini di tahun 2020 tetap meningkat walau di masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial. Selengkapnya, kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 2-69
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Keterangan
2016	2.198.931	2.465.179	89,20	(e-KTP)
2017	2.243.502	2.509.452	89,40	(e-KTP)
2018	2.389.077	2.435.478	98,09	(e-KTP)
2019	2.413.745	2.462.876	98,01	(e-KTP)
2020	2.409.401	2.484.734	99,37	(e-KTP)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-70
Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga	Keterangan
2016	956.805	1.137.816	84,09	SIAK
2017	1.012.354	1.174.978	86,16	SIAK
2018	1.054.096	1.170.759	90,04	SIAK
2019	1.095.631	1.196.250	91,59	SIAK
2020	1.101.493	1.172.677	93,93	SIAK

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-71

Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2016	2.276.697	3.512.189	64,82
2017	2.538.695	3.525.149	72,02
2018	1.086.851	1.221.652	88,97
2019	1.057.253	1.178.692	89,70
2020	1.069.948	1.209.277	88,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-72

Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Target Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim
2016	358	380	94,21
2017	306	400	76,5
2018	373	416	89,66
2019	423	432	97,92
2020	355	204	174,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Kartu Keluarga merupakan data yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga karena di dalam kartu ini berisi data lengkap mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kabupaten Bandung mengalami peningkatan rasio penduduk ber-KK per satuan keluarga selama selang waktu tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, rasio penduduk ber-KK per satuan keluarga adalah 89,20. Angka ini meningkat secara signifikan di tahun 2020 dengan rasio sebesar 93,93.

Akta kelahiran merupakan bukti sah yang memuat informasi terkait identitas setiap individu yang lahir. Melihat pentingnya memiliki akta kelahiran, rasio cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bandung terus meningkat sejak tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020, rasio cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bandung adalah sebesar 88,43.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung menerbitkan akta perkawinan non-muslim untuk warga Kabupaten Bandung, untuk warga muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Persentase penerbitan akta perkawinan non-muslim di Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah sebesar 174,02%.

F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan indikator kelompok binaan PKK dan LSM aktif. Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan ini cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan jumlah LSM terdaftar pada tahun 2018-2020. Selengkapnya kinerja penyelenggaraan urusan ini di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, maju dan mandiri. Jumlah PKK di Kabupaten Bandung tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan



tahun 2016. Informasi mendetail mengenai kelompok binaan PKK di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-73**.

Tabel 2-73
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pemberdayaan masyarakat						
1	Jumlah PKK	56.809	87.054	69.042	67.978	67.978
	Jumlah PKK Aktif	51.582	73.995	62.137	64.579	64.579
	Persentase PKK Aktif (%)	90,80	84,99	90	95,00	95,00
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	5.227	44.736	13.964	15.138	15.490
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,10	0,60	0,22	0,23	0,24

Sumber: DPMD Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah LSM, baik jumlah LSM terdaftar maupun jumlah LSM aktif. Tahun 2020, sekitar 311 LSM terdaftar di Kabupaten Bandung memiliki status aktif.

Tabel 2-74
Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM terdaftar	265	274	262	267	338
2	Jumlah LSM tidak aktif	32	27	12	55	27
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	233	247	250	322	311

Sumber: Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan melalui indikator rasio akseptor Keluarga Berencana (KB). Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB

adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan ini cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Hal ini juga dapat disebabkan oleh fluktuatifnya jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Bandung. Selengkapnya, rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 2-75**.

Tabel 2-75
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2016	580.334	703.383	82,51
2017	587.289	714.046	82,25
2018	603.950	730.128	82,72
2019	554.413	699.669	79,84
2020	554.422	683.705	81,09

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

H. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan mencakup rasio izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan jumlah uji KIR angkutan umum. Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan ini cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani, meski jumlah angkutan yang meningkat. Terlebih lagi, penyelenggaraan urusan ini juga terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kinerja pada tahun 2020 menurun. Selengkapnya, gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut.

1. Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengemudi angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebanyak 43 izin. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh disrupsi pandemi COVID-19 yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perekonomian dan terbatasnya pergerakan masyarakat. Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada **Tabel 2-76**.

Tabel 2-76
Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Moda Layanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek					
1	Antar Kota Dalam Provinsi	4.283	4.288	4.288	4.288	4.288
2	Angkutan Perkotaan	2.279	2.277	2.274	2.274	2.264
3	Angkutan Perdesaan	494	495	496	496	496
B	Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek					
1	Angkutan Pariwisata	108	136	150	150	160
2	Angkutan Karyawan	47	47	47	47	47



No.	Moda Layanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Angkutan Sewa Khusus	0	0	67	183	311
4	Angkutan Kawasan Tertentu	56	61	76	87	87
Jumlah Izin Trayek		7.267	7.304	7.398	7.525	7.653
Jumlah Penduduk		3.596.623	3.657.601	3.717.291	3.775.279	3.623.790
Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum		1 : 495	1 : 501	1 : 503	1 : 501	1 : 494

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten Bandung baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan

penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan umum yang telah melakukan uji kir sebanyak 31.751 kendaraan. Data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2016-2020 ditampilkan pada **Tabel 2-77**.

Tabel 2-77
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Angkutan Umum	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil penumpang umum	5.672	5.136	4.406	3.896	2.143
2	Mobil bus	648	656	643	672	489
3	Mobil barang	39.769	38.344	37.327	32.987	28.968
4	Kereta gandingan/tempelan	4	23	63	57	151
Jumlah		46.093	44.159	42.439	37.612	31.751

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

I. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dari aspek komunikasi dan informatika, sejak tahun 2013 seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung telah dilengkapi akses terhadap internet. Dalam mendukung kelancaran transformasi data dan informasi pembangunan antar perangkat daerah, beberapa sistem informasi lokal pun terus dikembangkan dalam lingkungan pemerintah daerah

Kabupaten Bandung. Selama kurun lima tahun, terus terjadi peningkatan jumlah sistem informasi. Upaya digitalisasi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah pun terus dikembangkan pada saat pandemi di tahun 2020. Secara detail, informasi mengenai jumlah ketersediaan sarana/ prasana komunikasi dan informasi di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2-78**.

Tabel 2-78

Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	72	74	74	85	129
2	Jumlah sistem informasi yang ada	71	110	110	131	221
3	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	4	4	4	4	5

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung mencerminkan kinerja yang fluktuatif namun cenderung menguat pada periode 2016-2019. Hal ini ditandai di antaranya dengan meningkatnya persentase koperasi aktif namun secara jumlah koperasi aktif variabel tersebut cenderung menurun. Terlebih lagi, pada tahun 2020, disrupsi pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat dan melemahnya usaha koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, meski secara umum jumlah koperasi menurun, namun pada tahun 2020 jumlah pelaku UKM meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan resiliensi kewirausahaan masyarakat Kabupaten Bandung namun kegiatan tersebut tidak terwadahi dalam usaha koperasi. Secara lebih rinci, gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil

menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Jumlah koperasi pada kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 namun menurun di tahun 2020. Selain itu, ditinjau dari produktivitas koperasi, kinerja koperasi di Kabupaten Bandung masih tergolong rendah. Dari total koperasi yang telah terbangun, selama lima tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 51% koperasi yang berstatus koperasi aktif. Meninjau potensi koperasi terbangun, maka perlu upaya mendorong kinerja koperasi, serta menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif maupun yang terdampak pandemi COVID-19. Informasi detail mengenai perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-79**.

Tabel 2-79

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	861	807	806	853	866
2	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	861	733	786	779	786
3	Jumlah Koperasi	1.722	1.540	1.592	1.632	1.652
4	Persentase Koperasi Aktif (%)	50	52	51	52	52
5	Jumlah Koperasi Produksi	201	175	175	180	197
6	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	137	130	131	133	131

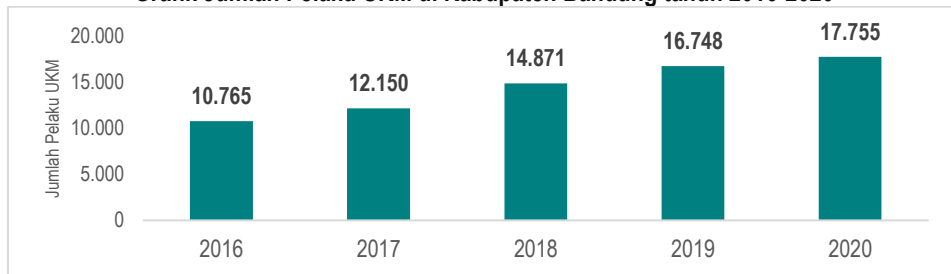
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Jumlah UMKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan perlu didorong agar memiliki peningkatan kapasitas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha mikro, disusul usaha kecil, sementara untuk usaha menengah tidak dimasukkan ke dalam perhitungan dikarenakan menjadi bagian dari kewenangan provinsi.

Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM. Khususnya pada tahun 2020, UKM di Kabupaten Bandung didominasi oleh UKM bidang kuliner yakni sebanyak 9.457 UKM atau setara 53,26% UKM di Kabupaten Bandung. Jenis usaha lainnya yang jumlah pelaku UKM signifikan adalah UKM agrobisnis sebanyak 4.212 UKM atau setara 23,73% UKM di Kabupaten Bandung. Banyaknya pelaku usaha pada kedua jenis UKM tersebut dapat menjadi titik intervensi yang signifikan untuk kembali menguatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk meningkatkan resiliensi kewirausahaan masyarakat pada saat pandemi. Informasi detail mengenai jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2-62** dan **Tabel 2-80**.

Gambar 2-62
Grafik Jumlah Pelaku UKM di Kabupaten Bandung tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-80
Jumlah Pelaku UKM di Kabupaten Bandung Tahun per Jenis Usaha Tahun 2020

Jenis Usaha	Jumlah UMKM
Agrobisnis	4.214
Fashion	2.142
Otomotif	246
Kerajinan	447
Kuliner	9.457
Lainnya	1.249
Total	17.755

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

3. Jumlah Omzet

Jumlah omzet menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Dalam kurun lima tahun terakhir omzet koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan namun mengalami

penurunan di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung. Meski demikian, omzet di tahun 2020 yang masih lebih tinggi dibandingkan omzet



tahun 2019 ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung memiliki potensi resiliensi terhadap disrupsi pandemi.

Tabel 2-81
Jumlah Volume Koperasi dan Omzet Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020

No	Kegiatan	Omzet Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi	716.314.145.613	714.391.795.262	996.224.195.072	994.617.866.963	1.075.426.723.732
2	UMKM	n/a	911.250.000.000	1.115.325.000.000	1.256.100.000.000	1.331.625.000.000

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

K. Urusan Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi atau penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terlihat dari selang tahun 2016 hingga 2020, jumlah investor yang melakukan penanaman modal di

Kabupaten Bandung terus meningkat. Meskipun dalam kondisi pandemi di tahun 2020, jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih di atas 6.000 investor dan Penanaman Modal Asing (PMA) justru meningkat dari 103 investor di tahun 2019 menjadi 154 investor di tahun 2020.

Tabel 2-82
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2016-2020

No.	Investor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	58	71	112	6.992	6.010
2	Penanaman Modal Asing (PMA)	22	27	49	103	154
	Total	80	98	161	7.095	6.164

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir cenderung meningkat. Ditinjau dari jumlah proyek, tahun 2020 proyek PMDN di Kabupaten Bandung berjumlah 6.010 proyek. Jumlah ini menurun jika dibandingkan jumlah proyek PMDN pada tahun sebelumnya yang mencapai 6.992 proyek. Meski demikian, hal ini berbeda dengan realisasi jumlah proyek PMA. Pada tahun 2020, sektor PMA Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebanyak 51 proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa meski jumlah proyek PMDN dan PMA menurun, iklim investasi asing di Kabupaten Bandung masih kuat.

Ditinjau dari segi nilai realisasi investasi, nilai realisasi investasi PMDN terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Meski demikian, nilai realisasi investasi PMA cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun 2019 ke 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah PMA meningkat, nilai realisasi setiap investasi PMA tersebut cenderung dalam jumlah yang lebih sedikit. Adapun secara keseluruhan nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, yakni mencapai Rp. 26.300.207.834.856. Informasi detail mengenai jumlah proyek dan realisasi investasi di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2-83**.

Tabel 2-83
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek			Realisasi Investasi			Penyerapan Tenaga Kerja	
	PMDN	PMA	Total	PMDN	PMA	Total	Indonesia	Asing
2016	2.240	67	2.307	5.297.733.143.668	2.877.269.319.178	8.175.002.462.846	67.027	100
2017	2.669	60	2.729	8.649.022.464.692	2.324.129.700.450	10.773.152.165.142	35.832	45
2018	1.317	49	1.366	8.888.625.245.625	2.189.795.938.221	11.078.421.183.846	41.087	52
2019	6.992	103	7.095	18.899.840.864.553	4.437.902.128.226	23.337.742.992.779	47.283	14
2020	6.010	154	6.164	22.666.440.330.112	3.633.767.504.744	26.300.207.834.856	50.213	33

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran mengenai urusan kepemudaan dan olahraga dapat ditunjukkan melalui indikator-indikator berikut:

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 90 pemuda berprestasi dan 101 organisasi pemuda dengan 54 Organisasi Kepemudaan (OKP) aktif di Kabupaten Bandung. Namun pada tahun 2020 tercatat hanya 1 jumlah sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten Bandung.

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam

memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga. Pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Bandung selain dimotori oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga juga dimotori oleh masyarakat umum yang diwadahi dalam klub dan organisasi olah raga. Tahun 2020, tercatat terdapat sebanyak 100 klub olah raga dan 90 organisasi olah raga.

M. Urusan Statistik

Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2016-2019 ditampilkan dalam **Tabel 2-84**.

Tabel 2-84
Ketersediaan Dokumen Statistik Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	PDRB	√		√			√	√		√	
2	IPM	√		√		√		√		√	
3	Suseda		√		√		√	√		√	
4	KBDA	√		√		√		√			√
								√			√



No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
5	Indeks Gini Ratio		√		√		√	√		√	
6	Input Output		√		√		√		√		√
7	IKM		√		√	√		√		√	
8	IHK		√		√		√		√		√
9	Data Pokok	√			√		√	√		√	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

N. Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 secara umum sudah baik. Hal ini ditandai dengan persentase penyelesaian penegakan K3 yang secara konsisten ada di 100% dan tingginya indeks kepuasan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan persandian secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

1. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-85
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penegakan Perda					
a	Jumlah Pelanggaran Perda	160	468	3101	209	192
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	160	468	3101	209	96
c	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	50
2	Penegakan K3					
a	Jumlah Pelanggaran K3	1.020	1.673	1363	1.798	1.198
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1.020	1.673	1363	1.798	1.198
c	Persentase Penyelesaian Penegakan K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah yang didapatkan melalui survei kepuasan masyarakat pada sarana pendidikan dan kesehatan milik pemerintah serta perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Data yang diperoleh mengenai IKM Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah sebesar 82,37%.

O. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan cerminan jati diri masyarakat pada suatu daerah. Pelestarian budaya diupayakan

melalui pemeliharaan benda-benda, situs, dan kawasan cagar budaya, serta penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut ini merupakan data mengenai benda-benda cagar budaya yang dilestarikan serta data perkembangan kesenian di Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2016-2020.

Hingga tahun 2021, belum ada situs cagar budaya di Kabupaten Bandung yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bandung belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang tersertifikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah melaksanakan pelatihan TACB secara mandiri sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tabel 2-86
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
2016	100	100	100 %
2017	111	111	100 %
2018	111	111	100 %
2019	111	111	100 %
2020	111	111	100 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

P. Urusan Perpustakaan

Gambaran umum mengenai urusan perpustakaan yang akan dibahas meliputi jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

1. Jumlah Perpustakaan

Salah satu sarana pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yaitu sarana perpustakaan. Perpustakaan selain berperan dalam mencerdaskan siswa sekolah, juga berperan untuk mencerdaskan masyarakat secara umum, terutama dengan berkembangnya perpustakaan masyarakat di Kabupaten Bandung. Memandang pentingnya peran

perpustakaan dalam pembangunan pendidikan warga, dalam kurun 2016-2020 pemerintah Kabupaten Bandung senantiasa terus melakukan pembangunan perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan masyarakat.

Meskipun dalam selang tahun 2016-2020 pembangunan perpustakaan di Kabupaten Bandung sempat mengalami fluktuasi, tetapi mulai tahun 2018 terjadi pembangunan perpustakaan secara signifikan. Dalam rentang tahun 2018-2020, pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan masyarakat dan LSM telah berhasil membangun sebanyak 757 unit perpustakaan baru di Kabupaten Bandung. Informasi detail disajikan pada **Tabel 2-87**.



Tabel 2-87
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Jenis Perpustakaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perpustakaan Desa/Kelurahan	276	69	22	92	54
2	Perpustakaan SD/MI	66	934	636	869	1635
3	Perpustakaan SMP/MTs	64	236	208	208	568
4	Perpustakaan SMA/SMK/MA	40	-	138	0	232
5	Perpustakaan SKPD	28	-	-	10	28
6	Perpustakaan PONTREN	37	-	-	0	483
7	Perpustakaan Masyarakat (TBM, RUPIN, dsb)	50	33	-	56	42
Total		561	1.272	1.004	1.241	3.042

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Minat baca masyarakat di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini tercermin dengan adanya kecenderungan kunjungan ke perpustakaan yang meningkat dari tahun 2017-2019 namun mengalami penurunan di tahun 2020,

yakni hanya sebanyak 147.550 kunjungan dari 263.271 di tahun 2019. Adapun ini dapat disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang memindahkan sebagian besar aktivitas masyarakat ke rumah. Informasi detail mengenai jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2-88**.

Tabel 2-88
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan ke perpustakaan	55.072	198.913	255.308	263.271	147.550
2	Populasi yang Harus Dilayani	59.388	3.090.916	2.912.940	2.612.167	3.575.982

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Q. Urusan Kearsipan

Dalam hal kearsipan, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung telah menerapkan kearsipan secara baku guna memiliki sistem kearsipan yang baik untuk kemudian dapat digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku menurun selama kurun waktu 2017-2019 namun meningkat di tahun 2020. Informasi detail disajikan pada **Tabel 2-89**.

Adapun jumlah arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih terbatas. Meski sempat mengalami penurunan jumlah arsiparis di tahun 2016-2019, terdapat peningkatan jumlah arsiparis dari 2 orang di tahun 2019 menjadi 9 orang di tahun 2020. Arsiparis justru mengalami penurunan. Informasi perkembangan jumlah arsiparis di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-90**.



Tabel 2-89
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2016-2020

No.	Perangkat Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Badan	5	5	5	5	6
2	Dinas	20	19	19	19	21
3	Bagian	12	12	12	12	12
4	RSUD	3	3	3	3	3
5	Lembaga Teknis Daerah	2	2	2	2	2
6	Kecamatan	31	31	31	31	31
7	Kelurahan	10	10	10	10	10
8	Desa	270	270	270	270	270
Total		357	353	352	352	354

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2-90
Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Indikator/Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Arsiparis Penyelia (orang)	6	5	5	3	3
2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan (orang)	7	7	5	3	3
3	Arsiparis Pelaksana (orang)	4	1	1	1	1
4	Arsiparis Pertama (orang)	1	2	1	2	2
Total		18	15	12	2	9

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) perdagangan; 7) perindustrian; dan 8) transmigrasi.

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Secara umum, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan terus membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kapasitas kelompok, jumlah pelaku usaha yang bersertifikat, dan terjaganya lokasi-lokasi ikan di perairan umum. Meski demikian, sebagaimana terjadi di tahun 2020, masih perlu diperkuat jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai indikator perikanan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2-91
Indikator Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	5	106	266	560	845



No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	169	169	169	169	183
3	Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	9	9	9	12	12
4	Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (lokasi) (kumulatif)	1	22	32	48	53
5	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	93	95	97	99	99

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

B. Urusan Pariwisata

Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Kabupaten Bandung banyak memiliki area dengan panorama alam yang menjadi daya tarik wisata, terutama di area yang berlokasi di selatan dan utara Kabupaten Bandung. Di samping kawasan pariwisata alam, Kabupaten Bandung juga kaya akan kawasan wisata budaya. Kawasan pariwisata Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi tujuan utama kunjungan domestik, tetapi juga menjadi tujuan wisata mancanegara.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar didominasi oleh wisata alam dan agro.

Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Situ Cileunca, Situ Patengan, Kolam Air Panas Alami Walini, Kolam Air Panas Alami Cimanggu, Kolam Air Panas Alami Cibolang, Perkemahan Rancaupas, Tebing Keraton, Curug Cinulang. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Bandung membangkitkan perekonomian Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020, sektor pariwisata termasuk sektor yang terdampak secara signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah kunjungan wisata dan jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Bandung. Informasi detail mengenai capaian indikator capaian pariwisata di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-92**.

Tabel 2-92
Indikator Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	2.000.000	2.152.222	2.449.515	2.807.660	2.072.697
2	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	156	156	156	202	9
3	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	1.955	2.217	N/a	8	58

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

C. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian merupakan salah satu urusan yang penting dan berkontribusi secara signifikan untuk perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Bandung. Pada tahun 2016-2019, urusan pertanian ditandai dengan terus meningkatnya produktivitas komoditas. Walau demikian, penyelenggaraan urusan ini termasuk salah satu sektor yang terdampak oleh adanya disrupsi



pandemi COVID-19 dan PSBB/PPKM pada tahun 2020. Maka dari itu terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian dapat ditinjau seperti berikut.

1. Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura

Produktivitas komoditas padi cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Meski demikian, di kala pandemi

produktivitas komoditas padi justru cenderung meningkat dari tahun 2019, yakni dari 63,52 menjadi 63,54 di tahun 2020. Peningkatan juga terus terjadi dengan pencapaian indeks pertanaman yang mencapai 2,76 di tahun 2020. Meski demikian, terdapat variasi pada masing-masing luas areal pengembangan hortikultura unggulan dan jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-93
Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Jumlah pencapaian produktivitas komoditas (kw/ha)					
1	Padi	63,84	63,33	63,39	63,52	63,54
II	Luas areal pengembangan hortikultura unggulan (ha)					
1	Alpukat	64	172,4	-	2639	18
2	Strawberry	87	123,49	-	1318	141
3	Jeruk	225	525	-	241	52
4	Jambu biji	12	47,79	-	488	7
5	Krisan	14.600	17.100	-	9977	9055
6	Sedap malam	11.205	11.625	-	9355	25415
7	Mawar	308	250	-	463	479
III	Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)	2,65	2,67	2,69	2,73	2,76
IV	Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura					
1	Sayuran (kw/ha)	253,92	254,03	-	207,08	219,23
2	Buah-buahan (kw/ha)	124,23	125,68	-	181,23	95,86
3	Tanaman hias (tangkai/ha)	28,87	35,89	-	10000	10,28
4	Tanaman obat (kw/ha)	3,30	3,92	-	11,5	2,25
5	Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok)	2.398	2.445	2.879	3.034	3.211
6	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (orang)	78	75	82	62	14

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2. Indikator Peternakan

Dalam kurun lima tahun terakhir, status kesehatan hewan cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tercatat status kesehatan hewan adalah 72%, yakni turun dari 75,33% di tahun 2019. Berkurangnya status kesehatan hewan, kelompok ternak yang terbina, pelaku usaha pengolahan ternak yang bersertifikat, jumlah peternak

yang memanfaatkan teknologi dan sarana dan prasarana di rumah potong hewan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa produktivitas sektor peternakan di Kabupaten Bandung terdampak secara signifikan oleh adanya disrupsi pandemi COVID-19. Informasi detail mengenai capaian indikator peternakan Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-94**.

Tabel 2-94
Indikator Peternakan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	32	32	32	32	32
2	Meningkatnya status kesehatan hewan (%)	74,30	71,5	72	75,33	72
3	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (%)	131,34	N/a	N/a	N/a	0,09
4	Meningkatnya kelompok terbina dalam mendorong populasi ternak (kelompok)	N/a	154	190	196	25
5	Peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (orang)	200	144	100	140	0
6	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	587	130	33	100	10
7	Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	83,5	100	100	100	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

D. Urusan Kehutanan

Praktek *illegal logging* dan *illegal trading*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan asas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan salah satu langkah yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya. Namun Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan

pemerintah provinsi, di antaranya urusan kehutanan sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih.

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu sebagai berikut.

1. Energi

Potensi energi di Kabupaten Bandung terdiri dari panas bumi (geothermal), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik) dan tenaga surya (PLTS).



(i) Panas Bumi

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap panas bumi yang cukup banyak sampai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan Pengembangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang-Darajat dan Cibuni dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothermal Darajat II Limited (Darajat) serta PT. Teknosatria energi Geothermal (Cibuni) namun untuk wilayah cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi eksplorasi pemanfaatan panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnya pemanfaatan volume uang panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan sebagai upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan

panas bumi dengan instansi terkait baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah potensi panas bumi dengan besar potensi diperkirakan sebesar 2.711 Mega Watt (MW). Dari jumlah tersebut, energi panas bumi yang sudah dimanfaatkan (ter-install) baru mencapai \pm 787 MW yang tersebar di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, Kamojang dan Cibuni. Energi panas bumi yang telah dimanfaatkan berperan penting mensuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali. Meninjau masih tingginya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan diperkirakan potensi luas cakupan ini ke depan akan semakin berkembang. Informasi detail mengenai potensi panas bumi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-95**.

Tabel 2-95
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung Tahun 2020

No.	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1	Pangalengan	PT Pertamina Geothermal Energy	Wayang Windu	PT. Star Energy	400	227
2.	Pasirjambu/ Rancabali	PT. Geo dipa Energi	Patuha	PT Geo Dipa Energi	706	50
3	Ibun	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	855	240
4	Kertasari	PT Pertamina Geothermal Energy	Darajat	PT. Star Energy	610	270
5	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	140	0
Jumlah					2.711	787

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

(ii) Minyak Bumi

Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu SPBU sebanyak 73 unit usaha dan agen LPG sebanyak 54 agen.

2. Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan menjadi sumber daya pertambangan dan sumber daya air tanah.



(i) Pertambangan

Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Bandung berupa andesit, tanah urug, dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan Banjaran. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

(ii) Sumber Daya Air Tanah

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip

pengelolaan 'one basin one management'. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5 juta m³/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m³.

F. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Selama kurun lima tahun terakhir, sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling besar ketiga setelah sektor industri dan pertanian. Perkembangan sektor perdagangan Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2-96
Indikator Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US \$)	824.819.145	897.710.575	1.028.957.434,14	948.614.175,00	726.705.757,52
2	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	5	3	2	5	5

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US\$) mengalami terus meningkat dari tahun 2016 sebesar US\$ 824.819.145 menjadi US\$ 897.710.575 pada tahun 2017 dan menjadi US\$ 1.028.957.434,14 pada tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020, yakni masing-masing senilai US\$948.614.175,00 dan US\$726.705.758. Penurunan nilai ekspor barang dan jasa ini mengindikasikan salah satu dampak disrupsi pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung.

G. Urusan Perindustrian

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2-97
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Besar	Total
2016	8.053	395	366	8.814
2017	8.519	397	368	9.284
2018	9.233	346	140	9.719
2019	9.506	358	140	10.004
2020	12.184	902	143	13.229

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada industri kecil, baik industri non formal maupun formal, mengalami peningkatan. Industri kecil formal dan non formal di tahun 2018 berjumlah 9.233 unit. Terdapat juga 346 unit industri menengah dan 140 unit industri besar. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2020 dengan jumlah industri kecil formal dan non formal di Kabupaten Bandung berjumlah 12.184 unit, jumlah industri menengah mencapai 902 unit, dan terdapat peningkatan jumlah industri besar menjadi 143 unit.

H. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung terbatas meliputi transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang disponsori dan dibiayai oleh pemerintah. Berdasarkan perkembangannya, dalam kurun lima tahun terakhir jumlah transmigrasi umum di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah transmigran ini sejalan dengan telah meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Informasi mengenai perkembangan jumlah transmigrasi di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-98**.

Tabel 2-98
Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Jenis Transmigrasi		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Transmigrasi Swakarsa	Jumlah KK	0	0	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	0
Transmigrasi Umum	Jumlah KK	8	7	3	0	0
	Jumlah Jiwa	31	35	9	0	0
Transmigrasi Bedol Desa	Jumlah KK	0	0	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau dari capaian pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan. Secara umum, pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2020 di komponen

penyelenggaraan pemerintahan tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Rincian indikator untuk masing-masing komponen pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut.

Dari komponen pelayanan publik, kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai dari Indeks Kepuasan

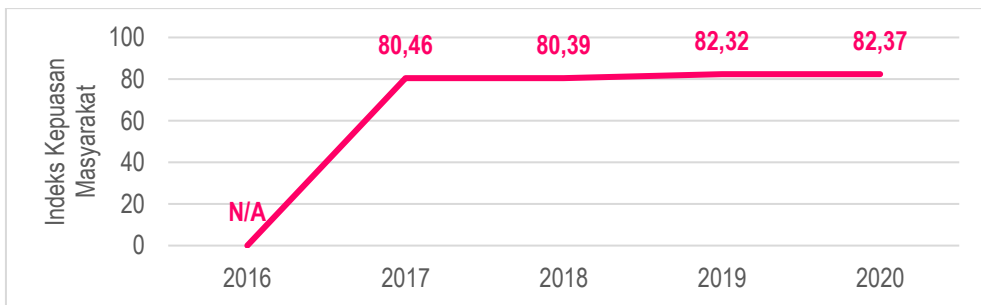


Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara umum, **Gambar 2-63** menunjukkan bahwa IKM 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dan mencapai 82,37 pada tahun 2020. **Gambar 2-64** juga menunjukkan peningkatan pada Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung, yakni IRB 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dan mencapai 64,33 pada tahun 2020. Adapun **Gambar 2-65** menunjukkan bahwa Nilai Maturitas SPIP cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai maturitas SPIP mencapai 3. Progres pada komponen pelayanan publik juga mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk turut menyukseskan Agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dari komponen transparansi dan akuntabilitas, dapat ditinjau perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Bandung yang terus meningkat. **Gambar 2-66** menunjukkan bahwa SAKIP Kabupaten Bandung semula ada di 54,61 (CC) pada tahun 2016 dan

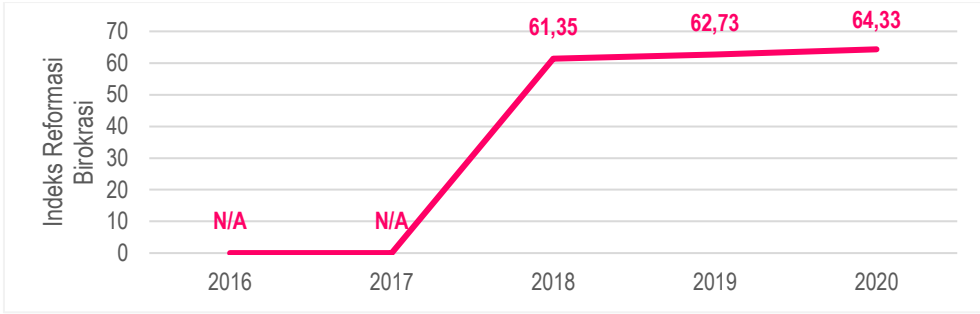
berhasil mencapai 71,44 (BB) pada tahun 2020. Pencapaian ini menunjukkan semakin membaiknya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung sudah menggunakan *e-budgetting* mulai tahun 2019, yakni melalui simcan.bandungkab.go.id, dan melalui SIPD Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2021. Penggunaan *e-procurement* sudah dilakukan menggunakan lpse.bandungkab.go.id mulai tahun 2018. Adapun penggunaan e-Analisis Standar Biaya di Kabupaten Bandung sudah menggunakan simcan.bandungkab.go.id mulai tahun 2019 dan SIPD Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2021.

Dari komponen pengelolaan keuangan, dapat dilihat pada **Tabel 2-97** bahwa opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung cenderung baik, terutama dilihat pencapaian pada tahun 2017-2020 yang masuk ke kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Gambar 2-63
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

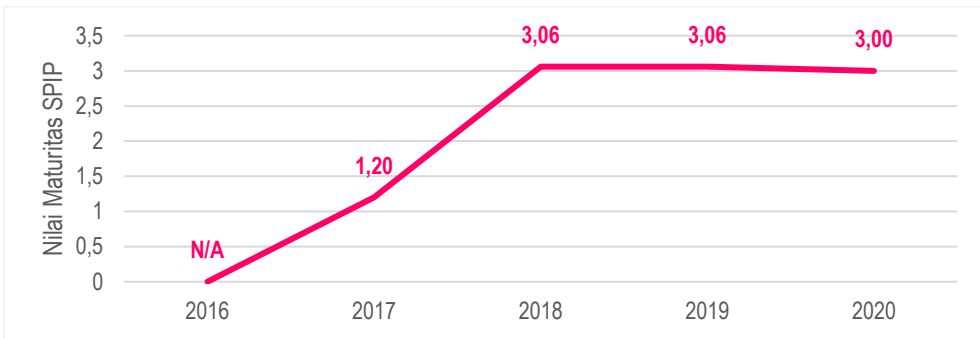
Sumber: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Online. Diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-64

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

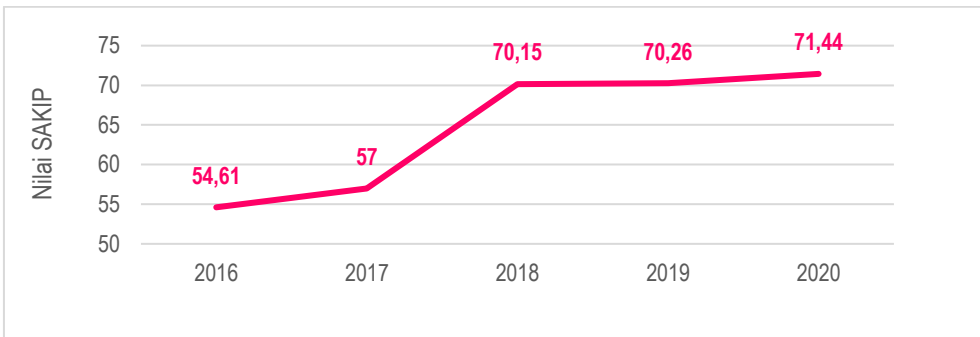
Sumber: Hasil Penilaian Kemen PAN RB RI. Diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-65

Capaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Penilaian BPKP. Diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-66

Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Penilaian Kemen PAN RB RI. Diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 2-99

Capaian Opini BPK Untuk Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

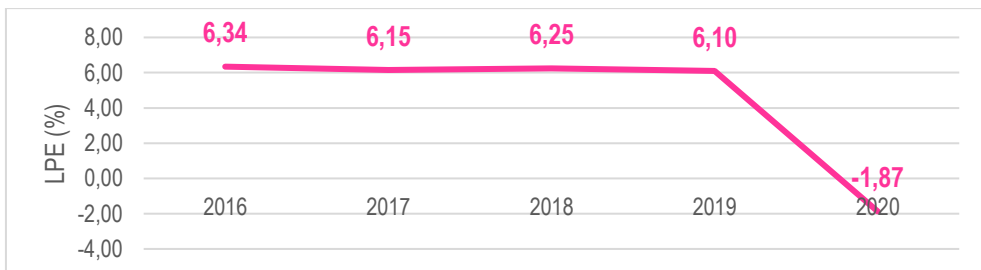
Sumber: Hasil Penilaian BPK. Diolah Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies* (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya. Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah di antaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

Sebelum meninjau lebih jauh mengenai daya saing Kabupaten Bandung, terlebih dahulu akan dibahas mengenai perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan daya Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, capaian LPE Kabupaten Bandung sempat mengalami peningkatan di tahun 2019 namun turun di tahun 2020, yang mana hal ini turut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Adapun ditinjau dari aspek PDRB ADHK, secara umum terjadi penurunan laju pertumbuhan untuk setiap lapangan usaha. Secara lebih rinci, hanya 3 lapangan usaha di antaranya memiliki pertumbuhan di kala pandemi, yakni Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Adapun sektor lainnya cenderung menurun dan bahkan mengalami laju pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

Perkembangan capaian LPE Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam Gambar 2-67.



Gambar 2-67

Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Bandung antara lain tergambar dari capaian indikator kinerja Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan/angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan). Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah

tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp. 1.184.542 yang terdiri dari bahan bukan pangan sebesar 51,99% dan bahan pangan sebesar 48,01%. Secara umum, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Bandung di tahun 2020 naik 8% dari tahun 2019. Adapun proporsi pengeluaran bahan bukan pangan naik sebesar 20% dari tahun 2019 dan pengeluaran bahan pangan justru mengalami penurunan sebesar 3%.

Gambaran kinerja sektor ekonomi Kabupaten Bandung setelah dianalisis dengan menggunakan 2 (dua) jenis analisis yaitu *analisis location quotient (LQ)*, serta analisis *shift share*, maka didapatkan beberapa poin penting, antara lain:

Tabel 2-100
Gambaran Kinerja Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung

No	Pembahasan	Temuan
1	Struktur dan Pola PDRB	Kabupaten Bandung menempati Peringkat PDRB ADHK per kapita ke-25 di Jawa Barat;
2	Struktur dan pola sektor ekonomi Kabupaten Bandung (2016-2020)	Tiga sektor dengan kontribusi tinggi: 1. Industri pengolahan (51,11%); 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,65%); 3. Pertanian, kehutanan dan perikanan (7,04%).
		Tiga sektor dengan pertumbuhan tinggi: 1. Informasi dan komunikasi (9,95%); 2. Real Estate (3,17%); 3. Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (2,73%)
3	Analisis LQ (2016-2020)	Sektor basis: 1. Industri pengolahan; 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 4. Jasa lainnya; 5. Real estate;
4	Analisis <i>shift-share</i>	Tiga sektor dengan pertumbuhan regional tinggi: 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
		Tiga sektor dengan pertumbuhan proporsional tinggi: 1. Jasa Pendidikan; 2. Informasi dan Komunikasi; 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
		Tiga sektor dengan pertumbuhan pangsa wilayah tinggi: 1. Industri Pengolahan; 2. Jasa Lainnya; 3. Konstruksi;

Sumber: Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2021

Temuan mengenai gambaran ekonomi wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menjadi unggulan di antaranya sektor industri pengolahan (sektor C), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (sektor G), dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (sektor A).

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kabupaten Bandung.

2.4.2.1 Level of Service (LOS) Jalan

Indikator *level of service* (LOS) jalan atau tingkat pelayanan jalan merupakan ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, kepadatan, dan hambatan yang terjadi, sehingga dinilai dapat menunjukkan kondisi aksesibilitas Kabupaten Bandung. Dari 6 (enam) kategori *level of service* (LOS) jalan, dalam rentang waktu 5 tahun terakhir Kabupaten Bandung tergolong ke dalam kategori sebagai berikut.

Tabel 2-101
Level of Service (LOS) Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

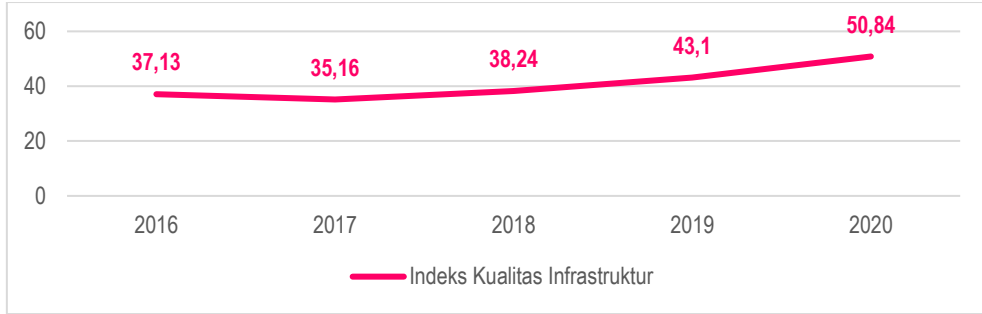
No.	Tahun	Kategori Level of Service (LOS) Jalan
1	2016	D
2	2017	D
3	2018	D
4	2019	C
5	2020	B

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.4.2.2 Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)

Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) merupakan indikator dalam mengukur tingkat kualitas infrastruktur suatu wilayah. IKI sebagai agregat atau komposit dari lima indikator berikut 1) Indikator jalan dengan kondisi mantap; 2) persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak; 3) persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak; dan 4)

persentase keluarga pengguna listrik; dan 5) kualitas sinyal telepon dan internet. Proses menghitung IKI dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan dari kelima indikator tersebut dan didapatkan hasil yang cenderung meningkat setiap tahunnya, menandakan adanya peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Bandung walaupun belum signifikan. Berikut adalah capaian dari kelima indikator IKI.



Gambar 2-68

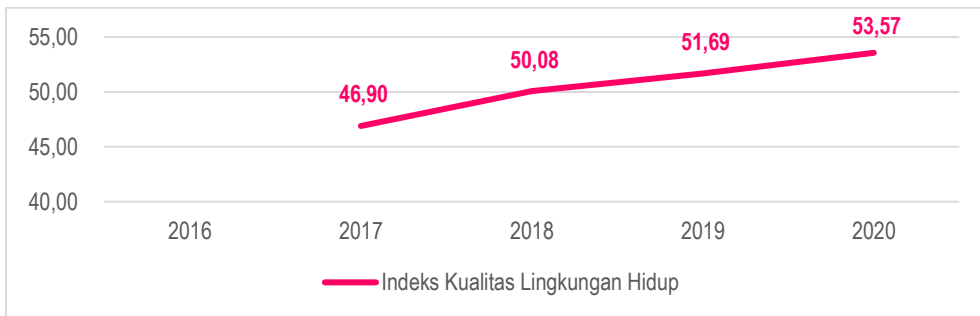
Grafik Perkembangan Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2.4.2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami pengembangan, sesuai dengan surat Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SPT/ REN.O/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020, IKLH kabupaten terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Rumus perhitungan IKLH disesuaikan dari $(0,30 \times IKA) + (0,30 \times IKU) + (0,40 \times IKTL)$, menjadi rumus yang baru $= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$. Capaian IKLH Kabupaten Bandung terus meningkat, dapat dilihat pada **Gambar 2-68** di mana pada tahun 2017-2019 dihitung dengan perhitungan yang berlaku sampai dengan Tahun 2019, dan capaian IKLH Tahun 2020 adalah 53,57 di mana nilai tersebut dihitung rumus perhitungan terbaru.



Gambar 2-69

Grafik Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.4.2.4 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI

dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara



spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020, Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut

pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Berikut adalah data IRBI Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.

Tabel 2-102
Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)	Kategori Risiko Bencana
1	2016	174	Tinggi
2	2017	174	Tinggi
3	2018	174	Tinggi
4	2019	174	Tinggi
5	2020	174	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kemudahan prosedur perijinan. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyediakan prosedur perizinan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan, sehingga memudahkan calon investor dalam mengurus proses perizinan. Melalui kemudahan proses perizinan

diharapkan akan menjadi insentif dan stimulus bagi calon investor untuk menjalankan kegiatan di Kabupaten Bandung. Lingkup perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan izin penyelenggaraan reklame. Informasi detail mengenai jumlah jenis izin dan jumlah izin yang terbit baik secara *online* atau *offline* di Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 2-103**.

Tabel 2-103
Data Perkembangan Jenis Izin dan Jumlah Izin yang Terbit Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Izin	42	89	89	44 ONLINE 12 OFFLINE	70 ONLINE 6 OFFLINE
2	Jumlah izin yang terbit	6.793	6.079	7.429	3.684 ONLINE 1.336 OFFLINE	2.966 ONLINE 1.243 OFFLINE

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.4.3.2 Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah)

Tabel 2-104

Jumlah dan Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pajak Daerah	384.495.956.018	464.592.767.806,0	472.460.682.943,00	525.068.992.918,00	498.815.169.939,00
a	Pajak Hotel	4.204.098.463	5.028.778.143,6	6.173.761.937,00	7.568.662.689,00	6.471.163.124,00
b	Pajak Restoran	12.774.005.471	18.273.358.346,4	25.695.647.125,00	32.026.966.078,00	23.014.071.913,00
c	Pajak Hiburan	1.773.066.735	3.899.227.827,0	3.796.231.351,00	5.661.456.689,00	1.969.743.217,00
d	Pajak Reklame	3.239.576.910	3.657.132.755,0	3.776.397.829,00	4.375.713.353,00	5.042.545.485,00
e	Pajak Penerangan Jalan/ GENSET	131.591.826.182	150.946.030.168,0	159.364.947.768,00	163.129.579.684,00	149.649.854.970,00
f	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	151.490.752	205.094.745,0	336.543.553,00	1.785.525.393,00	927.033.351,00
g	Pajak Parkir	520.316.508	1.124.726.494,0	1.706.415.160,00	10.016.813.856,00	2.690.488.207,00
h	Pajak Air Bawah Tanah	11.248.115.353	10.920.624.860,0	10.936.534.294,00	1.035.470.668,00	6.953.320.273,00
i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	93.198.190.759	101.686.820.619,0	104.650.994.168,00	110.201.134.526,00	96.464.116.046,00
j	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	125.795.268.885	168.850.973.848,0	156.023.209.758,00	189.267.669.982,00	205.632.833.353,00
2	Retribusi	26.937.588.476	21.833.385.145,0	26.704.035.670,00	25.837.878.597,00	21.282.679.329,00
a	Jumlah Retribusi Jasa Umum	9.138.798.200	9.827.218.970,0	11.767.975.250,00	12.257.332.000,00	12.277.370.702,00
b	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	3.856.910.500	3.318.347.000,0	4.307.256.550,00	6.257.491.223,00	3.577.695.016,00
c	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	13.941.879.776	8.687.819.175,0	10.704.035.870,00	7.323.055.374,00	5.427.613.611,00

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Mengacu pada tabel realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bandung di atas, dalam kurun lima tahun menunjukkan tren pertumbuhan positif. Lima tahun terakhir pajak daerah Kabupaten Bandung tumbuh dengan rata-rata persentase sebesar 7,165% per tahun. Adapun untuk pendapatan retribusi daerah, dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, yakni dengan rata-rata pertumbuhan - 4,378%.

2.4.3.3 Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa

swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Secara umum, perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Bandung cenderung membaik. Hal ini ditandai dengan jumlah desa swasembada yang meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, yakni persentase desa yang berstatus swasembada mencapai 16,49%. Meski demikian, masih terdapat jumlah desa berstatus swakarya atau transisional yang signifikan, yaitu sebanyak 178 desa. Hal ini perlu diantisipasi pemerintah daerah untuk diarahkan menjadi desa swasembada

Tabel 2-105

Percentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	211	213	177	128	55
2	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	23	35	65	108	178
3	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	6	6	23	42	46
4	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	240	254	265	278	279
5	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) (%)	2,50	2,36	8,68	15,11	16,49

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.4.3.4 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu 1) Indeks Sosial; 2) Indeks Ekonomi; dan 3) Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan. indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Realisasi capaian IDM Kabupaten Bandung meningkat, namun data hanya tersedia pada Tahun 2019 dan 2020, yaitu sebesar 0,7229 dan 0,7524. (Sumber: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020)

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan

nasional dan daerah. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di mana sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah pencari kerja di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar pencari kerja di tahun 2020 adalah pencari kerja laki-laki, yakni sebanyak 4.291 orang, dengan mayoritas tingkat pendidikan terakhirnya adalah lulusan SMK. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat mengantisipasi pengangguran yang meningkat dengan mengembangkan dan menyalurkan SDM kompeten dengan industri-industri yang sesuai kebutuhan perekonomian daerah.

Tabel 2-106

Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	27	51	35	35	16
2	SMP	225	516	225	134	152
3	MTS	35	84	41	46	0
4	SMA	1.243	2.168	1.622	1437	834
5	MA	231	404	297	0	0
6	SMK	5.984	3.792	1.479	1.669	6181
7	STM	8	74	33	0	0
8	SPG	0	41	0	0	0
9	SMEA	2	16	2	0	0
10	SPMA	1	1	0	0	0
11	DI	7	43	18	11	4
12	DII	8	44	27	4	2
13	DIII	645	990	966	489	292
14	S1	902	2.459	2.699	1.247	707
15	S2	15	59	42	28	6
	Total	9.333	10.742	7.486	5.100	8.194

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2021

2.4.4.1 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum terdapat fluktuasi rasio ketergantungan di Kabupaten Bandung selama tahun 2016-2020, namun terdapat kecenderungan menurun di tahun 2018-2020. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) di Kabupaten Bandung. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2-107

Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	1.064.826	1.043.148	1.100.429	961.036*	958.954
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	152.386	173.736	158.435	193.163*	88.584
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) + (2)	1.217.209	1.216.884	1.258.864	N/a	1.134.659
4	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	2.379.411	2.440.717	2.458.427	2.407.480*	2.489.131
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	51,16	49,86	51,21	47,94*	45,58

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



2.4.4.2 Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan

masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan data 4 (tiga) tahun terakhir (2017-2020), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan angka yang fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-108
Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Perhitungan Angka Kriminalitas	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Pidana	N/A	1.782	1.524	1.397	1.807
<i>Dibagi</i>					
Jumlah Penduduk	N/A	3.657.701	3.717.291	3.775.279	3.623.790
Angka Kriminalitas (Crime Rate) per 100.000 penduduk berdasarkan metode BPS	N/A	48,72	41,00	37,00	49,86

Sumber: Polresta Bandung, 2021



Tabel 2-109

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	68,804,851	73,039,454	77,603,122	82,336,633	80,829,310	81,430,929.94	<
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	94,334,764	102,865,597	113,185,388	124,001,193	123,049,250	122,637,180.11	>
1.3	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	19,130,404	19,969,224	20,877,715	21,809,417	21,095,969	21,407,053.84	<
1.4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	26,228,705	28,123,789	30,474,122	32,845,571	32,115,121	32,239,601.33	<
1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.34	6.15	6.25	6.10	-1.87	-1.10	<
1.6	Laju Inflasi	3.61	2.72	3.56	3.18	1.44	4.00	>
1.7	Jumlah Penduduk	3,596,623	3,657,601	3,717,291	3,775,279	3,623,790		
1.8	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.77	1.70	1.63	1.56	1.49	0.76	<
1.9	Indeks Pembangunan Manusia	70.69	71.02	71.75	72.41	72.39		
1.10	Indeks Pendidikan	62.83	62.89	63.71	64.52	65.12	64.65	>
1.11	Rata-rata Lama Sekolah	8.5	8.51	8.58	8.79	8.96	8.79	>
1.12	Harapan Lama Sekolah	12.42	12.43	12.64	12.68	12.69	12.69	=
1.13	Indeks Kesehatan	81.69	81.74	81.94	82.15	82.35	81.85	>
1.14	Angka Harapan Hidup	73.1	73.13	73.26	73.4	73.53	73.20	>
1.15	Indeks Pengeluaran	68.82	69.69	70.75	71.63	70.74	70.59	>
1.16	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun (Ribu Rp)	9,580	9,854	10,203	10,502	10,201	10,150	>
1.17	Jumlah Penduduk Miskin	272,650	268,020	246,130	223,210	263,230		
1.18	Tingkat Kemiskinan	7.61	7.36	6.65	5.94	6.91	6	<
1.19	Garis Kemiskinan	297,483	310,569	334,929	345,177	367,403		
1.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.00	1.12	0.87	1.04	0.92	0.85	<
1.21	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.18	0.26	0.20	0.28	0.17		
1.22	Gini Ratio	0.399	0.391	0.418	0.355	0.414	0,39 - 0,40	<



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Urusan Pendidikan							
2.1.1	APS SD	99.98	99.98	99.98	92.42	99.6		
2.1.2	APM SD	96.11	95.61	95.60	92.06	99.25	95	>
2.1.3	APK SD	104.73	105.39	107.10	100.78	103.48		
2.1.4	Rasio Ketersediaan SD	1 : 242	1 : 242	1 : 238	1 : 260	1 : 243		
2.1.5	Rasio Guru dan Murid SD	1 : 24	1 : 26	1 : 25	1 : 26	1 : 25		
2.1.6	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	99.71	99.75	99.78	99.78	N/A		
2.1.7	APS SMP	97.17	97.18	98.22	77.55	91.37		
2.1.8	APM SMP	84.91	84.88	78.70	74.79	84.03		
2.1.9	APK SMP	94.15	97.74	95.40	96.99	90.65		
2.1.10	Rasio Ketersediaan SMP	1 : 391	1 : 381	1 : 366	1 : 416	1 : 320		
2.1.11	Rasio Guru dan Murid SMP	1 : 17	1 : 20	1 : 20	1 : 23	1 : 23		
2.1.12	Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA	80.85	85.78	88.62	88.05	N/A		
2.2	Urusan Kesehatan							
2.2.1	Rasio Posyandu dan Balita	1 : 78	1 : 82	1 : 71	1 : 80,85	1 : 82		
2.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Penduduk	1 : 19,982	1 : 20,321	1 : 22,127	1 : 20,973	1 : 12,988		
2.2.3	Rasio Rumah Sakit Per Penduduk	1 : 513,804	1 : 522,515	1 : 531,042	1 : 471,909	1 : 383,150		
2.2.4								
2.2.5	Persentase Balita Gizi Baik	95.21	94.59	94.29	94.26	83.61		
2.2.6	Angka Kematian Bayi	33	33.6	0	0	0		
2.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.3.1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	63.55	52.73	56.01	56.84	659.485		
2.3.2	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	40	43.48	47.62	51.04	53.16		



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.3	Persentase Irigasi Teknis dalam Kondisi Baik	59.63	63.68	65.60	68.88	69.58%		
2.3.4	Persentase Irigasi Non Teknis dalam Kondisi Baik	49.24	54.32	56.57	59.4	63.85		
2.3.5	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	1.24	1.47	2.88	1.75	2.08		
2.3.6	Persentase Bangunan Ber-IMB	7.45	7.43	7.44	7.47	7.51		
2.3.7	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	38.283	46.54	48.39	50.9	51.29	48.95 >	
2.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.4.1	Persentasi Permukiman Layak Huni	93.78	94.66	96.6	98.13	98.67		
2.4.2	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	N/A	77.12	78.57	80.52	81		
2.4.3	Akses Aman terhadap Air Bersih di Perkotaan	12.32	12.77	12.87	15.35	16.48		
2.4.4	Akses Aman terhadap Air Bersih di Perdesaan	13.44	14.52	15.97	17.92	18.73		
2.4.5	Akses Aman terhadap Sanitasi	57.32	72.64	73.42	80.16	86.11	76.37 >	
2.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
2.5.1	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100	100	100	100	50	100 <	
2.5.2	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100	100	100	100	100		
2.5.3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 Penduduk	1.01	1.14	1.06	1.21	1.26		
2.5.4	Rasio Jumlah Linmas per 10,000 Penduduk	15.84	15.79	18.21	15.30	15.88		
2.6	Urusan Sosial							



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.6.1	Persentase Penanganan PPKS Fakir Miskin	10.4	45.1	2.7	17.54	15.98		
2.6.2	Persentase Penanganan PPKS Anak Terlantar	15.5	16.9	21.25	24.62	25.77		
2.6.3	Jumlah Panti Asuhan	51	43	41	37	43		
2.6.4	Jumlah Panti Jompo	1	1	1	2	2		
2.6.5	Jumlah Panti Rehabilitasi	3	3	6	2	4		
2.7	Urusan Tenaga Kerja							
2.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	N/A	62.81	61.89	65.38	62.20		
2.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	3.92	5.00	5.48	8.58	6.5	<
2.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	93.43	93.59	93.96	93.95		
2.8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	76.5	72.4	65.86	67.07		
2.8.3	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	65.2	67.6	67.6	70.98	N/A		
2.9	Urusan Pangan							
2.9.1	Skor PPH Konsumsi	79.27	84.6	88.6	90.40	93.80	85.4	>
2.9.2	Skor PPH Ketersediaan	79.27	78.9	78.9	94.9	88.6	91	<
2.9.3	%AKE	104.10	116.00	117.30	109.70	110.00		
2.9.4	%AKP	109.60	119.40	125.40	210.80	119.40		
2.10	Urusan Pertanahan							
2.10.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	8.62	8.65	8.97	10.15	12.07		
2.11	Urusan Lingkungan Hidup							
2.11.1	Persentase Penataan Pengendalian Pencemaran Air	57.7	56.3	62	59.7	61.5		



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.11.2	Persentase Penataan Pengendalian Pencemaran Udara	87	92	94	78	80		
2.11.3	Persentase Penataan Pengelolaan Limbah B3	43	45	50	53	57		
2.11.4	Persentase Penanganan Volume Sampah	24.00	26.00	41.50	59.91	43.43		
2.11.5	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Penduduk	1 : 11,5	1 : 10	1 : 4	1:750	1:750		
2.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.12.1	Rasio Penduduk Ber-KTP	89.2	89.4	98.09	98.01	99.37		
2.12.2	Rasio Keluarga Ber-KK	84.09	86.16	90.04	91.59	93.93		
2.12.3	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	64.82	72.02	88.97	89.7	88.43		
2.12.4	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	94.21	76.5	89.66	97.92	174.02		
2.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.13.1	Persentase PKK Aktif	90.8	84.99	90.00	95.00	95.00		
2.13.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0.1	0.6	0.22	0.23	0.24		
2.13.3	Jumlah LSM Aktif	233	247	250	322	311		
2.14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.14.1	Rasio Akseptor KB	82.51	82.25	82.72	79.24	81.09		
2.15	Urusan Perhubungan							
2.15.1	Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum	1 : 495	1 : 501	1 : 503	1 : 501	1 : 494		
2.15.2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	46,093	44,159	42,439	37,612	31,751		



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.16	Urusan Komunikasi dan Informatika							
2.16.1	Jumlah PD yang Memiliki Akses Internet	72	74	74	85	129		
2.16.2	Jumlah Sistem Informasi yang Tersedia	71	110	110	131	221		
2.17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
2.17.1	Persentase Koperasi Aktif	50	50,34	52	52	51		
2.17.2	Jumlah Pelaku Koperasi	1,722	1,540	1,592	1,632	1,658		
2.17.3	Jumlah Pelaku UKM	10,765	12,150	14,871	16,748	17,755		
2.17.4	Jumlah Omzet Koperasi	716,314,145,613	714,391,795,262	996,224,195,072	994,617,866,963	587,164,567,907		
2.17.5	Jumlah Omzet UKM	N/A	911,250,000,000	1,115,325,000,000	1,256,100,000,000	1,331,625,000,000		
2.18	Urusan Penanaman Modal							
2.18.1	Jumlah Investor PMDN	58	71	112	6,992	6,010		
2.18.2	Jumlah Investor PMA	22	27	49	103	154		
2.18.3	Jumlah Proyek PMDN	2,240	2,669	1,317	6,992	6,010		
2.18.4	Jumlah Proyek PMA	67	60	49	103	154		
2.18.5	Realisasi Investasi PMDN	5,297,733,143,668	8,649,022,464,692	8,888,625,245,625	18,899,840,864,553	22,666,440,330,112		
2.18.6	Realisasi Investasi PMA	2,877,269,319,178	2,324,129,700,450	2,189,795,938,221	4,437,902,128,226	3,633,767,504,744		
2.18.7	Penyerapan Tenaga Kerja Domestik	67,027	35,832	41,087	47,283	50,213		
2.18.8	Penyerapan Tenaga Kerja Asing	100	45	52	14	33		
2.19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
2.19.1	Jumlah Organisasi Pemuda	59	59	1479	1479	101		
2.19.2	Jumlah Organisasi Olahraga	109	112	118	100	90		
2.20	Urusan Statistik							



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.20.1	-							
2.21	Urusan Persandian							
2.21.1	-							
2.22	Urusan Kebudayaan							
2.22.1	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	100	100	100	100		
2.23	Urusan Perpustakaan							
2.23.1	Jumlah Perpustakaan	561	1,272	1,004	1,241	3,042		
2.23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	55,072	198,913	255,308	263,271	147,550		
2.24	Urusan Perpustakaan							
2.24.1	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	561	1,272	1,004	1,241	3,042		
2.24.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	55,072	198,913	255,308	263,271	147,550		
2.25	Urusan Kearsipan							
2.25.1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	357	353	352	352	354		
2.25.2	Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan	18	15	12	2	9		
2.26	Urusan Kelautan dan Perikanan							
2.26.1	Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan	5	106	266	560	845		
2.26.2	Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB	169	169	169	169	183		



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.26.3	Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya	9	9	9	12	12		
2.26.4	Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum	1	22	32	48	53		
2.26.5	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat	93	95	97	99	99		
2.27	Urusan Pariwisata					12		
2.27.1	Jumlah kunjungan wisata	2,000,000	2,152,222	2,449,515	2,807,660	2,072,697		
2.27.2	Jumlah daya tarik wisata	156	156	156	202	9		
2.27.3	Jumlah mitra kerja pariwisata	1,955	2,217	N/A	8	58		
2.28	Urusan Pertanian							
2.28.1	Jumlah Pencapaian Produktivitas Komoditas Padi	63.84	63.33	63.39	63.52	63.54		
2.28.2	Jumlah Pencapaian Indeks Pertanaman (IP)	2.65	2.67	2.69	2.73	2.76		
2.28.3	Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh	2,398	2,445	2,879	3,034	3,211		
2.28.4	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan	78	75	82	62	14		
2.28.5	Jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi	32	32	32	32	32		
2.28.6	Status kesehatan hewan	74.3	71.5	72	75.33	72		
2.28.7	Jumlah kelompok terbina dalam mendorong populasi ternak	N/a	154	190	196	25		
2.28.8	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat	200	144	100	140	0		
2.28.9	Jumlah pemanfaatan teknologi peternakan	587	130	33	100	10		



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.28.10	Persentase sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH	83.5	100	100	100	0		
2.31	Urusan Perdagangan							
2.31.2	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	824,819,145	897,710,575	1,028,957,434.14	948,614,175.00	726,705,757.72		
2.31.3	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	5	3	2	5	5		
2.32	Urusan Perindustrian							
2.32.1	Jumlah Industri Kecil	8,053	8,519	9,233	9,506	12,184		
2.32.2	Jumlah Industri Menengah	395	397	346	358	902		
2.32.3	Jumlah Industri Besar	366	368	140	140	143		
2.33	Urusan Transmigrasi							
2.33.1	Jumlah Transmigrasi (KK)	8	7	3	0	0		
2.33.2	Jumlah Transmigrasi (orang)	31	35	9	0	0		
2.34	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.34.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80,46	80,39	82,32	82,37		
2.34.2	Nilai SAKIP Kabupaten	54,61	57,00	70,15	70,26	71,44		
2.34.3	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	N/A	1,20	3,06	3,06	3,00		
2.34.4	Kapasitas Fiskal Daerah (Juta Rupiah)	1.675.158,00	1.725.259,00	2.564.871,00	2.236.780,00	1.675.158,00		
2.34.5	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP		
3)	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah							
3.1.2	Jumlah Pajak Daerah	384,495,956,018	464,592,767,806.00	472,460,682,943.00	525,068,992,918.00	498,815,169,939.00		
3.1.3	Jumlah Retribusi Daerah	26,937,588,476	21,833,385,145.00	26,704,035,670.00	26,323,898,545.00	21,309,353,803.00		



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2	Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Level of Service (LOS) Jalan	D	D	D	C	B	C	>
3.2.2	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	46,41	43,95	47,81	53,87	63,55		
3.2.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	46,90	50,08	51,69	53,57		
3.2.4	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	174	174	174	174	174		
3.2.5	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	74.91	78.73	78.57	80.52	81.45		
3.3	Daya Saing Sumber Daya Manusia							
3.3.1	Total Pencari Kerja	10,064	10,742	7,486	5,100	8,194		
3.3.2	Rasio Ketergantungan	51.16	49.86	51.21	47,94*	45.58		
3.4	Status Desa							
3.4.1	Persentase Desa Berstatus Swadaya	211	213	177	128	55		
3.4.2	Persentase Desa Berstatus Swakarya	23	35	65	108	178		
3.4.3	Persentase Desa Berstatus Swasembada	6	6	23	42	46		
3.4.4	Indeks Desa Membangun (IDM)	N/A	N/A	N/A	72,29	75,24		
3.5	Angka Kriminalitas	N/A	48,72	41,00	37,00	49.86		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2.5 Kondisi COVID-19 di Kabupaten Bandung Tahun 2020

2.5.1 Kondisi Kesehatan

Pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 terdampak secara signifikan oleh adanya penyebaran virus COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Wabah COVID-19 mulai merebak di Tiongkok, tepatnya di daerah Wuhan pada Desember 2019 dan secara cepat menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Penyebaran virus ini lebih cepat dibandingkan dengan wabah-wabah penyakit serupa lainnya, seperti SARS dan MERS, dikarenakan tingginya pergerakan manusia yang mempercepat proses penyebaran. Ditambah lagi dengan masa inkubasi yang cukup panjang, yakni 2-14 hari yang menghambat proses deteksi dan penanganan dini. Mengingat pesatnya penyebaran COVID-19 di dunia, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai wabah berstatus darurat atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Istilah ini didefinisikan sebagai peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan masyarakat bagi negara-negara lain melalui penyebaran penyakit secara internasional dan membutuhkan respons internasional yang terkoordinasi.

Perkembangan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bandung dimulai sejak munculnya kasus positif pertama pada tahun 2020. Hingga saat ini, per 31 Agustus 2021, total kumulatif kasus yang ada di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 33.020 orang dengan kasus aktif sebanyak 1.169 kasus (3,54%) dan jumlah yang meninggal akibat COVID-19 adalah sebanyak 606 jiwa (1,84%) serta terdapat 31.245 jiwa (94,62%) yang sembuh. Adapun persentase keterpakaian bed isolasi rumah sakit adalah sebesar 18% dari 351 bed. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang terpapar COVID-19 mengalami kesembuhan, namun penanganan penderita COVID-19 tersebut cukup berdampak pada penuhnya keterpakaian infrastruktur kesehatan di Kabupaten Bandung. Jika dikomparasi dengan rekapitulasi di tingkat provinsi, kasus aktif di Kabupaten Bandung lebih tinggi, yakni di Provinsi Jawa Barat terdapat 3,28% kasus aktif. Meski demikian, persentase kasus COVID-19 yang meninggal di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Bandung, yaitu 1,95% kasus yang meninggal di tingkat provinsi. Secara lebih rinci, berikut adalah rekapitulasi kasus COVID-19 di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.

Tabel 2-110
Rekapitulasi Kasus COVID-19 Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat Dan Kabupaten Bandung

Wilayah	Total Kasus Konfirmasi	% Kasus Aktif	% Sembuh	% Meninggal
Indonesia	4.079.267	4,98%	91,77%	3,25%
Jawa Barat	689.797	3,28%	94,78%	1,95%
Kabupaten Bandung	33.020	3,54%	94,62%	1,84%

Ket: Data update per 30 Agustus 2021; Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

Dilihat dari persebarannya, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kasus aktif lebih tinggi. Pada rentang waktu 15-30 Agustus 2021, 5 (lima) kecamatan dengan kasus aktif terbanyak adalah Cimenyang, Cileunyi, Rancaekek, Margahayu, dan Margaasih. Akan tetapi, 5 (lima) kecamatan dengan kasus kematian COVID-19 terbanyak ada di Kecamatan Baleendah, Rancaekek, Cileunyi, Margahayu, Paseh. Hal ini mengindikasikan bahwa

terdapat beberapa kecamatan yang sarana dan prasarana kesehatannya masih memadai untuk menekan tingkat kematian COVID-19 meskipun kasus aktif COVID-19nya tinggi. Sebaliknya, ada beberapa kecamatan yang sarana dan prasarana kesehatannya kurang memadai untuk menangani kasus COVID-19 yang ada di kecamatannya, meskipun jumlah kasus aktifnya lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan kurang meratanya penanganan COVID-19 di Kabupaten

Bandung. Selengkapnya, pemaparan jumlah kasus aktif di Kabupaten Bandung untuk setiap kecamatannya dapat dilihat pada **Gambar 2-70**.

Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, teridentifikasi beberapa desa yang memiliki tingkat risiko persebaran COVID-19 yang lebih tinggi dibanding desa lainnya. Sulitnya akses sarana dan prasarana penanganan dan pengawasan penyebaran COVID-19 dapat melatarbelakangi tingginya risiko di desa tersebut. Secara lebih rinci, peta zona risiko COVID-19 per desa di Kabupaten Bandung dapat dilihat di **Gambar 2-72**.

Selain dari sisi kesehatan, adanya pandemi COVID-19 juga berdampak penurunan ekonomi global secara pesat dan mengakibatkan adanya kontraksi pada hampir seluruh sektor perekonomian, khususnya kinerja sektor keuangan, industri, pariwisata, jasa, dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, munculnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan *social distancing*, sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berimbas pada seluruh aspek pembangunan Kabupaten Bandung. Aspek-aspek yang paling terdampak dari adanya pandemi ini mencakup kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Meski demikian, seiring dengan berkembangnya pandemi, terdapat optimisme pada proses vaksinasi masal COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), distribusi vaksin COVID-19 mulai dilakukan di awal tahun 2021 dan penyelenggaraan vaksinasi sudah dilakukan bertahap untuk kalangan prioritas.

Hingga 31 Agustus 2021, secara umum 9 dari 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah mendapatkan 1 dosis vaksin COVID-19. Tahap I menyoar tenaga kesehatan dan sudah tercapai 103,69% untuk vaksinasi dosis 1 dan 94,80% untuk vaksinasi dosis 2. Pada Tahap II, dilakukan vaksinasi yang menyoar kelompok prioritas lanjut usia, dan petugas publik. Tingkat distribusi vaksinasi COVID-19 untuk petugas publik lebih tinggi dibandingkan kelompok lanjut usia, baik untuk vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Semakin banyaknya masyarakat yang menerima distribusi vaksin COVID-19 dapat menjadi harapan semakin cepatnya pemulihan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Secara lebih rinci, progres vaksinasi dapat dilihat pada **Tabel 2-111**.

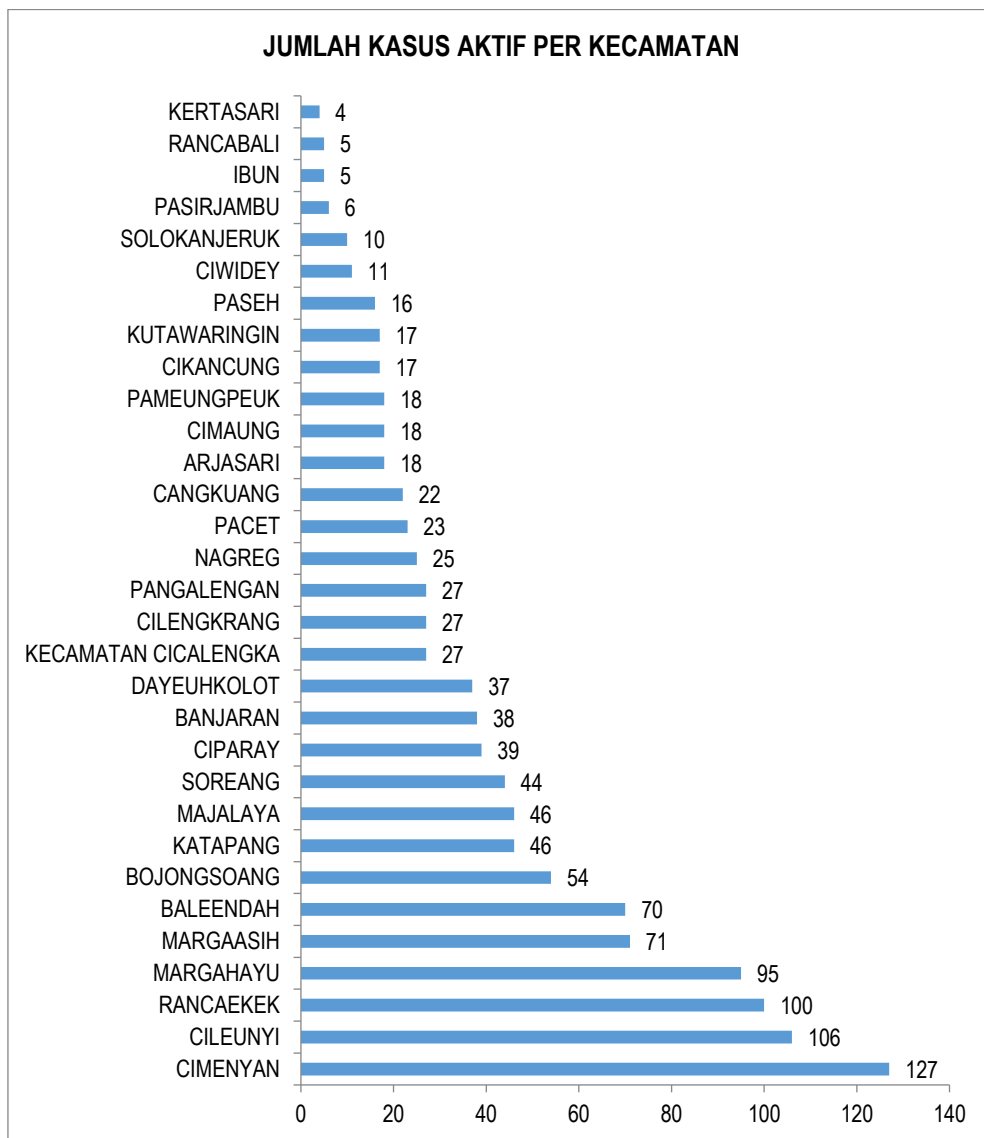
Tabel 2-111
Progres Vaksinasi COVID-19 Nasional, Provinsi Jawa Barat, Dan Kabupaten Bandung

	Nasional ¹		Provinsi Jawa Barat ¹		Kabupaten Bandung ²	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Vaksinasi Dosis 1						
Tenaga Kesehatan	1.468.764	112,31%	181.701	113,52%	7.558	107,03%
Lanjut Usia	21.553.118	24,49%	3.408.940	20,19%	230.997	15,23%
Petugas Publik	17.327.167	192,17%	2.195.338	236,98%	162.812	54,70%
Masyarakat Rentan dan Umum	141.211.181	13,720%	27.254.788	11,98%	1.997.564	18,23%
Kelompok Usia 12-17 Tahun	26.705.490	9,93%	4.867.047	6,88%	396.288	1,59%
Vaksinasi Dosis 2						
Tenaga Kesehatan	1.468.764	104,13%	181.701	105,01%	7.558	95,52%
Lanjut Usia	21.553.118	17,41%	4.403.983	14,09%	230.997	10,31%
Petugas Publik	17.327.167	110,58%	2.195.338	126,31%	162.812	44,36%



	Nasional ¹		Provinsi Jawa Barat ¹		Kabupaten Bandung ²	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Masyarakat Rentan dan Umum	141.211.181	6,49%	27.254.788	5,64%	1.997.564	8,27%
Kelompok Usia 12-17 Tahun	26.705.490	6,53%	4.867.047	3,43%	396.288	0,08%

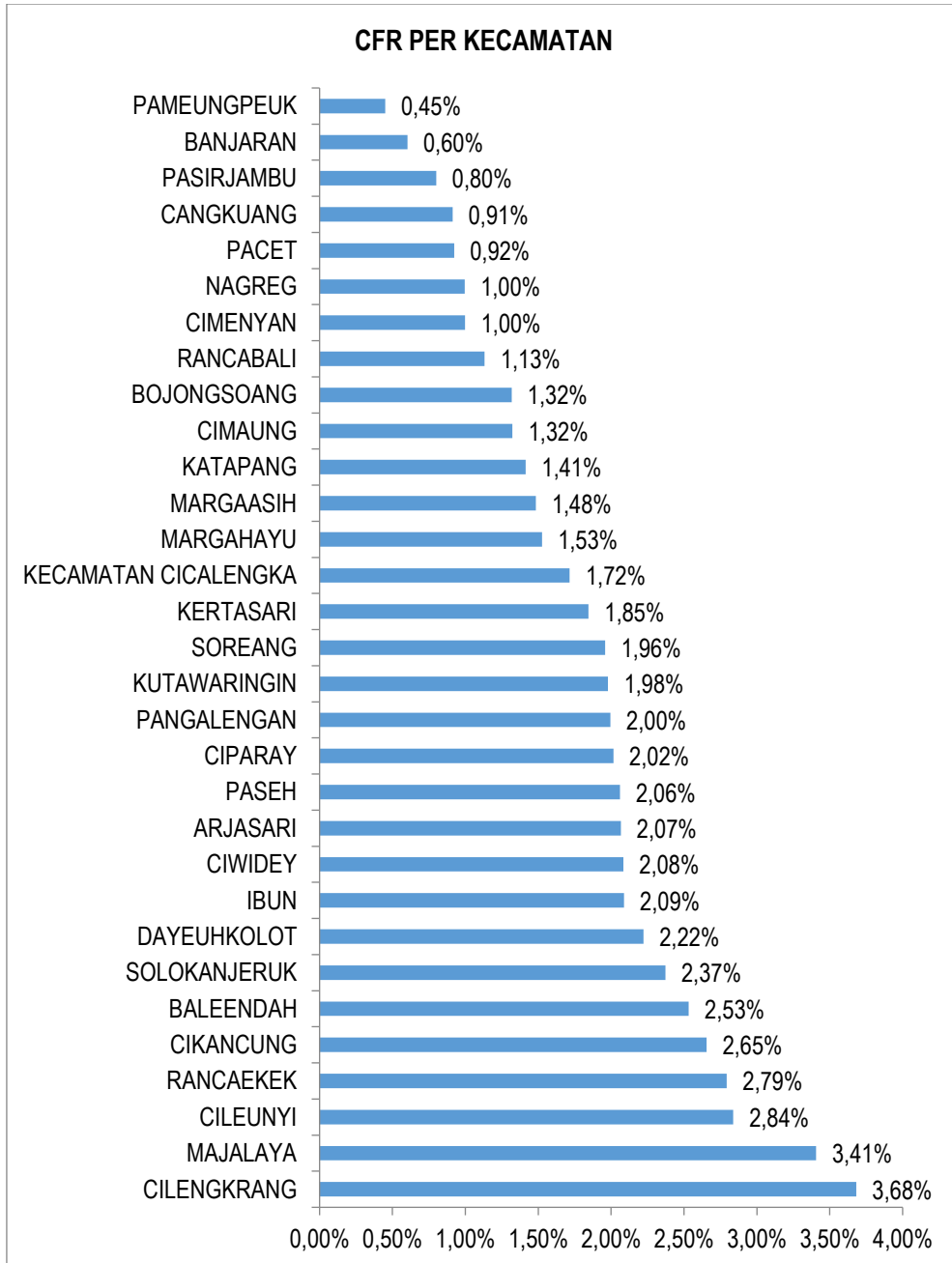
Sumber: ¹<https://vaksin.kemkes.go.id/> (Data per 31 Agustus 2021); ²Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Data per 31 Agustus 2021)



Gambar 2-70

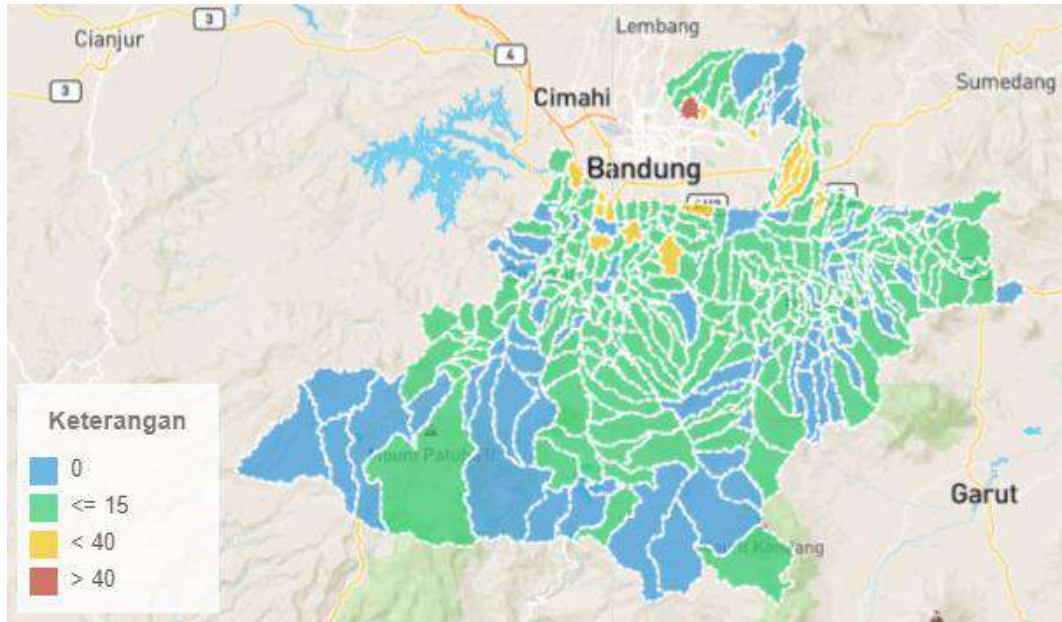
Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Per Kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021; Data update per 31 Agustus 2021



Gambar 2-71
Tingkat Kematian COVID-19 Per Kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD; Data update per 31 Agustus 2021



Gambar 2-72

Peta Zona Risiko COVID-19 Per Desa Di Kabupaten Bandung

Sumber: <https://dashboardcovid.bandungkab.go.id/>, 2021; Data update per 31 Agustus 2021

2.5.2 Kondisi Sektor Terdampak Lainnya

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan mulai dari sektor kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Sejak kejadian pertama kasus infeksi COVID-19 ditemukan pada bulan Maret hingga bulan Desember 2020, kinerja pembangunan makro Indonesia mengalami penurunan, begitu pula dengan Kabupaten Bandung. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap kinerja pembangunan makro tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2020 masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dan capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara kondisi ketenagakerjaan pada Tahun 2020 menunjukkan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding kondisi Tahun 2019. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19

yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah berimbas pada kinerja perekonomian Kabupaten Bandung.

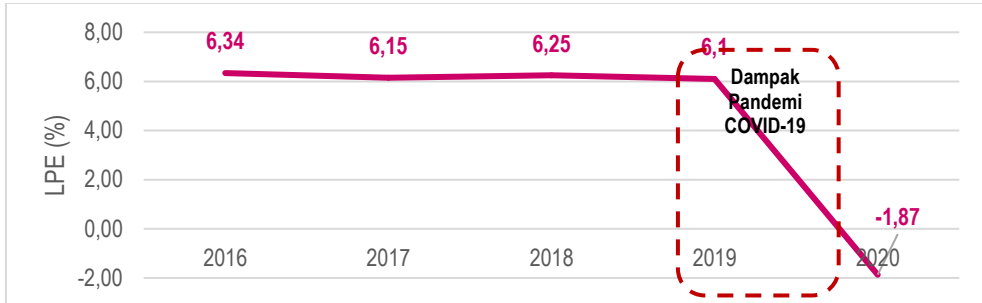
Secara umum, dapat diketahui bahwa LPE Kabupaten Bandung pada tahun 2020 melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diilustrasikan pada **Gambar 2-73**. Meski demikian, seiring dengan pandemi pada paruh ke dua tahun 2020, perekonomian nasional dan daerah cenderung menguat, walau masih jauh dari laju pertumbuhan sebelum pandemi. Pada **Gambar 2-74**, dapat dilihat bahwa terjadi penguatan pada Triwulan ke-2 hingga Triwulan ke-4 untuk LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini dapat mengindikasikan menguatnya juga LPE Kabupaten Bandung pada triwulan terkait.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi lapangan usaha. 3 (tiga) lapangan usaha dengan peranan terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Bandung, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan



Sepeda Motor mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,61 persen dan -0,11 persen dibanding tahun 2019. Sementara lapangan usaha Pertanian,

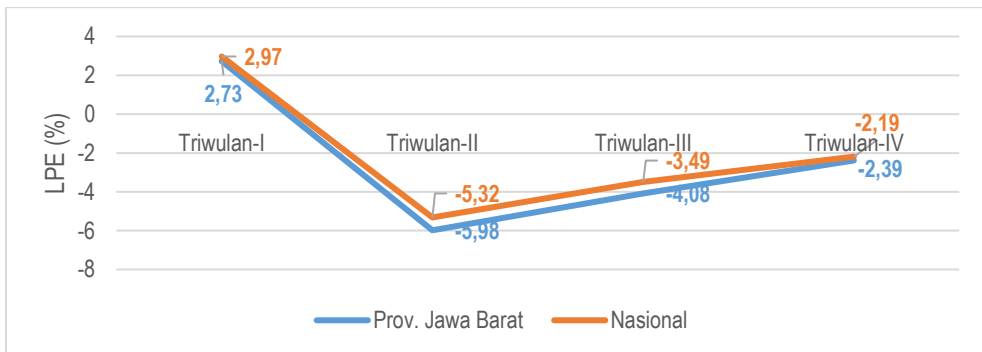
Kehutanan dan perikanan tumbuh positif sebesar 0,17 persen meskipun melambat dibanding tahun 2019 sebesar 1,09 persen.



Gambar 2-73

Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

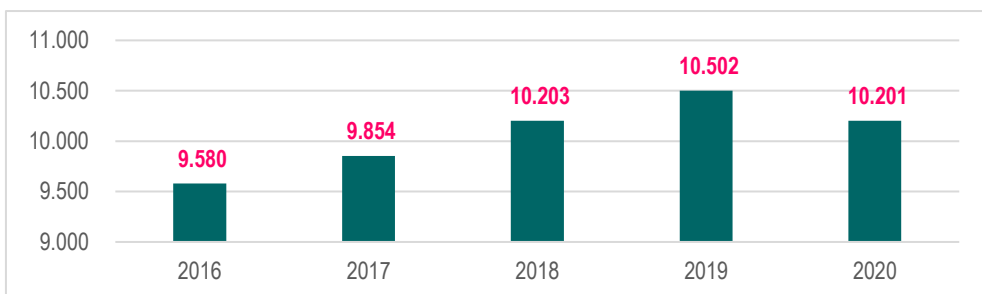
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 2-74

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Per Triwulan Di Tahun 2020

Sumber: BPS, 2021



Gambar 2-75

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

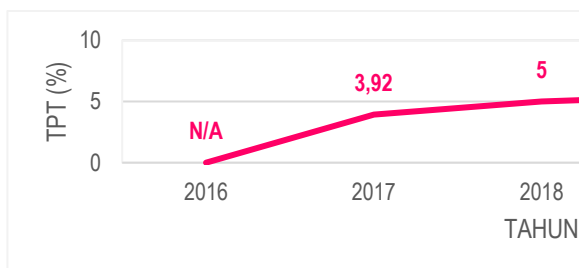
Dampak Pandemi COVID-19 juga berimbas pada aspek pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020. IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 72,41 poin menjadi 72,39 poin. Penurunan IPM Kabupaten Bandung disebabkan karena komponen pengeluaran per kapita mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita pertahun mencapai Rp10.502.000 menurun menjadi Rp10.201.000 pada tahun 2020, walaupun masih melebihi target capaian tahun 2020 yakni Rp10.150.000.

Dinamika ketenagakerjaan pada Tahun 2020 tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19. BPS Kabupaten Bandung melakukan survei dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung terhadap 305 responden usaha, yakni 27 UMB dan 278 UMK di Kabupaten Bandung. Berdasarkan analisis dampak Covid-19 tersebut, mayoritas usaha/perusahaan di Kabupaten Bandung masih beroperasi selama pandemi Covid-19 yakni sebanyak 63% usaha/perusahaan di Kabupaten Bandung. Sebagian besar usaha/perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa berstrategi untuk mengurangi kapasitas *output* dengan cara mengurangi jam kerja, mesin dan personil. Adapun terdapat 15% usaha/perusahaan yang berhenti beroperasi dan 10% yang berhenti beroperasi. Hal ini dapat mengindikasikan adanya potensi resiliensi dari pelaku usaha di Kabupaten Bandung untuk dapat bertahan selama pandemi yakni dengan berbagai strategi

produksi yang menyesuaikan dengan kondisi kesehatan pegawai maupun ketersediaan serta permintaan pasar.

Sebagai konsekuensi adanya berbagai strategi usaha yang diterapkan para pelaku usaha agar bertahan selama pandemi, kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang terdampak. Menurut analisis Covid-19 oleh BPS Kabupaten Bandung, sebagian besar usaha/perusahaan tidak mengambil tindakan terhadap tenaga kerja. Adapun sisanya mengurangi jam kerja untuk karyawan tertentu dan menerapkan *Work From Home* terhadap sebagian/seluruh tenaga kerja baik dengan pengurangan/tidak ada pengurangan gaji. Secara lebih rinci, terdapat 52% usaha/perusahaan yang tidak mengambil tindakan terhadap tenaga kerja, 25% usaha/perusahaan melakukan pengurangan jam kerja untuk karyawan tertentu, dan 15% usaha/perusahaan menerapkan WFH sebagian/seluruh tenaga kerja dengan ada/tidak ada pengurangan gaji.

Ditelaah dari aspek statistik ketenagakerjaan, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019. Pengangguran mengalami kenaikan sebesar ± 660.000 orang sebanding dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,77 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 mencapai 7,69 persen meningkat menjadi 10,46 persen pada Tahun 2020.



Gambar 2-76

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung juga mempengaruhi kinerja finansial pada pelaku usaha secara umum. Berdasarkan analisis Covid-19 oleh BPS Kabupaten Bandung, mayoritas usaha/perusahaan mengalami penurunan laju omset dengan rata-rata perkiraan penurunan sebesar 30-40% selama masa pandemi Covid-19, yakni sebesar 76% pelaku usaha/perusahaan. Meski demikian, terdapat 18% usaha/perusahaan yang memiliki laju omset tetap dan 6% laju omset naik.

Dalam menghadapi pandemi, analisis BPS Kabupaten Bandung menunjukkan adanya 3 (tiga) kendala terbesar yang dihadapi oleh usaha/perusahaan selama masa pandemi Covid-19. Kendala tersebut meliputi kendala pemasaran/penjualan produk, pembayaran biaya bahan baku produksi dan pembayaran hutang.

Adapun secara khusus, dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kabupaten Bandung dapat ditinjau dari beberapa sektor, di antaranya sektor pariwisata, UMKM, dan ketenagakerjaan sebagai berikut.

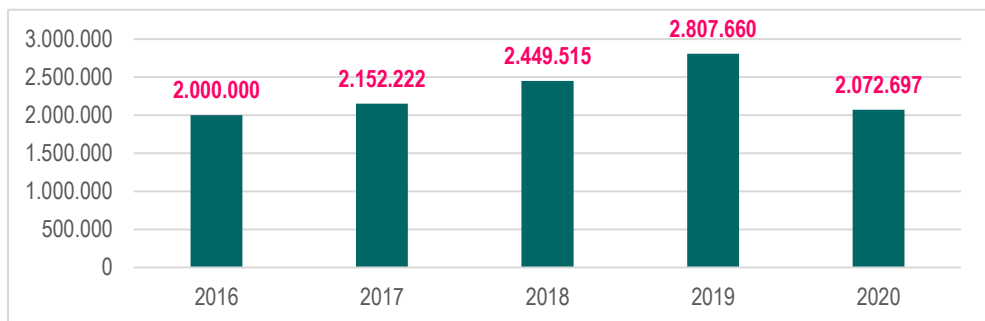
2.5.2.1 Sektor Pariwisata

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata karena penutupan destinasi wisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

- Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari pandemik COVID

dispesifikasikan sebagai penurunan vertikal dari kurva permintaan ekspor terkait pariwisata (yaitu perhotelan, restoran dan transportasi). Berdasarkan Survei Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, kinerja pariwisata menurun sebesar -25% sampai -50% per triwulan 1 dan 2.

- Perkembangan jumlah wisatawan ke Kabupaten Bandung mengalami tren negatif sejak pandemi COVID-19, secara kumulatif Januari – Desember 2020 hanya sebesar 2.072.697 jiwa turun -26 persen dibandingkan tahun 2019 dengan periode yang sama.
- Sebanyak 979 karyawan pada Sektor Pariwisata terdampak COVID-19 dengan 15 karyawan di PHK, 324 karyawan dirumahkan namun tidak diberi upah, dan 79 karyawan dirumahkan dan diberi upah.



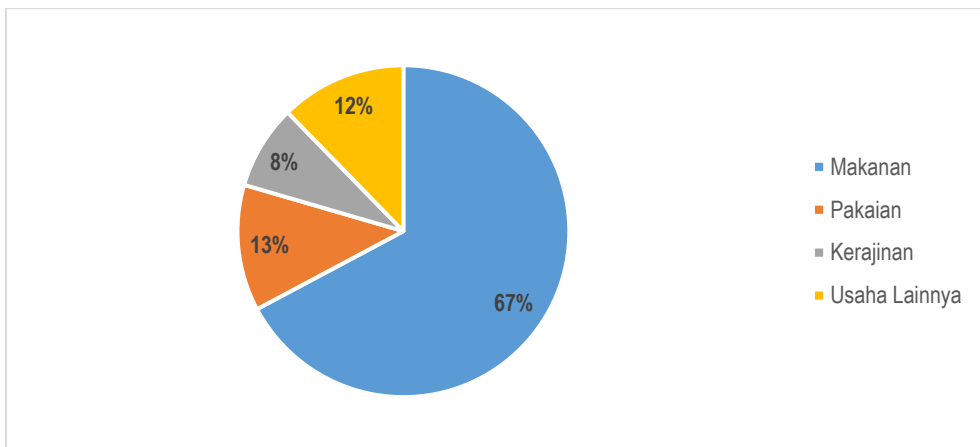
Gambar 2-77
Perkembangan Jumlah Wisatawan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 (Jiwa)

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

2.5.2.2 Sektor UMKM

Kabupaten Bandung masih mengalami kontraksi ekonomi dan belum pulihnya permintaan akibat masih terbatasnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi produksi sebagai dampak dari PSBB dan PPKM. Selama PPKM, survei perilaku masyarakat Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kegiatan operasional restoran

mengalami penyesuaian seiring dengan peraturan yang berlaku. Pada Bulan Juni 2021, yakni periode sebelum PPKM Darurat, 42% responden usaha restoran beroperasi seperti normal. Sedangkan pada periode PPKM Darurat, 57% responden usaha restoran beroperasi dengan skema *take away* dan hanya 11% responden usaha yang beroperasi seperti normal. Data UMKM terdampak COVID-19 berdasarkan bidang usaha adalah sebagai berikut.



Gambar 2-78

Data UMKM Terdampak COVID-19 Berdasarkan Bidang Usaha

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD

2.5.2.3 Sektor Ketenagakerjaan

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (para pekerja/buruh). Berdasarkan data per Bulan Desember 2020 hingga Juni 2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung diketahui terdapat sebanyak 111 perusahaan yang terdampak akibat pandemi COVID-19, dengan total pekerja/buruh yang terdampak sebanyak 14.053 orang, dengan 5.677 orang di-PHK dan sebanyak 8.266 orang dirumahkan.

Meski demikian, **Tabel 2-112** menunjukkan bahwa terdapat pengurangan jumlah perusahaan yang

melakukan perumahan dan PHK terhadap karyawannya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Adapun jumlah karyawan yang dirumahkan dan mendapat PHK pun berkurang pada tahun 2021. Pada tahun 2021, hanya terdapat 1 perusahaan yang melakukan PHK dan 110 tenaga kerja yang mendapatkan PHK. Meski masih terdapat perusahaan dan tenaga kerja yang mengalami PHK, akan tetapi hal ini dapat mengindikasikan mulai menguatnya kinerja ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian di Kabupaten Bandung dari dampak Covid-19 di tahun 2020.

Tabel 2-112

Data Perusahaan yang Terkena Dampak Covid-19

No	Uraian	Jumlah Perusahaan		Jumlah Total	Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Total
		Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dirumahkan	28		28	8.266		8.266
2	PHK	82	1	83	5.677	110	5.787
	Jumlah Total	110	1	111	13.943	110	14.053

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, 2021 yang dikelola dalam SIPD



2.6 Evaluasi RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021

Evaluasi terhadap hasil pembangunan jangka menengah daerah dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Dikarenakan akhir periode RPJMD Kabupaten Bandung adalah tahun 2021, maka evaluasi hasil capaian visi pun membandingkan capaian pembangunan dengan target tahun 2021. Terdapat 2 periode capaian yang digunakan yaitu capaian tahun 2019 dan juga capaian tahun 2020 yang digunakan untuk melihat capaian RPJMD. Penggunaan kedua periode capaian ini dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 dan masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2021 dan telah mendisrupsi berbagai kegiatan pembangunan yang berdampak pada realisasi capaian pembangunan jangka menengah daerah. Perbandingan kedua periode capaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan kondisi yang terjadi pada capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah setelah adanya Pandemi COVID-19.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 adalah “Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergi pembangunan perdesaan berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan”. Visi ini telah menjadi landasan dan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan selama periode 2016 – 2021. Perumusan visi ini berangkat dari permasalahan dan isu – isu yang ada guna meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dapat diketahui sejauh mana mimpi pembangunan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat capaian visi pembangunan jangka menengah daerah di tahun 2020 adalah sebesar 94,92% dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020, visi pembangunan jangka menengah daerah tidak melampaui target yang ditetapkan untuk tahun ini. Sedangkan saat tahun 2019 capaiannya mencapai 131,19%. Melihat capaian visi pembangunan di tahun 2019, optimisme pemerintah Daerah Kabupaten Bandung semakin tinggi untuk mencapai arah kebijakan pembangunan tahap IV dalam RPJPD Kabupaten Bandung yaitu pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Akan tetapi, adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020 ternyata berdampak pada capaian visi pembangunan jangka menengah daerah. Pada tahun 2020, prognosis tingkat capaian tahun 2020 adalah sebesar 94,92%. Hal ini menandakan bahwa proyeksi realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan tahun 2020. Terdapat penurunan tingkat capaian visi RPJMD sebesar 36,27% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dapat diwujudkan melalui kelima misi pembangunan jangka menengah daerah. Kelima misi pembangunan ini menjadi pedoman dan langkah pemerintah Daerah untuk bersama – sama mewujudkan visi. Oleh karenanya, pencapaian visi sangat bergantung dengan kinerja pencapaian misi itu sendiri. Dapat dilihat bahwa menurunnya tingkat capaian visi berdasarkan capaian tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan capaian misi – misi pembangunan yang juga terdampak oleh Pandemi COVID-19. Dari kelima misi pembangunan ini, seluruh capaian di tahun 2020 mengalami penurunan. Misi yang mengalami penurunan paling tinggi adalah misi 5 dengan pengurangan lebih dari 50%, Misi 2 dan misi 1, dan misi 4 dengan pengurangan kurang dari 20%. Sementara itu, hanya misi 3 yang mengalami peningkatan. Capaian Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilihat pada **Tabel 2-114**.



Tabel 2-113
Capaian Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

VISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021	Tingkat Capaian 2019	Predikat Capaian	Tingkat Capaian 2020	Predikat Capaian	Persentase Penurunan Tingkat Capaian dari 2019 ke 2020
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan	131,19%	Sangat Tinggi	94,92 %	Sangat Tinggi	36,27%

Sumber: Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Selain menilai terhadap capaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 juga menilai capaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan

merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Capaian tujuan pembangunan daerah diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian sasaran pembangunan daerah diukur menggunakan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Tabel 2-114
Capaian Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

MISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021	Tingkat Capaian 2019	Predikat Capaian	Prognosis Tingkat Capaian 2020	Predikat Capaian	Persentase Penurunan Tingkat Capaian dari 2019 ke 2020
MISI 1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	140,82%	Sangat Tinggi	120,34%	Sangat Tinggi	-20,48%
MISI 2: MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING	161,34%	Sangat Tinggi	95,53%	Sangat Tinggi	-65,81%
MISI 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR TERPADU DENGAN TATA RUANG	123,60%	Sangat Tinggi	134,16%	Sangat Tinggi	10,56%
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	124,66%	Sangat Tinggi	105,11%	Sangat Tinggi	-19,55%
MISI 5: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	105,54%	Tinggi	9,48%	Sangat Rendah	-96,06%

Sumber: Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Bandung,



salah satunya adalah dengan mengukur tingkat realisasi dari pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). Sebagai indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan di tingkat kabupaten, evaluasinya menjadi penting untuk melihat bagaimana hasil pembangunan secara makro. Evaluasi terhadap tingkat realisasi IKU dan IKD serta target yang ditetapkan untuk tahun 2021 tercantum dalam **Tabel 2-115** yang dikelompokkan berdasarkan urutan misi dalam dokumen RPJMD.



Tabel 2-115

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi					% Capaian 2020	Ketercapaian	Predikat (86/2017)	Tren 2019-2020	Target 2021	Gap 2020-2021	Gap Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.33	70.69	71.02	71.75	72.41	72.39	100.08%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	72.5	99.85%	Sudah Tercapai/ On Track
2	Tingkat Kemiskinan	6	7.61	7.36	6.65	5.94	6.91	86.83%	Tidak Tercapai	Tinggi	Menurun	6.5	76.56%	Perlu Kerja Keras
3	Persentase Desa Mandiri	20.74	N/A	0.37	9.62	20.74	20.74	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	20.74	100.00%	Sudah Tercapai/ On Track
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1.1	6.34	6.15	6.26	6.09	-1.87	30.00%	Tidak Tercapai	Sangat Rendah	Menurun	3,56	105.00%	Sudah Tercapai/ On Track
5	Skor PPH Konsumsi	85.4	75.86	83	84.6	87.9	83.3	97.54%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	86.3	96.52%	Sudah Tercapai/ On Track
6	Kualitas Pelayanan Infrastruktur	71.66	60.52	60.15	61.9	71.66	61.95	86.45%	Tidak Tercapai	Tinggi	Menurun	71.9	86.16%	Perlu Kerja Keras
7	Indeks Kualitas Air	28	20	19	26.3	30.3	29.67	105.96%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	29	102.31%	Sudah Tercapai/ On Track
8	Indeks Reformasi Birokrasi	65	N/A	N/A	61.35	62.75	64.33	98.97%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	67	96.01%	Sudah Tercapai/ On Track
9	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20	N/A	10	64	13.6	-74	-370.00%	Tidak Tercapai	Sangat Rendah	Menurun	25	54.40%	Sulit Tercapai
1	Indeks pendidikan	64.65	62.83	62.89	63.48	64.52	65.12	100.72%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	64.67	100.69%	Sudah Tercapai/ On Track
2	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8.56	8.46	8.47	8.5	15.87	11.25	131.43%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	8.6	130.81%	Sudah Tercapai/ On Track
3	Persentase tingkat	99	96.81	97.02	98.05	99.03	100	101.01%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	99.5	100.50%	Sudah Tercapai/ On Track



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi					% Capaian 2020	Ketercapaian	Predikat (86/2017)	Tren 2019-2020	Target 2021	Gap 2020-2021	Gap Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020							
	kelulusan SD/ sederajat													
4	Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	98	96.3	98.03	99.1	99.41	100	102.04%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	98.5	101.52%	Sudah Tercapai/ On Track
5	Persentase pemustaka	2.5	7.86	8.25	8	8.84	4.9	196.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	3	163.33%	Sudah Tercapai/ On Track
6	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	0	383	154	441	244	201	201.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	85	236.47%	Sudah Tercapai/ On Track
7	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	80	76.09	76.75	79.67	79.89	80.36	100.45%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	80.25	100.14%	Sudah Tercapai/ On Track
8	Persentase fasilitas kesehatan berakreditasi	92.31	16.13	48.5	80.65	100	95.83	103.81%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	100	95.83%	Sudah Tercapai/ On Track
9	Indeks kesehatan	81.85	81.69	81.74	81.77	82.15	82.35	100.62%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	82.2	100.19%	Sudah Tercapai/ On Track
10	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	65	N/A	68	86	81	98	150.77%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	70	140.00%	Sudah Tercapai/ On Track
11	Indeks pengeluaran	70.59	68.82	69.69	70.21	71.63	70.74	100.21%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	71.77	98.56%	Sudah Tercapai/ On Track
12	Tingkat pengangguran terbuka	6.5	4.03	3.73	5	5.48	8.58	68.00%	Tidak Tercapai	Sedang	Menurun	5.45	63.52%	Sulit Tercapai



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi					% Capaian 2020	Ketercapaian	Predikat (86/2017)	Tren 2019-2020	Target 2021	Gap 2020-2021	Gap Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020							
13	Indeks kedalaman kemiskinan	0.85	1	1.12	0.87	1.04	1.04	77.65%	Tidak Tercapai	Tinggi	Tetap	0.84	80.77%	Perlu Kerja Keras
14	Persentase Desa Mandiri	20.74	N/A	0.37	9.62	20.74	20.74	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	16	129.63%	Sudah Tercapai/ On Track
15	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	6.88	4.24	5.85	2.24	2.24	0.19	2.76%	Tidak Tercapai	Sangat Rendah	Menurun	2.35	97.70%	Sudah Tercapai/ On Track
16	Nilai tukar petani	105.36	104.86	105.36	109.002	112.36	105.36	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	107.36	98.14%	Sudah Tercapai/ On Track
17	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	-2.2	5.9	5.64	6.71	5.87	-3.78	28.18%	Tidak Tercapai	Sangat Rendah	Menurun	6.19	94.17%	Perlu Kerja Keras
18	Persentase Koperasi Berkualitas	4	1.5	2	3	4	5	125.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	4.5	111.11%	Sudah Tercapai/ On Track
19	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	-4.56	5.94	5.75	5.95	6.35	-3.27	128.29%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	6.17	94.19%	Perlu Kerja Keras
20	Jumlah kunjungan wisata	2,500,000	2,100,000	2,152,222	2,449,515	2,826,771	2,072,697	82.91%	Tidak Tercapai	Tinggi	Menurun	3,000,000	69.09%	Sulit Tercapai
21	Persentase pertumbuhan sektor penyediaan	-6.9	6.53	6.42	7.07	6.99	-3,21	128.29%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	6.5	93.90%	Perlu Kerja Keras



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi					% Capaian 2020	Ketercapaian	Predikat (86/2017)	Tren 2019-2020	Target 2021	Gap 2020-2021	Gap Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020							
	akomodasi dan makan minum dalam PDRB (pariwisata)													
22	Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	65	35	45	55	111	111	170.77%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	75	148.00%	Sudah Tercapai/ On Track
23	Laju pertumbuhan investasi	8.6	-13.2	34.23	53.56	38.5	12.69	147.56%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	10	126.90%	Sudah Tercapai/ On Track
24	Skor PPH Konsumsi	85.4	75.86	83	84.6	87.9	83.3	97.54%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	86.3	96.52%	Sudah Tercapai/ On Track
25	Skor PPH Ketersediaan	91	81.3	86	88.6	90.6	93.8	103.08%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	92	101.96%	Sudah Tercapai/ On Track
26	Moda share	2.16	1.41	1.45	1.346	5.5	5.48	253.70%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	2.25	243.56%	Sudah Tercapai/ On Track
27	Level of service (LOS) jalan	C	D	D	D	C	B	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	C	100.00%	Sudah Tercapai/ On Track
28	Luas sawah yang terairi irigasi	55	N/A	40	44.5	72.5	72.76	132.29%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	60	121.27%	Sudah Tercapai/ On Track
29	Akses aman terhadap air bersih	80.24	76.04	77.12	78.57	80.52	81.45	101.51%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	83	98.13%	Sudah Tercapai/ On Track
30	Akses aman terhadap sanitasi	76.37	70.2	70.51	73.42	80.16	86.11	112.75%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	80	107.64%	Sudah Tercapai/ On Track
31	Persentase kawasan kumuh	0.33	0.72	0.65	0.49	0.33	0.32	103.03%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	0.25	78.13%	Perlu Kerja Keras
32	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	58	55,55	55,93	56,12	56,50	57,46	99,07%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	58	99,07%	Sudah Tercapai/ On Track
33	Response time terhadap kejadian kebakaran	75	55.35	60	66	84.78	82.27	109.69%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	75	109.69%	Sudah Tercapai/ On Track



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi					% Capaian 2020	Ketercapaian	Predikat (86/2017)	Tren 2019-2020	Target 2021	Gap 2020-2021	Gap Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020							
34	Persentase penanganan kebencanaan	100	100	100	100	100	100	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	100	100.00%	Sudah Tercapai/ On Track
35	Luas genangan	1.5	1.3	1.35	1.42	4.5	5.62	374.67%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	1.55	362.58%	Sudah Tercapai/ On Track
36	Indeks kualitas air	28	20	19	26.3	30.3	29.67	105.96%	Tercapai	Sangat Tinggi	Menurun	29	102.31%	Sudah Tercapai/ On Track
37	Indeks kualitas udara	78	60	72	75.1	76.4	78.1	100.13%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	80	97.63%	Sudah Tercapai/ On Track
38	Persentase pengelolaan sampah	56.51	22	26	41.5	56.91	62.37	110.37%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	65	95.95%	Sudah Tercapai/ On Track
39	Luas ruang terbuka hijau	48.95	38.283	46.54	48.39	50.9	51.29	104.78%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	49.4	103.83%	Sudah Tercapai/ On Track
40	Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	0.31	100.00%	Sudah Tercapai/ On Track
41	Nilai SAKIP kabupaten	72	54.61	60.3	70.15	70.26	71.44	99.22%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	77	92.78%	Perlu Kerja Keras
42	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	3	N/A	1.2	3.0602	3.0602	3	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	3.2	93.75%	Perlu Kerja Keras
43	Indeks kepuasan masyarakat	81.78	N/A	80.46	80.39	82.37	82.37	100.72%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	82.7	99.60%	Sudah Tercapai/ On Track
44	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	1	2	1	1	1	1	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	1	100.00%	Sudah Tercapai/ On Track
45	Tingkat kemandirian fiskal	16.86	N/A	18	17.63	17.89	38.17	226.39%	Tercapai	Sangat Tinggi	Meningkat	18.4	207.45%	Sudah Tercapai/ On Track
46	Persentase penurunan	20	N/A	10	64	13.6	-74	-370.00%	Tidak Tercapai	Sangat Rendah	Menurun	25	-296.00%	Sulit Tercapai



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi					% Capaian 2020	Ketercapaian	Predikat (86/2017)	Tren 2019-2020	Target 2021	Gap 2020-2021	Gap Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020							
	gangguan kamtibmas													
47	Persentase penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100.00%	Tercapai	Sangat Tinggi	Tetap	100	100.00%	Sudah Tercapai/ On Track

Sumber: Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Jika dilihat dari evaluasi kondisi Kabupaten Bandung kepada tahap-IV RPJP Kab. Bandung 2005-2025 bisa tergambarkan bagaimana permasalahan-permasalahan pembangunan sudah teridentifikasi dengan baik sehingga dapat diintervensi melalui perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi *gap* terhadap arah kebijakan RPJPD untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan yang telah terealisasi

hingga tahap ketiga RPJPD serta permasalahan – permasalahan apa saja yang masih perlu diselesaikan untuk dapat mencapai target arah kebijakan di tahap keempat. Berikut adalah penjabaran *gap* antara capaian pembangunan dengan target arah kebijakan periode keempat pada RPJPD Kabupaten Bandung yang disusun berdasarkan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 2-116

Gap Capaian Pembangunan Terhadap Arah Kebijakan Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025

Arah Kebijakan untuk RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)	Gap
Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	
Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman yang sudah dapat dideteksi secara dini	Sudah terdapat tim kewaspadaan dini daerah, Kominda, dan FKDM serta adanya kegiatan kerja sama dengan mitra jajaran samping dalam upaya meningkatkan ketertiban masyarakat.
Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sudah meningkat ditandai dengan persentase penanganan kebencanaan mencapai 100% dan meningkatnya jumlah desa tangguh bencana menjadi 6 desa di tahun 2019, namun tidak ada penambahan desa tangguh bencana baru di 2020.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK	Terdapat 6 aplikasi (kepegawaian, keuangan, kependudukan, kemiskinan, monev, dan kesehatan) yang sudah terintegrasi dengan <i>dashboard</i> Kabupaten Bandung. Bidang urusan yang masih belum terintegrasi dan direncanakan akan diintegrasikan yaitu pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan desa.
Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan efektifnya sistem pelayanan berbasis teknologi yang sudah terintegrasi	Terdapat peningkatan jenis pelayanan yang sudah berbasis teknologi dan terintegrasi. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sudah menggunakan sistem <i>one day service</i> . Pelayanan perizinan sudah dilakukan otomatisasi proses kerja/layanan melalui aplikasi SAMIRINDU, SiLONCER, serta SIMELON. Pelayanan di kecamatan pun sudah berbasis teknologi menggunakan aplikasi SIMACAN. Selain itu, sudah diberlakukan juga sistem antrian <i>online</i> seperti di kecamatan, rumah sakit, atau puskesmas untuk meningkatkan kinerja layanan administrasi.
Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	
Pengendalian dan kontrol terhadap pencemaran lingkungan sudah optimal ditandai dengan meningkatnya daya dukung lingkungan, kualitas air, udara, dan tanah	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sudah mengalami peningkatan tetapi masih termasuk ke dalam kategori “Kurang Baik” atau 52,57 poin. Masih perlu dilakukan pengendalian terhadap sumber – sumber pencemar air dan udara khususnya selain yang berasal dari industri.
Pengurangan risiko bencana yang sinergi, terintegrasi, dan efektif dalam setiap dimensi pembangunan	Sudah terdapat dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bandung tetapi belum dapat dipastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan sektoral sudah mempertimbangkan risiko bencana sebagaimana yang direkomendasikan dalam dokumen kajian risiko bencana.



Arah Kebijakan untuk RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)	Gap
Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air berbasis <i>sustainable river environment TOD</i>	Dalam rangka menunjang ketahanan air, pemenuhan kebutuhan air harus dapat terjamin. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perhitungan mengenai besaran ketersediaan air baku di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung juga belum membentuk jaringan informasi sumber daya air yang seharusnya menjadi target pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Berdasarkan data yang dimiliki, kapasitas mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku adalah sebesar 1,7726 m ³ /detik. Masih terdapat tantangan dalam mengelola sumber daya air yaitu mempertahankan dan melindungi sumber daya air sebagai air baku kebutuhan penduduk serta pembangunan sarana – sarana yang berfungsi dalam menyediakan kebutuhan air baku baik berupa pembangunan waduk, situ, embung, atau jaringan irigasi.
Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan semakin baiknya sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang terus mengalami peningkatan yang artinya semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, belum terdapat payung hukum atau peraturan daerah yang digunakan sebagai pengendali pemanfaatan ruang. Masih perlu didorong penyusunan RDTR dan PZ sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Terlindunginya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dari konversi lahan pertanian ke non pertanian	Sudah ditetapkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini juga sedang dilakukan penyusunan analisis neraca penatagunaan lahan oleh BPS sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengendalian pembangunan.
Peningkatan akses dan ketersediaan RTH publik dan taman sudah dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi	Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 38,28 Ha tahun 2016 menjadi 51,29 Ha tahun 2020. Meskipun sudah mengalami peningkatan, tetapi luas RTH publik di Kabupaten Bandung belum memenuhi syarat ketersediaan 20% RTH. Persentase RTH di Kabupaten Bandung baru sebesar 0,21% dari luas wilayah perkotaan seluas 24.150,49 Ha.
Pertumbuhan jumlah penduduk alami maupun migrasi sudah terkendali	Jumlah penduduk Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan positif dengan laju pertumbuhan penduduk yang menurun selama 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung sebesar 1,84% di tahun 2020. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan melalui indikator rasio akseptor Keluarga Berencana (KB). Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung selalu berfluktuatif namun memiliki tren yang meningkat, artinya sudah menunjukkan adanya pengendalian penduduk.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Meningkatkan standarisasi kualitas pendidikan formal dan non formal yang bersertifikasi dalam mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A mengalami peningkatan dari 8,46% di tahun 2016 menjadi 15,87% di tahun 2019 namun menurun menjadi 11,25 di tahun 2020. Persentase lembaga pendidikan yang berakreditasi A di Kabupaten Bandung masih cukup rendah. Akan tetapi, jumlah sekolah formal dengan akreditasi minimal B sudah cukup banyak, persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B masing – masing sebesar 68,5% dan 48,9%.
Pemerataan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat	Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah mengalami peningkatan namun belum memenuhi kebutuhan. Terdapat 8 unit rumah sakit dan 62 buah puskesmas yang tersebar di 31 kecamatan. Proporsi puskesmas terhadap penduduk sebesar 1,6 per 100.000 penduduk, masih jauh dari target nasional sebesar 1 per 30.000 penduduk.
Fokus pada pengembangan balita melalui intervensi pada nutrisi anak dan pengembangan pendidikan pra sekolah	Pada tahun 2019, prevalensi <i>stunting</i> sebesar 4,71% pada baduta dan 7,32% pada balita. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif. Cakupan ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan sudah mencapai 63,8%. <i>Stunting</i> yang terjadi di Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan oleh ibu hamil maupun anak balita. Meskipun status gizi ibu hamil dan balita sudah baik, pencegahan <i>stunting</i> masih perlu dilakukan melalui perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan akses sanitasi dan air bersih.
Peningkatan kualitas gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak	Kualitas kesehatan ibu hamil sudah mengalami peningkatan. Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 yang diiringi dengan peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan terampil (92,75%). Cakupan K1 dan K4 juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016.



Arah Kebijakan untuk RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)	Gap
	Kabupaten Bandung mempunyai masalah gizi ganda yaitu permasalahan kekurangan dan kelebihan gizi. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang disebabkan oleh konsumsi makanan tidak seimbang, kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga, penyakit infeksi pada balita dan pengetahuan dari perilaku ibu tentang gizi seimbang masih kurang. Meskipun begitu, dari sisi asupan gizi terdapat peningkatan kesadaran ibu untuk menyusui anaknya (bayi <6 bulan) menjadi 63,84%.
Peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Ketahanan keluarga belum dapat tercipta secara optimal. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh pasangan lebih tinggi dibandingkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain selain pasangan. Salah satu faktor yang mendorong tingginya tindak kekerasan oleh pasangan adalah faktor ekonomi dan pernikahan dini. Di sisi lain, peran perempuan di berbagai bidang pembangunan juga belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan tahun 2019 di DPRD menurun menjadi 14,55% dan perempuan dengan jabatan eselon II menurun menjadi 19,44%.
Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan lansia	Upaya penciptaan lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan lansia belum ditekankan pada upaya – upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Sedangkan upaya pelayanan dan penanganan kasus kekerasan sudah optimal dengan persentase korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sudah mencapai 100%.
Terciptanya kesejahteraan pekerja di berbagai lapangan usaha yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bandung menempati urutan ke-7 dari 27 kab/kota di Jawa Barat. Akan tetapi, tingkat pengangguran di Kab. Bandung mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Masih terdapat ketidaksinkronan antara pendidikan, kesenjangan pekerjaan, serta pengangguran pekerja berpendidikan tinggi. Sebanyak 65% penganggur terbuka di Kabupaten Bandung justru merupakan calon tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi (lulusan SMA/SMK dan universitas) terlebih kondisi pandemi menyebabkan peningkatan signifikan angka pengangguran.
Memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik, tersertifikasi, dan inovatif	Sudah dilakukan upaya penyiapan tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan yang sesuai dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian besar tenaga kerja yang terserap oleh PMA/PMDN bukan berasal dari Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Pemuda dan organisasi/ lembaga kepemudaan terlibat aktif dalam berbagai bidang pembangunan dan ikut mengawal pengendalian pembangunan	Peran serta pemuda pelopor dan organisasi/lembaga kepemudaan sudah berdampak positif terhadap pembangunan. Akan tetapi, masih perlu didorong peningkatan jumlah partisipasi pemuda maupun organisasi/lembaga kepemudaan dalam pembangunan. Dari 87 organisasi/lembaga kepemudaan yang ada di Kabupaten Bandung, hanya sebanyak 54 organisasi/lembaga kepemudaan yang aktif.
Kebutuhan pangan lokal sudah terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan ditandai dengan termanfaatkannya bahan baku lokal untuk konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang	Berdasarkan aspek ketersediaan, jenis komoditi yang mengalami surplus hanya pada komoditi jagung, umbi – umbian kecuali sagu, susu, dan sayur. Sementara jenis pangan lain masih defisit dan memerlukan impor dari daerah lain. Produksi pangan – pangan strategis (beras, daging sapi, telur, ikan, dan kedelai) justru berasal dari luar Kabupaten Bandung, hanya daging ayam yang sebagian besar pasokannya berasal dari dalam Kabupaten Bandung. Selain itu, kapasitas produksi pangan – pangan alternatif beberapa kali tidak mampu memenuhi permintaan pasar
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat	Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2010, namun sayangnya kembali meningkat di Tahun 2020. Rata – rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin tinggi ditandai dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.
Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan	
Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dengan kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi	Hingga tahun 2019, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mencapai 98,13%. Meskipun begitu, masih terdapat 18.589 unit atau sekitar 2,63% rumah yang tidak layak huni. Peningkatan perumahan layak huni ini juga telah didukung dengan adanya kemudahan pembiayaan perumahan bagi MBR. Bantuan pembiayaan yang sudah berjalan di Kabupaten Bandung sampai saat ini antara lain bantuan subsidi perumahan melalui FLPP (Fasilitasi Likuiditas Pembangunan Perumahan),



Arah Kebijakan untuk RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)	Gap
masyarakat berpenghasilan rendah agar terwujudnya kabupaten tanpa permukiman kumuh	BP2BT (Bantuan Penyediaan Perumahan Berbasis Tabungan), serta pembangunan rusunawa. Selain itu, hingga tahun 2019 terdapat 45 perumahan yang dibangun oleh 40 pengembang yang mendapatkan subsidi bantuan penyediaan PSU oleh pemerintah.
Termanfaatkannya penggunaan energi baru dan terbarukan (panas bumi) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga	Dana bagi hasil dari panas bumi, migas, dan tambang merupakan salah satu penghasil PAD yang cukup besar bagi Kabupaten Bandung. Potensi uap panas bumi di Kabupaten Bandung tersebar di 3 wilayah kawasan pengembangan panas bumi yaitu Pangalengan, Kamojang – Darajat, dan Cibuni. Tantangan utama dalam pemanfaatan panas bumi adalah belum optimalnya pemanfaatan wilayah pengembangan panas bumi serta pemanfaatan volume uap panas bumi. Sementara itu, pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti biogas belum optimal.
Meratanya layanan kesehatan yang ditunjang oleh tenaga kesehatan handal hingga ke wilayah terpencil	Rasio tenaga medis per satuan penduduk berfluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2019, rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah 0,1531. Hal yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan ialah belum selarasnya regulasi tentang pengaturan pemenuhan tenaga kesehatan dengan kondisi kebutuhan yang ada, serta tingginya mobilitas tenaga kesehatan.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi	APK PAUD tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yaitu 67,21 dan 70,03 sementara APK PAUD tahun 2018 dan 2019 menurun drastis menjadi sebesar 20,22 dan 20,21. Hal ini dikarenakan lembaga PAUD yang dihitung ke dalam Dapodik hanya lembaga PAUD yang sudah mendapatkan izin. Kondisi saat ini adalah banyak lembaga PAUD yang belum memiliki perizinan sehingga tidak terdaftar di Dapodik yang mengakibatkan tidak terhitungnya partisipasi lembaga PAUD. Tantangan ke depannya adalah untuk memfasilitasi dan mempermudah perizinan lembaga PAUD. Partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Meskipun tingkat partisipasi terus membaik, namun jumlah siswa yang putus sekolah juga terus meningkat. Pada tahun 2019, jumlah siswa SMA dan SMK yang putus sekolah mencapai 1.616 siswa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Begitu pula dengan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/K/MA yang masih sebesar 88,62% di tahun 2018.
Pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan terpadu	Transportasi massal yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah <i>light rail transport</i> (LRT). Proses pengembangan LRT sedang memasuki tahapan studi / kajian awal untuk jalur LLRE Martadinata – Banjaran, Leuwipanjang – Soreang, dan Majalaya – Gedebage.
Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu secara merata di berbagai wilayah	Dari 455.004 ton timbulan sampah per tahun, pada tahun 2019 sebanyak 258.961,99 ton/tahun sampah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung atau sebesar 56,91%. Dari total sampah yang terkelola tersebut, sebanyak 22,09% sampah didaur ulang, termanfaatkan di sumber sampah, serta pembatasan timbulan sampah. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya di mana baru sebesar 18,87% sampah yang dikelola secara terpadu melalui pengurangan sampah dari sumber
Pengelolaan sampah sudah efektif dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan	Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) baru berasal dari pemanfaatan dan pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas.
Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat	Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat, hingga tahun 2019 baru sebesar 73,74% penduduk yang menguasai penggunaan teknologi seperti telepon seluler (HP)/ nirkabel atau komputer (PC/ <i>desktop</i> , <i>laptop/ notebook</i> , <i>tablet</i>). Sementara itu, persentase penduduk yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, BBM, dan Whatsapp) bary mencapai 56,07%. Hal ini menunjukkan masih perlunya perluasan akses internet dan pemanfaatan TIK khususnya di kawasan dan komunitas yang sulit mendapatkan akses internet.
Tepeliharanya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di tahun 2019 adalah sebesar 80,16%. Meskipun cakupan akses sanitasi layak mengalami peningkatan, namun capaian ini belum memenuhi target universal yaitu 100%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana sanitasi yang dibangun serta belum mencukupinya ketersediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sementara itu, untuk limbah industri sebagian besar telah diolah langsung. Beberapa industri telah melakukan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> air limbah. Namun, Pemda belum memberikan insentif kepada industri yang telah melakukan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> limbah tersebut.



Arah Kebijakan untuk RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)	Gap
Pemantapan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan (<i>ecodrain</i>) yang terpadu di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman	Pembangunan sistem drainase di Kabupaten Bandung sudah berupaya menerapkan konsep berwawasan lingkungan (<i>ecodrain</i>). Komponen bangunan <i>eco-drainage</i> yang sudah dibangun di Kabupaten Bandung antara lain sumur peresapan air hujan (SPAH), parit peresapan air hujan (PPAH), kolam retensi, serta embung. Bangunan tersebut berfungsi untuk menampung atau meresapkan air guna mengisi kembali pasokan air tanah (konservasi air). Akan tetapi, pengelolaan drainase primer, sekunder, dan tersier masih belum optimal dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur pengelolaan drainase lingkungan.
Pemantapan pengelolaan irigasi terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian	Luas sawah yang terairi irigasi di tahun 2019 baru mencapai 72,5%. Jaringan irigasi yang ada belum memenuhi kebutuhan perairan. Di samping itu, permasalahan utama dalam pengelolaan irigasi adalah terkait pengendalian fungsi irigasi khususnya untuk jaringan irigasi yang berubah fungsi menjadi jaringan drainase. Selanjutnya masih terdapat permasalahan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi yang berada di sekitar kawasan yang mengalami perubahan guna lahan, seperti yang berdekatan dengan kawasan industri maupun permukiman, sehingga kualitas airnya berpotensi mengalami pencemaran.
Meningkatnya akses aman terhadap air bersih bagi masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Kabupaten Bandung sebesar 80,52% di tahun 2019, mengalami peningkatan sejak tahun 2016 yang nilainya sebesar 76,04%. Meskipun mengalami peningkatan, namun akses aman air bersih belum mencapai target universal yaitu 100%. Permasalahan dalam penyelenggaraan air bersih antara lain masih rendahnya kualitas air baku di beberapa tempat, masih terbatasnya ketersediaan sumber air baku dan tidak meratanya persebaran sumber air baku, belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan SPAM oleh masyarakat, serta kurangnya kebijakan terkait pemanfaatan dan pengendalian sumber air bersih.
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah perempuan & anak, disabilitas, dan manula sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat	Belum terdapat regulasi yang mendukung untuk penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi perempuan & anak, disabilitas, dan manula.
Adanya transformasi perdesaan yang ditandai dengan perubahan pada struktur ekonomi dan pekerjaan serta meningkatnya elemen kota tanpa mengubah fungsi kawasan perdesaan	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bandung tahun 2019 sebesar 0,7524 mengalami peningkatan sebesar 3,93% dibanding tahun 2018 dengan nilai 0,7228. Status IDM Kabupaten Bandung adalah Maju yaitu memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	
Terdiversifikasinya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga tercipta inovasi dari keterpaduan antara sektor pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa	Sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang sudah saling terpadu antara sektor pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa. Adanya pengembangan 1000 kampung telah meningkatkan diversifikasi atau keanekaragaman produk usaha atau komoditas yang berkembang sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tidak hanya bergantung pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi.
Berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan	Sudah terdapat peningkatan jaringan kerja sama usaha, peningkatan manajemen usaha serta perluasan akses permodalan bagi koperasi. Akan tetapi, produktivitas dan kelembagaan usaha koperasi masih rendah. Selain itu, masih banyak koperasi di sektor riil yang memiliki potensi namun belum terdata dan terbina.
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan perekonomian	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan perekonomian belum berjalan secara optimal.
Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai	Produktivitas budidaya pertanian masih belum optimal yang disebabkan oleh masih rendahnya penggunaan teknologi, masih rendahnya kapasitas petani, kurangnya permodalan, masih rendahnya kualitas produk pertanian, serta masih banyaknya penyakit



Arah Kebijakan untuk RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)	Gap
dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu	dan hama tanaman. Selain itu, masih terdapat praktik budidaya pertanian yang tidak ramah lingkungan.
Berkembangnya agroindustri yang berbasis sumber daya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian	Pengembangan agroindustri di Kabupaten Bandung sudah berjalan untuk komoditas – komoditas pangan seperti sayuran dan beras. Akan tetapi, kualitas produk yang dihasilkan dari agroindustri masih rendah sehingga belum mampu memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian.
IKM (industri kecil menengah) dan UKM (usaha mikro dan koperasi) yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM dan UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan	IKM dan UKM yang berkembang belum mampu mandiri dan berdaya saing bahkan belum mampu menstimulus penciptaan IKM dan UKM baru. Pengembangan potensi IKM dan UKM sebagai sektor utama penggerak ekonomi kerakyatan juga belum optimal. Hal ini dikarenakan pengembangan IKM dan UKM masih terkendala dengan kualitas SDM yang rendah serta peran sistem pendukung yang kurang optimal. Kualitas SDM yang rendah disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi. Sementara itu, kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses IKM dan UKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi, dan pasar.
Berkembangnya ekonomi kreatif yang difokuskan pada pengembangan seni pertunjukan dan aplikasi dan <i>game</i> yang ditandai dengan optimalnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif	Di antara 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif yang akan difokuskan pengembangannya, hanya sub sektor seni pertunjukan yang sudah berkembang di Kabupaten Bandung. Terdapat 41 lingkup seni yang aktif dan melaksanakan pertunjukan. Sementara itu, untuk sub sektor permainan interaktif yaitu aplikasi dan <i>game</i> masih belum dikembangkan. Dari sisi potensi, Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk mendorong kemitraan antara perguruan tinggi selaku akademisi yang fokus dalam pengembangan industri kreatif dengan pelaku usaha dalam bidang penelitian dan inovasi. Namun, Kabupaten Bandung belum memiliki sebuah wadah untuk membangun terciptanya proses transfer informasi dan ilmu pengetahuan yang berujung pada penciptaan inovasi, seperti Technopark.
Berkembangnya pangsa pasar produk - produk unggulan yang ditandai dengan terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan <i>e-commerce</i>	Saat ini sedang dilakukan kajian awal untuk menyusun peta jalan atau <i>road map</i> pengembangan ekonomi digital dan <i>e-commerce</i> di Kabupaten Bandung yang rencananya akan diperkuat melalui Peraturan Bupati.
Penguatan sektor pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha-wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (<i>community based tourism enterprise</i>)	Sudah terdapat objek – objek wisata yang dikelola oleh masyarakat namun belum teridentifikasi dan terdata dengan baik sehingga pengelolaan sektor pariwisata berbasis masyarakat belum optimal. Hal ini juga dikarenakan belum adanya perizinan untuk objek wisata yang dikelola oleh masyarakat. Di sisi lain, wirausaha berbasis masyarakat sudah banyak berkembang khususnya yang terdapat dalam kampung – kampung yang termasuk program 1000 Kampung. Namun, setiap sumber daya yang ada tersebut masih berdiri sendiri sehingga belum membentuk satu sistem wirausaha kepariwisataan berbasis masyarakat yang saling mendorong dan melengkapi.
Meningkatnya investasi yang sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan	Sudah ada peningkatan nilai investasi sejak tahun 2017 hingga 2020 namun tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Investasi yang masuk juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi perekonomian daerah karena hingga saat ini penggalan potensi investasi masih belum optimal

Sumber: Evaluasi RPJMD 2016-2021

Selain melihat bagaimana gap kondisi antara kondisi saat ini dengan RPJP Kabupaten Bandung 2005-2025, berikut merupakan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 yang dilakukan terdapat beberapa rekomendasi

yang disarankan dari capaian serta permasalahan yang telah terjadi selama rentang tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021.



Tabel 2-117
Permasalahan dan Rekomendasi Tiap Urusan RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016-2021

Urusan	Permasalahan	Rekomendasi
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) belum meratanya ketersediaan sarana pendidikan berkualitas, 2) belum meratanya ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, 3) masih meningkatnya angka putus sekolah, serta 4) belum optimalnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan anak usia dini dan kesetaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan fasilitas pendidikan dan sarana penunjang pendidikan (sarana pengajaran dan pembelajaran) antar satuan pendidikan dan antar wilayah • Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang berkualitas, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan pelayanan pendidikan • Pemberian pendampingan bagi siswa rawan putus sekolah • Pemberian insentif dan disinsentif bagi lembaga pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas dan mutu lembaga pendidikan • Mempersiapkan digitalisasi pendidikan
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum meratanya pemenuhan pelayanan kesehatan 2) Masih kurangnya sumber daya manusia kesehatan berkualitas 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, ODGJ, dan orang berisiko terinfeksi HIV dan Covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan mitra sistem rujukan online yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap • Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar minimal • Pemberian afirmasi pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk ditempatkan di wilayah dengan aksesibilitas rendah dan daerah yang kurang diminati • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sesuai standar termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan
Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) belum optimalnya pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, dan perpustakaan khusus, 2) belum terpenuhinya kebutuhan jumlah bahan pustaka yang berkualitas, serta 3) belum terintegrasinya <i>database</i> perpustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya literasi interaktif dengan menyediakan pojok baca di tempat umum / publik seperti di terminal, angkutan umum, taman, panti sosial, pabrik, dll. • Peningkatan konten daftar pustaka maupun jumlah koleksi judul buku khususnya untuk buku – buku digital atau <i>ebook</i> • Mendorong peran perangkat daerah dalam menyediakan pojok baca • Penguatan peran institusi sosial penggerak literasi dan inovasi



Urusan	Permasalahan	Rekomendasi
Olahraga dan Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga 2) Adanya ketidakserasian antara olahraga minat dan olahraga berprestasi 3) Belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka peluang kompetisi dan mendorong keikutsertaan atlet dalam kompetisi olahraga • Mengoptimalkan pemanfaatan SOR Jalak Harupat sebagai sumber pendapatan daerah • Memaksimalkan peran organisasi pemuda dalam membentuk pemuda berprestasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergitas antar pemangku kepentingan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya pengendalian angka kelahiran 2) Belum terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam pembangunan 3) Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender di setiap sektor pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan layanan yang ramah terhadap perempuan dan anak • Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak • Pengembangan sistem informasi evaluasi kinerja pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Penyusunan mekanisme standar untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal 2) Masih terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha 3) Belum optimalnya penempatan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal • Peningkatan kapasitas tenaga kerja terkait teknologi informasi dan komunikasi • Peningkatan program perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal • Pengoptimalan penyerapan tenaga kerja bagi lulusan pendidikan non formal maupun balai latihan kerja • Peningkatan akses masyarakat perdesaan terhadap pendidikan informal dan non formal untuk menciptakan lapangan kerja non formal di perdesaan • Penyesuaian lingkungan baru bagi transmigran
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya akurasi, transparansi, dan validasi data fakir miskin penerima bantuan sosial 2) Belum optimalnya pembinaan terkait keberlanjutan bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan ketersediaan data fakir miskin yang valid melalui konsep Satu Data Nasional • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran • Penyusunan instrumen pengendalian untuk menjamin keberlanjutan usaha ekonomi produktif • Pembinaan kewirausahaan terhadap penerima manfaat yang mendapatkan bantuan modal melalui bantuan usaha ekonomi produktif



Urusan	Permasalahan	Rekomendasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa2) Belum optimalnya peran BUMDES dalam mendorong perekonomian masyarakat desa3) Kurangnya ketersediaan data di tingkat desa	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten• Pemerataan penyediaan sarana prasarana dasar dan sarana prasarana perekonomian di seluruh wilayah perdesaan• Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kawasan perdesaan• Melakukan <i>assessment</i> kualitas kepala desa untuk menyusun prioritas pembinaan ke pemerintah desa• Penyusunan regulasi untuk mengarahkan penggunaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan desa• Penyusunan instrumen monitoring untuk memastikan efektivitas pendamping desa dalam memfasilitasi musyawarah desa• Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RPJM Desa terhadap RPJMD
Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya produktivitas budidaya pertanian2) Belum optimalnya pengelolaan produk hasil olahan pertanian3) Masih adanya praktik budidaya pertanian yang tidak ramah lingkungan4) Berkurangnya luasan lahan pertanian5) Berkurangnya sumber daya pekerja di sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan sebagai sumber energi baru terbarukan skala rumah tangga• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian• Peningkatan pemberdayaan kelembagaan serta organisasi petani• Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang pertanian
Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya aksesibilitas, akomodasi, dan amenitas yang mendukung pariwisata2) Belum optimalnya pembinaan pelaku seni3) Belum terintegrasinya pengembangan daya tarik wisata dan informasi kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan koridor pariwisata Kabupaten Bandung yang terintegrasi• Pengembangan paket – paket destinasi wisata dengan melibatkan mitra kerja (hotel, agen perjalanan, atau penyedia akomodasi lainnya)• Penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata termasuk pengembangan produk – produk unggulan kabupaten• Mendorong pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai daya tarik wisata



Urusan	Permasalahan	Rekomendasi
Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya pengembangan potensi UMKM sebagai sektor utama penggerak ekonomi kerakyatan2) Masih rendahnya produktivitas dan kelembagaan usaha koperasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar• Pengembangan sentra – sentra usaha produk unggulan kabupaten• Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi agar lebih modern dan profesional• Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah
Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1) Masih kurangnya daya saing industri kecil menengah2) Belum optimalnya pengembangan distribusi serta pemasaran produk dalam negeri khususnya produk lokal	<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan industri – industri potensial bagi pengembangan daya saing produk unggulan lokal• Akselerasi industrialisasi terintegrasi hulu – hilir berbasis pertanian dan non pertanian• Pengembangan kawasan industri terpadu
Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya perencanaan pengembangan investasi2) Perlu ditingkatnya pengendalian perizinan di tingkat perangkat daerah maupun kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil• Pengembangan investasi inklusif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat• Penetapan kebijakan zonasi dan pengaturan wilayah investasi berdasarkan karakteristik dan jenis investasi
Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1) Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan2) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)3) Belum optimalnya daya saing sektor perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan jaringan distribusi pangan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi• Penyediaan sistem distribusi pangan B2SA bagi masyarakat miskin dan rentan• Pemberian insentif bagi petani yang menanam komoditas pangan alternatif• Pemberdayaan usaha hasil pertanian komoditas pangan alternatif untuk mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal• Percepatan pemenuhan pembangunan jaringan irigasi, jalan, sarana air bersih, dan sarana sanitasi untuk desa – desa rawan pangan prioritas• Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi, mutu, dan nilai tambah produk perikanan



Urusan	Permasalahan	Rekomendasi
Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum2) Masih terbatasnya kapasitas sarana prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem angkutan masal untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan mengatasi kemacetan• Peningkatan kapasitas sistem sarana dan prasarana transportasi darat dan perkeretaapian• Penyederhanaan izin trayek angkutan umum guna menjangkau seluruh wilayah kabupaten• Pengembangan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) pada kawasan – kawasan strategis dan pusat pertumbuhan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya tingkat pelayanan jalan Kabupaten Bandung2) Belum optimalnya pengendalian banjir3) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian jaringan irigasi4) Pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi masih kurang	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan aksesibilitas wilayah terisolasi guna memperlancar distribusi arus barang dan jasa serta mobilitas penduduk• Pengembangan sistem pengelolaan daerah irigasi berbasis teknologi tepat guna• Pemenuhan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian (pertanian, perindustrian, pariwisata, dll)• Pengembangan sistem pengendali banjir terintegrasi• Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis dan kawasan pengembangan lainnya
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemenuhan ketersediaan sarana sanitasi dan air bersih layak dan aman bagi seluruh masyarakat2) Belum terintegrasinya penanganan permasalahan kawasan kumuh3) Masih rendahnya penataan ruang terbuka hijau	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan penyediaan air baku yang aman dan berkualitas dari sumber air hingga konsumen• Pengembangan jaringan pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah skala kawasan dan perkotaan• Peningkatan tata kelola kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi• Penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi
Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana2) Belum idealnya kapasitas layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan dan sistem peringatan dini bencana berdasarkan karakteristik wilayah dan jenis bencana• Peningkatan infrastruktur tangguh bencana serta pemenuhan sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana• Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kebencanaan dan layanan kebakaran



Urusan	Permasalahan	Rekomendasi
Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih tingginya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan 2) Kurangnya pelestarian dan perlindungan terhadap daerah yang berfungsi lindung dan penyangga 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan – kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air • Peningkatan rehabilitasi dan konservasi tanah melalui kegiatan vegetatif maupun sipil teknis • Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi, redeliniasi, reboisasi lahan – lahan kritis • Peningkatan kemampuan distribusi rantai pasok bank sampah
Komunikasi dan Informatika dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum baiknya sistem integrasi data dan informasi • Belum baiknya pengawasan berjenjang di masing – masing OPD; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola komunikasi dan kualitas informasi publik • Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika • Peningkatan <i>mindset</i> kerja inovatif ASN • Penguatan pengawasan melalui WBS

Sumber: Evaluasi RPJMD Kab. Bandung 2016-2021

2.7 Evaluasi Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan SDGs/TPB melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran dan indikator SDGs/TPB nasional periode tahun 2017-2019 yang selaras dengan SDGs/TPB. Sasaran dan indikator SDGs/TPB nasional tersebut digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi capaian SDGs/TPB. Perpres 59/2017 mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran SDGs/TPB disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional SDGs/TPB, dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Gambar 2-79
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Di dalam Permen tersebut ditetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs/TPB tahun 2017-2019, serta pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi SDGs/TPB, yang penyusunannya bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dalam menyusun dokumen Renaksi SDGs/TPB yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Pada tahun 2020, pemerintah pusat melalui Bappenas menerbitkan Edisi Kedua dari pedoman Penyusunan Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs/TPB yang merespons perubahan yang terjadi dalam RPJMN 2020-2024 dan tantangan pandemi COVID-19. Pedoman ini juga dilengkapi dengan 4 (empat) buku metadata indikator SDGs/TPB Indonesia edisi II yang terdiri atas metadata pilar pembangunan sosial,

ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Metadata indikator ini merevisi jumlah indikator nasional yang semula sebanyak 319 indikator menjadi 289 indikator. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

2.7.1 Kerangka Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung

Dalam melakukan evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh sasaran/indikator, melainkan merumuskan indikator prioritas yang disesuaikan dengan wewenang dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung. Indikator



prioritas dirumuskan dengan pertimbangan: Pada tingkat nasional, selain merevisi jumlah indikator dari 319 menjadi 289, metadata edisi II juga merevisi substansi indikator, yang mana terdapat indikator yang dihapus, diperbaiki penjelasannya, atau digabung dari metadata edisi I. Sedangkan pada tingkat regional Provinsi Jawa Barat, melalui Pergub Jabar Nomor 18 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, pemprov Jabar menetapkan 147 indikator prioritas. Meski demikian, 147 indikator ini masih berpedoman pada metadata edisi I, sehingga perlu dilakukan penyesuaian substansi indikator. Hasilnya, dari 147 indikator, dengan pembaruan dari Metadata Indikator Edisi II,

terdapat 47 indikator yang tetap, 23 yang diperbaiki isinya, 19 yang diperbaiki isinya dan diganti nomornya, 17 yang digabung menjadi 8 indikator, serta 40 indikator yang dihapus pada metadata II; Total terdapat 97 indikator irisan antara Pergub Jabar 18/2018 dengan metadata II. Dari 97 indikator irisan tersebut, dilakukan tinjauan mengenai keterangan disagregasi pada metadata II yang menjelaskan mengenai wilayah administrasi, hasilnya; 44 merupakan wilayah administrasi kabupaten/kota, 38 pada tingkat provinsi, dan 16 nasional. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung merumuskan 44 indikator SDGs prioritas.

Tabel 2-118
Indikator Prioritas dalam Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator Prioritas	Jumlah
Pilar Sosial			17
1	Tanpa Kemiskinan	1.2.1*; 1.3.1.(a); 1.3.1.(b); 1.4.1*	4
2	Tanpa Kelaparan	2.4.1.(a)	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1.2*; 3.3.3*; 3.4.1.(a); 3.4.1.(b); 3.4.1.(c); 3.8.2.(a); 3.a.1*	7
4	Pendidikan Berkualitas	4.3.1.(a); 4.5.1*; 4.6.1.(a)	3
5	Kesetaraan Gender	5.5.1*; 5.5.2*	2
Pilar Ekonomi			13
7	Energi Bersih dan Terjangkau	7.1.1*; 7.1.2.(a); 7.1.2.(b)	3
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1*; 8.1.1.(a)	2
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.2.1.(a)	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	10.1.1.(a); 10.1.1.(b); 10.1.1.(c); 10.3.1.(b) 10.4.1.(b)	5
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.1*; 17.1.1.(a)	2
Pilar Lingkungan			7
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.1.1*; 6.2.1	2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11.5.1*	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	12.4.2*; 12.5.1.(a); 12.8.1.(b)	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	13.1.1*	1
14	Ekosistem Lautan	-	-
15	Ekosistem Daratan	-	0
Pilar Hukum dan Tata Kelola			7
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(b); 16.6.1.(a); 16.6.1.(b); 16.6.1.(c); 16.7.1.(a); 16.7.1.(b); 16.9.1.(b)	7
Total			44

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

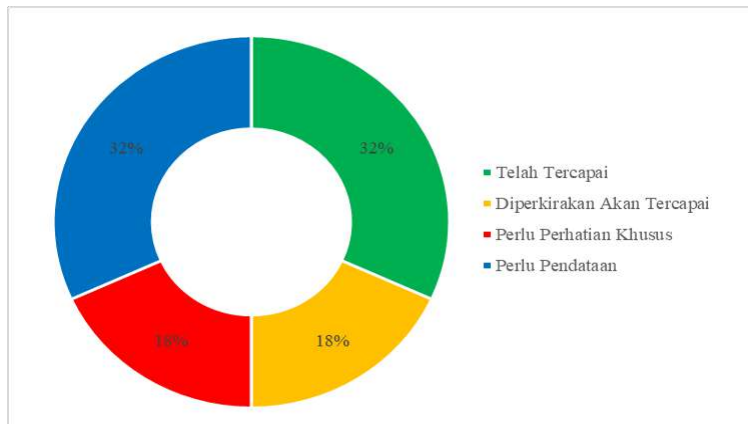
Untuk target capaian, pada tingkat global, target capaian SDGs hanya ditetapkan pada akhir tahun rencana yaitu tahun 2030, serta beberapa ada yang berakhir pada tahun 2020 dan 2025. Pada tingkat nasional, Perpres 59/2017 menjelaskan target akhir tahun 2019, Permen PPN 7/2018 (RAN TPB) menetapkan target dari tahun 2017-2019, dan roadmap hanya menguraikan target tahunan hingga tahun 2030 untuk beberapa indikator saja. Sedangkan RAN TPB baru yang merespons metadata II dan RPJMN 2020-2024, pada saat evaluasi ini disusun, masih dalam proses penyusunan. Pada tingkat regional, Pemprov Jabar melalui Pergub Jabar 18/2018 (RAD TPB) menetapkan target tahunan dari 2018-2023. Meski demikian, terbitnya metadata edisi II merevisi substansi indikator sehingga beberapa target capaian yang telah ditetapkan setelah tahun 2019 tidak sesuai dengan perhitungan indikator yang baru. Pada tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Bandung hingga saat ini belum memiliki RAD TPB tingkat Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi belum memiliki target capaian SDGs yang disepakati dan memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pada kerangka evaluasi ini, target capaian evaluasi SDGs berpedoman pada target nasional hingga tahun 2019, dan target Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2020.

2.7.2 Hasil Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung

Penjelasan mengenai hasil evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu tinjauan umum capaian SDGs Kabupaten Bandung, serta capaian SDGs Kabupaten Bandung berdasarkan 4 (empat) pilar SDGs.

2.7.2.1 Tinjauan Umum Capaian SDGs Kabupaten Bandung

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian mengenai Kerangka Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Bandung pada bagian sebelumnya, terdapat 44 indikator SDGs prioritas Kabupaten Bandung. Penilaian dilakukan dengan membandingkan capaian Kabupaten Bandung dengan target nasional dan target provinsi Jawa Barat. Kategori hasil capaian dibagi menjadi 4 yaitu; telah tercapai, diprediksi akan tercapai setidaknya hingga tahun 2023, perlu perhatian khusus, serta perlu pendataan. Hasil evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung tahun 2020 ialah sebagai berikut.



Gambar 2-80
Tinjauan Umum Hasil Capaian SDGs Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Berdasarkan hasil di atas, evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 50% indikator berstatus telah dan diprediksi akan tercapai, 18% merupakan indikator yang perlu perhatian khusus, serta 32% indikator perlu pendataan lebih lengkap. Meski demikian, evaluasi pada tahun 2020 memiliki kondisi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19, yang berdampak terutama pada kinerja di sektor sosial dan ekonomi. Akibatnya beberapa indikator yang pada tahun 2019 telah tercapai, memiliki capaian yang berada di bawah target pada tahun 2020. Dengan demikian, penting untuk memerhatikan upaya penanggulangan COVID-19 untuk memenuhi target capaian di masa depan.

Dari total indikator yang telah dan diprediksi akan tercapai, sebagian besar merupakan indikator yang berkaitan dengan kinerja pembangunan sosial meliputi tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, pembangunan ekonomi meliputi energi bersih dan terjangkau, serta pembangunan hukum dan tata kelola. Untuk indikator yang perlu perhatian khusus sebagian besar berkaitan dengan pencapaian kehidupan sehat dan sejahtera serta pendidikan berkualitas. Sedangkan untuk indikator yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, sebagian besar masih memerlukan pendataan lebih lanjut.

2.7.2.2 Capaian SDGs Kabupaten Bandung Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan

Terdapat 4 (empat) pilar dalam SDGs yaitu Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola, capaian Kabupaten Bandung berdasarkan keempat pilar tersebut antara lain:

A. Pilar Pembangunan Sosial

Dari 5 tujuan yang menjadi bagian dari pilar pembangunan sosial, hasil capaian tahun 2020 ialah: Pencapaian tujuan tanpa kemiskinan seperti persentase penduduk miskin, serta akses penduduk miskin terhadap jaminan kesehatan dan

ketenagakerjaan secara umum telah tercapai, sedangkan untuk akses terhadap pelayanan dasar masih memerlukan pendataan untuk kedalaman indeks mobilitas dasar pedesaan dan perkotaan. Untuk pencapaian tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan, sudah tercapai melalui proporsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang relatif tinggi terhadap total lahan pertanian pangan di Kabupaten Bandung. Untuk pencapaian tujuan ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, pelayanan persalinan dan eliminasi malaria telah tercapai, tetapi untuk prevalensi darah tinggi dan merokok serta jaminan kesehatan terhadap seluruh penduduk masih memerlukan perhatian khusus, sedangkan prevalensi obesitas dan merokok di usia muda masih perlu pendataan. Untuk tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas, angka melek aksara Kabupaten Bandung telah mencapai target, tetapi untuk angka partisipasi kotor perguruan tinggi masih relatif rendah, sedangkan untuk rasio angka partisipasi murni sekolah dasar dan angka partisipasi kotor sekolah menengah masih memerlukan pendataan untuk kedalaman perempuan dan laki-laki, pedesaan dan perkotaan, kuintil terendah dan kuintil tertinggi, serta disabilitas dan tanpa disabilitas. Untuk pencapaian tujuan kelima kesetaraan gender, perlu perhatian khusus pada perempuan di DPRD dan pemerintahan daerah, serta perlu pendataan pada perempuan di posisi managerial pada kedalaman manajer administrasi dan komersial, manajer produksi dan pelayanan khusus, dan manajer jasa perhotelan, perdagangan, dan jasa lainnya.

B. Pilar Ekonomi

Dari 5 tujuan yang menjadi bagian dari pilar pembangunan ekonomi, hasil capaian tahun 2020 ialah: Pencapaian tujuan energi bersih dan terjangkau, telah tercapai melalui rasio elektrifikasi, sedangkan untuk penggunaan gas rumah tangga masih memerlukan pendataan. Untuk pencapaian tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, indikator pertumbuhan PDRB per kapita diperkirakan akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan, tetapi perhatian khusus perlu diberikan kepada nilai PDRB



per kapita yang masih berada di bawah target. Untuk pencapaian tujuan industri, inovasi dan infrastruktur, indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur juga perlu perhatian khusus. Untuk pencapaian tujuan berkurangnya kesenjangan, Kabupaten Bandung sudah tidak memiliki desa tertinggal dan cakupan jaminan BPJS ketenagakerjaan juga sudah mencapai target, dalam beberapa tahun ke depan persentase penduduk miskin dan persentase desa mandiri diharapkan akan mencapai target, sedangkan untuk penanganan pengaduan pelanggaran HAM masih memerlukan pendataan. Untuk pencapaian tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan, indikator total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya diperkirakan dapat mencapai target, tetapi untuk indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDRB masih perlu perhatian khusus.

C. Pilar Lingkungan

Dari 4 tujuan yang menjadi bagian dari pilar pembangunan pilar lingkungan, hasil capaian tahun 2020 ialah: Untuk pencapaian tujuan air bersih dan sanitasi layak, indikator persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman telah mencapai target, sedangkan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, masih perlu pendataan termasuk rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal dan tidak. Untuk pencapaian tujuan kota dan permukiman dan layak, indikator yang berkaitan masih perlu pendataan mendalam yang membagi korban bencana menjadi korban jiwa, korban hilang, korban terluka dan korban mengungsi. Untuk pencapaian tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, secara umum masih memerlukan pendataan berkaitan dengan timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan energi dan migas, serta prasarana jasa, selain itu pendataan juga diperlukan untuk jumlah timbulan sampah yang di-daur-ulang serta fasilitas publik yang

menerapkan standar pelayanan minimal dan teregister (seperti pada pasar tradisional, pasar modern / supermarket, taman kota, tempat ibadah, *rest area*, sekolah, rumah sakit, dan lainnya). Untuk pencapaian tujuan penanganan perubahan iklim, indikator yang digunakan adalah jumlah korban bencana, dengan status capaian masih perlu pendataan untuk korban meninggal, hilang, luka, dan mengungsi akibat bencana.

D. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Terdapat 1 tujuan pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: Indikator yang telah tercapai untuk tujuan ini adalah persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP dengan target WTP, persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B, serta persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun yang telah mencapai angka target. Untuk indikator Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B diperkirakan dapat mencapai target yaitu SAKIP A pada tahun mendatang. Sedangkan indikator yang perlu perhatian khusus adalah Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Selain itu, terdapat juga indikator yang memerlukan pendataan yaitu persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.

2.7.3 Tantangan Pelaksanaan SDGs Kabupaten Bandung

Berdasarkan tinjauan mengenai capaian SDGs di Kabupaten Bandung, maka dapat dirumuskan tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung berkaitan dengan pelaksanaan SDGs secara umum di masa depan, antara lain:



- Mempertahankan kinerja wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan kesehatan dan ibu melahirkan yang dilanjutkan dengan pencatatan akta kelahiran, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, meningkatkan minat baca, kestabilan aliran listrik ke rumah, serta kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin, cakupan perlindungan sosial, keinginan masyarakat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk menciptakan SDM yang kompetitif, strategi perekonomian yang berdayasaing dan inovatif, program perekonomian yang berbasis desa, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik;
- Memberikan perhatian khusus pada pengembangan peran perempuan pada pos pengambilan keputusan, mengakhiri diskriminasi perempuan, perwujudan strategi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, akses industri terhadap layanan jasa keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan retrofit industri, serta pengolahan limbah industri dan sampah yang didaur ulang;
- Pendataan akses rumah tangga terhadap fasilitas pelayanan dasar dan sanitasi yang layak, kesehatan masyarakat terutama merokok dan obesitas, partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan menengah, penggunaan gas, pengaduan pelanggaran HAM, jumlah korban meninggal hilang terluka dan mengungsi akibat bencana, produksi limbah sampah dan jenis penanganannya, fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat teregister, bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi yang diberikan kepada orang miskin.

2.8 Evaluasi Penerapan SPM di Kabupaten Bandung

Semenjak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemaknaan Standar Pelayanan Minimal mengalami perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penetapan SPM. Pasal 18 UU 23/2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, Pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, serta (6) sosial.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU 23/2014 tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan SPM lalu ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing – masing yang ditetapkan oleh Kementerian terkait. Standar teknis tersebut dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan Menteri teknis lainnya



kemudian menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar. Berikut adalah peraturan – peraturan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan SPM:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Mengacu pada peraturan – peraturan di atas, penerapan SPM ditujukan untuk mencapai target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Pemenuhan pelayanan dasar tersebut digunakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi terhadap pencapaian SPM ini kemudian digunakan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah, pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berikut adalah rekapitulasi hasil capaian penerapan SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Tabel 2-119
Rekapitulasi Capaian SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
		d	e	
a	c			f
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun	
		502.617	622.887	80,69%
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	
		16.127	33.121	48,69%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
		75.322	133.993	56,21%
2	Kesehatan			
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil	
		76.833	79.131	97,10%
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin	
		70.120	75.534	92,83%
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir	
		66.856	71.937	92,94%
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah balita	
		321.541	356.541	90,18%
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar	
		72.709	170.270	42,70%
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif (15 - 59 tahun) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia produktif (15 - 59 tahun)	
		418.061	2.566.844	16,29%
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas)	
		110.237	327.577	33,65%
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara penderita hipertensi	
		111.504	1.306.543	8,53%
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus	
		32.847	321.846	10,21%
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang terlayani kesehatan	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	
		2.062	5.325	38,72%
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penderita tuberkulosis	
		11.825	16.479	71,76%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara yang beresiko terinfeksi HIV	
		52.271	87.240	59,92%
3	Pekerjaan Umum			
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah rumah tangga	
		2.912.065	2.868.804	101,51%
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga	
		3.042.919	2.730.440	111,44%
4	Perumahan Rakyat			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah korban bencana	
		7	7	100,00%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah yang terkena relokasi	
		Tidak Dihitung	Tidak Dihitung	n/a
5	Tantribumlinmas			
5.1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah korban terdampak bencana	
		56.094	56.094	100,00%
5.2	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.	Jumlah korban terdampak bencana	
		56.094	56.094	100,00%
5.3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga yang dievakuasi	
		250.248	250.248	100,00%
5.4	pelayanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran	jumlah kasus yang ditangani dengan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran	jumlah kasus	
		282	232	121,55%



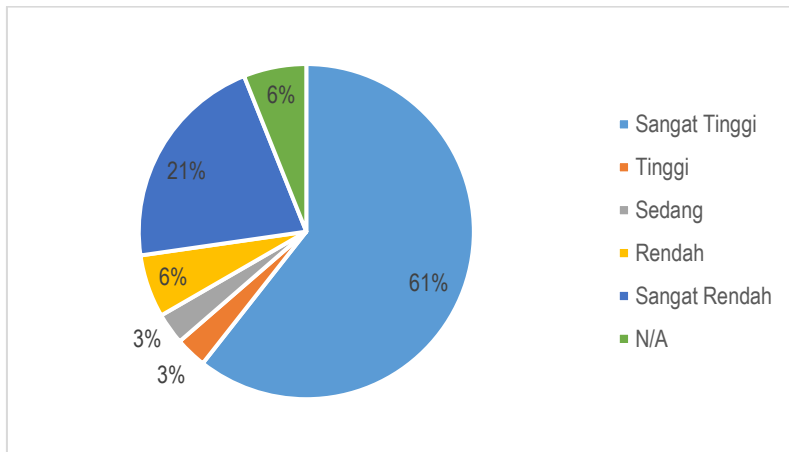
No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
5.5	pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	jumlah kasus yang ditangani dengan pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	jumlah kasus	
		282	282	100,00%
5.6	pelayanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah kasus yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi	
		370	370	100,00%
5.7	pelayanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran	Jumlah desa yang mendapat pelayanan pemberdayaan	Jumlah desa yang ditargetkan mendapat pelayanan pemberdayaan	
		20	20	100,00%
5.8	pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	jumlah pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran (unit)	jumlah pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran yang ditargetkan (unit)	
		150	150	100,00%
5.9	pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	jumlah pelayanan yang terkena dampak	jumlah pelayanan yang ditargetkan terkena dampak	
		0	0	100,00%
6	Sosial			
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		150	150	100,00%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		211	211	100,00%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		145	145	100,00%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial	
		-	-	-
6.4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah warga negara korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Persentase (d/e)		%
		5.328	5.328	100,00%

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2021

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian pemenuhan SPM di Kabupaten Bandung pada tahun 2020, didapatkan bahwa 61% jenis pelayanan dasar sudah memiliki predikat capaian Sangat Tinggi yaitu dengan tingkat capaian di atas 90%. Sebanyak 3% jenis pelayanan dasar memiliki predikat Tinggi yaitu dengan tingkat capaian antara 75% sampai 90%. Sementara itu, 6% jenis pelayanan dasar memiliki predikat Rendah dan 21% jenis pelayanan dasar memiliki predikat Sangat Rendah. Terdapat 2 jenis pelayanan

dasar yang tidak dihitung sehingga datanya N/A. Jenis pelayanan yang tidak dihitung tersebut adalah jenis pelayanan “Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti” dan “Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten” dikarenakan tidak ada pada program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung yang tertera pada Renstra dan Renja.



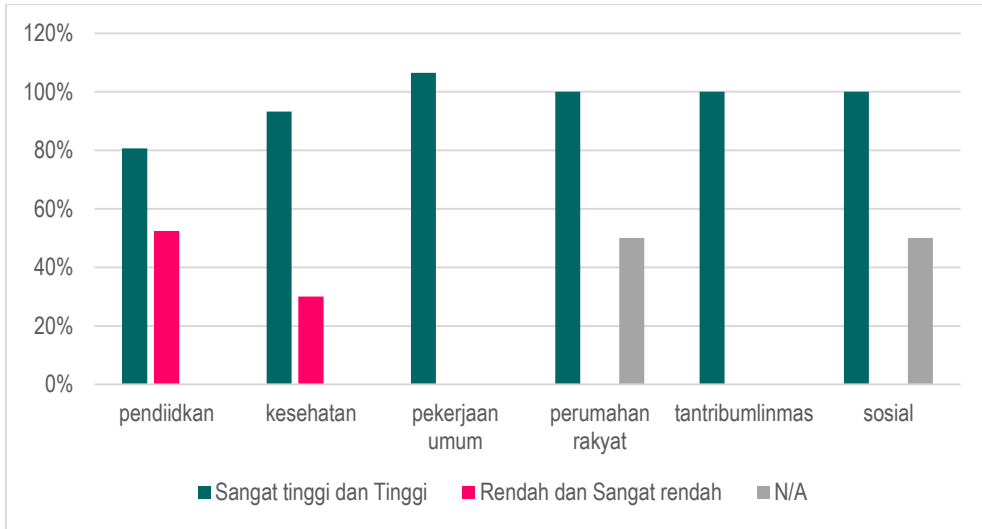
Gambar 2-81

Predikat Capaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2020

Sumber: Data diolah dari Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2021

Apabila diidentifikasi berdasarkan jenis urusannya, capaian SPM bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan tantribumlinmas dikatakan sudah baik karena setiap jenis pelayanan dasar yang ditargetkan sudah memiliki capaian dengan predikat Sangat Tinggi dan Tinggi. Artinya, sebanyak lebih dari 75% penerima pelayanan sudah memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan dasar secara minimal. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun terdapat

jenis pelayanan dasar dengan predikat Rendah dan Sangat Rendah, namun capaian pelayanan dasar dengan predikat Sangat Tinggi dan Tinggi masih lebih besar. Sebagian besar jenis pelayanan di bidang pendidikan baru memenuhi target capaian kurang dari 65%. Sebanyak lebih dari 35% penerima layanan belum memperoleh haknya untuk mendapatnya beberapa jenis pelayanan dasar secara minimal di bidang pendidikan.



Gambar 2-82
Predikat Capaian SPM Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis Urusan Tahun 2020

Sumber: Data diolah dari Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2021

Jenis pelayanan dasar yang masih harus ditingkatkan capaiannya karena memiliki predikat Rendah dan Sangat Rendah adalah sebagai berikut:

Tabel 2-120
Predikat Capaian SPM Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis Urusan Tahun 2020 dengan Predikat Rendah dan Sangat Rendah

SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian	Predikat
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	56,21%	Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus)	59,92%	Rendah
Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	48,69%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	42,70%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	16,29%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	33,65%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	8,53%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	10,21%	Sangat Rendah
Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	38,72%	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah dari Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2021

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (*money follow programs*). Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerangka pendanaan pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis terhadap potensi, kapasitas dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bandung dalam mendanai pembangunan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pola/*trend* pengelolaan keuangan, digunakan analisis *timeseries* terhadap data lima tahun terakhir. Adapun yang dimaksud dengan analisis rencana kerangka pendanaan pembangunan yaitu prakiraan kemampuan pendanaan daerah berdasarkan hasil proyeksi gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2021)

Kinerja keuangan Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditinjau melalui kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

3.1.1 Kinerja pelaksanaan APBD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi komponen pendapatan, belanja serta pembiayaan. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Secara detail, kinerja pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah pendapatan yang terdiri atas tiga hal yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Definisi dari masing-masing pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, yaitu hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka

membayai urusan rumah tangga daerahnya. Adapun komponen pendapatan asli daerah meliputi:

a. Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bandung meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bandung meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUKD, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar dan Banten.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.

2. Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan daerah yang bertujuan untuk menutup celah fiskal sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Pendapatan Transfer meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- i. Dana perimbangan
- ii. Dana insentif Daerah
- iii. Dana otonomi khusus
- iv. Dana keistimewaan
- v. Dana desa

b. Transfer antar-daerah

- i. Pendapatan bagi hasil
- ii. Bantuan keuangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang meliputi:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021-2026 ditampilkan pada **Tabel 3-1**.



Tabel 3-1

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	Pendapatan Asli Daerah	856.514.244.254,00	936.905.730.680,00	927.543.321.132,00	1.025.354.252.358,00	1.078.798.409.190,99	6,04%
4.1.1	Pajak Daerah	380.710.099.448,00	464.592.767.806,00	468.478.520.169,00	525.068.992.918,00	498.815.169.939,00	7,49%
4.1.2	Retribusi Daerah	26.937.588.476,00	21.833.385.145,00	26.706.610.670,00	25.837.878.597,00	21.309.353.803,00	-4,35%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.792.013.347,00	66.015.053.552,00	67.428.288.786,00	70.065.467.253,00	74.021.306.917,00	4,21%
4.1.4	Lain-Lain PAD Sah	386.074.542.983,00	384.464.524.177,00	364.929.901.507,00	404.381.913.590,00	484.652.578.531,99	6,29%
4.2	Pendapatan Transfer	3.751.155.128.639,00	3.541.990.387.713,00	3.666.263.710.871,00	3.996.968.985.843,00	3.574.982.661.411,00	-0,90%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.992.226.054.296,00	3.009.662.895.582,00	3.137.666.226.435,00	3.374.888.933.422,00	2.957.339.226.626,00	0,01%
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	122.598.021.996,00	132.414.794.380,00	144.933.549.485,00	151.333.724.285,00	137.750.861.223,00	3,23%
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	127.864.485.604,00	176.808.511.261,00	195.510.310.644,00	363.282.842.422,00	173.845.604.745,00	20,63%
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	2.096.677.101.000,00	2.059.845.225.000,00	2.060.202.697.000,00	2.149.817.107.000,00	1.967.815.290.000,00	-1,46%
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Fisik	645.086.445.696,00	93.254.506.200,00	155.348.717.215,00	149.233.490.259,00	86.346.101.765,00	-16,26%
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	547.339.858.741,00	581.670.952.091,00	561.221.769.456,00	591.581.368.893,00	2,72%
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	195.728.743.000,00	-	34.250.000.000,00	11.571.605.000,00	83.017.987.000,00	156,24%
4.2.2.1	Dana Penyesuaian	195.728.743.000,00	-	34.250.000.000,00	11.571.605.000,00	83.017.987.000,00	156,24%
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	381.354.984.993,00	413.156.535.131,00	464.457.469.495,00	461.292.696.640,00	452.165.021.128,00	4,52%
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	381.354.984.993,00	413.156.535.131,00	464.457.469.495,00	461.292.696.640,00	452.165.021.128,00	4,52%
4.2.4	Bantuan Keuangan	181.845.346.350,00	119.170.957.000,00	29.890.014.941,00	149.215.750.781,00	82.460.426.657,00	61,27%
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	181.845.346.350,00	119.170.957.000,00	29.890.014.941,00	149.215.750.781,00	82.460.426.657,00	61,27%
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	602.364.179.262,00	666.167.779.366,00	707.861.860.902,00	751.654.370.862,00	7,68%
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	352.949.930.262,00	349.781.200.000,00	356.279.720.000,00	407.732.170.000,00	5,13%
4.3.2	Pendapatan Lainnya	-	-	56.918.159.366,00	-	-	0,00%
4.3.7	Pendapatan Dana Desa	-	249.414.249.000,00	259.468.420.000,00	311.070.693.000,00	318.473.742.000,00	8,77%
4.3.9	Bonus Produksi Panas Bumi	-	-	-	40.511.447.902,00	25.448.458.862,00	-37,18%
Jumlah Pendapatan		4.607.669.372.893,00	5.081.260.297.655,00	5.259.974.811.369,00	5.730.185.099.103,00	5.405.435.441.463,99	4,27%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2016-2020

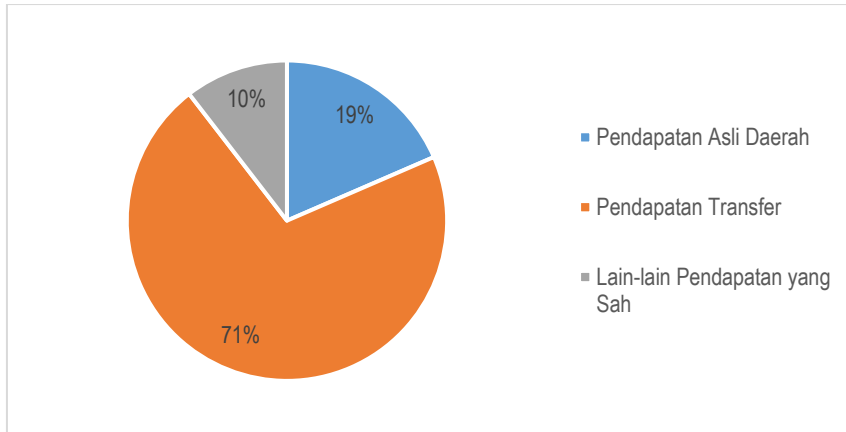
Berdasarkan **Tabel 3-1** diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Namun jika dilihat pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 4,27%. Salah satu komponen pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah memiliki rata-rata per tahun yang cenderung meningkat dari periode Tahun 2016-2020, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,04% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 7,68% untuk Lain-lain pendapatan yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, daerah serta bantuan keuangan merupakan komponen menyumbang bagian paling besar kepada pendapatan daerah yaitu sebesar 71% dengan pertumbuhan rata-ratanya adalah -0,90% Persentase pertumbuhan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah berbeda-beda. Rata-rata pertumbuhan terbesar terdapat pada komponen pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 7,49%.

Sumber pendapatan Kabupaten Bandung paling besar berasal dari pendapatan Pendapatan Transfer atau yang dulu biasa disebut Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Pendapatan Dana Perimbangan dari tahun 2016-2020 Kabupaten Bandung setiap tahun mengalami naik turun tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar -0,90%. Pendapatan Dana Perimbangan tertinggi berasal dari komponen Dana Alokasi Umum sebesar 55,04% dari keseluruhan total Pendapatan Transfer.

Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,68%. Pendapatan lain-lain yang sah tertinggi ada pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 751.654.370.862,00. Sementara jumlah pendapatan dari Dana Penyesuaian meningkat sebesar 156,24% pada tahun 2020. Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Dilihat dari **Gambar 3-1** tentang Rata-rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 terlihat bahwa proporsi Pendapatan Transfer memberikan porsi paling besar yaitu sebesar 71% untuk sumber pendapatan di Kabupaten Bandung. Pada Pendapatan Transfer, komponen yang menyumbang pendapatan Kabupaten Bandung terbesar adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan total pendapatan selama periode 2016-2020 adalah sebesar Rp15.471.783.336.361,00. Selain itu untuk Lain-lain pendapatan yang Sah menyumbang sekitar 8,77% untuk total keseluruhan pendapatan dengan komponen Pendapatan Dana Desa yang menyumbang proporsi terbesar pada kategori ini.

Selain itu untuk Pendapatan Asli Daerah menyumbang pendapatan kepada Kabupaten Bandung sebesar 19% dengan komponen pajak daerah yang menyumbang proporsi terbesar pada kategori ini. Pajak daerah yang terkumpul sepanjang 1 tahun 2016-2021 adalah sebesar Rp2.337.665.550.280,00.



Gambar 3-1
Rata-rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2016-2020

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terbagi menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian dari belanja operasi adalah:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial.

1) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



Tabel 3-2

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA						
5.1	Belanja Operasi	3.583.511.030.560,99	3.845.042.387.508,61	3.741.710.298.024,11	4.055.761.572.750,96	3.839.635.231.125,00	1,92%
5.1.1	Belanja Pegawai	2.177.921.989.998,00	2.119.011.282.357,00	2.040.022.998.438,41	2.415.428.151.539,00	2.306.122.262.836,00	1,86%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.318.658.566.812,99	1.630.141.674.151,61	1.622.290.649.585,70	1.505.837.343.953,96	1.298.577.870.478,00	0,55%
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.4	Belanja Hibah	86.120.723.750,00	95.636.931.000,00	78.820.150.000,00	130.680.177.258,00	234.653.097.811,00	34,71%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	809.750.000,00	252.500.000,00	576.500.000,00	3.815.900.000,00	282.000.000,00	132,20%
5.2	Belanja Modal	569.467.889.003,50	713.093.010.271,89	628.497.495.404,59	1.088.249.765.480,00	732.513.027.371,00	13,45%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18.368.478.929,00	51.442.612.163,00	39.813.701.975,00	35.044.540.185,00	14.740.207.100,00	21,88%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.713.802.413,50	141.873.440.751,72	153.387.849.592,00	125.706.783.367,00	140.814.210.726,00	-2,55%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.322.953.262,00	129.756.120.493,17	103.619.745.146,59	304.004.746.489,00	356.934.337.443,00	45,46%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.286.954.704,00	314.449.361.710,00	244.772.333.752,00	535.828.609.530,00	180.154.984.511,00	16,15%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.775.699.695,00	75.571.475.154,00	86.903.864.939,00	87.665.085.909,00	39.869.287.591,00	113,22%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.013.637.734,00	1.997.578.200,00	74.310.500,00	9.010.995.300,00	250.013.049.867,00	3638,54%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.013.637.734,00	1.997.578.200,00	74.310.500,00	9.010.995.300,00	250.013.049.867,00	3638,54%
5.4	Belanja Transfer	483.251.737.484,00	554.797.924.500,00	541.643.716.900,00	629.071.261.000,00	637.060.579.965,00	7,46%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	267.228.456.500,00	45.076.932.000,00	36.959.841.000,00	43.925.247.000,00	53.501.143.550,00	-15,12%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	216.023.280.984,00	509.720.992.500,00	504.683.875.900,00	585.146.014.000,00	583.559.436.415,00	37,66%
Total		4.640.244.294.782,49	5.114.930.900.480,50	4.911.925.820.828,70	5.782.093.594.530,96	5.459.221.888.328,00	4,60%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2016-2020

Gambaran belanja daerah berdasarkan **Tabel 3-2** yaitu periode tahun 2016-2020 bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,60%. Belanja Operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,92%. Komponen Belanja Operasi terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Pegawai, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,86%. Dari sisi Belanja Modal diperoleh bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 13,45%. Komponen Belanja Modal yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yaitu sebesar 113,22% selama periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, walaupun menurun kembali di tahun 2020. Sedangkan dari sisi Belanja Tidak Terduga diperoleh bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018-2020 yaitu rata-rata sebesar 3638,54%. Dari sisi Belanja Transfer mengalami rata-rata kenaikan sebesar 7,46%.

rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Bandung.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada **Tabel 3-3** menginformasikan mengenai



Tabel 3-3

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	526.080.122.611	488.060.279.022	466.235.385.718	709.644.093.976	636.924.698.548	7,57%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	525.908.303.877	488.056.779.022	466.235.385.718	709.425.571.231	636.923.198.548	7,57%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	48.425.168	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	123.393.566	3.500.000	-	218.522.745	1.500.000	-98,24%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.500.000.000	10.500.000.000	54.578.530.986	20.812.400.000	8.500.000.000	97,42%
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	10.000.000.000	53.500.000.000	20.812.400.000	8.500.000.000	103,69%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000	500.000.000	1.078.530.986	-	-	57,85%
	Pembiayaan Netto	520.580.122.611	477.560.279.022	411.656.854.732	688.831.693.976	628.424.698.548	9,12%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	488.005.200.722	443.889.676.197	759.705.845.272	636.923.198.548	574.638.251.684	9,04%

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung, 2016-2020

3.1.2 Neraca Pembiayaan

Neraca pembiayaan daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu daerah terkait pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bandung serta kemampuan aset daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan *solvabilitas*.

1) **Rasio likuiditas** digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

- Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
- Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

2) **Rasio solvabilitas** adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
- Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

3) **Rasio aktivitas** adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang

Di mana :

Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunkan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan

Di mana :

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2

- i. Aset
Aset adalah sumber daya yang mana dalam hal ini mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- ii. Kewajiban
Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah daerah dimasa perencanaan penganggaran yang akan datang.
- iii. Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah hal-hal yang mencerminkan bagaimana kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset yang dimiliki dengan kewajiban yang harus diselesaikan.



Tabel 3-4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan
5.3.1	ASET						
5.3.1.1	ASET LANCAR						
5.3.1.1.1.a	Kas di Kas Daerah	238.369.475.814,00	563.010.557.847,00	627.220.023.096,00	557.816.025.839,00	422.008.579.088,00	28%
5.3.1.1.1.b	Kas di Bendahara Penerimaan	1.005.146,00	40.712.500,00	113.092,00	29.092,00	0,00	919%
5.3.1.1.1.c	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.001.701,00	300.295.296,00	241.316.462,83	45.431.310,00	27.164.452,00	3690%
5.3.1.1.1.d	Kas di BLUD	99.687.303.208,36	84.975.715.629,34	81.914.803.475,27	68.420.607.022,71	83.608.943.137,69	-3%
	Kas di Bendahara FKTP	0	0	0	0,00	0,00	
5.3.1.1.1.f	Kas di Bendahara BOS	1.740.565.602,00	338.192.674,00	51.517.259,00	10.641.734.376,00	2.094.197.960,00	5078%
5.3.1.1.1.g	Kas di Bendahara BLOCKGRANT	0	0	121.700,00	0,00	0,00	
	Kas Lainnya	0	446.846.786,00	0	0,00	0,00	
5.3.1.1.1.h	Setara Kas	150.000.000.000,00	0	0	0,00	0,00	
5.3.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0	0	536.258.449.191,96	0,00	0,00	
5.3.1.1.3.a	Piutang Pendapatan	514.173.101.051,79	517.247.901.093,06	14.796.464.689,99	826.052.095.185,84	872.308.553.829,00	1348%
	Piutang Lainnya	15.324.320.274,50	17.555.644.846,33	-355.099.233.928,14	12.842.253.653,00	0,00	-578%
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	-303.665.913.956,72	-332.407.748.907,36	910.940.282,00	-560.653.195.135,46	-531.251.476.003,45	-15436%
5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	207.547.042,91	303.276.389,85	61.627.095.017,14	1.208.023.054,00	3.952.200.947,00	5099%
5.3.1.1.6	Persediaan	52.801.872.937,04	56.414.839.330,40	37.822.391.086,30	59.484.121.349,85	90.363.858.275,60	21%
5.3.1.1.3.b	Piutang BLUD	18.941.660.612,00	12.354.607.580,57	-3.263.683.916,92	50.120.758.063,10	19.172.564.515,10	-465%
5.3.1.1.7	Penyisihan Piutang BLUD	-1.395.202.585,65	-2.113.545.406,29	1.002.480.317.507,43	-4.686.975.448,87	5.988.804.472,90	
	JUMLAH ASET LANCAR	786.187.736.847,23	918.467.295.658,90	1.002.480.317.507,43	1.008.448.654.708,17	956.295.781.728,04	5%
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	
	Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	
	Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
5.3.1.2.1.a	Dana Bergulir	10.299.274.187,56	10.295.774.187,56	10.135.147.800,56	9.916.625.055,56	9.912.625.055,56	-1%
5.3.1.2.1.a	(Dana Bergulir Diragukan Tertagih)	-5.938.074.562,56	-5.938.074.562,56	-6.635.147.800,56	-6.635.147.800,56	-6.635.147.800,56	3%
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.361.199.625,00	4.357.699.625,00	3.500.000.000,00	3.281.477.255,00	3.277.477.255,00	-7%
5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen						
5.3.1.2.2.a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	272.856.319.729,23	285.703.047.655,36	373.712.739.237,32	396.955.374.002,13	696.657.911.764,65	29%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Uraian	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan
	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	272.856.319.729,23	285.703.047.655,36	373.712.739.237,32	396.955.374.002,13	696.657.911.764,65	29%
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	277.217.519.354,23	290.060.747.280,36	377.212.739.237,32	400.236.851.257,13	699.935.389.019,65	29%
5.3.1.3	ASET TETAP						
5.3.1.3.c.1	Tanah	2.966.947.552.217,00	3.371.328.675.714,00	3.690.923.803.172,00	3.936.096.925.581,00	4.038.844.652.397,00	8%
5.3.1.3.c.2	Peralatan dan Mesin	891.087.980.675,00	984.071.594.181,00	1.065.897.853.670,00	1.171.333.446.315,00	1.343.880.117.640,00	11%
5.3.1.3.c.3	Gedung dan Bangunan	2.246.220.041.170,00	2.270.239.153.295,79	2.472.343.810.110,17	2.723.142.527.344,00	3.099.608.682.448,00	8%
5.3.1.3.c.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.672.279.731.670,00	4.095.812.302.024,00	4.582.865.498.080,00	5.111.560.240.187,00	5.346.057.218.047,00	10%
5.3.1.3.c.5	Aset Tetap Lainnya	130.100.179.229,00	215.999.624.962,00	295.913.207.059,00	346.174.718.205,00	344.895.890.834,00	30%
5.3.1.3.c.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.987.550.650,00	41.157.503.529,00	21.197.016.790,00	139.389.559.781,00	30.335.010.276,00	122%
5.3.1.3.c.7	Akumulasi Penyusutan	-2.325.000.008.490,00	-2.833.393.171.237,17	-3.201.693.067.536,00	-3.701.899.940.421,00	-4.247.065.198.796,00	16%
	JUMLAH ASET TETAP	7.607.623.027.121,00	8.145.215.682.468,62	8.927.448.121.345,17	9.725.797.476.992,00	9.956.556.372.846,00	7%
5.3.1.4	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0,00	
5.1.3.5	ASET LAINNYA						
5.1.3.5.1	Tagihan Jangka Panjang	474.145.736,02	493.775.334,19	469.381.789,53	470.799.589,53	442.040.189,53	-2%
5.1.3.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	243.265.576.475,00	258.578.320.275,00	14.337.216.800,00	14.337.216.800,00	56.548.516.800,00	52%
5.1.3.5.4	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	49.626.000,00	0,00	
5.1.3.5.5	Aset Lain-lain	39.159.150.190,00	50.420.439.164,00	107.873.009.564,00	115.070.310.561,00	115.070.310.561,00	37%
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0	0	-10.752.300,00	0,00	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	-165.380.275,00	0	0,00	0,00	
5.1.3.5.2	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	-469.901.442,64	-480.813.701,36	-432.735.143,52	-419.427.341,53	-442.040.189,53	-1%
	JUMLAH ASET LAINNYA	282.428.970.958,38	308.846.340.796,83	122.246.873.010,01	129.497.773.309,00	183.389.938.224,00	-1%
	JUMLAH ASET	8.953.457.254.280,84	9.662.590.066.204,71	#####	11.263.980.756.266,30	11.796.177.481.817,70	
5.3.2	KEWAJIBAN						
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.965.600,00	-765.004,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Utang Bunga	0	0	0	0,00	0,00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	500.000.000,00	500.000.000,00	0	0,00	0,00	
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.280.059.399,64	2.898.793.487,97	2.920.399.619,47	3.265.806.268,70	3.945.892.590,50	40%
5.3.2.1.3	Utang Beban	20.305.721.603,00	43.755.160.102,07	70.503.956.962,00	84.717.018.098,00	89.327.320.016,00	51%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Uraian	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	659.446.900,00	312.010.740,00	192.128.614,00	31.714.689,00	20.350.000,00	-53%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.747.193.502,64	47.465.199.326,04	73.618.485.195,47	88.014.539.055,70	93.293.562.606,50	47%
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri	1.078.530.971,00	578.530.986,00	0	0,00	0,00	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.078.530.971,00	578.530.986,00	0	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN	23.825.724.473,64	48.043.730.312,04	73.618.485.195,47	88.014.539.055,70	93.293.562.606,50	45%
5.3.3	EKUITAS	8.929.631.529.807,20	9.614.546.335.892,67	10.355.769.565.904,50	11.175.966.217.210,60	11.702.883.919.211,20	7%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.953.457.254.280,84	9.662.590.066.204,71	10.429.388.051.099,90	11.263.980.756.266,30	11.796.177.481.817,70	7%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Audited)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020)

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 merupakan sebuah aksi yang berdasarkan hukum dalam menciptakan iklim keuangan yang bisa mendorong agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah bisa maksimal. Kebijakan pengelolaan keuangan ini meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

A. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016-2020 meliputi segala kebijakan yang berasal dari sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bisa diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan Pendapatan berdasarkan asal sumber penerimaannya, yaitu:

1. **Pendapatan Asli Daerah** yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan PAD dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meliputi:
 - a. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis punggutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
 - c. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - d. Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - f. Meningkatkan kualitas data potensi Pajak Daerah, melalui pemutakhiran database PBB-P2 dan Pajak Daerah lainnya;
 - g. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, melalui pemeriksaan pajak sesuai ketentuan dan melakukan uji petik terhadap Wajib Pajak yang diragukan kebenaran laporan omsetnya;
 - h. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui mobil keliling PBB, dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah;



- i. Mengembangkan aplikasi Pendapatan Pajak Daerah dalam rangka pemantauan omset Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - j. Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat;
 - k. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil;
 - l. Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
 - m. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - n. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
 - o. Diberlakukannya Insentif Pajak Daerah pada tahun 2020 untuk wajib pajak daerah terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) karena adanya *force majeure* yaitu munculnya wabah COVID-19 yang membatasi ruang gerak dan aktivitas ekonomi para wajib pajak.
2. **Dana Perimbangan** yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah** yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan untuk meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

B. Kebijakan Umum Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2016-2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2016-2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, di mana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2020 yang baru mencapai sebesar 72,39 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan



- publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui *analisis cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melakukan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung;
 4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
 8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% di antaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan, pendorongan sektor pariwisata, peningkatan kemampuan berwirausaha;
 9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
 10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
 11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
 12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
 13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal*

- outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman;
- c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta Mengalokasikan tambahan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah (Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sekurang-kurangnya 10%) kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan

- secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- h. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - i. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kebijakan Belanja pada rentang Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami perubahan drastis pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi dengan adanya wabah COVID-19 yang membuat adanya penyesuaian kebijakan belanja yaitu di antaranya adalah:

- a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan 1) bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) /tunjangan kinerja daerah dan/ atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat; 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) / tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai; 3) Mengendalikan/ mengurangi honorarium kegiatan 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/ atau 5) Mengendalikan/ mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan



- kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/Gedung/Gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan; Jasa konsultasi; Tenaga ahli/instruktur /narasumber; Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/ atau Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
 - c. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud digunakan untuk mendanai:
 - i. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
 - ii. Penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan

daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau

- iii. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016-2020 adalah:

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016-2020 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja

terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Dalam aspek belanja operasi, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 93,91%. Sedangkan belanja tidak terduga memiliki rata-rata penyerapan anggaran terendah dengan persentase serapan sebesar 30,83%. Angka tersebut mengindikasikan penganggaran belanja tidak terduga masih meleset dari perencanaan.

Komponen pada belanja yang memiliki persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu komponen belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata persentase serapan yaitu sebesar 110,37%. Penyerapan ini bahkan melebihi dari rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan kegiatan pada anggaran desa pada anggaran perubahan. Tingginya angka serapan menunjukkan efektifnya pengalokasian anggaran dalam meningkatkan pembangunan perdesaan.

Dalam aspek belanja modal, rata-rata anggaran yang terealisasi baru sekitar 88,62%. Komponen belanja modal yang persentase penyerapannya terendah yaitu komponen belanja modal tanah dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 81,54%. Sedangkan komponen belanja modal yang persentase penyerapannya paling tinggi yaitu komponen belanja modal aset tetap lainnya dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 109,38%.

Tabel 3-5

Persentase Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bandung 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
5	BELANJA	100,75%	94,35%	89,44%	93,97%	100,00%	95,70%
5.1	BELANJA OPERASI	90,18%	94,97%	92,26%	93,92%	98,24%	93,91%
5.1.1	Belanja Pegawai	89,55%	88,80%	90,52%	93,91%	91,47%	90,85%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90,80%	87,64%	92,22%	91,82%	88,32%	90,16%
5.1.3	Belanja Hibah	98,00%	96,58%	96,64%	95,24%	97,64%	96,82%
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	38,91%	72,31%	28,28%	85,11%	32,59%	51,44%
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	n/a	209,79%	99,61%	99,49%	32,59%	110,37%
5.2	BELANJA MODAL	91,45%	87,48%	73,65%	93,47%	97,04%	88,62%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	75,48%	76,47%	75,63%	83,09%	97,04%	81,54%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85,74%	85,92%	62,83%	82,95%	98,16%	83,12%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92,25%	69,69%	43,72%	96,51%	106,53%	81,74%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	96,79%	97,38%	95,25%	94,60%	94,59%	95,72%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94,95%	98,95%	159,33%	98,34%	95,31%	109,38%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	44,60%	0,45%	6,50%	24,84%	96,66%	34,61%
5.3.1	Belanja Tak Terduga	44,60%	0,45%	6,50%	24,84%	77,77%	30,83%
6	TRANSFER	99,68%	12,02%	96,36%	150,19%	49,90%	81,63%
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	99,44%	89,03%	96,36%	150,19%	99,81%	106,97%
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,05%	45,32%	89,07%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2016-2020

B. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur. Salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau

dari tingkat keterserapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara detail, informasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2016-2020 yaitu:

Tabel 3-6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bandung

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	2.177.921.989.998,00	4.640.744.294.782,49	46,93
2	Tahun anggaran 2017	2.119.011.282.357,00	5.115.430.900.480,50	41,42
3	Tahun anggaran 2018	2.040.022.998.438,00	4.913.004.351.814,70	41,52
4	Tahun anggaran 2019	2.415.428.151.539,00	10.694.019.415.359,70	22,59
5	Tahun anggaran 2020	2.306.122.262.836,00	11.241.315.482.859,00	20,51

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2016-2020

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun antar tahun pada periode Tahun 2016–2020. Pada tahun 2020 proporsinya adalah 20,51 persen. Ini berarti belanja untuk pembangunan tetap lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah akan menghasilkan keputusan mengenai besarnya surplus yang perlu disalurkan atau defisit yang harus ditutup. Penentuan keputusan tersebut ditentukan dengan membandingkan antara total pendapatan dan belanja daerah.

i. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit

riil anggaran pemerintah daerah dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Selain melihat bagaimana sumber penutup defisit Riil yang ada di Kabupaten Bandung pada rentang tahun perencanaan sebelumnya, akan dilihat juga bagaimana analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi data realisasi anggaran pada **Tabel 3-7**.



Tabel 3-7
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.607.669.372.893,00	5.081.260.297.655,00	5.259.974.811.369,00	5.730.185.099.103,00	5.405.435.441.463,99
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	4.640.244.294.782,00	5.114.930.900.481,00	4.911.925.820.829,00	5.782.093.594.531,00	5.459.221.888.328,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.500.000.000,00	10.500.000.000,00	54.578.530.986,00	20.812.400.000,00	8.500.000.000,00
	Defisit Riil	- 38.074.921.889,00	- 44.170.602.826,00	293.470.459.554,00	- 72.720.895.428,00	- 62.286.446.864,01

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung, 2016-2020



Tabel 3-8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Defisit Riil	-38.074.921.889	-44.170.602.826	293.470.459.554	-72.720.895.428	-62.286.446.864
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	99,967	99,999	100	99,969	
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,023	0,001	-	0,031	
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,009	-	-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	100	100	100	100	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan					

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung, 2016-2020



Tabel 3-9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SILPA	2017	% dari SILPA	2018	% dari SILPA	2019	% dari SILPA
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	488.005.200.722		443.889.676.197		759.705.845.272		636.923.198.548	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-
5	sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung, 2016-2019

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan tahun anggaran 2021-2026 perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Analisis ini akan terbagi menjadi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta

prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.



Gambar 3-2 Kerangka Analisis Proyeksi Keuangan Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proyeksi pendapatan daerah dilihat dari angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah yang mana dalam hal itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya yaitu kebijakan di bidang keuangan negara, asumsi indikator makro ekonomi serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun

komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021 bersumber dari APBD. Sementara itu, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022 berdasarkan dari proyeksi RKPD, serta Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja periode sebelumnya, disajikan pada **Tabel 3-10**



Tabel 3-10

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No	Uraian	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	4.157.446.819.351	4.352.246.452.940	4.402.991.765.667	4.422.761.615.167	4.444.064.567.032	4.466.916.624.953
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	969.634.012.302,00	1.091.878.496.339,00	1.116.007.008.786,00	1.135.776.858.286,00	1.157.079.810.151,00	1.179.931.868.072,00
4.1.01	Pajak Daerah	493.013.669.290,00	542.995.000.000,00	559.284.850.000,00	576.063.395.500,00	593.345.297.365,00	611.145.656.286,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.972.392.911,00	32.414.815.670,00	33.043.475.000,00	34.034.779.000,00	35.055.829.000,00	36.107.528.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.441.288.786,00	68.441.288.786,00	73.441.288.786,00	73.441.288.786,00	73.441.288.786,00	73.441.288.786,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Sah	386.206.661.315,00	448.027.391.883,00	450.237.395.000,00	452.237.395.000,00	455.237.395.000,00	459.237.395.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.159.812.807.049,00	3.233.467.956.601,00	3.260.084.756.881,00	3.260.084.756.881,00	3.260.084.756.881,00	3.260.084.756.881,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.308.213.000,00	2.639.308.213.000,00	2.665.925.013.280,00	2.665.925.013.280,00	2.665.925.013.280,00	2.665.925.013.280,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	520.504.594.049,00	594.159.743.601,00	594.159.743.601,00	594.159.743.601,00	594.159.743.601,00	594.159.743.601,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.000.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	4.157.446.819.351,00	4.352.246.452.940,00	4.402.991.765.667,00	4.422.761.615.167,00	4.444.064.567.032,00	4.466.916.624.953,00
5.	BELANJA	4.627.883.014.648,00	4.622.246.452.940,00	4.402.991.765.667,00	4.422.761.615.167,00	4.444.064.567.032,00	4.466.916.624.953,00
5.1	Belanja Operasi	3.453.425.102.255,00	3.823.908.814.505,00	3.599.692.280.610,00	3.618.685.145.160,00	3.621.614.016.560,00	3.659.124.653.967,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.087.337.448.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.206.285.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.483.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	206.030.208.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.368.159.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	480.053.680.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	22.313.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.919.404.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.259.257.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269.931.181.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.519.480.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110.951.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	53.913.774.270,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.913.774.270,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00
5.4	Belanja Transfer	640.490.457.820,00	763.600.037.567,00	768.561.884.189,00	769.338.869.139,00	787.712.949.604,00	773.054.370.118,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.298.606.220,00	57.540.981.567,00	59.232.832.500,00	61.009.817.450,00	62.840.112.637,00	64.725.318.429,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	598.191.851.600,00	706.059.056.000,00	709.329.051.689,00	708.329.051.689,00	724.872.836.967,00	708.329.051.689,00
	Jumlah Belanja	4.627.883.014.648,00	4.622.246.452.940,00	4.402.991.765.667,00	4.422.761.615.167,00	4.444.064.567.032,00	4.466.916.624.953,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No	Uraian	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Total Surplus/(Defisit)	-470.436.195.297,00	-270.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN						
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	493.937.275.297,00	350.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	493.937.275.297,00	350.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	23.501.080.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.501.080.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	470.436.195.297,00	270.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3.3.1 Perhitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

B. Proyeksi kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2021 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui **Tabel 3-11**.

C. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang yang disajikan pada **Tabel 3-12**.



Tabel 3-11
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

No.	Uraian	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	2.727.827.906.797,00	2.732.869.440.567,00	2.737.831.287.189,00	2.738.608.272.139,00	2.756.982.352.604,00	2.742.323.773.118,00
5.1	Belanja Operasi	2.087.337.448.977,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.087.337.448.977,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00	1.969.269.403.000,00
5.4	Belanja Transfer	640.490.457.820,00	763.600.037.567,00	768.561.884.189,00	769.338.869.139,00	787.712.949.604,00	773.054.370.118,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.298.606.220,00	57.540.981.567,00	59.232.832.500,00	61.009.817.450,00	62.840.112.637,00	64.725.318.429,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	598.191.851.600,00	706.059.056.000,00	709.329.051.689,00	708.329.051.689,00	724.872.836.967,00	708.329.051.689,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
6.2.02	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Total		2.728.327.906.797,00	2.733.369.440.567,00	2.738.331.287.189,00	2.739.108.272.139,00	2.757.482.352.604,00	2.742.823.773.118,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 3-12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	4.157.446.819.351	4.352.246.452.940	4.402.991.765.667	4.422.761.615.167	4.444.064.567.032	4.466.916.624.953
2	Pencairan Dana Cadangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	493.937.275.297	350.000.000.000	0	0	0	0
4	Total Penerimaan	4.651.384.094.648	4.702.246.452.940	4.402.991.765.667	4.422.761.615.167	4.444.064.567.032	4.466.916.624.953
5	Dikurangi						
6	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	2.728.327.906.797	2.733.369.440.567	2.738.331.287.189	2.739.108.272.139	2.757.482.352.604	2.742.823.773.118
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.923.056.187.851	1.968.877.012.373	1.664.660.478.478	1.683.653.343.028	1.686.582.214.428	1.724.092.851.835

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



BAB 4 Contents

BAB 3	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2021)	3-1
3.1.1	Kinerja pelaksanaan APBD	3-1
3.1.2	Neraca Pembiayaan.....	3-9
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020)	3-13
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	3-18
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	3-20
3.3	Kerangka Pendanaan.....	3-24
3.3.1	Perhitungan Kerangka Pendanaan	3-27
BAB 4	Contents	30

Tabel 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 3-3

Tabel 3-2 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 3-6

Tabel 3-3 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

3-8

Tabel 3-4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung..... 3-10

Tabel 3-5 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bandung 2016-2020 19

Tabel 3-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bandung 3-20

Tabel 3-7 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020..... 3-21

Tabel 3-8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020..... 3-22

Tabel 3-9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2016-2019 3-23

.Tabel 3-10 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 3-25

Tabel 3-11 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

3-28

Tabel 3-12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

3-29



Gambar 3-1 Rata-rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 3-5

Gambar 3-2 Kerangka Analisis Proyeksi Keuangan Daerah 3-24

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan perumusan isu strategis daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa 5 (lima) tahun yang akan datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan untuk mengetahui apa saja akar masalah yang berpotensi menghambat pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung. Permasalahan pembangunan ini dianalisis agar dapat dipetakan bagaimana permasalahan yang terkait sesuai dengan urusan dan kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dianalisis untuk dicari manakan isu-isu strategis yang akan menjadi perhatian dalam pembangunan di masa yang akan datang. Permasalahan dan isu strategis daerah nantinya akan menjadi dasar untuk pembentukkan visi, misi, tujuan hingga arahan kebijakan yang akan dibentuk nantinya.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan yang terjadi antara pembangunan yang ingin dicapai dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan yang timbul ini menjadikan adanya ketidakpuasan dalam masyarakat akan tidak tercapainya kondisi ideal yang seharusnya ada dalam berkehidupan sehari-hari. Tujuan dari adanya perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020

dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) tematik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan **Gambar 4-1**.

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap IV, ditemukan 8 (delapan) masalah utama di Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam **Gambar 4-2**.

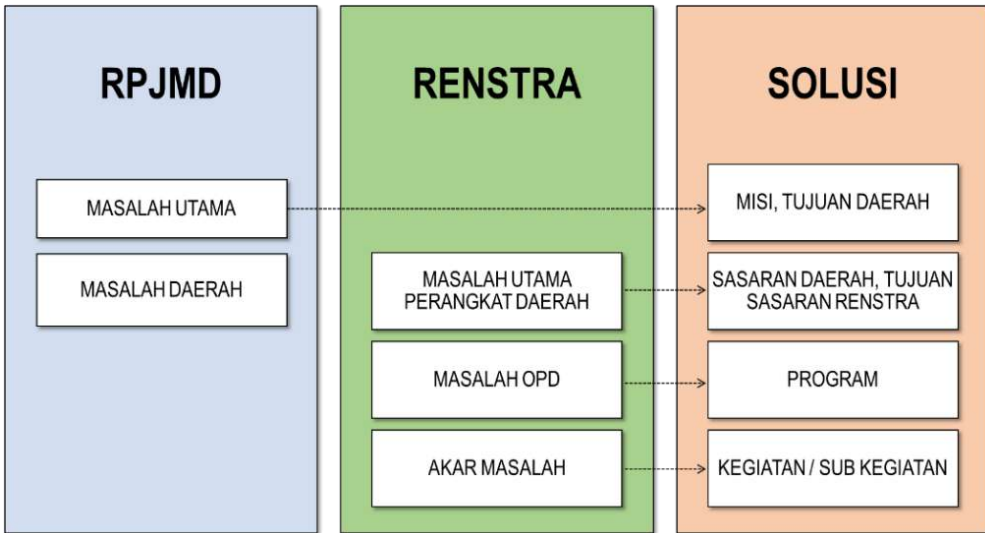
Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kabupaten Bandung selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan utama pembangunan adalah;

- (1) Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan manajemen data;
- (2) Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup;
- (3) Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan;
- (4) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial;
- (5) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- (6) Masih belum optimalnya pelayanan dan pemerataan infrastruktur;



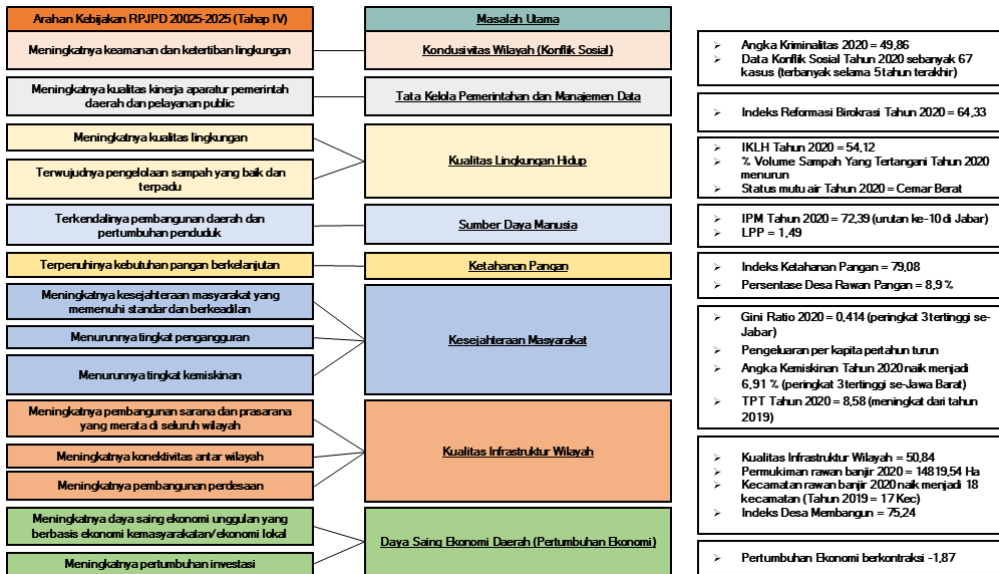
(7) Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan dan;

(8) Masih belum optimalnya kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan.



Gambar 4-1
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 4-2
Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan Masalah Utama

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Pandemi COVID-19 secara makro menjadi penyebab dari perlambatan ekonomi di Kabupaten Bandung yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial, dan masih rendahnya kualitas SDM. Permasalahan tersebut dialami oleh seluruh daerah di Indonesia dan menjadi isu global yang belum dapat diprediksi akhir dari pandemi COVID-19 tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19.

Selanjutnya, masalah utama tersebut akan diselesaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah. Sesuai dengan kerangka logis permasalahan daerah dan Perangkat Daerah yang dijelaskan dalam **Gambar 4-1**, masalah-masalah ini merupakan hasil analisis dari data yang ada pada gambaran umum wilayah. Identifikasi permasalahan ini akan dibagi sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Dalam lebih memudahkan dalam melakukan mengidentifikasi masalah, rumusan masalah yang ada akan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- (1) Masalah Pokok, yang merupakan masalah yang bersifat makro dan bisa

diselesaikan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran;

- (2) Masalah, berisi beberapa penyebab dari masalah pokok yang pemecahannya bisa dilakukan melalui strategi;
- (3) Akar Masalah, adalah mencari beberapa penyebab dari masalah secara lebih detail. Pemecahan akar masalah ini melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang ada di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

4.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

Pada bidang Pendidikan terdapat tiga masalah pokok yaitu belum merata kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan, masih belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang tersedia dan belum optimalnya kerjasama antar stakeholder dan multisektor dalam pengembangan Pendidikan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-1
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pendidikan

Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
Belum merata kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan	Kuota rehabilitasi sarana terutama rehabilitasi ruang kelas masih jauh dari kebutuhan	Terlalu banyak sekolah yang mengusulkan rehabilitasi, dikarenakan kondisi bangunan banyak yang sudah termasuk katagori rusak sedang, bahkan tidak sedikit yang sudah termasuk rusak berat. Masih banyak sekolah yang melaksanakan KBM dua sif bahkan ada yang 3 sif
	Jumlah PAUD belum merata dan sesuai standar	Perijinan PAUD sulit didapatkan, sehingga banyak paud yang tidak bisa terdata.
	Kurangnya sekolah kejuruan di daerah yang sesuai dengan potensi daerah setempat	Banyaknya pihak sekolah yang terkendala untuk menunggu bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Masih belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang tersedia.	Distribusi guru yang tidak merata	Pengangkatan guru CPNS tidak sebanding dengan kebutuhan guru

Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
		Banyak guru PNS yg pensiun sedangkan kebijakan untuk mengangkat guru honor dihentikan
	Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi	Hambatan dalam peningkatan guru mendapatkan sertifikasi yakni keterbatasan anggaran guna memberikan program sertifikasi guru, sehingga dilakukan secara bertahap.
	Kesejahteraan guru honorer yang jarang di perhatikan	Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yaitu harus memiliki sertifikasi, dengan syarat mengajar lebih dari 24 jam. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa guru terutama belum mencapai 24 jam.
	Tenaga pendidik PAUD belum terstandarisasi	Belum adanya insentif untuk mendorong standarisasi tenaga pendidik PAUD
Belum optimalnya kerjasama antar stakeholder dan multisektor dalam pengembangan pendidikan	Belum adanya kolaborasi dalam pelatihan dan pendidikan dalam peningkatan <i>soft skill</i> siswa.	Pengadaan pelatihan masih dilakukan pada masing-masing dinas sesuai bidang yang di ampu dan belum terhubung dengan Disdik
	Pendataan kebutuhan pelatihan belum terintegrasi dengan baik.	Belum optimalnya kajian untuk kebutuhan pelatihan dan peningkatan kemampuan siswa
		Kurangnya sosialisasi ke para operator sekolah untuk pemutakhiran data peserta didik di DAPODIK

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

B. Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan terdapat lima masalah pokok yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, belum meratanya kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, belum optimalnya manajemen data

kesehatan, belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap faskes swasta dan tradisional. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-2
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin	Masih banyaknya kendala dalam proses pengajuan SKTM dan Jampersal	Kurangnya pengetahuan masyarakat dan lintas sektor
	Masalah terdapat <i>double</i> jaminan	Kartu identitas BPJS belum semua diterima masyarakat
	Belum optimalnya pelaksanaan program Layan Rawat	
Belum ada tenaga khusus yang melaksanakan kegiatan layad rawat		
Belum meratanya kuantitas dan kualitas kesehatan	Belum optimalnya pemerataan dan pemenuhan jumlah, jenis dan kualitas sumber daya manusia kesehatan di puskesmas (11,3% puskesmas yang telah terpenuhi berdasarkan jumlah dan jenis tenaga sesuai standar minimal, 17,7%	Belum ada UPTD khusus yang menangani kegiatan PSC 119
		Regulasi dan surat edaran tentang pembatasan pemenuhan tenaga non PNS tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini
		Belum adanya alokasi pemenuhan tenaga PNS untuk tenaga administrasi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	puskesmas kekurangan bidan, 41,9% puskesmas kekurangan perawat)	atau tenaga penunjang lainnya yang ditempatkan di puskesmas	
		Pendistribusian dan penyebaran SDM di puskesmas belum mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan non teknis	
		Masih rendahnya kemampuan dan kapasitas pengelola dan pendayagunaan ketenagaan baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas	
	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Puskesmas di Puskesmas	Belum semua Kepala Puskesmas, Kasubag.TU dan ketua Pokja di Pkm mendapat pelatihan Manajemen Puskesmas	Siklus manajemen Puskesmas belum dilaksanakan sesuai jadwal
			Kwalitas laporan tahunan belum baik
			masih adanya Puskesmas yang lambat dalam menyampaikan laporan tahunan dan PKP
			belum semua unsur Dinas Kesehatan mendapat pelatihan Manajemen Puskesmas
			Belum semua Puskesmas mendapat pembinaan dan pengawasan
	Belum optimalnya pengelolaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas	Belum semua Puskesmas memiliki umlah alat pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang memadai	Kurangnya tenaga medis kesehatan
			Belum semua Puskesmas melaksanakan Pemantapan Mutu External (PME)
Belum optimalnya pengelolaan laboratorium di Puskesmas	SDM dan Sarpras belum sesuai peraturan yang berlaku	Belum semua Puskesmas melaksanakan Pemantapan Mutu External (PME)	
		SDM dan Sarpras belum sesuai peraturan yang berlaku	
Belum optimalnya manajemen data kesehatan	data ketenagaan sering terkendala validitasnya	Mobilitas data ketenagaan yang tinggi dan selalu berubah sehingga diperlukan update data yang terus menerus dan dibutuhkan koordinasi yang intens dengan kepegawaian dalam pengelolaan data kepegawaian	
	data terkait masyarakat dengan penyakit tidak menular belum terkumpul dengan maksimal	banyak pasien yang dilayani oleh faskes belum dilaporkan ke Dinas Kesehatan	
Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Terdapat tenaga kesehatan yang menjalankan praktik belum memiliki SIP (13,5%)	Perubahan regulasi dalam pengelolaan perizinan bidang kesehatan terpadu di satu pintu di DPMPSTP dan adanya kendala teknis dan operasional	
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM dalam memberi pelayanan kesehatan (49,5)	Jumlah SDM yang banyak dan anggaran yang terbatas	
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap faskes swasta dan tradisional	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan swasta (Klinik Pratama)	Keterbatasan tenaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta	
		Masih ada klinik Pratama yang pindah tempat atau tutup tetapi tidak melapor	
		Masih ada Klinik Pratama yang tidak memasang plang	
	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan kesehatan tradisional	Belum semua petugas pengelola Kestrads mendapat pelatihan ketrampilan Kestrads	
		Belum semua Puskesmas memiliki minimal 1 kelompok TOGA yang dibina	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih ada Hattra yang belum berizin
		Belum semua petugas pengelola Kestrad mendapat pelatihan Asuhan Mandiri Kestrad

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat dua masalah pokok yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan

dasar belum memadai dan adanya peningkatan alih fungsi lahan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-3
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai	Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik belum optimal	Muatan kendaraan yang berlebih (overloaded)	
		Kurang baiknya sistem drainase jalan	
		Ketidaksesuaian standar pembangunan jalan	
		Masih rendahnya penerapan teknologi baru dalam kegiatan pemeliharaan jalan	
	Kondisi jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam kondisi baik belum optimal	Kondisi jaringan drainase dalam kondisi baik belum optimal	Belum memadainya SDM dan sarana pendukung untuk pemeliharaan irigasi
			Adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase perkotaan
	Belum terintegrasinya sistem drainase perkotaan yang berdaya fungsi optimal	Belum tertanganinya banjir	Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengelolaan, dan pembangunan drainase
			Pemanfaatan lahan perumahan belum disertai dengan penyediaan saluran drainase yang terintegrasi
			Belum terbebaskannya sempadan sungai dari bangunan liar
			Belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan
	Cakupan pelayanan air bersih belum optimal	Cakupan pelayanan persampahan perkotaan belum optimal	Belum mencukupinya kapasitas jaringan drainase
			Adanya pendangkalan sungai
			Sumur resapan tidak efektif
			Sebaran sumber air baku tidak merata
	Rendahnya peningkatan	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah	Lokasi air baku tidak berada pada lahan masyarakat melainkan lahan milik PERHUTANI
			Kuantitas air baku rendah
			Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air baku
			Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu
			Belum efektifnya pengelolaan persampahan dengan skema 3R
		Masih tingginya perilaku masyarakat untuk membuang sampah sembarangan	
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah	
		Belum tersedianya database bangunan yang sudah ber-	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	persentase bangunan ber-IMB	IMB Menurunnya jumlah pemohon IMB yang berskala besar (perumahan, industri, perdagangan/ jasa) Adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam hal IMB untuk perusahaan dan perumahan Adanya persyaratan izin lokasi yang dibebankan di akhir rangkaian proses izin pada penerbitan IMB Panjangnya alur proses penerbitan IMB akibat regulasi baru
Adanya peningkatan alih fungsi lahan	Rendahnya rasio RTH per satuan luas wilayah Pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukkan	Rendahnya rasio RTH per satuan luas wilayah Belum adanya basis data tentang aset tanah untuk dijadikan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau Belum tersedianya Perda RDTR kawasan perkotaan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Belum tersusunnya masterplan untuk kawasan strategis sebagai acuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang Terbatasnya SDM, peralatan, dan teknologi penunjang untuk pengawasan dan pengendalian ruang
Pembinaan Jasa Konstruksi belum berjalan dengan baik	Keterbatasan kompetensi SDM konstruksi Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tidak berjalan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terhambat Pengawasan dan pembinaan badan usaha jasa konstruksi yang lemah	Proses asesmen tenaga terampil yang kurang optimal Minimnya kegiatan bimbingan teknis jasa konstruksi Belum adanya portal/situs pembina jasa konstruksi yang baik Belum terselenggaranya bimbingan teknis administrator sipjaki Belum adanya regulasi daerah yang mengatur proses permohonan izin usaha jasa konstruksi SOP permohonan IUJK belum berjalan dengan optimal Tidak tersedianya database BUJK Terbatasnya SDM, peralatan, dan teknologi penunjang untuk pengawasan dan pembinaan BUJK

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat empat masalah pokok yaitu masih perlunya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman, belum Optimalnya Ketersediaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah

dalam mencakup seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung, kualitas prasarana dan sarana dan utilitas umum masih belum merata, dan masih belum tertibnya administrasi dan tata kelola pertanahan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-4
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar	Masih ada Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni	Masih ada Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum semua penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman	Pelayanan PSU belum optimal
		Proses serah terima PSU belum optimal
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas sanitasi terbangun dan lingkungan
		Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL sesuai standar
		Sulitnya mencari lahan yang ideal untuk pembangunan sanitasi
	Masih besarnya backlog perumahan	Keterbatasan dan mahalannya harga lahan
		Belum optimalnya intervensi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan
Belum tertatanya kawasan kumuh	Realisasi penataan kawasan kumuh baru masih rendah	Belum adanya sinkronisasi dan integrasi program mengenai penataan dan pengendalian kawasan kumuh
	Masih besarnya luasan kawasan kumuh	Belum adanya basis data mengenai deliniasi kawasan kumuh
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

E. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terdapat tujuh masalah pokok yaitu masih adanya pelanggaran perda di Kabupaten Bandung dalam urusan keamanan dan ketertiban, belum terpenuhinya rasio tenaga pengaman dan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung, masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman,

masih perlunya peningkatan untuk pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kondisi fisik, sosial, ekonomi masyarakat terdampak pasca Bencana, masih belum optimalnya koordinasi antar lembaga dan mitra untuk penanganan kebencanaan, masih belum optimalnya inventarisasi dan manajemen data terkait kebencanaan dan masih perlunya peningkatan pencegahan kebencanaan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-5
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana	Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran baru belum optimal	Minimnya ketersediaan pos damkar untuk melayani 9 WMK (hanya 3 pos yang baru dibangun sedangkan 6 lainnya masih menggunakan fasilitas lingkungan kantor kecamatan)
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan kebakaran rata-rata masih di atas	Sedikitnya jumlah mobil damkar yang dapat beroperasi (11/14 mobil)
		Terbatasnya sumber air untuk pemadaman



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	22 menit	Tidak adanya hydrant kota Terbatasnya sungai dan kolam yang dapat digunakan untuk cadangan air
	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya daerah rawan bencana
		Belum optimalnya regulasi mitigasi bencana Belum efektifnya penyebaran informasi kebencanaan
Belum efektifnya penyebaran informasi kebencanaan	Sistem pengawasan perijinan belum berjalan optimal	Belum memadainya sarana prasarana untuk patroli
		Belum optimalnya integrasi perijinan antar lembaga Kurangnya jumlah linmas untuk pengawasan
Kurangnya jumlah linmas untuk pengawasan	Kurang beraninya masyarakat dalam menegakkan hukum (menegur)	Masih rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

F. Bidang Sosial

Pada bidang sosial terdapat tiga masalah pokok yaitu belum optimalnya peran antar sektor dalam penanganan permasalahan sosial pada PPKS,

belum optimalnya transparansi dan akurasi data terkait urusan sosial dan masih kurangnya sarana prasarana untuk bantuan sosial. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-6
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peran antar sektor dalam penanganan permasalahan sosial pada PPKS	Masih banyaknya bantuan yang tidak berkelanjutan	Masih belum baiknya sistem pelaporan untuk kasus sosial dimasyarakat.
	Masih banyaknya penyandang Penyakit Sosial yang terdiri dari Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Perumahan, Korban Penanggulangan Narkoba (NAPZA) dan HIV/AIDS. Jumlah yang terdata secara keseluruhan mencapai 1.064 orang	Keterbatasan jangkauan layanan terpadu bagi PPKS
	Terbatasnya jenis logistik kebencanaan	Belum adanya regulasi yang mendukung ketersediaan sarpras untuk penyandang disabilitas
Belum optimalnya transparansi dan akurasi data terkait urusan sosial	Keakuratan data penerima bantuan masih belum tepat sasaran	Kurangnya ketersediaan pendamping / pekerja sosial
		Pengumpulan data terikat kepada hasil musyawarah desa Verifikasi data calon penerima bantuan belum efektif
Masih kurangnya sarana prasarana untuk bantuan sosial	Kurangnya fasilitas alat bantu untuk kasus kecacatan dan lanjut usia	Belum adanya regulasi yang mendukung ketersediaan sarpras untuk penyandang disabilitas
		Tingginya beban ekonomi bagi lanjut usia

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

Pada bidang Tenaga kerja terdapat tiga masalah pokok yaitu belum optimalnya penyerapan tenaga

kerja, permasalahan perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh pemerintah cukup tinggi dan Belum optimalnya penempatan transmigrasi. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-7
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya kompetensi angkatan kerja	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
	Rendahnya kualifikasi angkatan kerja	Belum efektifnya sertifikasi tenaga kerja
	Adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja	Belum optimalnya pemetaan kebutuhan industri
	objek pelatihan belum tepat sasaran masih belum adanya AKAD dalam 5 tahun	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja
	belum terjalinnya kolaborasi dengan PD lainnya terkait supply tenaga kerja	
Permasalahan perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh pemerintah cukup tinggi	Kurangnya pengetahuan pekerja dan pengusaha tentang peraturan ketenagakerjaan	Belum optimalnya pembinaan sarana hubungan industrial
Belum optimalnya penempatan transmigrasi	Terbatasnya kuota pengiriman transmigran	Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan transmigran

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat dua masalah pokok

yaitu belum tercapainya implementasi pengarusutamaan gender di kabupaten bandung dan pemenuhan hak anak belum optimal. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-8
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum tercapainya implementasi Pengarusutamaan gender di Kabupaten Bandung	Pelaksanaan 7 indikator PUG yang meliputi 1 s/d7 belum dapat direalisasikan secara optimal	1. Belum didukung adanya regulasi PPRG 2. Terbatasnya SDM yang memahami isu ini 3. Belum optimalnya kinerja Pokja PUG 4. Belum optimalnya data terpilah sebagai dasar untuk mengisikan RAD Pokja PUG 5. belum adanya forum data terkait PUG
	Belum optimalnya sosialisasi ke tingkat desa dan kecamatan	Kurangnya koordinasi antara pemerintahan desa di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dalam hal pencegahan kekerasan di tingkat wilayahnya
	Kurangnya jangkauan pelayanan bagi Korban ke tingkat desa	Belum terkoordinirnya koordinasi pelayanan hingga ke tingkat desa
	Belum terpetakannya Organisasi Perempuan di Kabupaten Bandung	1. Belum adanya pendataan Organisasi Perempuan 2. KK Binaan dengan Pendidikan rendah



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Kurangnya SDM untuk lokasi pembinaan yang jauh dan kurang strategis 4. Organisasi Perempuan yang ada belum berkembang 5. Kurang terakomodirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perempuan
Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal	Pencegahan dan Pemulihan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Dukungan Anggaran Sosialisasi Pencegahan dan Pemulihan Terhadap Korban Tindak Kekerasan sangat Kurang/rendah
	Pembinaan FAD Kurang (4 Kali/Tahun)	Pertemuan Rutin Kurang Karena Dukungan Anggaran Kurang
	Belum semua orang memahami tentang pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang terwujud dalam Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pemahaman tentang Hak-hak Anak Belum Optimal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

C. Bidang Pangan

Pada bidang pangan terdapat masalah dua pokok yaitu belum terjaganya keamanan dan ketahanan

pangan, belum optimalnya kebutuhan pangan dengan gizi seimbang untuk masyarakat. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-9
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum terjaganya keamanan pangan masyarakat	Penggunaan pestisida, formalin, dan boraks pada kelompok pangan segar masih tinggi	Kerjasama dan sinergitas diantara SKPD terkait dalam mendukung ketahanan pangan belum optimal.	
	Tingginya pencemaran lingkungan terutama air yang menjadi sarana utama untuk budidaya dan pemeliharaan ikan.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan pangan	
	Sertifikasi keamanan pangan segar dan olahan belum memadai dan menyeluruh	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan pangan	Belum tersedianya peraturan di daerah terkait keamanan pangan
			Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan keamanan pangan di tengah masyarakat
		Sumberdaya untuk penanganan keamanan pangan masih terbatas	
Masih rawannya ketersediaan pangan daerah	Lemahnya pengendalian tata ruang Kawasan dalam mendukung ketahanan pangan	Tingginya alih fungsi lahan pertanian	
	Belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung kawasan pangan	Jalan akses ke wilayah produksi pangan masih kurang	
		Kuantitas dan kualitas irigasi/pengairan produksi belum memadai (63%)	
		Belum tersusunnya peta akses jalan untuk Kawasan pangan dan peta eksisting jaringan irigasi untuk pertanian	
	Tata kelola Kawasan diluar Kawasan pangan belum terbentuk dan bersinergi	Kurangnya sinergi dan koordinasi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan (Pemda Kab, BBUMN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi)	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Daya dukung lahan dan air kurang memadai	Masih tingginya kasus kekeringan dan banjir di pusat produksi pangan Berkurangnya kualitas lahan pertanian	
	Berkurangnya jumlah petani pangan	Rendahnya minat generasi penerus pada sektor pertanian Belum optimalnya sistem penyuluhan pertanian yang tepat dan memanfaatkan TIK yang mendukung petani pangan	
	Masih lemahnya penguatan sub-sistem produksi	Berkurangnya luas lahan pertanian produktif Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas (<i>smart farming</i>) hingga pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Harga sarana produksi fluktuatif dan peredarannya belum merata Masih tingginya ketergantungan terhadap pupuk/pestisida kimia serta belum tersedianya benih/bibit premium dalam komoditas pangan Tingginya ancaman hama dan penyakit tanaman dan hewan yang mempengaruhi produksi Belum terciptanya pemanfaatan limbah rumah tangga dan sektor pertanian untuk sarana produksi alternatif	
	Masih lemahnya distribusi dan aksesibilitas pangan	Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan pangan Kemampuan akses pangan masyarakat masih rendah karena rawan daya beli karena masih lemahnya kerjasama dengan pihak lain dalam memberikan akses pangan Belum terbentuknya simpul pangan di tingkat masyarakat (RT/RW/Desa) P2L Belum terintegrasinya sistem informasi ketahanan pangan terkait <i>supply - demand</i> Kurangnya sarana dan prasarana logistic pangan tingkat kabupaten dan desa (Lumbung dan Gudang) Belum tertatanya rantai pasok pangan	
	Belum optimalnya antisipasi dan mitigasi perubahan iklim terkait pangan	Belum tersusunnya roadmap produksi roadmap produksi pertanian dalam mitigasi perubahan iklim Budidaya pertanian yang masih mengabaikan aspek konservasi dan lingkungan Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mengantisipasi periklim	
	Belum optimalnya konsumsi pangan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi seimbang untuk masyarakat	Masih rendahnya pengembangan dan konsumsi sumber protein hewani	Masih kurangnya minat masyarakat terutama anak-anak terhadap konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbangnya
		Skor PPH belum memenuhi nilai ideal	Rendahnya permintaan terhadap makanan lokal
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sesuai potensi daerah.	Alih fungsi lahan produktif usaha sektor pertanian/peternakan/



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perikanan/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya, masih banyak terjadi.
	Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal	Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal pengganti beras
		Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi
		Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi
	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi	Lembaga Pendidikan (sekolah) belum memahami dan mensosialisasikan pangan B2SA
		Belum terkoordinasikannya keterlibatan swasta dan kelompok masyarakat pemerhati pangan dalam peningkatan pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat
Belum optimalnya pemanfaatan TIK dan media social dalam peningkatan pengetahuan pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat		
Belum tersedianya dukungan kelembagaan terkait tata kelola ketahanan pangan	Belum terbangunnya sinergitas lembaga dan perangkat daerah pengampu ketahanan pangan	Belum tersedianya kerjasama regional antar pemerintah lain sebagai pemasok dan pembeli pangan
		Lembaga pengelola ketahanan pangan belum optimal
	Pembagian peranan dari setiap pemangku kepentingan dalam ketahanan pangan belum tersedia	Belum terbangunnya kerjasama regional antar pemerintah di Kawasan Metropolitan Bandung Raya
		Belum optimalnya keterlibatan desa dalam ketahanan pangan masyarakat
	Belum tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan Kawasan pangan berdasarkan HITS	Belum optimalnya sistem informasi terkait ketahanan pangan
		Belum tersedianya perda RDTR kawasan pangan
Belum terbangunnya pusat inovasi dalam mendukung ketahanan pangan		
Belum tersedianya Perda Ketahanan Pangan	Fokus pemangku kepentingan terkait pangan masih rendah dan belum holistik	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

D. Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian terdapat satu masalah pokok yaitu masih belum tertibnya administrasi dan

tata kelola pertanian. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-10
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum tertibnya administrasi dan tata kelola pertanian	Belum Optimalnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Masih banyaknya Pemanfaatan tanah-tanah Pemda secara Ilegal
		Masih banyak nya lahan yang belum di manfaatkan secara maksimal
	Adanya permasalahan atas kepemilikan	Belum semua Lahan/Tanah Milik



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	tanah milik Pemda	Pemerintah Kabupaten yang sudah bersertipikat
		Kurang lengkapnya dokumen dan berkas untuk mendukung kepemilikan dan status tanah milik pemkab
	Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	Masih banyak aset tanah yang dikuasai pihak lain karena adanya unsur historis yang belum terselesaikan
		Belum memadainya pengamanan asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung
		Belum optimal terpasangnya plank dan patok pada tanah/lahan milik pemda

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

E. Bidang Lingkungan Hidup

Pada bidang lingkungan hidup terdapat empat masalah pokok yaitu adanya degradasi lingkungan/penurunan kualitas lingkungan, Lemahnya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan, Berkurangnya luas daerah resapan air, dan belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT (Energi Baru Terbarukan) secara maksimal. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-11
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Adanya degradasi lingkungan/penurunan kualitas lingkungan	Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati	Adanya alihfungsi lahan
		Adanya perubahan pola tanam
	Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih, nilai indeks kualitas air ada diangka 30,2 dengan status kualitas air buruk	Perilaku masyarakat yang mencemari lingkungan seperti membuang limbah langsung ke sungai
		90% outlet air limbah domestik tidak memenuhi baku mutu air limbah
		Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha terkait tata cara pengolahan limbah
		Adanya limbah kiriman dari wilayah lain diluar Kabupaten Bandung
	Adanya limbah kotoran sapi yang dibuang langsung ke sungai	
Indeks kualitas udara yang menurun pada tahun 2019		Semakin banyaknya jumlah kendaraan yang kurang ramah lingkungan
		Masih adanya kegiatan usaha yang menimbulkan polusi udara, belum adanya pemanasan/boiler di industri yang ramah lingkungan dengan biaya pemeliharaan yang rendah
Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengolahan sampah belum optimal, tahun 2019 hanya mencapai 26,91% dari target nasional 100%	Kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah
		Masih rendahnya peran aktif masyarakat dala upaya pengurangan sampah
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah
	Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	Masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan
		Belum memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah
	Lemahnya penegakan hukum untuk pengendalian pencemaran	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	Adanya keterbatasan lahan untuk menyediakan IPAL Belum efektifnya regulasi yang mewajibkan penyediaan IPAL domestik
	Pengurangan sampah domestik rumah tangga masih belum optimal	masih rendahnya kesadaran masyarakat pemanfaatan bank sampah belum optimal
Berkurangnya luas daerah resapan air	Adanya alih fungsi lahan lindung menjadi kawasan terbangun	Masih kurangnya upaya konsevasi SDA
		Belum optimalnya pelaksanaan, penanaman dan pemeliharaan tanaman konservasi
Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal	Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan	Masih kurangnya inisiatif masyarakat dalam koknservasi dan pengendalian
		Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan limbah sebagai EBT
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT	Terbatasnya ketersediaan teknologi pengolahan limbah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

F. Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pada bidang administrasi kependudukan dan pencacatan sipil terdapat dua masalah pokok yaitu

belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan masih belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-12
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencacatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya pelayanan administrasi Kependudukan	Kurang optimalnya kualitas jarkomdat dan aplikasi pendukung SIAK serta sarana prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kurangnya SDM yang terampil dalam bidang jaringan dan teknologi informasi serta sarana prasarana yang kurang mendukung	
		Terlambatnya penangan Ketika terjadi error atau trouble shooting serta keterbatasan sarana dan prasarana yang akan digunakan	
	Belum optimalnya ketersediaan bahan baku penerbitan dokumen Kependudukan	Terlambatnya pemberian blanko KTP el dari pusat	
		Terbatasnya jumlah tinta untuk pencetakan KIA	
	Terhambatnya pencetakan dokumen kependudukan	Gangguan Jaringan dari pusat dan daerah	
	Terhambatnya proses mutasi penduduk yang terkonsolidasi secara nasional	Gangguan Jaringan	
	Belum semua lembaga / Instansi pengguna melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan (PKS)	Belum Optimalnya pelaksanaan sosialisasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	
	Belum semua lembaga menindaklanjuti PKS untuk mengakses data kependudukan	Kurangnya Koordinasi antara lembaga penyelenggara dan lembaga pengguna	
	Kurang tertibnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan		Jumlah pemohon melebihi kapasitas
			Petugas pelayanan adminduk di kecamatan Sebagian besar mengarahkan masyarakat ke kantor Disdukcapil
Penyelesaian pelayanan adminduk di kecamatan relative lama (1 s/d 2 minggu)			



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Informasi kepada masyarakat belum optimal</p> <p>Koordinasi antara dinas dengan aparat di kewilayahan kurang optimal</p> <p>Sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan sebagian sudah rusak</p> <p>Adanya pihak luar yang memberikan jasa pelayanan adminduk (pencaloan)</p> <p>Adanya petugas yang memfasilitasi pencaloan</p> <p>Kurangnya pengawasan salah satunya disebabkan oleh tidak berfungsinya cctv sebagai alat bantu dalam pengawasan</p>
Masih belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan.	Belum tersampainya informasi administrasi kependudukan kepada lapisan masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi kepada aparat dan masyarakat
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
		Masih kurangnya masyarakat yang melek IT dalam mengakses informasi pelayanan adminduk
	Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen pencatatan sipil
		Kualitas database kependudukan yang belum valid, salah satunya adalah masih banyaknya data ganda
	Banyaknya data anomali dan data ganda serta data yang non aktif (tidak mengalami perubahan selama 5 tahun) yang harus diolah dan disinkronisasikan	
	Kurangnya pemahaman dari petugas registrat desa dan masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen dalam keakuratan data	
	Banyaknya petugas registrat desa yang diganti dikarenakan tidak adanya regulasi terhadap pemerintahan desa	
	Petugas registrat desa yang baru minim akan pemahaman tentang administrasi kependudukan	
Wawasan atau pengetahuan yang diberikan ke petugas registrat desa sebelumnya jarang dialih teknologikan ke petugas registrat desa yang baru		
Terlambatnya Data Kependudukan yang disajikan kepada pengguna data dan masyarakat	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Kemendagri per semester terlambat disampaikan ke Disdukcapil	
Belum Optimalnya pendataan penduduk non permanen	Belum maksimal data penduduk non permanen	
Belum optimalnya pendataan akta nikah	Belum optimalnya koordinasi dengan kementerian Agama	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021



G. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat dua masalah pokok yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa dalam

mencapai kemandirian desa dan belum optimalnya pemanfaatan potensi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-13
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa dalam mencapai kemandirian desa	Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa.	Belum optimalnya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi
	Belum optimalnya peran lembaga desa dalam pemerintahan desa.	Belum optimalnya kepatuhan terhadap regulasi
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset desa .	Belum optimalnya kapasitas kepemimpinan di desa
	Pergantian personil perangkat desa.	Pilkades sebagai proses suksesi kepemimpinan di Desa rawan konflik
	Belum optimalnya Proses perencanaan di desa	1. Belum optimalnya data profil desa 2. Belum terjalannya kerja sama antar desa 3. Belum tetapkannya batas wilayah antar Desa
	Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pembangunan Perdesaan	Belum optimalnya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi
	Belum optimalnya pembagian peran aparatur pemerintah desa sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan	Rendahnya nilai gotong royong masyarakat Belum optimalnya regulasi
Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa	Belum optimalnya peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat di pedesaan	1. Belum optimalnya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi 2. Pengurus Bumdes rentan berganti dan tidak berkelanjutan
	Kompetensi SDM Pengelola BUMDes dinilai masih kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan BUMDes	1. Belum optimalnya kerjasama antar desa maupun pihak ke tiga 2. Tenaga pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) belum efektif 3. belum ada indikator khusus untuk Bumdes
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pemasaran produk unggulan desa	Setiap penggantian kepala desa berdampak pada perubahan kepengurusan
	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kurangnya pemahaman pemerintah desa maupun masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	Belum optimalnya peran pemerintahan desa.	
	Kekayaan desa belum dikelola (diamankan) dengan baik	Belum semua Desa mempunyai Perdes kewenangan desa
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa	Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan desa Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Desa belum bisa dilaksanakan dengan baik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

H. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana terdapat satu masalah pokok yaitu

pengendalian peningkatan jumlah penduduk belum optimal. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-14
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengendalian peningkatan jumlah penduduk belum optimal	Masih tingginya angka pernikahan usia dini.	Belum mempunyai data kependudukan yang lengkap sesuai yang dibutuhkan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
	Materi penyuluhan belum sepenuhnya sesuai dengan berdasarkan analisa dan segmentasi sasaran	Isi pesan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan Advokasi belum sesuai dengan analisa dan segmentasi sasaran.
	Intensitas penyuluhan masih kurang	Para petugas lapangan belum mempunyai data yang valid dan lengkap sebagai bahan operasional di lapangan
	Pelayanan MKJP (IUD dan Implant) belum optimal	Adanya keharusan membayar karena di Dinas Kesehatan adanya Tarif BLUD yang dinyatakan pada Perbup Tahun 2019 tentang layanan (termasuk IUD) pemasangan/lepas tanpa penyakit harus bayar (Rp. 50.000) dengan penyakit harus bayar (Rp. 70.000)
	Operasional untuk paguyuban yang tidak tentu sesuai dengan yang ada di DPA	Kegiatan KIE tidak akan optimal sehubungan dengan anggaran kegiatan yang tidak ada

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

I. Bidang Perhubungan

Pada bidang perhubungan terdapat tiga masalah pokok yaitu tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS), rendahnya penggunaan kendaraan umum

dan belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah

Tabel 4-15
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS)	Luas jalan dari tahun 2013 tidak bertambah dengan road density 5,4%	Adanya perubahan guna lahan yang berdampak pada bangkitan dan tarikan lalu lintas
	Adanya peningkatan jumlah perjalanan dengan trip rate >3	
	Terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki VCR > 0,6	Pembangunan jalan tidaksebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang ada di jalan
	Indeks aksesibilitas rendah	Adanya kemudahan dalam mendapatkan kendaraan pribadi
Rendahnya penggunaan kendaraan umum	Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor	Luas jalan kecil, volume lalu lintas tinggi
	Rendahnya kualitas layanan	Adanya kemudahan dalam mendapatkan kendaraan pribadi
		Jumlah kendaraan umum



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	angkutan umum	terbatas yang berdampak pada peningkatan waktu tunggu Rute kendaraan umum tidak menjangkau semua daerah
Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor	Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Adanya keterbatasan lahan dan kendala dalam pembebasan lahan
	Belum memadainya ketersediaan ruang operasional terminal (kapasitasnya baru 53%)	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

J. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada bidang komunikasi dan informatika terdapat dua masalah pokok yaitu belum optimalnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan

informasi publik dan belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-16
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Komunikasi Dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Perangkat daerah belum membudayakan transparansi dan akuntabilitas	Perangkat daerah belum memahami keterbukaan informasi publik
		Pengelola dokumentasi tidak sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan
		Sarana prasarana pendukung di perangkat daerah belum sesuai kebutuhan
		Masih ditemukannya aduan / informasi / aspirasi publik melalui layanan aduan terintegrasi masyarakat yang tidak direpson Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Fungsi diseminasi informasi dan komunikasi publik belum mendorong peningkatan standar hidup masyarakat	Kabupaten Bandung belum memiliki City Branding yang mengakar ke seluruh sektor kehidupan masyarakat
		Kurang kapasitas dan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan diseminasi informasi
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya penyelenggaraan APTIKA (Aplikasi dan Informatika)	Belum Optimalnya Implementasi Regulasi dan Kebijakan Aptika
		Belum optimalnya tatalaksana layanan infrastruktur TIK
		Belum Optimalnya implementasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya integrasi Aplikasi dan Pengelolaan Database Aplikasi
		Belum Optimalnya Digitalisasi penunjang Ekosistem TIK
		Masih Terbatasnya kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia TIK
		Belum Optimalnya NSPK (Norma, Standar, Kriteria, Prosedur), Pengelola Layanan Pusat Data, Pengelola Layanan Pusat Pemulihan Bencana (DRC), Pengelola Layanan Webhosting dan Domain bandungkab.go.id, Pengelola Jaringan Intra Pemerintah, Pengelola Jaringan Komunikasi Pemerintah
	Belum optimalnya layanan Infrastruktur TIK di Kabupaten Bandung	Belum optimalnya layanan Jaringan Intra Pemerintah
		Belum optimalnya layanan Pusat Data ; Layanan Pusat Pemulihan Bencana (DRC); Layanan Webhosting dan Domain bandungkab.go.id

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

K. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat tiga masalah pokok yaitu masih rendahnya kualitas dan produktivitas usaha koperasi, belum

optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi koperasi dan umkm dan belum optimalnya kapasitas umkm sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-17
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Masih rendahnya kualitas dan produktivitas Usaha Koperasi	Masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif	Belum optimalnya pendataan koperasi dan penertiban koperasi	
	Masih banyaknya koperasi yang tidak tertib administrasi	Kurangnya pemahaman SDM koperasi terhadap administrasi Koperasi	
	Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai kaidah perkoperasian	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan koperasi	
	Pengelolaan koperasi masih dilakukan secara konvensional	Fasilitasi Digitalisasi koperasi belum optimal	
	Keterbatasan SDM Koperasi dalam mengakases teknologi informasi	SDM koperasi yang tidak mau beralih ke digital	
	Masih Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif pada koperasi	Keberadaan sarana dan prasarana teknologi belum dimanfaatkan secara optimal	
	Masih belum kurangnya SDM koperasi yang kompeten	Kurangnya pendidikan terhadap anggota koperasi	
	Masih kurangnya pendampingan terhadap koperasi	Masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas diklat perkoperasian	
	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi dan lembaga lain	Belum optimalnya kemampuan koperasi untuk menjangkau akses pasar	Terbatasnya SDM yang tersedia untuk melakukan pendampingan
			Kurangnya informasi/ fasilitas yang tersedia
		Masih banyak koperasi yang tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		untuk ke lembaga keuangan/ permodalan
	Belum optimalnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan	Banyak unit usaha koperasi yang masih berada dalam zona nyaman dan tidak melakukan inovasi
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UMKM	Belum optimalnya koperasi dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan produk dan layanan bagi anggota	
	Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholder koperasi	Masih adanya ego sektoral antar OPD
	Database yang dimiliki belum lengkap dan valid	Pengelolaan data yang tidak dilakukan dengan baik
	Masih kurangnya pendampingan terhadap koperasi	Terbatasnya SDM yang tersedia
	Masih belum optimalnya fasilitasi <i>business matching</i>	Masih kurangnya dari sisi kuantitas
	Belum adanya PERDA UMKM	Perda UMKM masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD
	Kurangnya pendampingan dan layanan bisnis bagi UMKM	Terbatasnya ASN yg ada di Dinas
	Masih kurangnya personil ASN dalam pemberdayaan dan pendampingan UMKM	Banyaknya UMKM yang belum memenuhi persyaratan administrasi
	Kurangnya fasilitasi terhadap lembaga permodalan/ pembiayaan	Belum adanya sarana dan prasarana untuk sentra produk UMKM
	Kurangnya sentra produk-produk UMKM	Masih kurangnya sosialisasi kepada UMKM terkait fasilitasi sertifikat produk
	Masih banyak UMKM yang belum terfasilitasi sertifikat produk (Halal, HAKI, PIRT)	Belum adanya sarana mobil promosi
	Kurangnya pendataan UMKM secara menyeluruh	
	Kurangnya saran dan prasarana informasi dan promosi	
Belum Optimalnya Kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Masih kurangnya kapasitas SDM pelaku UMKM dalam pengembangan produk	Banyak para pelaku umkm yang masih berpendidikan SD, SMP dan SMA dan belum mendapatkan peatihan bisnis
		Masih belum optimalnya pelatihan bagi pelaku UMKM
		Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi informasi
		Perekrutan tenaga kerja berdasarkan kerabat dekat, bukan berdasarkan keahlian
	Masih kurangnya kemampuan manajemen usaha UMKM	Usaha merupakan turun temurun dari orang tua
	Kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi target produksi sesuai permintaan pasar	Kekurangan modal dan sarana prasarana tidak mendukung untuk produksi banyak
	Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM	Perputaran penjualan sedikit sehingga margin yang didapat kurang
	Belum optimalnya kemampuan UMKM dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan	Banyak UMKM yang tidak bisa melengkapi administrasi ke lembaga keuangan
		Promosi tentang pentingnya sertifikat produk bagi UMKM kurang maksimal
	Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi produk	Sarana dan prasarana yang tersedia belum optimal
	Banyaknya supplier sehingga meningkatnya harga bahan baku	



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kualitas packaging produk yang masih belum menarik	
	Keterbatasan bahan baku yang tersedia	Beberapa bahan baku sulit didapatkan atau musiman
	Terbatasnya kemampuan pelaku UMKM dalam menjangkau akses pasar	Kurangnya informasi yang diperoleh oleh UMKM terkait akses pasar dan jaringan usaha
	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran UMKM	Tidak semua UMKM dapat terfasilitasi dalam bazar dan pameran
		Masih kurangnya fasilitasi promosi melalui pameran, bazaar, online market
	Pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk yang sejenis	Kurangnya inovasi dalam meningkatkan kualitas dan layanan produk
Masih kurangnya <i>business matching</i>	Kurangnya pemetaan potensi dan kebutuhan	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

L. Bidang Penanaman Modal

Pada bidang penanaman modal terdapat tiga masalah pokok yaitu belum optimalnya data peluang investasi di kabupaten bandung, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha

terhadap LKPM. (laporan kegiatan penanaman modal) dan terbatasnya SDM dan infrastruktur pelayanan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah

Tabel 4-18
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya data peluang investasi di Kabupaten Bandung	Potensi Peluang investasi yang dipromosikan belum didukung dengan data yang lengkap dan akurat dalam bentuk Feasibility Study (FS)	Data Peluang Investasi di Kabupaten bandung belum akurat
Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap LKPM. (laporan kegiatan penanaman Modal)	Belum seluruhnya pelaku usaha menyampaikan LKPM.	Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terhadap LKPM.
Terbatasnya SDM dan infrastruktur pelayanan	Pelayanan PTSP belum optimal karena keterbatasan SDM dan infrastruktur pelayanan	Kualitas Pelayanan PTSP belum optimal karena keterbatasan SDM dan infrastruktur pelayanan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

M. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada bidang kepemudaan dan olahraga terdapat tiga masalah pokok yaitu belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, masih kurangnya prestasi

bidang olahraga di kabupaten bandung dan belum meratanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-19
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Belum Optimalnya kegiatan fasilitasi kegiatan Kepemudaan	Terbatasnya Anggaran dan SDM untuk memfasilitasi kegiatan Kepemudaan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih Rendahnya Pembinaan Terhadap Organisasi Kepemudaan	Tidak terakomodir untuk dilakukan Pembinaan secara menyeluruh
	Kurang Optimalnya Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Tidak adanya Fasilitas Digital yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh Pemuda
	Diperlukannya Peningkatan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda	Belum Optimalnya Sosialisasi Program dan Pelatihan secara berkala
	Masih Lemahnya Pembinaan Profesionalisme Kepemudaan	Kurang Optimalnya Sosialisasi dan Pembinaan mengenai Profesionalisme Kepemudaan
	Masih Rendahnya Peningkatan Perluasan Akses Sarana Prasarana Kepemudaan	Kurangnya Fasilitas Kegiatan Kepemudaan, hanya dibeberepa bagian saja yang sudah memiliki Fasilitas Kepemudaan
	Belum Optimalnya Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Terbatasnya Anggaran dan SDM
Masih kurangnya prestasi bidang Olahraga di Kabupaten Bandung	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Belum Tersedianya Data Keolahragaan Rekreasi : Tenaga Ahli Keolahragaan, Saprass Keolahragaan, Klub/Sanggar/Perkumpulan Keolahragaan, Jumlah masyarakat yang aktif Berolahraga (APMO = Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga)
	Tidak meratanya peningkatan atlet pelajar di setiap kecamatan.	Atlet pelajar masih didominasi oleh sekolah-sekolah yang terletak dipertanian.
	Kurang meratanya peningkatan Kualitas pelatih dan instruktur di setiap kecamatan	Masih kurangnya pelatih yang memiliki lisensi yang sesuai dengan cabang olahraga yang ampunya. Minimnya regenerasi pelatih
	Prestasi atlet pelajar kurang berkembang	Sarana dan Prasarana olahraga di setiap kecamatan yang belum memiliki berstandar
	Peningkatan Pemerataan SDM Sarjana Pendamping Pengerak Olah Raga	Terbatasnya kuota sarjana pendamping
	Kerjasama Peningkatan Olahragawan berbakat dan berprestasi melalui Bimbingan Teknis Insan Olahraga.	Pelaksanaan Bimtek hanya 1 hari, karena Bimtek memerlukan pendalaman Materi dan Test Kebugaran (Lab. Keolahragaan)
	Belum terakomodirnya Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat pada Paguron-Paguron Pencak Silat.	Pelaksanaan Seleksi Festival Pencak Silat IPSI Kab. Bandung hanya 1.hr tidak sebanding dengan jumlah paguron sekitar 150 yang diakomodir oleh DPC IPSI di 31 Kecamatan
	Belum optimalnya Pembinaan pada bidang Olahraga Prestasi	Belum Adanya Peraturan Bupati Bandung tentang: Pembinaan Atlet Berprestasi , penghargaan jenjang karir, kejuaraan daerah Belum Tersebarannya Sarana dan prasarana Olahraga di Wilayah untuk pembinaan Olahraga
	Pembinaan Tenaga Keolahragaan masih kurang	Masih Terbatasnya Kopetensi tenaga Ahli Keolahragaan yang di Kabupaten Bandung Belum terselenggaranya pemusatan pelatihan untuk atlet berprestasi Belum Tersedianya Database Keolahragaan di Kabupaten Bandung
	Belum meratanya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Bandung	Belum Tersedianya Sarana dan prasarana Olahraga yang sesuai dengan potensi 1. Sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan olahraga prestasi di



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kewilayahan	kewilayahan masih terbatas, dikarenakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di haruskan di lahan milik pemerintah daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

N. Bidang Statistik

Pada bidang terdapat satu masalah pokok yaitu belum terpenuhinya standar kualitas data statistik.

Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-20
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhinya standar kualitas data statistik	Belum Optimalnya Pengumpulan data Statistik	Data yang dihasilkan oleh Perangkat daerah kurang akurat dan konsisten
		Belum adanya portal data yg mendukung terwujudnya satu data
		Perangkat Daerah harus mengimput atau entri data pada lebih 1(satu) aplikasi
		Adanya perbedaan data pada beberapa Perangkat Daerah
		Data masih banyak yang belum menyajikan secara seri shg sangat menyulitkan dlm pengolahan Analisa
		Data belum semuanya memenuhi kebutuhan untuk perencanaan pembangunan
		Belum adanya standarisasi dalam penyajian dan pelaporan data statistik
		Belum optimalnya pengelola data statistik di perangkat daerah
		Masih rendahnya pemahaman terhadap Data statistik Sektoral
		Belum optimalnya pelaksanaan Forum Data
	Belum Optimalnya Pengolahan Analisis data Statistik	Belum adanya portal data yg mendukung terwujudnya satu data
		Perangkat Daerah harus mengimput atau entri data pada lebih 1(satu) aplikasi
		Adanya perbedaan data pada beberapa Perangkat Daerah
		Belum Adanya Standarisasi & metadata
		Masih kurangnya data untuk mendukung pengolahan analisa
		Data masih banyak yang belum menyajikan secara seri shg sangat menyulitkan dlm pengolahan Analisa
Belum Optimalnya Penyajian dan Pelaporan data Statistik	Belum ada Pedoman yg mengatur secara implisit terhadap pelaksanaan kegiatan bid.statistik	
	Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana dan Prasarana	
Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana dan Prasarana	Sumber Daya manusia (SDM) yang terbatas	
	Kurangnya fasilitas pelatihan / pendidikan	
	Ruangannya masih belum memenuhi kriteria yang nyaman	
		Kurangnya fasilitas pelatihan / pendidikan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021



O. Bidang Persandian

Pada bidang persandian terdapat satu masalah pokok yaitu belum Optimalnya Penyelenggaraan

Persandian untuk Pengamanan Informasi. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-21
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Belum ada kebijakan tata kelola Keamanan informasi dan persandian	Masih kurangnya peraturan/regulasi sebagai bentuk kebijakan tata kelola manajemen operasional keamanan informasi dan persandian
	Masih Kurangnya tingkat Keamanan informasi dan persandian	Kurangnya SDM dalam bidang keamanan informasi dan persandian
		Kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada interal Perangkat daerah terkait keamanan informasi dan persandian
		Kurangnya sarana dan prasarana di bidang keamanan informasi dan persandian

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

P. Bidang Kebudayaan

Pada bidang kebudayaan terdapat tiga masalah pokok yaitu belum optimalnya pelestarian cagar/situs budaya, belum optimalnya pelestarian

seni budaya lokal, dan belum optimalnya pelestarian Seni Budaya Lokal. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-22
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelestarian cagar/situs budaya	Kurangnya Pemeliharaan Situs / Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	banyaknya situs dan cagar yang masih milik pribadi sehingga menyulitkan intervensi dari pemerintah
Belum optimalnya pelestarian Seni Budaya Lokal	Kurang Apresiasi Terhadap Seniman dan Budayawan Lokal	Masih Kurangnya Minat Generasi Muda terhadap pelestarian Seni dan Budaya Lokal
	Masih Banyaknya Lingkung Seni / Kelompok Seni yang belum berbadan Hukum dan belum memiliki SK Penetapan	Padepokan Seni belum memiliki legalitas dari kemenhukam sehingga bantuan-bantuan terhambat, rencananya akan diadakan program bantuan untuk pengurusan legalitas kepada kementerian.
	Belum adanya Data Akurat tentang kebutuhan data seni dan budaya di Kabupaten Bandung	Belum adanya Pendataan ke lapangan terkait data seni budaya yang ada di Kabupaten Bandung baik di lihat dari jumlah maupun jenis seni budaya serta lokasi kelompok seni budaya tersebut
Belum terintegrasinya potensi kepariwisataan di Kabupaten Bandung	Belum adanya Asosiasi Travel kabupaten Bandung sebagai salah satuendorong Pariwisata kabupaten Bandung	Belum di bentuknya ASITA Kabupaten Bandung
	Belum adanya paket wisata yang terpadu	Belum di buatnya Paket Wisata terpadu di kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Q. Bidang Perpustakaan

Pada bidang perpustakaan terdapat satu masalah pokok yaitu Belum optimalnya penyelenggaraan

perpustakaan wilayah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Berikut



merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-23
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan wilayah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan minat baca masyarakat	Jumlah perpustakaan desa belum semua terbina	Pembinaan pustakawan di desa belum berkelanjutan, terhalang oleh penggantian kepala desa sehingga perlu pembinaan ulang.
	masih adanya aset perpustakaan banyak yang hilang	lemahnya manajemen data dari pengelola terdahulu
		laporan wakaf buku yang berasal dari CSR belum terdata dengan baik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

R. Bidang Kearsipan

Pada bidang kearsipan terdapat satu masalah pokok yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip

dinamis oleh perangkat daerah. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-24
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis oleh perangkat daerah	Pengelolaan arsip belum terlalu diperhatikan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah	Belum ada regulasi terkait kearsipan yang lebih tematik
		Belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan aplikasi SiDokter dengan baik sesuai peraturan kepala ANRI no 37/2016

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.1.3 Urusan Pilihan

A. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada bidang kelautan dan perikanan terdapat satu masalah pokok yaitu masih belum optimalnya

sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-25
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Kelautan Dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.	Tingginya harga sarana prasana produksi perikanan.	Masih rendahnya minat masyarakat untuk memakan produk perikanan
	Masih belum optimalnya PIM (Pasar Ikan Modern) sebagai simpul distribusi pangan.	
	Tingginya pencemaran lingkungan terutama air yang menjadi sarana utama untuk budidaya dan pemeliharaan ikan.	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021



B. Bidang Pariwisata

Pada bidang pariwisata terdapat dua masalah pokok yaitu masih belum maksimalnya pengembangan daya tarik wisata di kabupaten

bandung, masih kurangnya aksesibilitas dan amenitas dalam mendukung kegiatan pariwisata. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-26
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum maksimalnya pengembangan daya Tarik wisata di Kabupaten Bandung	Belum banyaknya produk oleh-oleh yang menjadi ciri khas kabupaten Bandung.	Masih kurangnya kreatifitas warga lokal dalam mengembangkan produk potensi daerah yang menjadi ciri khas dan menggambarkan kabupaten Bandung
	Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu	Belum adanya Konten Pemasaran yang menyajikan Daya tarik Pariwisata dan Budaya Secara Terpadu
	Minimnya pengembangan daya tarik wisata baru	Minimnya Lahan untuk pengembangan daya tarik wisata baru di kabupaten bandung karena mahalnya investasi di sektor pariwisata
Masih kurangnya aksesibilitas dan amenitas dalam mendukung kegiatan pariwisata.	Sarana dan Prasana Pendukung di sekitar objek wisata belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan	Belum optimalnya integrasi daya tarik wisata dan sarana pendukung pariwisata di kabupaten Bandung.
	Mahalnya tarif penginapan dan hotel serta kurangnya pusat kuliner yang mumpuni di Kabupaten Bandung.	Kurangnya Pengunjung ke hotel yang ada di Kabupaten Bandung
	Kurangnya SDM lokal dengan keahlian di bidang pariwisata.	Belum Optimalnya dukungan pendidikan di bidang pariwisata
	Masih terjadinya Kemacetan jalan menuju objek wisata khususnya di hari libur	Aksesibilitas menuju Objek Wisata Kabupaten Bandung masih belum sesuai harapan (Jalan Kondisi baik dan Kapasitas Jalan yang belum bisa memenuhi kebutuhan Wisatawan)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

C. Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian terdapat tiga masalah pokok yaitu produktivitas budidaya pertanian masih belum optimal, budidaya pertanian yang belum ramah

lingkungan, dan masih kurang optimalnya kualitas dan kuantitas sdm petani. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-27
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Produktivitas budidaya pertanian masih belum optimal	Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian	Kurangnya modal usaha
		Pemahaman petani untuk penggunaan teknologi masih kurang
	Masih tingginya biaya produksi budidaya pertanian	Akses terhadap benih/bibit berkualitas terbatas
		Tingginya biaya sarana produksi pertanian
	Rendahnya kapasistas budidaya pertanian	Tingginya biaya tenaga kerja
Kurangnya aksesibilitas ke lokasi budidaya pertanian	Umumnya pelaku budidaya tergolong ke dalam petani gurem (petani subsisten)	
		Masih belum memadai jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk pertanian	Semakin terbatasnya ketersediaan sumber air bagi usaha budidaya	
		Masih kurangnya jumlah infrastruktur irigasi teknis	
		Masih kurangnya jumlah embung	
		Terbatasnya ketersediaan dam parit yang memadamai.	
	Kualitas produk panen dan pasca panen masih rendah		Masih tingginya tingkat kehilangan produk panen pada saat panen
			Keterbatasan sarana pertanian ditingkat pasca panen
	Berkurangnya luas lahan pertanian		Meningkatnya kebutuhan lahan perumahan, perindustrian, dan infrastruktur jalan
			Belum optimalnya sosialisasi LP2B
			Berkurangnya kualitas lahan pertanian akibat pola budidaya yang merusak
	Tingginya ancaman hama dan penyakit		Sistem budidaya masih tradisional dan belum menerapkan GAP
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang serangan hama dan penyakit			
Adanya perubahan iklim			
Budidaya pertanian yang belum ramah lingkungan	Masih tingginya ketergantungan petani akan pupuk dan obat-obatan kimia	Kurangnya pemahaman petani terkait dampak penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia jangka Panjang	
		Ketersediaan pupuk organik masih rendah	
		Nilai ekonomi penggunaan pupuk kimia lebih menguntungkan	
	Masih belum optimalnya pengelolaan limbah peternakan		Kurangnya pemahaman petani terkait pengelolaan limbah yang ramah lingkungan
			Keterbatasan infrastruktur dan sarana pengolahan limbah
			Belum adanya jaminan pemanfaatan hasil pengolahan limbah ternak pada sub sektor lainnya.
Masih kurang optimalnya kualitas dan kuantitas sdm petani	Jumlah petani yang berkurang	Pendapatan non pertanian lebih menarik minat.	
		Regenerasi petani rendah	
	Belum optimalnya penyuluhan ditingkat petani		Rasio antara jumlah penyuluh dengan kelompok tani binaan masih timpang
			Kemampuan penyuluh masih tersegmentasi sub sektor pertanian
	Masih kurangnya pemahaman petani terkait penguasaan teknologi pertanian		Kelas kelompok tani pemula masih mendominasi
			Dinamika kelompok tani belum berorientasi bisnis

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

D. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada bidang energi dan sumber daya mineral terdapat satu masalah pokok yaitu regulasi

Kepanasbumian belum ada. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-28

Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Regulasi Keperanasbumian belum ada	Belum keluarnya peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi	Potensi pemanfaatan langsung panas bumi belum optimal.
		Tidak tersedianya dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

E. Bidang Perdagangan

Pada bidang perdagangan terdapat empat masalah pokok yaitu belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis, belum efektif dan efisien pelaksanaan

pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri, belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan dan belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-29

Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis	Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Masih banyak pedagang ditingkat eceran yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang strategis diatas harga eceran tertinggi (het)
		Belum tersedianya data tentang produksi, kebutuhan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
		Mekanisme pemantauan dan pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis belum optimal
		Belum adanya data tentang perdagangan antar wilayah
Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri	Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi	Belum tersedianya data distributor, agen dan penjual eceran pupuk bersubsidi
		Masih lemahnya pengawasan penyaluran pupuk distribusi ditingkat distributor ke pedagang pengecer pupuk.
		Masih lemahnya edukasi tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pupuk bagi distributor, agen dan pengecer pupuk.
		Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi (rdkk) masih belum optimal
Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi & promosi produk, kerjasama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri	Kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk	Kurangnya pengembangan kerjasama kemitraan	
		Kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi & pengenalan produk ke masyarakat luas	
		Masih kurangnya pemasaran produk dalam negeri	
Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan	Masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin	Kurang pengawasan terhadap gudang	
		Gudang tidak terdata dan belum memiliki izin	
		Kurang pengawasan terhadap toko modern	
	Penerima/ pemberi waralaba belum memiliki stpw	Kurang adanya sosialisasi stpw	
		Pelayanan kemetrolagian legal masih belum optimal	Kurangnya sdm penera yang dimiliki
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemetrolagian legal.
Belum optimalnya pelayanan metrologi legal atas permintaan wajib tera ulang (wtu)/oko.			
		Belum terlaksananya pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar pemda/pasar desa secara menyeluruh.	
		Pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (uttp)/barang dalam keadaan terbungkus (bdk) pasca tera/tera ulang belum optimal	
		Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kemetrolagian kepada masyarakat.	
Daya Saing Pasar Rakyat Masih rendah	Sarana dan prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat	Kurangnya pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat	
	Pengelolaan pasar rakyat belum optimal	Masih rendahnya kompetensi pengelola pasar rakyat	
	Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pedagang pasar rakyat	Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	
	Sebagian harga komoditi di pasar rakyat kurang bersaing	Masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	
	Kurang tertatanya pkl di sekitar pasar rakyat		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

F. Bidang Perindustrian

Pada bidang perindustrian terdapat dua masalah pokok yaitu masih rendahnya tingkat daya saing

industri besar dan industri kecil menengah (IKM) dan masih kurangnya IKM berpotensi Ekspor. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-30
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan industri kecil menengah (IKM)	Masih lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri menjadi rendah	Rendahnya tingkat Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri/pelaku IKM
	Bahan baku, barang modal dan bahan penolong masih tergantung pada produk	Masih terbatasnya bahan baku, barang modal dan bahan penolong lokal



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	impor	
	Masih rendahnya penerapan Standar Industri	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha Industri dalam menerapkan standar industri
	Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang rencana pembangunan industri daerah	Belum tersedianya data industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perindustrian Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan.	Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM tentang pengelolaan manajemen keuangan.
	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM	Kurangnya Modal Usaha yang dimiliki IKM
	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku IKM	Kurangnya tingkat pendidikan IKM
	Belum optimal pengelolaan modal/pembiayaan/manajemen usaha	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan IKM
	Belum optimalnya Legalitas Usaha/Legalitas Produk	Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap legal formal
	Belum optimalnya penggunaan media Promosi/Media Sosial	Kurangnya penguasaan IT dikalangan IKM
	Belum terbentuknya asosiasi Industri Per Komoditi IKM	Kurangnya motivasi memebentuk asosiasi per komoditi
Masih kurangnya IKM berpotensi Ekspor	Rendahnya peluang usaha bagi IKM	Belum tersedianya informasi peluang usaha bagi IKM
	Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap bisnis ekspor	1. Kurangnya informasi pasar 2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri 3. Kurangnya modal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

G. Bidang Transmigrasi

Pada bidang transmigrasi terdapat satu masalah pokok yaitu belum optimalnya penempatan

transmigrasi. Berikut merupakan turunan dari masalah pokok tersebut kedalam masalah dan akar masalah.

Tabel 4-31
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Transmigrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penempatan transmigrasi	Terbatasnya kuota pengiriman transmigran	Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan transmigran

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

4.2 Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, selanjutnya diolah menjadi isu-isu besar pembangunan di Kabupaten Bandung. Isu-isu ini selanjutnya akan dianalisis melalui pembobotan untuk menentukan isu mana yang akan menjadi isu strategis di Kabupaten Bandung untuk direncanakan kedalam rancangan lima tahun yang akan datang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pada periode lima tahun yang akan datang. Isu strategis daerah yang dirumuskan harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun

internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka Panjang. Isu strategis ini juga harus bisa memedomani prioritas nasional dan provinsi, RTRW, serta KLHS RPJMD.

4.2.1 Telaah Isu Strategis Internasional

a. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi.

Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang saat ini masih menjadi sektor unggulan nasional maupun Jawa Barat serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

c. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus COVID-19 mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan



perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemi ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagian besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat

maka berdampak menurunnya polusi dan langit pun terlihat biru, kembali cerah sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

4.2.2 Telaah Isu Strategis RPJMN Nasional Tahun 2020-2024

Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Mepedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Penelaahan isu strategis nasional juga perlu diperhatikan dalam menyusun isu strategis daerah.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut.

Tabel 4-32
Isu Strategis Nasional RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024	
Kategori	Isu Strategis
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
Pembangunan Wilayah dan Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan antara wilayah masing tinggi 2. Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah 3. Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal 4. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang 5. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah 6. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien



RPJMN Tahun 2020-2024	
Kategori	Isu Strategis
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan 2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk 3. Pemenuhan Layanan Dasar 4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 5. Pengentasan Kemiskinan 6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
Kebudayaan dan Karakter Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa 2. Belum Optimalnya Pemajuan 3. Kebudayaan Indonesia 4. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti 5. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama 6. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama 7. Rendahnya budaya literasi 8. Belum optimalnya peran keluarga
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau 2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas 3. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Ketahanan Kebencanaan 4. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi 5. Penguatan Konektivitas 6. Infrastruktur Perkotaan 7. Infrastruktur Transformasi Digital
Lingkungan Hidup Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia 4. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim 5. Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah 6. Pembangunan Rendah Karbon
Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya politik tinggi dan rendahnya akuntabilitas dan transparansi Intervensi terhadap penyelenggara pemilu 2. Lemahnya peraturan perundanganbidang politik 3. Rendahnya kualitas implementasi 4. Tingginya potensi ancaman pada kebebasan sipil 5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi Pancasila belum menjadi acuan utama 6. Belum terintegrasinya wawasan kebangsaan 7. Menguatnya ideologi transnasional 8. Lunturnya nilai-nilai pancasila 9. Tingginya potensi ancaman pada kebebasan sipil 10. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi 11. Paradigma komunikasi public 12. Ketergantungan penyiaran terhadap rating 13. Misinformasi dan disinformasi konten digital 14. Ketimpangan masyarakat memahamikonten media 15. Akses informasi yang belum merata danberkeadilan 16. Kualitas pers dan jurnalistik

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah.

Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Keterkaitan misi, arahan Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4-3
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

4.2.3 Telaah Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Telaah isu strategis yang ada pada RPJMD Provinsi Jawa Barat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung. Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut.

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing SDM;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlaku yakni Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD 2005-2025. Tema pada tahapan ini adalah tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka disusun lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan Tema atau fokus pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan adalah:

- 2019: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik
2020: Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik Melalui Percepatan Penanganan

- 2021: Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem
2022: Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian
2023: Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Kabupaten Bandung dalam konteks RPJMD Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan tersendiri sesuai dengan wilayah koordinasi maupun wilayah perencanaan yang menaunginya. Dalam skenario pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada Wilayah Pengembangan, arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung adalah sebagai bagian dari WP Cekungan Bandung (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang) yang pengembangannya difokuskan pada:

1. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan
2. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan
3. Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal
4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri nonpolitif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan. Arahan pengembangan PKL pada WP Cekungan Bandung yaitu Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pangalengan. Selain itu, Kabupaten Bandung termasuk pada Rencana Proyek Strategis Provinsi Tahun 2018-2023 yakni menjadi Kawasan Sains dan Teknologi Kopi Jawa Barat di Pangalengan

4.2.4 Telaah Isu Strategis RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

Sebagai landasan dan acuan, poin-poin dalam RPJPD Kabupaten Bandung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut.

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan
3. Peningkatan kemanan publik dan kesejahteraan sosial
4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
6. Pengendalian penataan ruang dan pertanahan
7. Pengendalian pertumbuhan penduduk
8. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
9. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global
11. Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas
12. Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
13. Ekonomi kemasyarakatan / ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan
14. Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025. Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang

dimiliki, maka visi pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kerta Raharja Tahun 2025”**. Adapun visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang aman dan tertib
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Menciptakan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing

Dalam tahapan keempat pembangunan daerah Kabupaten Bandung di RPJPD Kabupaten Bandung, ditetapkan prioritas pembangunan, yakni **“Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan”**. Dalam kalimat prioritas tersebut terdapat tiga kata kunci utama yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, yaitu perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan; kesejahteraan masyarakat; dan pemerataan pembangunan. Keitga kata kunci ini selanjutnya akan diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD.

Penetapan prioritas pembangunan tahap keempat ini berkaitan dengan tahapan sebelum dan setelahnya. Dimana hasil perwujudan perencanaan pembangunan di tahap ketiga menjadi dasar dalam keberlangsungan implementasi di tahap keempat ini. Keberhasilan dari implementasi pembangunan di tahap keempat kemudian menjadi bahan atau dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di tahap selanjutnya.

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan, maka beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk diterapkan di tahun 2020-2025 (tahap keempat RPJP) antara lain:

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan public
3. Meningkatnya kualitas lingkungan
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan
7. Menurunnya tingkat pengangguran
8. Menurunnya tingkat kemiskinan
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasayarakatan/ ekonomi lokal
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi

4.2.5 Telaah Isu Strategis dan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2025

Selain memperhatikan isu strategis nasional, perumusan isu strategis kabupaten harus juga memperhatikan KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan

terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menghasilkan rekomendasi berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah. KLHS RPJMD Tahun 2021-2025 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Muatan KLHS RPJMD Tahun 2021-2025 terfokus pada 8 (delapan) isu prioritas dan urutannya sebagai berikut:

1. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
2. TPB 2 : Tanpa Kelaparan;
3. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
4. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan;
5. TPB 15 : Ekosistem Darat
6. TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
7. TPB 4 : Pendidikan Berkualitas; dan
8. TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

Selain isu prioritas, KLHS RPJMD menghasilkan rekomendasi terhadap RPJMD Kabupaten Bandung sebagai berikut.

1. Rekomendasi TPB 3 Menjamin Kehidupan Sehat

TPB 3 Menjamin Kehidupan Sehat memuat 5 Isu Strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-33

Rekomendasi terhadap TPB 3. Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Masih kurangnya imunisasi dasar lengkap untuk bayi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pelayanan kesehatan balita, • pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir • Sosialisasi pelayanan vaksin dasar yang aman • Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan • Peningkatan kapasitas petugas pengelola imunisasi • Peningkatan kualitas prasarana dan sarana (<i>coldchain</i>) • Peningkatan sosialisasi mengenai peduli imunisasi kepada stakeholder. • Peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kesehatan. Pembentukan kader kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas melaksanakan Posyandu memberi layanan kesehatan ibu dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Badan Keuangan Aset Daerah • BAPPEDA • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama (terkait BIAS=Bulan Imunisasi Anak Sekolah) • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa DPMD) • DP3KBP3A
Masih tinggi prevalensi tekanan darah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana (tensi meter digital, alat mendeteksi komplikasi dari hipertensi seperti alat laboratorium, foto meter, EKG, alat-alat laboratorium untuk deteksi komplikasi) • Peningkatan kapasitas petugas sesuai SOP • Peningkatan kader POSBINDU PTM, untuk penapisan awal, (screening) 1500 orang ditingkat desa, target tingkat RW (untuk diagnosis dan penanganan) • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan tenaga medis di FKTP /Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskemas) di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut /FKRTL (Rumah Sakit) • Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya (melalui BPJS pemerintah bantuan iuran) • Peningkatan kesadaran masyarakat cakupan UHC (Kepesertaan JKN) • Peningkatan sistem informasi dan pelaporan penyakit tidak menular • Peningkatan sarana fasilitas kesehatan milik swasta • Pemeliharaan alat kesehatan khususnya kalibrasi • Peningkatan peran LABKESDA dalam penegakkan diagnosis penyakit terkait hipertensi • Peningkatan Kesadaran melalui sosialisasi dan implementasi Perda No. 19 Tentang Penanggulangan Penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah • BAPPEDA • DISKOMINFO • SETDA
Tingginya angka kelahiran yang mempengaruhi tingkat Kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan kesehatan • Sosialisasi kesehatan dan pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini • Sosialisasi kepada masyarakat tentang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera • Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera • Peningkatan petugas penyuluh KB (untuk 270 desa dan 10 kelurahan) dan pemberian insentif tenaga penggerak desa • Optimalisasi Aplikasi SASIDUGA (sabilulungan Sistem Kependudukan dan Keluarga) • Meningkatkan upaya preventif melalui pencegahan pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> • DISKES • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) • DISDIK • DISPORA • BAPPEDA • KEMENAG • DISNAKER



Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
	<ul style="list-style-type: none"> usia dini, Penundaan Anak Pertama (PAP), Pembentukan Pusat informasi Reproduksi Remaja (PIKMA), Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pelayanan Sabilulunga Keliling Kecamatan pada perayaan hari2 besar (KB Gratis) 	<ul style="list-style-type: none"> DPMD
Kurangnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medic Peningkatan akses terhadap manfaat layanan BPJS. Memaksimalkan pemanfaatan pajak rokok untuk peningkatan jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) Peningkatan sarana-prasarana kesehatan Peningkatan pendataan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di tiap desa Peningkatan jumlah Supervisor dan Fasilitator Penyediaan SIKS-NG/Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (untuk Data DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan PBI) 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Satlak JKN (BUPATI, SEKDA, ASISTEN, BKPSDM, DINKES, DISDUKCAPIL, DISNAKER, DPMD, DINSOS, RSUD, PUSKESMAS, BAPEDA, TIM TAPD BPJS)
Masih tinggi persentase merokok umum >15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi PERDA Kawasan Tanpa Rokok, dan PERBUB 89/2018 Jo 71/2019, dan Penegakkan hukum melalui satuan tugas penegak KTR Pembentukan Satgas penegak KTR tingkat desa dan kecamatan Menurunkan jumlah perokok pemula dengan sosialisasi bahaya rokok, pada rumah tangga, sekolah maupun lembaga pendidikan dan pemerintahan Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk (upaya berhenti merokok / UBM) di puskesmas dan jaringannya Program upaya kesehatan masyarakat Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati pelarangan reklame atau iklan rokok 	<ul style="list-style-type: none"> DISKES SETDA DISDIK KEMENAG DISPERINDAG Satpol PP Karangtaruna DPMPTSP

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

2. Rekomendasi TPB 2 Menghilangkan Kelaparan

penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

TPB 2 Menghilangkan Kelaparan memuat 1 Isu Strategis dan detail

Tabel 4-34
Rekomendasi terhadap TPB 2 Menghilangkan Kelaparan

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Masih adanya ketidakcukupan pangan (Prevalence of	<ul style="list-style-type: none"> Melestarikan dan menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan model distribusi pangan (Usaha Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kesehatan BPKAD BAPPEDA



Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Undernourishment).	<p>Masyarakat/UPM secara kelompok)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, pengelolaan dan penyaluran pangan • Meningkatkan sentra produk unggulan • Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan • Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, dan kehutanan • Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan • Meningkatkan pengembangan usaha, • sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan • Penyediaan Sistem Informasi Pangan • Pengembangan Lahan Lestari • Pemanfaatan pekarangan rumah untuk pangan • Sosialisasi Alih Pola konsumsi dengan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) • Kajian Kerawanan dan kerentanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • DISDIK • DPMD • DISKOMINFO • Dinas Pertanian

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

3. Rekomendasi TPB 6. Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

TPB 6 Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang

Berkelanjutan memuat 2 Isu Strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-35
Rekomendasi terhadap TPB 6. Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
<p>Masih belum tercapainya akses terhadap layanan sumber air minum layak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas air dengan menjaga kelestarian sumber air permukaan: mata air atau situ. Penetapan sempadan mata air, situ, sungai • Peningkatan kualitas air dengan menjaga daerah tangkapan mata air dari berbagai lahan terbangun. • Pemantauan kualitas air pada sumber mata air situ dan mata air • Meningkatkan pengendalian daya rusak air, melalui pengawasan kegiatan (industri, ternak domestik) sebagai sumber pencemar air sungai • Meningkatkan ketersediaan sumberdaya air pada daerah kriti air melalui sistem , pengelolaan air minum • Penyediaan sarana air bersih, melalui: Konstruksi perpipaan, sumur dalam, konstruksi sumur dangkal, pengembangan sambungan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • Disperkimtan • Dinas PUPR • BKAD • BAPPEDA • Dinas Lingkungan Hidup
<p>Masih belum tercapainya akses terhadap layanan sumber air minum layak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana prasarana Pengelolaan air limbah domestic individu maupun Komunal • Meningkatkan penggunaan tanki septik bersuspek aman oleh rumah tangga • Revitalisasi IPLT Cibeet dan pembangunan IPLT baru • Optimalisasi IPAL Soreang • Peningkatan sosialisasi pengelolaan air limbah dan persampahan kepada masyarakat dan stakeholder • Mendorong keberfungsian UPTD PALD lebih optimal • Mendorong sumber pendanaan lain untuk pengelolaan Air Limbah • <i>Pengawasan dan pemantauan pada daerah sumber pencemar</i> • <i>Meningkatkan pengelolan dan pengembangan system air limbah</i> • “Penyediaan Jamban Sehat dan Tangki Septik untuk 100.000 Rumah Tangga” • “Kredit Sanitasi Pembangunan 50.000 Jamban dan Tangki Septik” • “Penyediaan 1.500 Unit IPAL Komunal Permukiman” • “Revitalisasi dan Pembangunan Baru IPLT dan IPAL” Program 2021: • Penyediaan sarana Sanitasi melalui pembangunan: drainase, IPAL Komunal, MCK, SPAL, Septiktank individu • Perbaikan rumah tidak layak huni • Penataan permukiman 1000 kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • Disperkimtan • Dinas PUPR • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

4. Rekomendasi TPB 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan

TPB 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan memuat 5 Isu Strategis dan



detail penjabaran rekomendasi dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-36
Rekomendasi terhadap TPB 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Masih belum tercapainya penyediaan sarana untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kemiskinan segala bentuk Meningkatkan sumberdaya manusia melalui fasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi dalam bentuk: UMKM Pendanaan untuk pemberantasan kemiskinan Bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu, 	<ul style="list-style-type: none"> Dinkes Disnaker Disdik Dinsos BPKD BAPPEDA
Kurangnya proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses jaminan Kesehatan kesegala lapisan masyarakat melalui peningkatan proporsi jaminan kesehatan dan Pendaftaran peserta oleh Pemerintah Daerah secara mandiri (PD Pemda) Peningkatan distribusi kualitas dan kuantitas sesuai standar SDM pelaksana pelayanan kesehatan secara merata Peningkatan layanan kesehatan: layanan rumah sakit, maupun layanan rawat jalan Sosialisasi terhadap peserta Jaminan kesehatan, terkait ingin berobat pada fasilitas tingkat lanjut Efektifitas jaminan kesehatan bersubsidi sebagai proteksi finansial pada rumah tangga miskin. Penyediaan Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS-NG) Pemberian bantuan Pembayaran Jaminan Kesehatan guru honorer dan pekerja dan keluarga yang di PHK oleh Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinkes Dinsos BKAD BAPPEDA Disnaker Bagian Kesra BPJS (Ketenagakerjaan) DISDUKCAPIL
Belum tercapai persentase 100 % akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan kualitas air minum masyarakat Ketersediaan LABKESDA klinis dan kesehatan lingkungan Meningkatkan sumberdaya masyarakat Meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak melalui penambahan jumlah jaringan pelayanan Pengembangan sumber air minum pedesaan melalui PAMSIMAS Inventarisasi mata air untuk sumber air minum Pengembangan pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan, Peningkatan sumber air melalui pembangunan embung 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Dinas PUPR BBWS Disperkimtan BKAD BAPPEDA
Belum optimal rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah Pembangunan IPAL komunal Peningkatan sanitasi masyarakat; seperti Fasilitas MCK komunal, Sosialisasi pembangunan IPAL Peningkatan kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat (PHBS) Pengawasan dan pemantauan pada daerah sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Dinkes Disperkimtan Dinas PUPR Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup



Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
	pencemar	
Layanan pendidikan bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan pendidikan bagi terutama masyarakat tidak mampu, bentuk pendidikan formal dan informal • Pendataan masyarakat miskin • Sosialisasi pentingnya manfaat pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi daya saing kesetiap desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • Badan Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

5. Rekomendasi TPB 15. Melindungi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

TPB 15 Melindungi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem

Daratan memuat 1 Isu Strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-37

Rekomendasi terhadap TPB 15. Melindungi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Kurangnya lahan RTH 30% dari luas Keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Ruang berwawasan lingkungan hidup • Meningkatkan upaya konservasi dan perlindungan mata air dan sumber-sumber air • Upaya Rehabilitas Hutan dan Lahan • Peningkatan tutupan vegetasi perkotaan • Penyusunan dan penetapan produk hukum terkait lahan kritis dan terlantar serta pengaturan pola tanam • Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem • Sosialisasi dan edukasi pengendalian kerusakan hutan dan lahan • Kemitraan dan penguatan jejaring pengendalian kerusakan lingkungan serta imbal jasa lingkungan • Pemulihan tutupan lahan dan hutan, serta kawasan bekas tambang • Penguatan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • BBWSC • BKSDA • PERHUTANI - KPH Bandung Utara dan Bandung Selatan • PTPN VIII • BPPDAS - KLHK • Penggiat Konservasi • Dinas ESDM Prov. Jabar • Dinas Kehutanan Prov. Jabar • Bappeda Prov. Jabar • Perum Jasa Tirta II • Dinas PSDA Prov. Jabar • BAPPEDA • DINAS LH • DISTAN • DPUTR • DPMD

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025



6. Rekomendasi TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

TPB 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh

dan Berkelanjutan memuat 1 Isu Strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-38

Rekomendasi terhadap TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
<p>Kurangnya akses pelayanan sampah perkotaan yang terlayani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan persampahan • Pengelolaan sampah dengan sistem 3R mencapai segala pelosok. • Sosialisasi dan koordinasi pengelolaan sampah sampah sistem 3 R • Pengelolaan sampah bernilai ekonomi , yaitu organik menjadi kompos untuk pertanian dari upaya produksi kompos sampai pemasaran kompos. Anorganik dengan peningkatan kualitas dan kuantitas Bank Sampah Induk dan BS unit serta fasilitasi penyediaan sarana perdagangan sampah guna ulang • Pengembangan Bank Sampah Tematik • Pengawasan terhadap pengelolaan sampah pada kawasan berpengelola • Penyediaan sistem informasi pengelolaan sampah • Pembentukan Dewan Sampah • Sertifikasi petugas pengelolaan sampah • Penyediaan Pusat Olah Organik (POO) • Pembangunan 4 buah SPA/Stasiun Peralihan Antara (wilayah Baleendah, Rancaekek, Ciparay dan Soreang) untuk mereduksi volume sampah • Penyediaan TPS 3 di setiap Kecamatan • Penyusunan Dokumen Teknis pengelolaan sampah (turunan dari Jakstrada) sampai tingkat desa • Peningkatan fasilitas pengangkut sampah • Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di setiap pelosok • Sosialisasi penyadaran masyarakat, penyadaran formal: edukasi diberikan kepada pendidikan formal (SD,SMP,SMA sederajat) • Penyadaran informal kepada masyarakat yaitu penyadaran masyarakat tentang penanganan sampah berbasis lingkungan hidup • Edukasi pengelolaan sampah pada pendidikan formal • Industri yang menghasilkan sampah perlu pengembangan produk yang memudahkan proses daur ulang, dan mengurangi produk dari plastik • Peningkatan sektor informal dalam penanganan sampah (seperti tukang sampah, pemulung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas LH • Dinas PUPR • BAPPEDA • DISDIK • DPMD

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025



7. Rekomendasi TPB 4. Menjamin Kehidupan Pendidikan yang Inklusif dan Merata

TPB 4 Menjamin Kehidupan Pendidikan yang Inklusif dan Merata memuat 6 Isu

Strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-39

Rekomendasi terhadap TPB 4. Menjamin Kehidupan Pendidikan yang Inklusif dan Merata

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Kurangnya persentase SD Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional Peningkatan akses akreditasi melalui jalur online Peningkatan kualitas dan kuantitas guru Peningkatan standard kurikulum dan bahan ajar serta pengawasan sekolah Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan/fasilitas sekolah: perpustakaan, sarana olah raga, kamar mandi/WC terpisah wanita dan pria, sarana komputer, laboratorium dll Peningkatan kesiapan dan kemampuan Sekolah dalam memenuhi Standar Pendidikan Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kuota Assesment Akreditasi Peningkatan Sekolah Berbudaya Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas LH
Kurangnya Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi secara intensif pentingnya Pendidikan untuk peningkatan sumberdaya manusia yang semakin kompetitif. melalui akses wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun secara terpadu di Sekolah-sekolah TK, SD, SMP sesuai jadwal yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Dinas LH Dinas PUPR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kurangnya Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> Membangun unit sekolah baru, menambah ruang kelas baru, memberikan bantuan operasional sekolah, dan lain-lain Peningkatan fasilitas Pendidikan berserta sarana dan prasarana Peningkatan kualitas pendidik Peningkatan kesejahteraan pendidik Pendanaan yang memadai Pendataan terhadap lulusan SMP yang menganggur maupun tidak menganggur Bantuan pemerintah terhadap masyarakat/siswa miskin Peningkatan pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin (BOSDA) Peningkatan kualitas pelayanan BOSDA 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Dinas LH Dinas PUPR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kurangnya lama	<ul style="list-style-type: none"> membangun unit sekolah rbaru, menambah ruang kelas baru, memberikan bantuan operasional 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Badan Perencanaan



Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	<p>sekolah, dan lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi akses wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun secara terpadu di Sekolah-sekolah TK, SD,SMP sesuai jadwal yang ditetapkan • Menyelenggarakan Pendidikan formal yang bermutu yaitu dari tenaga pendidik dan kurikulum kearah kecakapan hidup/live skill • Pendataan terhadap lulusan TK/SD yang mengganggu maupun tidak mengganggu • Bantuan pemerintah terhadap masyarakat/siswa miskin • akses Pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat penyandang cacat disemua pelosok • Pengendalian faktor sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi RLS (faktor orangtua, fasilitas pendidikan, faktor pembiayaan , nilai pendidikan dan upaya-upaya pribadi) 	<p>Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Masyarakat
Kurangnya Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun unit sekolah baru, menambah ruang kelas baru, memberikan bantuan operasional sekolah, dan lain-lain • sosialisasi akses wajib belajar Pendidikan TK • Meningkatkan penataan kelembagaan PAUD (khususnya dalam perijinan lembaga pendidikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Lembaga Masyarakat
Adanya masyarakat buta aksara	<ul style="list-style-type: none"> • menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara; inventarisasi masyarakat yang belum melek aksara • menyelenggarakan pendidikan nonformal yang bermutu yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan • meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

8. Rekomendasi TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

memuat 2 Isu Strategis dan detail penjabaran rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-40

Rekomendasi terhadap TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
Tingginya tingkat pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja menjadi tenaga terampil siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja • Meningkatkan sarana dan prasarana SDM: pengembangan sarana prasarana balai Latihan kerja untuk meningkatkan SDM sesuai bidang kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • Disperindag • BAPPEDA • Badan Pengelolaan Keuangan



Isu Strategis	Rekomendasi	Stakeholder yang terlibat
	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan perluasan dan pemerataan Pendidikan menengah umum dan kejuruan yang bermutu dan relevan; melalui akreditasi dan peningkatan pendidik serta sarana prasarana. Sosialisasi pentingnya Pendidikan umum dan kejuruan dalam memberikan nilai SDM yang mandiri meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan pasar kerja, serta meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing; menyelenggarakan pendidikan nonformal yang bermutu yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, serta memberikan/meningkatkan kecakapan hidup peserta didik; 	<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> DPMPSTP Diskopukm Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pertanian
Kurangnya Kontribusi Pariwisata terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengembangan parawisata dan produk wisata. Upaya adaptasi perubahan baru: peningkatan protokol Kesehatan pada lokasi objek wisata secara ketat sesuai dengan zona kondisi daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pengembangan produk wisata maupun kuliner dengan alternatif yang berbasiskan offline/online pada masa adaptasi perubahan baru, melalui promosi produk wisata Sistem perdagangan kuliner secara luas jenis usaha melalui koperasi/individu atau fasilitas pemerintah dalam Meningkatkan produk unggulan. Meningkatkan infrastruktur pada objek yang menjadi destinasi wisata, serta peningkatan sarana dan prasarana dan SDM pariwisata Meningkat promosi wisata: melalui pamflet atau transportasi umum, serta media masa 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BAPPEDA Dinas Perhubungan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

4.2.6 Telaah RPJMD Daerah Sekitar Yang Berbatasan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan

RPJMD kabupaten sekitar yang berbatasan yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cianjur sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4-41

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Berbatasan

RPJMD Daerah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
RPJMD Kota Bandung 2018-2023	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan derajat masyarakat Tata kelola pemerintahan Ketimpangan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan TIK



RPJMD Daerah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang 6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan 7. Penanggulangan kemiskinan dan PPKS 8. Sinergitas pembiayaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelesaian Permasalahan layanan Infrastruktur Kota 5. Peningkatan Perekonomian Kota 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan 7. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Angka Kemiskinan 2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka 3. Tigginya ketimpangan pendapatan 4. Tingginya potensi dan kejadian bencana 5. Rendahnya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bertransportasi 6. Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman 7. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup 8. Belum optimalnya kualitas pendidikan 9. Belum optimalnya kualitas kesehatan 10. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial 11. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat 12. Tingginya pertumbuhan penduduk 13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 Lapangan Kerja 2. Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan 3. Gratis Raskin 4. Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP 5. Gratis Izin Usaha Khusus UMKM, Kemudahan Birokrasi 6. Tambahan insentif RT/RW 7. Alokasi Anggaran Rp100.000.000 di setiap RW per Tahun 8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di Setiap Kelurahan 9. Tambahan Penghasilan Guru 10. Tambahan Insentif Guru Ngaji 11. Tambahan Fasilitas dan Insentive Guru PAUD 12. Bebas SPP 13. Keringanan DSP SMU/SMK 14. Kesejahteraan Buruh 15. Kestabilan Keberlangsungan Industri 16. Kemudahan Birokrasi 17. Pengembangan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri 18. Pengembangan Pasar Tradisional 19. Optimalisasi Sarana Olahraga 20. Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimahi 21. 21. Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 3. Peningkatan Aksesibilitas baik Antar Wilayah dalam Kabupaten Bandung Barat maupun Keluar Daerah 4. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat 2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 3. Pengembangan industri pertanian (agroindustri) 4. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat 5. Pengembangan kluster ekonomi di



RPJMD Daerah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
		<p>Bandung Barat yang mengaitkan antara kegiatan ekonomi menengah dan besar dan usaha skala mikro dan kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Revitalisasi industri 7. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan 8. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 9. Pengembangan jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat miskin 10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan 3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik 4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi Dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 5. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Antisipasi Bencana 7. Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman 8. Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses, mutu dan Layanan kesehatan dan Pendidikan 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PPKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam Kehidupan bermasyarakat 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk Penunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi 5. Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan 6. Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata 7. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah 8. Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil 9. Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan 10. Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang 11. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
RPJMD Kabupaten Garut 2019-2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kemiskinan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan angka kemiskinan dan



RPJMD Daerah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
	<ol style="list-style-type: none">2. penciptaan lapangan kerja2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal	<ol style="list-style-type: none">2. perluasan kesempatan kerja2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur8. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah



RPJMD Daerah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah
Perubahan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pembangunan Ekonomi (Peningkatan Daya saing Ekonomi, Pengurangan Tingkat Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah 4. Pembangunan Sosial (Pengembangan masyarakat, Kehidupan beragama dan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah) 5. Pembangunan Sumberdaya Alam, Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup 6. Pembangunan Kewilayahan 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Penerapan Reformasi Birokrasi 8. Pemekaran Wilayah Cianjur Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Sosial Keagamaan 3. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peningkatan Kesehatan 5. Peningkatan Ekonomi 6. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : RPJMD Kabupaten yang Berbatasan

4.2.7 Telaah Pencapaian Sustainable Development Goals 2021-2026

Pengarusutamaan pencapaian SDGs ke dalam perencanaan pembangunan dimulai dengan integrasi SDGs dengan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Di tingkat daerah, indikator SDGs prioritas Kabupaten Bandung disinkronisasi dengan tujuan, sasaran dan indikator RPJMD untuk menjadi acuan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026. Adapun secara lebih rinci, pengarusutamaan SDGs terhadap Renstra PD dilakukan dengan pendekatan yang lebih fokus pada indikator prioritas SDGs Kabupaten Bandung.

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab 2, evaluasi capaian SDGs di Kabupaten Bandung tahun 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator SDGs yang perlu pendataan

maupun perhatian khusus. Pada tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Bandung berupaya menitikberatkan pada formulasi indikator dan *targetting* perencanaan berbasis evaluasi tersebut. Adapun kata kunci indikator untuk setiap pilar SDGs prioritas Kabupaten Bandung yang digunakan dalam pengarusutamaan SDGs di RPJMD adalah sebagai berikut.



Tabel 4-42
Kata Kunci Indikator untuk Setiap Pilar SDGs Prioritas Kabupaten Bandung

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan							
Pilar Sosial		Pilar Ekonomi		Pilar Lingkungan		Pilar Hukum dan Tata Kelola	
1	Kemiskinan, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan akses terhadap pelayanan dasar.	7	Elektrifikasi, jaringan dan penggunaan gas.	6	Layanan air minum, sanitasi, dan fasilitas cuci tangan.	16	Bantuan hukum, WTP, SAKIP, IRB, perempuan di DPRD dan eksekutif, serta akta kelahiran.
2	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	8	PDRB per kapita (nilai dan laju pertumbuhan).	11	Korban bencana.		
3	Proses melahirkan, malaria, merokok, tekanan darah tinggi, obesitas, dan jaminan kesehatan.	9	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	12	Limbah, sampah, fasilitas publik, SPM.		
4	APM (SD), APK (SMP, SMA, PT), dan angka melek aksara.	10	Kemiskinan, desa tertinggal dan desa mandiri, pelanggaran HAM, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.	13	Korban bencana.		
5	Perempuan di pemerintahan dan managerial.	17	Pendapatan dan penerimaan pajak daerah.				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Selanjutnya, setiap pilar dan indikator SDGs dipetakan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Secara lebih rinci, penjabaran mengenai pemetaan indikator SDGs di dalam cascading RPJMD dapat dilihat pada Bab 5.

4.2.8 Telaah Standar Pelayanan Minimal 2021-2026

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah amanat dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan telah ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya melalui Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Pr/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menerapkan SPM Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang Sosial. Berdasarkan capaian-capaian penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2020 sebagaimana telah dipaparkan pada Bab 2, dilakukan evaluasi yang

tertuang pada Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Arah kebijakan pencapaian SPM pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut.

A. Bidang Pendidikan

Berdasarkan permasalahan pada bidang pendidikan, arah kebijakan untuk pencapaian standar pelayanan minimum yaitu:

- Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dengan komitmen guru honor, serta pengangkatan guru P3K
- Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan mengoptimaliskan kualitas pelayanan pendidikan pada lembaga lembaga pendidikan.

B. Bidang Kesehatan

Berdasarkan permasalahan pada bidang kesehatan, arah kebijakan untuk pencapaian standar pelayanan minimum yaitu:

- Membuat alur pelayanan disesuaikan dengan proses (Protokol Kesehatan)
- Penguatan kembali tentang SITB dan Refresh program TBC
- Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang terdistribusi di seluruh wilayah kabupaten.
- Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik) di setiap kecamatan.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengoptimaliskan

- kualitas pelayanan Kesehatan pada sarana-sarana kesehatan.
- Membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama lintas sektor antara instansi kesehatan dengan instansi pemerintah lainnya maupun kerjasama dengan sector swasta merupakan peluang untuk dapat mempercepat proses pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung.
- Meningkatkan penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public melalui berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.
- Advokasi dengan bidang dan instansi terkait dalam penganggaran.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan promosi kesehatan dan Kerjasama lintas sektor terkait.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan permasalahan pada bidang pekerjaan umum, arah kebijakan untuk pencapaian standar pelayanan minimum yaitu:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari

- Menyediakan infrastruktur sumber daya air berwawasan lingkungan sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan,
- Mendorong Pemerintah Untuk Mempercepat pembangunan rencana waduk (Ciwidey, Santosa, Kadaleman, Cibatarua, Citarik dan 5 waduk kecil),

- Melakukan upaya pembebasan lahan Lokasi Mata Air yang saat ini dimiliki oleh Masyarakat untuk dikuasai Pemerintah,
- Melakukan Studi secara komprehensif atas lokasi lokasi yang potensial untuk dijadikan embung dan dilanjutkan dengan pembebasan lahan,
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga daerah tangkapan air,
- Penyusunan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan air baku secara terpadu dengan berbagai multi pihak,
- Memanfaatkan sumber air baku lokal yang terkendali,
- Meningkatkan Program Konservasi pada daerah tangkapan air,
- Edukasi pemanfaatan air secara bijak,
- Gerakan rehabilitasi lahan kritis melalui pembentukan Yayasan Leuweung Sabilulungan bersama tokoh-tokoh lingkungan

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah domestik

- Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dan pembangunan SPAL yang tepat guna dan memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan pemerintah.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sarana air limbah domestik kepada kelompok pengelola dan pemanfaat sarana sanitasi yang telah dibangun
- Perlu dilakukannya pemicuan kepada masyarakat untuk mau membangun sarana sanitasinya secara mandiri dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Perlu dilakukannya revitalisasi IPLT Cibebet dan dibangunnya IPLT yang

berlokasi dekat dengan wilayah pelayanan.

- Menambah armada sedot tinja dan perlunya pembenahan manajemen operasional sedot tinja.
- Mencari peluang pembiayaan-pembiayaan alternatif lain seperti anggaran Pusat, Provinsi, NGO dan swasta (CSR)
- Mendorong pihak swasta berperan aktif dalam investasi sanitasi di Kab. Bandung,
- Meningkatkan intensitas dan kontinuitas sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi,
- Perlunya memaksimalkan media sosial (cetak dan elektronik) untuk mensosialisasikan pentingnya perilaku PHBS.
- Lebih melibatkan perempuan dan semua kalangan di masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sanitasi dimulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan.
- Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sosialisasi secara terus menerus mengenai Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan semua stake holder.
- Perlu ditingkatkannya koordinasi antar perangkat daerah khususnya Pokja Sanitasi dan harus disinergikan semua kegiatan penanganan permasalahan sanitasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan permasalahan pada bidang perumahan rakyat, arah kebijakan untuk pencapaian standar pelayanan minimum yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam.

- Melakukan pendataan rumah yang berada di daerah rawan bencana.
- Melakukan koordinasi dengan pihak BPBD tentang data korban bencana alam sebagai bahan tindak lanjut penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam di Kabupaten Bandung.
- Mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah.

- Melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk menangani penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

E. Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan permasalahan pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, arah kebijakan untuk pencapaian standar pelayanan minimum yaitu:

- Perlu peningkatan sosialisasi dan penanganan pandemi COVID 19 berupa : Jaga jarak, Mencuci tangan, pakai masker dll
- Perlu peningkatan dalam Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

- Perlu peningkatan dalam optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana
- Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
- Perlu peningkatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat barang dan jasa dan keahlian teknis Penanggulangan Bencana (PB)
- Perlu peningkatan dalam sarana komunikasi di daerah
- Perlu peningkatan Akses Jalan oleh Perangkat Daerah/Dinas Teknis baik perbaikan maupun pelebaran sehingga akses masuk ke tempat Kejadian Bencana dapat dilalui
- Perlu peningkatan dalam Sarana dan Prasarana
- Perlu peningkatan dalam Kemampuan Personil baik kualitas maupun kuantitas
- Mendirikan / menambah Pos Pos damkar di 9 kecamatan/WMK, dari semula 3 Pos Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) menjadi 9 Pos
- Mengusulkan tambahan anggaran untuk biaya Operasional, dan kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang mobilitas pemadaman kebakaran yang sangat diperlukan untuk memenuhi Target indikator Kinerja Utama (IKU) Disdamkar pada tahun 2020, yaitu "Prosentase Capaian Tingkat Respon Time Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)" sebesar 75 %, Disdamkar berupaya untuk mencapai target tersebut.

F. Bidang Sosial

Berdasarkan permasalahan pada bidang sosial, arah kebijakan untuk pencapaian standar pelayanan minimum yaitu:

- Melakukan Penjangkauan didampingi para pendamping
- Penegasan dari panitia dan pengarahannya penjelasan lebih rinci tentang jenis bantuannya
- Pergantian peserta dengan Berita Acara

4.2.9 Telaah Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode Tahun 2021-2026

Dalam perumusan isu-isu strategis memperhatikan Rencana Program Strategis Bupati yang meliputi 9 bidang yakni 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Sosial; 4) Ekonomi; 5) Pemerintahan; 6) Keagamaan; 7) Infrastruktur; 8) Pertanian; dan 9) Pariwisata. Selengkapnya, rencana program strategis Bupati adalah sebagai berikut.

A. Pendidikan

1. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini
2. Memenuhi persyaratan sarana pendidikan dasar (SD dan SMP) sesuai standar nasional pendidikan
3. Pengembangan kurikulum muatan lokal
4. Meningkatkan insentif bagi guru honor dan tenaga pendidikan
5. Pembinaan prestasi olah raga pada usia pendidikan dasar dan menengah
6. Memfasilitasi peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk memberi kesempatan belajar kepada penduduk usia 25 tahun keatas



7. Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi
8. Optimalisasi pendidikan karakter yang religius

B. Kesehatan

1. Pemerataan tenaga kesehatan sampai ke fasilitas kesehatan terdepan
2. Pembangunan rumah sakit tipe D
3. Peningkatan kapasitas Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan
4. Peningkatan kapasitas RS rujukan
5. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
6. Fasilitasi Posyandu
7. Optimalisasi vaksinasi Covid-19 masyarakat Kabupaten Bandung
8. Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam rangka pemenuhan *Universal Health Coverage*
9. Optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

C. Sosial

1. Mewujudkan satu data pembangunan daerah yang terintegrasi dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten (termasuk updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2. Menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk Kabupaten Bandung
3. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, Ormas, Pramuka, Karang Taruna, serta Petugas Sosial Masyarakat Lainnya

5. Peningkatan mitigasi dan penanggulangan kebencanaan serta kebakaran
6. Pembinaan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
7. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
8. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan ketahanan keluarga

D. Ekonomi

1. Memfasilitasi bantuan modal bagi Koperasi dan usaha Mikro dalam upaya recovery ekonomi pasca Pandemi Covid-19
2. Pengembangan Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Start Up
3. Perencanaan Pembangunan Pasar Tematik dan rumah komoditas (Konveksi, Seni, Makanan, dan souvenir lainnya)
4. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Modern
5. Perencanaan pembangunan pasar sehat dan pembinaan pengelolaan pasar desa
6. Pembentukan forum CSR untuk mendorong percepatan pembangunan
7. Penguatan pelayanan ekspor komoditi produk Kabupaten Bandung
8. Mendorong kemudahan investasi dan perizinan
9. Petani BEDAS Sejahtera

E. Pemerintahan

1. Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah

2. Meningkatkan ketersediaan layanan jaringan internet untuk mewujudkan smart city
3. Pelayanan KTP, KK, dan Administrasi Kependudukan lainnya 1x24 jam
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan di daerah perbatasan
5. Mendorong Percepatan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang properti
6. Mengkoordinasikan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pusat
7. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan regulasi pemerintah daerah
8. Memfasilitasi pengembangan dan penataan wilayah Bandung Timur
3. Mendorong pembangunan Terminal Tipe A, Terminal Tipe B & Revitalisasi Terminal Tipe C
4. Penertiban dan optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pelayanan dan pendapatan
5. Melakukan revitalisasi dan pembersihan anak-anak sungai yang berpotensi banjir dalam menunjang program Citarum Harum
6. Penyusunan Rencana detail tata ruang Kecamatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
7. Penyediaan fasilitasi perumahan subsidi khusus bagi buruh
8. Pembangunan rumah tidak layak huni
9. Penataan perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan
10. Memfasilitasi sertifikasi dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

F. Keagamaan

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang religius dan berakhlak baik melalui pemahaman dan pengamalan agama secara utuh
2. Meningkatkan fasilitas pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya
3. Pemberian stimulan sarpras keagamaan

G. Infrastruktur

1. Menyelesaikan perbaikan dan peningkatan jalan, pedestrian, jembatan, saluran drainase, TPT dan irigasi
2. Mendorong perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran drainase desa

H. Pertanian

1. Pengembangan sistem basis data lahan pertanian sebagai dasar tindak lanjut sertifikasi lahan pertanian
2. Peningkatan produktivitas lahan pertanian agro
3. Pengembangan komoditas pertanian melalui fasilitasi bantuan pertanian
4. Pengembangan pasar hasil produksi pertanian dan peternakan berbasis digital
5. Penguatan kerjasama dengan Swasta, BUMN, dan Pemerintah dalam mengembangkan pertanian dan peternakan modern
6. Peningkatan infrastruktur pertanian
7. Bantuan risiko harga dan asuransi gagal panen komoditas padi, jagung, dan kedelai

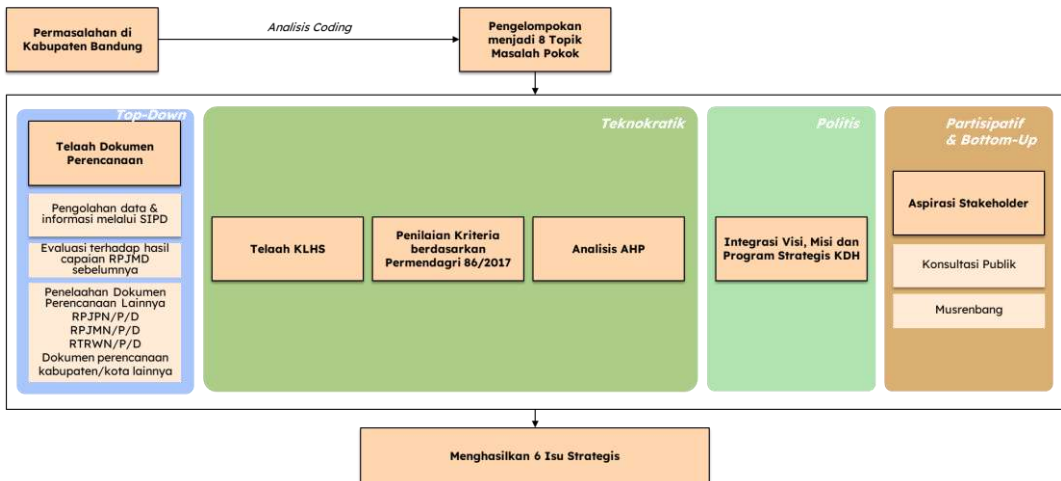
I. Pariwisata

1. Implementasi rencana detail Pariwisata Daerah
2. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata melalui penguatan kerja sama komunitas masyarakat dan pelaku industri pariwisata, pemerintah, serta BUMN untuk revitalisasi prasarana pariwisata
3. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya berskala Nasional dan Internasional
4. Perencanaan pembangunan alun-alun dan Gedung Kreatif Center

5. Penguatan Paguyuban Seni dan Budaya

4.2.10 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Setelah menelaah permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung, faktor eksternal serta isu strategis global, nasional, provinsi, maupun KLHS, berikut adalah diagram alir dalam proses perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.



Gambar 4-4
Diagram Alir dalam Proses Perumusan Isu Startegis

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Isu strategis Kabupaten Bandung meliputi enam kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan lingkungan hidup, ekonomi wilayah, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, dan kebencanaan. Seluruh isu-isu ini tergabung menjadi isu strategis dibawah ini yaitu,

Isu Strategis 1:

Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing

Isu Strategis 2:

Belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan

Isu Strategis 3:



Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing

Isu Strategis 4:

Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan

Isu Strategis 5:

Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah

Isu Strategis 6:

Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan

Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing isu strategis yang telah dijelaskan sebelumnya.

Isu strategis 1: Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam pembangunan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia di suatu wilayah namun di sisi lain aspek sumber daya manusia ini juga mempengaruhi banyak aspek dalam pembangunan suatu wilayah, sehingga sumber daya manusia merupakan aspek yang strategis untuk ditangani. Tiap tahunnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Bandung ada diangka 70,69, sedangkan pada tahun 2019 nilai IPM Kabupaten berada pada angka 72,41. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 72,39. Aspek sumberdaya manusia masih menjadi isu yang strategis di Kabupaten Bandung. Permasalahan aspek sumberdaya terlihat dari

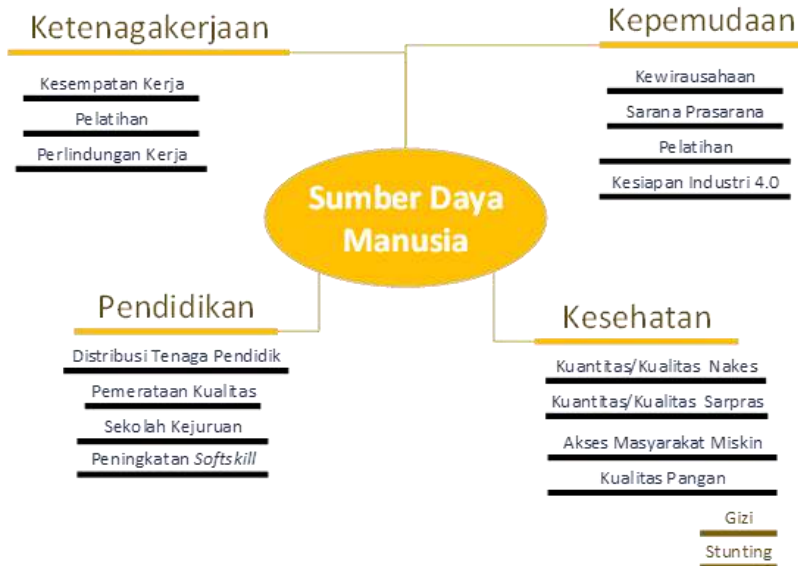
berbagai sisi yaitu sisi Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepemudaan

Dalam hal Pendidikan, permasalahan yang masih dialami adalah kurang meratanya distribusi tenaga pendidik, pemerataan kualitas sekolah, keberadaan sekolah kejuruan dan peningkatan *softskill* masyarakat. Permasalahan dalam hal distribusi tenaga pendidik disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena pengangkatan guru CPNS dalam beberapa tahun terakhir tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada sedangkan disisi lain banyak guru PNS yg pensiun, pengangkatan guru atau tenaga pendidik diluar jalur CPNS masih terkendala biaya, guru honorer yang ada saat ini pun kesejahteraannya masih perlu diperhatikan. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi diatas rata-rata kebanyakan memilih untuk bekerja di pusat kota dibandingkan daerah yang jauh dari pusat kota. Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata ini juga berpengaruh terhadap tidak meratanya kualitas sekolah yang ada di Kabupate Bandung. Kualitas sekolah yang tidak merata ini juga disebabkan oleh belum meratanya sarana prasarana penunjang kegiatan sekolah di Kabupaten Bandung.

.Permasalahan pendidikan yang ada bisa berujung kepada permasalahan ketenagakerjaan. Saat ini Kabupaten Bandung masih memiliki permasalahan dalam hal penyerapan tenaga kerja yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi angkatan kerja, rendahnya kualifikasi angkatan kerja, objek pelatihan yang belum tepat sasaran. Terlebih lagi kondisi pandemi COVID-19 yang memaksa kegiatan belajar mengajar secara daring, mempengaruhi kualitas pendidikan SDM dan berdampak pada kualitas tenaga kerja di masa depan. Hak-hak pekerja dan permasalahan pekerjaan juga masih cukup tinggi. Keberadaan sekolah kejuruan pada awalnya diharapkan dapat membantu dalam percepatan penyerapan tenaga

kerja, namun saat ini keberadaan sekolah kejuruan belum mampu berjalan sesuai dengan potensi

daerah Kabupaten Bandung itu sendiri.



Gambar 4-5
Kerangka Isu Strategis 1
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Dalam hal urusan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam hal produktivitas dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Saat ini permasalahan stunting, penyakit kronis, pandemi COVID-19 dan sebagainya masih tinggi. Belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin serta belum meratanya kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu penyebab aspek kesehatan ini menjadi isu penting. Kepemudaan juga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pemuda sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat mejadi generasi yang lebih baik sebelumnya harusnya bisa mendapatkan dorongan dalam meningkatkan

kemampuannya. Saat ini partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan masih minim, hal ini disebabkan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi untuk segala urusan kegiatan kepemudaan.

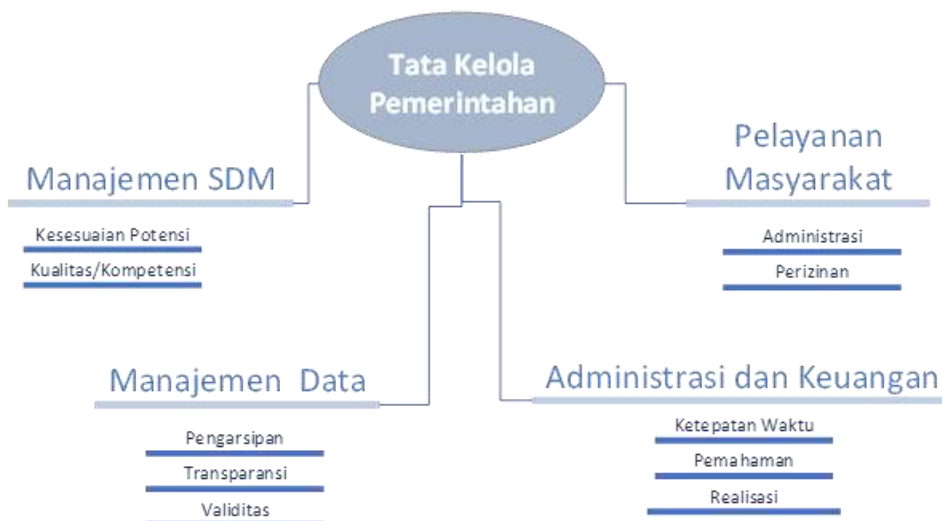
Isu strategis 2: Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan adalah salah aspek mendasar dalam manajerial sebuah kota. Sebuah pemerintahan yang baik harus memegang prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi,



melibatkan stakeholder dunia usaha, konsensus,

akuntabilitas, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas.



Gambar 4-6
Kerangka Isu Strategis 2
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah Kabupaten Bandung masih perlu meningkatkan performanya di beberapa sisi yaitu dalam hal manajemen SDM, manajemen data, administrasi keuangan serta pelayanan masyarakat. Dalam manajemen Sumber Daya Manusia, pemerintah Kabupaten Bandung beserta perangkat daerah terkait masih terkendala dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, beberapa posisi masih diisi oleh sumber daya yang tidak terlalu terkait kompetensinya hal ini akan menjadi masalah terkait kualitas dari kinerja yang dilakukannya.

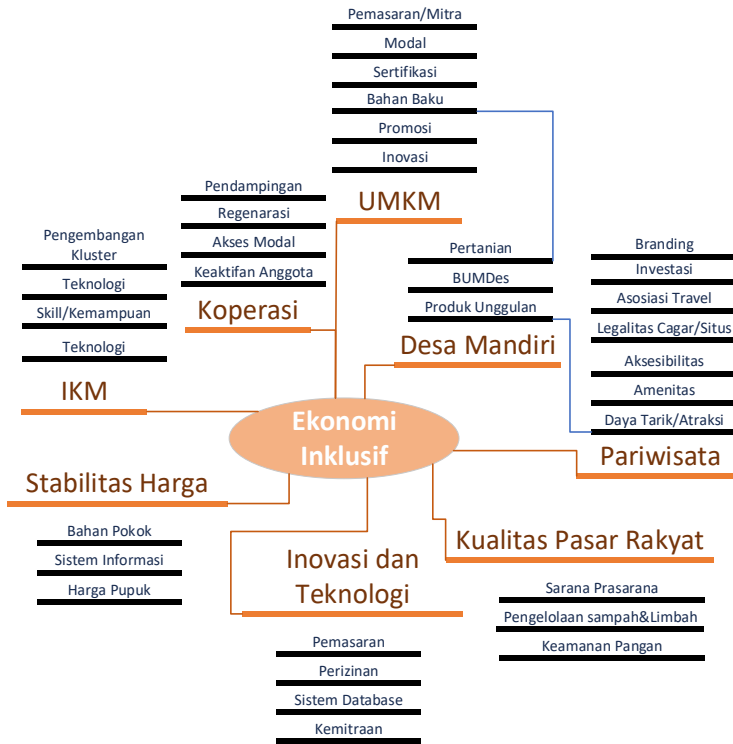
Selain itu dalam hal administrasi dan keuangan, kinerja pemerintah masih terkendala dalam hal ketepatan waktu, pemahaman dan realisasi kinerja yang berhubungan dengan prinsip efisiensi

dan efektifitas dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik. Dalam hal pelayanan masyarakat juga meskipun sudah baik dalam beberapa urusan seperti administrasi kependudukan, namun hal-hal lain seperti terkait perizinan dan lainnya masih terkendala dari sisi kepuasan dan kemudahan akses masyarakat. Faktor yang strategis lainnya dalam hal tata kelola pemerintahan adalah manajemen data. Manajemen data seperti validitas, transparansi dan pengarsipan data seharusnya menjadi hal dasar dalam melakukan kegiatan, dengan data yang valid maka ketepatan dampak yang diharapkan bisa terjadi. Selain itu, penyampaian informasi juga penting agar semua perencanaan yang terjadi bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa dikawal bersama.

Isu strategis 3: Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing

Konsep ekonomi inklusif adalah suatu upaya untuk menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Ekonomi inklusif ini ditopang oleh tiga pilar yaitu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim. Pemerataan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat masih belum bisa dicapai dan menjadi permasalahan di Kabupaten Bandung. Permasalahan perekonomian di Kabupaten

Bandung adalah belum meratanya kesempatan setiap lapisan masyarakat untuk berkontribusi kepada perekonomian di Kabupaten Bandung. Belum meratanya kesempatan kerja ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kemampuan dan kompetensi masyarakat, belum tepat sarannya pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, rendahnya kualitas dan produktivitas usaha koperasi, belum optimalnya kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing industri kecil menengah serta belum optimalnya perkembangan pariwisata.



Gambar 4-7
Kerangka Isu Strategis 3
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Ketidakmerataan peluang ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Bandung selain disebabkan

oleh faktor internal dari kemampuan sumberdaya manusianya itu sendiri tapi terpengaruh juga oleh

faktor eksternal seperti revolusi industri 4.0 dan transformasi ekonomi digital yang belum optimal terlebih di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah, masyarakat, dan bisnis diharuskan beradaptasi dan berinovasi pada tatanan baru dengan protokol kesehatan. Transformasi digital yang inklusif perlu diterapkan untuk kreasi nilai tambah ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Faktor eksternal lain juga menyebabkan ketidakmerataan peluang ekonomi seperti stabilitas harga, ketahanan pangan, dan kualitas pasar rakyat. Pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Beberapa harga pokok yang naik dalam musim tertentu maupun dalam waktu yang tidak diduga disebabkan salah satunya oleh tidak terjaganya bahan pokok yang saling mempengaruhi dari sistem ketahanan pangan yang ada. Selain itu, transparansi dan distribusi informasi dalam hal harga-harga kebutuhan pokok masih menjadi permasalahan dalam pencegahan persaingan pasar yang tidak sehat.

Isu Strategis 4: Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan

Sebagai wilayah yang menjadi salah satu penopang pangan bagi Kota Bandung, ketahanan dan keamanan menjadi hal yang penting. Dalam berbagai aspek pada ketahanan dan keamanan pangan, Kabupaten Bandung masih memiliki beberapa masalah diantaranya yaitu dalam hal ketersediaan, keamanan, konsumsi, tata ruang dan kelembagaan dalam bidang pangan. Beberapa permasalahan dalam urusan ketahanan dan keamanan pangan diantaranya adalah belum

terintegrasinya sistem distribusi dan aksesibilitas pangan, hal ini sulit diwujudkan karena belum adanya perencanaan dan masterplan khusus yang dibuat sebagai salah satu langkah untuk bisa mengoperasionalkan kegiatan ketahanan pangan. Perencanaan ini belum bisa terwujud salah satunya merupakan akibatnya masih belum terintegrasinya sistem informasi pangan, perda RDTR khusus kawasan pangan dan juga belum adanya pendataan yang baik terkait pangan dari hulu hingga ke hilir.

Saat ini urusan pangan masih menjadi hal yang sulit diwujudkan karena belum terciptanya kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan terkait urusan ini. Beberapa pemangku kepentingan masih saling lempar tanggungjawab terkait dengan urusan ketahanan dan keamanan pangan. Permasalah urusan pangan juga ada pada keamanan pangan. Masyarakat baik penyedia dan konsumsi harus sadar terkait keamanan makanan yang akan digunakan dan bebas dari bahan berbahaya. Lemahnya pengendalian dan pengawasan menjadi salah satu alasan sulitnya mengawasi keamanan pangan. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan dari sisi pengetahuan terkait pangan dan alternatif pangan, kerjasama dengan pihak sekolah dan swasta untuk sosialisasi perlu ditingkatkan.

Isu ketahanan dan keamanan pangan menjadi strategis karena hal ini sangat berkaitan erat dengan berbagai bidang tidak hanya bidang pangan, perlu kolaborasi antar bidang seperti bidang pertanian, tata ruang, kesehatan hingga pendidikan.



Gambar 4-8
Kerangka Isu Strategis 4
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

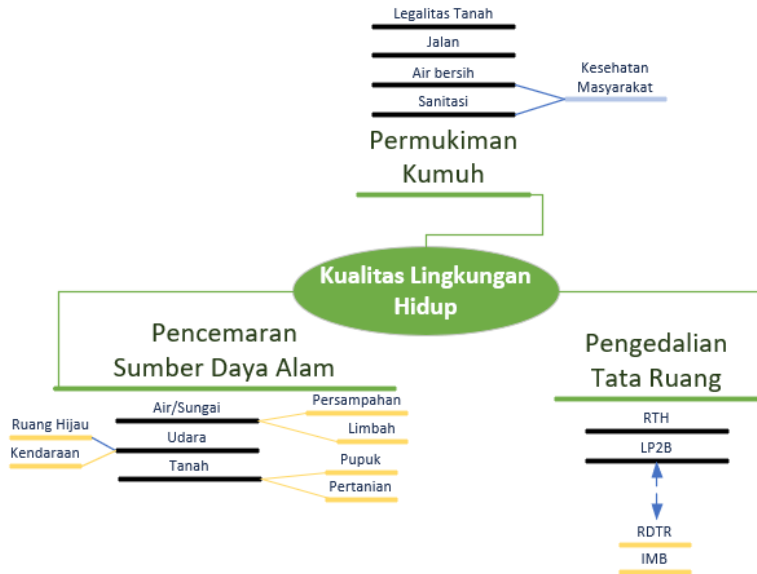
Isu Strategis 5: Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah

Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan berkelanjutan. Aspek sumber daya alam lingkungan menjadi salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan selain pilar ekonomi dan sosial budaya. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, selain dengan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, permasalahan lingkungan hidup perlu diatasi terlebih dahulu. Permasalahan lingkungan

hidup masih menjadi isu di Kabupaten Bandung, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh tiga hal besar yaitu kualitas permukiman, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengendalian tata ruang. Dalam permukiman kumuh, di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 masih tercatat besarnya permukiman kumuh adalah sebesar 0,32% dari keseluruhan Kabupaten Bandung. Hal yang paling mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dari permukiman kumuh ini adalah bagaimana masyarakat membuang limbah padat dan cair hasil dari kegiatan rumah tangganya. Pada permukiman kumuh, masyarakat kebanyakan tidak memiliki

akses kepada sanitasi layak dan sistem persampahan yang baik, sehingga banyak dari mereka yang langsung membuang limbah cair dan

padat langsung ke sungai/badan air terdekat. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas air bersih yang ada di Kabupaten Bandung.



Gambar 4-9
Kerangka Isu Strategis 5

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

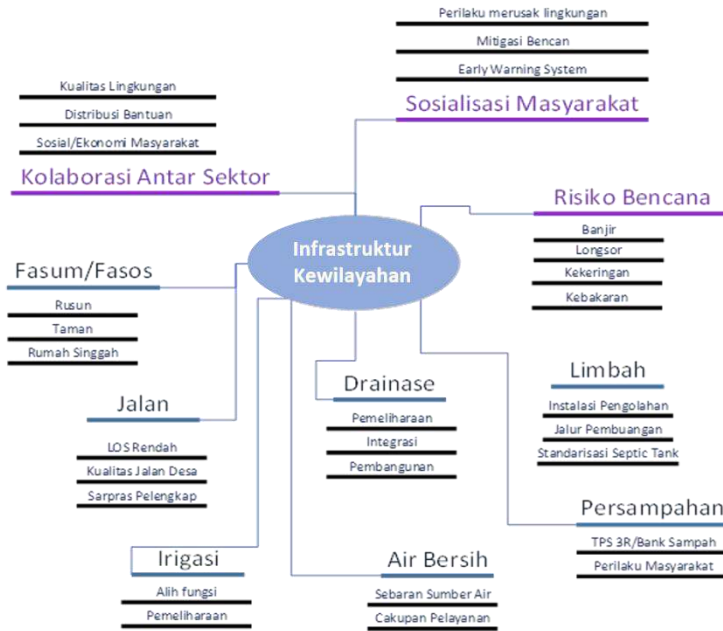
Masih kurang terkendalnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh lemahnya pengendalian tata ruang. Lemahnya pengendalian tata ruang menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali seperti dari lahan hijau atau lahan sawah menjadi bangunan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali secara tidak langsung menyebabkan kurangnya daerah tangkapan air dan kualitas udara yang memburuk dengan kurangnya pepohonan. Pengendalian tata ruang yang buruk juga saling berkaitan kepada munculnya permukiman kumuh. Saat ini, Kabupaten Bandung belum memiliki Perda Peraturan Zonasi sebagai instrumen pengendalian tata ruang. Tidak adanya Perda Peraturan Zonasi menyebabkan Satuan Polisi Pamong praja sulit dikerahkan untuk membantu penegakkan dalam pengendalian tata ruang.

Selain itu kualitas lingkungan hidup yang baik ini sulit dicapai karena masih lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang ada di air, udara dan tanah. Pada air hal yang paling berpengaruh adalah masih adanya pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan masih ditemukannya saluran drainase yang langsung dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan. Dari sisi udara, belum adanya alat yang bisa mengecek kualitas udara secara *real time* sehingga pengendalian udara masih belum maksimal. Minimnya pemanfaatan dan pengembangan angkutan umum serta berkurangnya luasan lahan hijau yang ditanami pohon juga menjadi salah satu faktor tingginya pencemaran udara. Terakhir, urusan pencemaran tanah ini disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan pupuk kimia ini menjadi dilema yang perlu diselesaikan karena di

satu sisi penggunaan pupuk ini terjangkau dan tergolong mudah dibandingkan dengan penggunaan organik. Namun penggunaan pupuk kimia ini bisa mengancam kesuburan tanah di kemudian hari.

Suatu wilayah yang berketahanan adalah wilayah yang mampu bertahan dan sigap ketika bencana yang terjadi. Kabupaten Bandung adalah wilayah yang memiliki potensi bencana yang cukup banyak seperti banjir, gempa bumi, longsor, kekeringan hingga kebakaran.

Isu strategis 6: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan



Gambar 4-10
Kerangka Isu Strategis 6

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Dalam menghadapi isu ketahanan wilayah masih banyak hal yang masih kendala seperti pemerataan infrastruktur, khususnya infrastruktur kebencanaan, strategi dalam mengurangi risiko bencana, distribusi logistik bantuan dan bagaimana kolaborasi antara sektor dalam tanggap darurat menghadapi tantangan yang ada. Sebelum dapat menuju kota yang kokoh dan tangguh, pemerataan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan

dan penunjangnya perlu di tingkatkan terlebih dahulu. Seperti misalnya pada hal pertanian, dalam mencegah kekeringan, pemerataan pembangunan irigasi beserta pemeliharaannya perlu dilakukan secara maksimal, atau pada urusan penanganan banjir, permasalahan drainase perlu dilakukan terlebih dahulu. Selain dari sisi infrastruktur, hal lainnya yang masih menjadi isu dalam menuju kota tangguh berketahanan adalah bagaimana kekuatan



lembaga sosial dan ekonomi dalam menghadapi bencana. Kolaborasi antar aktor perlu dijalin dengan sistem yang baik agar distribusi bantuan jika terjadi bencana bisa dilakukan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kolaborasi kelembagaan ini juga diperlukan dalam menjaga kualitas lingkungan agar meminimalisir dampak yang akan terjadi.

Saat ini Kabupaten Bandung belum memiliki sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang optimal. Sistem ini penting ada untuk mencegah

kerusakan dan kerugian yang lebih merugikan lagi. Sistem ini berhubungan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana mitigasi bencana dan apa yang harus dilakukan. Pengetahuan kepada masyarakat dianggap bisa mengurangi kekacauan yang akan terjadi di kemudian hari.

Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung disajikan sebagai berikut.

Tabel 4-43

Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
APN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
		IS 4	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan
APN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
APN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
APN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
APN 5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
APN 6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
APN 7	Stabilitas polhukamham dan transformasi pelayanan publik	IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Isu Strategis

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung disajikan sebagai berikut.

Tabel 4-44

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
PPP 1	Reformasi sistem kesehatan daerah	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing



Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
PPP 2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
PPP 3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	IS 4	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan
PPP 4	Reformasi sistem perlindungan sosial	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
PPP 5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
PPP 6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
PPP 7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan
PPP 8	Gerakan membangun desa	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
		IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
PPP 9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
		IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
PPP 10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
		IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
PPP 11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
		IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Keterkaitan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan Isu

Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung disajikan sebagai berikut.

Tabel 4-45

Keterkaitan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
S1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola pemerintahan.
S2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik		
S3	Meningkatnya kualitas lingkungan	IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang



Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
S4	Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk		yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
		IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan
S5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
		IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
S6	Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	IS 4	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan
S7	Menurunnya tingkat pengangguran	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
S8	Menurunnya tingkat kemiskinan		
S9	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
S10	Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu		
S11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah		
S12	Meningkatnya pembangunan perdesaan		
S13	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
S14	Meningkatnya pertumbuhan investasi		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hasil analisa KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025 dengan Isu

Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung disajikan sebagai berikut.

Tabel 4-46

Keterkaitan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
TPB 3	Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
		IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
TPB 2	Menghilangkan Kelaparan	IS 4	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan
TPB 6	Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan	IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
TPB 1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
TPB 15	Melindungi dan Meningkatkan Pemanfaatan	IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	
	Berkelanjutan Ekosistem Daratan		tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan
TPB 4	Menjamin Kehidupan Pendidikan yang Inklusif dan Merata	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing

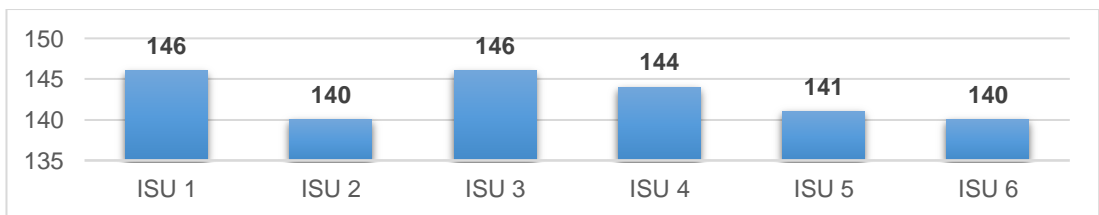
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi dari *stakeholder* yang diperoleh melalui Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang, 6 poin isu strategis Kabupaten Bandung kemudian dibobotkan untuk mengetahui isu mana yang dinilai paling krusial dan perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan penilaian oleh *stakeholder* meliputi:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas program strategis Bupati yang perlu diwujudkan

Dari hasil pembobotan terhadap penilaian isu strategis Kabupaten Bandung diperoleh informasi bahwa isu strategis yang dianggap paling krusial dibandingkan dengan yang lainnya adalah isu “Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing”, dan “Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing” sementara untuk isu ketiga adalah “Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan”. Hasil pembobotan isu-isu strategis Kabupaten Bandung ditampilkan pada **Gambar 4-11** berikut.



Gambar 4-11
Hasil Pembobotan Isu Stragis Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021



BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bandung 2021-2026 adalah penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2020, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2021-2026, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas Kabupaten Bandung sesuai dengan misi yang diemban. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perumusan visi dan misi RPJMD selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, juga harus mengacu kepada RPJPD. Dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2023, dan RPJP Nasional Tahun 2004-2024 sebagai berikut.

Tabel 5-1
Visi RPJPD, RPJP Nasional DAN RPJPD Provinsi Jawa Barat

RPJP Nasional (Tahun 2004-2024)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2003-2023)	RPJPD Kabupaten (2005-2025)
"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur"	"Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia"	"Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025"

Sumber: RPJP Nasional 2004-2024, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2003-2023 dan RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025, terdapat 6 (enam) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

5. Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
6. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Pada masing-masing dokumen perencanaan RPJP di tiap levelnya, RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 melihat kepada arahan kebijakan pembangunan RPJP yang ada ditahap ke-IV. Berikut merupakan arahan kebijakan pada tahap IV di masing-masing perencanaan jangka panjang.



Tabel 5-2

Arahan Kebijakan RPJPD, RPJP Nasional Dan RPJPD Provinsi Jawa Barat

RPJP Nasional (Tahun 2004-2024)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2003-2023)	RPJPD Kabupaten (2005-2025)
Tahap IV (2020-2024)	Tahap IV (2018-2023)	Tahap IV (2021-2025)
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang	Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan

Sumber: RPJP Nasional 2004-2024, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2003-2023 dan RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”

Penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut.

Bangkit: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli

Edukatif: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau "Bedas" di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung, menuju Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui

optimalisasi aspek pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dinamis: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agamis: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan.



Sejahtera: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. **Membangkitkan Daya Saing Daerah**
2. **Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata**
3. **Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan**
4. **Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan**
5. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah**

Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Selain itu, daerah yang berdaya saing merupakan kunci pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Dalam mempersiapkan perekonomian daerah yang

berdaya saing, maka beberapa faktor perlu didorong dan ditingkatkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah peningkatan daya saing sektor perdagangan, industri besar dan industri kecil menengah, peningkatan daya saing sektor pertanian serta pariwisata. Selain itu peningkatan investasi juga merupakan hal utama dalam mendukung perekonomian daerah yang berdaya saing

Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata

Kualitas pembangunan manusia adalah salah satu pilar dalam menopang kegiatan ekonomi yang bedaya saing. Dalam mempersiapkan pembangunan manusia yang berkualitas, maka beberapa faktor perlu didorong dan ditingkatkan. Faktor-faktor tersebut adalah meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan. Sebelum menuju kepada peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan, pemerataan akses Pendidikan dan kesehatan perlu dituntaskan terlebih dahulu agar semua lapisan masyarakat mendapatkan keadilan dalam akses kepada pendidikan dan kesehatan.

Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan adalah lingkungan hidup yang berkualitas baik. Lingkungan hidup dan penataan ruang menjadi dua hal yang saling berkaitan, lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan tak akan terwujud tanpa adanya pengendalian tata ruang yang baik. Dalam mewujudkan itu semua beberapa faktor perlu didorong yaitu penerapan *zero waste* dan *circular economy*, pengendalian RTH dan LP2B, peningkatan kualitas air, udara dan tanah, penanggulangan pencemaran lingkungan, lingkungan pemukiman sehat serta penataan ruang yang berkelanjutan. Pengendalian



tata ruang menjadi aspek yang paling penting dalam menjaga agar daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat terjaga dengan baik. Pengendalian tata ruang yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau yang memadai serta penguatan lahan LP2B untuk pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan tingkat rawan bencana yang lumayan tinggi. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang rentan terkena beberapa bencana yaitu banjir, longsor, kekeringan, kebakaran serta gempa bumi. Tantangan wilayah rawan bencana ini bisa menjadi penghambat dalam pembangunan jika tidak ditangani. Upaya-upaya peningkatan kegiatan ekonomi, sumber daya manusia serta infrastruktur akan percuma jika wilayah yang ada tidak tangguh setiap menghadapi bencana. Tantangan ini bisa diatasi dengan konsep *resilient and resilient city*, dimana sebuah wilayah dipersiapkan untuk tidak mudah jatuh dan tetap tangguh ketika bencana tiba. Dalam mewujudkan wilayah yang kokoh tersebut maka perlu diciptakannya pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan sistem mitigasi bencana, peningkatan pembangunan infrastruktur kebencanaan, pemanfaatan sistem teknologi *Early Warning System*, pemerataan pembangunan fasum-fasos serta penguatan sistem logistik, dengan tetap mewujudkan resiliensi masyarakat berbasis potensi desa.

Misi ini juga mengandung semangat karuhun Sunda dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa tatar sunda mempunyai karakteristik tersendiri tidak hanya dilihat dari bentang alamnya dan dirasakan dari seni budayanya saja tetapi juga merupakan satu kesatuan keberlanjutan hidup manusia sunda yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Ciri sunda merupakan ciri amanat dari lingkungan yang telah menjadi pesan untuk keberlanjutan seharusnya. Manusia yang mendiaminya, harus memiliki karakter yang belum tentu harus sama serupa dengan wilayah lainnya.

Revolusi industri dan kapitalisasi ternyata tidak dapat menjamin akrabnya manusia dengan karakteristik alamnya, hanya menimbulkan dampak kerusakan dan ketimpangan, manusia semakin serakah tanpa batas serta munculnya ketidakpercayaan akan masa depan manusia sendiri.

Perjalanan zaman mengantarkan manusia tradisional Sunda pada kondisi dimana menelan mentah-mentah modernisasi tanpa proses diskursus yang matang, sehingga tercerai menjadi entitas-entitas tanpa mempunyai "pusing jagat", kibat, orientasi diri yang bisa kita sebut sebagai manusia artifisial Sunda.

Narasi pesan karuhun sunda merupakan kebijakan yang akan menjadi awal tertuangnya pesan karuhun yang cerdas dan egaliter pada dokumen formal dalam mengembalikan ke jati Sunda sebagai acuan pembangunan serta sebagai landasan hukum yang mengikat dalam upaya mengarahkan pembangunan dalam arti sesungguhnya dan seutuhnya.

Bahwa tingkah laku harus seiring, sejalan dan sesuai dengan penyediaan ruangnya berdasarkan tata ruang yang sudah jelas pesannya berbasis patanjala (Daerah Aliran Sungai)

Bahwa ekosistem air, tanah, udara, manusia, satwa, tumbuhan dan semesta di tatar sunda telah menjadi satu kesatuan harmoni yang tak terpisahkan yang merupakan anugerah dan amanah dari maha Pencipta.

Pesan ruang "Lemah Mala", karena dalam Tipologi Wilayah dan Pola Topografi Kampung sekarang memiliki kaitan erat dengan aspek Mitigasi Bencana, terdapat korelasi sisi geologi tata lingkungan dengan Lemah Mala (sodong, sarongge, cadas gantung, mungkal patenggang, lebak, rancak, kubakan badak, catang nunggang, catang nonggeng, garungguran, gareggeran, lemah sahar, dangdan warian, hunyur, lemah laki, pitunahan celeng, kolomberan, jaryan, sema/kuburan, lemah kasingsal) yang sebagian hilang dari toponimi peta modern.



Kampung tidak sekedar tempat tinggal. Kampung lebih tepatnya tempat bermukim, ruang hidup dan kehidupan. Ruang saling menghidupi secara bersama untuk membentuk sebuah kebudayaan, peradaban serta sejarah. Lebih dari itu, sebuah kampung dengan segala aktifitas penghuninya menjadi rujukan bagi generasi selanjutnya.

Masyarakat Sunda mengenal istilah "pamali" sebagai nilai yang melekat dalam perilaku keseharian, termasuk penentuan wilayah pemukiman. Adapun konsekuensi dari pelanggaran nilai tersebut, maka bersiaplah menerima "mamala".

Dalam kebudayaan masyarakat Sunda, topografi (rupa muka bumi) menjadi salah satu dari sekian hal yang dianggap prinsip serta spiritual dalam membuka pemukiman (kampung). Terbukti dengan adanya beberapa referensi (baik lisan maupun tulisan) yang concern terhadap hal itu.

Dalam naskah "Siksa Kanda Ng Karesian" disebutkan "Lemah Mala", yaitu tanah atau wilayah yang tidak layak dibuka dan menjadi kawasan lindung.

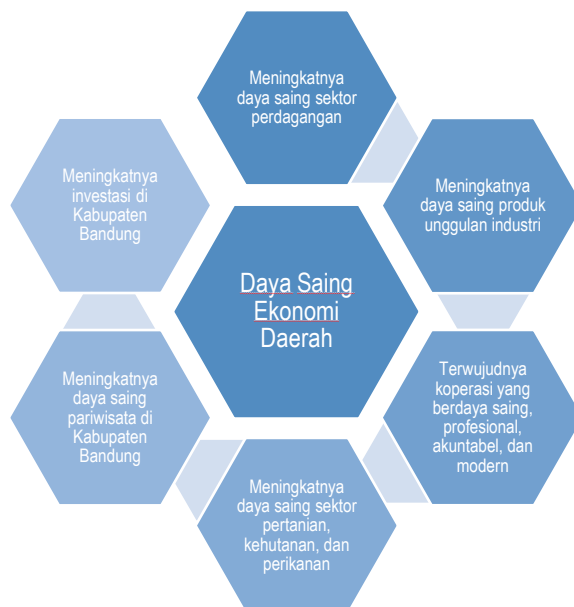
Kenapa bencana kini kerap melanda, karena kita sudah melanggar amanat karuhun...sebagai yang merasakan jati sunda saestuna

Yang disebut *Wastu Citra* oleh *Mangun Wijaya*, bagaimana arti arsitektur harus berfungsi dengan baik sebagai tempat berlindung sekaligus harus mengekspresikan manusianya dalam konteks kebudayaan.

Sesuai dengan 3 prioritas program yaitu Industri Pertanian, Industri Kreatif dan Industri Pariwisata, ketiganya merupakan peluang sekaligus ancaman, karena itu hamonisasi investasi harus bersanding dengan ekologi begitu pula korporasi harus bersanding dengan konservasi sebagai satu kesatuan. dengan mengacu pada kajian aspek dampak lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Narasi Pesan Karuhun Sunda ini merupakan pusat dan jembatan ruh substansi kebijakan antara misi ke 3 dengan misi lainnya pada dokumen ini. Implementasi pesan karuhun sunda dalam kebijakan secara bertahap dimulai dari:

1. Penguatan kebijakan pertanahan (*land banking*) dengan mengembalikan peruntukan lahan HGU jaman kolonial Belanda sebagai lahan konservasi sesuai penataan ruang kabuyutan secara bertahap dengan berbasis patanjala (Mikro Das manajemen), penguasaan mata air oleh negara melalui pemerintah daerah. Mendorong penguasaan lahan untuk penyediaan sistem Air baku skala regional yang dikuasai pemerintah daerah
2. Mengembangkan dan menetapkan Taman Hutan Rakyat, Taman Nasional, Taman Buru dan Lahan konservasi lainnya.
3. Memutus mata rantai kesenjangan dengan mengembalikan hakekat manusia sunda pada tempatnya.
4. Mendorong manfaat kearifan lokal menjadi keuntungan bersama secara hakiki yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan hak keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan tuntas jasa lingkungan dengan disertai hak imbal jasa lingkungan
5. Mengembalikan hak petani/buruh tani melalui kerjasama pemerintah daerah dalam pengelolaan Land Banking berbasiskan konservasi dan pengendalian lahan yang hanya bisa dilakukan melalui hukum kearifan lokal dimana pengeloaan lahan sesuai dengan pesan para cendikiawan/khalifah (karuhun) sunda.



Gambar 5-1

Integrasi Perencanaan Misi 1

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



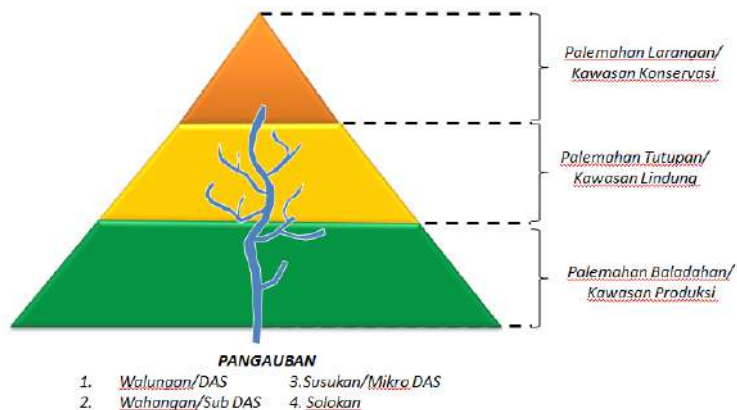
Gambar 5-2

Integrasi Perencanaan Misi 2

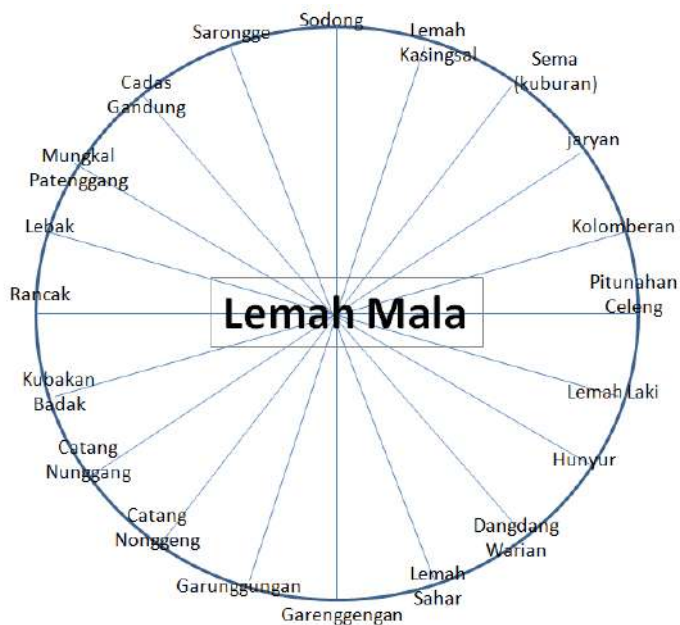
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 5-3
Integrasi Perencanaan Misi 3
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

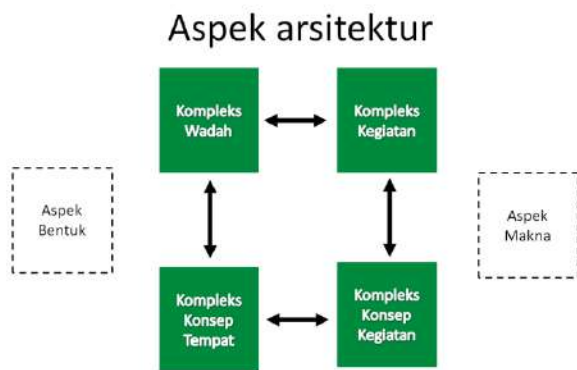


Gambar 5-4
Klasifikasi Pangauban
Sumber: Hamdani, Deni. Komite Mikro DAS



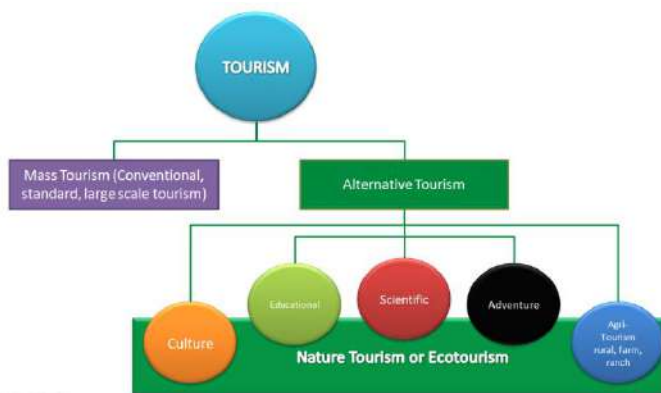
Gambar 5-5
Lemah Mala

Sumber: Hamdani, Deni. Komite Mikro DAS



Gambar 5-6
Aspek Arsitektur Wastu Citra

Sumber: Hamdani, Deni. Komite Mikro DAS



Gambar 5-7
Konsep Pariwisata Berbasis Lingkungan

Sumber: Hamdani, Deni. Komite Mikro DAS

Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan

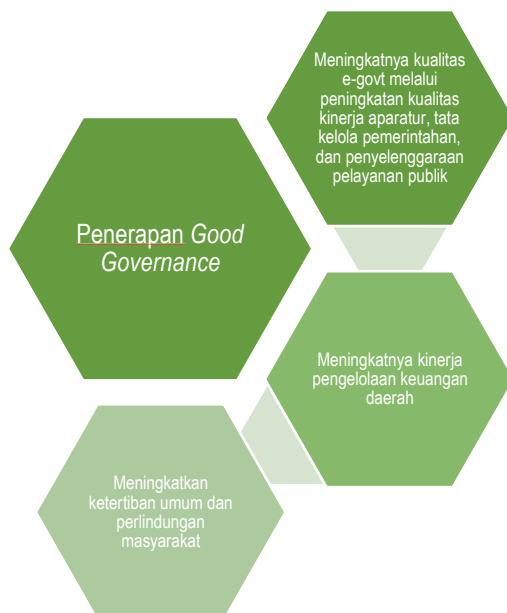
Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip *good governance* sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kota/kabupaten dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep *good governance* yang masih terus diupayakan, penerapan konsep *dynamic governance* dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu didorongnya beberapa faktor tersebut yaitu, meningkatnya kualitas *e-government* melalui peningkatan kualitas kinerja

aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah

Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan menjangkau perekonomian inklusif berkualitas. Oleh karena itu Pemerintah harus mengurangi kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan daerah, mengurangi pengangguran, meningkatkan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah, dan menurunkan masalah pangan daerah.



Gambar 5-8

Integrasi Perencanaan Misi 4

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 5-9

Integrasi Perencanaan Misi 5

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 5-3

Visi, Misi RPJP Kabupaten Bandung, RPJM Provinsi dan RPJMN

RPJP Kabupaten Bandung (2005-2025)	RPJMD Kabupaten Bandung (2021-2026)	RPJM Provinsi Jawa Barat (2018-2023)	RPJMN (2020-2024)
<i>Visi: Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2020</i>	<i>Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera</i>	<i>Visi: Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"</i>	<i>Tema: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan</i>
Misi	Misi	Misi	Agenda Pembangunan
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	Membangkitkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan	Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah		Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik
Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib		Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa	Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Jika dilihat dari visi RPJP Kabupaten Bandung (2005-2025) Kabupaten Bandung diharapkan menjadi Kabupaten Bandung Repeh, Rapih serta Kerta Raharja yang turun menjadi 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang. Di sisi lain RPJM Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki lima misi dan agenda pembangunan RPJMN yang turun menjadi 7 agenda pembangunan. Meski dalam hal ini masing-masing memiliki jumlah turunan misi dan agenda pembangunan yang berbeda-beda, namun semuanya membahas hal-hal yang sama yakni terkait

kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, lingkungan yang berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ini menyiratkan bahwa misi pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung dengan dokumen perencanaan di atasnya telah sejalan.

Selanjutnya akan dilihat bagaimana misi Kepala Daerah terpilih yang telah dirumuskan sebelumnya dengan RPJM Jawa Barat dan Agenda Pembangunan yang bisa dilihat pada **Tabel 5-2**.

Tabel 5-4

Integrasi Misi RPJMD, Misi RPJM Provinsi Jawa Barat dan Agenda Pembangunan RPJMN

Misi RPJMD Kab. Bandung (2021-2026)	Misi RPJM Provinsi Jawa Barat (2018-2023)	Agenda Pembangunan RPJMN (2020-2024)
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memperkuat stabilitas polhukam dan ransformasi pelayanan publik



Misi RPJMD Kab. Bandung (2021-2026)	Misi RPJM Provinsi Jawa Barat (2018-2023)	Agenda Pembangunan RPJMN (2020-2024)
Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa	Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa
Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan	Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Membangkitkan daya saing daerah		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Kelima misi strategis di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari isu strategis yang telah dianalisis dan dipaparkan pada bab sebelumnya. Secara lengkap bentuk sinergi atau keterkaitan antara isu strategis dengan misi pembangunan Kabupaten Bandung disajikan pada **Tabel 5-3**.

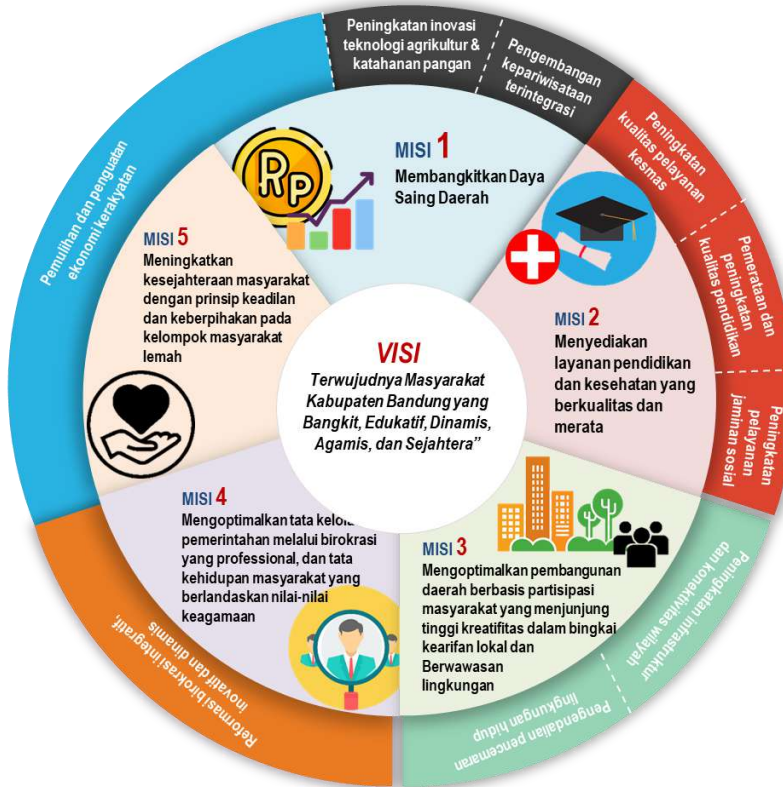
Visi dan misi pembangunan daerah kemudian dijabarkan ke dalam 9 prioritas pembangunan yang diarahkan pada isu strategis.

Tabel 5-5

Keterkaitan antara Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Isu Strategis RPJMD

Misi RPJMD 2021-2025		Isu Strategis RPJMD 2021-2026	
M 1	Membangkitkan Daya Saing Daerah	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
M 2	Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	IS 1	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing
M 3	Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan	IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
		IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.
M 4	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan
M 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah	IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing
		IS 4	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Gambar 5-10
Keterkaitan Prioritas dalam Pencapaian Visi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, yang dirumuskan secara teknokratik melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, kebijakan

pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Jawa Barat dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan yang dirumuskan ini akan dikolaborasi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2026. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang dirumuskan dalam rangkan ingin tercapainya tujuan, yang mana adalah berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.



Target, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kabupaten Bandung ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro Provinsi Jawa Barat dan kemampuan Kabupaten Bandung dengan adanya pandemi COVID-19 sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Kabupaten Bandung berdasarkan publikasi BPS dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Berikut adalah indikator makro Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.



Tabel 5-6

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi 2022-2026				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75%	5,17%	5,20%	5,30%	5,60%
2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	136.561.007,20	143.306.746,39	150.052.415,58	156.798.084,77	163.543.753,95
3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	83.856.515,35	85.364.102,03	86.871.688,72	88.379.275,40	89.886.862,09
4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita	Ribu Rp	36.414.618,38	37.681.001,26	38.912.583,09	40.110.778,96	41.276.928,26
5	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita	Ribu Rp	22.360.712,64	22.445.592,53	22.528.139,87	22.608.449,49	22.686.611,18
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	2,90%	2,78%	2,67%	2,55%	2,43%
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,43%	1,41%	1,39%	1,37%	1,36%
8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,48	73,78	74,17	74,55	74,94
9	Indeks Pendidikan	Poin	65,78	66,11	66,43	66,75	67,08
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,84	8,97	9,3	9,39	9,47
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73	12,74	12,76	12,77	12,78
12	Indeks Kesehatan	Poin	82,73	82,92	83,1	83,29	83,48
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77	73,9	74,02	74,14	74,26
14	Indeks Pengeluaran	Poin	72,65	73,27	73,9	74,52	75,15
15	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10.800,00	10.980,00	11.158,32	11.345,44	11.532,56
16	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	233.636	230.471	185.405,78	175.402,93	165.059,87
17	Tingkat kemiskinan	Persen	6,32%	6,06%	4,81%	4,49%	4,17%
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	8,15%	7,93%	7,71%	7,51%	7,31%
19	Gini Ratio	Ratio	0,4	0,395	0,39	0,385	0,38
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,40%	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021



Dari 20 (dua puluh) indikator makro tersebut, 8 (delapan) di antaranya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pengeluaran per Kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, sudah diarahkan untuk Kabupaten Bandung

dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Perbandingan arahan indikator makro Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk Kabupaten Bandung dengan hasil proyeksi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-7
Perbandingan Indikator Makro Kabupaten Bandung Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023*		Target Pembangunan dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	
	2022	2023	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	73,48	74,17	73,48	73,78
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,84	8,97	8,84	8,97
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,16	13,48	12,73	12,74
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,89	73,98	73,77	73,9
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	10.800	10.980	10.800	10.980
Tingkat Kemiskinan (%)	6,23	6,06	6,32	6,06
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,6	9,6	8,15	7,93
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,59	4,75	5,17

**) Amanat RPJMN 2020-2024 dan Permendagri 18/2020*

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Proyeksi Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan target RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Adanya perbedaan ini bukan berarti program pembangunan Kabupaten Bandung tidak mendukung target Provinsi Jawa Barat. Penyebab utama terjadinya perbedaan target adalah besarnya dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi di Kabupaten Bandung sehingga adaptasi perencanaan dilakukan berdasarkan kondisi riil dan kemampuan daerah.

Penjabaran Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut.

Misi 1: Membangkitkan daya saing daerah

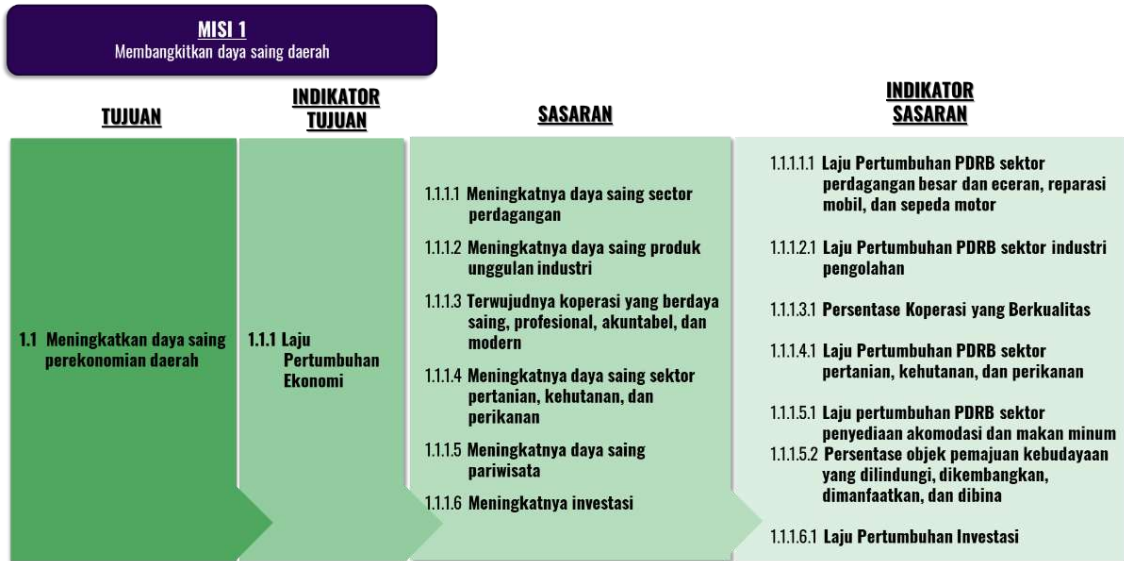
Adapun tujuan dan sasaran dari misi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah



- a. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan
- b. Meningkatnya daya saing produk unggulan industri
- c. Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern
- d. Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
- e. Meningkatnya daya saing pariwisata
- f. Meningkatnya investasi

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 1** berikut ini.



Gambar 5-11
Kerangka Berpikir Logis Misi 1
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata

Adapun tujuan dan sasaran dari misi adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat

- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk berpenghasilan rendah

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 2** berikut ini.



Gambar 5-12
Kerangka Berpikir Logis Misi 2

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

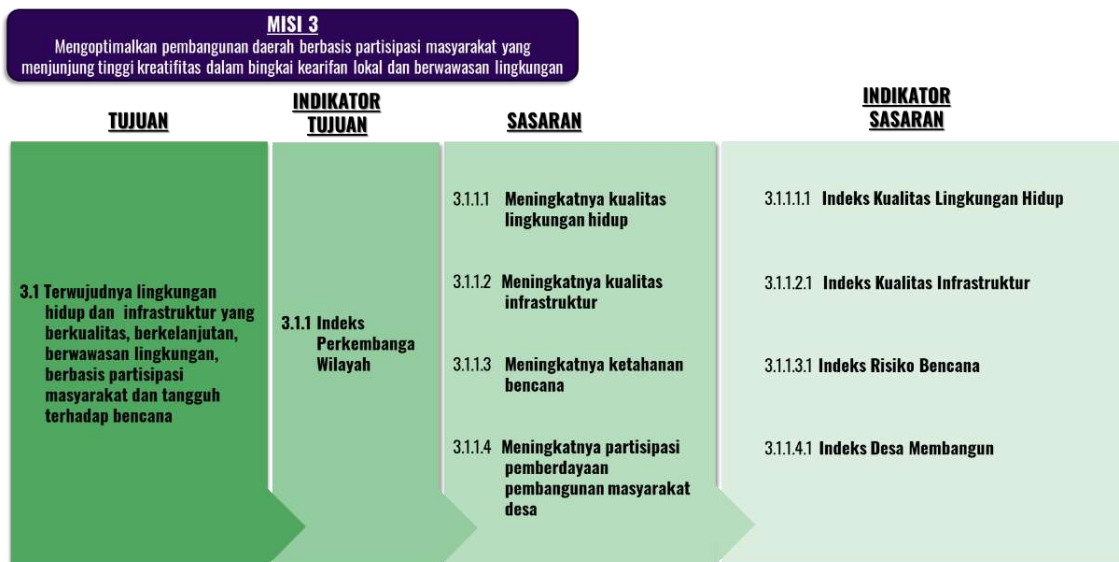
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan

Adapun tujuan dan sasaran dari misi adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur
- c. Meningkatnya ketahanan bencana
- d. Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 3** berikut ini.



Gambar 5-13
Kerangka Berpikir Logis Misi 3
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan

Adapun tujuan dan sasaran dari misi adalah sebagai berikut.

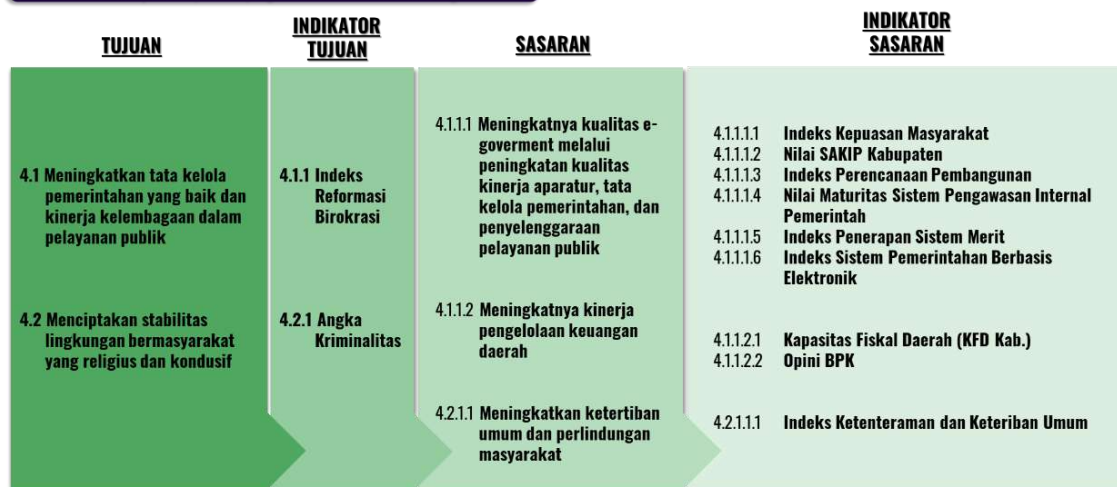
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik.
 - a. Meningkatnya kualitas *e-government* melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik

- b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
2. Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif
 - a. Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 4** berikut ini.

MISI 4

Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan



Gambar 5-14
Kerangka Berpikir Logis Misi 4

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah

Adapun tujuan dan sasaran dari misi adalah sebagai berikut.

1. Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi inklusif
 - a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan

- b. Berkurangnya jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat
 - a. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b. Menurunnya masalah pangan daerah

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 5** berikut ini.



Gambar 5-15
Kerangka Berpikir Logis Misi 5
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD maka dibutuhkan konsistensi dari penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur yang menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Di bawah ini dijabarkan konsistensi penurunan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada **Tabel 5-6** berserta capaian target.



Tabel 5-8

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS)

No	MISI	No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Membangkitkan Daya Saing Daerah	1.1	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,87	3,56	4,75	5,17	5,2	5,3	5,6
		1.1.1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-3,78	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1
		1.1.2	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	-3,27	2,52	3,09	4,03	4,72	5,23	5,6
		1.1.3	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase koperasi yang berkualitas	%	5	5	5,5	6	6,5	7,0	7,5
		1.1.4	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	0,19	0,59	1,39	2,19	3,09	3,99	4,89
		1.1.5	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-3,21	1,66	3,26	4,06	4,86	5,66	6,46
				Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	%	N/A	5%	5%	10%	15%	20%	25%
1.1.6	Meningkatnya investasi	Laju Pertumbuhan investasi	%	N/A	2,9	2,9	2,9	2,0	2,9	2,9		
2	Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,39	72,33	73,48	73,78	74,17	74,55	74,94
		2.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	65,12	65,12	65,78	66,11	66,43	66,75	67,08
		2.1.2		Indeks Kesehatan	Poin	82,35	82,41	82,73	82,92	83,1	83,29	83,48



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No	MISI	No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Total Fertility Rate	Anak/Wanita usia subur	2,43	2,43	2,42	2,42	2,41	2,41	2,4
		2.1.3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk berpenghasilan rendah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Poin	80,36	81,00	82,22	83,20	84,19	85,17	86,16
3	Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan	3.1	Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	Indeks Perkembangan Wilayah	Poin	N/A	52,65	54,59	55,77	57,12	58,42	60,03
		3.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53,57	52,59	53,29	53,68	53,98	54,28	54,60
		3.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	63,55	64,66	65,97	67,22	68,46	69,58	70,65
		3.1.3	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	174	170	165	160	155	150	145
		3.1.4	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7524	0,7767	0,8100	0,8165	0,8307	0,8442	0,8704
4	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,33	65,8	67,28	68,76	70,25	71,73	73,21
		4.1.1	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,78	82,73	83,3	83,87	84,44	85	85,57
				Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,44	73	76	78	80	81	82
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	78,02	78,72	79,42	80,12	80,82	81,52	82,22
				Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Poin	3	3	3	3	3	3	3
				Indeks Penerapan Sistem Merit	Poin	N/A	304.5	326.5	348.5	353.5	359	362
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,82	2,98	3,15	3,31	3,47	3,64	3,80
		4.1.2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD Kab)	Juta Rp	2.236.780	1.741.425	1.928.570	2.065.240	2.166.710	2.316.910	2.431.990



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

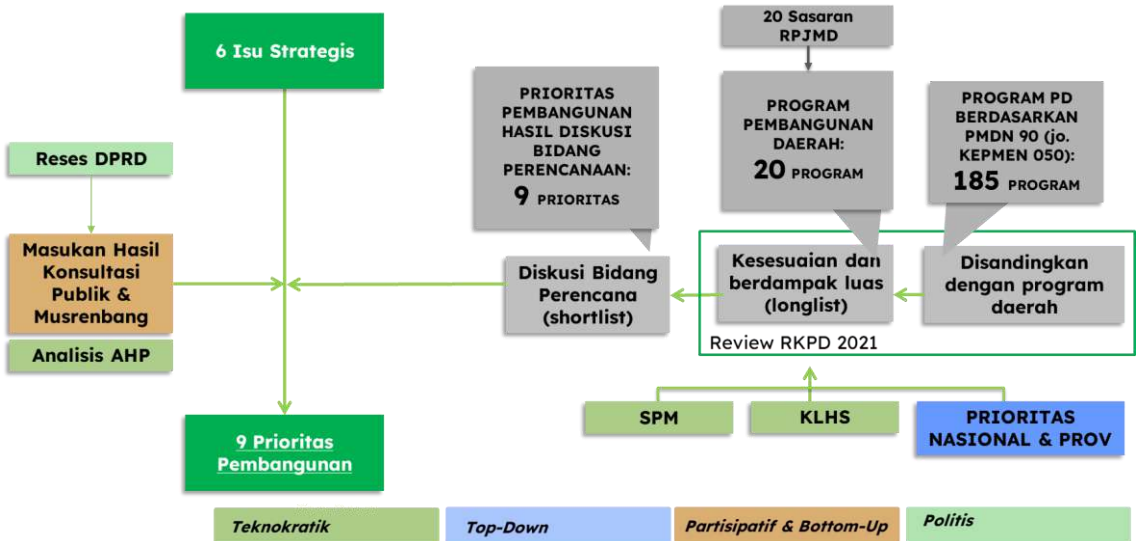
No	MISI	No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Opini BPK	Poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4.2	Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	Laju penurunan angka kriminalitas	%	-34,76	7,7	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8
		4.2.1	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	70	72	74	76	78	80
5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah	5.1	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Indeks Gini	Rasio	0,414	0,415	0,4	0,395	0,39	0,385	0,38
		5.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Indeks Pengeluaran	Poin	70,74	71,14	72,65	73,27	73,9	74,52	75,15
		5.1.2	Berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,58	8,37	8,15	7,93	7,71	7,51	7,31
		5.1.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,59	93,85	94,11	94,37	94,63	94,89	95,15
		5.2	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	79,08	80,1	81,11	83,14	85,17	87,2	88,2
		5.2.1	Menurunnya masalah pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	%	84,3	86,3	86,3	86,5	86,7	86,9	87,1

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5.3 Prioritas Pembangunan

Perumusan prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis pembangunan daerah, prioritas pembangunan Nasional, dan prioritas pembangunan provinsi dalam

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Untuk menindaklanjutinya, maka dibuat prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Diagram Alir Proses Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5-16
Diagram Alir dalam Proses Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

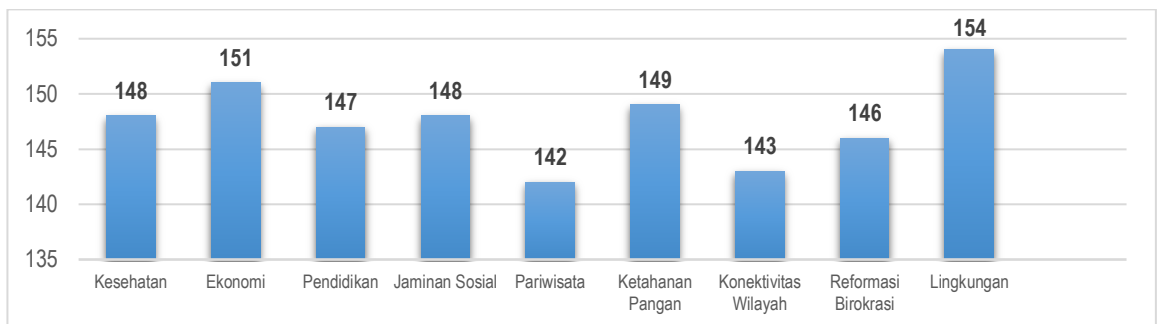
Dari perumusan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, dihasilkan 9 Prioritas, yakni:

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif;
- (2) Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan;
- (3) Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis;
- (4) Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global;
- (5) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim;
- (6) Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan;
- (7) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- (8) Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat; dan
- (9) Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efisien dan tepat sasaran, 9 prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 perlu disusun dalam prioritas pembangunan berdasarkan skala urgensi. Mengingat akan perlunya efisiensi pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung, maka penetapan skala prioritas terhadap prioritas pembangunan tersebut menjadi semakin esensial. Penetapan skala diurutkan berdasarkan masukan berbagai kalangan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung pada Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 melalui penyebaran kuesioner.

Kuesioner yang disebarakan pada Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan secara daring. Formulir daring tersebut berisikan matriks urutan

piroritas dan penilaian dari pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tersebut memberikan penilaian terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan RPJMD 2021-2026, yakni terkait isu dan prioritas pembangunan yang mana yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung selama 5 tahun kedepan. Pemangku kepentingan memberikan penilaian dengan menggunakan skala Likert, yakni dengan membuat centang untuk opsi sangat setuju, setuju, setara, tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk setiap penilaian isu strategis dan prioritas pembangunan. Pada saat rekapitulasi penilaian, setiap penilaian memiliki bobot nilai yang kemudian diakumulasi menjadi skor setiap isu strategis dan prioritas pembangunan. Hasil skoring tersebut mencerminkan urutan urgensi prioritas pembangunan. **Gambar 5-17** menampilkan hasil kuesioner terhadap tingkat urgensi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.



Gambar 5-17

Grafik Hasil Kuesioner terhadap Tingkat Urgensi Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2026 Menurut Persepsi Stakeholder

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan hasil kuesioner yang dipaparkan di **Gambar 5-17**, maka urutan prioritas pembangunan untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
2. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
3. Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
5. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat



6. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
7. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
8. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
9. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Adapun gambaran masing-masing prioritas pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim

Pembangunan di Kabupaten Bandung tidak semata-mata dilakukan untuk kepentingan ekonomi, namun justru berupaya menjunjung adanya keterkaitan dengan daya dukung fisik dan upaya konservasi lingkungan hidup, terutama pada pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan antisipasi risiko perubahan iklim. Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya melakukan optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi terhadap data, informasi dan program pengelolaan kualitas air, udara, tutupan lahan daerah maupun pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan.

2. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan

Basis perekonomian masyarakat Kabupaten ditopang oleh adanya ekonomi kerakyatan yang inklusif. Terlebih di saat pandemi, banyak pelaku usaha perekonomian masyarakat yang terdampak sehingga turut mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan dan daya saing perekonomian

daerah secara keseluruhan. Prioritas pembangunan ini berupaya untuk meningkatkan masyarakat terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan pusat-pusat distribusi untuk mendorong aktivitas perdagangan di kalangan masyarakat secara merata.

3. Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan

Peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan basis perekonomian di bidang agrikultur. Selain upaya untuk mengembangkan simpul pangan lokal dan regional untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung juga mendorong adanya bantuan risiko harga dan asuransi pada saat terjadinya gagal panen, terutama untuk komoditas seperti padi, jagung dan kedelai. Upaya mewujudkan peningkatan daya saing dan ketahanan pangan daerah tersebut diwujudkan dalam peningkatan inovasi dan kolaborasi simpul pangan daerah.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif

Pelayanan kesehatan masyarakat yang baik menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menjadi sehat dan produktif. Prioritas pembangunan ini berupaya meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Selain itu, terdapat fokus upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi dan upaya pengendalian penduduk guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung.

5. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat



Prioritas pembangunan ini berupaya melindungi masyarakat Kabupaten Bandung akan akses terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Bandung dapat menikmati pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, menerima bantuan sosial secara merata dan tepat sasaran, dan memperoleh pelayanan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan, khususnya untuk perempuan dan anak.

Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global

Sebagai salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan aspek pendidikan menjadi modal yang penting untuk membentuk masyarakat Kabupaten Bandung yang berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan dan tantangan global. Pada era globalisasi, masyarakat dan perekonomian daerah dituntut untuk dapat adaptif mendukung perkembangan isu-isu pembangunan global seperti industrialisasi 4.0. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Meski demikian, kebijakan pendidikan juga diarahkan untuk turut melestarikan budaya setempat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung juga berupaya mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berbasis pada Semangat Pembangunan BEDAS.

6. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis

Tantangan globalisasi juga menuntut pemerintah menjadi entitas yang adaptif terhadap perubahan. Guna mencapai birokrasi yang integratif, inovatif dan dinamis, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi

pada peningkatan kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun pelayanan pemerintahan ini juga didukung oleh peran serta entitas pembangunan lainnya sehingga terwujud suatu lingkungan bermasyarakat yang stabil dan kondusif.

7. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Prioritas pembangunan ini berorientasi pada pemenuhan dan pengelolaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi perencanaan. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program pengelolaan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang berkualitas ini diantaranya mencakup peningkatan jalan dengan kondisi mantap, akses air minum dan sanitasi layak, tingkat elektrifikasi daerah dan kualitas sinyal telepon dan internet.

8. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Pariwisata merupakan salah satu aspek perekonomian masyarakat yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam mengembangkan kepariwisataan daerah sebagai pendorong perekonomian daerah, pariwisata daerah perlu dikelola sebagai satu kesatuan destinasi pariwisata daerah yang terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan prioritas pembangunan ini dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat secara merata dan turut mengembangkan potensi lokal daerah. Upaya-upaya yang didorong mencakup penguatan kolaborasi dan kemitraan, penguatan ekonomi kreatif dan optimalisasi daya tarik investasi bidang pariwisata.

Selain mendorong pembangunan di tingkat kabupaten, prioritas pembangunan Kabupaten Bandung turut mendukung prioritas pembangunan



pada tingkat provinsi maupun nasional. Sandangan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa

Barat, dan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 5-7** berikut.

Tabel 5-9
Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung

NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KABUPATEN BANDUNG	
PN6	Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P1	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup		
PN1	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		PP8	Gerakan membangun desa		
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P3	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan sosial	P5	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P6	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara		
PN7	Memperkuat Stabilitas polhukhanam dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	P7	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
		PP8	Gerakan membangun desa		
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P8	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara		
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Sedangkan keterkaitan isu strategis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikatornya dapat dilihat pada **Tabel 5-9**.

Tabel 5-10
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan	
IS 1	Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing	P4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif



Isu Strategis		Prioritas Pembangunan	
		P6	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola pemerintahan	P7	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		P5	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
		P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi
IS 4	Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan	P3	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan
IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	P1	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan	P8	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 5-11

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikatornya

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”				
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	
		Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase koperasi yang berkualitas	
		Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan
		Meningkatnya daya saing pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi
			Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	
		Meningkatnya investasi	Laju Pertumbuhan investasi	
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata				
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks Pendidikan	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Total Fertility Rate	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk berpenghasilan rendah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan				
Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	Indeks Perkembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
		Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
		Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Reformasi birokrasi integratif, inovatif, dan dinamis
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas <i>e-government</i> melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
			Nilai SAKIP Kabupaten	
			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
			Indeks Penerapan Sistem Merit	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Fiskal Daerah (KFD Kab.)	
	Opini BPK			



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	Laju penurunan angka kriminalitas	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah				
Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Indeks Pengeluaran	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
		Berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Menurunnya masalah pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 serta menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun ke depan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Strategi dan Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan tersebut yaitu metode analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) serta melihat integrasi kepada perencanaan kewilayahan. Dengan metode ini, berbagai potensi dan permasalahan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal diidentifikasi sebagai basis dalam penentuan strategi. Melalui penggunaan metode ini, diharapkan dapat diperoleh strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode Tahun 2021-2025 adalah “Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan”. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun,

yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Hal ini disajikan pada **Gambar 6-1**.

Strategi pembangunan merupakan serangkaian langkah-langkah yang berisikan proses perwujudan visi dan misi pembangunan yang menyoar pada sasaran strategis daerah. Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati, telah disusun tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penerjemahan visi yang ideal ke dalam level yang lebih mudah dicapai. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi didasarkan pada isu-isu strategis yang terdapat di Kabupaten Bandung yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Isu-isu ini berupa potensi dan permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal wilayah. Penyusunan strategi berdasarkan isu-isu ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien, yakni menjawab permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Identifikasi potensi dan permasalahan internal dan eksternal Kabupaten Bandung yang dikelompokkan ke dalam kelompok potensi, permasalahan pada **Gambar 6.2**.



Gambar 6-1

Posisi RPJMD Tahun 2021-2026 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dimiliki Kabupaten Bandung berdasarkan faktor internal dan eksternal yang kemudian dianalisis menggunakan metode SWOT, diperoleh strategi-strategi yaitu:

- Pemanfaatan potensi alam, budaya dan produk desa sebagai atraksi wisata dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
- Meningkatkan kemandirian desa dalam rangka penguatan ekonomi
- Meningkatkan jangkauan pemasaran UMKM dengan wilayah sekitar untuk meningkatkan perekonomian wilayah
- Pembangunan wilayah Industri berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan pembangunan daerah
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian
- Pembangunan ekonomi yang kokoh berdaya saing
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
- Meningkatkan investasi dan skema KPBU untuk membantu pembangunan infrastruktur dasar perkotaan serta untuk penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan dalam penciptaan iklim ekonomi inklusif
- Pemulihan dan penguatan ekonomi
- Meningkatkan integrasi dengan wilayah sekitar untuk mengatasi permasalahan pembangunan
- Meningkatkan ketahanan wilayah dari bencana dan menjamin ketahanan pangan

Masing-masing strategi yang sudah dihasilkan tersebut kemudian perlu disesuaikan dengan visi-misi yang telah ada sebelumnya. Untuk menyesuaikan strategi dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka hasil dari analisis SWOT yang sudah dilakukan kemudian disandingkan dengan masing-masing sasaran strategis lalu kemudian diturunkan menjadi strategi pembangunan dan arah kebijakan.



		POTENSI	PERMASALAHAN
		STRENGTH	WEAKNESS
INTERNAL		<ul style="list-style-type: none"> Sektor ekonomi dalam hal Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial, Jasa Lainnya bersaing dengan Provinsi Jawa Barat Masih banyaknya potensi alam dan budata khas daerah yang bisa menjadi atraksiwisata Sentra penghasil produk pertanian dan komoditas perdagangan masih tinggi Banyaknya potensi unik desa/dampung yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa mandiri Sudah terjalannya beberapa potensi ekspor dalam bentuk pasokan bahan baku produksi Masih tingginya budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat Struktur kependudukan yang menunjukkan tingkat bonus demografi yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Masih perlunya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan gizi seimbang Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar perkotaan Perlunya perlindungan bagi kelompok rentan agar terciptanya pembangunan yang inklusif Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan daya saing daerah Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja Rendahnya partisipasi masyarakat dan pemuda untuk turut serta dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Lemahnya manajemen data dan informasi dalam lingkungan pemerintah daerah Belum optimalnya fungsi pelayanan dan pengawasan pemerintah untuk masyarakat Perlunya peningkatan ketahanan kota dalam menghadapi bencana Perlunya peningkatan keamanan dan ketahanan pangan Masih belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan ekonomi dan politik
		<p>OPPORTUNITY</p> <ul style="list-style-type: none"> Tol Soroja menjadi potensi untuk penggerak ekonomi dengan wilayah sekitar Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Reaktivasi kereta api Bandung-Ciwidey Pembangunan tol Cisumdawu menjadi potensi untuk penggerak ekonomi dengan wilayah sekitar Pembangunan terowongan Nanjung untuk menjadi pelopor pengendali banjir untuk Bandung Raya Pembangunan TPPAS Legok Nangka untuk inovasi penanganan persampahan 	<p>THREAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan transportasi dengan wilayah yang berbatasan Daya saing investasi dengan wilayah lain masih rendah Tantangan globalisasi (degradasi budaya dan peningkatan tenaga kerja asing) Adanya pelemahan ekonomi secara nasional dan global akibat adanya wabah pandemi Covid-19.
EKSTERNAL			

Gambar 6-2
Pemetaan SWOT Analysis Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-1

Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS)				
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
1.1 Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	1.1.1 Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	1.1.1.1 Penataan logistik produk pangan dan non pangan	a. Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar	
		1.1.2 Meningkatkan daya saing produk unggulan industri	1.1.2.1 Penumbuhan dan penataan sentra industri	a. Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
	b. Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan			
	c. Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi			
	d. Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi			
	1.1.3 Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	1.1.3.1 Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha	a. Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro	
			1.1.2.1 Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi	a. Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				b. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
1.1.4 Meningkatkan daya saing sektor pertanian,	1.1.4.1 Peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perkebunan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	a. Pengembangan simpul pangan regional dan lokal		



Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
		kehutanan, dan perikanan				
			1.1.4.2	Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular	a.	Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani
					b.	Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
			1.1.4.3	Peningkatan daya saing sektor perikanan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	a.	Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan
					b.	Pengembangan kualitas hidup ikan perairan
					c.	Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	1.1.5	Meningkatnya daya saing pariwisata	1.1.5.1	Promosi dan branding kawasan wisata	a.	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung
			1.1.5.2	Penataan daerah kawasan pariwisata berstandar global	a.	Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan
			1.1.5.3	Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	a.	Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
			1.1.5.4	Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	a.	Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda
	1.1.6	Meningkatnya investasi di Kabupaten Bandung	1.1.6.1	Penguatan daya tarik investasi Daerah	a.	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi
					b.	Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi
					c.	Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata						



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2.1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	2.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	2.1.1.1	Pemerataan pelayanan sekolah formal dan non formal	a.	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
						b.	Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				2.1.1.2	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan pelayanan pendidikan terutama dalam mendukung industri 4.0 dan isu-isu pembangunan global	a.	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
						b.	Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
		2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan akses pelayanan kesehatan	a.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan
						2.1.2.3	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan reproduksi
				b.	Menurunkan angka kelahiran murni		
		2.1.3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk berpenghasilan rendah	2.1.3.1	Peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan bidang kesehatan melalui optimalisasi sarana prasarana kesehatan	a.	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
		<p>Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan</p>					



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3.1	Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	3.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.1.1.1	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah yang berkualitas	a.	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
		3.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	3.1.2.1	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan infrastruktur daerah	a.	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
		3.1.3	Meningkatnya ketahanan bencana	3.1.3.1	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana	a.	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana
		3.1.4	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	3.1.4.1	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan							
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	4.1.1	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	4.1.1.1	Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik	a.	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
				4.1.1.2	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a.	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				4.1.1.3	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip	a.	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
				4.1.1.4	Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah	a.	Peningkatan kapasitas APIP
				4.1.1.5	Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN	a.	Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
				4.1.1.6	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	a.	Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
		4.1.2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	4.1.2.1	Meningkatkan kemandirian fiskal	a.	Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
				4.1.2.2	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	a.	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
						b.	Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD
4.2	Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	4.2.1	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	4.2.1.1	Peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam hidup bermasyarakat	a.	Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
				4.2.2.1	Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat	a.	Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah							
5.1	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	5.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	5.1.1.1	Penguatan daya beli masyarakat	a.	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
						5.1.2	Berkurangnya jumlah pengangguran
						b.	Meningkatkan perlindungan perkerja



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				5.1.2.2	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	a.	Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
		5.1.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.1.3.1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan melindungi hak-hak anak	a.	Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak
5.2	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	5.2.1	Menurunnya masalah pangan Daerah	5.2.1.1	Tercapainya ketahanan pangan daerah dan masyarakat melalui penciptaan inovasi dan penguatan kolaborasi simpul pangan	a.	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-2

Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Isu Strategis Kabupaten Bandung		Prioritas Pembangunan Daerah		Arah Kebijakan
IS 1	Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing.	P 4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
				Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi
				Menurunkan angka kelahiran murni
IS 1		P 6	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
				Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
				Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global
IS 2	Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan	P 7	Reformasi birokrasi integratif, inovatif, dan dinamis	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
				Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan
				Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
				Peningkatan kapasitas APIP
				Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
				Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
				Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
				Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
				Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan



Isu Strategis Kabupaten Bandung		Prioritas Pembangunan Daerah		Arah Kebijakan
IS 3	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing	P 2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar
				Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri
				Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan
				Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
				Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi
				Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
				Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
		Meningkatkan perlindungan pekerja		
		Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0		
		P 5	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	
Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak				
P 9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi			Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung
				Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan
				Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
				Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda
				Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi
				Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi
				Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Isu Strategis Kabupaten Bandung		Prioritas Pembangunan Daerah		Arah Kebijakan
IS 4	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan	P 3	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
				Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
				Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan
				Pengembangan kualitas hidup ikan perairan
				Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
				Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani
IS 5	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	P 1	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
				Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana
IS 6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.	P 8	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Arah kebijakan pembangunan dirumuskan sebagai langkah-langkah strategis guna mewujudkan strategi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Penyelenggaraan arah kebijakan setiap tahunnya akan membentuk fokus atau tema pembangunan. Sebagaimana yang ditampilkan dalam **Tabel 6-1**, berikut adalah rincian visi, misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.

6.2 Tema Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Strategi dan

arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Bupati, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026, kelima tema tersebut dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 6-3

Tema Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

1. Tema Pembangunan Tahun 2022

Pada tahun awal berlakunya RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2022, tema yang dipilih adalah Pemulihan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif. Pada implementasinya, penentuan tema pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2022 juga tidak luput dari kondisi faktual yang tengah terjadi di masyarakat. Pada tahun penyusunan rencana, yakni tahun 2021, Indonesia dan negara-

negara di dunia masih berupaya memulihkan kesehatan dan perekonomian masyarakat sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang mewabah secara global. Memasuki tahun ke-2 dan ke-3 setelah penularan COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia di awal tahun 2020, diprediksikan bahwa dampak pandemi COVID-19 masih akan terasa di kalangan masyarakat, terutama berkaitan dengan dampak terhadap



kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 yang sudah dimulai di Indonesia sejak Januari 2021 untuk kalangan prioritas, diprediksikan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 terdapat dorongan besar untuk melakukan pemulihan perekonomian daerah dan nasional dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pemulihan ekonomi memprioritaskan pulihnya sektor ekonomi yang ditandai oleh penambahan tenaga kerja dan jam kerja hingga penciptaan lapangan kerja baru di Kabupaten Bandung.

2. Tema Pembangunan Tahun 2023

Memasuki tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Bandung, tema yang ditetapkan adalah Penguatan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan. Setelah pada tahun sebelumnya pemerintah daerah melakukan pemulihan perekonomian masyarakat secara inklusif yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, maka di tahun 2023 ini pemerintah daerah berupaya untuk melakukan penguatan Sumber Daya Manusia agar masyarakat menjadi lebih tangguh terhadap tantangan-tantangan yang datang dari luar, seperti pandemi COVID-19 yang telah terjadi.

Selain lebih tangguh dalam hal kesehatan, peningkatan kualitas SDM dalam bidang pendidikan juga menjadi penting untuk diperhatikan karena pada saat pandemi COVID-19 terjadi, sektor pendidikan menjadi terganggu karena ditiadakannya kegiatan belajar mengajar secara fisik di sekolah-sekolah, walaupun dapat dilakukan secara daring, namun diperlukan penguatan kembali di sektor ini.

Selain itu, peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat pun menjadi fokus utama dalam tema ini. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi penting berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas dan

produktivitas sumber daya manusia dalam pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga termasuk upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung penyederhanaan birokrasi pemerintahan dari struktural menjadi fungsional. Implikasi dari upaya mendukung penyederhanaan birokrasi pemerintahan ini di antaranya berimbas pada kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Tema Pembangunan Tahun 2024

Setelah melakukan penguatan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, dan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing menjadi lanjutan tema pembangunan di tahun 2024 ini. Pertumbuhan SDM dan perekonomian yang berdaya saing ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi inklusif di mana semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya pertumbuhan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, diharapkan SDM dan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung dapat bersaing dengan daerah lain dan mampu membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung.

Pertumbuhan SDM dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan desa mandiri, pembentukan UMKM yang berdaya saing, pariwisata berdaya saing serta partisipasi aktif dari perempuan dan kaum disabilitas yang melengkapi tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Bandung yang dapat mengadaptasi ekonomi kreatif antara lain adalah kegiatan pertanian serta industri dan usaha kecil dan mikro (IKM dan UKM). Pertanian merupakan salah satu kegiatan utama penduduk Kabupaten Bandung dengan hasil produksi yang berkualitas dan



memiliki ciri khas. Sementara itu, potensi IKM dan UKM di Kabupaten Bandung cukup tinggi dengan jenis produk yang beragam yang tersebar di setiap kecamatan. Kualitas dan variasi produk Kabupaten Bandung sampai saat ini belum cukup dikenal masyarakat karena proses produksi dan pemasaran yang masih tradisional. Tanpa diintervensi oleh kreativitas berupa inovasi dan ide-ide baru, maka produk-produk tersebut akan kalah bersaing dengan produk wilayah lain yang sudah menerapkan ekonomi kreatif. Selain itu, Pemerintah Daerah akan mendorong arah pengembangan industri ke depan (*medium-hightech*) dengan *interlinkage* antar industri dan penguatan kaitan pengembangan ekonomi dengan kabupaten/kota terdekat, termasuk memperkuat kelembagaan, dasar hukum implementatif, serta literasi digital dan inovasi memanfaatkan era transformasi digital.

4. Tema Pembangunan Tahun 2025

Dalam tahun keempat perencanaan, fokus pembangunan adalah Pemantapan Daya Saing Daerah. Setelah meningkatkan SDM dan perekonomian yang berdaya saing, SDM dan perekonomian yang dilakukan tetap dalam kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, pada tahun diharapkan pemantapan daya saing daerah dapat tercapai dan dioptimalkan pada tahun ini.

5. Tema Pembangunan Tahun 2026

Pada tahap terakhir perencanaan tahun 2026, Kabupaten Bandung memiliki fokus kepada Pencapaian Kemandirian Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera Lahir dan Batin. Setelah pemulihan, peningkatan, dan pemantapan SDM dan perekonomian yang berdaya saing dilakukan, idealnya pembangunan wilayah yang mandiri dan sejahtera lahir batin saing tidak terlalu sulit diwujudkan. Pembangunan wilayah yang mandiri dan sejahtera lahir batin dari sisi SDM dan perekonomian sudah didorong pada tahun sebelumnya. Pada tahun terakhir ini diharapkan

telah muncul kelembagaan yang terbentuk untuk menjaga stabilitas kemandirian wilayah. Pengembangan inovasi serta teknologi dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang mandiri dan sejahtera diharapkan bisa didorong lebih maksimal pada saat ini.

Dalam mencapai tema pembangunan yang telah ditetapkan di atas, arahan kebijakan yang sudah dirumuskan berdasarkan strategi pembangunan yang ada kemudian dijabarkan kembali dengan rentang tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. Pada **Tabel 6-3** akan diperlihatkan pada tahun perencanaan dan tahap apa masing-masing arahan kebijakan dimulai.

Adapun keterkaitan arah kebijakan dan tema pembangunan tahunan, serta keterkaitan antara tujuan sampai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 6-4**.



Tabel 6-3

Arahan Kebijakan dalam Rentang Tahun Perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026

Arahan Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah					
Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar *					
Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri					
Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan					
Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi					
Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi					
Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro *					
Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya					
Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi *					
Pengembangan simpul pangan regional dan lokal					
Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani*					
Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan					
Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan					
Pengembangan kualitas hidup ikan perairan					
Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan					
Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung *					
Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan *					
Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif					
Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda *					
Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi					
Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi					
Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal *					
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata					



Arahan Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global *					
Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan					
Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0 *					
Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global					
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan *					
Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan*					
Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi					
Menurunkan angka kelahiran murni *					
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah *					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah *					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana *					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa *					
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan					
Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik *					
Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan *					
Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD					
Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip					
Peningkatan kapasitas APIP					
Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN					
Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan *					
Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan *					
Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah					
Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis					



Arahan Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan					
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah					
Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran *					
Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja *					
Meningkatkan perlindungan pekerja					
Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0					
Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak *					
Pengembangan simpul pangan regional dan lokal *					

Keterangan: *)Termasuk program strategis Bupati

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-4

Arahan Kebijakan Pada Setiap Tahun Perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar* • Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri • Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan • Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi • Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi • Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro* • Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya • Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi* • Pengembangan simpul pangan regional dan lokal • Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani* • Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan • Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan • Pengembangan kualitas hidup ikan perairan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar* • Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri • Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan • Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi • Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi • Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro* • Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya • Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi* • Pengembangan simpul pangan regional dan lokal • Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani* • Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan • Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan • Pengembangan kualitas hidup ikan perairan • Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra 	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar* • Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri • Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan • Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi • Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi • Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro* • Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya • Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi* • Pengembangan simpul pangan regional dan lokal • Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani* • Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan • Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan • Pengembangan kualitas hidup ikan perairan • Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0* • Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pembangunan berbasis risiko bencana* • Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan* • Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip • Peningkatan kapasitas APIP • Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis • Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global • Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan* • Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip • Peningkatan kapasitas APIP • Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis • Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan • Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran* • Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak*



2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung* • Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan* • Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif • Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda* • Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi • Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi • Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal* • Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global* • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan* • Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi • Menurunkan angka kelahiran murni* • Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan 	<p>pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan* • Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif • Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda* • Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi • Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi • Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal* • Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global • Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global* • Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0* • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan* • Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan 	<p>citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan* • Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif • Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda* • Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi • Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi • Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal* • Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global • Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global* • Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0* • Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran* • Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak* 	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
<p>sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kelahiran murni* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa* • Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik* • Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan* • Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD • Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah • Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran* • Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja* • Meningkatkan perlindungan pekerja 	<p>kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kelahiran murni • Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan* • Menurunkan angka kelahiran murni* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa* • Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik* • Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN • Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan* • Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan* 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan* • Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi • Menurunkan angka kelahiran murni* • Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana* • Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa* • Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik* • Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan* 		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0 • Pengembangan simpul pangan regional dan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD • Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah • Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis • Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran* • Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja* • Meningkatkan perlindungan pekerja • Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0 • Pengembangan simpul pangan regional dan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN • Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan* • Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan* • Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD • Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah • Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis • Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan • Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran* • Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja* • Meningkatkan perlindungan pekerja • Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0 • Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak* • Pengembangan simpul pangan regional dan lokal 		

Keterangan: *)Termasuk program strategis Bupati

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-5

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan		
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah					
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Penataan logistik produk pangan dan non pangan	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar		
	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Penumbuhan dan penataan sentra industri	Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri		
			Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan		
			Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi		
	Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha	Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi	Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi		
			Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro		
			Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya		
	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi	Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi		
	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan			Peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perkebunan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal
					Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular
Peningkatan daya saing sektor perikanan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	Peningkatan daya saing sektor perikanan melalui penciptaan Inovasi dan penguatan kolaborasi	Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani			
		Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan			
		Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan			
Meningkatnya daya saing pariwisata	Promosi dan branding kawasan wisata	Pengembangan kualitas hidup ikan perairan			
		Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			
		Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung			
Meningkatnya daya saing pariwisata	Penataan daerah kawasan pariwisata berstandar global	Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif
		Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala global	Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda
	Meningkatnya investasi di Kabupaten Bandung	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai daya tarik investasi	Penguatan daya tarik investasi Daerah
		Peningkatan citra Kabupaten Bandung sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan prospektif	Penyelenggaraan branding investasi di Kabupaten Bandung Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-6

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2

TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata			
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Pemerataan pelayanan sekolah formal dan non formal	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global
			Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan pelayanan pendidikan terutama dalam mendukung industri 4.0 dan isu-isu pembangunan global	Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0
		Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan akses pelayanan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan
		Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan reproduksi	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi
		Menurunkan angka kelahiran murni	
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk berpenghasilan rendah	Peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-7

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan			
Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah yang berkualitas	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan infrastruktur daerah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah
	Meningkatnya ketahanan bencana	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana
	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-8

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik
		Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan
		Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
		Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas APIP
		Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN	Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
		Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kemandirian fiskal	Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD
		Peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam hidup bermasyarakat	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat	Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis
			Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-9

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah			
Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Penguatan daya beli masyarakat	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
	Berkurangnya jumlah pengangguran	Meningkatkan kualitas pengelolaan angkatan kerja	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
		Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatkan perlindungan pekerja
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan melindungi hak-hak anak	Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0
Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Menurunnya masalah pangan Daerah	Tercapainya ketahanan pangan daerah dan masyarakat melalui penciptaan inovasi dan penguatan kolaborasi simpul pangan	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



6.1.1 Kebijakan Terkait Penanganan COVID-19

Tema yang diusung untuk tahun pertama perencanaan menengah daerah Kabupaten Bandung, yakni Pemulihan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif, merupakan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang berupaya memperkuat kembali perekonomian masyarakat. Diketahui bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat tidak merata di semua sektor dan kalangan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari adanya sektor-sektor yang lebih terdampak dibandingkan yang lain dan adanya kalangan masyarakat yang lebih rentan terhadap represi pandemi dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemulihan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bandung.

Dalam mewujudkan tema pembangunan tersebut, pola pembiayaan pembangunan Kabupaten Bandung disusun dengan menggunakan skala prioritas pengalokasian anggaran. Selaras dengan pola pembiayaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, berikut adalah prioritas pola pembiayaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bandung.

1. Prioritas 1: Dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, serta penanganan, rekonstruksi, dan rehabilitasi dampak pandemik COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial
2. Prioritas 2: Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan pelayanan dasar
3. Prioritas 3: Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung mencakup dua aspek, yakni

penanganan kesehatan dan pemulihan perekonomian masyarakat. Rincian kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung berdasarkan kedua aspek tersebut adalah sebagai berikut.

A. Penanganan Kesehatan Masyarakat

Dalam mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat, Indonesia per Januari 2021 sudah melakukan program vaksinasi secara bertahap dengan target kalangan masyarakat prioritas. Sesuai dengan instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi COVID-19, vaksin diberikan secara gratis, yakni masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk memprioritaskan program vaksinasi mulai tahun anggaran 2021 dan direncanakan program tersebut akan berlanjut hingga tahun 2022.

Pada implementasinya, gelombang 1 vaksinasi mencakup periode Januari-April 2021 untuk petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia. Sedangkan gelombang 2 vaksinasi adalah April 2021 hingga Maret 2022 untuk masyarakat rentan dan masyarakat lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Meski program vaksinasi telah berjalan secara bertahap di Indonesia, pemerintah daerah diarahkan untuk terus mengadvokasi penerapan 3M ke masyarakat, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Rincian kebijakan prioritas penanganan COVID-19 yang diterapkan oleh Pemerintah Bandung mencakup aspek preventif, kuratif, dan promotif. Adapun rincian kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Preventif, yakni meliputi kebijakan pencegahan sebagai berikut.
 - a. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
 - b. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Upaya yang dilakukan meliputi Disinfeksi dan Pemasangan Sarana CTPS di Tempat Umum. Secara lebih rinci, kegiatan yang dilakukan mencakup:



- i. Desinfeksi di Tempat Umum (Terminal, pasar, sekolah, perkantoran dll) melalui kemitraan dengan Organisasi Profesi, BUMN, dan Swasta dalam rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19
- ii. Pemasangan sarana CTPS di tempat umum disertai edukasi cuci tangan yang benar dan gerakan bersih-bersih
- c. Peningkatan surveilans bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 serta dalam rangka meningkatkan surveilans bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dilakukan dengan cara:
 - i. *Testing* (Test), meliputi:
 - Pembentukan jejaring lab. pemeriksa COVID-19
 - Percepatan tes COVID-19 bagi yang bergejala (suspek)
 - ii. *Tracing* (pelacakan), meliputi:
 - Penguatan PE dan pelacakan kontak
 - Pemantauan karantina kontak erat
 - iii. *Isolate* (Isolasi), meliputi:
 - Isolasi mandiri, isolasi di RS darurat, isolasi di RS rujukan
 - Karantina mandiri bagi kontak erat
 - iv. *Treatment* (Penanganan), meliputi:
 - Penyiapan RS darurat, RS perawatan, dan RS rujukan COVID-19
 - Pengobatan simptom, suportif, penyakit komorbid.
 - d. Mengembangkan jaring pengaman sosial mandiri maupun dengan pemerintah
 - e. Penegakan hukum protokol kesehatan di setiap jenjang aktivitas masyarakat
 - f. Peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 di masyarakat Kabupaten Bandung
2. Promotif, yakni meliputi kebijakan peningkatan sebagai berikut.
 - a. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
 - b. Advokasi 5M. Kebijakan Advokasi 5 M meliputi penyebaran Informasi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat Tentang COVID-19 dan pencegahan dengan 5 M, kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya:
 - i. Pembuatan Poster Digital Untuk Masyarakat
 - ii. Membuat Pedoman Bagi tenaga kesehatan, masyarakat, dan Kelompok Rentan
 - iii. Kampanye Beribadah Ramadhan Sehat dan Ajakan Tidak Mudik.
 - iv. Membuat Iklan Layanan Masyarakat
 - v. Kampanye pakai 5 M dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - vi. Kampanye adaptasi kebiasaan baru
 - c. Advokasi vaksinasi
 - d. Advokasi Gerakan Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS). Kebijakan ini dapat diimplementasi dengan kegiatan sebagai berikut.
 - i. GERMAS di semua tatanan dengan adaptasi kebiasaan baru
 - ii. Dilakukan semua sektor mulai dari pusat, provinsi, kab/kota, puskesmas serta kelompok2 masyarakat



- iii. Edukasi & Perilaku Hidup Sehat di berbagai media
 - iv. Penyusunan regulasi GERMAS tingkat Kabupaten
 - v. Advokasi ke pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain untuk menggalakkan GERMAS
- e. Kerja sama dengan komunitas dalam rangka peningkatan kewaspadaan COVID-19. kebijakan ini dapat diimplementasi dengan kegiatan sebagai berikut.
- i. Senam Virtual
 - ii. Poster bagi remaja
 - iii. Lomba vlog bersih lingkungan
 - iv. Komunitas gizi, ibu dan anak untuk cegah COVID 19
 - v. Kemitraan dunia usaha, swasta
 - vi. Gerakan Masyarakat 5 M (GEMA 5 M)
 - vii. Kampanye Pencegahan COVID-19 Pelajar Kabupaten Bandung
 - viii. Kampanye #satukertascegahcovid
 - ix. Kampanye bersama mahasiswa Cegah COVID19
 - x. Gerakan Bersih Sekolah dan Giat Bersih Tempat Ibadah
 - xi. Dukungan pencegahan COVID-19 pada PMI
3. Kuratif, yakni meliputi kebijakan penyembuhan sebagai berikut.
- a. Peningkatan kapasitas daya tampung fasilitas kesehatan untuk penyintas COVID-19
 - b. Penyintas COVID-19 Tanpa Gejala diisolasi secara mandiri dengan pendampingan tenaga/kader kesehatan setempat

B. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung berupaya mendukung tercapainya *Indonesian economic rebound* Tahun 2022 dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional 5,4 – 6% dan LPE Provinsi Jawa Barat 5% berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Dukungan pencapaian LPE tersebut, Kabupaten Bandung ditargetkan sebesar 5,25% pada Tahun 2022.

Menurut BPS (2021), dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 79% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 19%. Sedangkan, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 54% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil, serta sektor pertanian. Selain itu, BPS melaporkan sekitar 97% ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, penguatan pada sektor-sektor ini dapat mengakselerasi peningkatan LPE di Kabupaten Bandung untuk mendukung *Indonesian Economic Rebound*; yang pada akhirnya juga dapat mendukung tercapai penurunan tingkat kemiskinan Jawa Barat ke 7,3 - 7,9% dan tingkat pengangguran ke 9,7%.

Upaya pemulihan ekonomi masyarakat meliputi 2 langkah, yakni melalui 3 (tiga) pilar pemulihan ekonomi dan program strategis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan masing-masing upaya tersebut adalah sebagai berikut.

3 Pilar Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung

Pada tahun 2022, pembangunan Kabupaten Bandung berfokus pada fase pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat, yakni dengan penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan logistik pangan, dan penguatan investasi pariwisata serta pengembangan pusat inovasi melalui kerja sama pentahelix. Ketiga skenario pemulihan tersebut saling



terintegrasi untuk mendorong pemulihan perekonomian masyarakat yang inklusif di Kabupaten Bandung. Rincian masing-masing skenario adalah sebagai berikut.

1. Penguatan UMKM dan Koperasi

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 53%. Peranan pemerintah Kabupaten Bandung dalam intervensi sektor industri pengolahan difokuskan pada industri kecil, terutama pada UMKM yang disinergiskan oleh koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat. Dalam skenario ini, peranan pemerintah adalah menjaga kontinuitas produksi dan mengembangkan diferensiasi produk, membangun rintisan *end-to-end system* dalam pemasaran produk UMKM berbasis digital, serta mengembangkan pusat inovasi dan inkubasi bisnis menjadi kerangka prioritas ketahanan ekonomi lokal.

Skenario penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas struktur prioritas kebijakan yang saling berkesinambungan. Keempat prioritas kebijakan ini menjadi penunjang dalam pembentukan klaster-klaster industri. Prioritas kebijakan penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas:

- a. Kontinuitas produksi dan diferensiasi produk UMKM, yang diwujudkan dengan:
 - i. Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM;
 - ii. Fasilitasi penguatan kontinuitas ketersediaan sarana produksi;
 - iii. Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai stakeholder meliputi: perguruan Tinggi, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan diferensiasi produk dan teknologi produksi;
 - iv. Pengembangan standar dan protokol kesehatan dalam produksi produk; dan,
 - v. Fasilitasi sertifikasi produk.
 - b. Pembangunan sistem *end-to-end business*, yang diwujudkan dengan:
 - i. Pengembangan digitalisasi pemasaran produk UMKM (e-Commerce);
 - ii. Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan KADIN, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan pemasaran;
 - iii. Penguatan branding produk UMKM;
 - iv. Pengembangan koperasi produksi digital; dan
 - c. Penguatan Pemodalan UMKM, yang diwujudkan dengan:
 - i. Fasilitasi pengembangan kerja sama perkreditan (*business matching*) dengan perbankan;
 - ii. Penguatan lembaga BPR sebagai lembaga penyalur kredit usaha kecil;
 - iii. Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan KADIN atau Lembaga permodalan lainnya.
 - d. Pengembangan pusat inovasi dan inkubasi bisnis, yang diwujudkan dengan:
 - i. Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM (inkubasi bisnis);
 - ii. Pemetaan pengembangan *business matching*;
 - iii. Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau institusi lainnya sebagai transfer teknologi produksi dan diferensiasi produk, pemasaran, dan branding;
 - iv. Penguatan database UMKM; dan
 - v. Penelitian dan pengembangan produk berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- ### 2. Pengembangan Logistik Pangan
- Sementara itu, pengembangan logistik pangan dititikberatkan pada peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Titik



fokus pada pengembangan logistik pangan adalah menata dan memperkuat rantai pasok pangan dalam pendekatan deglobalisasi pangan, yakni penguatan produksi pangan lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan swasembada pangan sebagai akibat dampak terganggunya jalur distribusi pangan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Pembatasan perdagangan ekspor-impor di wilayah Indonesia yang mengakibatkan daerah perlu memperkuat ketahanan pangan sendiri melalui pengembangan logistik pangan. Selain itu, menghadapi tantangan adanya paparan virus COVID-19, pemerintah juga perlu mulai mensosialisasikan pergeseran preferensi pangan masyarakat terhadap healthy food untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengelola ketahanan pangan rumah tangga, menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan produk pangan, menata distribusi pangan, mensosialisasikan program B2SA dan mengendalikan stabilitas harga pangan.

Melalui kebijakan pengembangan logistik pangan, diharapkan dapat menciptakan kepastian harga pasar, informasi pasokan yang tersedia, transparansi biaya transaksi, dan konsumsi pangan sehat bernutrisi. Sebagai tahap awal pengembangan sistem logistik pangan Kabupaten Bandung, pemerintah menyusun arah kebijakan prioritas program/kegiatan untuk Tahun 2022, antara lain:

- a. Penguatan sub-sistem produksi pangan melalui penguatan teknologi produksi dan pendampingan desiminasi teknologi dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
 - b. Penguatan kelembagaan simpul pangan tingkat kabupaten.
 - c. Penguatan kelembagaan simpul pangan pada lingkungan masyarakat terendah.
 - d. Pengembangan kolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi, BULOG, perusahaan layanan pengiriman.
 - e. Penguatan database pangan real-time dan faktual.
3. Penguatan Investasi Pariwisata
- Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 menjadi komponen yang juga harus diintervensi dalam rangka pemulihan ekonomi. Kabupaten Bandung memiliki banyak objek wisata, khususnya wisata alam, perlu menerapkan kebijakan baru berkaitan dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun dan menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata demi mendorong perubahan layanan kepariwisataan. Layanan ini termasuk di dalamnya adalah perhotelan, restoran, dan jasa-jasa lainnya. Kebijakan lainnya adalah membangun kembali kepercayaan bersama antara pemerintah dan sektor swasta, memperkuat kolaborasi antar stakeholder, dan menata kawasan pariwisata berbasis *cleanliness, health, dan safety*.
- Untuk mampu menguatkan kembali investasi di bidang pariwisata Kabupaten Bandung, ditetapkan 3 (tiga) tahapan prioritas kebijakan yang mampu menunjang penguatan investasi pariwisata. Ketiga prioritas kebijakan tersebut yaitu:
- a. Pengembangan *branding* wisata
 - i. Penyusunan dan penerapan protokol CHS (*cleanliness, health, safety*) wisata untuk hotel, restoran, gerai produk wisata, dan kawasan wisata;
 - ii. Pengembangan *branding* destinasi wisata;
 - iii. Promosi wisata; dan



- iv. Penguatan kerja sama dan keterlibatan komunitas wisata, masyarakat, dan institusi lainnya dalam branding wisata.
- b. Penataan Kawasan wisata
 - i. Penguatan keterlibatan dan kerja sama dengan komunitas wisata, masyarakat, dan institusi (PTPN, Perhutani) atau pihak swasta lainnya dalam penataan kawasan wisata;
 - ii. Penataan lingkungan wisata.
 - iii. Penataan gerai produk wisata.
 - iv. Aktivasi pusat informasi pariwisata.
 - v. Penyusunan masterplan kawasan wisata.
- c. Penguatan investasi pariwisata
 - i. Penyusunan profil dan proposal investasi kawasan unggulan Kabupaten Bandung.
 - ii. *Business matching* pelaku dan stakeholder wisata.

Program Strategis Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan program strategi yang menitikberatkan penguatan modal sosial masyarakat. Program strategi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya penurunan tingkat kemiskinan Nasional ke 8,5 – 9% serta tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat 7,3 – 7,9% di Tahun 2022. Guna mendukung penurunan tingkat kemiskinan tersebut, Kabupaten Bandung ditargetkan 6,32%.

Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung akibat COVID-19 untuk mendukung tercapainya *Indonesian economic rebound* Tahun 2022 dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional 5,4 – 6% dan LPE Provinsi Jawa Barat 5% berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Dukungan

pencapaian LPE tersebut, Kabupaten Bandung ditargetkan sebesar 5,34% pada Tahun 2022.

Menurut BPS (2021), dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 79% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 19%. Sedangkan, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 54% pada PDRB Kabupaten Bandung, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil, serta sektor pertanian. Selain itu, BPS melaporkan sekitar 97% ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, penguatan pada sektor-sektor ini dapat mengakselerasi peningkatan LPE di Kabupaten Bandung untuk mendukung Indonesian Economic Rebound; yang pada akhirnya juga dapat mendukung tercapai penurunan tingkat kemiskinan Jawa Barat ke 7,3 - 7,9% dan tingkat pengangguran ke 9,7%.

Program strategis Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui “Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa” pada sektor-sektor ekonomi produktif yang dapat menguatkan ekonomi kerakyatan. Program strategis ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan skala mikro bagi masyarakat dan pelaku usaha, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri.

Pada implementasinya, program ini mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut.

1. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Adapun tujuan dan sasaran program strategis Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bandung baik di bidang sosial kemasyarakatan (daya tahan), bidang pemberdayaan ekonomi (daya saing dan daya tarik), maupun bidang pembangunan sarana dan prasarana dasar (daya lestari).
2. Mengakselerasi pengembangan aktivitas usaha masyarakat berbasis klaster ekonomi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, pelaku usaha mikro serta koperasi guna meningkatkan kewirausahaan dan skala ekonomi masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, melalui:

1. Pengembangan dan pemberdayaan usaha dalam bentuk Koperasi dan/atau bentuk lembaga ekonomi mikro lainnya.
2. Pemberdayaan UMKM, industri rumah tangga, industri kreatif, usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta usaha ekonomi produktif lainnya.
3. Mengoptimalkan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa dalam sektor ekonomi.
4. Mendorong pelaku usaha mikro untuk ikut serta dalam koperasi dalam upaya meningkatkan skala ekonomi.
5. Mengintegrasikan aktivitas ekonomi BUM Desa dengan Koperasi dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan skala ekonomi pelaku usaha.
6. Menjembatani pemasaran produk pelaku usaha mikro dan kecil melalui kemitraan usaha dengan Koperasi, Koperasi Desa, dan Koperasi produksi lainnya.
7. Meningkatkan keterlibatan filantropi dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif.
8. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Penelitian dalam mengembangkan pusat inovasi dan *co-working space* di tingkat masyarakat sebagai wadah transfer pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan skala ekonomi koperasi dan pelaku usaha mikro.

Alternatif mekanisme penyaluran dana APBD Kabupaten Bandung dalam program ini dapat berupa: 1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, dan 2) Kerja sama dengan Perbankan (BJB dan/atau perbankan BUMN lainnya) (lihat **Gambar 6-6**). Sedangkan peruntukan program ini terutama digunakan untuk pembinaan, pendampingan, pengendalian, dan pengawasan. Beberapa Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan Peraturan Bupati:
 - a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa,
 - b. Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Keuangan.
2. Menu Kegiatan menjadi bagian dalam SIPD yang diprioritaskan untuk program pembinaan, pendampingan, pengendalian, dan pengawasan bagi pengembangan lembaga keuangan mikro.
3. Perangkat Daerah: DPMD, DiskopUKM, Disperindag, Bagian Perekonomian Setda, dan Kecamatan & Kelurahan.

Bantuan Keuangan Khusus Desa	Kerja sama dengan BPR dan Perbankan
<p>Definisi: bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus pada Desa.2. Menu Kegiatan menjadi bagian dalam SIPD yang diprioritaskan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat.3. Kepala Desa menyusun usulan penyaluran dana kepada Perangkat Daerah yang membidangi PMD dan Keuangan Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluator Independen hasil seleksi proposal bisnis koperasi dan pelaku usaha mikro.	<p>Dana salur berupa Hibah bergulir kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme kerja sama dengan BPR atau Perbankan lainnya, terutama terkait dengan indikator koperasi dan pelaku usaha penerima, bunga, dan agunan pinjaman.2. BPR atau perbankan dapat menyalurkan dana atas dasar hasil rekomendasi dari Tim Evaluator.

Gambar 6-4
Rincian Alternatif Mekanisme Penyaluran APBD Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

6.3 Arah Kebijakan Spasial Kabupaten Bandung

Perencanaan berbasis kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang akan memetakan langsung lokasi pembangunan secara spesifik. Dengan demikian, implementasi pembangunan diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Beberapa perencanaan berbasis kewilayahan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bandung sesuai yang sudah direncanakan pada RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036. Penelaahan RTRW

Kabupaten Bandung dilakukan untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang pembangunan daerah tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung meliputi:

- i. Kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan Daerah untuk mewujudkan



kemandirian dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan merata.

- i. Kebijakan pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi sesuai fungsi pusat kegiatan dan sistem sarana prasarana yang terpadu.
- ii. Kebijakan pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya dengan prinsip berkelanjutan.
- iii. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan.
- iv. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung terikat pada keharusan untuk mengikuti struktur ruang wilayah yang berada pada hirarki di atasnya. Rencana struktur ruang juga harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada di dalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan.

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Bandung dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan. Konsep yang digunakan ialah membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten dan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten. Pengembangan sistem perkotaan/permukiman di wilayah Kabupaten Bandung mempertimbangkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masing-masing pusat kegiatan, mengembangkan sistem jaringan

prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain untuk mengurangi ketergantungan kepada wilayah lain, mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah kabupaten, dan mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.

Rencana penetapan pusat kegiatan meliputi:

- a. PKN, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
- b. PKL Soreang-Kutawaringin-Katapang yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten atau Ibukota Kabupaten, perdagangan dan jasa regional, perumahan, permukiman, industri, pariwisata dan pertanian;
- c. PKLp Banjaran, Majalaya, Baleendah, Cileunyi-Rancaekek dan Cicalengka yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan, permukiman, industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi
- d. PPK Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Canguang, Ciparay, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Cilengkrang, dan Cimencyan yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, wisata alam, industri, agroindustri, perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
- e. PPL Rancabali, Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk, Kertasari, Pacet, Ibum, Solokanjeruk, Paseh, Nagreg, dan Cikancung yang berfungsi sebagai perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan, transport alam, agroindustri, kehutanan, dan konservasi.

2. Rencana Sistem Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi untuk Kabupaten Bandung akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Arah jangka



panjang rencana pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Bandung ialah menyediakan sarana transportasi massal antar wilayah khususnya yang menunjang pergerakan yang mengarah ke Kota Bandung dan Kota Cimahi. Arahan transportasi Kabupaten Bandung adalah transportasi kereta api atau light rail transportation (monorel). Guna meningkatkan kapasitas dan tingkat pelayanan jalan dan memperbaiki sistem manajemen lalu lintas, rencana jangka pendek transportasi untuk Kabupaten Bandung ialah penataan angkutan umum untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. Sementara konsep pengembangan jaringan transportasi jangka menengah adalah melakukan pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk dibangun adalah jalan tol Soreang-Cidaun, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan jalan tol dalam Kota Bandung. Pengembangan terminal yang diusulkan adalah pembangunan terminal terpadu di Gedebage, pembangunan terminal tipe B di Soreang, Cicalengka, Padalarang, Tanjungsari dan Lembang, pembangunan terminal tipe C di Banjaran, Ciparay, Rancaekek. Sistem angkutan massal yang diusulkan untuk Metropolitan Bandung berupa monorail, double decker, busline, LRT, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan peningkatan jalur kereta api. Sementara itu, rencana sistem transportasi udara di Kabupaten Bandung meliputi Bandara khusus pertahanan dan keamanan di Kecamatan Margahayu dan ruang udara untuk penerbangan.

3. Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Rencana jaringan sumber daya air di Kabupaten Bandung meliputi sistem pengelolaan wilayah sungai (WS), cekungan air tanah (CAT), jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian daya rusak air. Rencana jaringan sumber daya air bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya air sebagai air baku kebutuhan penduduk di Kabupaten Bandung.

Rencana pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai (WS) di Kabupaten dilakukan dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian potensi Wilayah Sungai sekaligus Daerah Sungai yang ada di Kabupaten Bandung. Selain itu, sinergi dan integrasi perencanaan dengan kabupaten/kota sekitar terutama terkait konservasi sumber daya air juga perlu dilakukan. Upayanya antara lain konservasi sungai, pemanfaatan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Pengembangan jaringan irigasi ditujukan untuk mengairi areal pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bandung untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Rencana sistem jaringan dan pengelolaan air baku di Kabupaten Bandung melalui jaringan PDAM Tirta Raharja dengan pelayanan kawasan perkotaan PKL, PKLp, dan PPK sementara kawasan perdesaan dengan fungsi PPL dikembangkan penyediaan air baku perdesaan. Rencana pengendalian banjir regional di kawasan rawan banjir seperti di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu/ Sub DAS Hulu Citarum dikendalikan melalui rencana pembangunan tanggul di sekitar sungai, pengerukan tanah dan sampah, pembangunan kolam retensi/polder, penataan drainase primer dan sekunder, rehabilitasi sungai, pembangunan *flood way*, serta rehabilitasi sarana bangunan air. menggunakan solar cell, biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik, pengembangan jaringan listrik dengan sistem bawah tanah, pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran listrik, serta pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

4. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bandung hingga tahun 2036 adalah sekitar 1.770.071 SST. Pelayanan telekomunikasi dilayani oleh PT. Telkom Kabupaten Bandung dan PT Telkom Divisi Regional (Divre) III Jabar. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bandung adalah



pengembangan sistem jaringan telepon tetap (kabel) dan pengembangan sistem jaringan telepon bergerak (nirkabel) yang diimplementasikan dengan pembangunan Tower BTS Terpadu, pengembangan jaringan internet dan pengembangan jaringan cyber province yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung terutama pada wilayah pusat kegiatan (PKL, PKLp, dan PPK).

5. Rencana Fasilitas Pengelolaan Sampah

Rencana sistem persampahan di Kabupaten Bandung meliputi peningkatan pelayanan persampahan di wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Bandung sementara wilayah Selatan didominasi dengan penanganan individual melalui upaya penanganan 3R dan Bank Sampah, optimalisasi operasional dan teknologi pengolahan TPPAS Legok Nangka, pengembangan TPPAS Babakan Ciparay dengan sistem sanitary landfill / controlled landfill, pengembangan bangunan daur ulang dengan penyediaan TPST3R di tiap kecamatan, penyediaan Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) dan komposer di seluruh kecamatan, pembangunan SPA (Stasiun Peralihan Antara), serta pemanfaatan sampah menjadi biogas, pembangkit listrik, bahan bakar, dan pupuk.

6. Rencana Sistem Pengolahan Air Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beraacun (B3)

Rencana sistem pengolahan air limbah yang diterapkan di Kabupaten Bandung adalah sistem pembuangan air limbah setempat (on site sanitation) yang dilaksanakan oleh masing-masing keluarga sementara sistem off site direncanakan di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan komersial dan pusat pemerintahan.

7. Rencana Sistem Jaringan Drainase

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Bandung meliputi penyediaan dan pemanfaatan saluran drainase terpisah dari saluran buangan air limbah domestik maupun non domestik,

penataan saluran drainase, pengembangan sistem drainase kombinasi, penataan saluran drainase pada kawasan perkotaan, peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan, pengembangan sistem drainase makro dan perkotaan, pembuatan embung, serta pembangunan sarana drainase perkotaan pada kawasan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.

8. Rencana Sistem Pelayanan Air Minum

Rencana sistem pelayanan air minum di Kabupaten Bandung yaitu rencana sistem penyediaan air bersih dengan melakukan pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air, perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi, pengembangan sistem penyediaan air bersih regional, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi, perbaikan manajemen pengelolaan, peningkatan kemitraan, pengembangan sistem penyediaan air bersih lintas wilayah, dan pengembangan pemanfaatan air untuk industri air minum dan kemasan.

9. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik dan Energi

Pengembangan prasarana energi di Kabupaten Bandung adalah melalui pengembangan jaringan listrik perdesaan, elektrifikasi jaringan listrik untuk perumahan baru dengan mengikuti jaringan listrik yang sudah ada, pengembangan sumber energi listrik terbarukan di antaranya.

10. Rencana Sistem Kebencanaan

Pemanfaatan ruang dalam mendukung sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung di antaranya melalui sistem peringatan dini, bangunan penyelamatan, dan jalur penyelamatan.

B. Rencana Pola Ruang



Pola ruang wilayah Kabupaten Bandung sepenuhnya dikembangkan dengan memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bandung serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan. Pola ruang di Kabupaten Bandung diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya agar tercipta

keseimbangan dan keserasian dalam peruntukan ruang.

1. Rencana Kawasan Lindung

Jenis kawasan lindung yang ada di Kabupaten Bandung terdiri dari hutan lindung, kawasan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan konservasi, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Tabel 6-10

Alokasi Luas Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Cagar Alam	15.157,42	8,6
2	Taman Buru	1.043,45	0,59
3	Taman Hutan Raya	230,21	0,13
4	Taman Wisata Alam	549,18	0,31
5	Sempadan	1.198,26	0,68
6	Hutan Lindung	34.204,02	19,41
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	339,79	0,19
8	Perairan	483,92	0,27
9	Kolam Retensi	26,75	0,02
Total		53.232,99	30,21

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2. Rencana Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang yang mampu menjadi wadah bagi berlangsungnya berbagai kegiatan penduduk serta keterkaitan fungsional antar kegiatan, sehingga tercipta keserasian antara satu kegiatan dengan kegiatan lain serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan budidaya di

Kabupaten Bandung mencakup kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, serta kawasan peruntukan lainnya.

Tabel 6-11

Alokasi Luas Kawasan Budidaya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi	4.323,19	2,45
2	Hutan Produksi Terbatas	57,01	0,03
3	Tanaman Tahunan / Perkebunan	35.449,37	20,11



No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
4	Hutan Rakyat	913,91	0,52
5	Pertanian Lahan Basah	31.046,74	17,62
6	Pertanian Lahan Kering	8.376,22	4,75
7	Perikanan	573,52	0,33
8	Peternakan	80,07	0,05
9	Kawasan Peruntukan Industri	4.386,00	2,49
10	Pemerintahan / Fasum	488,99	0,28
11	Kawasan Permukiman	33.458,53	18,98
12	Perdagangan / Jasa	3.253,72	1,85
13	Kawasan Hankam	598,41	0,34
Total		123.005,68	69,79

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kebijakan dan arahan pembangunan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi yang mengarahkan arah pengembangan dalam memacu pertumbuhan bagi Kabupaten Bandung.

i) Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Bandung meninjau pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan. KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung Raya dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Selain Kawasan Strategis Nasional, Kabupaten Bandung memiliki rencana pembangunan kawasan terpadu. Berikut adalah penjabaran rencana pembangunan tersebut.

a. Pembangunan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB)

Pengembangan kawasan KSTB dilatarbelakangi oleh adanya potensi internal wilayah serta kemungkinan perkembangannya yang diprediksi akan semakin besar terkait kedudukan strategisnya di lingkup regional Provinsi Jawa Barat dan nasional. Ditinjau dari potensi internal, pada kondisi eksisting kawasan KSTB merupakan kawasan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, secara tidak langsung kawasan ini menjadi *landmark* serta mewakili wajah Kabupaten Bandung ketika dilihat dari kaca mata eksternal. Selain itu, sebagai pusat pemerintahan, kawasan ini memegang peranan penting sebagai pusat pelaksanaan pengembangan dan pengendalian Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Sebagaimana umumnya pusat-pusat pemerintahan wilayah administratif lain di Indonesia, kawasan KSTB juga menjelma menjadi pusat komersial dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, terlebih lagi dengan adanya potensi dalam sektor industri, jasa, pertanian, perdagangan, dan UKM.

Dengan luas kawasan kurang lebih sekitar 2.523 Ha, kawasan KSTB meliputi empat kecamatan, di antaranya Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang dan Margaasih (Ang-Kut-Ka-Sih). Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan ini, selain dipengaruhi oleh kualitas sumber daya masyarakat lokal, serta ketersediaan sumber daya alam, juga turut



dipengaruhi oleh faktor geografis. Kawasan KSTB memiliki posisi strategis dengan jarak 5-10 Km dari Kota Bandung, yang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Selain dari pada itu, kawasan ini juga dilalui jaringan kolektor primer yang menjadi penghubung dalam jalur pergerakan arah utara-selatan di Provinsi Jawa Barat.

Ditinjau dari konteks regional Provinsi Jawa Barat dan nasional, KSTB merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang dalam RTRW Nasional Tahun 2008-2028 ditetapkan sebagai kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan dan dipandang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dalam lingkup regional provinsi dan nasional. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Cekungan Bandung, pertumbuhan di kawasan KSTB akan berdampak pada perkembangan Kawasan Cekungan Bandung. Pertumbuhan KSTB ke depan diprediksi akan semakin meningkat dengan dibangunnya Jl. Tol Soroja (Soreang – Pasir Koja) yang meningkatkan aksesibilitas terhadap Kota Bandung, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Tol Soroja akan membangkitkan pergerakan barang dan jasa dari dan menuju kawasan KSTB dan kawasan lainnya di Kabupaten Bandung. Kawasan KSTB akan menjadi gerbang dari dan menuju Kabupaten Bandung sekaligus menjadi hub pergerakan barang dan jasa. Seiring meningkatnya pergerakan, sebagai implikasinya diprediksi akan terjadi peningkatan aktivitas komersial, jasa dan permukiman di sekitar koridor jalan tol. Terlebih lagi dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sejak tahun 2016. Kemudahan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bandung akan menjadi magnet bagi pertumbuhan kegiatan di Kabupaten.

Didasari oleh adanya prediksi- prediksi perkembangan ke depan, maka kemungkinan perkembangan ini perlu didukung oleh ketersediaan sarana prasarana, seperti sarana prasarana transportasi, permukiman, air bersih dan air limbah, drainase, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta sarana jasa dan komersial lainnya. Untuk menjamin terwujudnya rencana, maka rencana pengembangan KSTB perlu dipayungi suatu regulasi,

salah satunya yaitu dengan mengakomodir rencana pengembangan dalam rencana pengembangan kawasan, baik itu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun rencana tapak dengan skala yang lebih besar. Melalui perencanaan pengembangan kawasan, selain akan menjamin terwujudnya rencana juga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan isu dan persoalan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah. Beberapa isu tersebut antara lain terjadinya pembangunan kawasan perkotaan yang tidak terarah (*urban sprawl*), kemacetan lalu lintas terutama sekitar gerbang Tol Soroja, pertumbuhan permukiman kumuh dan liar (*slump and squatter*), termarginalisasinya masyarakat lokal oleh pendatang yang memiliki kemampuan skill yang lebih baik, serta isu terjadinya degradasi lingkungan sebagai trade off antara sektor ekonomi dan lingkungan.

Pengembangan KSTB didasarkan pada dua konsep, yaitu konsep pembangunan kawasan terpadu (*compact city*) dan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konsep *compact city* dalam hal ini merujuk pada pembangunan kawasan yang menerapkan penggunaan lahan campuran (*mixed land use*), yang menggabungkan fungsi permukiman, komersial, kultural, institusional, perkantoran, industri dan fungsi lainnya secara terintegrasi dalam satu kawasan. Melalui penerapan konsep ini, diharapkan dapat meningkatkan fungsi kawasan serta dapat mereproduksi waktu perjalanan antar fungsi guna lahan, sehingga lebih jauh lagi penerapan konsep *compact city* akan berdampak pada penghematan energi.

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang pertama kali dicetuskan dalam Brundtland Report diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan mengacu pada konsep ini, pembangunan KSTB akan dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang menggabungkan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian



pembangunan Kabupaten Bandung ke depan diharapkan dapat berdaya saing dari segi ekonomi (*economically viable*), mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk (*socially equitable*), serta ramah lingkungan (*environmentally bearable*).

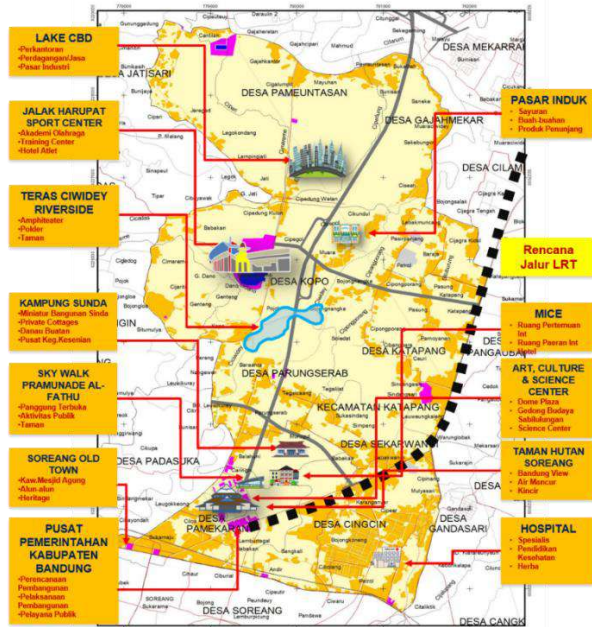
Untuk mendukung pembangunan KSTB, tahun 2018 direncanakan untuk dilaksanakan pembangunan antara lain *Central Business District* (CBD), rumah sakit, universitas dan akademi olahraga serta pusat pelatihan olah raga (*sport training center*), puseur ilmu, seni dan budaya, serta sarana pendukung MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*). Selain dari pada itu pembangunan KSTB akan didukung oleh

pembangunan infrastruktur dasar berupa perbaikan jaringan jalan, penyediaan infrastruktur pengendali banjir (kolam retensi, rumah pompa, amenitas *river front*), infrastruktur pengelolaan air limbah (*waste water treatment plant*), ketersediaan ruang terbuka hijau, serta ketersediaan permukiman vertikal (rusunawa dan rusunami). Mengacu pada rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2021, fungsi guna lahan di Kawasan KSTB ditampilkan pada **Tabel 6-12**. Adapun beberapa rencana pembangunan yang akan dikembangkan di kawasan KSTB antara lain ditampilkan pada **Gambar 6-5**.

Tabel 6-12
Rencana Pola Ruang Kawasan KSTB

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Industri	235,13
2	Perumahan	1.278,17
3	Perairan dan Sempadan	128,35
4	Fasilitas Umum dan Sosial, Pemerintahan dan Hankam	260,57
5	Perdagangan dan Perkantoran	561,74
6	Taman dan RTH	0,82
7	Kawasan Perrtanian dan Tanaman Tahunan	58,22
	TOTAL	2.523,00

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2016-2036



Gambar 6-5

Ilustrasi Rencana Pengembangan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Pengembangan KSTB akan dilakukan melalui beberapa strategi pengembangan, antara lain:

1. Mengembangkan regulasi pengelolaan KSTB. Melalui regulasi ini, diharapkan dapat meminimalisir spekulasi lahan terkait pertumbuhan kawasan ini. Adapun bentuk alternatif regulasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan KSTB antara lain melalui penetapan *land freezing* (pembekuan lahan pasca penetapan kebijakan pembangunan).
2. Menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan KSTB. Strategi ini ditetapkan sebagai antisipasi terjadinya urban sprawl dan isu perkotaan lainnya. Perencanaan Kawasan antara lain dapat disusun dalam bentuk RDTR yang didetailkan dalam Rencana Tapak.
3. Mengoptimalkan sumber pendanaan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bentuk *Public Private Partnership* (PPP).

b. Pembangunan Kota Baru Tegalluar (KBT)

Mengacu pada RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, Kawasan Kota Baru Tegalluar ditetapkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi. Penetapan ini didasari oleh potensi ekonomi kawasan yang akan berpengaruh secara regional terhadap ekonomi Kabupaten Bandung khususnya Kabupaten Bandung bagian timur seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur strategis di kawasan tersebut. Beberapa infrastruktur yang akan dibangun antara lain Kereta Api Cepat Indonesia China, jalur LRT (*Light Rapid Transit*), Tol Ujungberung – Gedebage – Majalaya, Tol Cileunyi – Tasik. Selain akan menjadi hub pergerakan dalam internal Kabupaten Bandung, Kota Baru Tegalluar juga akan menjadi hub bagi pergerakan dari dan menuju Jakarta dan priangan timur.

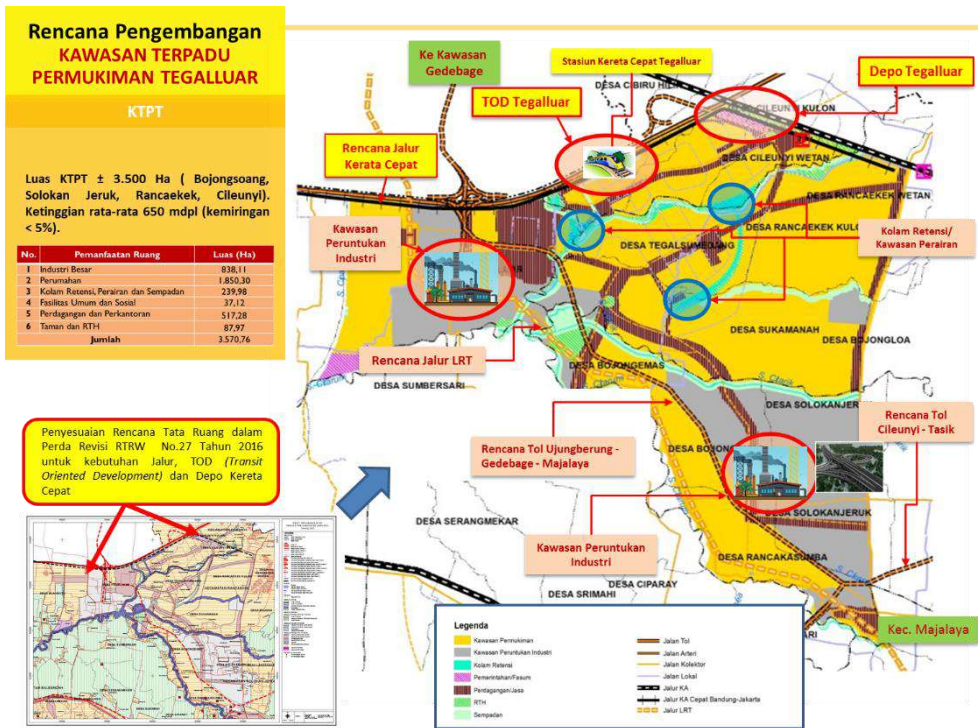
Dalam jangka panjang, Kota Baru Tegalluar akan dibangun sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari pengembangan kawasan permukiman skala besar,



perdagangan dan jasa, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan rekreasi. Adapun untuk tahun 2018, pembangunan di kawasan Kota Baru Tegalluar antara lain: 1) Pengembangan kawasan permukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan wisata, 2). Pengembangan IPAL kawasan, 3). Pengembangan dan peningkatan teknologi pengolahan limbah terpadu kawasan industry, 4). Peningkatan kapasitas sistem drainase, 5). Pengendalian penangan banjir dan

genangan, 6). Penyusunan RTR, 7). Pembangunan Tol Tegalluar yang menghubungkan Ujungberung – Gedebage – Majalaya, 8). Pembangunan stasiun dan depo bagian dari pengembangan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung.

Ilustrasi rencana pengembangan Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar ditampilkan pada **Gambar 6-6** sebagai berikut.



Gambar 6-6
Ilustrasi Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar (KTPT)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

6.4 Program Pembangunan Daerah

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan Kabupaten Bandung 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawabnya. Sebagai

bentuk mewujudkan perencanaan yang implementatif, sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan



sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Baik strategi maupun arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah dilakukan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perumusan program-program pembangunan daerah juga dibuat berdasarkan Janji Bupati yang diberikan pada masa kampanye. Dalam periode menjabat selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Kabupaten Bandung menetapkan beberapa program pembangunan daerah, yakni:

1. Program peningkatan daya saing sektor perdagangan
2. Program peningkatan daya saing produk unggulan industri
3. Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern
4. Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
5. Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing
6. Program peningkatan potensi investasi daerah
7. Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
8. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat
9. Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpenghasilan rendah terhadap fasilitas kesehatan
10. Program peningkatan kualitas lingkungan hidup
11. Program peningkatan kualitas infrastruktur
12. Program peningkatan ketahanan bencana
13. Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa
14. Program peningkatan kualitas *e-government*
15. Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
16. Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
17. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan
18. Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja
19. Program Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20. Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah

Program yang sudah dibuat ini selanjutnya akan diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik targetnya berikut lokasinya, untuk mencapai indikator sasaran yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Program-program pembangunan daerah di atas memiliki definisi tersendiri sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pelaksanaannya. Untuk memperjelas bagaimana keterkaitan antara program pembangunan daerah dengan program pemerintah daerah dengan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah, berikut definisi program pembangunan daerah berdasarkan Permendagri beserta Perangkat Daerah penanggung jawab dalam

Tabel 6-1



Tabel 6-13

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab	
1	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program peningkatan daya saing sektor perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DISPERIN	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DISPERIN	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DISPERIN	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISPERIN	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DISPERIN	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DISPERIN	
		Program peningkatan daya saing produk unggulan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISPERIN	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	DISPERIN	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISPERIN	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DISPERIN	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOPUKM	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DISKOPUKM	
		Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DISKOPUKM	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DISKOPUKM	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DISKOPUKM	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DISKOPUKM	
		Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan	Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISTAN
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DISTAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISTAN				



Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab
	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISTAN
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISTAN
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISTAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DISPAKAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DISPAKAN
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DISPAKAN
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPARBUD
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPARBUD
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPARBUD
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DISPARBUD
		Program peningkatan potensi investasi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISPARBUD
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DISPARBUD
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DISPARBUD
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISPARBUD
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DISPARBUD
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
2	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk	Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIK
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DISDIK
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DISDIK
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DISDIK



Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab
	membentuk generasi berdaya saing global		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DISDIK
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DISPORA
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DISARPUS
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DISARPUS
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKES
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP2KBP3A
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP2KBP3A
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP2KBP3A
	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpenghasilan rendah terhadap fasilitas kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RSUD SOREANG
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			RSUD SOREANG	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			RSUD MAJALAYA	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			RSUD CICALENGKA	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			RSUD CICALENGKA	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			DLH	
3	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH



Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab
Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Program peningkatan kualitas infrastruktur	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLH
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DPUTR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		DPUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		DPUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DPUTR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		DPUTR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		DPUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		DLH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		DISHUB
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		DISKOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		DISPERKIMTAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DISPERKIMTAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		DISPERKIMTAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DISPERKIMTAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		DISPERKIMTAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DISPERKIMTAN		
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		DISPERKIMTAN		



Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab		
	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	Program peningkatan ketahanan bencana	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DISPERKIMTAN		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DISPERKIMTAN		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DISDAMKAR		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD		
			Reformasi birokrasi integratif, inovatif, dan dinamis	Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DPMD
					PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
			4	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Program peningkatan kualitas e-government	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SELURUH KECAMATAN					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SELURUH KECAMATAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SELURUH KECAMATAN					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	SELURUH KECAMATAN					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL					
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL					
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA					
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO					



Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab
5			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DISARPUS
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DISARPUS
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DISARPUS
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFO
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFO
		Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD
		Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS
	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKER
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DISNAKER
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISNAKER
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKER
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP2KBP3A
	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	Program Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP2KBP3A
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DP2KBP3A
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DP2KBP3A
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DP2KBP3A
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DP2KBP3A
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DISPAKAN
	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan	Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DISPAKAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			DISPAKAN	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			DISPAKAN	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-14

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS)																				
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah																				
Tujuan																				
a	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,87	3,56	4,75		5,17		5,2		5,3		5,6		5,6			Indikator Makro	
Sasaran																				
a	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	-3,78	3,23	3,68		3,67		3,67		3,66		3,66		3,66			Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan Usuran Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan daya saing sektor perdagangan					4.963.402.000			4.463.402.000		4.463.402.000		4.463.402.000		4.463.402.000					
a	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	USD	\$726.705.758	\$726.705.758	\$726.851.099	286.378.000	\$726.996.440	286.378.000	\$727.141.781	286.378.000	\$727.287.122	286.378.000	\$727.432.463	286.378.000	\$727.432.463			Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan	D7
b	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	Persen	14	14	14	800.000	21	300.000	28	300.000	35	300.000	42	300.000	42			Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan	
c	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	N/A	3	3	1.259.329.000	3	1.259.329.000	3	1.259.329.000	3	1.259.329.000	3	1.259.329.000	3			Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan	
d	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Persen	N/A	18,3	20	1.834.104.000	20	1.834.104.000	21	1.834.104.000	23	1.834.104.000	25	1.834.104.000	25			Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan	D3; D5
e	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	Persen	N/A	56	60	233.500.000	65	233.500.000	70	233.500.000	75	233.500.000	80	233.500.000	80			Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan	
f	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP sesuai standar	Persen	73,87	70	80	550.91.000	85	550.91.000	90	550.91.000	95	550.91.000	100	550.91.000	100			Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan	
Sasaran																				
a		Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-3,27	7,35	7,53		7,7		7,87		8,05		8,22		8,22			Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri																	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan daya saing produk unggulan industri					2.168.900.000		2.168.900.000		2.168.900.000		2.168.900.000		2.168.900.000						
a	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Persen	N/A	2	20	1.125.000.000	20	1.125.000.000	20	1.125.000.000	20	1.125.000.000	20	1.125.000.000	100		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
b	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	Persen	N/A	3	2,5	350.000.000	2,5	350.000.000	2,5	350.000.000	2,5	350.000.000	2,5	350.000.000	12,5		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
c	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pelaporan SIINAS	Persen	N/A	17	20	425.000.000	20	425.000.000	20	425.000.000	20	425.000.000	20	425.000.000	100		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
d	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	Persen	93,5	95	268.900.000	80	268.900.000	80	268.900.000	80	268.900.000	100	268.900.000	100	268.900.000	100		Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
Sasaran																				
a	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	5	5	5,5		6		6,5		7,0		7,5		7,5		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program perwujudan koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern					8.162.950.573		4.433.925.918		4.433.925.918		4.433.925.918		4.433.925.918						
a	PROGRAM MEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kapasitas Usaha Mikro	Persen	2,12	2,49	4,25	1.447.544.000	8,5	768.017.000	12,75	768.017.000	17	768.017.000	21,25	768.017.000	21,25		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
b	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kualitas usaha mikro	Persen	8	9	10	3.543.650.573	10	1.101.913.268	10	1.101.913.268	10	1.101.913.268	10	1.101.913.268	10		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026



No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
				2020	2021															
c	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang berizin	Persen	N/A	N/A	55	125.000.000	60	125.000.000	65	125.000.000	70	125.000.000	75	125.000.000	75	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
d	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Patuh	Persen	22	20	20	737.152.000	40	687.152.000	60	687.152.000	80	687.152.000	100	687.152.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
e	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Persen	22	20	20	303.050.000	40	443.050.000	60	443.050.000	80	443.050.000	100	443.050.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
f	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kompeten	Persen	8	10	13,2	890.587.000	16,8	292.826.650	20,3	292.826.650	23,8	292.826.650	27,1	292.826.650	27,1	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
g	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	N/A	-0,37	0,5	1.115.967.000	1	1.015.967.000	1,5	1.015.967.000	2	1.015.967.000	2,5	1.015.967.000	2,5	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			D1
Sasaran																				
a	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	0,19	5,51	5,82		6,13		6,43		6,74		7,05		7,05	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
Program Pembiayaan Daerah																				
1	Program peningkatan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan						32.716.534.000		17.754.475.389		17.754.475.389		17.754.475.389		17.754.475.389					
a	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi ikan tangkap	Persen	3	N/A	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	15	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
b	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	Persen	2,9	N/A	2,06	4.474.092.000	0,02	2.344.287.000	0,03	2.344.287.000	0,03	2.344.287.000	0,03	2.344.287.000	15,63	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
c	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	Persen	-12,68	N/A	3	1.057.630.000	3	548.897.200	3	548.897.200	3	548.897.200	3	548.897.200	17	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
d	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	Ton	1257387,81	1.281.425,89	1.302.997,81	17.340.033.000	1.324.960,80	7.039.140.000	1.347.321,93	7.490.928.000	1.370.089,67	6.979.140.000	1.393.273,48	7.019.140.000	1.393.273,48	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian			H1; H2; H4
		Jumlah Populasi Temak	Ekor	7789217	6.994.555,79	7.041.755,45		7.089.564,80		7.137.930,93		7.187.640,65		7.238.736,03		7.238.736,03	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian			
f	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	1. Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Persen	1,545 %	1,88 %	1,950 %		1,95 %	2.395.488.000	1,95 %	2.093.700.000	1,95 %	2.245.488.000	1,95 %	2.203.700.000	1,95 %	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian			H3; H6



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati					
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
				2020	2021																		
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2. Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju		2. 42,86 %	2. 57,14 %	2. 15 %	2.241.626.811	2. 15%		2. 15%		2. 15%		2. 15%	2. 15%								
g	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase penurunan kasus penyakit hewan endemik	Persen	1. 75,45%	1. 73%	1. 73,05%	1.425.939.000	1. 73,05%	2.470.000.000	1. 73,05%	2.320.000.000	1. 73,05%	2.530.000.000	1. 73,05%	2.520.000.000	1. 74,5%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Persen	2. 98,71%	2. 85,08	2. 85,10%	1.475.413.189	2. 85,15%	1.031.663.189	2. 85,15%	1.031.663.189	2. 85,15%	1.131.663.189	2. 85,15%	1.193.451.189	2. 85,20%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
i	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Persen	3,2	3,2	3,2	175.000.000	0,03	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
j	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	Persen	100	100	100	300.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	11,49	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
k	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pengembangan Usaha Tani dan Alsintan)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	Ton	54,15	6,05	2,45	1257387,81	9%	1281425,89	1302997,81	375.000.000	1324960,8	-	1347321,93	-	1370089,67	-	1393273,48	-	1393273,48	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
l	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia)	Rasiolahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Persen	5,45	8,8	9,5	175.000.000	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
m	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia)	Rasiolahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Persen	5,45	8,8	9,5	300.000.000	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
n	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pembibitan Tanaman)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	Ton	54,15	6,05	2,45	1257387,81	9%	1281425,89	1302997,81	375.000.000	1324960,8	-	1347321,93	-	1370089,67	-	1393273,48	-	1393273,48	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
o	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium)	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	Persen	1. 75,45%	1. 73%	1. 73,05%		1. 73,05%		1. 74%		1. 74%		1. 74,5%	1. 74,5%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
				2. 98,71%	2. 85,08	2. 85,10%	350.000,00	2. 85,15%	-	2. 85,20%	-	2. 85,20%	-							
p	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (UPTD Pasar Hewan)	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	Persen	1. 75,45%	1. 73%	1. 73,05%		1. 73,05%		1. 74%		1. 74%		1. 74,5%	1. 74,5%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
				2. 98,71%	2. 85,08	2. 85,10%	275.000,00	2. 85,15%	-	2. 85,20%	-	2. 85,20%	-							
q	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pembibitan Ternak)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	Ton	1257387,81	1281425,89	1302997,81	861.800,00	1324960,8	-	1347321,93	-	1370089,67	-	1393273,48	1393273,48	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
r	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian)	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Persen	5,45	8,8	9,5	150.000,00	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	9,5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
s	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian)	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	Persen	54,15	6,05	2,45	1.075.000,000	8,95	-	4,85	-	11,16	-	11,49	11,49	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
Sasaran																				
a	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	-3,21	7,97	8,46		8,95		9,44		9,94		10,43	10,43	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
		Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	Persen	10	10	20		40		60		80		100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program pengembangan pariwisata yang berdaya saing						14.424.296.900		10.064.179.850		10.064.179.850		10.064.179.850	10.064.179.850						
a	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Persen	N/A	N/A	5	2.343.782.450	5	1.197.335.450	5	1.197.335.450	5	1.197.335.450	5	1.197.335.450	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		15; 14	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
b	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	Persen	N/A	5	5	1.352.632.660	5	525.831.400	5	525.831.400	5	525.831.400	5	525.831.400	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
c	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terpelihara	Persen	N/A	10	10	641.150.000	10	491.150.000	10	491.150.000	10	491.150.000	10	491.150.000	50	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
d	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persen	N/A	5	5	370.000.000	5	270.000.000	5	270.000.000	5	270.000.000	5	270.000.000	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
e	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Terbangunnya museum sejarah Daerah	Museum	N/A	N/A	0	-	0	500.000.000	0	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
f	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Rata-rata tinggal wisatawan 2 Rata-rata belanja wisatawan	Buah	N/A	N/A	1,55;455000	2.525.351.000	1,6;460000	3.258.351.000	1,65;465000	3.158.351.000	1,7;470000	3.233.351.000	1,75;475000	3.158.351.000	1,75;4750000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			I1
g	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Persen	N/A	N/A	5	1.825.440.000	5	1.525.440.000	5	1.725.440.000	5	1.650.440.000	5	1.725.440.000	25	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			I2; I3
h	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan i HAKI	Persen	N/A	N/A	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
i	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dibina	Persen	N/A	N/A	10	5.135.940.790	10	2.066.072.000	10	1.966.072.000	10	1.966.072.000	10	1.966.072.000	50	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	10		
Sasaran																				
a	Meningkatnya investasi	Laju Pertumbuhan investasi	Persen	N/A	2,9	2,9		2,9		2		2,9		2,9		2,9	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan potensi investasi daerah						4.449.999.000		4.449.999.000		4.449.999.000		4.449.999.000		4.449.999.000					
a	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-Jumlah kemitraan pelaku usaha - Jumlah peluang investasi unggulan	Jumlah	N/A	3;1	4;2	1.345.102.000	5;3	1.945.102.000	6;4	1.945.102.000	7;5	1.945.102.000	8;6	1.945.102.000	33;21	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			D8
b		Jumlah peluang investasi unggulan	Jumlah	N/A	1	2		3		4		5		6		21				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
c	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peluang investasi yang dipromosikan	Persen	N/A	20	20	400.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
d	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	Persen	N/A	0,05	0,1	1.604.897.000	0,15	1.215.060.000	0,2	1.215.060.000	0,25	1.215.060.000	0,4	1.215.060.000	0,4	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
e	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan penyempitan LKPM pelaku usaha	Persen	N/A	10	12	300.000.000	13	450.000.000	15	450.000.000	17	450.000.000	19	450.000.000	19	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
f	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dalam sistem informasi	Persen	N/A	100	100	800.000.000	100	289.837.000	100	289.837.000	100	289.837.000	100	289.837.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata																				
Tujuan																				
a	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,39	72,8	73,48		73,78		74,17		74,55		74,94		74,94	Indikator Makro			
Sasaran																				
a	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	65,12	65,46	65,78		66,11		66,43		66,75		67,08		67,08	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan			
Program Pembangunan Daerah																				
1		Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat					329.326.211.830		258.997.613.688		263.074.113.688		263.988.990.488		263.833.990.488					
a	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	- Rata-rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan	Persen	N/A	45,2	45,5	657.969.000	45,7	995.063.700	45,9	995.063.700	46	986.440.500	46,1	986.440.500	20	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
b	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase kecamatan yang terdapat naskah kuno	Persen	N/A	N/A	20	30.000.000	20	71.500.000	20	71.500.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
c	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (***)	- tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Indeks	56,20%	59,96%	63,72%	275.161.358.957	67,48%	236.528.842.025	71,24%	236.528.842.025	73%	236.528.842.025	75%	236.528.842.025	75%	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan	V	V	A1; A2; A4; A5; A6; A8
d		- tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Indeks	85,84%	88,15%	90,50%		92,84%		95,18%		97,00%		97,50%			Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan			
e		- tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan	Indeks	48,69%	52,89%	57,09%		61%		65,49%		69,69%		70,00%		70%	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
f	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR ISI NILAI STANDAR PROSES	Persen	N/A	N/A	N/A	400.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			A3
g	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP index pemerataan guru matpel SMP	Indeks	N/A	N/A	N/A	600.000.000	N/A	750.000.000	N/A	750.000.000	N/A	750.000.000	N/A	750.000.000	N/A	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
h	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Nilai standar pengelolaan	Persen	N/A	N/A	N/A	300.272.161	N/A	500.272.161	N/A	500.272.161	N/A	500.272.161	N/A	500.272.161	N/A	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
i	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	Persen	100	100	100	300.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
j	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan pemuda yang berprestasi/restas 2. Jumlah pelatihan wirausaha muda	1. Persen 2. Orang	N/A	N/A	1.20; 2.100	5.985.605.800	1.22; 2.125	5.160.605.800	1.24; 2.150	6.960.605.800	1.25; 2.175	8.520.937.002	1.28; 2.200	8.105.931.314	1.28; 2.200	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
k	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Orang	N/A	N/A	20	1.200.000.000	22	350.000.000	24	375.000.000	25	450.000.000	28	500.000.000	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
l	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Jumlah pembinaan atlet berprestasi.Jumlah pembinaan atlet berprestasi 2. Jumlah sarana dan prasarana bertaraf internasional 3. Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga	1. Atlet 2. Lapangan 3. Persen	N/A	N/A	1.1032; 2.2; 3.10	44.691.005.912	1.1532; 2.3; 3.15	12.891.330.002	1.1682; 2.4; 3.20	15.142.830.002	1.2182; 2.5; 3.25	14.437.498.800	1.2232; 2.6; 3.30	14.647.504.488	1.2232; 2.6; 3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
Sasaran																				
a	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,35	82,54*	82,73		82,92		83,1		83,29		83,48		83,48	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
		Total Fertility Rate		2,43	2,43	2,42		2,42		2,41		2,41		2,4		2,4	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat						80.128.851.400		78.111.508.200		78.101.508.200		98.017.851.318		99.111.731.911					
a	PROGRAM MEMENUH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	Persen	N/A	81,91	100	72.327.354.400	100	70.850.466.000	100	70.850.466.000	100	90.751.809.118	100	91.845.689.711	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			B3; B4; B5; B7; B8
a	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	Persen	N/A	80	82	200.000.000	85	290.000.000	90	290.000.000	92	290.000.000	95	290.000.000	95	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026



No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
c	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN *)	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Pumama - Mandiri)	Persen	N/A	65	70	200.000.000	73	280.000.000	80	280.000.000	84	280.000.000	85	280.000.000	85	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	V		B9
d	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (angka kelahiran total)	Kelahiran/ibu	2,43	2,42	2,42	234.000.000	2,41	234.000.000	2,41	234.000.000	2,4	234.000.000	2,4	234.000.000	2,4	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			C8
e		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	81,27%	68,95%	69,15%		69,35%	69,55%		69,75%		70,00%		70,00%	70,00%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
f		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,37%	10,17%	9,97%		9,77%	9,57%		9,37%		9,17%		9,17%	9,17%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
g	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	20,32%	20,82%	21,32%	1.775.270.000	21,82%	1.770.270.000	22,32%	1.760.270.000	22,82%	1.775.270.000	23,32%	1.775.270.000	23,32%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Sasaran																				
a	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk berpenghasilan rendah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persen	80,36	81	82,22		83,2	84,19		85,17		86,16		86,16	86,16	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
Program Pembangunan Daerah																				
1		Program peningkatan aksesibilitas penduduk berpenghasilan rendah terhadap fasilitas kesehatan					13.366.154.000		13.559.257.000		13.483.107.000		13.393.649.500		13.300.719.125					
b	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (**)	Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	Persen	N/A	90,77	90,85	5.592.227.000	91	4.976.772.200	92%	4.976.772.200	93	4.976.772.200	95	4.976.772.200	95	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		V	B1
b	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD) Majalaya	Persen	84,86	83,73	80,55	3.632.834.000	80,60	2.462.834.000	80,65	2.462.834.000	80,75	2.462.834.000	80,80	2.462.834.000	80,80	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Majalaya)	V		B8
c	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	100	100	100		100	1.170.000.000	100	1.170.000.000	100	1.170.000.000	100	1.170.000.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Majalaya)			
d	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD) Cicalengka	Persen	83,19	87	87,35	500.000.000	87,5	1.203.103.000	87,75	1.126.953.000	88	1.037.495.500	88,25	944.565.125	88,25	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Cicalengka)			B8



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																			
e	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	41,12	41,12	42,66	2.867.500.000	45,21	2.867.500.000	48	2.867.500.000	60	2.867.500.000	52	2.867.500.000	100			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Cicalengka)	
f	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan)	Persen	78,63	77,56	77,56		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Soreang)		
g	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan)	Persen	78,63	77,56	77,56	6.165.820.000	78,5	5.565.820.000	79	5.565.820.000	79,5	5.565.820.000	80	5.565.820.000	80			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Soreang)	
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan																				
Tujuan																				
a	Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	Indeks Perkembangan Wilayah	Poin	N/A	52,65	54,59		55,77		57,12		58,42		60,03		60,03				
Sasaran																				
a	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53,57	52,59	53,29		53,68		53,98		54,28		54,6		54,6			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup						27.306.494.354		28.385.110.583		25.659.081.835		40.511.096.513		55.651.917.400					
a	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persen	100	100	100	70.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
b	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas air	Persen	26,67	26,67	33,33	1.623.873.000	40	3.226.124.728	46,67	500.095.980	53,33	500.095.980	60	500.095.980	60			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
c		Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	Persen	16,12	16,12	19,35		22,26		25,8		29		32,25		32,25			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
d		Penambahan luas tutupan lahan	Ha	23.185	23.185	50		50		50		50		50		23435 ha			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati	
				Realisasi	Proveksi	2022		2023		2024		2025		2026							
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target
e	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pembangunan Taman Kehati	Persen	25	25	17,5	69.19 0.000	15	569.19 0.000	15	569.19 0.000	15	569.19 0.000	12,5	569.19 0.000	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
f	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha / kegiatan terhadap PPLH	Persen		70	71,3	123.0 06.000	Pemantauan dan pembinaan kinerja industri 70%	72,3 0%	81.738. 000	73%	81.738. 000	74,30 %	81.738. 000	74,70 %	81.738. 000	74,7	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
g	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	Persen	60 laporan	60 laporan dari 5 segmen	5	342.0 83.000	5	242.02 5.600	5	242.02 5.600	5	242.02 5.600	5	242.02 5.600	25	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
h	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kampung Bedas	Persen		Sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 95 Kampung Bedas pada 95 Desa/Kelurahan (33,93) meliputi 27 Kecamatan	50 ds (17,8)	171.9 05.000	50 ds (17,8)	70.967. 839	50 ds (17,8)	70.967. 839	35 ds (12,5)	70.967. 839	70.967. 839	280 Kampung Bedas (100)	280 Kampung Bedas (100)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
i	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT *)	Persentase kesesuaian data dan informasi adipura	Persen	70	70	70	50.00 0.000	71	50.000. 000	72	50.000. 000	73	50.000. 000	75	50.000. 000	75	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	V			
j	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	Persen	100	100	100	160.0 00.000	100	160.00 0.000	100	160.00 0.000	100	160.00 0.000	100	160.00 0.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
k	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN *)	Persentase Volume Sampah yang terkelola	Persen	62,37	68,52	74,73	24.69 6.437 .354	80,9 3	23.709. 064.41 6	87,15	23.709. 064.41 6	93,42	38.561. 079.09 4	99,69	53.701. 899.98 1	99,69	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	V		D4
Sasaran																				
a	Meningkatnya kualitas infrastruktur	(Indeks Kualitas Infrastruktur*)	Poin	63,55	64,66	65,97		67,2 2		68,46		69,58		70,65		70,65		V		
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan kualitas infrastruktur						422.4 66.62 5.291		313.28 5.063.6 53		313.28 5.063.6 53		294.03 8.421.4 49		317.77 8.188.0 57					
a	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) *)	Persentase ruas jalan yang termitosasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan	Persen	N/A	N/A	36,65	4.647 .177. 000	40	4.196.0 79.000	50	4.196.0 79.000	62	4.196.0 79.000	100	4.196.0 79.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	V	G3	
b	PROGRAM PENGELOLAAN DELAYARAN	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksanaan perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	Persen	N/A	N/A	50	17.97 4.000	75	17.974. 000	80	17.974. 000	80	17.974. 000	100	17.974. 000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
c	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksanaan perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	Persen	N/A	N/A	50	265.9 02.00 0	75	200.00 0.000	80	200.00 0.000	80	200.00 0.000	100	200.00 0.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
f	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM **)	AKSES AMAN TERHADAP AIR MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	81,45	86,09	90,73	28.37 8.643 .000		-		-					100	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	V	
g	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH **)	AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	81,11	88,33	91,55	22.37 9.160 .929		-		-					100	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	V	
h	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN **)	PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG	Persen	98,3	95,79	96,36	1.000 .650. 000	97,2 7	1.000.6 50.000	98,18	1.000.6 50.000	100	1.000.6 50.000	100	1.000.6 50.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		V	G7
i	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LJAS KAWASAN KUMUH YANG TERTANGANI	Persen	0,32	0,28	0,23	2.380 .350. 000	0,19	2.380.3 50.000	0,14	2.380.3 50.000	0,1	2.380.3 50.000	0,06	2.380.3 50.000	0,06	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
j	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Persen	74	65	74	60.66 0.257 .216	82,3 5	11.340. 150.84 6	90,68	11.340. 150.84 6	100	38.667. 501.30 3	100	56.331. 792.34 1	100	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			G8
k	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE LJAS KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU	Persen	15	15,61	17	14.37 4.458 .000	19	10.038. 558.00 0	21	10.038. 558.00 0	23	10.038. 558.00 0	25	10.038. 558.00 0	25	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			G9; G10; E5



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
l	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	Persen	20	20	50	247.250.000	50	347.250.000	75	347.250.000	75	347.250.000	75	347.250.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
m	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase alas kepemilikan tanah bagi masyarakat (petani) dalam rangka meningkatkan taraf hidup/perekonomian	Persen	N/A	N/A	20		20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
n	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT	Persen	12,27	26,31	62,34	1.193.360.000	80,36	1.193.360.000	98,38	1.193.360.000	100	1.193.360.000	100	1.193.360.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
o	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN	Persen	15	15	16	692.000.000	17	492.000.000	19	492.000.000	20	492.000.000	22	492.000.000	22	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
		PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA																		
p	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen		66,32	67,96		69,31		70,66		72,00		73,35		73,35	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			G5
		Persentase kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh bangunan pengendali banjir	Persen	1,42	28,63	29,69	23.865.610.155	30,80	15.806.899.389	31,91	15.806.899.389	33,07	15.806.899.389	34,28	15.806.899.389	34,28				
q	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (***)	AKSES AMAN TERHADAP AIR MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	81,45	86,09	90,73		95,37	12.544.793.000	100,00	12.544.793.000	100	12.544.793.000	100	12.544.793.000	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
r	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (***)	AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	85,11	88,33	91,55		94,77	11.783.606.999	98,00	11.783.606.999	100	11.783.606.999	100	11.783.606.999	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
s	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	2,08	41,00	43,00	29.950.965.136	45,00	16.474.968.778	47,00	16.474.968.778	49,00	16.474.968.778	51,00	16.474.968.778	51,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			G1
t	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan pemerintah yang sesuai Standar Kualitas	Persen	7,51	12,00	20,00	54.956.856.000	40,00	129.942.456.000	60,00	129.942.456.000	80,00	45.942.456.000	100,00	45.942.456.000	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			B2
u	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (*)	Persentase jalan kabupaten mantap	Persen	85,86	85,86	87,16	153.689.042.905	88,66	80.760.009.041	90,16	80.760.009.041	91,36	118.186.016.380	92,86	124.261.491.950	92,86	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V		G1; G2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.kabupatenbandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
v	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikasi	Persen		48,94	59,16	550.000.000	69,37	550.000.000	79,53	550.000.000	89,79	550.000.000	100	550.000.000	100,00	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
w	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen RTR (RTRW, RDTR dan lainnya) yang Ditetapkan	Persen	61,00	11,54	61,54	4.543.641.000	73,08	4.543.641.000	84,62	4.543.641.000	96,15	4.543.641.000	100	4.543.641.000	100,00	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			G6
x	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase PUJ yang terbangun pada tahun rencana	Persen	76,00	56,27	60,22	14.790.403.950	64,17	5.689.936.600	68,11	5.689.936.600	72,06	5.689.936.600	76,01	5.689.936.600	76,01	Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan			
Sasaran																				
a	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	174	170	165		160		155		150		145	145	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)				
Program Pembangunan Daerah																				
1		Program peningkatan ketahanan bencana					8.810.798.000		7.670.798.000		7.670.798.000		7.670.798.000		7.670.798.000					
a	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (**)	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	N/A	100	100	5.957.241.000	100%	5.877.241.000	100%	5.877.241.000	100%	5.877.241.000	100%	5.877.241.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	V	V	
b	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (**)	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WKM) - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran	Persen	70	75	80	2.853.557.000	86	1.793.557.000	90	1.793.557.000	95	1.793.557.000	100	1.793.557.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Disdamkar)		V	C5
Sasaran																				
a	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun*)	Poin	0,7524	0,7767	0,81		0,8165		0,8307		0,8442		0,8704	0,8704	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V			
Program Pembangunan Daerah																				
1		Program peningkatan partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa					11.336.781.000		8.911.781.000		8.261.781.000		10.036.781.000		8.336.781.000					
a	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Persen	N/A	N/A	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dokumen Resmi
Hak Cipta © 2021
Kabupaten Bandung

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
b	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Persen	N/A	5	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
c	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Persen	N/A	10	10	10.103.400.000	10	7.728.400.000	10	7.078.400.000	10	8.853.400.000	10	7.153.400.000	10	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
d	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terjalin	Persen	N/A	90	91	983.381.000	92	933.381.000	93	933.381.000	94	933.381.000	95	933.381.000	95	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			B6
Misi 4: Mensoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan																				
Tujuan																				
a	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,33	65,8	67,28		68,76		70,25		71,73		73,21		73,21				
Sasaran																				
a	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,78	82,73	83,3		83,87		84,44		85		85,57		85,57				
b		Nilai AKIP Kabupaten	Poin	71,44	73	76		78		80		81		82		82				
c		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	78,02	78,72	79,42		80,12		80,82		81,52		82,22		82,22				
d		Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Poin	3	3,05	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5				
e		Indeks Penerapan Sistem Merit	Poin	N/A	304,5	326,5		348,5		353,5		359		362		362				
f		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,82	2,98	3,15		3,31		3,47		3,64		3,8		3,8				
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan kualitas e-government						2.767.966.055.868		2.774.955.707.007		2.773.555.976.630		2.775.645.986.813		2.780.130.086.507					
d	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keuasan Masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persen	N/A	N/A	100	326.389.000	100	326.389.000	100	326.389.000	100	326.389.000	100	326.389.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
e	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi -Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Persen	32,81	32,81	32,81	3.556.535.000	46,88	3.556.535.000	57,81	3.556.535.000	68,75	3.556.535.000	79,69	3.556.535.000	79,69	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			E2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RP.JMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
		disediakan secara online dan terintegrasi																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	70	71	6.142.692.000	70	6.133.941.000	70	6.133.941.000	70	6.133.941.000	70	6.133.941.000	70		Kesatuan Bangsa dan Politik		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point	N/A	1.80	1.80,10	44.218.858.000	1.80,20	44.161.344.000	1.80,30	44.161.344.000	1.80,40	44.161.344.000	1.80,50	44.161.344.000	1.80,50		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (Bapenda)		
		2. Persentase aset dalam kondisi baik			2.90	2.85		2.86	2.87	2.87	2.88	2.88	2.89	2.89	2.89	2.89				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP	Point	N/A	81 point	81,2 Point	13.792.145.000	-81,2	13.623.411.000	-81,4	13.792.145.000	-81,6	13.792.145.000	-81,8	13.792.145.000	82 Point		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan		
		- Persentase BMD dalam kondisi baik			79	79,5		-	98,66%	-	98,68%	-	98,70%	-	98,72%	81,5				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point; Persen	77	79	80	21.997.361.000	81	21.671.608.736	82	21.671.608.736	83	21.671.608.736	84	21.671.608.736	84		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BKAD)		
		2. Persentase aset yang dikelola dengan baik			90	93		93	93	93	93	93	93	93	93	93				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	76,3	76,5	77	24.528.567.000	77	24.428.868.000	78	24.428.868.000	79	24.428.868.000	80	24.428.868.000	80,5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian		
		Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	Persen	85	90%	91%		92%	93%	93%	94%	94%	95%	95%	95%	95%		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP; 2. Persentase BMD dalam kondisi baik	Point	100	74	70	10.078.093.000	72 point	10.037.103.000	74 point	10.037.103.000	75 point	10.037.103.000	76 point	10.037.103.000	76		Unsur Pemerintahan Bidang Ketertaman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point	74,76	75,5	76,5	12.003.917.000	77,5	11.951.329.300	78,5	11.951.329.300	79,5	11.951.329.300	81	11.951.329.300	81		Unsur Pemerintahan Bidang Sosial		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proveksi	2022		2023		2024		2025		2026						
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		2. Nilai IKM																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	70	73,75	11.156.340.000	N/A	11.226.870.667	N/A	11.311.845.997	N/A	11.176.120.367	N/A	11.176.120.367	N/A				Urusan Pemerintahan Bidang Perustakaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point	76,96	78,2	79	14.142.547.000	80	13.844.094.000	81	13.844.094.000	82	13.844.094.000	83	13.844.094.000	77				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Disdamkar)
		2. Nilai IKM																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point	N/A	70 point	N/A	1.095.176.176.075	N/A	1.094.922.480.075	N/A	1.094.922.480.075	N/A	1.094.922.480.075	N/A	1.094.922.480.075	N/A				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		2. Nilai BMD																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point	77,37	77,5	77,9	309.643.255.000	78,2	308.698.176.765	78,5	308.698.176.765	78,8	308.698.176.765	79	308.698.176.765	79				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Persentase Aset BMD dalam kondisi baik						70%		80%		90%		100%		100%				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	70	70,5 Poin	184.488.640.000	N/A	185.088.640.000	N/A	185.088.640.000	N/A	185.088.640.000	N/A	185.088.640.000	N/A				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Soreang)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	78,68	79,27	78,69	146.908.095.000	78,70	146.908.095.000	78,75	146.908.095.000	78,80	146.908.095.000	78,85	146.908.095.000	78,85				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Majalaya)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP (RSUD Cicalengka)	Point	- 70,27 Point	- 65 Point	N/A	69.330.312.000	- 71 Point	70.627.209.000	- 71,5 Point	72.703.359.000	- 72 Point	75.792.816.500	- 72,5 Point	79.885.746.875	N/A				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Cicalengka)
		- Presentasi BMD dalam Kondisi Baik		-94,56 %	- 80 %			- 80 %		- 80 %		- 80 %		- 80 %						
		- Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target		-87,78%	-89%			- 91%		-92%		-93%		-94%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	Point		73,5	74,3	30.339.523.000	- 74,32	30.721.985.000	-74,34	30.721.985.000	-74,36	30.721.985.000	-74,38	30.721.985.000	-74,38				Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati			
				Realisasi	Proveksi	2022		2023		2024		2025							2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
																			2020	2021	2020
		2. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	#FIELD!	- n.a	#FIELD!	35.09 5.641 .000	-78	35.417. 441.00 0	#FIELD!	35.417. 441.00 0	-79	35.417. 441.00 0	#FIELD!	35.417. 441.00 0	#FIELD!				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point				17.04 5.381 .000		20.534. 442.00 0		20.534. 442.00 0		20.534. 442.00 0		20.534. 442.00 0					Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Nilai IKM - Aset dalam Kondisi Baik	Point; Persen	74,52 poin	74,82 poin	74,82,8 1,77	9,047 .725 .000	75,1 2 poin	9,079,8 22.000	82,6 4 poin	9,079,8 22.000	83,51 poin	95,3 2 poin	9,079,8 22.000	85,25 poin	96,82 poin	9,079,8 22.000	76,02;85,25			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Point	72,97 poin	73,22 poin	73,47 poin	14,84 6,956 .000	73,7 2 poin	14,463. 078.00 0	90 poin	14,463. 078.00 0	90 poin	85 perse n	14,463. 078.00 0	90 poin	85 perse n	14,463. 078.00 0	74,47 poin			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM	Point	80,75; 84,47	N/A	81,00; 84,57	11,78 7,455 .000	81,2 5; 84,6 2	11,781. 711.00 0	81,50; 84,67	11,781. 711.00 0	81,75; 87,72	11,781. 711.00 0	82,00; 84,82	11,781. 711.00 0	82,00; 84,82	11,781. 711.00 0	82,00; 84,82			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	74	75	13,99 4,949 .000	76	13,814. 631.34 0	77	13,814. 631.34 0	78	13,814. 631.34 0	79	13,814. 631.34 0	79	13,814. 631.34 0	79			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.kabupatenbandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Point	72	75 Point 76%	78	35.32 2.929 .000	77	35.335 289.00 0	78	35.335 289.00 0	79	35.335 289.00 0	80	35.335 289.00 0	80	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Nilai IKM	Point	81,24	81,5	81,75	20.75 3.900 .000	82	20.746 389.50 0	82,25	20.746 389.50 0	82,5	20.746 389.50 0	82,75	20.746 389.50 0	82,75	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP Persentase BMD dalam kondisi baik	Point	61,7	70	70	21.66 0.941 .000	71	22.984 974.00 0	72	18.908 474.00 0	73	17.978 474.00 0	75	18.133 474.00 0	75	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	81,88	80,1	82	39.28 5.230 .000	82,3	39.136 377.00 0	82,8	39.136 377.00 0	83,3	39.136 377.00 0	83,8	39.136 377.00 0	83,8	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Point	77,24	71	77,5	41.77 8.724 .000	77,5	40.885 357.00 0	77,75	40.885 357.00 0	78	40.885 357.00 0	78,25	40.885 357.00 0	78,25	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	Point	81,8	77,5	77,5		77,5		N/A			78,25	78,25		78,75	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Persentase Aset Dalam kondisi Baik	Point	68,96	69,06	69,16	25.50 6.660 .000	69,2 6	25.495 721.00 0	69,36	25.495 721.00 0	69,46	25.495 721.00 0	69,56	25.495 721.00 0	69,56	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP	Point	73,74	73,74	74	9513 0160 00	74,2 5	950625 8000	74,5	950625 8000	75,75	950625 8000	75	950625 8000	75	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proveksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	80	80,05	16.88 2.615 .000	80,1	16.005. 500.00 0	80,15	16.005. 500.00 0	80,2	16.005. 500.00 0	80,25	16.005. 500.00 0	80,25	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Point	80,11	80,15	80,2	82.28 9.145 .000	A(80,20)	84.394. 504.24 2	A(80,20)	84.394. 504.24 2	A(80,20)	84.394. 504.24 2	A(80,20)	84.394. 504.24 2	80,2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Point	1.81,70 2.75	1.81,70 2.75	1.81,80 2.76	17.15 2.720 .000	81,90 77	17.245. 549.40 0	81,99 78	17.245. 549.40 0	82 79	17.245. 549.40 0	82 80	17.245. 549.40 0	N/A	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Presentase BMD dalam kondisi Baik	Point	1.72,20 poin	1.78 poin	1.78,5	23.11 3.475 .000	79 point	24.670. 070.00 0	79,50 point	24.670. 070.00 0	80 point	24.670. 070.00 0	80,5 point	24.670. 070.00 0	1.80,50 poin	Urusan Pemerintahan Bidang Keterlraman dan Keterlraman Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Setda	Point	65,69	N/A	70,3	53.15 9.131 .793	70,5	55.122. 459.44 3	70,6	55.122. 459.44 3	70,75	55.122. 459.44 3	71,2	55.122. 459.44 3	71,2	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			
		Presentase BMD Kondisi Baik	Persen	89,95	N/A	91,25		91,3		91,35		91,4		91,45		91,45	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Presentase BMD dalam keadaan baik	Point	65,69; 89,95	66,80	67,80	59.89 7.180 .000	68 80	59.200. 240.00 0	69 80	59.200. 240.00 0	70 80	59.200. 240.00 0	70 80	59.200. 240.00 0	70 80	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH *)	Rata-rata Presentase Manajemen Layanan ASN	Persen	80	80	80	3.443 .756 .000	85	3.443.7 56.000	87	3.443.7 56.000	90	3.443.7 56.000	90	3.443.7 56.000	90	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	V		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Peningkatan Kompetensi ASN	Persen	67,08%	70,08	73,08	1.866 .964 .000	100	3.366.9 64.000	100	3.366.9 64.000	100	3.366.9 64.000	100	3.366.9 64.000	85,08	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	N/A	20	20	321.826.000	20	325.960.900	20	325.960.900	20	313.712.300	20	313.712.300	20	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi	Persen	N/A	100	100	23.413.000	100	50.254.300	100	50.254.300	100	48.413.000	100	48.413.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Informasi Arsip yang dimanfaatkan	Persen	N/A	100	100	23.238.000	100	50.061.800	100	50.061.800	100	48.238.000	100	48.238.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	N/A	87,80%	100	1.223.247.000	100	1.223.247.000	100	1.223.247.000	100	1.223.247.000	100	1.223.247.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan	Jumlah	N/A	96%	62	56.000.000	62	56.000.000	62	56.000.000	62	56.000.000	62	56.000.000	62	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	"PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN "	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Persen	202	202	202	1.006.245.000	202	3.597.185.390	202	3.272.011.300	202	2.561.904.415	202	2.661.804.415	202	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penangan pengawasan	Persen	14 laporan	14 laporan	14 laporan	1.437.305.000	14 laporan	1.205.654.889	14 laporan	1.738.412.267	14 laporan	2.670.038.170	14 laporan	2.806.307.489	14 laporan	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data	Persen	20	20	27	1.330.827.000	46	1.330.827.000	64	1.330.827.000	82	1.330.827.000	100	1.330.827.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Meksikasikan Keamanan Informasi dan Persandian informasi pemerintah	Persen	N/A	N/A	100%	770.896.000	100%	770.896.000	100%	770.896.000	100%	770.896.000	100%	770.896.000	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD *)	Persentasefasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu	Persen	100	100	100	13.099.061.000	100	13.099.061.000	100	13.099.061.000	100	13.099.061.000	100	13.099.061.000	100	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	V		
		Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti		100	100	100		100		100		100		100		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Persen	N/A	100	100	19.39 6.753 .000	100	14.854. 503.00 0	100	14.854. 503.00 0	100	14.854. 503.00 0	100	14.854. 503.00 0	100	Usur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			F1;F2;F3; E7; A7; E4; E7; E6; E1; E8
		Nilai LPDP	Persen	N/A	N/A	3,51		3,61		3,71		3,81		3,91		3,91	Usur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi	Persen	N/A	100	80	2.741 .207 .000	80	2.741.2 07.000	80	2.741.2 07.000	80	2.741.2 07.000	80	2.741.2 07.000	100	Usur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			D6
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK *)	Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	N/A	99,5	99,5	1.666 .500 .000	99,6	1.421.5 00.000	99,7	1.421.5 00.000	99,8	1.421.5 00.000	99,9	1.421.5 00.000	99,9	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		
		Cakupan kepemilikan KK	Persen	N/A	96,5	96,5		97		97,5		98		98,5		98,5	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Cakupan kepemilikan KIA	Persen	N/A	40	40		50		60		70		80		80	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		IKM	Persen	N/A	85,67	85,37		85,4		85,45		85,5		85,55		85,55	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	Persen	N/A	95	95	458.0 00.00 0	96	458.00 0.000	97	458.00 0.000	98	458.00 0.000	99	458.00 0.000	99	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			E3
		Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	N/A	41	40		60		70		80		90		90	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		IKM	Persen	N/A	85	85,37		85,4		85,45		85,5		85,55		85,55	Usur Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian nilai PPD	Persen	85,4	86,5	87,6	2.649 .984 .000	0,88 7	2.999.9 84.000	0,898	3.139.3 11.005	0,909	2.649.9 84.000	0,92	2.649.9 84.000	92	Usur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)	- Persentase keselarasan muatan RKPd dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPd - Persentase muatan RKA dengan RKPd	Persen	1	0,97	97,2	2.602 .700 .000	0,97 4	2.602.7 00.000	0,976	2.602.7 00.000	0,978	2.602.7 00.000	0,98	2.602.7 00.000	98	Usur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	V		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Persen	N/A	25%	30%	851.0 00.00 0	40%	1.001.0 00.000	50%	1.001.0 00.000	60%	1.351.0 00.000	70%	1.351.0 00.000	70%	Usur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
								N/A	20%	30%		40%							50%	
		- Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan			N/A	20%	30%		40%		50%		60%		70%		70%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Point	N/A	77	85	4.149.043.000	87	4.268.418.000	88	4.268.418.000	89	4.268.418.000	90	4.268.418.000	91				Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	100	100	98.781.000	100	100.681.000	100	100.681.000	100	100.681.000	100	100.681.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	86	0,86	10.735.000	0,85	30.735.000	0,85	30.735.000	0,85	30.735.000	0,87	30.735.000	88				Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	15.235.000	100	15.235.000	100	15.235.000	100	15.235.000	100	15.235.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	60.248.000	100	30.248.000	100	30.248.000	100	30.248.000	100	30.248.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Point	N/A	76	76	12.572.268.000	72	12.434.103.000	72	12.434.103.000	73	12.434.103.000	73	12.434.103.000	73				Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	Point	N/A	81	81		73		75		78		79		79				Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	83	100	6.598.400.000	73	7.050.000	75	7.050.000	78	7.050.000	79	7.050.000	79				Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
	PROGRAM KOORDINASI	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100	30.000.000	100	6.515.190.000	100	6.515.190.000	100	6.515.190.000	100	6.515.190.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penejakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	75.00 0.000	100	36.170. 000	100	36.170. 000	100	36.170. 000	100	36.170. 000	100	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
					100			100	69.990. 000	100	69.990. 000	100	69.990. 000	100	69.990. 000					Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100			100	75.000. 000	100	75.000. 000	100	75.000. 000	100	75.000. 000					Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Point	N/A	65	67	4.218 .546. 000	68	4.210.7 57.000	69	4.210.7 57.000	70	4.210.7 57.000	71	4.210.7 57.000	71				Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	81	82	22.00 0.000	83	12.000. 000	84	12.000. 000	85	12.000. 000	86	12.000. 000	86				Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	26.00 0.000	100	26.000. 000	100	26.000. 000	100	26.000. 000	100	26.000. 000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	18.00 0.000	100	18.000. 000	100	18.000. 000	100	18.000. 000	100	18.000. 000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	35.00 0.000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	75.00 0.000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP	Point	N/A	63	65	4.357 .464. 000	66,5	4.328.4 85.438	70	4.328.4 85.438	71	4.329.6 90.438	71,5	4.328.4 85.438	71,5				Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	Point	N/A	80	85		0,86		0,87		0,885		0,89		89			Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	80	85	79.00 0.000	0,86	89.000. 000	0,87	89.000. 000	0,885	89.000. 000	0,89	89.000. 000	89			Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	37.30 0.000	100	57.300. 000	100	57.300. 000	100	52.125. 000	100	57.300. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang diugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	15.00 0.000	100	11.030. 000	100	11.030. 000	100	15.000. 000	100	11.030. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong	
		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	25.00 0.000	100	25.000. 000	100	25.000. 000	100	25.000. 000	100	25.000. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	100.0 00.00 0	100	90.000. 000	100	90.000. 000	100	90.000. 000	100	90.000. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	67,56	63,9	68,80	4.252 .350. 000	69	4.313.2 43.400	69,30	4.330.5 21.400	69,60	4.330.5 21.400	70	4.313.2 43.400	70			Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung	
		Nilai IKM	Point	76,03	78	82		82,2 0		82,40		82,60		83		83			Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	76,03	78	82	65.52 7.000	82,2 0	38.687. 100	82,40	38.687. 100	82,60	38.687. 100	83	38.687. 100	83			Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	63.08 9.000	100	69.891. 000	100	69.891. 000	100	69.891. 000	100	69.891. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	74.27 6.000	100	33.959. 000	100	26.330. 000	100	26.330. 000	100	33.959. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	KETERTIBAN UMUM																			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang digunakan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	9.649 .000	100	9.649.0 00	100	-	100	-	100	9.649.0 00	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	37.45 6.000	100	25.818. 500	100	25.818. 500	100	25.818. 500	100	25.818. 500	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Pooint	N/A	64	63,5	4.618 .762. 000	64,6	4.607.7 43.000	65,45	4.607.7 43.000	68,7	4.607.7 43.000	70,5	4.607.7 43.000	70,5		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
		Nilai IKM	Pooint	N/A	83	82,5		82,5	84,5						86,5			Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	N/A	82,5	82,5	45.00 0.000	84,5	70.014. 000	85	70.014. 000	85,5	70.014. 000	86,5	70.014. 000	86,5		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100	40.00 0.000	100	40.000. 000	100	40.000. 000	100	40.000. 000	100	40.000. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A		N/A		N/A	19.793. 000	N/A	19.793. 000	N/A	19.793. 000	N/A	19.793. 000	N/A		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	100	100	92.88 8.000	100	75.554. 000	100	75.554. 000	100	75.554. 000	100	75.554. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	N/A	100	100	72.11 1.000	100	44.638. 000	100	44.638. 000	100	44.638. 000	100	44.638. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Nilai Persentase BMD	Point				4.443 .574. 000		4.422.9 20.000	67,5	4.422.9 20.000	68	4.422.9 20.000	68,5	4.422.9 20.000	68,8		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proveksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	78,83	75	76	75.000.000	77	85.000.000	78	85.000.000	79	85.000.000	79,5	85.000.000	80	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100	6.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peneakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	100	100	96.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	67,48	68,00	4.247.189.000	68,50	4.236.10.000	69,00	4.236.10.000	72	4.236.10.000	73	4.236.10.000	73	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang			
		Nilai IKM	Point	N/A	76,56	77,56		78,56		79,56		80,56		81,56		81,56	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	76,56	77,56	92.976.000	78,56	56.216.000	79,56	56.216.000	80,56	56.216.000	81,56	56.216.000	81,56	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	64.512.000	100	54.204.000	100	54.204.000	100	54.204.000	100	54.204.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	40.725.000	100	40.725.000	100	40.725.000	100	40.725.000	100	40.725.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penekakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	51.760.000	100	21.760.000	100	21.760.000	100	21.760.000	100	21.760.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan dawasi	Persen	N/A	100	100	29.90 0.000	100	60.208. 000	100	60.208. 000	100	60.208. 000	100	60.208. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	63,52	67,14	68	4.710 .318. 991	69,5 2	4.708.8 34.000	70,52	4.708.8 34.000	71,52	4.708.8 34.000	73	4.708.8 34.000	73		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
		Persentase BMD dalam Keadaan Baik	Persen	86,31	75	87		87,1 5		87,3		88		88,15		88,15		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	82,13	85	86	53.37 9.000	86,7 5	69.683. 000	87,15	69.683. 000	87,82	69.683. 000	88	69.683. 000	88		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	N/A	N/A	100	65.070. 000	100	65.070. 000	100	65.070. 000	100	65.070. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	100	100	20.00 0.000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	98	100	35.18 7.000	100	43.187. 000	100	43.187. 000	100	43.187. 000	100	43.187. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan dawasi	Persen	100	100	100	139.3 44.00 0	100	49.970. 000	100	49.970. 000	100	49.970. 000	100	49.970. 000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Point	68,04	68,37	68,4	4.707 .603. 000	68,5	4.689.3 03.870	68,75	4.689.3 03.870	69	4.689.3 03.870	69,25	4.689.3 03.870	74		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung		
		Nilai IKM	Point	79	80	81		82		83		84		85		85		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	79	80	81	25.00 0.000	82	25.000. 000	83	25.000. 000	84	25.000. 000	85	25.000. 000	85		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	0	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	50.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	46.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100			100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	70	70	7.906.036.000	72	7.883.837.000	72	7.883.837.000	73	7.883.837.000	74	7.883.837.000	74				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
		Nilai IKM	Point	N/A	80	82		82		83		84		85		85				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	80	82	66.977.000	82	76.977.000	83	76.977.000	84	76.977.000	85	76.977.000	85				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	2.455.600.000	100	2.485.600.000	100	2.485.600.000	100	2.485.600.000	100	2.485.600.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berjalan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	32.522.000	100	32.522.000	100	32.522.000	100	32.522.000	100	32.522.000	100				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PEMERINTAHAN UMUM																			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan dawasi	Persen	N/A	100	100	70.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciminyan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Point	67,38	67,40	67,42	4.218.128.200	67,44	4.201.466.580	67,46	4.201.466.580	67,48	4.201.466.580	67,50	4.201.466.580	67,50	67,50			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	81,80	94,80	82,00	40.232.000	82,10	40.232.000	82,20	40.232.000	82,30	40.232.000	82,40	40.232.000	82,40	82,40			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	24.864.000	100	54.864.000	100	54.864.000	100	54.864.000	100	54.864.000	100	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	0	0	0	100	10.080.000	100	10.080.000	100	10.080.000	100	10.080.000	100	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	29.142.800	100	35.430.800	100	35.430.800	100	35.430.800	100	35.430.800	100	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan dawasi	Persen	N/A	100	100	72.078.000	100	25.710.000	100	25.710.000	100	25.710.000	100	25.710.000	100	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Point	N/A	73	74	5.050.904.500	75	4.976.372.000	76	4.976.372.000	77	4.976.372.000	78	4.976.372.000	78	78			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	82 Poin	83 Poin	151.200.000	84 Poin	104.947.500	85 Poin	104.947.500	86 Poin	104.947.500	87 Poin	104.947.500	87 Poin	87 Poin			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM	Persen	N/A	95	95	16.800.000	95	73.200.000	95	73.200.000	95	73.200.000	95	73.200.000	95	95			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN																		
	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peneakan perda yang berkaitan dengan ketenraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	90	90	33.60 0.000	90	41.400. 000	90	41.400. 000	90	41.400. 000	90	41.400. 000	90			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	90	90	71.56 0.000	90	76.760. 000	90	76.760. 000	90	76.760. 000	90	76.760. 000	90			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	91.95 7.500	100	77.842. 500	100	77.842. 500	100	77.842. 500	100	77.842. 500	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	56.54	70	5.818 .918. 000	71	5.812.8 36.000	72	5.812.8 36.000	73	5.812.8 36.000	74	5.812.8 36.000	74			Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	81,37	84	28.40 0.000	85	28.400. 000	87	28.400. 000	89	28.400. 000	90	28.400. 000	90			Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	81,37	100	1.032 .100. 000	100	1.032.1 00.000	100	1.032.1 00.000	100	1.032.1 00.000	100	1.032.1 00.000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot	
	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	81,37	100	21.92 0.000	100	21.920. 000	100	21.920. 000	100	21.920. 000	100	21.920. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peneakan perda yang berkaitan dengan ketenraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	81,37	100	66.80 0.000	100	66.800. 000	100	66.800. 000	100	66.800. 000	100	66.800. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	81,37	100	30.00 0.000	100	30.000. 000	100	30.000. 000	100	30.000. 000	100	30.000. 000	100			Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	70	71	4.311.860.000	72	4.310.771.000	73	4.310.771.000	74	4.310.771.000	74	4.310.771.000	74	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	74	77	110.000.000	80	90.000.000	83	90.000.000	86	90.000.000	86	90.000.000	86	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat/Desa	Persen	N/A	100	100	60.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	N/A	72	4.127.381.000	73	4.168.882.000	74	4.168.882.000	75	4.168.882.000	76	4.168.882.000	76	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	N/A	83	70.000.000	84	70.000.000	85	70.000.000	86	70.000.000	87	70.000.000	87	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	N/A	100	60.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	N/A	100	90.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dokumen Resmi
Hak Cipta © 2021
Kabupaten Bandung

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	N/A	100	60.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	Point	N/A	70 Point	71 Point	4.045.948.000	72 Point	4.018.198.000	73 Point	4.018.198.000	74 Point	4.018.198.000	75 Point	4.018.198.000	75	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	83	84	15.000.000	85	25.000.000	86	25.000.000	87	25.000.000	88	25.000.000	88	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari			
			Persen	N/A	100	100	10.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	35.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	120.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100			100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000		Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	63,97	63,97	65,00	4.370.711.000	66,00	4.326.622.000	67,00	4.316.622.000	68,00	4.326.622.000	69,00	4.326.622.000	69,00	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin			
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	93,00%	93,00%	83,00%		83,50%		84,00%		84,50%		85,00%		85,00%				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	84,89	84,89	85,00	40.000.000	86,00	57.300.000	87,00	67.300.000	88,00	57.300.000	89,00	57.300.000	89,00	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	50.000.000	100	67.300.000	100	67.300.000	100	67.300.000	100	67.300.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati	
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026							
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang digasikan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	15.00 0.000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	15.00 0.000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	20.00 0.000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	60	61	4.190 .149. 000	62	4.187.5 38.000	63	4.187.5 38.000	64	4.187.5 38.000	65	4.187.5 38.000	65	65	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	75	76	94.08 6.000	77	89.086. 000	78	89.086. 000	79	89.086. 000	80	89.086. 000	80	80	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	48.00 0.000	100	53.000. 000	100	53.000. 000	100	53.000. 000	100	53.000. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	15.00 0.000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang digasikan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	25.00 0.000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	15.000. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	40.41 3.000	100	40.413. 000	100	40.413. 000	100	40.413. 000	100	40.413. 000	100	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP	Point	80	83	85	4.385 .648. 000	86,5	4.374.5 49.000	87,5	4.374.5 49.000	88,5	4.374.5 49.000	90	4.374.5 49.000	90	90	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margasasih			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		60,03	63	85		86		87		88,5		89	89	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	60,03	63	85	90.000.000	86	90.000.000	87	90.000.000	88,5	90.000.000	89	90.000.000	89	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	N/A	70	5.971.396.000	70,56	5.971.396.000	71	5.971.396.000	71,2	5.971.396.000	71,56	5.971.396.000	71,56	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	N/A	93,97	34.000.000	Nilai IKM 93,98	39.000.000	Nilai IKM 93,99	39.000.000	Nilai IKM 94,00	39.000.000	Nilai IKM 94,10	39.000.000	94,1	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100	964.200.000	1	959.200.000	1	959.200.000	1	959.200.000	1	959.200.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				2020	2021															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persen	N/A	100	100	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	71	72	4.713.115.000	73	4.678.292.868	74	4.678.292.868	75	4.678.292.868	76	4.678.292.868	76	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	85	86	55.000.000	0,87	20.000.000	0,88	20.000.000	0,89	20.000.000	0,9	20.000.000	90	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	59.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP	Point	N/A	61,59 Point	63,44 Point	4.361.384.000	65,34 Point	4.336.585.000	67,30 Point	4.336.585.000	69,32 Point	4.336.585.000	71,40 Point	4.336.585.000	71,40 Point	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	- Nilai IKM	Point	N/A	78,83 Point	80,10 Point	35.000.000	81,70 Point	45.000.000	83,34 Point	45.000.000	85,00 Point	45.000.000	86,70 Point	45.000.000	86,70 Point	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	PELAYANAN PUBLIK																			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	N/A	100	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	40.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	70.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100			100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000			Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	70,82 Point	66,5	4.246.795.000	67	4.226.484.935	67,5	4.226.484.935	68,5	4.226.484.935	69	4.226.484.935	69		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk		
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	85	86	98.316.000	87	85.321.000	88	85.321.000	88,5	85.321.000	89	85.321.000	89		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	N/A	100	N/A		100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	12.094.000	100	12.094.000	100	12.094.000	100	12.094.000	100	12.094.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	62.679.000	100	62.679.000	100	62.679.000	100	62.679.000	100	62.679.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	66.005.000	100	41.000.000	100	41.000.000	100	41.000.000	100	41.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	5694	61,63	4.322.629.000	63	4.268.629.000	66	4.268.629.000	69	4.268.629.000	71	4.268.629.000	71	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	81	82	120.000.000	0,83	56.500.000	0,84	56.500.000	0,85	56.500.000	0,86	56.500.000	86	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa							38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	4.410.000	100	9.410.000	100	9.410.000	100	9.410.000	100	9.410.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	13.737.000	100	33.737.000	100	33.737.000	100	33.737.000	100	33.737.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	67,28	67,5	4.683.569.000	67,75	4.674.320.000	68	4.674.320.000	68,5	4.779.426.225	69	4.887.160.106	69	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	88	88,2	58.000.000	88,3	58.000.000	88,5	58.000.000	88,75	58.000.000	90	58.000.000	90	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100		100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	33.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	PEMERINTAHAN UMUM																			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan dawasi	Persen	N/A	100	100	105.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	67,61	67,77	4.545.310.000	68,45	4.518.025.000	69	4.518.025.000	69,50	4.518.025.000	70	4.518.025.000	70		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	83,25	84	39.664.000	85	49.664.000	86	49.664.000	87	49.664.000	88	49.664.000	88		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	15.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketertaman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	15.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan dawasi	Persen	N/A	100	100	75.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	63,3 Poin	60 Poin	60,20 Poin	3.870.645.000	60,40 Poin	3.820.245.000	60,60 Poin	3.820.245.000	60,80 Poin	3.820.245.000	61,00 Poin	3.820.245.000	61,00 Poin		Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancabali		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	84,79%	73%	73,20%	40.640.000	73,40%	78.100.000	73,60%	78.100.000	73,80%	78.100.000	74,00%	78.100.000	74,00%		Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancabali		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	52.867.500	100	53.812.500	100	53.812.500	100	53.812.500	100	53.812.500	100		Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancabali		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

www.bandung.go.id

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketertaman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	16.80 0.000	100	41.400. 000	100	41.400. 000	100	41.400. 000	100	41.400. 000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancabali			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100	100	100	60.19 0.000	100	36.350. 000	100	36.350. 000	100	36.350. 000	100	36.350. 000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancabali			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	100	100	79.50 2.500	100	40.337. 500	100	40.337. 500	100	40.337. 500	100	40.337. 500	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancabali			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	64	67	6.112 .632. 000	68	6.131.1 74.769	69	6.131.1 74.769	70	6.131.1 74.769	71	6.131.1 74.769	71	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaekek			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Persen	N/A	80	82	110.6 98.00 0	84	85.698. 000	86	85.698. 000	88	85.698. 000	90	85.698. 000	90	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaekek			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persen	N/A	100	100	1.050 .087. 000	100	1.075.0 87.000	100	1.075.0 87.000	100	1.075.0 87.000	100	1.075.0 87.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaekek			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketertaman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	30.00 0.000	100	30.000. 000	100	30.000. 000	100	30.000. 000	100	30.000. 000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaekek			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	40.00 0.000	100	40.000. 000	100	40.000. 000	100	40.000. 000	100	40.000. 000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaekek			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	75.00 0.000	100	75.000. 000	100	75.000. 000	100	75.000. 000	100	75.000. 000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaekek			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	67,32	67.50	68,75	4.507 .334. 000	68,9 0	4.498.2 29.000	69	4.498.2 29.000	69,15	4.498.2 29.000	69,30	4.498.2 29.000	69,30	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Point	85,30	85,50	86	45.000.000	86,50	45.000.000	87	45.000.000	87,50	45.000.000	88	45.000.000	88	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokjanjeruk			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	78	79	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokjanjeruk			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegeakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	78	79	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokjanjeruk			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	78	79	100	40.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokjanjeruk			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100	100	100	100.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokjanjeruk			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Point	N/A	75,97 Point	76,00 Point	4.433.325.000	76,25 Point	4.436.514.000	76,50 Point	4.436.514.000	76,75 Point	4.436.514.000	77,00 Point	4.436.514.000	77,00 Point	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Point	N/A	80,97 Point	81,00 Point	61.000.000	81,25 Point	65.660.000	81,50 Point	65.660.000	81,75 Point	65.660.000	82,00 Point	65.660.000	82,00 Point	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegeakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	100	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	N/A	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	N/A	100	100	68.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang			
Sasaran																				
a	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,641	2,84	3,04		3,14		3,24		3,34		3,44		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan				
		Opini BPK*)	Poin	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		V				
Program Pembangunan Daerah																				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dokumen Resmi
Hak Cipta © 2021
Kabupaten Bandung

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
1		Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah				816.6 37.18 0.435		821.59 9.027.0 57		822.37 6.012.0 07		840.75 0.092.4 72		826.09 1.512.9 86						
a	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH *)	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	N/A	18,4	49,74	13.44 4.236 .000	50,2 7%	13.444. 236.00 0	50,87 %	13.444. 236.00 0	51,43 %	13.444. 236.00 0	51,49 %	13.444. 236.00 0	51,49%	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (Bapenda)	V		G4
b	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Tersampaikan 2. Presentase Terpenuhi Tingkat Likuiditas keuangan Pemerintah Daerah 3. Presentase PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	801.7 05.00 0.435	100 % 100 %	806.66 6.847.0 57	100% %	807.44 3.832.0 07	100% %	825.81 7.912.4 72	100% %	811.15 9.332.9 86	100%	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BKAD)			
c	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	Persen	95%	90%	90%	1.487 .944. 000	90%	1.487.9 44.000	90%	1.487.9 44.000	90%	1.487.9 44.000	90%	1.487.9 44.000	90%	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BKAD)			
Tujuan																				
a	Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	Laju penurunan angka kriminalitas	Poin	49,86	46	44,5		43		41,5		40		38,5						
Sasaran																				
a	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Keteriban Umum	Poin	N/A	70	72		74		76		78		80			Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol)			
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					28.44 3.893 .500		21.935. 890.00 0		44.204. 163.67 5		21.935. 890.00 0		21.935. 890.00 0						
a	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	N/A	60	60	250.0 00.00 0	0,5	250.00 0.000	0,7	250.00 0.000	0,7	250.00 0.000	0,65	250.00 0.000	70	Kesatuan Bangsa dan Politik			
b	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan					0,5		0,7		0,7		0,65			Kesatuan Bangsa dan Politik				
c		Prosentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik	Persen	N/A	60	60	3.312 .851. 000	0,5	776.00 0.000	0,7	776.00 0.000	0,7	776.00 0.000	0,65	776.00 0.000	70	Kesatuan Bangsa dan Politik			
d		Prosentase peningkatan pendidikan politik						0,5		0,7		0,7		0,65		Kesatuan Bangsa dan Politik				
e	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas Organisasi kemasyarakatan	Persen	N/A	60	70	1.605 .000. 000	0,5	441.00 0.000	0,7	441.00 0.000	0,7	441.00 0.000	0,65	441.00 0.000	70	Kesatuan Bangsa dan Politik			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dokumen Resmi
Hak Cipta © Pemerintah Kabupaten Bandung

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati		
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025							2026	
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN																			
f	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi	Persen	N/A	60	60	150.000.000	0,5	150.000.000	0,7	150.000.000	0,7	150.000.000	0,65	150.000.000	70	Kesatuan Bangsa dan Politik			
g		Presentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan ketahanan sosial dan budaya	Persen	N/A	60	60		0,5		0,7		0,7	0,65		70	Kesatuan Bangsa dan Politik				
h	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	Persen	N/A	60	60	6.159.992.500	0,4	1.652.840.000	0,7	23.921.113.675	0,7	1.652.840.000	0,65	1.652.840.000	70	Kesatuan Bangsa dan Politik			
i		Presentase penanganan konflik sosial	Persen	N/A	60	40		0,4		0,7		0,65	0,65		70	Kesatuan Bangsa dan Politik				
j	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM **)	Presentase Pengendalian Gangguan Ketertarikan dan ketertiban Umum **)	Persen	N/A	100	100	16.966.050.000	100 persen	18.666.050.000	100 persen	18.666.050.000	100 persen	18.666.050.000	100 persen	18.666.050.000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)		V	
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah																				
Tujuan																				
a	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	Indeks Gini	Poin	0,414	0,41	0,4		0,39		0,38		0,37		0,36			Indikator Makro			
Sasaran																				
a	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Indeks Pengeluaran	Poin	70,74	72,03	72,65		73,25		73,90		74,52		75,15			Indikator Makro			
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan						23.116.818.640		15.270.673.610		15.270.673.610		15.270.673.610		15.270.673.610					
a	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase (%) PKS yang didaya guskan dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persen	90,41%	26%	41,28	5.482.852.000	56%	5.232.852.000	71%	5.232.852.000	85%	5.232.852.000	100%	5.232.852.000	67,43	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		C3; C4	
b	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	36,31%	100%	2,29	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	2,95	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
c	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL **)	Presentase PPKS yang meningkat Keberlungsan sosialnya	Persen	69,18%	36%	48,25	9.058.090.040	60%	4.640.347.410	73%	4.640.347.410	87%	4.640.347.410	100%	4.640.347.410	54,74%	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		V, C6	
d	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	Persen	61,42%	100%	35	5.130.156.600	100%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200	68,27	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		C1	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dokumen Resmi
Hak Cipta © 2021
Kabupaten Bandung

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/ ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proveksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
e	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) Penangan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Persen	61,42%	28%	42,57%	3.295 .720. 000	59%	2.729,7 20.000	73%	2.729,7 20.000	86%	2.729,7 20.000	100%	2.729,7 20.000	41,53%	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
f	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang representatif	Persen	80,00%	80%	100	100,0 00,00 0	100	100,00 0,000	100	100,00 0,000	100	100,00 0,000	100	100,00 0,000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
Sasaran																				
a	Berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,58	7,98	7,6		6,79		5,67		5,42		5,16	5,16	Indikator Makro				
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program optimalisasi pemberdayaan tenaga kerja						19.39 3.512 .949		8.005.4 59.312		8.005.4 59.312		8.005.4 59.312		8.005.4 59.312					
a	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rata-rata capaian/terhadap proveksi indikator dalam RTKD	Persen	N/A	100	60	571,0 00,00 0	61%	624,00 0,000	62%	624,00 0,000	63%	624,00 0,000	64%	624,00 0,000	64	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
b	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	Persen	70,75	30	40	9.498 .251. 200	41%	3.117,2 22.900	42%	3.117,2 22.900	43%	3.117,2 22.900	44%	3.117,2 22.900	44	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
c	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	13,7	65	15	7.330 .491. 949	16%	2.155,4 66.612	17%	2.155,4 66.612	18%	2.155,4 66.612	19%	2.155,4 66.612	19	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		C2	
d	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL*)	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	76,67	55	56	1.993 .769. 800	57%	1.993,7 69.800	58%	1.993,7 69.800	59%	1.993,7 69.800	60%	1.993,7 69.800	60	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	V		
e	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terajagi					-	1 Provi nsi	115,00 0,000	1 Provin si	115,00 0,000	1 Provin si	115,00 0,000	1 Provin si	115,00 0,000	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
Sasaran																				
a	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,59	93,85	94,11		94,3 7		94,63		94,89		95,15	95,15	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereencana				
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						1.721. 220.0 00		1.650.22 0.000		1.660.22 0.000		1.645.22 0.000		1.645.22 0.000					
a	PROGRAM PENGARJUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	Persen	100	100	100	313,7 50,00 0	100	318,75 0,000	100	315,75 0,000	100	300,75 0,000	100	313,75 0,000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
b		Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Persen		0,057	0,058		0,05 9		0,06		0,061		0,062	0,062					
c		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		67,27	67,47		67,6 7		67,87		68,07		68,27	68,27					
d	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penegakan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Penerimaan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	Persen	100	100	100	120,0 00,00 0	100	125,00 0,000	100	137,00 0,000	100	128,00 0,000	100	120,00 0,000	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		C7	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026



No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
e	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	Persen	100	100	100	454.813.000	100	354.813.000	100	357.813.000	100	354.813.000	100	359.813.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
f	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data terpilah anak	Persen	100	100	100	130.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	144.000.000	100	130.000.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
g	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Persen	100	100	100	152.657.000	100	159.657.000	100	154.657.000	100	162.657.000	100	156.657.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
h	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100	100	100	175.000.000	100	187.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
i	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100	100	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Tujuan																				
a	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	79,08	80,1	81,11		83,14		85,17		87,2		88,2	88,2	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan				
Sasaran																				
a	Menurunnya masalah pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi		84,3	86,3	86,3		86,5		86,7		86,9		87,1	87,1	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan				
Program Pembangunan Daerah																				
1	Program peningkatan penanganan masalah pangan daerah						5.339.773.200		7.318.774.400		4.818.774.400		9.818.774.400		4.818.774.400					
a	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Persen	16	20	20	442.500.000	20%	442.500.000	20%	442.500.000	20%	442.500.000	20%	442.500.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan			
b	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	AKE 101.2%; AKP 108.9%	100	100	4.247.273.200	100%	6.126.274.400	100%	3.626.274.400	100%	8.626.274.400	100%	3.626.274.400	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan			
c									100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		Usuran Pemerintahan Bidang Pangan			
d	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	Persen	N/A	N/A	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	100	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	MISI/TUJUAN/SASARAN/ ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		TARGET										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Urusan)	SDG	SPM	Program Strategis Bupati
				Realisasi	Proyeksi	2022		2023		2024		2025		2026						
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
e	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat keamanan pangan	Persen	N/A	>85	>85	250.000.000	>85	250.000.000	>85	250.000.000	>85	250.000.000	>85	250.000.000	>85	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
						4.622.246.452.940		4.402.991.765.667		4.422.761.615.167		4.444.064.567.032		4.466.916.624.953						

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



6.5 Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Berbasis Tematik (Bandung Bedas Manunggal)

Di samping arah kebijakan umum yang dibuat berdasarkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan, disusun pula kebijakan yang bersifat lebih terpadu (integrated) dan spesifik dalam rangka mendukung terciptanya rencana pembangunan yang efektif dan mengakomodir terlaksananya percepatan pembangunan Kabupaten Bandung. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan konsep tematik perencanaan terpadu “Bandung Bedas Manunggal”. Dalam menjawab tantangan pembangunan khususnya di era pandemi, inovasi dan kolaborasi multistakeholder dalam perencanaan pembangunan menjadi penting untuk menghadirkan program pembangunan yang tepat dan tanggap. Untuk pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bandung merumuskan konsep Bandung Bedas Manunggal sebagai konsep kebijakan integrated planning atau perencanaan terpadu yang mengedepankan inovasi, integrasi, dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan berbasis tematik desa. Tahun 2022 menjadi tahun pertama konsep kebijakan ini diimplementasi di Kabupaten Bandung.

Secara epistemologis, konsep Bandung Bedas Manunggal berupaya mengembangkan semangat Bedas Manunggal dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Konsepsi tersebut dapat dirinci dengan penjelasan-penjelasan berikut.

Dalam Bahasa Sunda, kata “Bedas” memiliki makna jelas, kuat dan tangguh. Sejalan dengan amanat RPJMD, Bandung BEDAS memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera. Pendekatan “Bedas” atau sifat jelas, kuat dan tangguh diperlukan dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut pada tahun 2021-2026.

Manunggal, dalam KBBI memiliki arti menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku. Prinsip ini menjadi

dimanifestasikan dalam pembangunan berbasis integrated planning atau perencanaan terpadu dalam bingkai Bedas.

Secara teoritis, konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal berupaya mengontekstualisasi teori Doughnut Economics yang dikembangkan oleh Ratworth (2012) dan Lego Philosophy oleh Irwin et al., (2017). Pada dasarnya, Ratworth (2012) mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan dua plafon, yakni plafon sosial dan plafon ekologis. Dalam menuju suatu tujuan pembangunan, plafon sosial bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah tersebut agar mendukung dan terus mengembangkan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Adapun plafon ekologis ada untuk memastikan pembangunan yang terjadi sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat dan menghindari wilayah dari pembangunan yang mengakibatkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat setempat. Dengan demikian, kedua plafon tersebut mengarahkan pada pembangunan yang tidak semata-mata untuk mengeksploitasi potensi daerah, baik potensi alam maupun potensi sosial, namun mengarahkan wilayah pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan Lego Philosophy berkenaan dengan prinsip kreativitas dalam proses pembangunan suatu identitas dan manifestasi visi yang dilakukan secara bersama meskipun memiliki karakteristik dan latar belakang yang beragam.

Selain itu, konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal juga memedomani konsep pembangunan daerah yang menjunjung pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rincian penjelasan masing-masing pendekatan yang terkandung dalam konsepsi Bandung Bedas Manunggal adalah sebagai berikut.

Tematik-Holistik, yakni dalam rangka memfokuskan pembangunan di Kabupaten Bandung dipilih beberapa tema strategis untuk dikembangkan. Terdapat 5 (lima)



tema yang menjadi fokus. Kelima tematik ini dipilih dengan melihat tema-tema pembangunan yang merupakan bagian dari satu kesatuan potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling terkait di Kabupaten Bandung. Adapun tematik ini dibingkai oleh Kearifan Lokal, dan Plafon Ekologis yang terdiri dari Ketahanan Bencana, Integrasi Spasial dan Daya Dukung Lingkungan. Secara garis besar, manifestasi tematik-holistik konsep Bandung Bedas Manunggal terilustrasi dalam fondasi Semangat Pembangunan Bedas. Selengkapanya, 5 (lima) tema tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kearifan lokal, yang diterjemahkan menjadi fokus Semangat Pembangunan BEDAS;
2. Pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Berdaya;
3. Reformasi birokrasi, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Rancage;
4. Transformasi digital, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Net 4.0; dan
5. Pembangunan berkelanjutan, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Lestari.

Integratif, yakni dalam melakukan intervensi pada pembangunan di Kabupaten Bandung memerlukan sinergi multipihak dan multiaspek. Secara lebih rinci, khususnya terkait 5 tematik yang diusung, intervensi untuk masing-masing tematik ini memerlukan intervensi dari multipihak dan multiaspek.

Spasial, yakni bahwa pengembangan konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal melalui 5 tematik yang diangkat akan tersebar ke seluruh daerah di Kabupaten Bandung pada skala desa. Pembangunan di tingkat desa sebagai daerah otonom menjadi lokus pembangunan yang diarahkan sesuai potensi lokal yang ada sekaligus simpul data yang dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat desa setempat.

Adapun konsep Bandung Bedas Manunggal dilengkapi 3 (tiga) pendekatan dalam mewujudkan *integrated planning*, yakni pendekatan kolaboratif, integratif, dan inovatif. Pendekatan kolaboratif dikedepankan untuk memastikan intervensi kebijakan Bandung Bedas Manunggal dilakukan secara multiaspek dan multipihak. Pendekatan integratif berupaya memanifestasi semangat 'Manunggal' atau keterpaduan dalam intervensi pembangunan Bandung Bedas Manunggal dalam mewujudkan satu tujuan, yakni Bandung BEDAS. Terakhir, pendekatan inovatif mengedepankan intervensi yang berorientasi pada proses pemecahan masalah yang kreatif dan solusi pembangunannya dapat aplikatif di lokus-lokus pembangunan Bandung Bedas Manunggal.

Berdasarkan konsepsi tersebut, Bandung Bedas Manunggal terdiri dari 5 (lima) lapisan pembangunan sebagai berikut.

Semangat Pembangunan BEDAS mencakup semangat pembangunan yang mendasari konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal. Semangat pembangunan berupaya mendorong pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, inovasi dan kolaborasi, kearifan lokal dan kesetaraan gender.

BEDAS Berdaya merupakan manifestasi simpul kreatif BEDAS yang terdiri dari 3 (tiga) tema yang dinilai strategis untuk pembangunan Kabupaten Bandung, yakni Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Pangan.

1. Ekonomi Kreatif. Pengembangan tematik ekonomi kreatif berupaya memanfaatkan potensi keahlian, bakat, dan juga kreativitas masyarakat Kabupaten Bandung serta letak Kabupaten Bandung yang strategis untuk menjangkau pasar. Pengembangan tematik ini juga sejalan untuk memberdayakan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan di tingkat desa/kampung pada berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti kuliner,

- seni pertunjukan, fesyen, kraf, desain produk dan lain-lain. Dengan demikian, pengembangan tematik ini juga akan mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
2. Ketahanan Pangan. Pengembangan tematik pangan meliputi upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjamin ketersediaan, kualitas, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini dilatarbelakangi oleh upaya menurunkan angka prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Upaya yang didorong dalam pengembangan tematik pangan ini meliputi pengembangan simpul pangan regional kabupaten dan lokal sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dari tingkat terkecil yaitu desa.
 3. Pariwisata. Pada kondisi eksisting, Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi pariwisata, baik yang itu untuk objek-objek wisata yang sudah dikembangkan maupun yang belum dikembangkan. Objek-objek wisata Kabupaten Bandung yang telah berkembang tidak menjadi destinasi bagi wisatawan domestik, tetapi juga bagi wisatawan internasional.

BEDAS Rancage, mencakup semangat reformasi birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pembentukan human capital di lingkungan pemerintahan dan di kalangan masyarakat pada umumnya berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berintegritas dan kompeten menuju perwujudan Society 5.0.

BEDAS Net 4.0, yakni upaya-upaya pemerintah untuk melakukan transformasi digital yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah.

BEDAS Lestari, merupakan konsepsi pembangunan daerah berbasis mikro DAS. Dalam hal ini, penyelenggaraan pembangunan berbasis mikro DAS menjunjung adanya plafon ekologis dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak hanya untuk mengejar nilai-nilai ekonomi semata namun juga turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) plafon ekologis yang dijunjung dalam konsepsi BEDAS Lestari, yakni Ketahanan Bencana, Daya Dukung Lingkungan dan Integrasi Spasial.

Gambar 6-7 adalah ilustrasi konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal.

Pada implementasinya, konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal didukung oleh desa sebagai lokus pembangunan dan indikator-indikator kinerja yang mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala. Dengan mengacu pada indikator dalam Sustainable Development Goals Desa, maka setiap desa sebagai lokus intervensi kebijakan Bandung Bedas Manunggal dapat dilihat perkembangannya dan dipastikan bahwa intervensi tersebut mendukung perwujudan Bandung BEDAS.

Konsep pembangunan tematik Bandung Bedas Manunggal telah dirancang sesuai dengan tema pembangunan tahunan dan akan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan hingga tingkat program Perangkat Daerah agar mendukung tema pembangunan tahunan.



Bebanah Lingkungan

Menjunjung Ketahanan Bencana, Daya Dukung Lingkungan, dan Integrasi Spasial

Transformasi menuju Bandung BEDAS 4.0

Semangat reformasi birokrasi dan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berintegritas, dan kompeten menuju Society 5.0

Simpul Kreatif BEDAS

Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Pangan



BEDAS Lestari

BEDAS Net 4.0

BEDAS Rancage

BEDAS Berdaya

BANDUNG
BEDAS!

Semangat pembangunan BEDAS!
Pembangunan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, inovasi dan kolaborasi, kearifan lokal, dan kesetaraan gender

Gambar 6-7
Konsep Kebijakan Bandung Bedas Manunggal
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-15

Pemetaan Konsep Pembangunan Tematik Bandung Bedas Manunggal

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
Spirit BEDAS	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINKES	Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam rangka pemenuhan Universal Health Coverage
	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Majalaya	
	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Soreang	
	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD Cicalengka	
	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS	
	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang	DINSOS	Pembinaan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
			Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DINSOS	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, Ormas, Pramuka, Karang Taruna, serta Petugas Sosial Masyarakat Lainnya
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	DISNAKER	Menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk Kabupaten Bandung
	Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3A	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
BEDAS Berdaya	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 2. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	DISPERIN	Penguatan pelayanan ekspor komoditi produk Kabupaten Bandung
	Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERIN	1. Perencanaan Pembangunan Pasar Tematik dan rumah komoditas (Konveksi, Seni, Makanan, dan souvenir lainnya) 2. Perencanaan pembangunan pasar sehat dan pembinaan pengelolaan pasar desa
	Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DISKOPUKM	Pengembangan Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Start Up
	Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	DISKOPUKM	Memfasilitasi bantuan modal bagi Koperasi dan usaha Mikro dalam upaya recovery ekonomi pasca Pandemi Covid-19



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
	serta peningkatan kualitas data koperasi		Daerah Kabupaten/Kota	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	DISPARBUD	1. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata melalui penguatan kerja sama komunitas masyarakat dan pelaku industri pariwisata, pemerintah, serta BUMN untuk revitalisasi prasarana pariwisata 2. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya berskala Nasional dan Internasional
	Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARBUD	Penyusunan rencana detail Pariwisata Daerah
	Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DISPARBUD	1. Penguatan Paguyuban Seni dan Budaya 2. Perencanaan pembangunan alun-alun dan Gedung Kreatif Center
	Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non	Penyediaan Pelayanan	DPMPSTP	Mendorong kemudahan investasi dan perizinan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
			Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B 2. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	DISTAN	1. Pengembangan sistem basis data lahan pertanian sebagai dasar tindak lanjut sertifikasi lahan pertanian 2. Peningkatan produktivitas lahan pertanian agro 3. Petani BEDAS Sejahtera
	Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana		Pengembangan pasar hasil produksi pertanian dan peternakan berbasis digital



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
	Pengembangan simpul pangan regional dan lokal	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pertanian Lainnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1. Pengembangan komoditas pertanian melalui fasilitasi bantuan pertanian 2. Petani BEDAS Sejahtera
	Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Peningkatan infrastruktur pertanian
BEDAS Rancage	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Pelayanan KTP, KK, dan Administrasi Kependudukan lainnya 1x24 jam
	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan,	Setda	1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang religius dan berakhlak baik melalui pemahaman dan pengamalan agama secara utuh. 2. Meningkatkan fasilitas pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya 3. Pemberian stimulan sarpras keagamaan 1. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam



Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
				Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		penyusunan regulasi pemerintah daerah 2. Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan di daerah perbatasan 2. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan regulasi pemerintah daerah 3. Mengkoordinasikan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pusat
			Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan		Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Memfasilitasi pembentukan Kabupaten Bandung Timur
	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda	Pembentukan forum CSR untuk mendorong percepatan pembangunan
	Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Bapenda	Penertiban dan optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pelayanan dan pendapatan



Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
				Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		
	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	DINKES	1. Peningkatan kapasitas Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas 3. Peningkatan kapasitas RS rujukan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin		Optimalisasi vaksinasi Covid-19 masyarakat Kabupaten Bandung
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	DINKES	Pemerataan tenaga kesehatan sampai ke fasilitas kesehatan terdepan
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINKES	Optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Menurunkan angka kelahiran murni	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Parameter Kependudukan	DP2KBP3A	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan ketahanan keluarga
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data,	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan	DPMD	Fasilitasi Posyandu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
	informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga	DISDIK	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini



Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
				Kependidikan bagi Satuan PAUD 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Memenuhi persyaratan sarana pendidikan dasar (SD dan SMP) sesuai standar nasional pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1. Meningkatkan insentif bagi guru honor dan tenaga pendidikan 2. Optimalisasi pendidikan karakter yang religius



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			Memfasilitasi peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk memberi kesempatan belajar kepada penduduk usia 25 tahun keatas
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Pembinaan prestasi olah raga pada usia pendidikan dasar dan menengah
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
BEDAS Net 4.0	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	DPUTR	1. Menyelesaikan perbaikan dan peningkatan jalan, pedestrian,	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
	evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jembatan Rehabilitasi Jembatan		jembatan, saluran drainase, TPT dan irigasi 2. Mendorong perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran drainase desa
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DPUTR	Menyelesaikan perbaikan dan peningkatan jalan, pedestrian, jembatan, saluran drainase, TPT dan irigasi
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24. Rehabilitasi Tanggul Sungai 46. Normalisasi/Restorasi Sungai	DPUTR	Melakukan revitalisasi dan pembersihan anak-anak sungai yang berpotensi banjir dalam menunjang program Citarum Harum
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	DPUTR	Pembangunan rumah sakit tipe D



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	DPUTR	Penyusunan Rencana detail tata ruang Kecamatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DISHUB	Mendorong pembangunan Terminal Tipe A, Terminal Tipe B & Revitalisasi Terminal Tipe C
	Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	Meningkatkan ketersediaan layanan jaringan internet untuk mewujudkan smart city
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DISPERKIMTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan 2. Memfasilitasi sertifikasi dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 3. Mendorong Percepatan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang property
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	DISPERKIMTAN	Penyediaan fasilitas perumahan subsidi khusus bagi buruh



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal	Arah Kebijakan RPJMD	Program PD	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Program Strategis
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DISPERKIMTAN	Pembangunan rumah tidak layak huni
BEDAS Lestari	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Modern
	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis resiko bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DISDAMKAR	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan kebencanaan serta kebakaran

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Selain dari keselarasan konsep pembangunan tematik tahunan, dalam mewujudkan pembangunan yang proporsional, tepat sasaran, dan efisien, maka konsep pembangunan tematik terintegrasi Bandung Bedas Manunggal dirancang dengan berbagai tolak ukur keberhasilan untuk setiap tema. Rincian tolak ukur keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Semangat Pembangunan BEDAS

Fokus Semangat Pembangunan BEDAS dilaksanakan selama 2022-2026 dan terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yakni aspek Kearifan Lokal dan Kesejahteraan Kelompok Rentan. Aspek kearifan lokal diturunkan menjadi dua subaspek, yakni Kolaborasi dan Inovasi dan Nilai Keagamaan. Adapun aspek Kesejahteraan Kelompok Rentan diturunkan menjadi dua subaspek, yakni Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan. Rincian tolak ukur keberhasilan untuk Fokus Semangat Pembangunan BEDAS dapat dilihat di **Gambar 6-8**.



Gambar 6-8
Tolak Ukur Keberhasilan Fokus Semangat Pembangunan BEDAS

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2. BEDAS Berdaya

Investasi. Rincian tolak ukur keberhasilan untuk Fokus BEDAS Berdaya dapat dilihat di **Gambar 6-9**.

Fokus BEDAS Berdaya dilaksanakan selama tahun 2022 dan terdiri dari 3 (dua) aspek utama, yakni aspek Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan dan Pariwisata. Aspek Ekonomi Kreatif diturunkan menjadi Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Ketenagakerjaan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Aspek Ketahanan Pangan diturunkan menjadi subaspek Pangan Daerah. Adapun aspek Pariwisata diturunkan menjadi dua subaspek, yakni Daya Saing dan

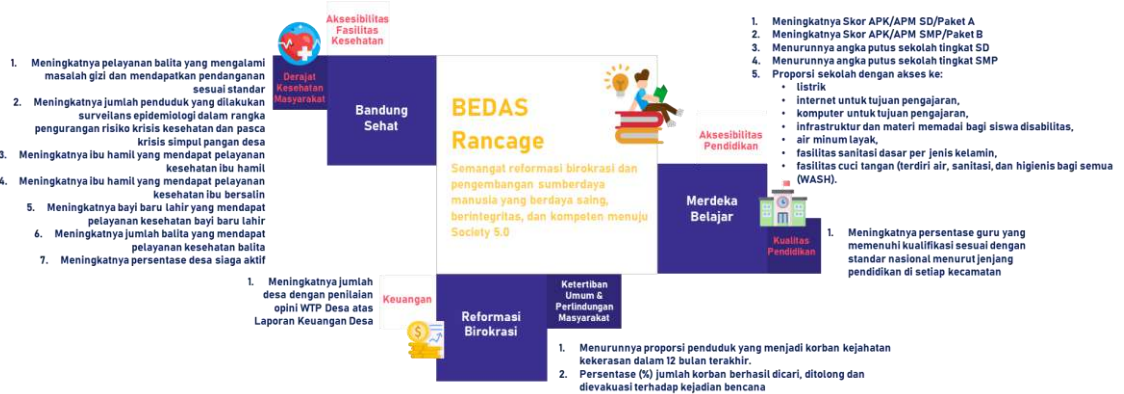


Gambar 6-9
Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Berdaya
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. BEDAS Rancage

Fokus BEDAS Rancage dilaksanakan selama tahun 2023 dan terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yakni aspek Bandung Sehat, Merdeka Belajar, dan Reformasi Birokrasi. Aspek Bandung Sehat diturunkan menjadi subaspek Derajat Kesehatan Masyarakat dan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan. Aspek Merdeka

Belajar diturunkan menjadi subaspek Aksesibilitas Pendidikan dan subaspek Kualitas Pendidikan. Adapun aspek Reformasi Birokrasi diturunkan menjadi dua subaspek, yakni Keuangan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Rincian tolak ukur keberhasilan untuk Fokus BEDAS Rancage dapat dilihat di **Gambar 6-10**.



Gambar 6-10
Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Rancage
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



4. BEDAS Net 4.0

Fokus BEDAS Net 4.0 dilaksanakan selama tahun 2024 dan terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yakni aspek Smart City dan Smart Government. Aspek Smart City diturunkan menjadi subaspek Kampung. Adapun

aspek Smart Government diturunkan menjadi subaspek Pelayanan Publik. Aspek Merdeka Belajar diturunkan menjadi subaspek Aksesibilitas Pendidikan dan subaspek Kualitas Pendidikan. Rincian tolak ukur keberhasilan untuk Fokus BEDAS Net 4.0 dapat dilihat di **Gambar 6-11**.



Gambar 6-11
Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Net 4.0

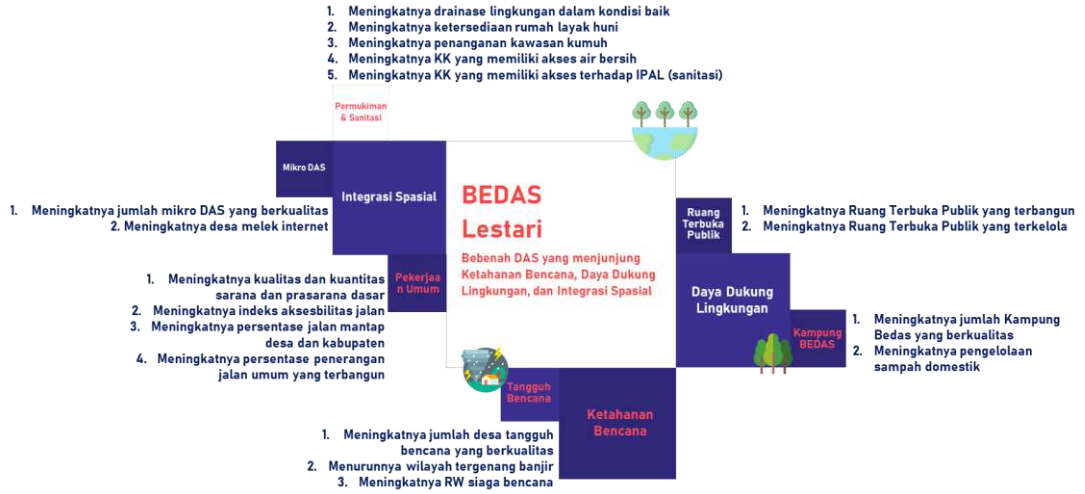
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5. BEDAS Lestari

Fokus BEDAS Lestari dilaksanakan selama tahun 2025-2026 dan terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yakni aspek Integrasi Spasial, Daya Dukung Lingkungan dan Ketahanan Bencana. Aspek Integrasi Spasial diturunkan menjadi subaspek Pekerjaan Umum, Mikro DAS dan Permukiman dan Sanitasi. Aspek Daya Dukung Lingkungan diturunkan menjadi subaspek

Ruang Terbuka Publik dan Kampung BEDAS. Adapun aspek Ketahanan Bencana diturunkan menjadi subaspek Tangguh Bencana. Rincian tolak ukur keberhasilan untuk Fokus BEDAS Lestari dapat dilihat di **Gambar 6-12**.

Selengkapnya, ringkasan tolak ukur keberhasilan Bandung Bedas Manunggal adapat dilihat pada **Tabel 6-16**.



Gambar 6-12
Tolak Ukur Keberhasilan Fokus BEDAS Lestari
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 6-16

Ringkasan Tolak Ukur Keberhasilan Konsep Pembangunan Tematik Bandung Bedas Manunggal

Bandung Bedas Manunggal	Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector		
				2022	2023	2024	2025	2026				
SEMANGAT PEMBANGUNAN BEDAS (2022-2026)												
Semangat pembangunan BEDAS! Pembangunan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, inovasi dan kolaborasi, kearifan lokal, dan kesetaraan gender	Kearifan Lokal	Kolaborasi dan inovasi	Meningkatnya indeks desa membangun	Nilai agregat dari: - Indeks Ketahanan Sosial - Indeks Ketahanan Ekonomi - Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi	Penyelenggaraan Penataan Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
					Fasilitasi kerjasama antar desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00		
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.103.400.000,00	7.728.400.000,00	7.078.400.000,00	8.853.400.000,00	7.153.400.000,00		
	Nilai keagamaan	Meningkatnya partisipasi tokoh keagamaan pada pembangunan tingkat desa	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat serta organisasi kemasyarakatan yang terbina / Jumlah Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan jumlah organisasi kemasyarakatan) dikali 100 persen	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	983.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.605.000.000,00	441.000.000,00	441.000.000,00	441.000.000,00	441.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Bakesbangpol
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.796.753.000,00	13.254.503.000,00	13.254.503.000,00	13.254.503.000,00	13.254.503.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Setda
Kesejahteraan Kelompok Rentan	Peningkatan kesejahteraan	Meningkatnya proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja,	Persentase (%) PPKS yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	8.332.391.040,00	3.914.648.410,00	3.914.648.410,00	3.914.648.410,00	3.914.648.410,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Dinsos	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	983.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Besar Manunggal			Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector
						2022	2023	2024	2025	2026		
			kelompok miskin dan rentan									
			Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.130.156.600,00	2.517.754.200,00	2.517.754.200,00	2.517.754.200,00	2.517.754.200,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Dinsos
		Pemberdayaan	Meningkatnya proporsi posisi diduduki perempuan di pemerintahan dan legislatif	(Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan / jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor) dikali 100 persen	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	65.000.000,00	60.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DP2KBP3A
			Meningkatnya persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	(Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan / jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor) dikali 100 persen	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	65.000.000,00	60.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DP2KBP3A
				(Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan / jumlah anak korban kekerasan yang melapor) dikali 100 persen	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DP2KBP3A
BEDAS BERDAYA (2022)												
Simpul Kreatif BEDAS: Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Pangan	Ekonomi kerakyatan	Perdagangan	Meningkatnya sarana prasarana distribusi perdagangan wilayah	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang di distribusikan/ dibangun	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.121.208.251	12.166.604.000	12.046.604.000	12.046.604.000	12.046.604.000	31 kecamatan	DISPERIN
					Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	87.500.000	207.500.000	207.500.000	207.500.000	207.500.000	31 kecamatan	DISPERIN
					Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	31 kecamatan	DISPERIN
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	31 kecamatan	DISPERIN
					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	31 kecamatan	DISPERIN
	Ketenagakerjaan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	8.993.547.200,00	2.578.518.900,00	2.578.518.900,00	2.578.518.900,00	2.578.518.900,00	31 Kecamatan di Wilayah	DISNAKER	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Besar Manunggal			Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector	
						2022	2023	2024	2025	2026			
				kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja) dikali 100 persen	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	6.633.070.949,00	1.398.045.612,00	1.398.045.612,00	1.398.045.612,00	1.398.045.612,00	Kabupaten Bandung	DISNAKER	
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	613.138.000,00	613.138.000,00	613.138.000,00	613.138.000,00	613.138.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DISNAKER	
					UMKM dan Koperasi	Meningkatnya kompetensi serta daya saing usaha mikro dan koperasi	(Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha --- x 100% jumlah usaha mikro yg ada)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.447.544.000	3.968.017.000	4.028.017.000	4.078.017.000	4.078.017.000
					Jumlah koperasi sehat, Patuh dan aktif tahun n - koperasi sehat, Patuh dan aktif tahun n-1	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	3.543.650.573	3.601.913.268	3.601.913.268	4.523.236.268	4.523.236.268	31 kecamatan	DISKOPUKM
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	737.152.000	987.152.000	1.037.152.000	1.415.829.000	1.415.829.000	31 kecamatan	DISKOPUKM
						Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	303.050.000	643.050.000	643.050.000	693.050.000	693.050.000	31 kecamatan	DISKOPUKM
						Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	31 kecamatan	DISKOPUKM
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	31 kecamatan	DISKOPUKM
						Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah	890.587.000	442.826.650	442.826.650	442.826.650	442.826.650	31 kecamatan	DISKOPUKM
						Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1.115.967.000	1.215.967.000	1.665.967.000	1.665.967.000	1.665.967.000	31 kecamatan	DISKOPUKM
		Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Daya saing Produk Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah komunitas ekonomi kreatif dan Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	31 kecamatan	DISPARBUD	
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	31 kecamatan	DISPARBUD	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal			Tolok Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector
						2022	2023	2024	2025	2026		
Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan	Nilai tukar pembudidaya ikan dan nilai tukar pengolah ikan, yakni rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang dibayar	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.720.355.000	950.275.000	950.275.000	950.275.000	950.275.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.608.737.000	1.550.000.000	1.349.012.000	1.349.012.000	1.349.012.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	200.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75.000.000	250.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	907.630.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		
	Meningkatnya Produksi Pangan Utama	Jumlah produksi tanaman pangan utama tahun n - Jumlah produksi tanaman pangan utama tahun n-1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.457.378.000	1.875.822.000	2.007.610.000	1.950.822.000	2.075.822.000	31 kecamatan	DISTAN		
			Pengembangan Prasarana Pertanian	801.500.000	1.001.500.000	768.700.000	808.700.000	828.700.000	31 kecamatan	DISTAN		
			Pembangunan Prasarana Pertanian	1.175.000.000	1.393.988.000	1.325.000.000	1.436.788.000	1.375.000.000	31 kecamatan	DISTAN		
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.375.000.000	1.075.000.000	1.075.000.000	1.125.000.000	1.075.000.000	31 kecamatan	DISTAN		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.475.413.189	1.031.663.189	1.031.663.189	1.131.663.189	1.193.451.189	31 kecamatan	DISTAN		
	Ketahanan Pangan	Pangan Daerah	Penguatan akses pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	442.500.000	782.500.000	892.500.000	692.500.000	942.500.000	31 kecamatan	DISPANGKAN	
			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%) tahun n - Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%) tahun n-1	1.617.302.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN	
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji mutu dan keamanan pangan	250.000.000	750.000.000	500.000.000	400.000.000	400.000.000	31 kecamatan	DISPANGKAN		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Besar Manunggal			Tolok Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector	
						2022	2023	2024	2025	2026			
Pariwisata dan Investasi	Pariwisata	Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n - jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.825.440.000	1.525.440.000	1.725.440.000	1.650.440.000	1.725.440.000	31 kecamatan	DISPARBUD	
			Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan tahun n - Lama tinggal wisatawan n-1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1.258.351.000	1.058.351.000	1.258.351.000	1.258.351.000	1.258.351.000	31 kecamatan	DISPARBUD	
				Penetapan Tanda Daftar Usaha	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	31 kecamatan	DISPARBUD		
	Investasi	Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	395.102.000	395.102.000	395.102.000	395.102.000	395.102.000	31 kecamatan	DPMPTSP
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	950.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	31 kecamatan	DPMPTSP
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	31 kecamatan	DPMPTSP
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	31 kecamatan	DPMPTSP
BEDAS RANCAGE (2023)													
Semangat reformasi birokrasi dan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berintegritas, dan kompeten menuju Society 5.0	Bandung Sehat	Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan pandangan sesuai standar	Prosentase pelayanan Balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan penanganan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.923.346.000,00	59.951.832.000,00	59.951.832.000,00	59.951.832.000,00	59.951.832.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Dinkes	
			Meningkatnya jumlah penduduk yang dilakukan surveilans epidemiologi dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis simpul pangan desa	Prosentase penduduk yang dilakukan surveilans epidemiologi dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan									
			Meningkatnya ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	Prosentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil									
			Meningkatnya ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin	Prosentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin									



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Besar Manunggal			Tolok Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector	
						2022	2023	2024	2025	2026			
			Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Prosentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir									
			Meningkatnya jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita	Prosentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita									
			Meningkatnya persentase desa siaga aktif	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai agregat dari : - Indeks Ketahanan Sosial - Indeks Ketahanan Ekonomi - Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Dinkes
							100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Dinkes
							125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
							125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
							10.103.400.000,00	7.728.400.000,00	7.078.400.000,00	8.853.400.000,00	7.153.400.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
			Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.984.008.400,00	10.388.634.000,00	10.388.634.000,00	20.388.634.000,00	11.388.634.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Dinkes
				Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Prosentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.635.445.800,00	1.635.445.800,00	1.635.445.800,00	1.635.445.800,00	1.635.445.800,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Disnaker
			Merdeka Belajar	Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya Skor APK/APM SD/Paket A	Prosentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SD atau Paket A / usia sekolah yang sesuai dengan jenjang	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	131.649.677.425,00	59.621.332.314,00	59.621.332.314,00	59.621.332.314,00	59.621.332.314,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Besar Manunggal		Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector
					2022	2023	2024	2025	2026		
			pendidikan SD atau Paket A								
		Meningkatnya Skor APK/APM SMP/Paket B	Prosentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SMP atau Paket B / usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan SMP atau Paket B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.882.421.952,00	41.640.685.611,00	41.640.685.611,00	41.640.685.611,00	41.640.685.611,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Disdik
		Menurunnya angka putus sekolah tingkat SD	Prosentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56.443.498.000,00	25.829.091.000,00	25.829.091.000,00	25.829.091.000,00	25.829.091.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Disdik
		Menurunnya angka putus sekolah tingkat SMP	Prosentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMP yang dinyatakan dalam persen	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.185.761.580,00	109.437.733.100,00	109.437.733.100,00	109.437.733.100,00	109.437.733.100,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Disdik
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).									
	Kualitas Pendidikan	Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan di setiap kecamatan	Prosentase tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan pengembangan karier	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	600.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	Disdik
Reformasi Birokrasi	Keuangan	Meningkatnya jumlah desa dengan penilaian opini WTP Desa atas Laporan Keuangan Desa	Prosentase desa yang menyampaikan Catatan laporan Keuangan (CaLK Desa) Desa secara benar dan tepat waktu	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.103.400.000,00	7.728.400.000,00	7.078.400.000,00	8.853.400.000,00	7.153.400.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
	Ketertiban Umum &	Menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	65.000.000,00	67.000.000,00	63.000.000,00	60.000.000,00		DP2KBP3A



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal			Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector
						2022	2023	2024	2025	2026		
	Perindungan Masyarakat		kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000,00	122.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	125.000.000,00		DP2KBP3A
			Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	31 Kecamatan	BPBD
BEDAS NET 4.0 (2024)												
Transformasi menuju Bandung BEDAS 4.0	Smart City	Kampung	Meningkatnya jumlah kampung digital	Prosentase kawasan pedesaan yang menerapkan teknologi informasi	Fasilitasi kerjasama antar desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
			Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	jumlah penyediaan layanan internet PD pada lingkup Kabupaten Bandung	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.435.905.000,00	1.435.905.000,00	1.435.905.000,00	1.435.905.000,00	1.435.905.000,00	seluruh PD	DPUTR
			Jumlah bulan layanan webhosting dan domain bandungkab.go.id	jumlah bulan layanan webhosting dan domain bandungkab.go.id	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.055.000,00	194.055.000,00	194.055.000,00	194.055.000,00	194.055.000,00	31 kecamatan	Diskominfo
			Meningkatnya jumlah komunitas digital	Prosentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang menerapkan teknologi informasi	Fasilitasi kerjasama antar desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
Smart Government	Pelayanan Publik		- Jumlah aplikasi layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi -Jumlah database aplikasi dan website terpelihara	- Jumlah aplikasi layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi - Jumlah database aplikasi dan website terpelihara - jumlah data base aplikasi dan website yang terpelihara	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	639.225.000,00	639.225.000,00	639.225.000,00	639.225.000,00	639.225.000,00	31 kecamatan	Diskominfo
			Indeks SPBE	- Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan smart city dan jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan smart city	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.500.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	Kab.Bandung	Diskominfo



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal			Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector		
						2022	2023	2024	2025	2026				
			Jumlah Jenis Kelengkapan Data Center	jumlah jenis kelengkapan data center	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	228.824.000,00	228.824.000,00	228.824.000,00	228.824.000,00	228.824.000,00	Kab.Bandung	Diskominfo		
BEDAS LESTARI (2025-2026)														
Beban DAS: Menjunjung Ketahanan Bencana, Daya Dukung Lingkungan, dan Integrasi Spasial	Integrasi Spasial	Mikro DAS	Meningkatnya jumlah mikro DAS yang berkualitas (indikator: indeks kualitas air, run off)	Jumlah Mikro DAS yang ditangani	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000					Kab.Bandung	DLH		
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab.Bandung	DLH		
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	737.678.000	2.604.214.926	80.060.500	80.060.500	80.060.500	Kab.Bandung	DLH		
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.940.000.000	50.784.000.000	54.512.400.000	59.163.640.000	64.780.004.000	Kab.Bandung	DPUTR		
					Meningkatnya desa melek internet	Prosentase desa yang sudah terjangkau internet	Penyelenggaraan Penataan Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
				Fasilitasi kerjasama antar desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00		DPMD			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.103.400.000,00	7.728.400.000,00	7.078.400.000,00	8.853.400.000,00	7.153.400.000,00		DPMD			
		Pekerjaan Umum	Meningkatnya indeks aksesibilitas jalan	1. Panjang Jaringan Jalan yang direkonstruksi 2. Panjang Jalan yang direhabilitasi 3. Panjang jalan yang dipelihara 4. Jumlah Jembatan yang dibangun 5. Jumlah Jembatan yang terpelihara secara rutin	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	105.947.208.421	50.149.906.719	50.149.906.719	82.575.914.058	89.651.389.628	Kab.Bandung	DPUTR		
					Meningkatnya persentase jalan mantap desa dan kabupaten	1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan,jembatan, dan bangunan pelengkap 2. Lahan/tanah yang Terbebaskan Untuk Jalan 3. Jumlah Dokumen informasi database jalan dan jembatan 4. Jumlah dokumen survey kondisi jalan dan jembatan yang tersusun 5. Panjang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	47.741.834.484	30.610.102.322	30.610.102.322	35.610.102.322	34.610.102.322	Kab.Bandung	DPUTR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal			Tolok Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector								
						2022	2023	2024	2025	2026										
				<p>Bangunan Pelengkap Jalan TPT yang terbangun Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan Panjang trotoar yang terbangun</p> <p>6. Panjang jalan yang dibangun untuk dilebarkan</p> <p>7. Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan</p>																
						<p>Prosentase jalan desa dengan kondisi baik dan sedang</p>	Penyelenggaraan Penataan Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	31	DPMD						
							Fasilitasi kerjasama antar desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD						
							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.103.400.000,00	7.728.400.000,00	7.078.400.000,00	8.853.400.000,00	7.153.400.000,00		DPMD						
						<p>Meningkatnya persentase penerangan jalan umum yang terbangun</p>	<p>1. Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun</p> <p>2. Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang direhabilitasi dan dipelihara</p>	<p>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>	14.790.403.950	5.689.393.600	5.689.393.600	5.689.393.600	5.689.393.600	Kab.Bandung	DPUTR					
						Permukiman dan Sanitasi	Meningkatnya drainase lingkungan dalam kondisi baik		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.950.965.136,00	16.474.968.778,00	16.474.968.778,00	16.474.968.778,00	16.474.968.778,00	Kab.Bandung	Disperkimtan				
										Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	<p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p>	107.500.000.000,00	107.500.000.000,00	107.500.000.000,00			107.500.000.000,00	107.500.000.000,00	Kab.Bandung	Disperkimtan
												1.946.000.000,00	1.946.000.000,00	1.946.000.000,00			1.946.000.000,00	1.946.000.000,00		
										Meningkatnya penanganan kawasan kumuh		<p>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p>	60.660.257.216,00	11.340.150.846,00			11.340.150.846,00	21.340.150.846,00	21.340.150.846,00	31 kecamatan
28.378.643.000,00	12.544.793.000,00	12.544.793.000,00	12.544.793.000,00	12.544.793.000,00	31 kecamatan								Disperkimtan							
Meningkatnya KK yang memiliki akses air bersih		22.379.160.929,00	11.783.606.999,00	11.783.606.999,00						11.783.606.999,00	12.236.800.000,00	31 kecamatan		Disperkimtan						
Meningkatnya KK yang memiliki akses terhadap IPAL (sanitasi)																				
Daya dukung lingkungan	Kampung BEDAS	Meningkatnya jumlah Kampung Bedas yang berkualitas (indikator:	jumlah pendampingan kampung Bedas	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	70.967.839,00	70.967.839,00	70.967.839,00	70.967.839,00	70.967.839,00	Kab.Bandung	DLH									



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Bandung Bedas Manunggal			Tolak Ukur Keberhasilan	Definsi Operasional	Kegiatan	Anggaran					Lokasi (Tingkat Kecamatan)	Leading Sector	
						2022	2023	2024	2025	2026			
Ketahanan bencana	Ruang Terbuka Publik	indeks kualitas air, run off, sampah, sedimentasi, dll)	Meningkatnya pengelolaan sampah domestik	(sampah yang dikelola/potensi timbulan sampah)x100%	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
					Pengelolaan Sampah	24.696.437.354,00	23.709.064.416,00	23.709.064.416,00	38.561.079.094,00	53.701.899.981,00	Kab.Bandung	DLH	
		Meningkatnya Ruang Terbuka Publik yang terbangun	Jumlah Ruang Terbuka Publik yang terbangun	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab.Bandung	DLH		
		Meningkatnya Ruang Terbuka Publik yang dikelola	Jumlah Ruang Terbuka Publik yang dikelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.069.190.000,00	1.069.190.000,00	1.069.190.000,00	1.069.190.000,00	1.069.190.000,00	Kab.Bandung	DLH		
	Tangguh Bencana	Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana yang berkualitas (indikator: indeks kualitas air, run off, sampah, sedimentasi, dll)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk setiap tahunnya	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Setiap tahun 3 desa	BPBD	
					Prosentase desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan ketika terjadi bencana	Penyelenggaraan Penataan Desa	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD
						Fasilitasi kerjasama antar desa	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000		DPMD
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.103.400.000	7.728.400.000	7.078.400.000	8.853.400.000	7.153.400.000		DPMD
Menurunnya wilayah tergenang banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.940.000.000,00	50.784.000.000,00	54.512.400.000,00	59.163.640.000,00	64.780.004.000,00	Kab.Bandung	DPUTR				
Meningkatnya RW siaga bencana	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat yang terbina kesiapsiagaan bencana	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	983.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	933.381.000,00	31 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung	DPMD				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

6.6 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Penguatan sistem inovasi dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah yang progresif dan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka tujuan pokok penguatan sistem inovasi adalah :

1. Meningkatkan kemampuan Bangsa dan Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) dan melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*).
2. Mendukung percepatan peningkatan daya saing (*competitiveness*) dan penguatan kohesi sosial (*social cohesion*).
3. Mendukung kemandirian Bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI (*sovereignty*).

Dalam kaitan ini, penguatan sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, karena secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing nasional maupun daerah yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pada pelaksanaannya, penguatan sistem inovasi daerah memerlukan arah kebijakan yang jelas. Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan Sistem Inovasi Daerah. Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut.

4. Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.
5. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek, mengembangkan kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Menumbuhkembangkan kolaborasi dan meningkatkan difusi inovasi. Tujuan utama

arah kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik daerah.

7. Membangun budaya inovasi. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di daerah.
8. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dalam kawasan Agropolitan. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi, saling melengkapi dan memperkuat rantai nilai dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
9. Penyelarasan dengan perkembangan global. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan pemangku kepentingan di daerah agar semakin memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan beberapa fokus penguatan sistem inovasi daerah untuk tahun 2021-2026.

1. Fokus penguatan ekosistem inovasi daerah yang berkaitan dengan Pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN adalah :
 - a. Penguatan regulasi, kelembagaan dan infrastruktur dasar yang kondusif bagi pengembangan Agropolitan berbasis iptek.
 - b. Peningkatan daya dukung kelembagaan iptekin/litbangyasa dalam penguatan inovasi dan bisnis



- yang dapat diabsorpsi oleh aparat pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat.
- c. Pengembangan kemitraan strategis dan wahana pengembangan inovasi dan bisnis.
 - d. Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan.
 - e. Pengembangan keterpaduan kebijakan untuk penguatan inovasi dan bisnis.
 - f. Penguatan internal menghadapi dinamika global.
2. Fokus pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis IPTEKIN adalah :
- a. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri pertanian, perikanan dan peternakan.
 - b. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri pengolahan makanan hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
 - c. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri kreatif untuk mendukung agropolitan.
3. Fokus pengembangan jaringan dalam Kawasan Agropolitan berbasis IPTEKIN adalah:
- a. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kelembagaan iptekin/litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan Kawasan Agropolitan berbasis IPTEK.
 - b. Pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyelarasan dinamika global untuk pengembangan inovasi di perdesaan
4. Fokus pengembangan technopreneur dalam mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis IPTEKIN adalah:
- a. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan inkubator bisnis dan teknologi.
 - b. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika global untuk pemajuan SMK
5. Fokus penguatan tematik sistem inovasi pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis IPTEKIN adalah :
- a. Penguatan infrastruktur TIK, peningkatan e-literacy atau melek TIK, penguatan regulasi dan tata kelola TIK, serta penguatan kelembagaan pengembangan infrastruktur/aplikasi/SIM open source.
 - b. Penguatan infrastruktur lingkungan yang menunjang aktivitas Agropolitan antara lain penyediaan SPAM, sumber energi baru terbarukan, dan pengelolaan limbah dan sampah.



BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Setelah dibuat keterkaitan antara indikator sasaran pembangunan dan program yang mendukung masing-masing sasaran, maka dibuat indikasi rencana program prioritas perangkat daerah. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang direncanakan akan tersedia dalam rangka mengimplementasi hasil penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

7.1. Skema Pendanaan Alternatif

Pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan dengan maksimal. Salah satu permasalahan lambatnya pemerataan pembangunan ini terkendala terkait dengan hal pembiayaan. Saat ini, Kabupaten Bandung masih tergantung kepada bantuan keuangan pusat/provinsi serta tidak bisa mengandalkan APBD dikarenakan terlalu besarnya biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan pendapatan daerah. Maka dari itu, Kabupaten Bandung perlu mencari alternatif pembiayaan lain agar pemerataan pembangunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, termasuk untuk mewujudkan program strategis kepala daerah.

Terdapat beberapa skema pembiayaan alternatif yang diusulkan di luar dari ketergantungan kepada APBD yaitu seperti kerja sama dengan pihak lain. Bentuk kerja sama ini meliputi CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dikenal juga dengan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), PPP (*Public Private Partnership*) atau yang sering disebut dengan Kerjasama Publik dan Badan Usaha, dan investasi langsung.

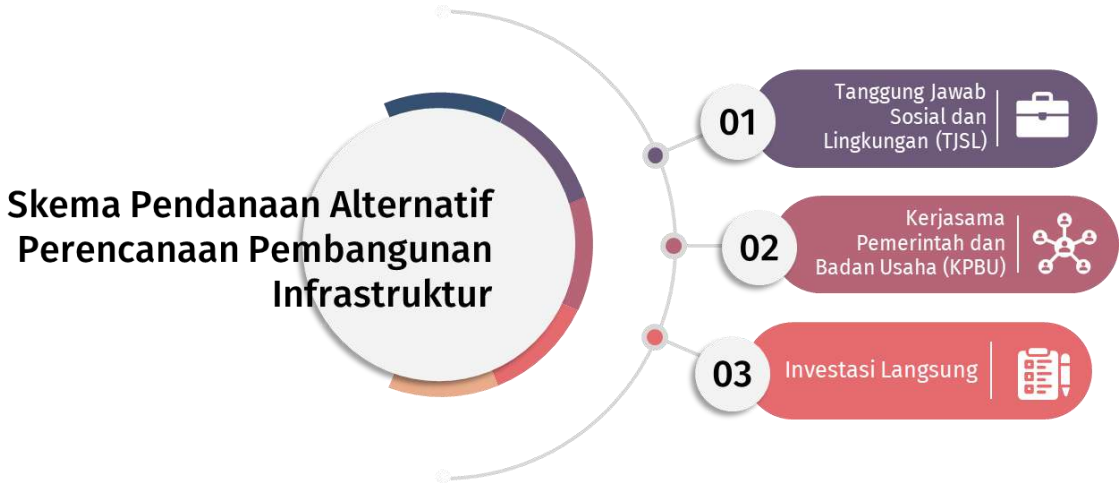
Secara ringkas, skema pendanaan alternatif untuk perencanaan pembangunan yang didorong dalam RPJMD ini dapat ditinjau pada **Gambar 7-1**.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan TJSL ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



Gambar 7-1

Diagram Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Pendanaan Alternatif



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Untuk TJSL di Kabupaten Bandung saat ini sudah disusun Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Bupati ini mengatur rinci Program dan Bidang TJSL yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Bandung serta amanat untuk membentuk Forum TJSL di Kabupaten Bandung. Tindaklanjut dari adanya Peraturan Bupati ini seharusnya segera membentuk Forum TJSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Forum TJSL ini terdiri dari pengurus dan anggota yang berupa perusahaan yang kemudian disebut dengan mitra. Tanpa adanya Forum TJSL maka pelaksanaan TJSL tetap tidak akan optimal, karena forum tersebut nanti yang akan mengelola dan menyalurkan TJSL dari tiap perusahaan. Penyusunan Peraturan Daerah juga menjadi sesuatu yang harus segera dilaksanakan, dengan adanya Perda maka diharapkan perusahaan baik PT maupun BUMN akan lebih perhatian dengan kewajiban terhadap lingkungannya, selain itu dalam Perda pun dapat diatur jenis dan besaran untuk TJSL serta transparansi penyaluran TJSL.

Jika melihat potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung maka potensi untuk

memanfaatkan TJSL sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan dalam pembangunan di wilayah pun sangat besar. Beberapa potensi yang saat ini sudah berjalan adalah pemanfaatan panas bumi, usaha perkebunan dan kehutanan, industri, ketenagalistrikan dan lain-lain baik yang dimanfaatkan oleh perseroan maupun oleh BUMN.

Saat ini secara ketersediaan aturan seperti Peraturan Daerah dan pembentukan Forum TJSL maupun fasilitasi pengelolaan TJSL di Kabupaten Bandung masih rendah, sehingga perlu dibuatnya perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan dunia usaha dalam pembentukan Forum TJSL dan pelaksanaan dan keberlanjutan TJSL di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan TJSL oleh masing-masing perusahaan apabila dilihat di lapangan sebetulnya sudah dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan, namun kegiatan tersebut belum melibatkan pemerintah daerah, hal ini dirasa kurang optimal, karena sasaran kegiatan dan bentuk kegiatan belum tentu sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

Selain skema TJSL, terdapat pula skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.



KPBU ini sudah menjadi salah satu skema pendanaan yang diandalkan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Skema pendanaan ini telah diatur dalam Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Infrastruktur yang boleh dibangun dengan skema pendanaan ini terbagi ke dalam infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur – infrastruktur yang termasuk ke dalam infrastruktur ekonomi antara lain:

- 1) infrastruktur transportasi;
- 2) infrastruktur jalan;
- 3) infrastruktur SDA dan irigasi;
- 4) infrastruktur air minum;
- 5) infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat;
- 6) infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Setempat;
- 7) infrastruktur Sistem Pengelolaan Sampah;

- 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika (jaringan telekomunikasi, infrastruktur *e-government*, dan/atau infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel/ducting);
- 9) infrastruktur energi dan kelistrikan;
- 10) infrastruktur konservasi energi;
- 11) infrastruktur fasilitas perkotaan; dan
- 12) infrastruktur kawasan.

Sementara itu, infrastruktur yang termasuk ke dalam infrastruktur sosial dan dapat menggunakan skema KPBU antara lain:

- 1) infrastruktur pariwisata;
- 2) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
- 3) infrastruktur pemasyarakatan;
- 4) infrastruktur perumahan rakyat;
- 5) infrastruktur kesehatan; dan
- 6) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian, dan budaya;

Dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 terdapat beberapa perencanaan pembangunan yang diusulkan untuk dibangun melalui skema pendanaan KPBU sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 7-2**.

Tabel 7-2
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema KPBU

No	Infrastruktur	Perkiraan Kebutuhan Biaya	Tahun	Status	PD Terkait	Keterangan
1	Pembangunan Sistem Transportasi Massal dan Terminal di Kabupaten Bandung	1.500.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	Dishub	
2	Pembangunan Light Rapid Transit (LRT)	3.000.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	Dishub	
3	Penerangan Jalan Umum	250.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	



No	Infrastruktur	Perkiraan Kebutuhan Biaya	Tahun	Status	PD Terkait	Keterangan
4	Pembangunan Kanal Banjir Bandung Selatan	18.000.000.000.000	2021-2026	Pengajuan LOI	DPUTR	
5	Pembangunan Jalan Lingkar Bandung selatan	5.000.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	
6	Pembangunan Tol Soreang- Ciwidey- Cidaun	8.400.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	
7	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modern Daraulin	50.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	
8	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Rancaekek	500.000.000.000	2021-2026	Sudah FS	DPUTR	
9	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sinumbra	2.669.465.102.502	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	
10	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kertasari	535.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	
11	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tegalluar	500.000.000.000	2021-2026	Perencanaan	DPUTR	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Pengembangan pemanfaatan KPBU sebagai skema pendanaan alternatif untuk pembangunan di daerah masih tergolong inovasi pendanaan pembangunan yang baru di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga merumuskan strategi pengembangan pemanfaatan KPBU agar dapat menjadi skema alternatif pendanaan yang inovatif dan aplikatif untuk pembangunan di daerah. Di antaranya, pemanfaatan KPBU di Kabupaten Bandung dapat menjadi skema pendanaan alternatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Melalui tim simpul KPBU, proyek potensial untuk dikerjasamakan melalui KPBU dapat diseleksi,

dipersiapkan, dimonitor dan dievaluasi keberlangsungannya.

Selain TJSL dan KPBU, terdapat alternatif skema pendanaan pembangunan lainnya berupa skema investasi langsung. Dalam skema ini, menitikberatkan pada peran investor dalam menyertakan modal dan mengelola serta bertanggungjawab terhadap proyek investasi jika terjadi kerugian. Dengan adanya berbagai skema alternatif pendanaan pembangunan ini, maka pendanaan pembangunan dapat berlangsung tanpa membebani anggaran daerah dan



APBD dapat dialokasikan pada prioritas pembangunan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam skema pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan pada 5 (lima) tahun ke depan. Secara lebih spesifik, berbagai skema pendanaan alternatif ini dapat menjadi pilihan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mewujudkan berbagai program pembangunan daerah yang melekat pada perangkat daerah dan juga mewujudkan berbagai program strategis Bupati dan Wakil Bupati.

7.2. Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- 2) Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya;
- 3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
- 4) Pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- 5) Peningkatan dan pemerataan pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;
- 6) Penerapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- 7) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

Untuk lebih rincinya pagu indikatif program perangkat daerah yang disertai dengan indikator tiap tahunnya beserta programnya akan disajikan pada **Tabel 7-4**



Tabel 7-3

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No	Uraian	APBD 2021	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
5.	BELANJA	4.627.883.014.648,00	4.622.246.452.940,00	4.402.991.765.667,00	4.422.761.615.167,00	4.444.064.567.032,00	4.466.916.624.953,00
5.1	Belanja Operasi	3.453.425.102.255,00	3.823.908.814.505,00	3.596.942.280.610,00	3.615.935.145.160,00	3.618.864.016.560,00	3.656.374.653.967,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.087.337.448.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.206.285.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.483.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	206.030.208.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.368.159.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	480.053.680.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	22.313.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.919.404.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.259.257.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269.931.181.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.519.480.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110.951.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	53.913.774.270,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.913.774.270,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00	34.737.600.868,00
5.4	Belanja Transfer	640.490.457.820,00	763.600.037.567,00	771.311.884.189,00	772.088.869.139,00	790.462.949.604,00	775.804.370.118,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.298.606.220,00	57.540.981.567,00	59.232.832.500,00	61.009.817.450,00	62.840.112.637,00	64.725.318.429,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	598.191.851.600,00	706.059.056.000,00	712.079.051.689,00	711.079.051.689,00	727.622.836.967,00	711.079.051.689,00
	Jumlah Belanja	4.627.883.014.648,00	4.622.246.452.940,00	4.402.991.765.667,00	4.422.761.615.167,00	4.444.064.567.032,00	4.466.916.624.953,00
	Total Surplus/(Defisit)	-470.436.195.297,00	-270.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 7-4

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Proyeksi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Target Capaian Kinerja	Tahun 2022	Target Capaian Kinerja	Tahun 2023	Target Capaian Kinerja	Tahun 2024	Target Capaian Kinerja	Tahun 2025	Target Capaian Kinerja	Tahun 2026	Target	Anggaran		
							60%											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.781.798.222.574		2.644.193.204.931		2.646.193.204.931		2.645.512.005.845		2.674.345.653.046		13.392.042.291.327		
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.371.937.807.193		1.334.451.594.261		1.334.451.594.261		1.334.451.594.261		1.334.451.594.261		6.709.744.184.237		
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1 0 0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Nilai AKIP 2. Nilai BMD	N/A	70 poin	N/A	1.095.176.176.075	1.094.922.480.075	1.094.922.480.075	1.094.922.480.075	1.094.922.480.075	N/A	5.474.866.096.375	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 0 0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN **)	- tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	56,20%	59,96%	63,72 %	275.161.358.957	67,48 %	236.528.842.025	71,24 %	236.528.842.025	73%	236.528.842.025	75%	1.221.276.727.057	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 0 0			- tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	85,84%	88,15%	90,50 %		92,84 %		95,18 %	97,00 %	97,50 %				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 0 0			- tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan	48,69%	52,89%	57,09 %		61%		65,49 %	69,69 %	70,00 %				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	3 0 0		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN NILAI STANDAR ISI NILAI STANDAR PROSES	N/A	N/A	N/A	400.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	1.150.000.000	N/A	5.000.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	4 0 0		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Index pemerataan guru	N/A	N/A	N/A	600.000.000	N/A	750.000.000	N/A	750.000.000	N/A	750.000.000	N/A	3.600.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1 1	1.01.0.00.0.00.01.0000	5 0 0		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Nilai standar pengelolaan	N/A	N/A	N/A	300.272.161	N/A	500.272.161	N/A	500.272.161	N/A	500.272.161	N/A	2.301.360.805	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

1	1	1.01.0.00 .00.01. 0000	6	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	N/A	100,00%	100,0 0%	300,0 0,000	100,0 0%	600,0 0,000	100,0 0%	600,0 0,000	100,0 0%	600,0 0,000	100,00%	2.700.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					801.85 6.037.4 00		800.98 8.615.9 65		802.98 8.615.9 65		825.88 9.959.0 83		830.98 3.839.6 76	4.062.7 07.068. 089		
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	77,37	77,37	77,5	309.64 3.255.0 00	77,9	308.69 8.176.7 65	78,5	308.69 8.176.7 65	78,8	308.69 8.176.7 65	79	308.69 8.176.7 65	77%	1.544.4 35.962. 060	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	2	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	N/A	81,91	100%	72.327. 354.40 0	100%	70.850. 466.00 0	100%	70.850. 466.00 0	100%	90.751. 809.11 8	100%	91.845. 689.71 1	100%	396.625 .785.22 9	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	3	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	N/A	90,77%	90,85 %	5.592.2 27.000	91%	4.976.7 72.200	92%	4.976.7 72.200	93%	4.976.7 72.200	95%	4.976.7 72.200	95%	25.499. 315.800	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	4	0	0	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	N/A	80	82%	200.00 0.000	85%	290.00 0.000	90%	290.00 0.000	92%	290.00 0.000	95%	290.00 0.000	95%	1.360.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	5	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	N/A	65	70%	200.00 0.000	73%	280.00 0.000	73%	280.00 0.000	80%	280.00 0.000	82%	280.00 0.000	82%	1.320.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	70,76	70	70.5 Poin	184.48 8.640.0 00	71	185.08 8.640.0 00	71,5	185.08 8.640.0 00	72	185.08 8.640.0 00	72,5	185.08 8.640.0 00	72,5	924.843 200.000 0	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Soreang)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	2	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Soreang	78,63	77,56	77,56 %	6.165.8 20.000	78,50 %	5.565.8 20.000	79%	5.565.8 20.000	80%	5.565.8 20.000	80%	5.565.8 20.000	80%	28.429. 100.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Soreang)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	5	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan)	78,63	77,56	77,56												Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Soreang)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP	78,68	79,27	78,69	146.90 8.095.0 00	78,70	146.90 8.095.0 00	78,75	146.90 8.095.0 00	78,80	146.90 8.095.0 00	78,85	146.90 8.095.0 00	78,85	734.540 .475.000 0	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Majalaya)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	2	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD) Majalaya	84,86	83,73	80,55	3.632.8 34.000	80,60	2.462.8 34.000	80,65	2.462.8 34.000	80,75	2.462.8 34.000	80,80	2.462.8 34.000	80,80	13.484. 170.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Majalaya)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	3	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	-	100%	1.170.0 00.000	100%	1.170.0 00.000	100%	1.170.0 00.000	100%	1.170.0 00.000	100%	4.680.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

																				Kesehatan (RSUD Majalaya)		
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP (RSUD Cicalengka) - Presentasi BMD dalam Kondisi Baik - Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target	- 70,27 Point -94,56 % -87,78%	- 65 Point - 80 % -89%	- 70,5 Point - 80 % -90%	69.330. 312.00 0	- 71 Point - 80 % -91%	70.627. 209.00 0	- 71,5 Point - 80 % -92%	72.703. 359.00 0	- 72 Point - 80 % -93%	75.792. 816.50 0	- 72,5 Point - 80 % -94%	79.885. 746.87 5	- 72,5 Point - 80 % -94%	368.339 .443.37 5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Cicalengka)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	2	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka	83,19%	87%	87,25 %	500.00 0.000	87,50 %	1.203.1 03.000	87,75 %	1.126.9 53.000	88%	1.037.4 95.500	88,25 %	944.56 5.125	88,25%	4.812.1 16.625	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Cicalengka)
1	2	1.02.0.00 .00.02. 0000	3	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	41,12	41,12	42,66 %	2.867.5 00.000	45,21 %	2.867.5 00.000	48,00 %	2.867.5 00.000	50,00 %	2.867.5 00.000	52,00 %	2.867.5 00.000	52%	14.337. 500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD Cicalengka)
1	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					400.60 3.064.1 25		356.80 0.878.4 49		356.80 0.878.4 49		310.22 6.885.7 88		316.30 2.361.3 58		1.740.7 34.068. 169	
1	3	1.04.2.10 .1.03.4.. 0	3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	AKSES AMAN TERHADAP AIR MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN	81,45%	86,09%	90,73 %	28.378. 643.00 0		-		-		-		-	100,00%	28.378. 643.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1.04.2.10 .1.03.4.. 0	5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	85,11%	88,33%	91,55 %	22.379. 160.92 9		-		-		-		-	100,00%	22.379. 160.929	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1.03.2.15 .1.04.3.. 0	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	A(80,11)	A(80,15)	A(80, 20)	82.289. 145.00 0	A(80, 20)	84.394. 504.24 2	A(80, 20)	84.394. 504.24 2	A(80, 20)	84.394. 504.24 2	A(80, 20)	84.394. 504.24 2	A(80,20)	419.867 .161.96 8	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1.03.2.15 .1.04.3.. 0	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	- Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase luas kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir yang dikelola		66,32	67,96		69,31	70,66		72,00		73,35		73,35			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3		3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	AKSES AMAN TERHADAP AIR	81,45%	86,09%		-	95,37 %	100,0 0%		100,0 0%		100%		100,00%	50.179. 172.000	Urusan Pemerintahan	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

		1.04.2.10 1.03.4.0 0					PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	MINUM DI KAWASAN PERMUKIMAN											12.544. 793.00 0	12.544. 793.00 0	12.544. 793.00 0	12.544. 793.00 0				Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1.04.2.10 1.03.4.0 0	5	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	AKSES AMAN TERHADAP SANITASI DI KAWASAN PERMUKIMAN	85,11%	88,33%	-	94,77 %	11.783. 606.99 9	98,00 %	11.783. 606.99 9	100%	11.783. 606.99 9	100%	11.783. 606.99 9	11.783. 606.99 9	11.783. 606.99 9	11.783. 606.99 9	100%	47.134. 427.996		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1.03.2.15 1.04.3.0 0	6	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik	2,08%	41,00%	43,00 %	29.950. 965.13 6	45,00 %	16.474. 968.77 8	47,00 %	16.474. 968.77 8	49,00 %	16.474. 968.77 8	51%	16.474. 968.77 8	16.474. 968.77 8	16.474. 968.77 8	51,00%	95.850. 840.248		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1.03.2.15 1.04.3.0 0	8	0	0		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Pemerintah yang sesuai standar kualitas	7,51%	12,00%	20,00 %	54.956. 856.00 0	40,00 %	129.94 2.456.0 00	60,00 %	129.94 2.456.0 00	80,00 %	45.942. 456.00 0	100%	45.942. 456.00 0	45.942. 456.00 0	45.942. 456.00 0	100,00%	406.726 680.00 0		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1.03.2.15 1.04.3.0 0	#	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan Kabupaten mantap (%)	85,86%	85,86%	87,16 %	153.68 9.042.9 05	88,66 %	80.760. 009.04 1	90,16 %	80.760. 009.04 1	91,36 %	118.18 6.016.3 80	93%	124.26 1.491.9 50	124.26 1.491.9 50	124.26 1.491.9 50	92,86%	557.656 569.31 7		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1.03.2.15 1.04.3.0 0	#	0	0		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikasi pada tahun rencana		12,00%	20,00 %	550.00 0.000	40,00 %	550.00 0.000	60,00 %	550.00 0.000	80,00 %	550.00 0.000	100%	550.00 0.000	550.00 0.000	550.00 0.000	100,00%	2.750.0 00.000		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1.03.2.15 1.04.3.0 0	#	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	61,00%	11,54%	61,54 %	4.543.6 41.000	73,08 %	4.543.6 41.000	84,62 %	4.543.6 41.000	96,15 %	4.543.6 41.000	100%	4.543.6 41.000	4.543.6 41.000	4.543.6 41.000	4.543.6 41.000	100,00%	22.718. 205.000		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				99.169. 615.21 6		49.841. 998.34 6		49.841. 998.34 6		72.833. 448.80 3		90.497. 739.84 1		90.497. 739.84 1		362.184 800.55 2				
1	4	1.04.2.10 1.03.4.0 0	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	A (81,24)	A (81,50)	A (81,7 5)	20.753. 900.00 0	A (82,0 0)	20.746. 389.50 0	A (82,2 5)	20.746. 389.50 0	A (82,5 0)	20.746. 389.50 0	A (82,7 5)	20.746. 389.50 0	20.746. 389.50 0	20.746. 389.50 0	A (82,75)	103.739 458.00 0		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	1.04.2.10 1.03.4.0 0	2	0	0		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN **)	PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG	98,3	95,79%	96,36 %	1.000.6 50.000	97,27 %	1.000.6 50.000	98,18 %	1.000.6 50.000	100,0 0%	1.000.6 50.000	100,0 0%	1.000.6 50.000	1.000.6 50.000	1.000.6 50.000	100,00%	5.003.2 50.000		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

1	4	1.04.2.10 .1.03.4..0 0	3	0	0	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH	0,32%	0,28%	0,23 %	2.380.3 50.000	0,19 %	2.380.3 50.000	0,14 %	2.380.3 50.000	0,10 %	2.380.3 50.000	0,06 %	2.380.3 50.000	0,06%	11.901. 750.000	Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1.04.2.10 .1.03.4..0 0	4	0	0	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	74	65,00%	74,00 %	60.660. 257.21 6	82,35 %	11.340. 150.84 6	90,68 %	11.340. 150.84 6	100,0 0%	38.667. 501.30 3	100,0 0%	56.331. 792.34 1	100,00%	178.339 852.55 2	Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1.04.2.10 .1.03.4..0 0	5	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE LUAS KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU	15	15,61%	17,00 %	14.374. 458.00 0	19,00 %	14.374. 458.00 0	21,00 %	14.374. 458.00 0	23,00 %	10.038. 558.00 0	25,00 %	10.038. 558.00 0	25,00%	63.200. 490.000	Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					73.110. 963.00 0		74.888. 115.00 0		74.888. 115.00 0		74.888. 115.00 0		74.888. 115.00 0		372.663 423.00 0	
1	5	1.05.0.00 .0.00.6..0 0	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM 3. Persentase aset dalam kondisi baik	1. 70,98; 2. ; 3. 61,24	1. 74; 2. ; 3. 100	1. 70; 2. ; 3. 75	10.078. 093.00 0	1. 72; 2. ; 3. 74	10.037. 103.00 0	1. 74; 2. ; 3. 90	10.037. 103.00 0	1. 75; 2. ; 3. 95	10.037. 103.00 0	1. 76; 2. ; 3. 100	10.037. 103.00 0	1. 76; 2. ; 3. 100	50.226. 505.000	Usuran Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
1	5	1.05.0.00 .0.00.6..0 0	3	0	0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (**)	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	N/A	100,00%	100,0 0%	5.957.2 41.000	100,0 0%	5.877.2 41.000	100,0 0%	5.877.2 41.000	100,0 0%	5.877.2 41.000	100,0 0%	5.877.2 41.000	100,00%	29.466. 205.000	Usuran Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
1	5	1.05.0.00 .0.00.7..0 0	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	76,69	78	79	14.142. 547.00 0	80	13.844. 094.00 0	81	13.844. 094.00 0	82	13.844. 094.00 0	83	13.844. 094.00 0	77	69.518. 923.000	Usuran Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Disdamkar)
1	5	1.05.0.00 .0.00.7..0 0	4	0	0	PROGRAM PENCEGAHAN, WMMK)	1. Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMMK)	70,00%	75,00%	80,00 %	2.853.5 57.000	85,00 %	1.793.5 57.000	90,00 %	1.793.5 57.000	95,00 %	1.793.5 57.000	100,0 0%	1.793.5 57.000	100,00%	10.027. 785.000	Usuran Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

							PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN **)	2. Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran											Perlindungan Masyarakat (Disdamkar)				
1	5	1.05.0.00 .00.5.0 0	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik	1. 72,20 poin 2. 100%	1. 78,5 2. 100%	1. 78,5 2. 100%	23.113. 475.00 0	1. 79 poin 2. 100%	24.670. 070.00 0	1. 79. 50 poin 2. 100%	24.670. 070.00 0	1. 80,50 poin 2. 100%	24.670. 070.00 0	1. 80,50 poin 2. 100%	1. 80,50 poin 2. 100%	121.793 .755.00 0	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol)	
1	5	1.05.0.00 .00.5.0 0	2	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM **)	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertarikan dan ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100,0 0%	16.966. 050.00 0	100,0 0%	18.666. 050.00 0	100,0 0%	18.666. 050.00 0	100,0 0%	18.666. 050.00 0	100,0 0%	18.666. 050.00 0	100,00%	91.630. 250.000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol)
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	0	0	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					35.120. 735.84 0		27.222. 002.91 0		27.222. 002.91 0		27.222. 002.91 0		27.222. 002.91 0	144.008 .747.28 0		
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	74,76	75,5	76,5	12.003. 917.00 0	77,5	11.951. 329.30 0	78,5	11.951. 329.30 0	79,5	11.951. 329.30 0	81	11.951. 329.30 0	81	59.809. 234.200	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	2	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) PKS yang didaya gunakan dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial	90,41	25,81%	41,90 %	5.482.8 52.000	55,96 %	5.232.8 52.000	71,00 %	5.232.8 52.000	85,32 %	5.232.8 52.000	100,0 0%	5.232.8 52.000	67,43	26.414. 260.000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	3	0	0		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	36,31	1,79%	2,29 %	50.000. 000	2,62 %	50.000. 000	2,95 %	50.000. 000	3,28 %	50.000. 000	3,62 %	50.000. 000	3,62%	250.000 .000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	4	0	0		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL **)	Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya	69,18	36,01%	48,30 %	9.058.0 90.040	60,49 %	4.640.3 47.410	73%	4.640.3 47.410	86,58 %	4.640.3 47.410	100,0 0%	4.640.3 47.410	54,74%	27.619. 479.680	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	5	0	0		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	61,42	18,10%	35,00 %	5.130.1 56.600	51,89 %	2.517.7 54.200	68,79 %	2.517.7 54.200	85,68 %	2.517.7 54.200	100,0 0%	2.517.7 54.200	68,27%	15.201. 173.400	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6	1.06.0.00 .00.8.0 0	6	0	0		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	61,42	27,85%	42,60 %	3.295.7 20.000	58,70 %	2.729.7 20.000	73,00 %	2.729.7 20.000	86,32 %	2.729.7 20.000	100,0 0%	2.729.7 20.000	100,00%	14.214. 600.000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6		7	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN		80,00%	80,00%											100,00%		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

		1.06.0.00 .00.8.0 0				TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang representatif				100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	100,0 0%	100,0 0.000	500.000 .000	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2						URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						413.26 4.061.8 48		357.30 6.243.8 32		351.51 5.190.4 14		372.97 5.442.5 62		381.41 6.263.4 49								1.876.4 77.202. 105		
2	7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						34.240. 468.94 9		22.353. 537.31 2		22.353. 537.31 2		22.353. 537.31 2		22.353. 537.31 2								123.654 .618.19 7		
2	7	2.07.3.32 .00.9.0 0	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>Nilai AKIP</p> <p>Nilai IKM</p> <p>Persentase BMD dalam Kondisi Baik</p>	<p>72,97 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>73,22 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>73,47 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>14.846. 956.00</p>	<p>73,72 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>14.463. 078.00</p>	<p>73,97 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>14.463. 078.00</p>	<p>74,22 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>14.463. 078.00</p>	<p>74,47 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>14.463. 078.00</p>	<p>74,47 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>74,47 poin</p> <p>90 poin</p> <p>85 persen</p>	<p>72.699. 268.000</p>	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</p>							
2	7	2.07.3.32 .00.9.0 0	2	0	0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	N/A	100	60	571.00 0.000	61%	624.00 0.000	62,00 %	624.00 0.000	0,63	624.00 0.000	0,64	624.00 0.000	44	3.067.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
2	7	2.07.3.32 .00.9.0 0	3	0	0	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	70,75	30	40	9.498.2 51.200	41%	3.117.2 22.900	42,00 %	3.117.2 22.900	0,43	3.117.2 22.900	0,44	3.117.2 22.900	44,00%	21.967. 142.800	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
2	7	2.07.3.32 .00.9.0 0	4	0	0	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	13,7	65	15	7.330.4 91.949	16%	2.155.4 66.612	17,00 %	2.155.4 66.612	0,18	2.155.4 66.612	0,19	2.155.4 66.612	19,00%	15.952. 358.397	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
2	7	2.07.3.32 .00.9.0 0	5	0	0	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL *)	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	76,67	55	56	1.993.7 69.800	57%	1.993.7 69.800	58,00 %	1.993.7 69.800	0,59	1.993.7 69.800	0,6	1.993.7 69.800	60,00%	9.968.8 49.000	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
2	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.346.2 20.000		1.275.2 20.000		1.285.2 20.000		1.270.2 20.000		1.270.2 20.000							6.447.1 00.000			
2	8	2.14.2.08 .00.14. 00	2	0	0	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<p>Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan</p> <p>Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD</p>	<p>100,00%</p> <p>0,057</p>	<p>100,00%</p> <p>0,058</p>	<p>100,0 0%</p> <p>0,058</p>	<p>313.75 0.000</p> <p>0,059</p>	<p>100,0 0%</p> <p>0,06</p>	<p>318.75 0.000</p> <p>0,061</p>	<p>100,0 0%</p> <p>0,062</p>	<p>315.75 0.000</p> <p>0,062</p>	<p>100,0 0%</p> <p>0,062</p>	<p>300.75 0.000</p> <p>0,062</p>	<p>100,0 0%</p> <p>0,062</p>	<p>313.75 0.000</p> <p>0,062</p>	<p>100,00%</p> <p>0,062</p>	<p>1.562.7 50.000</p>	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>								
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,27	67,47		67,67		67,87		68,07		68,27		68,27									68,27	Urusan Pemerintahan Bidang	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

PANGAN																						
2	9	2.09.3.25 .00.10. 0000	3	0	0	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	AKE 101.2%; AKP 108.9%	100%	100%	4.247.2 73.200	100,0 0%	6.126.2 74.400	100%	3.626.2 74.400	100,0 0%	8.626.2 74.400	100,0 0%	3.626.2 74.400	100,00%	26.252. 370.800	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	9	2.09.3.25 .00.10. 0000	4	0	0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	N/A	20	20	400.00 0.000	20	400.00 0.000	20	400.00 0.000	20	400.00 0.000	20	400.00 0.000	100%	2.000.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	9	2.09.3.25 .00.10. 0000	5	0	0	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat keamanan pangan	N/A	>85	>85	250.00 0.000	>85	250.00 0.000	>85	250.00 0.000	>85	250.00 0.000	>85	250.00 0.000	>85	1.250.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	2.132.6 10.000	10.663. 050.000			
2	1	0	4	0	0	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	20,00%	20,00%	50,00 %	247.25 0.000	50,00 %	347.25 0.000	75,00 %	347.25 0.000	75,00 %	347.25 0.000	75,00 %	347.25 0.000	100,00%	1.636.2 50.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2	1	0	6	0	0	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase akses kepemilikan tanah bagi masyarakat (petani) dalam rangka meningkatkan taraf hidup/perekonomian	N/A	N/A	20,00 %	20,00 %	100,00 0.000	20,00 %	100,00 0.000	20,00 %	100,00 0.000	20,00 %	100,00 0.000	100,00%	400.000 .000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
2	1	0	9	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT	12,27	26,31	62,34	1.193.3 60.000	80,36	1.193.3 60.000	98,38	1.193.3 60.000	100	1.193.3 60.000	100	1.193.3 60.000	100	5.968.8 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2	1	0	#	0	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA	15,00%	15,00%	15,00 %	692.00 0.000	17,00 %	492.00 0.000	19,00 %	492.00 0.000	20,00 %	492.00 0.000	22,00 %	492.00 0.000	22,00%	2.660.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					69.085. 218.35 4	69.270. 467.58 3	66.544. 438.83 5	81.396. 453.51 3	96.537. 274.40 0				382.833 .852.68 5			
2	1	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	77,24	71	77,5	41.778. 724.00 0	77,5	40.885. 357.00 0	77,75	40.885. 357.00 0	78	40.885. 357.00 0	78,25	40.885. 357.00 0	78,25	205.320 .152.00 0	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	1	0	0		Nilai IKM	81,8	77,5	77,5		77,75		7800 %		78,25		78,75				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	1	0	0		Persentase Aset dalam kondisi baik	92%	92%	92%		92%		93%		94%		94%		94%		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	2	0	0	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	100%	100%	100%	70.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100,00%	1.174.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	3	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase lokasi titik pantau kualitas air	-26,67%	-26,67%	33,33%	-	-40%	-	46,67%	-	53,33%	-	-60%	-	60,00%	6.350.285.668	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	3	0	0		-Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	-16,12%	-16,12%	19,5%	1.623.873.000	22,26%	3.226.124.728	25,80%	500.095.980	-29%	500.095.980	32,25%	500.095.980	-32,25%	6.350.285.668	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	3	0	0		-Penambahan luas tutupan lahan	-23.185 ha	-23.185 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	-50 ha	23435 ha	6.350.285.668	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pembangunan Taman Kehati	25,00%	25,00%	17,50%	69.190.000	15%	569.190.000	15%	569.190.000	15%	569.190.000	12,50%	569.190.000	100,00%	2.345.950.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap perizinan berusaha (aspek lingkungan) dan Sertifikat Layak Operasi	Pemantauan dan pembinaan kinerja industri 60%	Pemantauan dan pembinaan kinerja industri 70%	71,3%	123.000	72,30%	81.738.000	73,00%	81.738.000	74,30%	81.738.000	74,70%	81.738.000	74,70%	449.958.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	7	0	0	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	60 laporan dari 5 segmen	60 laporan dari 5 segmen	5%	342.083.000	5%	242.025.600	5%	242.025.600	5%	242.025.600	5%	242.025.600	25%	1.310.185.400	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	1	2.11.0.00.00.11.00	8	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kampung Bedas	Sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 95 Kampung Bedas pada 95 Desa/Kelurahan (33,93%) meliputi 27 Kecamatan	50 ds (17,8%)	171.905.000	50 ds (17,8%)	70.967.839	50 ds (17,8%)	70.967.839	35 ds (12,5%)	70.967.839	evaluasi dan pemantauan	70.967.839	280 Kampung Bedas (100%)	455.776.356	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2	1	2.11.0.00.00.11.00	9	0	0	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT *)	Persentase kesesuaian data dan informasi adipura	70,00%	70,00%	70,00 %	50.000.000	71,00 %	50.000.000	72,00 %	50.000.000	73,00 %	50.000.000	75,00 %	50.000.000	75,00%	250.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	2.11.0.00.00.11.00	#	0	0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100,00%	100,00%	100,0 0%	160.000.000	100,0 0%	160.000.000	100,0 0%	160.000.000	100,0 0%	160.000.000	100,0 0%	160.000.000	100,00%	800.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1	2.11.0.00.00.11.00	#	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	62,37%	68,52%	74,73 %	24.696.437.354	80,93 %	23.709.064.416	87,15 %	23.709.064.416	93,42 %	38.561.079.094	99,69 %	53.701.899.981	99,69%	164.377.545.261	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					33.743.270.000		33.880.732.000		33.880.732.000		33.880.732.000		33.880.732.000		169.266.198.000	
2	1	2.12.0.00.00.12.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	N/A	1. 73,5 poin 2. 85,37%	1. 74,3 poin 2. 91,2 %	30.339.523.000	1. 74,32 poin 2. 85,40 %	30.721.985.000	1. 74,34 poin 2. 85,45 %	30.721.985.000	1. 74,36 poin 2. 85,50 %	30.721.985.000	1. 74,38 poin 2. 85,55 %	30.721.985.000	1. 74,38 poin 2. 85,55%	153.227.463.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2.12.0.00.00.12.00	2	0	0	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK *)	Cakupan kepemilikan KTP-el	N/A	98,50%	99,50 %	1.666.500.000	99,60 %	1.421.500.000	100,0 0%	1.421.500.000	99,80 %	1.421.500.000	99,90 %	1.421.500.000	100,00%	7.352.500.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Cakupan kepemilikan KK	N/A	98,00%	96,50 %		97,00 %		98,00 %		98,00 %		98,50 %		99,00%	-	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Cakupan kepemilikan KIA	N/A	0	40,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		80,00%	-	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							IKM	N/A	85,37%	85,40 %		85,40 %		85,00 %		85,50 %		85,55 %		86,00%	-	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2.12.0.00.00.12.00	3	0	0	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	N/A	95	95	458.000.000	96	458.000.000	97	458.000.000	98	458.000.000	99	458.000.000	99	2.290.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

		2.13.0.00 .00.13. 00			LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	dan Lembaga Adat Desa yang terbina													Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				27.890. 930.00 0	27.874. 991.00 0	27.864. 991.00 0	27.879. 991.00 0	27.879. 991.00 0	27.879. 991.00 0	139.390 .894.00 0									
2	1 4	2.14.2.08 .00.14. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	68,96	69,06	69,16	25.506. 660.00 0	69,26	25.495. 721.00 0	69,36	25.495. 721.00 0	69,46	25.495. 721.00 0	69,56	25.495. 721.00 0	69,56	127.489 .544.00 0	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						Persentase BMD dalam kondisi baik	84	85	85,5		86	86,5	87	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5			
2	1 4	2.14.2.08 .00.14. 00	2	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	81,27%	68,95%	69,15 %	234.00 0.000	69,35 %	234.00 0.000	69,55 %	234.00 0.000	69,75 %	234.00 0.000	70,00 %	234.00 0.000	70,00%	1.170.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,37%	10,17%	9,97 %		9,77 %	9,57 %	9,37 %	9,17 %	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%			
2	1 4	2.14.2.08 .00.14. 00	3	0	0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	20,32%	20,82%	21,32 %	1.775.2 70.000	21,82 %	1.770.2 70.000	22,32 %	1.760.2 70.000	22,82 %	1.775.2 70.000	23,32 %	1.775.2 70.000	23,32%	1.775.2 70.000	23,32%	8.856.3 50.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	2.14.2.08 .00.14. 00	4	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	N/A	N/A	100,0 0%	375.00 0.000	100,0 0%	375.00 0.000	100,0 0%	375.00 0.000	100,0 0%	375.00 0.000	100,0 0%	375.00 0.000	100,00%	1.875.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	1 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				54.817. 097.95 0	45.520. 887.60 0	45.520. 887.60 0	45.520. 887.60 0	45.520. 887.60 0	45.520. 887.60 0	236.900 .648.35 0									
2	1 5	2.15.0.00 .00.15. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase BMD dalam kondisi baik	#FIELD! #FIELD! -92,9	- n.a - n.a - n.a	#FIEL D! -75 -100	35.095. 641.00 0	-78 -76 -100	35.417. 441.00 0	#FIEL D! -77 -100	35.417. 441.00 0	-79 -78 -100	35.417. 441.00 0	-79 -79 -100	35.417. 441.00 0	#FIELD! -79 -100	176.765 .405.00 0	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
2	1 5	2.15.0.00 .00.15. 00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait	N/A	N/A	36,65	4.647.1 77.000	40	4.196.0 79.000	50	4.196.0 79.000	62	4.196.0 79.000	100	4.196.0 79.000	100	21.431. 493.000	Urusan Pemerintahan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

		Risiko kemacetan dan kecelakaan																		Bidang Perhubungan				
2	15	2.15.0.00.00.15.00	3	0	0	JALAN (LLAJ) *) PROGRAM PENGELOLAAN Pelayaran	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	N/A	N/A	50	17.974.000	75	17.974.000	80	17.974.000	80	17.974.000	100	17.974.000	100	89.870.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
2	15	2.15.0.00.00.15.00	5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	N/A	N/A	50	265.902.000	75	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	100	200.000.000	100	1.065.902.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
2	15	1.03.2.15.1.04.3.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase PJJ yang terbangun pada tahun rencana	N/A	12	20	14.790.403.950	40	5.689.393.600	60,00%	5.689.393.600	80	5.689.393.600	100	5.689.393.600	100	37.547.978.350	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (DPU/DR)		
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					20.928.305.000		24.417.366.000		24.417.366.000		24.417.366.000		24.417.366.000		118.597.769.000			
2	16	2.16.2.20.2.21.16.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	70,82	72	72	17.045.381.000	72,5	20.534.442.000	73	20.534.442.000	73,5	20.534.442.000	74	20.534.442.000	74	99.183.149.000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
2	16	2.16.2.20.2.21.16.00	2	0	0	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik	N/A	100,00%	100,00%	326.389.000	100,00%	326.389.000	100,00%	326.389.000	100,00%	326.389.000	100,00%	326.389.000	100,00%	1.631.945.000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
2	16	2.16.2.20.2.21.16.00	3	0	0	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	32,81	32,81	32,81	3.556.535.000	46,88	3.556.535.000	57,81	3.556.535.000	68,75	3.556.535.000	79,69	3.556.535.000	79,69	17.782.675.000	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					17.210.675.573		13.513.747.918		13.513.747.918		13.513.747.918		13.513.747.918		71.265.667.245			
2	17	2.17.0.00.0.00.17.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM 3. Aset dalam kondisi baik	N/A	74,52;80,9;94,32	74,82 poin 81,77%	9.047.25.000	82,64%	9.079.822.000	83,51%	9.079.822.000	84,38%	9.079.822.000	85,25%	9.079.822.000	85,25%	76,02 poin 85,25%	45.367.013.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	2.17.0.00.0.00.17.00	2	0	0	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang berizin	N/A	N/A	55,00%	125.000.000	60,00%	125.000.000	65,00%	125.000.000	70,00%	125.000.000	75,00%	125.000.000	75,00%	75,00%	625.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17		3	0	0	PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase Koperasi Patuh	22,00%	20,00%	20,00%	737.152.000	20,00%	687.152.000	20,00%	687.152.000	20,00%	687.152.000	20,00%	687.152.000	20,00%	687.152.000	100,00%	3.485.760.000	Urusan Pemerintahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2	2	2.23.2.24 .00.21. 00	3	0	0	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KECAMATAN YANG TERDAPAT NASKAH KUNO	N/A	0	20	300000 00	15	715000 00	15	715000 00	15	650000 00	15	650000 00	20	303000 000	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
2	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					368.47 7.000	426.27 7.000	426.27 7.000	410.36 3.300	410.36 3.300	2.041.7 57.600							
2	2	2.23.2.24 .00.21. 00	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	N/A	20	20	321.82 6.000	20	325.96 0.900	20	325.96 0.900	20	313.71 2.300	20	313.71 2.300	20	1.601.1 72.400	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
2	2	2.23.2.24 .00.21. 00	3	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terlindungi	N/A	100	100	23.413. 000	100	50.254. 300	100	50.254. 300	100	48.413. 000	100	48.413. 000	100	220.747 .600	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
2	2	2.23.2.24 .00.21. 00	4	0	0	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase Informasi Arsip yang termanfaatkan	N/A	100	100	23.238. 000	100	50.061. 800	100	50.061. 800	100	48.238. 000	100	48.238. 000	100	219.837 .600	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					138.28 4.035.5 69	119.96 7.937.7 29	119.96 7.937.7 29	119.96 7.937.7 29	119.96 7.937.7 29	618.155 .786.48 5							
3	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.706.7 22.000	3.168.1 84.200	3.168.1 84.200	3.168.1 84.200	3.168.1 84.200	3.168.1 84.200	18.379. 458.800						
3	2	2.09.3.25 .00.10. 0000	3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi ikan tangkap	3,00%	N/A	3,00 %	175.00 0.000	3,00 %	175.00 0.000	3,00 %	175.00 0.000	3,00 %	175.00 0.000	3,00 %	175.00 0.000	15,00%	875.000 .000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3	2	2.09.3.25 .00.10. 0000	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	2,90%	N/A	2,06 %	4.474.0 92.000	2,09 %	2.344.2 87.000	2,76 %	2.344.2 87.000	2,83 %	2.344.2 87.000	2,89 %	2.344.2 87.000	15,63%	13.851. 240.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3	2	2.09.3.25 .00.10. 0000	5	0	0	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		-			100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		100.00 0.000		400.000 .000	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3	2	2.09.3.25 .00.10. 0000	6	0	0	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	-12,68%	2,00%	3,00 %	1.057.6 30.000	3,00 %	548.89 7.200	3%	548.89 7.200	3,00 %	548.89 7.200	3,00 %	548.89 7.200	17,00%	3.253.2 18.800	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					23.711. 680.79 0	20.894. 494.34 0	20.894. 494.34 0	20.894. 494.34 0	20.894. 494.34 0	107.289 .658.15 0							
3	2	2.22.3.26 .00.20. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	N/A	74	75	13.994. 949.00 0	76	13.814. 631.34 0	77	13.814. 631.34 0	78	13.814. 631.34 0	79	13.814. 631.34 0	79	69.253. 474.360	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
3	2	2.22.3.26 .00.20. 00	2	0	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Rata rata tinggal wisatawan 2 Rata -rata belanja wisatawan	N/A	N/A	1,55; 4550 00	2.525.3 51.000	1,6; 4600 00	3.258.3 51.000	1,65; 4650 00	3.158.3 51.000	1,7; 4700 00	3.233.3 51.000	1,75; 4750 000	3.158.3 51.000	1,75; 4750000	15.333. 755.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
3	2	2.22.3.26 .00.20. 00	3	0	0	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang	N/A	N/A	5,00 %	1.825.4 40.000	5,00 %	1.525.4 40.000	5,00 %	1.725.4 40.000	5,00 %	1.650.4 40.000	5,00 %	1.725.4 40.000	25%	8.452.2 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

3	26	2.22.3.26.00.00.20.00	4	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan i HAKI	N/A	N/A	2,00 %	230.00 0.000	2,00 %	230.00 0.000	2%	230.00 0.000	2,00 %	230.00 0.000	2,00 %	230.00 0.000	10,00%	1.150.0 00.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
3	26	2.22.3.26.00.00.20.00	5	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dibina	N/A	N/A	10	5.135.9 40.790	10	2.066.0 72.000	10	1.966.0 72.000	10	1.966.0 72.000	10	1.966.0 72.000	50	13.100. 228.790	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				66.295. 042.00 0		53.822. 668.18 9		53.822. 668.18 9		53.822. 668.18 9		53.822. 668.18 9		53.822. 668.18 9		281.585 .714.75 6	
3	27	3.27.0.00 .0.00.22. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	81,88	80,1	82	39.285. 230.00 0	82,3	39.136. 377.00 0	82,8	39.136. 377.00 0	83,3	39.136. 377.00 0	83,8	39.136. 377.00 0	83,8	195.830 .738.00 0	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
3	27	3.27.0.00 .0.00.22. 00	2	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	1257387,81	1.281.425, 89	1.302 .997, 81	17.340. 033.00 0	1.324 .960, 80	7.039.1 40.000	1.347 .321, 93	7.490.9 28.000	1.370 .089, 67	6.979.1 40.000	1.393 .273, 48	7.019.1 40.000	1.393.273,48	45.868. 381.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
3	27	3.27.0.00 .0.00.22. 00	2	0	0		Jumlah Populasi Ternak	7789217	6.994.555, 79	7.041 .755, 45	7.089 .564, 80	7.137 .930, 93	7.187 .640, 65	7.238 .736, 03					7.238.736,03			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
3	27	3.27.0.00 .0.00.22. 00	3	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN *)	Rasiolahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	1,5,45 %	1,8,8 %	1, 9,50 %	2.241.6 26.811	1, 9,5%	2.395.4 88.000	1, 9,5%	2.093.7 00.000	1, 9,5%	2.245.4 88.000	1, 9,5%	2.203.7 00.000	1,9,5%	11.180. 002.811	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
3	27	3.27.0.00 .0.00.22. 00	4	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase penurunan kasus penyakit hewan endemik	1.75,45%	1.73%	1, 73,05 %	1.425.9 39.000	1, 73,05 %	2. 85,15 %	2. 85,15 %	2. 85,15 %	2. 85,20 %	2.530.0 00.000	2. 85,20 %	2.520.0 00.000	2.85,20%	11.265. 939.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
3	27	3.27.0.00 .0.00.22. 00	5	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	3,20%	3,20%	3,20 %	1.475.4 13.189	3,20 %	1.031.6 63.189	3,20 %	1.031.6 63.189	3,20 %	1.131.6 63.189	3,20 %	1.193.4 51.189	3,20%	5.863.8 53.945	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	6	0	0	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	100,00%	100,00%	100,00%	175.000.000	100,00%	175.000.000	100,00%	175.000.000	100,00%	175.000.000	100,00%	875.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	7	0	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	54,15	6,05	2,45	300.000.000	8,95	1.575.000.000	4,85	1.575.000.000	11,16	1.625.000.000	11,49	1.575.000.000	11,49	6.650.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	2	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pengembangan Usaha Tani dan Alsintan)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	1257387,81	1281425,89	1302997,81	375.000.000	1324960,8	-	1347321,93	-	1370089,67	-	1393273,48	-	1393273,48	375.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	3	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia)	Rasiolahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	5,45	8,8	9,5	175.000.000	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	175.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	4	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasiolahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	5,45	8,8	9,5	300.000.000	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	300.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	2	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pembibitan Tanaman)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	1257387,81	1281425,89	1302997,81	490.000.000	1324960,8	-	1347321,93	-	1370089,67	-	1393273,48	-	1393273,48	490.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	4	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium)	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	1.75,45% 2.98,71%	1.73% 2.85,08	1.73,05% 2.85,10%	350.000.000	1.73,05% 2.85,15%	-	1.74% 2.85,15%	-	1.74% 2.85,20%	-	1.74,5% 2.85,20%	-	1.74,5% 2.85,20%	350.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	4	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Persentase status kesehatan hewan ternak - Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	1.75,45% 2.98,71%	1.73% 2.85,08	1.73,05% 2.85,10%	275.000.000	1.73,05% 2.85,15%	-	1.74% 2.85,15%	-	1.74% 2.85,20%	-	1.74,5% 2.85,20%	-	1.74,5% 2.85,20%	275.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	2	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pembibitan Ternak)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	1257387,81	1281425,89	1302997,81	861.800.000	1324960,8	-	1347321,93	-	1370089,67	-	1393273,48	-	1393273,48	861.800.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	3	0	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian)	Rasiolahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	5,45	8,8	9,5	150.000.000	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	-	9,5	150.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	2	3.27.0.00.0.00.22.00	7	0	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian)	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	54,15	6,05	2,45	1.075.000.000	8,95	-	4,85	-	11,16	-	11,49	-	11,49	1.075.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

PERINDUSTRIAN																								
3	3	3.30.3.31 3.29.23. 0000	2	0	0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	N/A	2,00%	20,00%	1.125.000.000	20,00%	1.125.000.000	20,00%	1.125.000.000	20,00%	1.125.000.000	20,00%	1.125.000.000	100,00%	5.625.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
3	3	3.30.3.31 3.29.23. 0000	3	0	0	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	N/A	3,00%	2,50%	350.000.000	2,50%	350.000.000	3,00%	350.000.000	2,50%	350.000.000	2,50%	350.000.000	12,50%	1.750.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
3	3	3.30.3.31 3.29.23. 0000	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pelaporan SIINAS	N/A	17,00%	20,00%	425.000.000	20,00%	425.000.000	20,00%	425.000.000	20,00%	425.000.000	20,00%	425.000.000	100,00%	2.125.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
3	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				115.359.779		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000			575.359.779			
3	3	3.32.3.31 3.29.23. 0000	2	0	0	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi	N/A	N/A	1 Provisi 115.359.779	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi 115.000.000	1 Provisi	575.359.779,00	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				148.293.332.793		145.017.470.443		145.017.470.443		145.017.470.443		145.017.470.443			728.363.214.565			
4	1					SEKRETARIAT DAERAH				75.297.091.793		72.718.169.443		72.718.169.443		72.718.169.443		72.718.169.443			366.169.769.565			
4	1	4.01.0.00 .0.00.24. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	65,69	N/A	70,3	53.159.131.793	70,5	55.122.459.443	70,6	55.122.459.443	70,75	55.122.459.443	71,2	55.122.459.443	71,2	273.648.969.565	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah		
4	1	4.01.0.00 .0.00.24. 0000	1	0	0		Persentase BMD Kondisi Baik	89,95	N/A	91,25%	91,30%	91,35%	91,40%	91,45%	91,45%	91,45%	91,45%	91,45%	91,45%	91,45%	91,45%	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah		
4	1	4.01.0.00 .0.00.24. 0000	2	0	0	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT *)	Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	N/A	100	100	19.396.753.000	100,00%	14.854.503.000	100%	14.854.503.000	100,00%	14.854.503.000	100,00%	14.854.503.000	1	78.814.765.000	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah		
4	1	4.01.0.00 .0.00.24. 0000	2	0	0		Nilai LPPD	N/A	N/A	3,51	3,61	3,71	3,81	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah		
4	1	4.01.0.00 .0.00.24. 0000	3	0	0	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi	N/A	100,00%	80,00%	2.741.207.000	80,00%	2.741.207.000	80,00%	2.741.207.000	80,00%	2.741.207.000	80,00%	2.741.207.000	80,00%	2.741.207.000	100,00%	13.706.035.000	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

4	2									72.996. 241.00 0		72.299. 301.00 0		72.299. 301.00 0		72.299. 301.00 0		72.299. 301.00 0		362.193 .445.00 0		
4	2	4.02.0.00 .0.00.25. 0000	1	0	0	SEKRETARIAT DPRD																
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1. Nilai AKIP															
4	2					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase BMD dalam kondisi baik	65,69; 89,95	66; 65,69	66,80	59.897. 180.00 0	67; 80	59.200. 240.00 0	68; 80	59.200. 240.00 0	69; 80	59.200. 240.00 0	70; 80	59.200. 240.00 0	70; 80	296.698 .140.00 0	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
4	2	4.02.0.00 .0.00.25. 0000	2	0	0	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD *)	Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu	100,00%	100,00%	100,0 0%	13.099. 061.00 0	100,0 0%	13.099. 061.00 0	100%	13.099. 061.00 0	100,0 0%	13.099. 061.00 0	100,0 0%	13.099. 061.00 0	100%	65.495. 305.000	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
							Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,0 0%		100,0 0%		100%		100%		100%		100%		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				932.58 8.515.4 35		938.89 8.662.7 93		939.98 3.708.7 48		958.21 8.462.2 08		943.55 9.882.7 22		4.713.2 49.231. 906		
5	1					PERENCANAAN				19.044. 829.00 0		19.226. 095.00 0		19.534. 156.00 5		19.044. 829.00 0		19.044. 829.00 0		95.894. 738.005		
5	1	5.01.5.05 .0.00.26. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	82,78 point	81 point	81.2 Point	13.792. 145.00 0	81,4 point	13.623. 411.00 0	81,6 point	13.792. 145.00 0	81,8 point	13.792. 145.00 0	82 point	13.792. 145.00 0	82 poin	68.791. 991.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
							2. Persentase BMD dalam kondisi baik	98,64%	94,50%	98,66 %		98,68 %		98,70 %		98,72 %		98,74 %		98,74%		
5	1	5.01.5.05 .0.00.26. 00	2	0	0	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian nilai PPD	85,4	86,50%	87,60 %	2.649.9 84.000	88,70 %	2.999.9 84.000	90%	3.139.3 11.005	90,90 %	2.649.9 84.000	92,00 %	2.649.9 84.000	92,00%	14.089. 247.005	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
5	1	5.01.5.05 .0.00.26. 00	3	0	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)	1. Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD 2. Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD 3. Presentase muatan RKA dengan RKPD	100%	97,00%	97,20 %	2.602.7 00.000	97,40 %	2.602.7 00.000	98%	2.602.7 00.000	97,80 %	2.602.7 00.000	98,00 %	2.602.7 00.000	98,00%	13.013. 500.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
5	2					KEUANGAN				882.85 3.399.4 35		887.43 1.979.7 93		888.20 8.964.7 43		906.58 3.045.2 08		891.92 4.465.7 22		4.457.0 01.854. 901		
5	2	5.02.0.00 .0.00.28. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	N/A	1. 80 poin	1. 80,10 poin	44.218. 858.00 0	1. 80,20 poin	44.161. 344.00 0	1. 80,30 poin	44.161. 344.00 0	1. 80,40 poin	44.161. 344.00 0	1. 80, 50 poin	44.161. 344.00 0	1. 80, 50 poin	220.864 234.00 0	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (Bapenda)
							2. Aset dalam kondisi baik	2. 90%	2. 85%	2. 85%		2. 86%		2. 87%		2. 88%		2. 89%		2. 89%		
5	2	5.02.0.00 .0.00.28. 0000	4	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH *)	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap	N/A	18,40%	49,74 %	13.444. 236.00 0	50,27	13.444. 236.00 0	50,87 %	13.444. 236.00 0	51,43	13.444. 236.00 0	51,94	13.444. 236.00 0	51,94	67.221. 180.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

5	2	5.02.0.00 .00.27. 0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan Asli Daerah 1. Nilai AKIP 2. Persentase aset yang dikelola dengan baik	77	79 90	80 93	21.997. 361.00 0	81 93	21.671. 608.73 6	82 93	21.671. 608.73 6	83 93	21.671. 608.73 6	84 93	21.671. 608.73 6	84 93	108.683 .795.94 4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BKAD)
5	2	5.02.0.00 .00.27. 0000	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarakan 2. Presentase Terpenuhi Tingkat Likuiditas keuangan Pemerintah Daerah 3. Presentase PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	801.70 5.000.4 35	100%	806.66 6.847.0 57	100%	807.44 3.832.0 07	100%	825.81 7.912.4 72	100%	811.15 9.332.9 86	100%	4.052.7 92.924. 957	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BKAD)
5	2	5.02.0.00 .00.27. 0000	3	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	95%	90,00%	90,00 %	1.487.9 44.000	100,0 0%	1.487.9 44.000	90,00 %	1.487.9 44.000	90,00 %	1.487.9 44.000	90,00 %	1.487.9 44.000	90,00%	7.439.7 20.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BKAD)
5	3					KEPEGAWAIAN					27.972. 323.00 0		27.872. 624.00 0		27.872. 624.00 0		27.872. 624.00 0		27.872. 624.00 0		139.462 .819.00 0	
5	3	5.03.5.04 .00.29. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	76.3	76.5	77	24.528. 567.00 0	78	24.428. 868.00 0	79	24.428. 868.00 0	80	24.428. 868.00 0	80,5	24.428. 868.00 0	80,5	122.244 .039.00 0	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
							Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	85	90%	91%			92%	93%		94%		95%		95%	-	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
5	3	5.03.5.04 .00.29. 00	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH *)	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	80	80	80	3.443.7 56.000	85	3.443.7 56.000	87	3.443.7 56.000	90	3.443.7 56.000	90	3.443.7 56.000	90	17.218. 780.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
5	4					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.866.9 64.000		3.366.9 64.000		3.366.9 64.000		3.366.9 64.000		3.366.9 64.000		15.334. 820.000	
5	4	5.03.5.04 .00.29. 00	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	67,08%	70,08	73,08	1.866.9 64.000	76,08	3.366.9 64.000	79,08	3.366.9 64.000	82,08	3.366.9 64.000	85,08	3.366.9 64.000	85,08	15.334. 820.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					851.0 0.000		1.001.0 00.000		1.001.0 00.000		1.351.0 00.000		1.351.0 00.000		5.555.0 00.000	
5	5	5.01.5.05 .00.26. 00	2	0	0	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	N/A	25%	30%	851.0 0.000	40%	1.001.0 00.000	50%	1.001.0 00.000	60%	1.351.0 00.000	70%	1.351.0 00.000	70%	5.555.0 00.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

						- Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%								
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			19.596.270.000	22.048.389.679	22.255.972.967	22.477.491.985	22.713.661.304	109.091.785.935							
6	1					INSPEKTORAT DAERAH			19.596.270.000	22.048.389.679	22.255.972.967	22.477.491.985	22.713.661.304	109.091.785.935							
6	1	6.01.000.00.30.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	1. 81,70 poin 2. 75%	1. 81,80 poin 2. 76%	1. 17.152.720.000 2. 77%	1. 81,90 poin 2. 77%	1. 17.245.549.400 2. 78%	1. 81,99 poin 2. 79%	1. 17.245.549.400 2. 80%	1. 82 poin 2. 80%	1. 82 poin 2. 80%	1. 82 poin 2. 80%	1. 86.134.917.600 2. 80%	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
6	1	6.01.000.00.30.0000	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	13.099.150.519	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
6	1	6.01.000.00.30.0000	3	0	0	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	9.857.717.816	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
7						UNSUR KEWILAYAHAN			170.916.839.000	170.491.975.260	170.491.975.260	170.491.975.260	170.491.975.260	852.884.740.040							
7	1					KECAMATAN			170.916.839.000	170.491.975.260	170.491.975.260	170.491.975.260	170.491.975.260	852.884.740.040							
7	1	7.01.000.00.10.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	77	85	4.149.043.000	87	4.268.418.000	88	4.268.418.000	89	4.268.418.000	90	4.268.418.000	21.222.715.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
7	1	7.01.000.00.10.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	100,00%	100,00%	98.781.000	100,00%	100.681.000	100,00%	100.681.000	100,00%	100.681.000	100,00%	100.681.000	501.505.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
7	1	7.01.000.00.10.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	86,00%	86,00%	10.735.000	85,00%	30.735.000	85%	30.735.000	85,00%	30.735.000	87,00%	30.735.000	133.675.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
7	1	7.01.000.00.10.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketertarikan dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	15.235.000	100,00%	15.235.000	100%	15.235.000	100,00%	15.235.000	100,00%	15.235.000	76.175.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
7	1	7.01.000.00.10.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	65.000.000	100,00%	65.000.000	100%	65.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%	65.000.000	325.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari
7	1	7.01.000.00.10.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	60.248.000	100,00%	30.248.000	100%	30.248.000	100,00%	30.248.000	100,00%	30.248.000	181.240.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Arjasari



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.18.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	57	70	12.527.268.000	72	12.434.103.000	72	12.434.103.000	73	12.434.103.000	73	12.434.103.000	73	62.263.680.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah		
7	1	7.01.0.00.0.00.18.0000	1	0	0		Nilai IKM	N/A	70	72%			73%		75%		78%		79%		79%	-	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah	
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		7.050.000		7.050.000		7.050.000		7.050.000		7.050.000	28.200.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah	
7	1	7.01.0.00.0.00.18.0000	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	100,00%	100,00%	6.598.400.000	100,00%	6.515.190.000	100%	6.515.190.000	100,00%	6.515.190.000	100,00%	6.515.190.000	100,00%	6.515.190.000	100,00%	32.659.160.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
7	1	7.01.0.00.0.00.18.0000	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	36.170.000	100%	36.170.000	100,00%	36.170.000	100,00%	36.170.000	100,00%	36.170.000	8600,00%	174.680.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
7	1	7.01.0.00.0.00.18.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%		100,00%	69.990.000	100%	69.990.000	100,00%	69.990.000	100,00%	69.990.000	100,00%	69.990.000	100,00%	279.960.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah
7	1	7.01.0.00.0.00.18.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	375.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Baleendah	
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	65	67	4.218.546.000	68	4.210.757.000	69	4.210.757.000	70	4.210.757.000	71	4.210.757.000	71	21.061.574.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran		
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	81,00%	82,00%	22.000.000	83,00%	12.000.000	84%	12.000.000	85,00%	12.000.000	86,00%	12.000.000	100,00%	12.000.000	100,00%	70.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	26.000.000	100,00%	26.000.000	100%	26.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	130.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	18.000.000	100,00%	18.000.000	100%	18.000.000	100,00%	18.000.000	100,00%	18.000.000	100,00%	18.000.000	89,00%	90.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	175.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	75.000.000	100,00%	50.000.000	100%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	275.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Banjaran



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	63,45	65	4.357.464.000	66,5	4.328.485.438	70	4.328.485.438	71	4.329.690.438	71,5	4.328.485.438	71,5	21.672.610.752	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	0	0		Nilai IKM	N/A	0,8	85,00%		86,00%		87%		88,50%		89,00%		100,00%	-	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	80,00%	85,00%	79.000.000	86,00%	89.000.000	87%	89.000.000	88,50%	89.000.000	89,00%	89.000.000	7900,00%	435.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	37.300.000	100,00%	57.300.000	100%	57.300.000	100,00%	52.125.000	100,00%	57.300.000	100,00%	261.325.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	11.030.000	100%	11.030.000	100,00%	15.000.000	100,00%	11.030.000	100,00%	63.090.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	125.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.04.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	100.000.000	100,00%	90.000.000	100%	90.000.000	100,00%	90.000.000	100,00%	90.000.000	100,00%	460.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Bojongsong
7	1	7.01.0.00.0.00.30.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	67,56	63,9	68,80	4.252.350.000	69	4.313.243.400	69,30	4.330.521.400	69,60	4330521400	70	4.313.243.400	70	21.539.879.600	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung
7	1	7.01.0.00.0.00.30.00	1	0	0		Nilai IKM	76,03	78	82		82,20		82,40		82,60		83		83	-	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung
7	1	7.01.0.00.0.00.30.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	67,56	78	82	65.527.000	82,20	38.687.100	82,40	38.687.100	82,60	38.687.100	83	38.687.100	83	220.275.400	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung
7	1	7.01.0.00.0.00.30.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	63.089.000	100,00%	69.891.000	100%	69.891.000	100,00%	69.891.000	100,00%	69.891.000	100,00%	342.653.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung
7	1	7.01.0.00.0.00.30.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	74.276.000	100,00%	33.959.000	100%	26.330.000	100,00%	26.330.000	100,00%	33.959.000	100,00%	194.854.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cangkung
7	1	7.01.0.00.0.00.30.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	N/A	100,00%	100,00%	9.649.000	100,00%	9.649.000	100%	-	100,00%	-	100,00%	9.649.000	100,00%	28.947.000	Unsur Kecamatan;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	yang ditugaskan kepala daerah															Kecamatan Ciangkuang	
7	1	7.01.00.00.030.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	37.456.000	100,00%	25.818.500	100%	25.818.500	100,00%	25.818.500	100,00%	25.818.500	100,00%	140.730.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciangkuang
7	1	7.01.00.00.014.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	63,5	63,5	4.618.762.000	N/A	4.607.743.000	N/A	4.607.743.000	N/A	4.607.743.000	N/A	4.607.743.000	100 poin	23.049.734.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.014.00	1	0	0		Nilai IKM	N/A	82,5	8250,00%										100,00%	-	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.014.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	82,50%	82,50%	45.000.000	84,50%	70.014.000	85,00%	70.014.000	85,50%	70.014.000	86,50%	70.014.000	100,00%	325.056.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.014.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	100,00%	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	200.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.014.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	N/A		N/A	19.793.000	N/A	19.793.000	N/A	19.793.000	N/A	19.793.000	100,00%	79.172.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.014.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Keterampilan Umum	N/A	100,00%	100,00%	92.888.000	100,00%	75.554.000	100%	75.554.000	100,00%	75.554.000	100,00%	75.554.000	100,00%	395.104.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.014.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	100,00%	100,00%	72.111.000	100,00%	44.638.000	100%	44.638.000	100,00%	44.638.000	100,00%	44.638.000	100,00%	250.663.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cicalengka
7	1	7.01.00.00.016.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	67,14	66	66,5	4.443.574.000	67	4.422.920.000	67,5	4.424.920.000	68	4.422.920.000	68,5	4.434.920.000	68,80%	22.149.254.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung
							2. Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	84,72	75	76		77		78		79		80		80,00%		
7	1	7.01.00.00.016.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	78,83	75	76	75000000	77	85000000	78	83000000	79	85000000	79,5	73.000.000	80	401.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung
7	1	7.01.00.00.016.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	6.000.000	100,00%	26.000.000	100%	26.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	110.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.16.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	100%	100%	200000.00	100%	200000.00	100%	200000.00	100%	200000.00	100%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung		
7	1	7.01.0.00.0.00.16.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100,00%	100%	100%	200000.00	100%	200000.00	100%	200000.00	100%	200000.00	100%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung		
7	1	7.01.0.00.0.00.16.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100,00%	100,00%	96.000.000	100,00%	66.000.000	100%	66.000.000	100,00%	66.000.000	100,00%	66.000.000	360.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cikancung	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	67,48	68,00	4.247.189.000	68,50	4.236.110.000	69,00	4.236.110.000	69,50	4.236.110.000	70,00	4.236.110.000	70,00	21.191.629.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	0	0		Nilai IKM	N/A	76,56	77,56		78,56	79,56	80,56	81,56	81,56%		81,56%	-		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	76,56	77,56	46.216.000	78,56%	56.216.000	79,56%	56.216.000	80,56%	56.216.000	81,56%	56.216.000	81,56%	271.080.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	64.512.000	100,00%	54.204.000	100%	54.204.000	100,00%	54.204.000	100,00%	54.204.000	100,00%	281.328.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	40.725.000	100,00%	40.725.000	100%	40.725.000	100,00%	40.725.000	100,00%	40.725.000	100,00%	203.625.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	51.760.000	100,00%	21.760.000	100%	21.760.000	100,00%	21.760.000	100,00%	21.760.000	100,00%	138.800.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	29.900.000	100,00%	60.208.000	100%	60.208.000	100,00%	60.208.000	100,00%	60.208.000	100,00%	270.732.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cilengkrang
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	63,52	67,14	68	4.710.318.991	69,52	4.708.834.000	70,52	4.708.834.000	71,52	4.708.834.000	73	4.708.834.000	73	23.545.654.991	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	0	0		Persentase BMD dalam Keadaan Baik	86,31	75	87		87,15	87,3	88	88,15	88,15		88,15	-		Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,13	85	86	53.379.000	86,75	69.683.000	87,15	69.683.000	87,82	69.683.000	88	69.683.000	88	332.111.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00%	100,00%	-	100,00%	65.070.000	100%	65.070.000	100,00%	65.070.000	100,00%	65.070.000	100,00%	260.280.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	98,00%	100,00%	35.187.000	100,00%	43.187.000	100%	43.187.000	100,00%	43.187.000	100,00%	43.187.000	100,00%	207.935.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100,00%	100,00%	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00%	100,00%	100,00%	139.344.000	100,00%	49.970.000	100%	49.970.000	100,00%	49.970.000	100,00%	49.970.000	87 Poin	339.224.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cileunyi
7	1	7.01.0.00.0.00.12.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	68,04	68,37	68,4	4.707.603.000	68,5	4.689.303.870	68,75	4.689.303.870	69	4.689.303.870	69,25	4.689.303.870	74	23.464.818.480	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
7	1	7.01.0.00.0.00.12.00	1	0	0		Nilai IKM	79	80	81		82	83	84	85	90%	-				Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung	
7	1	7.01.0.00.0.00.12.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	79	80	81	25.000.000	82	25.000.000	83	25.000.000	84	25.000.000	85	25.000.000	90,00%	125.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		60.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
7	1	7.01.0.00.0.00.12.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	75.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
7	1	7.01.0.00.0.00.12.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	88,00%	250.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
7	1	7.01.0.00.0.00.12.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	46.000.000	100,00%	31.000.000	100%	31.000.000	100,00%	31.000.000	100,00%	31.000.000	100,00%	170.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimaung
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	70	70	7.906.036.000	70	7.883.837.000	72	7.883.837.000	72	7.883.837.000	73	7.883.837.000	73	39.441.384.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimenyan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	0	0		Nilai IKM	N/A	80	82		82	83	84	85	85	-					Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimenyan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	80	82	66.977.000	82	76.977.000	83	76.977.000	84	76.977.000	85	76.977.000	85	374.885.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan		
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	2.455.600.000	100,00%	2.485.600.000	100%	2.485.600.000	100,00%	2.485.600.000	100,00%	2.485.600.000	100,00%	2.485.600.000	100,00%	12.398.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	150.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	32.522.000	100,00%	32.522.000	100%	32.522.000	100,00%	32.522.000	100,00%	32.522.000	100,00%	32.522.000	100,00%	162.610.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	70.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	190.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Cimencyan
7	1	7.01.0.00.0.00.21.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	67,38	67,40	67,42	4.218.128.200	67,44	4.201.466.580	67,46	4.201.466.580	67,48	4.201.466.580	67,50	4.201.466.580	67,50	4.201.466.580	67,50	21.023.994.520	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
7	1	7.01.0.00.0.00.21.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	81,80	94,80	82,00	40.232.000	82,10	40.232.000	82,20	40.232.000	82,30	40.232.000	82,40	40.232.000	82,40	40.232.000	82,40	201.160.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
7	1	7.01.0.00.0.00.21.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	24.864.000	100,00%	54.864.000	100%	54.864.000	100,00%	54.864.000	100,00%	54.864.000	100,00%	54.864.000	100,00%	244.320.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum				100%	10.080.000	100%	10.080.000	100%	10.080.000	100%	10.080.000	100%	10.080.000	100%	40.320.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay	
7	1	7.01.0.00.0.00.21.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	29.142.800	100,00%	35.430.800	100%	35.430.800	100,00%	35.430.800	100,00%	35.430.800	100,00%	35.430.800	100,00%	170.866.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
7	1	7.01.0.00.0.00.21.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	72.078.000	100,00%	25.710.000	100%	25.710.000	100,00%	25.710.000	100,00%	25.710.000	100,00%	25.710.000	100,00%	174.918.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciparay
7	1	7.01.0.00.0.00.27.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	73	74	5.050.904.500	75	4.976.372.000	76	4.976.372.000	77	4.976.372.000	78	4.976.372.000	78	4.976.372.000	78	24.956.392.500	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00 .00.27. 00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	82 Poin	83	151.20 0.000	84	104.94 7.500	85	104.94 7.500	86	104.94 7.500	87	104.94 7.500	87,00%	570.990 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
7	1	7.01.0.00 .00.27. 00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGANGKATAN PEMBANGUNAN DESADAN KELURAHAN	N/A	95,00%	95,00 %	16.800. 000	95,00 %	73.200. 000	95%	73.200. 000	95,00 %	73.200. 000	95,00 %	73.200. 000	100,00%	309.600 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
7	1	7.01.0.00 .00.27. 00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	90,00%	90,00 %	33.600. 000	90,00 %	41.400. 000	90%	41.400. 000	90,00 %	41.400. 000	90,00 %	41.400. 000	100,00%	199.200 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
7	1	7.01.0.00 .00.27. 00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	90,00%	90,00 %	71.560. 000	90,00 %	76.760. 000	90%	76.760. 000	90,00 %	76.760. 000	90,00 %	76.760. 000	8900,00%	378.600 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
7	1	7.01.0.00 .00.27. 00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	91.957. 500	100,0 0%	77.842. 500	100%	77.842. 500	100,0 0%	77.842. 500	100,0 0%	77.842. 500	100,00%	403.327 .500	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ciwidey
7	1	7.01.0.00 .00.07. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	65	70	5.818,9 18.000	71	5.812,8 36.000	72	5.812,8 36.000	73	5.812,8 36.000	74	5.812,8 36.000	74	29.070. 262.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot
7	1	7.01.0.00 .00.07. 00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	83,00%	84,00 %	28.400. 000	85,00 %	28.400. 000	87%	28.400. 000	89,00 %	28.400. 000	90,00 %	28.400. 000	90,00%	142.000 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot
7	1	7.01.0.00 .00.07. 00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,0 0%	1.032,1 00.000	100,0 0%	1.032,1 00.000	100%	1.032,1 00.000	100,0 0%	1.032,1 00.000	100,0 0%	1.032,1 00.000	100,00%	5.160,5 00.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot
7	1	7.01.0.00 .00.07. 00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,0 0%	21.920. 000	100,0 0%	21.920. 000	100%	21.920. 000	100,0 0%	21.920. 000	100,0 0%	21.920. 000	80,00%	109.600 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot
7	1	7.01.0.00 .00.07. 00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,0 0%	66.800. 000	100,0 0%	66.800. 000	100%	66.800. 000	100,0 0%	66.800. 000	100,0 0%	66.800. 000	100,00%	334.000 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot
7	1	7.01.0.00 .00.07. 00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	30.000. 000	100,0 0%	30.000. 000	100%	30.000. 000	100,0 0%	30.000. 000	100,0 0%	30.000. 000	100,00%	150.000 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Dayeuhkolot
7	1	7.01.0.00 .00.23. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	70	71	4.311,8 60.000	72	4.310,7 71.000	73	4.310,7 71.000	74	4.310,7 71.000	74	4.310,7 71.000	74	21.554. 944.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.23.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	74,00%	77	110.000.000	80%	90.000.000	80%	90.000.000	83,00%	90.000.000	86,00%	90.000.000	86,00%	470.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum		
7	1	7.01.0.00.0.00.23.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	100,00%	100,00%	60.000.000	100,00%	80.000.000	100%	80.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	80.000.000	89	380.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum
7	1	7.01.0.00.0.00.23.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	150.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum
7	1	7.01.0.00.0.00.23.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum
7	1	7.01.0.00.0.00.23.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	150.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Ibum
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	N/A	72	4.127.381.000	73	4.168.882.000	74	4.178.882.000	75	4.178.882.000	76	4.178.882.000	76	4.178.882.000	76	20.832.909.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	N/A	83,00%	70.000.000	84,00%	70.000.000	85%	60.000.000	86,00%	80.000.000	87,00%	60.000.000	94,10	340.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang		
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	100,00%	60.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	180.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	N/A	100,00%	90.000.000	100,00%	40.000.000	100%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	250.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	N/A	100,00%	60.000.000	100,00%	80.000.000	100%	80.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	360.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP	N/A	70 poin	71 poin	4.045.948.000	72 poin	4.018.198.000	73 poin	4.018.198.000	74 poin	4.018.198.000	75 poin	4.018.198.000	75 poin	4.018.198.000	75 poin	20.118.740.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari
							2. Nilai IKM																	
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	83,00%	84,00%	15.000.000	85,00%	25.000.000	86%	25.000.000	87,00%	25.000.000	88,00%	25.000.000	90,00%	25.000.000	90,00%	115.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN			N/A			N/A	45.000.000	N/A	45.000.000	N/A	45.000.000	N/A	45.000.000	N/A	45.000.000	N/A	180.000.000	Unsur Kecamatan;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				Kecamatan Kertasari		
7	1	7.01.00.00.20.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	10.000.000	100,00%	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	50.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari
7	1	7.01.00.00.20.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	175.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari
7	1	7.01.00.00.20.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	120.000.000	100,00%	75.000.000	100%	75.000.000	100,00%	75.000.000	100,00%	75.000.000	100,00%	75.000.000	100,00%	420.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kertasari
7	1	7.01.00.00.31.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	63,97	63,97	65,00	4.370.711.000	66,00	4.326.622.000	67,00	4.316.622.000	68,00	4.326.622.000	69,00	4.326.622.000	69,00	4.326.622.000	69,00	21.667.199.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin
7	1	7.01.00.00.31.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	84,89	84,89	85,00	40.000.000	86,00	57.300.000	87,00	67.300.000	88,00	57.300.000	89,00	57.300.000	89,00	57.300.000	89,00	279.200.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin
7	1	7.01.00.00.31.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%	67.300.000	100%	67.300.000	100,00%	67.300.000	100,00%	67.300.000	100,00%	67.300.000	100,00%	319.200.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin
7	1	7.01.00.00.31.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	75.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin
7	1	7.01.00.00.31.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	75.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin
7	1	7.01.00.00.31.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	89,00%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Kutawaringin
7	1	7.01.00.00.22.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	60	61	4.190.149.000	62	4.187.538.000	63	4.187.538.000	64	4.187.538.000	65	4.187.538.000	65	4.187.538.000	65	20.940.301.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya
7	1	7.01.00.00.22.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	75,00%	76,00%	94.086.000	77,00%	89.086.000	78,00%	89.086.000	79,00%	89.086.000	80,00%	89.086.000	80,00%	89.086.000	100,00%	450.430.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya
7	1	7.01.00.00.22.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	48.000.000	100,00%	53.000.000	100%	53.000.000	100,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000	100,00%	260.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.22.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15000000	100,00%	75.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya
7	1	7.01.0.00.0.00.22.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	25.000.000	100,00%	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15000000	100,00%	85.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya
7	1	7.01.0.00.0.00.22.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	40.413.000	100,00%	40.413.000	100%	40.413.000	100,00%	40.413.000	100,00%	40413000	100,00%	202.065.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Majalaya
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	63,45	85	4.385.648.000	86,5	4.374.549.000	87,5	4.374.549.000	88,5	4.374.549.000	90	4.374.549.000	90	21.883.844.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	80,00%	85,00%	90.000.000	86,00%	90.000.000	87%	90.000.000	88,50%	90.000.000	89,00%	90.000.000	89,00%	450.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	150.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	125.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	125.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	100%	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	300.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margaasih
7	1	7.01.0.00.0.00.05.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	N/A	70	5.971.396.000	70,56	5.971.396.000	71	5.971.396.000	71,2	5.971.396.000	71,56	5.971.396.000	71,56	29.856.980.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu
7	1	7.01.0.00.0.00.05.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	N/A	93,97	34.000.000	93,98	39.000.000	93,99	39.000.000	94	39.000.000	94,1	39.000.000	100,00%	190.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu
7	1	7.01.0.00.0.00.05.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	100,00%	100,00%	964.200.000	100,00%	959.200.000	100%	959.200.000	100,00%	959.200.000	100,00%	959.200.000	100,00%	4.801.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu
7	1	7.01.0.00.0.00.05.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	8.000.000	100,00%	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	8.000.000	100,00%	8.000.000	100,00%	40.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.0.00.05.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PROGRAM PENYELENGGARAAN	N/A	100,00%	100,0 0%	43.000.000	100,0 0%	43.000.000	100%	43.000.000	100,0 0%	43.000.000	100,0 0%	43.000.000	100,00%	215.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	8.000.000	100,0 0%	8.000.000	100%	8.000.000	100,0 0%	8.000.000	100,0 0%	8.000.000	7480,00%	40.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Margahayu	
7	1	7.01.0.00.0.00.17.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	71	72	4.713.115.000	73	4.678.292.868	74	4.678.292.868	75	4.678.292.868	76	4.678.292.868	76	23.400.814.472	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg	
7	1	7.01.0.00.0.00.17.0000	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	85,00%	86,00 %	55.000.000	87,00 %	20.000.000	88%	20.000.000	89,00 %	20.000.000	90,00 %	20.000.000	100,00%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg	
7	1	7.01.0.00.0.00.17.0000	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	100,00%	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,00%	170.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg	
7	1	7.01.0.00.0.00.17.0000	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	N/A	100,00%	100,0 0%	20.000.000	100,0 0%	20.000.000	100%	20.000.000	100,0 0%	20.000.000	100,0 0%	20.000.000	100,00%	100.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg	
7	1	7.01.0.00.0.00.17.0000	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,0 0%	59.000.000	100,0 0%	44.000.000	100%	44.000.000	100,0 0%	44.000.000	100,0 0%	44.000.000	85,00%	220.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg	
7	1	7.01.0.00.0.00.17.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,00%	230.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Nagreg	
7	1	7.01.0.00.0.00.19.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP	N/A	1. 61,59 poin 2. 78,53%	1. 63,44 poin 2. 80,10 %	4.361.384.000	1. 65,34 poin 2. 81,70 %	4.336.585.000	1. 67,30 poin 2. 83,34 %	4.336.585.000	1. 69,32 poin	4.336.585.000	1. 71,40 poin 2. 86,70 %	4.336.585.000	1. 71,40 poin 2. 86,70%	21.707.724.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet	
							2. Nilai IKM								2. 85,00 %								
7	1	7.01.0.00.0.00.19.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	78,83 poin	80,10 poin	35.000.000	81,70 poin	45.000.000	83,34 poin	45.000.000	85,00 poin	45.000.000	86,70 poin	45.000.000	86,70 poin	215.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet	
7	1	7.01.0.00.0.00.20.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			N/A		N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	N/A	200.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet
7	1	7.01.0.00.0.00.19.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	20.000.000	100%	20.000.000	100,0 0%	20.000.000	100,0 0%	20.000.000	100,00%	120.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.00.00.19.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,00%	200.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet
7	1	7.01.00.00.19.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	70.000.000	100,0 0%	40.000.000	100%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.000	100,00%	230.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pacet
7	1	7.01.00.00.09.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	70,82 poin	66,5	4.246.795.000	67	4.226.484.935	67,5	4.226.484.935	68,5	4.226.484.935	69	4.226.484.935	69	21.152.734.740	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk
7	1	7.01.00.00.09.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	85	N/A	98.316.000	87	85.321.000	88	85.321.000	88,5	85.321.000	89	85.321.000	89	439.600.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk
7	1	7.01.00.00.20.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	N/A	N/A	38.000.000	N/A	38.000.000	N/A	38.000.000	N/A	38.000.000	N/A	38.000.000	N/A	152.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk
7	1	7.01.00.00.09.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,0 0%	12.094.000	100,0 0%	12.094.000	100%	12.094.000	100,0 0%	12.094.000	100,0 0%	12.094.000	100,00%	60.470.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk
7	1	7.01.00.00.09.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,0 0%	62.679.000	100,0 0%	62.679.000	100%	62.679.000	100,0 0%	62.679.000	100,0 0%	62.679.000	100,00%	313.395.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk
7	1	7.01.00.00.09.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	66.005.000	100,0 0%	41.000.000	100%	41.000.000	100,0 0%	41.000.000	100,0 0%	41.000.000	100,00%	230.005.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pameungpeuk
7	1	7.01.00.00.11.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	56,94	61,63	4.322.629.000	63	4.268.629.000	66	4.268.629.000	69	4.268.629.000	71	4.268.629.000	71	21.397.145.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan
7	1	7.01.00.00.11.0000	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	80,83%	82,00 %	120.000.000	83,00 %	56.500.000	84%	56.500.000	85,00 %	56.500.000	86,00 %	56.500.000	100,00%	346.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan
7	1	7.01.00.00.20.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		154.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan
7	1	7.01.00.00.11.0000	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,0 0%	4.410.000	100,0 0%	9.410.000	100%	9.410.000	100,0 0%	9.410.000	100,0 0%	9.410.000	100,00%	42.050.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan
7	1	7.01.00.00.11.0000	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,0 0%	13.737.000	100,0 0%	33.737.000	100%	33.737.000	100,0 0%	33.737.000	100,0 0%	33.737.000	100,00%	148.685.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.000.00.11.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	34.000.000	100,00%	34.000.000	100%	34.000.000	100,00%	34.000.000	100,00%	34.000.000	100,00%	170.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pangalengan		
7	1	7.01.000.00.24.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	67,28	67,5	4.683.569.000	67,75	4.674.320.000	68	4.674.320.000	68,5	4.779.426.225	69	4.887.160.106	69	23.698.795.331	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh		
7	1	7.01.000.00.24.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	88,00%	88,20%	58.000.000	88,30%	58.000.000	88,50%	58.000.000	88,75%	58.000.000	90	58.000.000	90	290.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh		
7	1	7.01.000.00.21.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	32.000.000	100,00%	32.000.000	100%	32.000.000	100,00%	32.000.000	100,00%	32.000.000	100,00%	32.000.000	100,00%	128.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh
7	1	7.01.000.00.24.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	35.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh
7	1	7.01.000.00.24.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	90	100,00%	33.000.000	100,00%	43.000.000	100%	43.000.000	100,00%	43.000.000	100,00%	43.000.000	100,00%	43.000.000	100,00%	205.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh
7	1	7.01.000.00.24.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	90	100,00%	105.000.000	100,00%	63.000.000	100%	63.000.000	100,00%	63.000.000	100,00%	63.000.000	100,00%	63.000.000	100,00%	357.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Paseh
7	1	7.01.000.00.26.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	67,61	67,77	4.545.310.000	68,45	4.518.025.000	69,00	4.518.025.000	69,50	4.518.025.000	70	4.518.025.000	70	22.617.410.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
7	1	7.01.000.00.26.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	83,25%	84,00%	39.664.000	85,00%	49.664.000	86%	49.664.000	87,00%	49.664.000	88,00%	49.664.000	8800,00%	238.320.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
7	1	7.01.000.00.26.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	55.000.000	100%	55.000.000	100,00%	55.000.000	100,00%	55.000.000	100,00%	55.000.000	100,00%	235.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu
7	1	7.01.000.00.26.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	75.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu
7	1	7.01.000.00.26.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	29.000.000	100%	29.000.000	100,00%	29.000.000	100,00%	29.000.000	100,00%	29.000.000	100,00%	131.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00 .00.26. 00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	75.000. 000	100,0 0%	25.000. 000	100%	25.000. 000	100,0 0%	25.000. 000	100,00%	175.000 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Pasirjambu		
7	1	7.01.0.00 .00.28. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	63.3 poin	60 poin	60.20 poin	3.870.6 45.000	60.40 poin	3.820.2 45.000	60.60 poin	3.820.2 45.000	60.80 poin	3.820.2 45.000	61 poin	3.820.2 45.000	61 poin	19.151. 625.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancajali
7	1	7.01.0.00 .00.28. 00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	84,79%	73,00%	73,20 %	40.640. 000	73,40 %	78.100. 000	73,60 %	78.100. 000	73,80 %	78.100. 000	74,00 %	78.100. 000	74,00%	353.040 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancajali
7	1	7.01.0.00 .00.28. 00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00%	100,00%	100,0 0%	52.867. 500	100,0 0%	53.812. 500	100%	53.812. 500	100,0 0%	53.812. 500	100,0 0%	53.812. 500	100,00%	268.117 .500	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancajali
7	1	7.01.0.00 .00.28. 00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	100,00%	100,0 0%	16.800. 000	100,0 0%	41.400. 000	100%	41.400. 000	100,0 0%	41.400. 000	100,0 0%	41.400. 000	100,00%	182.400 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancajali
7	1	7.01.0.00 .00.28. 00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100,00%	100,00%	100,0 0%	60.190. 000	100,0 0%	36.350. 000	100%	36.350. 000	100,0 0%	36.350. 000	100,0 0%	36.350. 000	100,00%	205.590 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancajali
7	1	7.01.0.00 .00.28. 00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00%	100,00%	100,0 0%	79.502. 500	100,0 0%	40.337. 500	100%	40.337. 500	100,0 0%	40.337. 500	100,0 0%	40.337. 500	100,00%	240.852 .500	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancajali
7	1	7.01.0.00 .00.15. 00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	64	67	6.112.6 32.000	68	6.131.1 74.769	69	6.131.1 74.769	70	6.131.1 74.769	71	6.131.1 74.769	71	30.637. 331.076	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaek
7	1	7.01.0.00 .00.15. 00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	80,00%	86,00 %	110.69 8.000	84,00 %	85.698. 000	86%	85.698. 000	88,00 %	85.698. 000	90,00 %	85.698. 000	90,00%	453.490 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaek
7	1	7.01.0.00 .00.15. 00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	N/A	100,00%	100,0 0%	1.050.0 87.000	100,0 0%	1.075.0 87.000	100%	1.075.0 87.000	100,0 0%	1.075.0 87.000	100,0 0%	1.075.0 87.000	100,00%	5.350.4 35.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaek
7	1	7.01.0.00 .00.15. 00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,0 0%	30.000. 000	100,0 0%	30.000. 000	100%	30.000. 000	100,0 0%	30.000. 000	100,0 0%	30.000. 000	100,00%	150.000 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaek
7	1	7.01.0.00 .00.15. 00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,0 0%	40.000. 000	100,0 0%	40.000. 000	100%	40.000. 000	100,0 0%	40.000. 000	100,0 0%	40.000. 000	100,00%	200.000 .000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Rancaek
7	1	7.01.0.00 .00.15. 00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,0 0%	75.000. 000	100,0 0%	75.000. 000	100%	75.000. 000	100,0 0%	75.000. 000	100,0 0%	75.000. 000	100,00%	375.000 .000	Unsur Kecamatan;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

7	1	7.01.0.00.00.25.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	67,32	67,50	68,75	4.507.334.000	68,90	4.498.229.000	69	4.498.229.000	69,15	4.498.229.000	69,30	4.498.229.000	69,30	22.500.250.000	Kecamatan Rancaekek Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk
7	1	7.01.0.00.00.25.00	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	85,30	85,50	86,00	45.000.000	86,50	45.000.000	87,00	45.000.000	87,50	45.000.000	88,00	45.000.000	88,00	225.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk
7	1	7.01.0.00.00.25.00	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	78	79,00	100,00	15.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	95.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk
7	1	7.01.0.00.00.25.00	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	78	79,00	100,00	10.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	70.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk
7	1	7.01.0.00.00.25.00	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	78	79,00	100,00	40.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	180.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk
7	1	7.01.0.00.00.25.00	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00	100,00	100,00	100.000.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	100,00	480.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Solokanjeruk
7	1	7.01.0.00.00.29.0000	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	75,97 poin	76,00 poin	4.433.325.000	76,25 poin	4.436.514.000	76,50 poin	4.436.514.000	76,75 poin	4.436.514.000	77,00 poin	4.436.514.000	77,00 poin	22.179.381.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang
7	1	7.01.0.00.00.29.0000	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	N/A	80,97 poin	81,00 poin	61.000.000	81,25 poin	65.660.000	81,50 poin	65.660.000	81,75 poin	65.660.000	82,00 poin	65.660.000	82,00 poin	323.640.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang
7	1	7.01.0.00.00.29.0000	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	100,00%	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	110.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang
7	1	7.01.0.00.00.29.0000	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	100,00%	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	55.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang
7	1	7.01.0.00.00.29.0000	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	N/A	100,00%	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	110.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang
7	1	7.01.0.00.00.29.0000	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	N/A	100,00%	100,00%	68.000.000	100,00%	88.000.000	100,00%	88.000.000	100,00%	88.000.000	100,00%	88.000.000	100,00%	420.000.000	Unsur Kecamatan; Kecamatan Soreang
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					17.620.535.500		9.403.781.000		31.672.054.675		9.403.781.000		9.403.781.000		77.503.933.175	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

8	1								17.620.535.500		9.403.781.000		31.672.054.675		9.403.781.000		9.403.781.000		77.503.933.175				
8	1	8.01.000.00.31.00	1	0	0	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	N/A	70,00%	70,00%	6.142.920.000	70,00%	6.133.941.000	70,00%	6.133.941.000	70,00%	6.133.941.000	70,00%	30.678.456.000	Kesbangpol		
8	1	8.01.000.00.31.00	2	0	0	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	60,00%	60,00%	250.000.000	50,00%	250.000.000	70,00%	250.000.000	65,00%	250.000.000	70,00%	1.250.000.000	Kesbangpol		
8	1	8.01.000.00.31.00	3	0	0	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik	N/A	60,00%	60,00%	3.312.851.000	50,00%	776.000.000	70,00%	776.000.000	65,00%	776.000.000	70,00%	6.416.851.000	Kesbangpol		
8	1	8.01.000.00.31.00	4	0	0	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas organisasi kemasyarakatan	N/A	60,00%	60,00%	1.605.000.000	50,00%	441.000.000	70,00%	441.000.000	65,00%	441.000.000	70,00%	3.369.000.000	Kesbangpol		
8	1	8.01.000.00.31.00	5	0	0	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi	N/A	60,00%	60,00%	150.000.000	50,00%	150.000.000	70,00%	150.000.000	65,00%	150.000.000	70,00%	750.000.000	Kesbangpol		
8	1	8.01.000.00.31.00	5	0	0			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan ketahanan sosial dan budaya	N/A	60,00%	60,00%		50,00%		70,00%		65,00%		70,00%	-	Kesbangpol		
8	1	8.01.000.00.31.00	6	0	0	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	N/A	60,00%	60,00%	6.159.925.000	40,00%	1.652.840.000	70,00%	23.921.113.675	70,00%	1.652.840.000	65,00%	1.652.840.000	70,00%	35.039.626.175	Kesbangpol
8	1	8.01.000.00.31.00	6	0	0			Persentase penanganan konflik sosial	N/A	60,00%	40,00%		40,00%		70,00%		65,00%		70,00%	-	Kesbangpol		
									4.622.361.812.719		4.407.327.665.667		4.427.097.515.167		4.444.064.567.032		4.466.916.624.953		22.367.768.185.538				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

										4.622.246.452.940		4.402.991.765.667		4.422.761.615.167		4.444.064.567.032		4.466.916.624.953		22.358.981.025.759		
										-		-		-		-		-		-		
										115.359.779		4.335.900.000		4.335.900.000		-		-		-		
																					8.787.159.779	

Ket: *) Program termasuk indikator SPM; **) Program termasuk indikator SDGs

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kinerja dari perangkat daerah diukur dengan menggunakan indikator-indikator kinerja daerah berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran (*impact*), sampai dengan program (*outcome*). Penetapan indikator kinerja daerah ini juga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah ini dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah perlu mencantumkan indikator pada level tujuan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menetapkan 20 Indikator Makro pembangunan pada **Tabel 8-1**. Indikator Kinerja Makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian Indikator Kinerja Makro pembangunan Nasional dan

Provinsi Jawa Barat yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.

Pada **Tabel 8-2** diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. IKU Daerah, secara berjenjang akan dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Pada **Tabel 8-3** diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung selama Tahun 2021-2026.



Tabel 8-1

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi 2022-2026				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75%	5,17%	5,20%	5,30%	5,60%
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	83.856.515,35	85.364.102,03	86.871.688,72	88.379.275,40	89.886.862,09
3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	136.561.077,20	143.306.746,39	150.052.415,58	156.798.084,77	163.543.753,95
4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita	Ribu Rp	22.360.712,64	22.445.592,53	22.528.139,87	22.608.449,49	22.686.611,18
5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita	Ribu Rp	36.414.618,38	37.681.001,26	38.912.583,09	40.110.778,96	41.276.928,26
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	2,90%	2,78%	2,67%	2,55%	2,43%
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,43%	1,41%	1,39%	1,37%	1,36%
8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,48	73,78	74,17	74,55	74,94
9	Indeks Pendidikan	Poin	65,78	66,11	66,43	66,75	67,08
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,84	8,97	9,3	9,39	9,47
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73	12,74	12,76	12,77	12,78
12	Indeks Kesehatan	Poin	82,73	82,92	83,1	83,29	83,48
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77	73,9	74,02	74,14	74,26
14	Indeks Pengeluaran	Poin	72,65	73,27	73,9	74,52	75,15
15	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10.800,00	10.980,00	11.158,32	11.345,44	11.532,56
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,32%	6,06%	4,81%	4,49%	4,17%
17	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	233.636	230.471	185.405,78	175.402,93	165.059,87
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15%	7,93%	7,71%	7,51%	7,31%
19	Gini Ratio	Nilai	0,4	0,395	0,39	0,385	0,38
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,40%	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 8-2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Proyeksi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,87	3,56	4,75	5,17	5,20	5,30	5,60
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,39	72,33	73,48	73,78	74,17	74,55	74,94
3	Indeks Perkembangan Wilayah	Poin	N/A	52,65	54,59	55,77	57,12	58,42	60,03
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,33	65,8	67,28	68,76	70,25	71,73	73,21
5	Angka Kriminalitas	Poin	49,86	46	44,5	43	41,5	40	38,5
6	Indeks Gini	Poin	0,414	0,415	0,4	0,395	0,39	0,385	0,38
7	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	79,08	80,1	81,11	83,14	85,17	87,2	88,2
8	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	%	-3,78	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1
9	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	-3,27	2,52	3,09	4,03	4,72	5,23	5,6
10	Persentase koperasi yang berkualitas	%	5	5	5,5	6	6,5	7,0	7,5
11	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	0,19	0,59	1,39	2,19	3,09	3,99	4,89
12	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-3,21	1,66	3,26	4,06	4,86	5,66	6,46
13	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	%	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	30%
14	Laju Pertumbuhan Investasi	%	N/A	2,9	2,9	2,9	2,0	2,9	2,9
15	Indeks Pendidikan	Poin	65,12	65,12	65,78	66,11	66,43	66,75	67,08
16	Indeks Kesehatan	Poin	82,35	82,41	82,73	82,92	83,1	83,29	83,48
17	Total Fertility Rate	%	2,43	2,43	2,42	2,42	2,41	2,41	2,4
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	80,36	81,00	82,22	83,20	84,19	85,17	86,16
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53,57	52,59	53,29	53,68	53,98	54,28	54,60
20	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	63,55	64,66	65,97	67,22	68,46	69,58	70,65
21	Indeks Risiko Bencana	Poin	174	170	165	160	155	150	145
22	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7524	0,7767	0,8100	0,8165	0,8307	0,8442	0,8704
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,78	82,73	83,3	83,87	84,44	85	85,57
24	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,44	73	76	78	80	81	82
25	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	78,02	78,72	79,42	80,12	80,82	81,52	82,22
26	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Poin	3	3	3	3	3	3	3



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Proyeksi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	Indeks Penerapan Sistem Merit	Poin	N/A	304,5	326,5	348,5	353,5	359	362
28	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,82	2,98	3,15	3,31	3,47	3,64	3,8
29	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD Kab)	Juta Rp	2.236.780	1.741.425	1.928.570	2.065.240	2.166.710	2.316.910	2.431.990
30	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	70	72	74	76	78	80
32	Indeks Pengeluaran	Poin	70,74	71,14	72,65	73,27	73,9	74,52	75,15
33	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,58	8,37	8,15	7,93	7,71	7,51	7,31
34	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,59	93,85	94,11	94,37	94,63	94,89	95,15
35	Skor PPH Konsumsi	%	84,3	86,3	86,3	86,5	86,7	86,9	87,1

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 8-3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
1) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75%	5,17%	5,20%	5,30%	5,60%	5,60%	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	83.856.515,35	85.364.102,03	86.871.688,72	88.379.275,40	89.886.862,09	89.886.862,09	Indikator Makro
1.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	136.561.077,20	143.306.746,39	150.052.415,58	156.798.084,77	163.543.753,95	163.543.753,95	Indikator Makro
1.4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	Ribu Rp	22.360.712,64	22.445.592,53	22.528.139,87	22.608.449,49	22.686.611,18	22.686.611,18	Indikator Makro
1.5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Ribu Rp	36.414.618,38	37.681.001,26	38.912.583,09	40.110.778,96	41.276.928,26	41.276.928,26	Indikator Makro
1.6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	Persen	2,90%	2,78%	2,67%	2,55%	2,43%	2,43%	Indikator Makro
1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,43%	1,41%	1,39%	1,37%	1,36%	1,36%	Indikator Makro
1.8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,48	73,78	74,17	74,55	74,94	74,94	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
1.9	Indeks Pendidikan	Poin	65,78	66,11	66,43	66,75	67,08	67,08	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
1.10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,84	8,97	9,3	9,39	9,47	9,47	Indikator Makro
1.11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73	12,74	12,76	12,77	12,78	12,78	Indikator Makro
1.12	Indeks Kesehatan	Poin	82,73	82,92	83,1	83,29	83,48	83,48	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Kesehatan
1.13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77	73,9	74,02	74,14	74,26	74,26	Indikator Makro
1.14	Indeks Pengeluaran	Poin	72,65	73,27	73,9	74,52	75,15	75,15	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
1.15	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	Ribu Rp	10.800,00	10.980,00	11.158,32	11.345,44	11.532,56	11.532,56	Indikator Makro
1.16	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	233.636	230.471	185.405,78	175.402,93	165.059,87	165.059,87	Indikator Makro
1.17	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,32%	6,06%	4,81%	4,49%	4,17%	4,17%	Indikator Makro
1.18	Gini Ratio	Nilai	0,4	0,395	0,39	0,385	0,38	0,38	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
1.19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15%	7,93%	7,71%	7,51%	7,31%	7,31%	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
1.20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,40%	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,50%	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
2) ASPEK PELAYANAN UMUM									
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar									
2.1	Urusan Pendidikan								
2.1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10	IKU Dinas Pendidikan
2.1.2	Capaian SPM bidang pendidikan	Persen	75,45%	78,61%	81,77%	84,17%	85,00%	85,00%	IKU Dinas Pendidikan
2.1.3	Skor Pemetaan Mutu	Nilai	5,919	6,111	6,303	6,473	6,5	6,5	IKU Dinas Pendidikan
2.1.4	- tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Nilai	63,72%	67,48%	71,24%	73%	75%	75%	Dinas Pendidikan
2.1.5	- tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Nilai	90,50%	92,84%	95,18%	97,00%	97,50%	97,50%	Dinas Pendidikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.1.6	- tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan	Nilai	57,09%	61%	65,49%	69,69%	70,00%	70,00%	Dinas Pendidikan
2.1.7	Nilai standar pengelolaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan
2.1.8	Index pemerataan guru	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan
2.1.9	Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan
2.1.10	NILAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN NILAI STANDAR ISI NILAI STANDAR PROSES	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan
2.2	Urusan Kesehatan								
2.2.1	Indeks Kesehatan (I)	Persen	82,73	82,92	83,1	83,29	83,48	83,48	IKU Dinas Kesehatan
2.2.2	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	73,77	73,9	74,02	74,14	74,26	74,26	IKU Dinas Kesehatan
2.2.3	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
2.2.4	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar	Persen	82,00%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	95,00%	Dinas Kesehatan
2.2.5	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri)	Persen	70,00%	73,00%	80,00%	84,00%	85,00%	85,00%	Dinas Kesehatan
2.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Indeks	83,3	83,87	84,44	85	85,57	85,57	IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Kesehatan
2.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Kesehatan (I)	Indeks	83,3	83,87	84,44	85	85,57	85,57	IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Kesehatan
2.2.8	Persentase tenaga kesehatan yang bermutu	Persen	90,85	91	92	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Persen	77,56						RSUD Soreang
2.2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Persen	77,56	78,5	79	79,5	80	80	RSUD Soreang
2.2.11	Nilai IKM	Persen	80,55	80,60	80,65	80,75	80,80	80,80	RSUD Majalaya
2.2.12	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	RSUD Majalaya
2.2.13	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	Persen	87,25%	87,50%	87,75%	88,00%	88,25%	88,25%	RSUD Cicalengka
2.2.14	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar	Persen	42,66%	45,21%	48,00%	50,00%	52,00%	100,00%	RSUD Cicalengka
2.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.3.1	Persentase Pengurangan luas banjir kawasan perkotaan	Persen	30,76%	30,02%	29,31%	28,62%	27,92%	27,92%	IKU DPUTR
2.3.2	Persentase kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh bangunan pengendali banjir	Persen	29,69%	30,80%	31,91%	33,07%	34,28%	34,28%	IKU DPUTR
2.3.3	Persentase saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persen	67,69%	69,31%	70,66%	72,00%	73,35%	73,35%	IKU DPUTR
2.3.4	- Persentasi jaringan irigasi dalam kondisi baik -luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persen	29,69%	30,80%	31,91%	33,07%	34,28%	34,28%	DPUTR
2.3.5	Persentase jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	43,00%	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%	51,00%	IKU DPUTR
2.3.6	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	43,00%	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%	51,00%	DPUTR
2.3.7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	Persen	91,55%	94,77%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.3.8	Akses Aman Air Bersih (%)	Persen	91,55%	94,77%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.9	Akses aman terhadap air minum di kawasan permukiman	Persen	0,00%	94,77%	98,00%	100,00%	100,00%	100%	DPUTR
2.3.10	Meningkatnya akses aman terhadap sanitasi	Persen	90,73%	95,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.11	Akses aman sanitasi (%)	Persen	90,73%	95,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.12	Persentase akses aman terhadap sanitasi di kawasan permukiman	Persen	0,00%	95,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DPUTR
2.3.13	Persentase pembangunan bangunan pemerintah sesuai ketentuan teknis	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.14	Persentase bangunan Pemerintah yang sesuai standar kualitas	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.15	Persentase bangunan pemerintah yang terbangun pada tahun rencana	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	DPUTR
2.3.16	Persentase kondisi jalan kabupaten mantap	Persen	87,16%	88,66%	90,16%	91,36%	92,86%	92,86%	IKU DPUTR
2.3.17	Persentase jalan kabupaten mantap	Persen	87,16%	88,66%	90,16%	91,36%	92,86%	92,86%	DPUTR
2.3.18	Persentase SDM bidang konstruksi terampil yang tersertifikasi	Persen	59,16%	69,37%	79,58%	89,79%	100%	100%	IKU DPUTR
2.3.19	Persentase SDM bidang konstruksi terampil dan tersertifikasi pada tahun rencana	Persen	59,16%	69,37%	79,58%	89,79%	100%	100%	DPUTR
2.3.20	Perwujudan Rencana Tata Ruang	Persen	38,08%	53,93%	69,78%	85,64%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.21	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	Persen	61,54%	73,08%	84,62%	96,15%	100,00%	100,00%	IKU DPUTR
2.3.22	Persentase dokumen RTR (RTRW, RDTR, dan RDTR lainnya) yang ditetapkan	Persen	61,54%	73,08%	84,62%	96,15%	100,00%	100,00%	DPUTR
2.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
2.4.1	Persentase Lingkungan yang didukung oleh PSU yang memadai	Persen	17,00%	19,00%	21,00%	23,00%	25,00%	25,00%	IKU Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.4.2	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi	Persen	90,73%	95,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.4.3	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	Persen	91,55%	94,77%	98,00%	100,00%	99,00%	99,00%	IKU Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.4.4	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	96,36%	97,27%	98,18%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.4.5	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persen	0,23%	0,19%	0,14%	0,10%	0,06%	0,06%	IKU Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.4.6	Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung	Persen	96,36%	97,27%	98,18%	100,00%	100,00%	100,00%	Disperkintan
2.4.7	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	Persen	0,23%	0,19%	0,14%	0,10%	0,06%	0,06%	Disperkintan
2.4.8	PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Persen	74,00%	82,35%	90,68%	100,00%	100,00%	100,00%	Disperkintan
2.4.9	persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	Persen	17,00%	19,00%	21,00%	23,00%	25,00%	25,00%	Disperkintan
2.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
2.5.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	72	74	76	78	80	80	IKU Pemerintah Daerah
2.5.2	Respond Time terhadap kejadian kebakaran	Persen	83,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.5.3	Respon time 15 menit terhadap kejadian kebakaran	Persen	83,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.5.4	Persentase jumlah aset harta benda yang terselamatkan	Persen	86,00%	87,00%	87,00%	88,00%	89,00%	89,00%	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.5.5	Persentase jumlah korban yang diselamatkan (kebakaran dan non kebakaran)	Persen	95,00%	96,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.5.6	Persentase jumlah gedung/bangunan yang terproteksi dari kebakaran	Persen	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.5.7	Jumlah relawan kebakaran yang terbentuk di setiap desa	Jumlah	16	35	60	70	75	256	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.5.8	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WWMK) - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran	Persen	80,00%	86,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.5.9	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Poin	0,54	0,56	0,58	0,59	0,6	0,6	IKU BPBD
2.5.10	Persentase peningkatan pelayanan kepada warga/masyarakat yang terkena dampak bencana	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU BPBD
2.5.11	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BPBD
2.5.12	Persentase warga negara terdampak penegakan perda dan perkara yang dilayani	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Satpol PP
2.5.13	Persentase layanan terhadap warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Satpol PP
2.5.14	Persentase Pengendalian Gangguan Kelentraman dan ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Satpol PP
2.6	Urusan Sosial								
2.6.1	Persentase PPKS yang mandiri secara sosial ekonominya	Persen	32,03%	43,43%	54,33%	65,47%	75,91%	75,91%	IKU Dinsos
2.6.2	Persentase pelaku kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi	Persen	55,64%	62,98%	70,32%	77,66%	85,00%	85,00%	IKU Dinsos
2.6.3	Persentase relawan pelaku penanganan sosial dan pekerja penanganan sosial yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Persen							IKU Dinsos
2.6.4	Persentase PPKS yang berfungsi secara sosial	Persen							IKU Dinsos
2.6.5	Persentase PPKS yang menerima pelayanan kebutuhan dasar	Persen							IKU Dinsos
2.6.6	Persentase (%) PKS yang didaya gunakan dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persen	41,28%	55,96%	70,64%	85,32%	100,00%	67,43%	Dinsos
2.6.7	Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	2,29%	2,62%	2,95%	3,28%	3,62%	3,62%	Dinsos
2.6.8	Porsentase PPKS yang meningkat Keberfungsiannya sosialnya	Persen	48,25%	60,49%	72,72%	86,58%	100,00%	54,74%	Dinsos
2.6.9	Persentase Keluarga fakir miskin (KFM) yang tertangani	Persen	35,00%	51,89%	68,79%	85,68%	100,00%	68,27%	Dinsos
2.6.10	Persentase (%) Penangan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Persen	42,57%	58,70%	72,87%	86,32%	100,00%	41,53	Dinsos
2.6.11	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Representatif	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinsos
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
2.7	Urusan Tenaga Kerja								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.7.1	Persentase Penduduk Yang Bekerja	Persen	91,85%	92,07%	92,29%	92,49%	92,69%	92,69%	IKU Dinas Ketenagakerjaan
2.7.2	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persen	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	7,00%	IKU Dinas Ketenagakerjaan
2.7.3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	15,00%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	19,00%	IKU Dinas Ketenagakerjaan
2.7.4	Persentase Pencari kerja yang tersertifikasi	Persen	3,25%	3,50%	3,75%	4,00%	4,25%	4,25%	IKU Dinas Ketenagakerjaan
2.7.5	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	56,00%	57,00%	58,00%	59,00%	60,00%	60,00%	IKU Dinas Ketenagakerjaan
2.7.6	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	Persen	60	41,00%	42,00%	43,00%	44,00%	44,00%	Dinas Ketenagakerjaan
2.7.7	Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD	Persen	40	61,00%	62,00%	63,00%	64,00%	74,00%	Dinas Ketenagakerjaan
2.7.8	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	15	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	19,00%	Dinas Ketenagakerjaan
2.7.9	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	56	57,00%	58,00%	59,00%	60,00%	60,00%	Dinas Ketenagakerjaan
2.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.8.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,16	94,26	94,36	94,46	94,56	94,56	IKU Pemerintah Daerah/IKU DP2KBP3A
2.8.2	Persentase kecamatan layak anak	Persen	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	IKU DP2KBP3A
2.8.3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,16	94,26	94,36	94,46	94,56	94,56	IKU DP2KBP3A
2.8.4	Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.8.5	Persentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.8.6	Persentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.8.7	Persentase kecamatan layak anak	Persen	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	IKU DP2KBP3A
2.8.8	Persentase data terpilah anak	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.8.9	Persentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.8.10	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.9	Urusan Pangan								
2.9.1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81,11	83,14	85,17	87,2	88,2	88,2	IKU Pemerintah Daerah
2.9.2	Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Dispakan
2.9.3	Persentase penguatan CPPD	Persen	8,00%	30,00%	8,00%	30,00%	8,00%	N/A	IKU Dispakan
2.9.4	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%)	Persen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	IKU Dispakan
2.9.5	Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	IKU Dispakan
2.9.6	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Persen	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	IKU Dispakan
2.9.7	Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Dispangan
2.9.8	Persentase ketersediaan pangan utama	persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dispangan
2.9.9	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Dispangan
2.9.10	Persentase Tingkat keamanan pangan	persen	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	Dispangan
2.10	Urusan Pertanahan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.10.1	Persentase tanah pemda yang telah bersertifikat	Persen	62,34%	80,36%	98,38%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2.10.2	Efektivitas tata kelola pertanahan	Tingkat	62,34%	80,36%	98,38%	100,00%	100,00%	100,00%	Disperkimtan
2.10.3	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Persen	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	Disperkimtan
2.10.4	Persentase bidang tanah pemda yang dimanfaatkan persentase luas tanah yang terkelola	Pesen	16,00%	17,00%	19,00%	20,00%	22,00%	22,00%	Disperkimtan
2.10.5	Persentase bidang tanah pemda yang bersertifikat	Jumlah	62,34%	80,36%	98,38%	100,00%	100,00%	100,00%	Disperkimtan
2.10.6	Persentase akses kepemilikan tanah bagi masyarakat (petani) dalam rangka meningkatkan taraf hidup/perekonomian	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Disperkimtan
2.11	Urusan Lingkungan Hidup								
2.11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	53,29	53,68	53,98	54,28	54,6	54,6	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.2	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	97,60%	98,30%	98,90%	99,40%	100,00%	100,00%	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3	Persentase Volume Sampah yang terkelola	%	74,73%	80,93%	87,15%	93,41%	99,69%	99,69%	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2.11.4	Persentase Pengurangan Sampah	%	24,39%	26,08%	27,84%	29,72%	31,66%	31,66%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.5	Persentase Penanganan Sampah	%	50,34%	54,85%	59,31%	63,70%	68,03%	68,03%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6	Nikai SAKIP	Nilai	77,5	77,5	77,75	78	78,25	78,25	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2.11.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,5	77,75	78	78,25	78,75	78,75	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2.11.8	Persentase Asset dalam Kondisi Baik	%	92%	92%	92%	93%	94%	94%	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2.11.9	Nilai SAKIP	Nilai	77,5	77,5	77,75	78	78,25	78,25	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Nilai SKM	Indeks	77,5	77,75	78	78,25	78,75	78,75	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.12	Persentase lokasi titik pantau kualitas air	%	33,33%	40,00%	46,67%	53,33%	60,00%	60,00%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.13	Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	%	19,35%	22,26%	25,80%	29,00%	32,25%	32,25%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.14	Penambahan luas tutupan lahan	Ha	50	50	50	50	50	23435 ha	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.15	Persentase pembangunan Taman Kehati	%	17,50%	15%	15%	15%	12,50%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.16	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	%	71,3%	72,30%	73%	74,30%	74,70%	74,70%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.17	Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.18	Persentase Kampung Bedas	%	50 ds (17,8%)	50 ds (17,8%)	50 ds (17,8%)	35 ds (12,5%)	evaluasi dan pemantapan	280 Kampung Bedas (100%)	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.19	Persentase kesesuaian data dan informasi adipura	%	70%	71%	72%	73%	75%	75%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.20	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.21	Nilai SAKIP	Nilai	77,5	77,5	77,75	78	78,25	78,25	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.22	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,5	77,5	78	78,25	78,25	78,25	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.23	Persentase Asset dalam Kondisi Baik	%	92%	92%	92%	93%	94%	94%	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	95,00%	85,40%	85,45%	85,50%	85,55%	85,55%	IKU Disdukcapil
2.12.2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	98,50%	98,50%	IKU Disdukcapil
2.12.3	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Persen	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%	99,90%	IKU Disdukcapil
2.12.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun	Persen	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	99,00%	IKU Disdukcapil



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.12.5	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Persen	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	IKU Disdukcapil
2.12.6	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	IKU Disdukcapil
2.12.7	Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%	99,90%	Disdukcapil
2.12.8	Cakupan kepemilikan KK	Persen	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	98,50%	98,50%	Disdukcapil
2.12.9	Cakupan kepemilikan KIA	Persen	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	Disdukcapil
2.12.10	IKM	Persen	85,37%	85,40%	85,45%	85,50%	85,55%	85,55%	Disdukcapil
2.12.11	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	Persen	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	99,00%	Disdukcapil
2.12.12	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	Disdukcapil
2.12.13	IKM	Persen	85,37%	85,40%	85,45%	85,50%	85,55%	85,55%	Disdukcapil
2.12.14	Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Disdukcapil
2.12.15	Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen	62	62	62	62	62	62	Disdukcapil
2.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.13.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,81	0,8165	0,8307	0,8442	0,8704	0,8704	IKU DPMD
2.13.3	Persentase Desa Mandiri	Persen	46,67%	54,07%	61,48%	68,89%	76,30%	76,30%	IKU DPMD
2.13.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif	Persen	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%	95,00%	IKU Pemerintah Daerah/DPMD
2.13.5	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Persen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	DPMD
2.13.6	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Persen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	72,00%	DPMD
2.13.7	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Persen	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	DPMD
2.13.8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Persen	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%	95,00%	DPMD
2.14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.14.1	Total Fertility Rate	Kelahiran/lbu	2,42	2,42	2,41	2,41	2,4	2,4	IKU DP2KBP3A
2.14.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	69,15%	69,35%	69,55%	69,75%	70,00%	70,00%	DP2KBP3A
2.14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,97%	9,77%	9,57%	9,37%	9,17%	9,17%	DP2KBP3A
2.14.4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	21,32%	21,82%	22,32%	22,82%	23,32%	23,32%	DP2KBP3A
2.14.5	Partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Persen	53	54	55	56	57	57	IKU DP2KBP3A
2.14.6	Cakupan kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Persen	89,32%	89,42%	89,52%	89,62%	89,72%	89,72%	DP2KBP3A
2.14.7	Persentase pembinaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DP2KBP3A
2.15	Urusan Perhubungan								
2.15.1	Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung	Persen	7,00%	9,00%	11,00%	13,00%	15,00%	15,00%	IKU Dinas Perhubungan
2.15.2	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	46,94%	47,24%	47,54%	47,84%	48,14%	48,14%	IKU Dinas Perhubungan
2.15.3	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan	Persen	50	75	80	80	100	100	Dinas Perhubungan
2.15.4	Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan	Persen	50	75	80	80	100	100	Dinas Perhubungan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.15.6	Persentase PJU yang terbangun pada tahun rencana	Persen	60,22	64,17	68,11%	72,06	76,01	76,01	Dinas Perhubungan
2.15.7	Rata - Rata Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	Dinas Perhubungan
2.15.8	Persentase kemandapan jalan dan kelengkapannya	Persen	60,22%	64,17%	68,11%	72,06%	76,01%	76,01%	IKU DPUTR
2.15.9	Persentase ketersediaan PJU ideal di ruas jalan wilayah administrasi Kabupaten Bandung	Persen	60,22%	60,48%	60,74%	61,00%	61,26%	61,26%	IKU DPUTR
2.15.10	Persentase PJU yang terbangun	Persen	60,22%	64,17%	68,11%	72,06%	76,01%	76,01%	DPUTR
2.16	Usuran Komunikasi dan Informatika								
2.16.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,15	3,31	3,47	3,64	3,8	3,8	IKU Pemerintah Daerah
2.16.2	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	Nilai	72	72,5	73	73,5	74	74	Diskominfo
2.16.3	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet 2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	Persen	10,69	13,72	17	22	25	25	Diskominfo
2.16.4	Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah	Indeks	78	79	80	81	81	81	Diskominfo
2.17	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.17.1	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	5,5%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	7,50%	IKU Pemerintah Daerah
2.17.2	Laju pertumbuhan usaha mikro	Persen	9,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	IKU Diskop UKM
2.17.3	Persentase koperasi sehat	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Diskop UKM
2.17.4	Persentase Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	Persen	4,25%	8,50%	12,75%	17,00%	21,25%	21,25%	IKU Diskop UKM
2.17.5	Persentase usaha mikro yang meningkat kualitasnya	Persen	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%	IKU Diskop UKM
2.17.6	Persentase koperasi sehat	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Diskop UKM
2.17.7	Persentase Koperasi Patuh	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Diskop UKM
2.17.8	Persentase Koperasi aktif	Persen	52,50%	52,70%	52,80%	52,90%	53,00%	53,00%	IKU Diskop UKM
2.17.9	Persentase Kapasitas Usaha Mikro	Persen	4,25%	8,50%	12,75%	17,00%	21,25%	21,25%	Diskop UKM
2.17.10	Persentase Kualitas usaha mikro	Persen	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	Diskop UKM
2.17.11	Persentase Koperasi Patuh	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Diskop UKM
2.17.12	Persentase Koperasi sehat	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Diskop UKM
2.17.13	Persentase Koperasi yang berizin	Persen	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	Diskop UKM
2.17.14	Persentase SDM koperasi yang kompeten	Persen	13,20%	16,78%	20,31%	23,77%	27,15%	27,15%	Diskop UKM
2.17.15	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	2,50%	Diskop UKM
2.18	Usuran Penanaman Modal								
2.18.1	Laju Pertumbuhan investasi	Persen	2,9	2,9	2	2,9	2,9	2,9	IKU Pemerintah Daerah
2.18.2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persen	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	IKU DPMPPTSP
2.18.3	Nilai IKM bidang Perizinan	Persen	83,55%	83,60%	83,65%	83,70%	83,75%	83,75%	IKU DPMPPTSP
2.18.4	Nilai Realisasi Investasi	Trilyun	27,5	28	28,5	29	30	30	IKU DPMPPTSP
2.18.5	Jumlah kemitraan pelaku usaha	Jumlah	4	5	6	7	8	33	DPMPPTSP
2.18.6	Jumlah peluang investasi unggulan dan kemitraan pelaku usaha	Jumlah	2	3	4	5	6	21	DPMPPTSP
2.18.7	Persentase peluang investasi yang dipromosikan	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	DPMPPTSP
2.18.8	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	Persen	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%	0,40%	0,40%	DPMPPTSP
2.18.9	Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha	Persen	12,00%	13,00%	15,00%	17,00%	19,00%	20,00%	DPMPPTSP
2.18.10	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DPMPPTSP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
2.19.1	Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persen	20	22	24	26	28	28	IKU Dispora
2.19.2	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan pemuda yang berprestasi	Persen	20	22	24	26	28	28	IKU Dispora
2.19.3	Nilai AKIP	Poin	70,75	71,25	71,75	72,25	72,5	72,5	IKU Dispora
2.19.4	IKM	Poin	68	70	72	75	76	76	IKU Dispora
2.19.5	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	77	79	81	83	85	85	IKU Dispora
2.19.6	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan pemuda yang berprestasi	Persen	20	22	24	26	28	28	Dispora
2.19.7	Jumlah pelatihan wirausaha muda	Orang	100 orang	125	150	175	200	200	Dispora
2.19.8	Jumlah pembinaan atlet berprestasi	Atlet	1032 atlet	1532	1682	2182	2232	2232	Dispora
2.19.9	Jumlah sarana dan prasarana bertaraf internasional	Lapangan	2 lapangan	3	4	5	6	6	Dispora
2.19.10	Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga	Persen	10%	15%	20%	25%	30%	30%	Dispora
2.19.11	Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persen	20%	22%	24%	26%	28%	28%	Dispora
2.20	Urusan Statistik								
2.20.1	Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data	Persen	27,00%	46,00%	64,00%	82,00%	100,00%	100,00%	Diskominfo
2.21	Urusan Persandian								
2.21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Diskominfo
2.22	Urusan Kebudayaan								
2.22.1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	Persen	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	30,00%	IKU Pemerintah Daerah
2.22.3	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	54	56	58	60	62	62	IKU Disparbud
2.22.4	Persentase objek sejarah, cagar budaya, dan museum yang terpelihara dan terlindungi	Persen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	30,00%	IKU Disparbud
2.22.5	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan i HAKI	Persen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	10,00%	Disparbud
2.22.6	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Persen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	Disparbud
2.22.7	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	Persen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	Disparbud
2.22.8	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terpelihara	Persen	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Disparbud
2.22.9	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Persen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	Disparbud
2.22.10	Terbangunnya museum sejarah Daerah	Museum	0	0	1	1	1	1	Disparbud
2.23	Urusan Perpustakaan								
2.23.1	Indeks Baca	Indeks	56	56,2	56,33	56,43	56,53	56,53	IKU Disarpus
2.23.2	Rata-rata ketersediaan fasilitas membaca (X1)	Persen	45,50%	45,70%	45,90%	46,00%	46,10%	46,10%	IKU Disarpus
2.23.3	Tingkat pemanfaatan bahan bacaan	Persen	67,00%	67,30%	67,40%	67,50%	67,60%	67,60%	IKU Disarpus
2.23.4	Kebiasaan membaca masyarakat	Persen	55,50%	55,60%	55,70%	55,80%	55,90%	55,90%	IKU Disarpus
2.23.5	- Rata-Rata ketersediaan perpustakaan sekolah - Rata-Rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan	Persen	45,50%	45,70%	45,90%	46%	46,10%	46,10%	Disarpus
2.23.6	persentase kecamatan yang terdapat naskah kuno	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Disarpus
2.24	Urusan Kearsipan								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.24.1	Nilai pengawasan kearsipan daerah	Nilai	97,85	87,86	87,87	87,88	87,89	87,9	IKU Disarpus
2.24.2	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	IKU Disarpus
2.24.3	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Disarpus
2.24.4	Persentase arsip yang terlindungi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Disarpus
2.24.5	Persentase Informasi Arsip yang Termanfaatkan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Disarpus
Urusan Pemerintahan Pilihan									
2.25	Urusan Kelautan dan Perikanan								
2.25.1	Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan	Persen	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	IKU Dispakan
2.25.2	Persentase peningkatan produksi ikan tangkap	Persen	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	N/A	IKU Dispakan
2.25.3	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	Persen	2,06%	2,09%	2,76%	2,83%	2,89%	N/A	IKU Dispakan
2.25.4	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	Nilai	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	N/A	IKU Dispangan
2.25.5	Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap	Persen	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	15,00%	Dispangan
2.25.6	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	Persen	2,06%	2,09%	2,76%	2,83%	2,89%	12,63%	Dispangan
2.25.7	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	Persen	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	15,00%	Dispangan
2.26	Urusan Pariwisata								
2.26.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	3,26%	4,06%	4,86%	5,66%	6,46%	6,46%	IKU Pemerintah Daerah
2.26.2	Indeks tourism brand awareness	Indeks	5	5	5	5	5	30	IKU Disparbud
2.26.3	Persentase destinasi wisata yang CHSE	Persen	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	4,50%	IKU Disparbud
2.26.4	Persentase destinasi wisata halal	Persen	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	IKU Disparbud
2.26.5	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki ekosistem mapan	Persen	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	3,00%	IKU Disparbud
2.26.6	Persentase pertumbuhan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	Persen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	Disparbud
2.26.7	Rata-rata belanja wisatawan	Rupiah	455.000	460.000	465.000	470.000	475.000	475.000	Disparbud
2.26.8	Rata-rata tinggal wisatawan	Hari/jam	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,75	Disparbud
2.26.9	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	Persen	10	10	10	10	10	50	Disparbud
2.27	Urusan Pertanian								
2.27.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	1,39%	2,19%	3,09%	3,99%	4,89%	4,89%	IKU Pemerintah Daerah
2.27.2	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persen	8,27%	10,88%	13,48%	16,00%	18,53%	18,53%	IKU Distan
2.27.3	Jumlah produksi komoditi pertanian (ton)	Ton	1.428.164,26	1.450.116,25	1.472.467,38	1.495.224,12	1.518.396,94	1.518.396,94	IKU Distan
2.27.4	Persentase penurunan kasus penyakit hewan endemik	Persen	-20,00%	-20,00%	-20,00%	-20,00%	-20,00%	-20,00%	Distan
2.27.5	Jumlah lembaga pertanian yang maju (Kelompok Tani)	Kelompok Tani	100	127	131	146	179	179	Distan
2.27.6	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) (ton)	Ton	1.302.997,81	1.324.960,80	1.347.321,93	1.370.089,67	1.393.273,48	1.393.273,48	Distan
2.27.7	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	Ekor	7.041.755	7.089.565	7.137.931	7.187.641	7.238.736	7.238.736	Distan
2.27.8	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Persen	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	Distan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.27.9	Persentase status kesehatan hewan ternak	Persen	73,05%	73,05%	74,00%	74,00%	74,50%	74,50%	Distan
2.27.10	Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	Persen	85,10%	85,15%	85,15%	85,20%	85,02%	85,02%	Distan
2.27.11	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Persen	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	Distan
2.27.12	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Distan
2.27.13	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	Persen	2,45%	8,95%	4,85%	11,16%	11,49%	11,49%	Distan
2.28	Urusan Kehutanan								
	-								
2.29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.29.1	Persentase pemanfaatan panas bumi yang dikelola	Persen	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Disperin
2.29.2	Persentase pengelola pemanfaatan panas bumi yang menyampaikan laporan kinerja tahunan	Persen	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Disperin
2.29.3	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	Persen	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Disperin
2.30	Urusan Perdagangan								
2.30.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	Persen	3,50%	3,90%	4,30%	4,70%	5,10%	5,10%	IKU Pemerintah Daerah
2.30.2	Persentase terfasilitasinya promosi produk unggulan	Persen	14,00%	21,00%	28,00%	35,00%	42,00%	42,00%	IKU Disperin
2.30.3	Nilai Ekspor produk IKM	Dolar	\$726.851.099	\$726.996.440	\$727.141.781	\$727.287.122	\$727.432.463	\$727.432.463	IKU Disperin
2.30.4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas	Persen	20,00%	20,00%	21,60%	23,30%	25,00%	25,00%	IKU Disperin
2.30.5	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah	Persen	20%	20%	21,60%	23,30%	25%	25%	IKU Disperin
2.30.6	Persentase Alat UTPP sesuai standar	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%	IKU Disperin
2.30.7	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	Dolar	\$726.851.099	\$726.996.440	\$727.141.781	\$727.287.122	\$727.432.463	\$727.432.463	Disperin
2.30.8	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	Persen	14,00%	21,00%	28,00%	35,00%	42,00%	42,00%	Disperin
2.30.9	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	Disperin
2.30.10	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	Persen	20,00%	20,00%	21,00%	23,00%	25,00%	25,00%	Disperin
2.30.11	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	Persen	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	Disperin
2.30.12	Persentase Alat UTPP sesuai standar	Persen	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	Disperin
2.31	Urusan Perindustrian								
2.31.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,09%	4,03%	4,72%	5,23%	5,60%	%	IKU Pemerintah Daerah
2.31.2	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Persen	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Disperin
2.31.3	Persentase sentra industri yang sudah tertata	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Disperin
2.31.4	Persentase kepatuhan industri	Persen	5,00%	7,50%	10,00%	12,50%	15,00%	15,00%	IKU Disperin
2.31.5	Persentase industri yang terdaftar dalam SIINAS	Persen	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	IKU Disperin
2.31.6	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Disperin



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.31.7	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	Persen	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	12,50%	Disperin
2.31.8	Persentase pelaporan SINAS	Persen	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Disperin
2.32	Urusan Transmigrasi								
2.32.1	Jumlah lokasi transmigrasi yang terjajagi	Provinsi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
INSPEKTORAT DAERAH									
2.33.1	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3	3	3	3	3	3	IKU Pemerintah Daerah
2.33.2	Persentase Nilai SAKIP PD yang mendapat Nilai A	Persen	8 PD	9 PD	9 PD	10 PD	10 PD	10 PD	IKU Inspektorat
2.33.3	Persentase Tindak Lanjut atas temuan eksternal/BPK	Persen	70%	72%	73%	74%	75%	75%	IKU Inspektorat
2.33.4	Nilai Maturitas SPIP PD	Nilai	15%	20%	25%	30%	35%	35%	IKU Inspektorat
2.33.5	Nilai Maturitas Manajemen Risiko PD	Nilai	8%	10%	12%	14%	15%	15%	IKU Inspektorat
2.33.6	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
2.33.7	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan	Persen	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	Inspektorat
2.33.8	Persentase cakupan penanganan pengawasan	Persen	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	Inspektorat
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PERENCANAAN									
2.34.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	79,42	80,12	80,82	81,52	82,22	82,22	IKU Pemerintah Daerah
2.34.2	Persentase keselarasan perencanaan dengan penganggaran	Persen	97,20%	97,40%	97,60%	97,80%	98,00%	98,00%	IKU BAPPEDA
2.34.3	Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	Persen	79,42%	80,12%	80,82%	81,52%	82,22%	82,22%	IKU BAPPEDA
2.34.4	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persen	97,20%	97,40%	97,60%	97,80%	98,00%	98,00%	BAPPEDA
2.34.5	Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD	Persen	97,20%	97,40%	97,60%	97,80%	98,00%	98,00%	BAPPEDA
2.34.6	Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD	Persen	97,20%	97,40%	97,60%	97,80%	98,00%	100%	BAPPEDA
2.34.7	Capaian nilai PPD	Persen	87,60%	88,70%	89,80%	90,90%	92,00%	92,00%	BAPPEDA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
2.35.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persen	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	IKU BAPPEDA
2.35.2	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persen	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	BAPPEDA
2.35.3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Persen	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	BAPPEDA
2.35.4	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	Persen	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	BAPPEDA
KEUANGAN									
2.36.1	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Pemerintah Daerah
2.36.2	Kapasitas fiskal daerah								IKU Pemerintah Daerah
2.36.3	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU BKAD
2.36.4	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU BKAD
2.36.5	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU BKAD
2.36.6	1.Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BKAD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.36.7	2. Presentase Terpenuhinya Tingkat Likuiditas keuangan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Presentase PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.36.7	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	Persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	BKAD
2.36.8	Persentase Kontribusi Pajak Daerah	Persen	49,74%	50,27%	50,87%	51,43%	51,94%	51,94%	IKU Bapenda
2.36.9	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Persen	49,74%	50,27%	50,87%	51,43%	51,94%	51,94%	IKU Bapenda
2.36.10	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	50,10%	50,20%	50,30%	50,40%	50,50%	50,50%	Bapenda
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
2.37.1	Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	326,5	348,5	353,5	359	362	362	IKU Pemerintah Daerah
2.37.2	Nilai Index Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	Nilai	71	72	73	74	75	75	IKU BKPSDM
2.37.3	Rata-rata persentase manajemen layanan ASN	Persen	80,00%	85,00%	87,00%	90,00%	90,00%	90,00%	BKPSDM
2.37.4	Persentase peningkatan kompetensi ASN	Persen	73,08%	76,08%	79,08%	82,08%	85,08%	85,08%	BKPSDM
PENDUKUNG									
SEKRETARIAT DAERAH									
2.38.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	83,30%	83,87%	84,44%	85,00%	85,57%	85,57%	IKU Pemerintah Daerah/IKU Sekretariat Daerah
2.38.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,28	68,76	70,25	71,73	73,21	73,21	IKU Pemerintah Daerah/IKU Sekretariat Daerah
2.38.3	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	76	78	80	81	82	82	IKU Pemerintah Daerah
2.38.4	Nilai AKIP	Opini	70,3	70,5	70,6	70,75	71,2	71,2	IKU Sekretariat Daerah
2.38.5	Nilai Pelaporan (SAKIP)	Nilai	12,19	12,24	12,29	12,34	12,39	12,39	Setda
2.38.6	Persentase aset dalam kondisi baik	Persen	91,25%	91,30%	91,35%	91,40%	91,45%	91,45%	Setda
2.38.7	Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Setda
2.38.8	Nilai LPPD	Nilai	3,51	3,61	3,71	3,81	3,91	3,91	Setda
2.38.9	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi	Persen	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Setda
SEKRETARIAT DPRD									
2.39.1	Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Setwan
2.39.2	Persentase aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Setwan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
2.40.1	Persentase pengendalian penanganan potensi konflik Sosial	Persen	78,00%	81,00%	85,00%	88,00%	91,00%	91,00%	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.40.2	Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	60,00%	50,00%	70,00%	70,00%	65,00%	70,00%	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.40.3	Cakupan informasi dari jaringan yg di terima		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.40.4	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persen	60	50	70	70	65	70	Kesbangpol



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.40.5	Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	60	50	70	70	65	70	Kesbangpol
2.40.6	Persentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik	Persen	60	50	70	70	65	70	Kesbangpol
2.40.7	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persen	60,00%	50,00%	70,00%	70,00%	65,00%	70,00%	Kesbangpol
2.40.8	Persentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi	Persen	60,00%	50,00%	70,00%	70,00%	65,00%	70,00%	Kesbangpol
2.40.9	Persentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	Persen	60,00%	40,00%	70,00%	70,00%	65,00%	70,00%	Kesbangpol
UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN									
2.41.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	61	62	63	64	65	65	IKU Kec. Arjasari
2.41.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	60	65	70	70	75	75	IKU Kec. Arjasari
2.41.3	Nilai IKM	Poin	85	86	86	86	86	86	IKU Kec. Arjasari
2.41.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	IKU Kec. Arjasari
2.41.5	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	Poin	85	87	88	89	90	91	Kec. Arjasari
2.41.6	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	86,00%	85,00%	85,00%	85,00%	87,00%	88,00%	Kec. Arjasari
2.41.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Arjasari
2.41.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Arjasari
2.41.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Arjasari
2.41.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Arjasari
2.42.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	70	72	72	73	73	73	IKU Kec. Baleendah
2.42.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Baleendah
2.42.3	Nilai IKM	Poin	72	73	75	78	79	79	IKU Kec. Baleendah
2.42.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Baleendah
2.42.5	Nilai AKIP	Poin	70	72	72	73	73	73	Kec. Baleendah
2.42.6	Nilai IKM	Persen	72,00%	73,00%	75,00%	78,00%	79,00%	79,00%	Kec. Baleendah
2.42.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Baleendah
2.42.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Baleendah
2.42.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Baleendah
2.43.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	67	68	69	70	71	71	IKU Kec. Banjaran
2.43.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	67	68	69	70	71	71	IKU Kec. Banjaran
2.43.3	Nilai IKM	Poin	83	84	85	86	87	71	IKU Kec. Banjaran
2.43.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Banjaran
2.43.5	1. Nilai AKIP 2. Nilai IKM	Poin	67	68	69	70	71	71	Kec. Banjaran
2.43.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	86,00%	Kec. Banjaran



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.43.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Banjaran
2.43.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Banjaran
2.43.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Banjaran
2.43.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Banjaran
2.44.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Bojongsong
2.44.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Bojongsong
2.44.3	Nilai IKM	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Bojongsong
2.44.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Bojongsong
2.44.5	Nilai AKIP	Poin	65	66,5	70	71	71,5	71,5	Kec. Bojongsong
2.44.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,00%	86,00%	87,00%	88,50%	89,00%	89,00%	Kec. Bojongsong
2.44.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Bojongsong
2.44.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Bojongsong
2.44.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Bojongsong
2.44.10	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Bojongsong
2.45.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	68,80	69	69,30	69,60	70	70	IKU Kec. Cangkung
2.45.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	85%	87%	89%	91%	93%	93%	IKU Kec. Cangkung
2.45.3	Nilai IKM	Poin	82	82,20	82,40	82,60	83	83	IKU Kec. Cangkung
2.45.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Cangkung
2.45.5	Nilai AKIP	Poin	63	63,5	64	64,5	65	65	Kec. Cangkung
2.45.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	79,00%	Kec. Cangkung
2.45.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cangkung
2.45.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cangkung
2.45.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cangkung
2.45.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cangkung
2.46.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	63,5	64,6	65,45	68,7	70,5	70,5	IKU Kec. Cicalengka
2.46.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	85	86	88	90	91	91	IKU Kec. Cicalengka
2.46.3	Nilai IKM	Poin	82,5	84,5	85	85,5	86,5	86,5	IKU Kec. Cicalengka
2.46.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	80,00	82,00	84,00	85,00	86,00	86,00	IKU Kec. Cicalengka
2.46.5	Nilai AKIP	Poin	63,5	64,6	65,45	68,7	70,5	70,5	Kec. Cicalengka
2.46.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,50%	84,50%	85,00%	85,50%	86,50%	86,50%	Kec. Cicalengka
2.46.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cicalengka
2.46.8	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cicalengka



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.46.9	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cicalengka
2.47.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	66,5	67	67,5	68	68,5	68,8	IKU Kec. Cikancung
2.47.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	76	77	78	79	80	80	IKU Kec. Cikancung
2.47.3	Nilai IKM	Poin	76	77	78	79	79,5	80	IKU Kec. Cikancung
2.47.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Kec. Cikancung
2.47.5	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cikancung
2.47.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00%	80,50%	81,00%	81,50%	82,00%	82%	Kec. Cikancung
2.47.7	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cikancung
2.47.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cikancung
2.47.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cikancung
2.47.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cikancung
2.48.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	68	68,5	69	69,5	70	70	IKU Kec. Cilengkrang
2.48.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	83,56	84	85	86	87	87	IKU Kec. Cilengkrang
2.48.3	Nilai IKM	Poin	76,56	77,56	78,56	79,56	80,56	80,56	IKU Kec. Cilengkrang
2.48.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Cilengkrang
2.48.5	Nilai AKIP	Poin	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	70,00	Kec. Cilengkrang
2.48.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	77,56%	78,56%	79,56%	80,56%	81,56%	81,56%	Kec. Cilengkrang
2.48.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cilengkrang
2.48.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cilengkrang
2.48.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cilengkrang
2.48.10	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cilengkrang
2.49.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	68	69,52	70,52	71,52	73	73	IKU Kec. Cileunyi
2.49.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	87	87,15	87,3	88	88,15	88,15	IKU Kec. Cileunyi
2.49.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	86,75	87,15	87,82	88	88	IKU Kec. Cileunyi
2.49.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	500,00%	IKU Kec. Cileunyi
2.49.5	Nilai AKIP	Poin	68	69,52	70,52	71,52	73	73	Kec. Cileunyi
2.49.6	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	87	87,15	87,3	88	88,15	88,15	Kec. Cileunyi
2.49.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	86,75	87,15	87,82	88	88	Kec. Cileunyi
2.49.8	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400,00%	Kec. Cileunyi
2.49.9	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	500,00%	Kec. Cileunyi
2.49.10	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	500,00%	Kec. Cileunyi
2.49.11	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	500,00%	Kec. Cileunyi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.50.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	68,4	68,5	68,75	69	68,25	69,25	CI
2.50.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5	IKU Kec. Cimaung
2.50.3	Nilai IKM	Poin	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%	IKU Kec. Cimaung
2.50.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Cimaung
2.50.5	Nilai AKIP	Persen	68,4	68,5	68,75	69	68,25	69,25	Kec. Cimaung
2.50.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%	Kec. Cimaung
2.50.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimaung
2.50.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimaung
2.50.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimaung
2.51.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	70	72	72	73	74	74	IKU Kec. Cimenyan
2.51.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Cimenyan
2.51.3	Nilai IKM	Poin	82	82	83	84	85	N/A	IKU Kec. Cimenyan
2.51.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Cimenyan
2.51.5	Nilai AKIP	Poin	70	70	72	72	73	74	Kec. Cimenyan
2.51.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%	Kec. Cimenyan
2.51.7	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimenyan
2.51.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimenyan
2.51.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimenyan
2.51.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Cimenyan
2.52.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	67,42	67,44	67,46	67,48	67,50	67,50	IKU Kec. Ciparay
2.52.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	81,03%	80,15%	80,93%	81,13%	82,51%	82,51%	IKU Kec. Ciparay
2.52.3	Nilai IKM	Poin	82,00	82,10	82,20	82,30	82,40	82,40	IKU Kec. Ciparay
2.52.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Ciparay
2.52.5	Nilai AKIP	Poin	67,42	67,44	67,46	67,48	67,50	67,50	Kec. Ciparay
2.52.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,00	82,10	82,20	82,30	82,40	82,40	Kec. Ciparay
2.52.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ciparay
2.52.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ciparay
2.52.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ciparay
2.52.10	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ciparay
2.53.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	75,6	76	76,6	77	77,6	77,6	IKU Kec. Ciwidey
2.53.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	94,6	94,7	94,8	94,8	95,9	95,9	IKU Kec. Ciwidey
2.53.3	Nilai IKM	Poin	83	84	85	86	87	87	IKU Kec. Ciwidey
2.53.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Ciwidey
2.53.5	NILAI AKIP	Poin	75,6	76	76,6	77	77,6	77,6	Kec. Ciwidey



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.53.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	83	84	85	86	87	87	Kec. Ciwidey
2.53.7	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Dan Kelurahan	Persen	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	Kec. Ciwidey
2.53.8	Persentase Penegakan Perda Yang Berkaitan Dengan Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Persen	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Kec. Ciwidey
2.53.9	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah	Persen	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Kec. Ciwidey
2.53.10	Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ciwidey
2.54.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	70	71	72	73	74	74	IKU Kec. Dayeuhkolot
2.54.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Dayeuhkolot
2.54.3	Nilai IKM	Poin	83	85	87	89	90	90	IKU Kec. Dayeuhkolot
2.54.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Dayeuhkolot
2.54.5	1. Nilai AKIP	Poin	70	71	72	73	74	74	Kec. Dayeuhkolot
2.54.6	2. Nilai IKM	Poin	83	85	87	89	90	90	
2.54.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	83	85	87	89	90	88,00%	Kec. Dayeuhkolot
2.54.8	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Dayeuhkolot
2.54.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Dayeuhkolot
2.54.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Dayeuhkolot
2.54.11	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan keterlibatan umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Dayeuhkolot
2.55.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	71	72	73	74	74	74	IKU Kec. Ibum
2.55.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Ibum
2.55.3	Nilai IKM	Poin	77	80	83,00%	86,00%	86,00%	86,00%	IKU Kec. Ibum
2.55.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Ibum
2.55.5	Nilai AKIP	Poin	71	72	73	74	74	74	Kec. Ibum
2.55.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77	80	83,00%	86,00%	86,00%	86,00%	Kec. Ibum
2.55.7	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ibum
2.55.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan keterlibatan umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ibum
2.55.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ibum
2.55.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Ibum
2.56.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	72	73	74	75	76	76	IKU Kec. Katapang
2.56.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	99	99	99	99	99	99	IKU Kec. Katapang
2.56.3	Nilai IKM	Poin	86	87	88	89	90	90	IKU Kec. Katapang
2.56.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Kec. Katapang
2.56.5	Nilai AKIP	Poin	72	73	74	75	76	76	Kec. Katapang
2.56.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	87	88	89	90	90	Kec. Katapang
2.56.7	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan keterlibatan umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Katapang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.56.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Katapang
2.56.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Katapang
2.57.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	71	72	73	74	75	75	IKU Kec. Kertasari
2.57.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	98,02	98,03	98,04	98,05	98,06	98,06	IKU Kec. Kertasari
2.57.3	Nilai IKM	Poin	84	85	86	87	88	88	IKU Kec. Kertasari
2.57.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Kertasari
2.57.5	1. Nilai AKIP	Poin	71	72	73	74	75	75	Kec. Kertasari
	2. Nilai IKM		84	85	86	87	88	88	
2.57.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84	85	86	87	88	88	Kec. Kertasari
2.57.7	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Kertasari
2.57.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Kertasari
2.57.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kec. Kertasari
2.58.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	IKU Kec. Kutawaringin
2.58.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,00%	IKU Kec. Kutawaringin
2.58.3	Nilai IKM	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	IKU Kec. Kutawaringin
2.58.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	65,87%	73,58%	81,29%	89,00%	91,00%	91,00%	IKU Kec. Kutawaringin
2.58.5	1. Nilai AKIP	Poin	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00	Kecamatan Kutawaringin
	2. Nilai IKM	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	
2.58.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	Kecamatan Kutawaringin
2.58.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Kutawaringin
2.58.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Kutawaringin
2.58.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Kutawaringin
2.58.10	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Kutawaringin
2.59.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	61	62	63	64	65	65	IKU Kec. Majalaya
2.59.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Kec. Majalaya
2.59.3	Nilai IKM	Poin	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	IKU Kec. Majalaya
2.59.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Majalaya
2.59.5	Nilai AKIP	Poin	61	62	63	64	65	65	Kecamatan Majalaya
2.59.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%	Kecamatan Majalaya
2.59.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Majalaya
2.59.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Majalaya
2.59.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Majalaya
2.59.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Majalaya
2.60.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	85	86,5	87,5	88,5	90	90	IKU Kec. Margaasih



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.60.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Margaasih
2.60.3	Nilai IKM	Poin	85,00%	86,00%	87,00%	88,50%	89,00%	89,00%	IKU Kec. Margaasih
2.60.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Margaasih
2.60.5	Nilai AKIP	Poin	85	86,5	87,5	88,5	90	90	Kecamatan Margaasih
2.60.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,00%	86,00%	87,00%	88,50%	89,00%	89,00%	Kecamatan Margaasih
2.60.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margaasih
2.60.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margaasih
2.60.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margaasih
2.60.10	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margaasih
2.61.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	70	70,56	71	71,2	71,56	71,56	IKU Kec. Margahayu
2.61.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Margahayu
2.61.3	Nilai IKM	Poin	93,97	93,98	93,99	94	94,1	94,1	IKU Kec. Margahayu
2.61.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	75,01%	76,00%	80,00%	80,05%	80,51%	80,51%	IKU Kec. Margahayu
2.61.5	Nilai AKIP	Poin	70	70,56	71	71,2	71,56	71,56	Kecamatan Margahayu
2.61.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	93,97%	93,98%	93,99%	94%	94,10%	94,10%	Kecamatan Margahayu
2.61.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margahayu
2.61.8	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margahayu
2.61.9	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margahayu
2.61.10	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Margahayu
2.62.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	72	73	74	75	76	76	IKU Kec. Nagreg
2.62.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	65	70	75	80	85	85	IKU Kec. Nagreg
2.62.3	Nilai IKM	Poin	85	86	87	88	89	89	IKU Kec. Nagreg
2.62.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Kec. Nagreg
2.62.5	Nilai AKIP	Poin	72	73	74	75	76	76	Kecamatan Nagreg
2.62.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	Kecamatan Nagreg
2.62.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Nagreg
2.62.8	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Nagreg
2.62.9	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Nagreg
2.62.10	Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Nagreg
2.63.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	68,47	70,52	72,64	74,82	77,06	77,06	IKU Kec. Pacet
2.63.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	80,1	81,7	83,34	85	86,7	86,7	IKU Kec. Pacet
2.63.3	Nilai IKM	Poin	80,41	82,01	83,66	85,33	87,03	87,03	IKU Kec. Pacet
2.63.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	62	64	66	68	70	70	IKU Kec. Pacet



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.63.5	1. Nilai AKIP	Poin	68,47	70,52	72,64	74,82	77,06	77,06	Kecamatan Pacet
	2. Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	Persen	80,10	81,70	83,34	85	86,70	86,70	Kecamatan Pacet
2.63.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,41	82,01	83,66	85,33	87,03	87,03	Kecamatan Pacet
2.63.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pacet
2.63.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pacet
2.63.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pacet
2.63.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pacet
2.64.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	66,5	67	67,5	68,5	69	69	IKU Kec. Pameungpeuk
2.64.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	91	91,5	92	92,5	93	93	IKU Kec. Pameungpeuk
2.64.3	Nilai IKM	Poin	86	86,5	87	87,5	88	88	IKU Kec. Pameungpeuk
2.64.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	65,00%	70,00%	71,00%	72,00%	74,00%	74,00%	IKU Kec. Pameungpeuk
2.64.5	Nilai AKIP	Poin	71	71,25	71,50	71,80	72	72	Kecamatan Pameungpeuk
2.64.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	86,5	87	87,5	88	88	Kecamatan Pameungpeuk
2.64.7	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pameungpeuk
2.64.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pameungpeuk
2.64.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pameungpeuk
2.65.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	63	64	65	66	66	66	IKU Kec. Pangalengan
2.65.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	94	95	96	97	98	98	IKU Kec. Pangalengan
2.65.3	Nilai IKM	Poin	83	84	85	86	87	87	IKU Kec. Pangalengan
2.65.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%	81,00%	IKU Kec. Pangalengan
2.65.5	1. Nilai AKIP	Poin	61,63	63	66	69	71	71	Kecamatan Pangalengan
	2. Nilai IKM	Poin							
2.65.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,05%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	86,00%	Kecamatan Pangalengan
2.65.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pangalengan
2.65.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pangalengan
2.65.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pangalengan
2.66.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	67,5	67,75	68	68,5	69	69	IKU Kec. Paseh
2.66.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	77,25	77,5	77,75	78	78,25	78,25	IKU Kec. Paseh
2.66.3	Nilai IKM	Poin	88,20	88,30	88,50	88,75	90,00	90,00	IKU Kec. Paseh
2.66.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Paseh
2.66.5	Nilai AKIP	Poin	67,5	67,75	68	68,5	69	69	Kecamatan Paseh
2.66.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	88,20	88,30	88,50	88,75	90,00	90,00	Kecamatan Paseh
2.66.7	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Paseh
2.66.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Paseh



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.66.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Paseh
2.67.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	67,77	68,45	69,00	69,50	70,00	70,00	IKU Kec. Pasirjambu
2.67.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	IKU Kec. Pasirjambu
2.67.3	Nilai IKM	Poin	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00	IKU Kec. Pasirjambu
2.67.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	65,00%	65,50%	66,00%	66,50%	67,00%	67,00%	IKU Kec. Pasirjambu
2.67.5	Nilai AKIP	Poin	67,77	68,45	69,00	69,50	70	70	Kecamatan Pasirjambu
2.67.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	88,00%	Kecamatan Pasirjambu
2.67.7	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pasirjambu
2.67.8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pasirjambu
2.67.9	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pasirjambu
2.67.10	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Pasirjambu
2.68.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	60.20 Poin	60.40 Poin	60.60 Poin	60.80 Poin	61.00 Poin	61.00 Poin	IKU Kec. Rancabali
2.68.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%	IKU Kec. Rancabali
2.68.3	Nilai IKM	Poin	73,20%	73,40%	73,60%	73,80%	74,00%	74,00%	IKU Kec. Rancabali
2.68.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	55,00%	57,00%	59,00%	61,00%	63,00%	63,00%	IKU Kec. Rancabali
2.68.5	Nilai AKIP	Poin	60.20 Poin	60.40 Poin	60.60 Poin	60.80 Poin	61.00 Poin	61.00 Poin	Kecamatan Rancabali
2.68.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	73,20%	73,40%	73,60%	73,80%	74,00%	74,00%	Kecamatan Rancabali
2.68.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancabali
2.68.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancabali
2.68.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancabali
2.68.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancabali
2.69.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	67	68	69	70	71	71	IKU Kec. Rancaekek
2.69.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	81	82	83	84	85	85	IKU Kec. Rancaekek
2.69.3	Nilai IKM	Poin	82	84	86	88	90	90	IKU Kec. Rancaekek
2.69.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Kec. Rancaekek
2.69.5	Nilai AKIP	Poin	65	66	67	68	69	69	Kecamatan Rancaekek
2.69.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%	Kecamatan Rancaekek
2.69.7	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancaekek
2.69.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancaekek
2.69.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancaekek
2.69.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Rancaekek
2.70.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	68,75	68,90	69	69,15	69,30	69,30	IKU Kec. Solokanjeruk
2.70.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	81	82	83	84	85	85	IKU Kec. Solokanjeruk



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.70.3	Nilai IKM	Poin	86	86,50	87	87,50	88	88	IKU Kec. Solokjanjeruk
2.70.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Kec. Solokjanjeruk
2.70.5	Nilai AKIP	Poin	68,75	68,90	69	69,15	69,30	69,30	Kecamatan Solokjanjeruk
2.70.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	86,50	87	87,50	88	88	Kecamatan Solokjanjeruk
2.70.7	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Solokjanjeruk
2.70.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Solokjanjeruk
2.70.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Solokjanjeruk
2.70.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Solokjanjeruk
2.71.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	76	76,25	76,5	76,75	77	77	IKU Kec. Soreang
2.71.2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Soreang
2.71.3	Nilai IKM	Poin	81,00%	81,25%	81,50%	81,75%	82,00%	82,00%	IKU Kec. Soreang
2.71.4	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKU Kec. Soreang
2.71.5	Nilai AKIP	Poin	76	76,25	76,5	76,75	77	77	Kecamatan Soreang
2.71.6	Nilai IKM	Persen	81,00%	81,25%	81,50%	81,75%	82,00%	82,00%	Kecamatan Soreang
2.71.7	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Soreang
2.71.8	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Soreang
2.71.9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Soreang
2.71.10	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kecamatan Soreang
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
3.1	Indeks Perkembangan Wilayah	Poin	52,33	55,02	57,69	60,34	62,98	62,98	IKU Pemerintah Daerah
3.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	53,29	53,68	53,98	54,28	54,6	54,6	IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Lingkungan Hidup
3.3	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	Poin	65,97	67,22	68,46	69,58	70,65	70,65	IKU Pemerintah Daerah
3.4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	165	160	155	150	145	145	IKU Pemerintah Daerah
3.5	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,81	0,8165	0,8307	0,8442	0,8704	0,8704	IKU Pemerintah Daerah/DPMD
3.6	Angka Kriminalitas	Angka	44,5	43	41,5	40	38,5	38,5	IKU Pemerintah Daerah
3.7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	72	74	76	78	80	80	IKU Pemerintah Daerah
3.8	Indeks Pengeluaran	Poin	72,65	73,25	73,90	74,52	75,15	75,15	IKU Pemerintah Daerah
3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15%	7,93%	7,71%	7,51%	7,31%	7,31%	IKU Pemerintah Daerah
3.10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,11	94,37	94,63	94,89	95,15	95,15	IKU Pemerintah Daerah
3.11	Skor PPH Konsumsi	Skor	86,30%	86,50%	86,70%	86,90%	87,10%	87,20%	IKU Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



BAB 9 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung 5 (lima) tahun ke depan. Dalam implementasinya RPJMD akan menjadi dokumen acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih lanjut diturunkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Meninjau fungsi strategis RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya kesinambungan pembangunan. Maka dari itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan pedoman transisi, bahwa:

1. Seluruh ketentuan indikator kinerja, indikasi pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang termuat/tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Seluruh ketentuan indikator kinerja, indikasi pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang termuat/tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 tidak dapat berubah sampai dengan akhir masa berlakunya RPJMD.

Untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan di antaranya sebagai berikut.

1. Seluruh Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung bersama segenap masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Bandung yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi



- masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara substansi dalam RPJMD dengan substansi dalam Renstra Perangkat Daerah;
 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
 6. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 7. Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program/kegiatan baru diluar yang ada dalam dokumen RPJMD.





BANDUNG
BEDAS!

“Terwujudnya masyarakat
Kabupaten Bandung yang
Bangkit, Edukatif, Dinamis,
Agamis, dan Sejahtera”



PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG